



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

**LKPD**  
**2022**

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2022**



**DRAFT**

Dr. Ir. HAMKA HENDRA NOER, M.Si  
Pj. GUBERNUR GORONTALO





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dilaksanakan sebagaimana amanat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, pasal 69 dan Pasal 71, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diantaranya menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun substansi dan mekanisme Penyusunan LKPJ Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo merupakan laporan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah dan pertanggungjawaban kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, DPRD Provinsi Gorontalo serta seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 menggambarkan pelaksanaan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap dan Bapak DR. Drs. H. Idris Rahim, MM, dan dilanjutkan oleh Bapak **Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si** selaku **Penjabat Gubernur Gorontalo**.

Laporan keterangan pertanggungjawaban Provinsi Gorontalo Tahun 2022 menguraikan pencapaian pelaksanaan Program Kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang secara periodisasi masih selaras dengan target sasaran kinerja pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025. Adapun ruang lingkup dokumen LKPJ Tahun 2022 meliputi capaian indikator kinerja pembangunan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Alhamdulillah atas sinergitas dan kinerja kolaboratif antara Eksekutif dan Legislatif yang didukung oleh seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, pelaksanaan pembangunan tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa capaian kinerja diantaranya dapat tercapai, meskipun masih terdapat beberapa pencapaian target yang belum optimal, sehingga menjadi tantangan serta fokus perhatian bersama pada pelaksanaan pembangunan kedepan.

Berkaitan dengan hal tersebut, masukan semua pihak khususnya catatan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo sangat diharapkan sebagai bagian evaluasi serta menjadi masukan strategis dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di Provinsi Gorontalo pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian LKPJ Provinsi Gorontalo Tahun 2022 kami sampaikan, dan tak lupa ucapan terima kasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Gorontalo. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Provinsi Gorontalo yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo,           Maret 2023  
**Pj. GUBERNUR GORONTALO**

**Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si**

# RINGKASAN LKPJ GUBERNUR TAHUN 2022



DI SAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA LKPJ GUBERNUR TAHUN 2023



***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 ini dapat disusun. Sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama tahun 2022. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 69 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan LKPJ sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019.

Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo merupakan laporan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah dan pertanggungjawaban kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, DPRD Provinsi Gorontalo serta seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 menggambarkan pelaksanaan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap dan Bapak DR. Drs. H. Idris Rahim, MM, dan dilanjutkan oleh Bapak **Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si** selaku **Penjabat Gubernur Gorontalo**. Laporan keterangan pertanggungjawaban Provinsi Gorontalo Tahun 2022 menguraikan pencapaian pelaksanaan Program Kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2022, yang secara periodisasi masih selaras dengan target sasaran kinerja pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan telah bersama-sama menjalankan proses pembangunan selama ini, Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, DPRD, Bupati/Walikota, Organisasi Perangkat Daerah, Unsur Vertikal, Perbankan, LSM/Non State Actor, Dunia Usaha serta seluruh masyarakat Gorontalo yang telah menyukseskan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Kami menyadari bahwa capaian pembangunan yang telah diraih masih jauh dari yang diharapkan. Namun upaya yang telah dilakukan Pemerintah sudah cukup maksimal dengan keterbatasan fiskal daerah, dan ditengah kondisi ekonomi Nasional dan Daerah yang belum kondusif sehingga mempengaruhi segala aspek pembangunan daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, serta dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo pada tahun berikutnya. Masukan dan saran/koreksi serta rekomendasi dari DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan Daerah yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo,           Maret 2023  
**Pj. GUBERNUR GORONTALO**

**Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si**

# EXECUTIVE SUMMARY

## TEMA RKPD PROVINSI GORONTALO 2022

Sejalan dengan pencapaian Visi Misi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dan Visi Misi Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025, ditetapkan tema pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 yaitu **"Meneguhkan Pencapaian Masyarakat yang Maju, Unggul dan Sejahtera"**.

Untuk mewujudkan arah pembangunan daerah tahun 2022, maka ditetapkan target dan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan. Berikut target dan realisasi pembangunan daerah tahun 2022 sebagaimana berikut :

**Tabel 1**  
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama  
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator	RPJMD 2017-2022	Target		Realisasi 2022	% Capaian	Realisasi Tahun 2021
			RKPD Induk 2022	RKPD Perubahan 2022*			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,27	6,3 – 7,0	4,01 – 5,92	4,04	100,75	2,41
2	Indeks Gini	0,36	0,412-0,391	0,412-0,391	0,423	97,40	0,409
3	Indeks Pembangunan Manusia	69,62	69,62	69,62	69,81	100,27	69,00
4	Persentase Angka Kemiskinan (%)	14,69	14,91 – 14,33	14,91 – 14,33	15,51	96,13	15,41
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,86	4,11-3,91	3,91 – 3,01	2,58	116,67	3,01
6	Inflasi (%)	3,42	2 - 3	2 - 3	5,15	58,25	2,59
7	PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	39,89	39,89	39,89	39,89	100	34,213
8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
9	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	B	80	B
<b>Rata-rata Realisasi</b>						<b>94,39</b>	

Sumber : RKPD Induk dan Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

\* Dilakukan penyesuaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 berdasarkan hasil Rapat Pembahasan KEMD bersama Kementerian Bappenas dan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri pada saat Rakortekrenbangnas

Kinerja pembangunan Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai Arah Kebijakan Program Kegiatan Pembangunan Daerah yang telah direncanakan sebelumnya dengan mengoptimalkan sumber daya fiskal daerah. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah

berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama daerah mencapai 94,39 persen. Capaian kinerja yang sesuai dan melampaui target diantaranya Pertumbuhan Ekonomi tumbuh 4,04 % atau tercapai 100,27% dari target 4,01-5,92%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 69,81% melampaui target sebesar 69,62%, PDRB Perkapita sebesar 39,89 juta Rupiah atau tercapai 100%. Sementara kinerja yang belum tercapai yaitu Persentase Kemiskinan yang mengalami kenaikan 0,1% dibanding tahun sebelumnya menjadi 15,51% tahun 2022 atau hanya tercapai 96,13% dari target kemiskinan sebesar 14,91-14,33%, dan juga ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur berdasarkan indeks gini sebesar 0,423% atau masih jauh dari target sebesar 0,412-0,391. Tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi sebesar 5,15 persen, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi peningkatan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Capaian kinerja sektoral diantaranya Angka Rata-rata lama sekolah Tahun 2022 sebesar 8,02 persen tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 7,90 persen, Prevalensi Stunting turun dari 29 persen tahun 2021 menjadi 23,8 persen tahun 2022, Kondisi mantap jalan meningkat 60,05 persen. Dari sisi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, diantaranya kembali meraih Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP dengan kategori B, capaian Korsupgah KPK melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2022 menjadi 82,51%, dan pelayanan publik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,087 persen atau dengan kategori "Baik".

## **PENJABARAN APBD**

### **a. Pendapatan**

Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 mencapai Rp. 1,848 Trilyun, terjadi penurunan 6,10 persen dibanding tahun 2021 sebesar 1,968 Trilyun Rupiah. Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 1,78 Trilyun



Rupiah, maka realisasi pendapatan daerah tercapai 103,59 persen. Struktur Pendapatan Daerah masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar 72,20% dari total pendapatan, sementara sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 27,59% dari total Pendapatan.

#### **b. Belanja Daerah**

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp. 1,932 Trilyun, meningkat 3,58% dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 1,866 Trilyun, atau terrealisasi sebesar 91,08 persen dari target Belanja Daerah. Dari total realisasi belanja daerah, sebesar 71,76 % merupakan pengeluaran terhadap belanja operasi. Sementara Belanja Modal sebesar 16,46%, belanja transfer sebesar 10,91 % dan belanja tak terduga sebesar 0,86%.

#### **c. Pembiayaan**

Tahun 2022 penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 235,79 Milyar, dan Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 115,73 Milyar. Sementara pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp. 10,59 Milyar dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebesar Rp. 12,82 Milyar. Sementara untuk Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun berkenaan tahun 2022 sebesar Rp. 243,45 Milyar.

**Tabel ix****Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022**

No	Uraian	APBD	REALISASI			% Kenaikan dari tahun sebelumnya
			2021	%	2022	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.784.137.999.082,00</b>	<b>1.848.238.892.716,83</b>	<b>103,59</b>	<b>1.972.986.620.791,52</b>	<b>-6,32</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	442.748.816.082,00	509.985.305.398,83	115,19	400.778.561.529,00	-0,16
1.2	Pendapatan Transfer	1.335.768.644.000,00	1.334.495.372.320,00	99,90	1.475.696.593.000,00	-8,53
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.620.539.000,00	3.756.483.299,00	66,83	5.360.539.000,00	14,59
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.122.278.456.084,00</b>	<b>1.932.079.807.810,20</b>	<b>91,08</b>	<b>1.834.700.516.350,85</b>	<b>5,31</b>
2.1	Belanja Operasi	1.507.374.787.844,00	1.386.174.889.096,22	92,02	1.439.357.233.290,37	-3,69
2.2	Belanja Modal	382.695.940.984,00	318.331.581.107,98	83,18	176.360.030.440,48	80,50
2.3	Belanja Tak Terduga	20.978.895.685,00	16.716.126.244,00	79,68	16.703.054.982,00	0,08
2.4	Belanja Transfer	211.228.831.571,00	210.857.211.362,00	99,82	202.280.197.638,00	4,24
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	361.554.840.656,00	351.512.274.969,00	97,22	139.046.607.347,37	152,80
3.2	Pengeluaran pembiayaan	23.414.383.654,00	23.414.384.934,00	100,00	10.000.000.000,00	134,14
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>338.140.457.002,00</b>	<b>243.346.691.563,63</b>	<b>97,03</b>	<b>129.046.607.347,37</b>	<b>154,25</b>
	<b>Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>243.346.691.563,63</b>	<b>100</b>	<b>235.787.137.656,04</b>	<b>3,59</b>

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

\*Data Per 31 Desember 2022 (Unaudited BPK)

## **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Hasil kinerja pelaksanaan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah oleh masing-masing organisasi perangkat daerah menunjukkan hasil yang sudah sangat baik. Untuk rata-rata capaian kinerja tahun 2022 mencapai 94,19 %, dengan persentase realisasi anggaran rata-rata mencapai 98,07 %, atau dengan kategori Sangat Tinggi (ST).

**Tabel x**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja**  
**Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPd 2022	Pagu Anggaran APBD	Realisasi	% Keu	% Fisik
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	275.556.058.150	582.214.358.422	517.799.171.874	88,94	100
2	Dinas Kesehatan	103.276.952.286	154.337.251.790	142.396.876.884	92,26	99,94
3	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	77.734.914.041	129.160.944.071	126.339.770.546	97,82	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.038.808.997	258.735.549.782	209.983.215.254	81,16	84,82
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.167.668.576	17.274.069.043	15.907.902.267	92,09	99,55
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	11.354.934.098	10.609.237.574	10.039.368.606	94,63	100
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.185.693.475	12.341.281.680	11.983.062.168	97,10	100
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.129.492.571	20.171.788.876	19.902.996.134	98,67	100
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44.926.521.922	25.653.548.061	23.800.982.970	92,78	72,83
10	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	29.144.389.223	30.618.239.268	27.823.531.257	90,87	100
11	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	5.711.822.643	5.687.469.763	5.287.602.036	92,97	98,59
12	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	23.459.544.160	25.373.790.220	24.825.556.654	97,84	100
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	9.787.458.015	2.498.009.971	11.929.288.072	94,60	100
14	Dinas Pangan	10.188.844.813	11.745.585.345	11.586.723.964	98,65	100
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39.302.456.388	50.918.269.478	48.334.620.564	94,93	100
16	Dinas Perhubungan	11.643.678.711	12.328.622.635	12.204.595.213	98,99	100
17	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	15.822.637.762	23.537.500.798	22.640.094.278	96,19	100
18	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	23.601.777.508	38.167.659.012	36.173.738.155	94,78	98,13
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.863.166.759	10.038.939.304	9.962.687.577	99,24	100
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.568.264.030	48.866.763.551	43.397.036.659	88,81	95,42
21	Dinas Pariwisata	13.014.978.905	16.712.329.911	15.538.186.165	92,97	100
22	Dinas Pertanian	53.549.644.524	76.927.787.736	75.196.902.567	97,75	99,28
23	Biro Hukum	7.705.555.802	7.561.708.690	7.360.658.282	97,34	100
24	Biro Pengadaan	5.287.147.168	5.708.084.516	5.668.196.170	99,30	100
25	Biro Umum	18.947.642.082	21.049.605.281	19.467.735.668	92,49	98,53
26	Pimpinan Sekretariat Daerah	39.478.589.305	37.188.085.566	28.677.977.826	77,12	100,00
27	Badan Penghubung	7.807.096.396	9.728.275.765	9.405.878.429	96,69	100,00
28	Biro Organisasi	6.164.834.080	5.811.117.663	5.482.220.767	94,34	99,94
29	Sekretariat DPRD	83.379.098.142	97.649.086.685	90.331.706.599	92,51	97,50
30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.755.676.289	10.592.401.969	10.131.387.710	95,65	100
31	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	289.196.938.440	329.048.496.940	316.299.684.106	96,13	93,26
32	Badan Kepegawaian Daerah	11.530.530.293	6.044.333.956	5.649.750.191	93,47	96,49
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17.549.925.934	16.677.580.864	16.167.435.276	96,94	100
34	Inspektorat	18.906.440.281	21.146.649.150	20.420.106.514	96,56	100
	<b>TOTAL</b>	<b>1.475.739.181.769</b>	<b>2.142.124.423.336</b>	<b>1.958.116.647.401</b>	<b>94,19</b>	<b>98,07</b>

Sumber : OPD Provinsi Gorontalo,2022

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 249.453.368.211, dengan realisasi 239.498.064.382 atau terrealisasi sebesar 96,01. Capaian indikator kinerja SPM untuk urusan pendidikan tercapai 81,49 %, kesehatan tercapai 100%, Tantibumlinmas tercapai 100%. Untuk urusan Sosial dengan rata-rata 48,56 %, karena Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki panti untuk rehabilitasi sosial sehingga realisasi masih rendah.

**Tabel 4**  
Pagu dan Realisasi Fisik Anggaran Standar Pelayanan Minimal

No	Bidang Urusan	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Pendidikan	232.802.726.687,00	223.394.359.181	95,96
2	Kesehatan	2.092.392.311	2.019.418.196	94,55
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.350.033.906	2.153.908.413	93,24
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.369.512.965	1.297.369.487	94,73
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	- Satpol PP Linmas	3.274.353.404	3.253.241.545	99,35
	- BPBD (Kebencanaan)	3.213.445.561	3.137.707.398	97,64
6	Sosial	4.350.903.377	4.242.060.162	97,49
	<b>TOTAL</b>	<b>249.453.368.211</b>	<b>239.498.064.382</b>	<b>96,01</b>

## TUGAS PEMBANTUAN

Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari 4 Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 59.004.674.000, turun dibandingkan alokasi TP tahun 2021 sebesar. Pelaksanaan Tugas Pembantuan sudah sangat baik, dengan capaian kinerja anggaran mencapai 95,43 persen. Dengan rincian pagu dan realisasi sebagai berikut:



**Tabel. 5****Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

No	Kementerian/Lembaga	Instansi Daerah / Pelaksana	Anggaran	Realisasi	%
1.	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	41.544.428.000	39.839.761.171	95,897
2	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI	Dinas Penanaman Modal ESDM Transmigrasi	1.891.536.000	1.891.007.499	99,97
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.017.000.000	3.017.517.020	99,99
4.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.551.710.000	12.550.521.228	99,99
<b>Total</b>			<b>59.004.674.000</b>	<b>56.309.306.347</b>	<b>95,43</b>

**PENUTUP**

Demikian dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2022 ini disampaikan, kiranya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah. Selanjutnya LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2022 ini kami serahkan untuk dibahas oleh DPRD Provinsi Gorontalo sebagai representasi seluruh rakyat Gorontalo, dan diharapkan rekomendasi-rekomendasi konstruktif untuk semakin menyempurnakan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai aspek untuk pembangunan daerah yang lebih baik lagi ke depan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN LKPJ GUBERNUR TAHUN 2022 .....	iii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xxx
DAFTAR GRAFIK .....	xxxi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Dasar Hukum .....	I-2
1.2 Visi Misi, Tujuan dan Sasaran ... ..	I-5
1.2.1 Visi - Misi .....	I-4
1.2.2 Tujuan dan Sasaran .....	I-6
1.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 .....	I-7
1.3 Data Umum Daerah ... ..	I-13
1.3.1 Data Geografis Wilayah .....	I-13
1.3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk .....	I-15
1.3.3 Jumlah PNS .....	I-19
1.3.4 Realisasi Pendapatan .....	I-22
1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I-28
1.3.6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	I-41
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN</b>	
<b>BELANJA DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Pendapatan Daerah .....	II-4
2.2 Belanja Daerah .....	II-5
2.3 Pembiayaan Daerah .....	II-8



<b>BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>I-1</b>
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 .....	III-1
3.2 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Per Urusan Pemerintahan Tahun 2022 .....	III-24
<b>BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN ...</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Dasar Hukum .....	IV-1
4.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	IV-2
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Kesimpulan .....	V-1



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan Kelurahan dan Desa Provinsi Gorontalo.....	I – 15
Tabel 1.2 Jumlah PNS Provinsi Gorontalo .....	I – 19
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan 2022 .....	I – 23
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Sumber Pajak Daerah Tahun 2022.....	I – 25
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022.....	I – 26
Tabel 1.6 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022.....	I – 29
Tabel 1.7 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 .....	I – 30
Tabel 1.8 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	I – 31
Tabel 1.9 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	I – 32
Tabel 1.10 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	I – 33
Tabel 1.11 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	I – 34
Tabel 1.12 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	I – 36
Tabel 1.13 Alokasi dan Realisasi Belanja OPD Tahun 2022 .....	I – 36
Tabel 1.14 Pagu dan Realisasi Fisik Anggaran Standar Pelayanan Minimal.....	I – 38
Tabel 1.15 Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	I – 39
Tabel 1.16 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	I – 42





Tabel 2.1	Alokasi Mandatory Spending Dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun 2022 .....	II – 10
Tabel 3.1	Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 1
Tabel 3.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Milyar Rupiah) .....	III – 2
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (Milyar Rupiah) .....	III – 3
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran, Tahun 2022-2022.....	III – 4
Tabel 3.5	Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2021- 2022 .....	III – 5
Tabel 3.6	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022 .....	III – 8
Tabel 3.7	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022 .....	III – 11
Tabel 3.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo September 2021 – September 2022.....	III – 13
Tabel 3.9	Jumlah dan Presentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo .....	III – 14
Tabel 3.10	Komposisi Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorontalo Tahun 2020- 2022.....	III – 17
Tabel 3.11	Nilai PDRB Perkapita ADHB Provinsi Gorontalo .....	III – 20
Tabel 3.12	Indikator Antara Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 22
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 24
Tabel 3.14	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendidikan Tahun 2022 .....	III – 25



Tabel 3.15	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo .....	III – 32
Tabel 3.16	Targer dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	III – 36
Tabel 3.17	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kesehatan Tahun 2022 .....	III – 39
Tabel 3.18	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	III – 52
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 60
Tabel 3.20	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 .....	III – 62
Tabel 3.21	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 .....	III – 77
Tabel 3.22	Target dan Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 84
Tabel 3.23	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 85
Tabel 3.24	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 95
Tabel 3.25	Rekapitulasi Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Gorontalo .....	III – 96
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 97
Tabel 3.27	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 98



Tabel 3.28	Indikator kinerja pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 103
Tabel 3.29	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 107
Tabel 3.30	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 108
Tabel 3.31	Indikator kinerja pembangunan urusan Kententraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 117
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 120
Tabel 3.33	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 121
Tabel 3.34	Indikator Pembangunan Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak Provinsi Gorontalo.....	III – 132
Tabel 3.35	Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 133
Tabel 3.36	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 134
Tabel 3.37	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2022.....	III – 135
Tabel 3.38	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 140
Tabel 3.39	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 141
Tabel 3.40	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .....	III – 142



Tabel 3.41	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 148
Tabel 3.42	Capaian Output Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 148
Tabel 3.43	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 149
Tabel 3.44	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pangan Tahun 2022 .....	III – 151
Tabel 3.45	Alokasi Bantuan Kios AKses Pangan Tahun 2022 .....	III – 155
Tabel 3.46	Alokasi Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2022.....	III – 157
Tabel 3.47	Daftar Pelaksanaan Gelar Pangan Sepanjang Tahun 2022 .....	III – 158
Tabel 3.48	Rerata Harga Ecer Provinsi, Januari-Juli Tahun 2022 .....	III – 161
Tabel 3.49	Rerata Harga Ecer Provinsi, Agustus – Desember Tahun 2022 ....	III – 162
Tabel 3.50	Alokasi Penerima Manfaat Cadangan Pangan Masyarakat Untuk Gapoktan LDPM Tahun 2022 .....	III – 163
Tabel 3.51	Alokasi Penerima Manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Dana APBD Induk .....	III – 165
Tabel 3.52	Alokasi Penerima Manfaat Cadangan Pangan Masyarakat Daerah Dana APBD Perubahan .....	III – 167
Tabel 3.53	Alokasi Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Pengentasan Kemiskinan (P2L Taksin) .....	III – 169
Tabel 3.54	Alokasi Penerima Manfaat Kegiatan P2L Gertam Cabe .....	III – 170
Tabel 3.55	Alokasi Penerima Manfaat OPAL P2L Edukasi Pondok Pesantren .	III – 171
Tabel 3.56	Capaian Skor PPH Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 172
Tabel 3.57	Daftar Komoditi Yang Diserifikasi Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) Tahun 2022 .....	III – 174
Tabel 3.58	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo .....	III – 176
Tabel 3.59	Perkembangan Penurunan dan Peningkatan Jumlah Daerah Rawan Pangan Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2018-2021 .....	III – 177





Tabel 3.60	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 178
Tabel 3.61	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertahanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 179
Tabel 3.62	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 181
Tabel 3.63	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 182
Tabel 3.64	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021.....	III – 183
Tabel 3.65	Titik Pemantauan Kualitas Air .....	III – 189
Tabel 3.66	Titik Pemantauan Kualitas Udara .....	III – 191
Tabel 3.67	Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	III – 199
Tabel 3.68	Target Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 200
Tabel 3.69	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adminduk Capil Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 201
Tabel 3.70	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil Provinsi Gorontalo .....	III – 204
Tabel 3.71	Target Realisasi dan Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 205
Tabel 3.72	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 .....	III – 206



Tabel 3.73	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 210
Tabel 3.74	Status Desa Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.....	III – 211
Tabel 3.75	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 212
Tabel 3.76	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 212
Tabel 3.77	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 214
Tabel 3.78	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 215
Tabel 3.79	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perhubungan Tahun 2022 .	III – 216
Tabel 3.80	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 221
Tabel 3.81	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 225
Tabel 3.82	Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Informatika Tahun 2022 ...	III – 226
Tabel 3.83	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	III – 231
Tabel 3.84	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 232
Tabel 3.85	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 234
Tabel 3.86	Daftar Koperasi Berprestasi Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ...	III – 237
Tabel 3.87	Daftar Pemeriksaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Primer Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 238



Tabel 3.88	Koperasi Penerima Hadiah Penilaian Koperasi Sehat Kepatuhan Tahun 2022.....	III – 240
Tabel 3.89	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi,UKM,Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 252
Tabel 3.90	Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi,UKM,Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 252
Tabel 3.91	Jumlah Koperasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 255
Tabel 3.92	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tahun 2022 .....	III – 259
Tabel 3.93	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penanganan Modal Dinas PM,ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 259
Tabel 3.94	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	III – 266
Tabel 3.95	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 267
Tabel 3.96	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 268
Tabel 3.97	Indikator Kinerja Pemabangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 271
Tabel 3.98	Indeks Kepemudaan Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 272
Tabel 3.99	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 273



Tabel 3.100 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kebudayaan Tahun 2022 ...	III – 274
Tabel 3.101 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 277
Tabel 3.102 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 279
Tabel 3.103 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 279
Tabel 3.104 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 281
Tabel 3.105 Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Tahun 2022 .....	III – 282
Tabel 3.106 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 283
Tabel 3.107 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 286
Tabel 3.108 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 288
Tabel 3.109 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.....	III – 290
Tabel 3.110 Indikator Kinerja Urusan Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan .....	III – 306
Tabel 3.111 Penghargaan Nasional Yang Diterima Tahun 2022 .....	III – 308
Tabel 3.112 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 309
Tabel 3.113 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo .....	III – 319
Tabel 3.114 Rata-rata Lama Tinggal Tamu Mancanegara dan Nusantara Pada Hotel/Akomodasi Lainnya di Provinsi Gorontalo Kurun Waktu 2017-2021 .....	III – 320



Tabel 3.115 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 321
Tabel 3.116 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertanian Tahun 2022 .....	III – 324
Tabel 3.117 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Renstra Dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	III – 331
Tabel 3.118 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 335
Tabel 3.119 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kehutanan .....	III – 336
Tabel 3.120 Jenis Komoditi dan Lokasi yang Dikembangkan KPH .....	III – 349
Tabel 3.121 Indikator Kinerja Urusan Pembangunan Urusan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Dengan Renstra dan RPJMD Provinsi .....	III – 355
Tabel 3.122 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 355
Tabel 3.123 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 356
Tabel 3.124 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Penanaman Modal,ESDMN dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 360
Tabel 3.125 Rasio Desa Yang Teraliri Listrik Provinsi Gorontalo Tahun 2022...	III – 361
Tabel 3.126 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 .....	III – 361
Tabel 3.127 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perdagangan Tahun 2022 ..	III – 363
Tabel 3.128 Rekap Realisasi Export Berdasarkan Komoditi Selang Bulan Desember 2022 .....	III – 369
Tabel 3.129 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 377
Tabel 3.130 Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Tahun 2022 .....	III – 379
Tabel 3.131 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 382
Tabel 3.132 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perindustrian	



Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 383
Tabel 3.133 Daftar Penerima Bantuan .....	III – 387
Tabel 3.134 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian	
Dinas Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 390
Tabel 3.135 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 391
Tabel 3.136 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketransmigrasian	
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2022 ..	III – 392
Tabel 3.137 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketransmigrasian	
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2022...	III – 394
Tabel 3.138 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 394
Tabel 3.139 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintah Fungsi Pendukung	
Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 395
Tabel 3.140 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	
Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 402
Tabel 3.141 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 402
Tabel 3.142 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Tahun 2022.....	III – 403
Tabel 3.143 Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo .....	III – 407
Tabel 3.144 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 412
Tabel 3.145 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Biro Pengadaan Tahun 2022 .....	III – 412
Tabel 3.146 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengadaan Fungsi Pendukung Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	III – 418
Tabel 3.147 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 421
Tabel 3.148 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 421
Tabel 3.149 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 427



Tabel 3.150 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 427
Tabel 3.151 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Pimpinan Sekretariat Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 427
Tabel 3.152 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendukung Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo .....	III – 431
Tabel 3.153 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 431
Tabel 3.154 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Tahun 2022 .....	III – 432
Tabel 3.155 Jumlah Jamaah Haji Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 441
Tabel 3.156 Daftar Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2022 .....	III – 442
Tabel 3.157 Bantuan Studi (Beasiswa) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 443
Tabel 3.158 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintah Fungsi Pendukung Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	III – 447
Tabel 3.159 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 448
Tabel 3.160 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 448
Tabel 3.161 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022	III – 456
Tabel 3.162 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 457
Tabel 3.163 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 458
Tabel 3.164 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendukung Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 463
Tabel 3.165 Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 464
Tabel 3.166 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perencanaan Fungsi Penunjang Tahun 2022 .....	III – 465





Tabel 3.167 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Fungsi Penunjang Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 476
Tabel 3.168 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 476
Tabel 3.169 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 492
Tabel 3.170 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 495
Tabel 3.171 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kepegawaian Fungsi Penunjang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo .....	III – 502
Tabel 3.172 Hasil Penilaian Aspek/Komponen Indeks Merit System .....	III – 502
Tabel 3.173 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 503
Tabel 3.174 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Penunjang Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 504
Tabel 3.175 Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2022 .....	III – 508
Tabel 3.176 Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Tahun 2022 .....	III – 510
Tabel 3.177 Perjanjian Kerjasama dan Memorandum of Understanding (MOU) Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementrian/ Lembaga Selama Tahun 2022 .....	III – 511
Tabel 3.178 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan dan Fungsi Penunjang Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo .....	III – 514
Tabel 3.179 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 517
Tabel 3.180 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penelitian dan Pengembangan Fungsi Penunjang Bappeda Provinsi Gorontalo .....	III – 517
Tabel 3.181 Indikator Kinerja Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Fungsi Penunjang Bappeda Provinsi Gorontalo .....	III – 520
Tabel 3.182 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 521



Tabel 3.183	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penghubung Fungsi Penunjang Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 522
Tabel 3.184	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penghubung Fungsi Penunjang Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 526
Tabel 3.185	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 526
Tabel 3.186	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 528
Tabel 3.187	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo .....	III – 533
Tabel 3.188	Indikator dan Komponen MCP-KPK Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III – 534
Tabel 3.189	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	III – 535
Tabel 3.190	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Umum .....	III – 537
Tabel 3.191	Daftar Partai dan Perolehan Suara Hasil Pemilu Tahun 2019-2024 .....	III – 543
Tabel 3.192	Daftar Organisasi Masyarakat Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ..	III – 550
Tabel 3.193	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 .....	III – 553
Tabel 3.194	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia .....	III – 553
Tabel 3.195	Rekomendasi dan Tindak Lanjut DPRD Terhadap LKPJ Tahun Sebelumnya .....	III – 554
Tabel 4.1	Tugas Pembantuan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	IV – 2
Tabel 4.2	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantu Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	IV – 3
Tabel 4.3	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantu Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	IV – 13



Tabel 4.4	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantu Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 .....	IV – 16
Tabel 4.5	Program Kegiatan SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo .....	IV – 18
Tabel 4.6	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantu Di SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	IV – 19



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	I-7
Gambar 1.2 Tema dan Unsur Tema RKPD Provinsi Gorontalo 2022 .....	I-8
Gambar 1.3 Peta Provinsi Gorontalo .....	I-14
Gambar 1.4 Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo 2022 .....	I-17
Gambar 1.5 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo.....	I-18
Gambar 3.1 Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	III-10
Gambar 3.2 Infografis Cakupan Vaksinasi & Sebaran Kasus Covid di Provinsi Gorontalo Tahun 2022 (Update 31 Desember 2022) .....	III-54
Gambar 3.3 Sertifikat Penghargaan Dari Kementerian Perhubungan Katalisator Tumbuhnya Trayek Kapal Penumpang Komersial Terbaik Tahun 2022 .....	III-223
Gambar 3.4 Penandatanganan Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat .....	III-224
Gambar 3.5 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dengan Provinsi Jawa Timur Bidang Perhubungan .....	III-224



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 ..... I-16
Grafik 1.2	Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo 2022 ..... I-18
Grafik 1.3	Realisasi Pendapatan dan Persentase Kenaikan PAD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Dalam Milyar Rupiah) ..... I-22
Grafik 1.4	Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 ..... I-30
Grafik 1.5	Realisasi Komponen Belanja Modal Tahun 2022 ..... I-35
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo Tahun 2017-2022 ..... III-2
Grafik 3.2	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo 2020-2022 ..... III-6
Grafik 3.3	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2022 ..... III-8
Grafik 3.4	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo 2020-2022 ..... III-11
Grafik 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2022 ..... III-16
Grafik 3.6	Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo 2020-2022 ..... III-18
Grafik 3.7	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 ..... III-21
Grafik 3.8	Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 ..... III-33
Grafik 3.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 ..... III-34
Grafik 3.10	Angka Partisipasi Murni Provinsi Gorontalo 2020-2022 ..... III-34
Grafik 3.11	Indikator Intervensi Dalam Rangka Menurunkan Prevelensi Stunting di Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ..... III-53



Grafik 3.12	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 .....	III-55
Grafik 3.13	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 .....	III-56
Grafik 3.14	Prevelensi Stunting di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 .....	III-56
Grafik 3.15	Prevelensi Stunting di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 .....	III-57
Grafik 3.16	Target dan Capaian Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 .....	III-78
Grafik 3.17	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022.....	III-79
Grafik 3.18	Persentase Cakupan Sanitasi Dan Air Minum Layak Provinsi Gorontalo 2021-2022 .....	III-79
Grafik 3.19	Indeks Resiko Bencana Provinsi Gorontalo .....	III-105
Grafik 3.20	Upah Minum Provinsi .....	III-140
Grafik 3.21	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo .....	III-199
Grafik 3.22	Perkembangan Status Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022	III-211
Grafik 3.23	Perkembangan UMKM Naik Kelas Provinsi Gorontalo 2017-2022 .	III-256
Grafik 3.24	Nilai SAKIP Dinas PMESDMT Provinsi Gorontalo .....	III-264
Grafik 3.25	Media Tertimbang Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Internasional Provinsi Gorontalo.....	III-272
Grafik 3.26	Jumlah Pengakuan Nasional Terhadap Karya Seni Budaya Gorontalo Tahun 2022 .....	III-278
Grafik 3.27	Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Provinsi Gorontalo .....	III-307
Grafik 3.28	Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Macanegara Di Provinsi Gorontalo .....	III-319
Grafik 3.29	Jumlah Komoditi Ekspor Provinsi Gorontalo 2017-2022.....	III-378
Grafik 3.30	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo 2017-2022.....	III-378
Grafik 3.31	Indeks Merit System Provinsi Gorontalo 2021-2022 .....	III-502



## **BAB I PENDAHULUAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu (satu) tahun anggaran, yang disusun sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 19 yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 menggambarkan capaian kinerja pembangunan tahun 2022 yang masih erat kaitannya dengan pencapaian Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 meliputi dua aspek antara lain hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



- BAB I Pendahuluan, yang memuat Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan LKPJ, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022, Data Umum Daerah, serta Realisasi APBD Tahun 2022;
- BAB II Perubahan Penjabaran APBD, yang menjelaskan perubahan terhadap alokasi anggaran pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan serta pokok-pokok perubahan anggaran;
- BAB III Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang antara lain memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan, yang memuat urusan pemerintahan tugas pembantuan dan hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian.
- BAB V Penutup.

### **1.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);





5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 31 tahun 2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021



tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

27. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 Visi Misi, Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1 Visi - Misi**

Dalam penyelenggaraan Pembangunan jangka menengah Daerah, ditetapkan Visi Misi Pembangunan yang menjadi arah dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017-2022. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yaitu :

#### **“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”**

Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

**Gorontalo Maju dan Unggul**, yaitu kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

**Gorontalo Sejahtera**, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.



Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan;
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Intak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

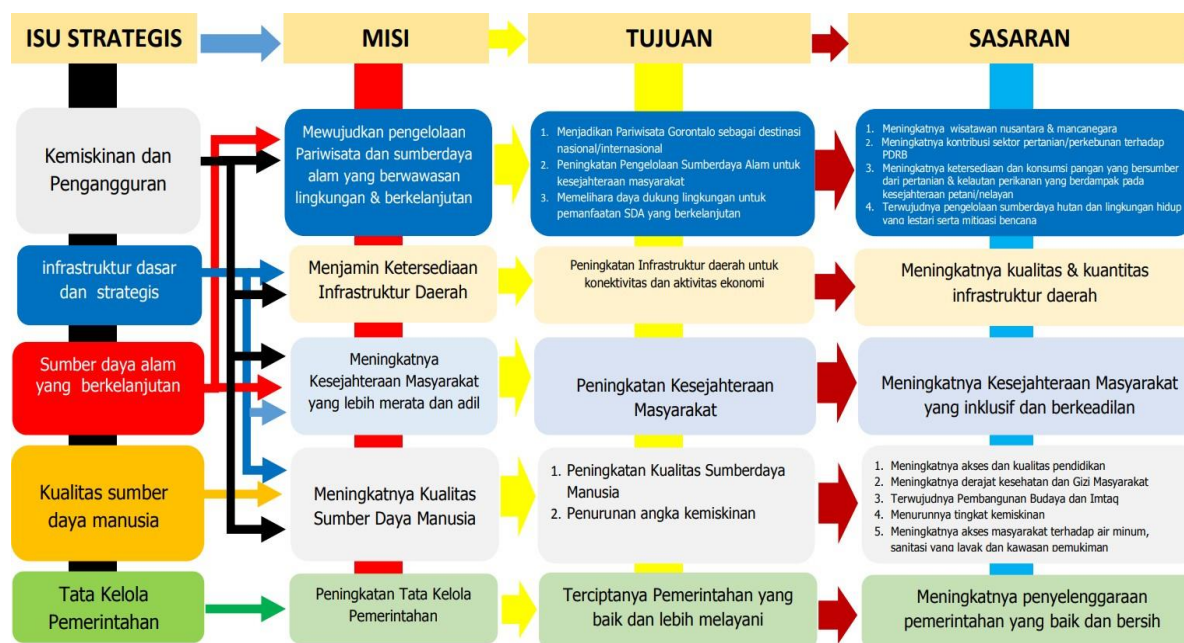
### **1.2.2 Tujuan dan Sasaran**

Dalam mewujudkan pencapaian Visi Misi Pembangunan tersebut, maka dirumuskan tujuan sasaran yang merupakan tolak ukur dalam pencapaian Visi Misi Pembangunan Daerah. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.



Tujuan dan sasaran untuk pencapaian keberhasilan pembangunan Provinsi Gorontalo yang selaras dengan pencapaian Visi Misi Pembangunan Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

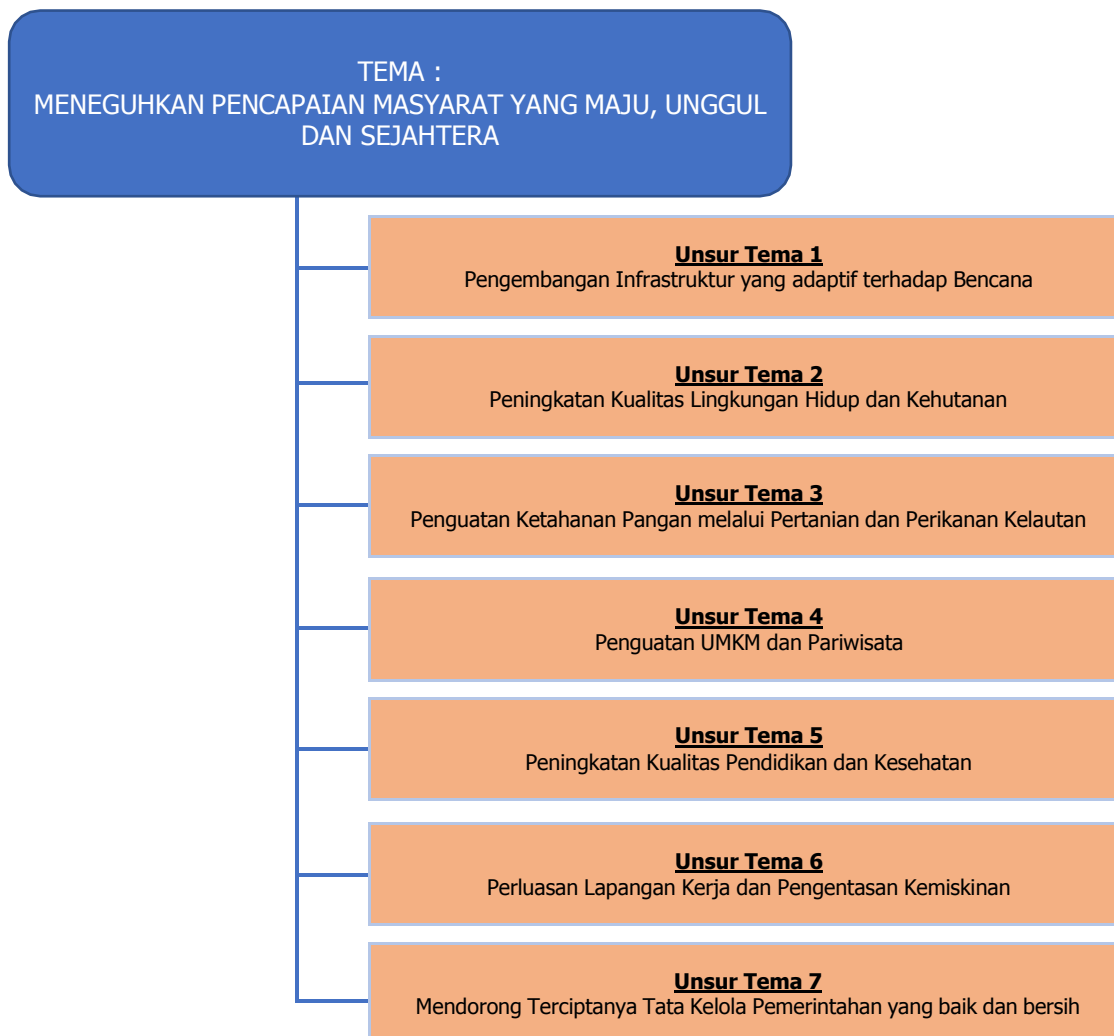


Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2017-2022

### 1.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022, merupakan penjabaran prioritas pembangunan tahunan yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, analisis permasalahan dan isu strategis, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Adapun Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 yang menggambarkan optimisme terhadap pencapaian target-target pembangunan diakhir periodisasi RPJMD 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
Tema dan Unsur Tema RKPd Provinsi Gorontalo 2022



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) Provinsi Gorontalo, 2022

**Unsur tema 1: Pengembangan Infrastruktur yang adaptif terhadap Bencana**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang pada daerah bantaran sungai dan hulu
2. Percepatan Perampungan RTRW
3. Penyusunan Dokumen Pengurangan Resiko Bencana



4. Pelatihan SDM Kebencanaan
5. Desa Tangguh Bencana
6. Mendorong peran multi sektor dalam penanganan bencana (Skema CSR)
7. Peningkatan Jalan Mantap Provinsi
8. Penunjang Operasional Bus Perintis
9. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)
10. Penerangan Jalan Umum (PJU)
11. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas
12. Penertiban Bidang Transportasi Jasa angkutan
13. Penyediaan Lahan untuk Infratraktur Strategis Nasional dan Provinsi

### **Unsur tema 2: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas pengelolaan sektor kehutanan. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
2. Pengelolaan Limbah B3
3. Penataan Manajemen Persampahan dan TPA (Evaluasi dan Pendampingan)
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Galian C di badan Sungai Prioritas
5. Pengembangan Informasi Geologi untuk Mendukung Geopark
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
7. Penguatan Kapasitas Desa Rawan Bencana
8. Peningkatan Kapasitas Aparat Penjagaan dan Pengamanan Kawasan Hutan
9. Penguatan Kelompok Masyarakat pemanfaatan HHBK
10. Mendorong Perhutanan Sosial

### **Unsur tema 3: Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian dan Perikanan Kelautan**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan, dengan mendorong sektor pertanian dan perikanan kelautan. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud,



penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Mendorong Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Fokus pada Padi, Jagung, Cabe dan Bawang)
2. Mendorong Produksi Perikanan dan Kelautan
3. Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
4. Mendorong pasca panen pertanian
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Perikanan (Pelaku Utama, Pelaku Usaha Pertanian dan Korporasi Petani)
6. Paket Korporasi Petani: Identifikasi Gapoktan dan Komoditas, Sosialisasi, Pendampingan (Pembentukan Kelembagaan yg berbadan hukum, Penguatan Manajemen Kelembagaan, Teknis Budidaya, Promosi dan Pemasaran)
7. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Pembangunan Gudang)
8. Pekarangan Pangan Lestari (PPL)

#### **Unsur tema 4: Penguatan UMKM dan Pariwisata**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada penguatan aspek UMKM, utamanya pengusaha lokal. Penguatan pada sektor pariwisata juga menjadi fokus pembangunan di tahun terakhir RPJMD. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Pengembangan Pusat Informasi
2. Promosi pariwisata
3. Pengembangan Destinasi Wisata untuk mendukung pengembangan Geopark
4. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan TIK pada Destinasi Wisata
5. Penataan Amenitas pada Destinasi Wisata Prioritas dan Geopark
6. Inventarisasi Keragaman Geologi dan Geoheritage
7. Sertifikasi SDM Kepariwisataaan
8. Pengembangan Desa Wisata
9. Peningkatan Atraksi bernuansa kearifan lokal
10. Penguatan SDM, Pengawasan dan Pembinaan UKM dan Koperasi
11. Peningkatan kemitraan, memperluas promosi dan pemasaran usaha, sosialisasi kredit perbankan bagi UMKM





12. Perampungan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Lanjutan)
13. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dekranasda)

### **Unsur tema 5: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, utamanya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Penguatan terhadap Lulusan (Database Alumni, Sertifikasi Kompetensi)
2. Penguatan terhadap Proses Pembelajaran (Silabi, Metode Belajar, Sarpras Pendukung, Layanan Konseling, Assessment peserta didik, Revitalisasi Perpustakaan, Language center, Pembinaan rutin kepada orang tua peserta didik)
3. Penguatan terhadap Manajemen Sekolah
4. Regulasi Perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus
5. Sarpras Sekolah Luar Biasa (SLB)
6. Ketersediaan Guru SLB (Ahli dalam mengajar anak berkebutuhan khusus)
7. Dua SMA Unggulan di Dua Zona (Pilot Project)
8. Penguatan Prakerin
9. Rekrutmen guru produktif
10. Penguatan Organisasi Kepemudaan
11. Pembinaan Pemuda melalui organisasi kepemudaan
12. Latihan Dasar Kepemimpinan
13. Penguatan PPLP, KONI
14. Kemitraan dengan pendidikan tinggi dalam keberlanjutan pembinaan olahraga
15. Beasiswa atlit berprestasi
16. Upaya Promotif dan Preventif, Penguatan dan Pemerataan SDM Kesehatan (kegiatan promotif, preventif, dan kuratif), Akreditasi Puskesmas, Updating PISPK
17. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
18. Pembinaan karakter SDM Puskesmas
19. Penguatan Manajemen Rumah Sakit
20. Perbaikan dan Penguatan Tata Kelola Sistem Rujukan Tingkat Lanjut



21. Kemitraan dalam standarisasi fasilitas kesehatan mandiri
22. Dukungan dan Fasilitasi terhadap pengembangan RS Tombulilato (Skema Hibah Barang/Uang/Penguatan Kapasitas)
23. Identifikasi kesiapsiagaan (SDM, Kesiapan masyarakat, Sarpras, dst)
24. Buffer stock obat-obatan, Sarpras, ketersediaan SDM, Puskesmas Pembantu (Pustu)
25. Pemanfaatan Grand Design Kependudukan

### **Unsur tema 6: Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada menjamin ketersediaan lapangan kerja di masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Adapun dalam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Penyediaan Mahyani
2. Pengurangan Kawasan Kumuh
3. Air Minum dan Sanitasi
4. Drainase pemukiman, persampahan, jalan kawasan pemukiman (Kawasan Kumuh)
5. Kemandirian Pangan (Rumah Pangan) di setiap mahyani
6. Penguatan pengelolaan Database Fakir Miskin (dorong pemanfaatan e-JPS)
7. Penguatan peran kab/kota dalam updating DTKS
8. Baksos NKRI per bulan
9. Perahu Fiber 3 GT bermesin tempel (Target Keluarga Miskin)
10. Optimalisasi Motor Cool Box yang telah tersedia di masyarakat
11. Penyediaan prasarana budidaya perikanan air laut dan tawar (danau)
12. Pemagangan Dalam Negeri

### **Unsur tema 7: Mendorong Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun dalam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. peningkatan kualitas budaya kerja
2. Penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah



3. pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan (Penguatan SIPD pada pengolahan data pembangunan dan pada perencanaan-penganggaran, pada pengendalian dan pengawasan, Satu Data, Satu Peta)
4. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran
5. Penataan jabatan fungsional tertentu (JFT)
6. Penyelenggaraan Diklat Teknis terpusat
7. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Kediklatan
8. Dukungan pelatihan untuk Pengelola Barang/Jasa
9. Perbaikan tata kelola perizinan

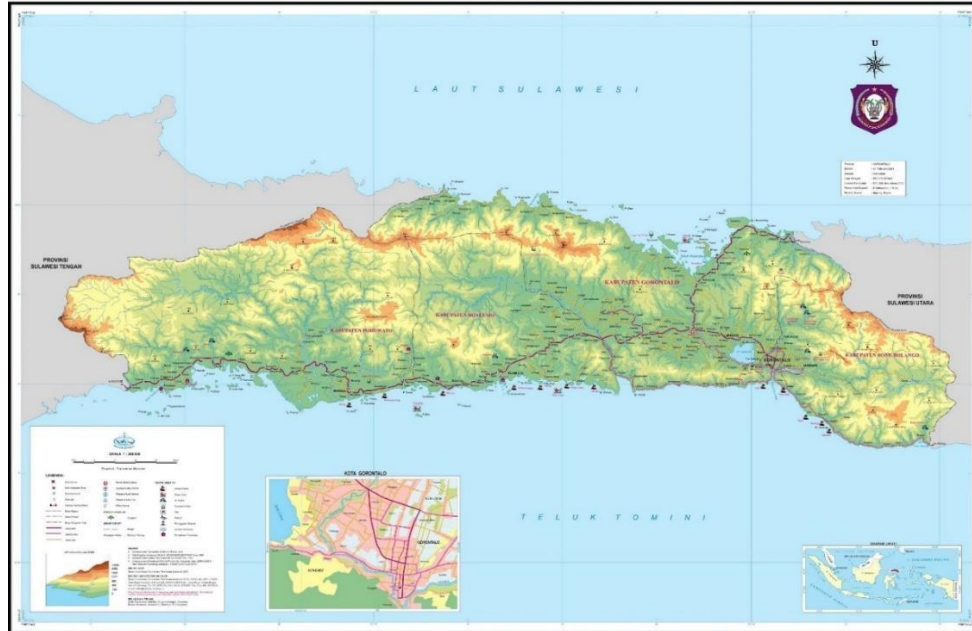
### **1.3 Data Umum Daerah**

#### **1.3.1 Data Geografis Wilayah**

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2001 Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi ke-32 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas Wilayah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 ditetapkan sebesar 11.257,07 km<sup>2</sup> atau hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Ditinjau secara astronomis, wilayah Provinsi Gorontalo terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0° 19' – 0° 57' Lintang Utara dan 121° 23' – 125° 14' Bujur Timur, sedangkan secara geografis, Provinsi Gorontalo berada dibagian utara Pulau Sulawesi, dengan batas wilayah meliputi :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

**Gambar 1.3**  
Peta Provinsi Gorontalo,



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Secara administratif, Provinsi Gorontalo terdiri dari 6 (enam) wilayah, yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Dengan urutan luas wilayah terbesar sampai dengan terkecil yaitu :

- Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 79,59 km<sup>2</sup>.
- Kabupaten Gorontalo Utara 1.676,15 km<sup>2</sup>,
- Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.521,88 km<sup>2</sup>,
- Kabupaten Pohuwato dengan luas 4.244,31 km<sup>2</sup>,
- Kabupaten Bone Bolango seluas 1.984,31 km<sup>2</sup>,
- Kabupaten Gorontalo seluas 1.750,83 Km<sup>2</sup>,

Dari 6 wilayah administrasi pemerintahan, Provinsi Gorontalo memiliki 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan sebanyak 657 Desa.



**Tabel 1.1**  
Luas Wilayah Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan Kelurahan dan Desa  
Provinsi Gorontalo

Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	1.750,83	15,55
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	82	82	1.521,88	13,52
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.984,31	17,63
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.244,31	37,70
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	123	123	1.676,15	14,89
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	79,59	0,71
75	<b>Provinsi Gorontalo</b>	77	72	657	729	11.257,07	100

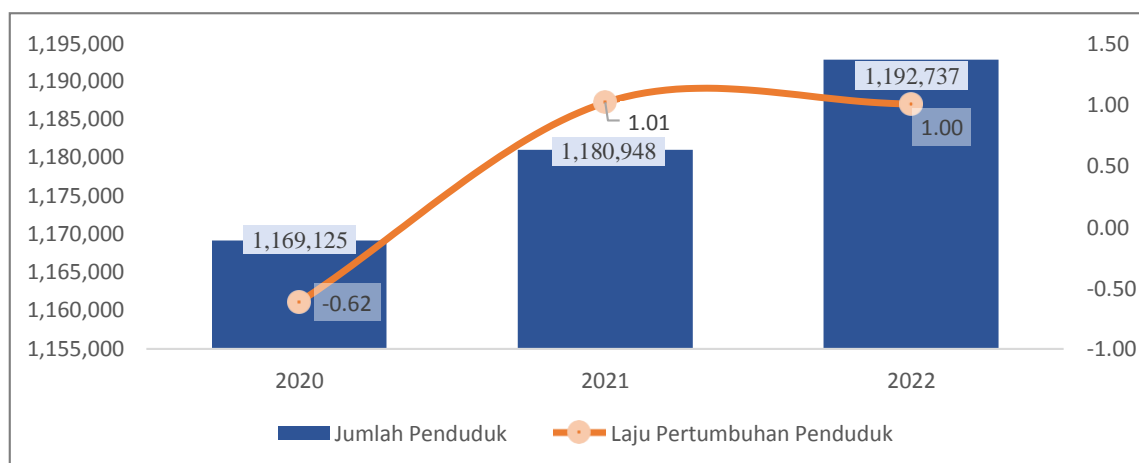
Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

### 1.3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Gorontalo menduduki peringkat ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk. Keseluruhan penduduk tersebar ke dalam 5 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan hasil Proyeksi Interim SP 2020, jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 2022 mencapai 1.192.737 jiwa yang artinya tumbuh satu persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah penduduk Gorontalo selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan berarti. Tercatat, laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar minus 0,62 dan 1,01 persen.



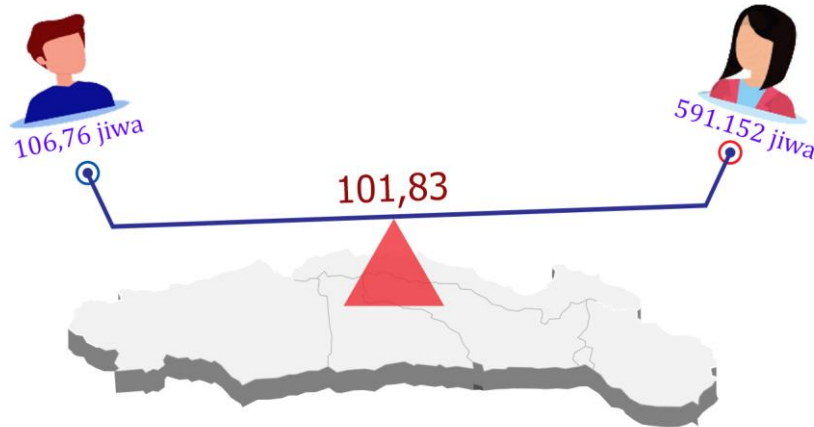
**Grafik 1.1**  
 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
 Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022



Sumber : Proyeksi Interim, SP 2020 Badan Pusat Statistik RI, 2022

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/seks ratio (SR) di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010 hingga tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk perempuan relatif seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Artinya, tidak terdapat selisih jumlah yang signifikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio jenis kelamin yang selalu bernilai mendekati 100. Pada tahun 2022 rasio jenis kelamin Provinsi Gorontalo sebesar 101,76 yang berarti bahwa terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

**Gambar 1.4**  
Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo 2022

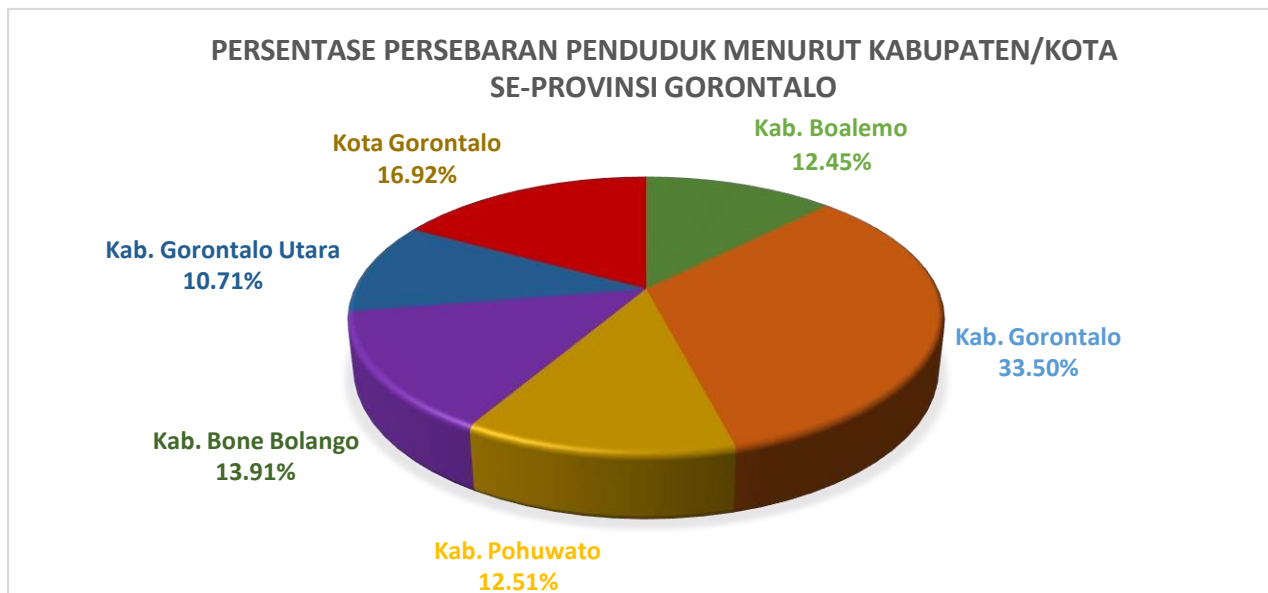


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Sebaran penduduk antar wilayah di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2022 masih belum merata, dimana Kabupaten Gorontalo masih menjadi kabupaten yang jumlah penduduknya tertinggi, sebesar 33,50% persen dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya sebesar 10,71 % dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo.



**Grafik 1.2**  
 Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

**Gambar 1.5**  
 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Sekitar 18 persen, Penduduk Provinsi Gorontalo tinggal di Kota Gorontalo yang merupakan wilayah Ibu Kota Provinsi. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 79,59 Km<sup>2</sup>, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan kepadatan penduduk mencapai 2.510 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah





terpadat kedua di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo dengan kepadatan penduduk mencapai 226 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2021. Selanjutnya disusul Kabupaten Boalemo 97 jiwa/km<sup>2</sup>, Kabupaten Bone Bolango 83 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Gorontalo Utara 75 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 35 jiwa/km<sup>2</sup>. Rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 105 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 1.3.3 Jumlah PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 5.242 ASN, orang yang terdiri dar 2.894 PNS pada Organisasi Perangkat Daerah, dan sebanyak 2.348 jumlah guru dan ASN yang tersebar di sekolah SMK/SMA/MA sederajat di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan jabatan , jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural sebanyak 353 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.901 orang dan fungsional umum/pelaksana sebanyak 1.988 orang.

**Tabel 1.2**

Jumlah PNS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jabatan Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum/ Pelaksana	Jumlah Pegawai
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	17	54	77
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO	5	8	17	30
3	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO	17	7	45	69
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	8	39	53
5	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7	19	35	61
6	BADAN PENGHUBUNG	5	0	23	28
7	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO	10	23	46	79
8	BIRO HUKUM	4	9	12	25
9	BIRO ORGANISASI	5	8	12	25



No	Unit Kerja	Jabatan Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum/ Pelaksana	Jumlah Pegawai
10	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA	3	9	22	34
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	5	15	10	30
12	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	2	10	12	24
13	BIRO UMUM DAN PIMPINAN SETDA	11	7	56	68
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4	26	27	57
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	25	10	61	96
16	DINAS KESEHATAN	14	40	82	136
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	8	9	20	37
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8	13	46	67
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8	12	61	81
20	DINAS PANGAN	6	11	28	45
21	DINAS PARIWISATA	6	9	45	60
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17	8	170	195
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	11	31	49
24	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI	11	30	68	109
25	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	8	50	130	188
26	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI	13	3	36	52
27	DINAS PERTANIAN	6	33	101	140
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	7	43	56
29	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN	9	2	26	37
30	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	9	18	55	82
31	INSPEKTORAT	6	82	14	102
32	SEKRETARIAT DPRD	4	8	61	73
33	UPT BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	4	2	17	23
34	UPT BALAI LATIHAN KERJA	4	8	12	24
35	UPT BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN	2	1	5	8



No	Unit Kerja	Jabatan Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum/ Pelaksana	Jumlah Pegawai
36	UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK	3	2	8	13
37	UPT BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	4	5	5	14
38	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	4	6	6	16
39	UPT BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN	4	0	19	23
40	UPT BALAI PENGUJIAN PENERAPAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN	4	0	5	9
41	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	4	29	15	48
42	UPT BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYU	4	0	1	5
43	UPT BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN	4	28	23	55
44	UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH I DAN II	3	0	10	13
45	UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH III	4	2	14	20
46	UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV	4	3	12	19
47	UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH V	4	1	21	26
48	UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH VI	4	3	22	29
49	UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH VII	4	3	21	28
50	UPT LABORATORIUM VETERINER	4	4	3	11
51	UPT MUSEUM PURBAKALA	4	0	13	17
52	UPT PELABUHAN PERIKANAN GENTUMA	3	0	6	9
53	UPT PELABUHAN PERIKANAN TENDA	4	0	8	12
54	UPT PELABUHAN PERIKANAN TILAMUTA	4	0	0	4
55	UPT RSUD HASRI AINUN HABIBIE	13	112	30	155
56	UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TALUMELITO	4	0	10	14
57	UPT WILAYAH I	4	0	23	27
58	UPT WILAYAH II	4	0	19	23
59	UPT WILAYAH III	3	0	14	17
60	GURU DAN PEGAWAI DI SMA/MA/SMK	0	2170	178	2348
<b>Jumlah</b>		<b>353</b>	<b>2901</b>	<b>1988</b>	<b>5242</b>

Sumber Data : Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo, 2022



### 1.3.4 Realisasi Pendapatan

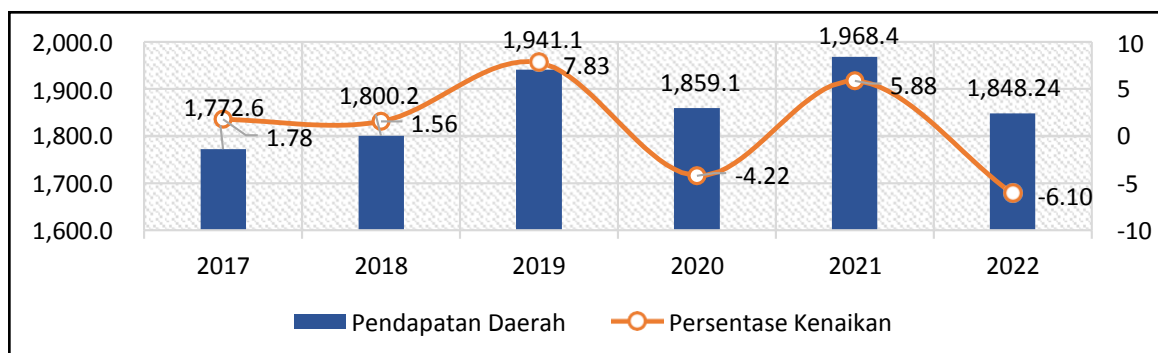
Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang , Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, selanjutnya Pendapatan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam hal ini bagian laba penyertaan modal serta Lain-lain PAD yang sah, (2) Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Penyesuaian (DID), serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pendapatan daerah dapat didorong melalui optimalisasi pengelolaan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah dalam merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo cenderung mengalami fluktuasi, Tahun 2022 Pendapatan Daerah sebesar 1,85 Trilyun Rupiah. Terjadi penurunan hingga minus 6,10 persen dibanding Tahun 2021 yang mencapai 1,968 Trilyun Rupiah.

**Grafik 1.3**

Realisasi Pendapatan dan Persentase Kenaikan PAD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

(Dalam Milyar Rupiah)





Penurunan pendapatan daerah salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dana transfer daerah yang menyebabkan alokasi dana transfer daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Alokasi dana transfer daerah Provinsi Gorontalo turun mencapai minus 8,53 persen. Penurunan pendapatan transfer tersebut di akibatkan oleh penurunan Dana Alokasi Khusus yang mencapai minus 33,74 persen.

Untuk realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah meningkat sebesar 9,93 persen, sedangkan pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan hingga sebesar minus 13,48 persen, dan lain-lain PAD yang sah yang berkurang hingga minus 40,65 persen, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 turun sebesar 818,76 Juta atau sebesar minus 0,16 persen. Sementara pendapatan yang bersumber dari pendapatan Hibah dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 14,59 persen dibanding tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 1,78 Trilyun Rupiah, maka realisasi pendapatan daerah tercapai 103,59 persen. Realisasi tertinggi yaitu dari sumber Pendapatan Asli Daerah mencapai 115,19 persen, sementara pendapatan transfer hanya sebesar 99,90 dari target, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 66,83 persen.

**Tabel 1.4**

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan 2022

No.	Uraian	2021			2022*			% kenaikan
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.881.835.693.529,00</b>	<b>1.972.986.620.791,52</b>	<b>104,84</b>	<b>1.784.137.999.082,00</b>	<b>1.848.238.892.716,83</b>	<b>103,59</b>	<b>-6,323</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>400.778.561.529,00</b>	<b>510.804.070.686,52</b>	<b>127,45</b>	<b>442.748.816.082,00</b>	<b>509.985.305.398,83</b>	<b>115,19</b>	<b>-0,160</b>
1.1.1	Pajak Daerah	343.683.585.030,00	400.748.386.370,00	116,60	376.125.487.471,00	440.544.499.280,00	117,13	9,930
1.1.2	Retribusi Daerah	6.820.930.101,00	5.743.128.705,00	84,20	7.405.098.965,00	4.969.122.986,00	67,10	-13,477
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.230.454.894,00	5.092.544.065,00	157,64	5.456.586.737,00	5.590.830.014,00	102,46	9,785
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	47.043.591.504,00	99.220.011.546,52	210,91	53.761.642.909,00	58.882.584.817,83	109,53	-40,655
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.475.696.593.000,00</b>	<b>1.458.904.411.530,00</b>	<b>98,86</b>	<b>1.335.768.644.000,00</b>	<b>1.334.495.372.320,00</b>	<b>99,90</b>	<b>-8,528</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	19.505.759.000,00	27.236.463.828,00	139,64	23.340.674.000,00	23.900.291.978,00	102,39	-12,45
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	940.639.321.000,00	940.639.321.000,00	100	940.903.029.000,00	940.903.029.000,00	100	0,03
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	475.808.733.000,00	451.285.846.702,00	94,85	335.769.178.000,00	299.041.695.342,00	89,06	-33,74



1.2.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus (DID)	39.742.780.000,00	39.742.780.000,00	100,00	35.755.763.000,00	70.650.356.000,00	197,59	77,77
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>5.360.539.000,00</b>	<b>3.278.138.575,00</b>	<b>61,15</b>	<b>5.620.539.000,00</b>	<b>3.756.483.299,00</b>	<b>66,83</b>	<b>14,59</b>
1.3.1	Hibah	3.620.539.000,00	2.831.202.111,00	78,20	3.620.539.000,00	3.259.172.621,00	90,02	15,11
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000,00	446.936.464,00	22,35	2.000.000.000,00	497.310.678,00	24,87	11,27

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022 - \* Un-audited BPK

Dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, Pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah. Sampai dengan tahun 2022, Tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap dana transfer daerah masih cukup tinggi. Sebesar 72,20 persen Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah hanya sebesar 27,59 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp. 509.987.037.097,83, atau tercapai 115,19 dari target pendapatan asli daerah. Salah satu sumber PAD terbesar yaitu berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 86,38 persen dari total PAD dan 23,84 persen dari total keseluruhan Pendapatan Daerah.

#### 1) Pajak daerah

Pajak daerah tahun 2022 terrealisasi sebesar Rp. 440.544.499.280,00 atau sebesar 117,13 persen dari target penerimaan pajak daerah. Adapun realisasi pajak menurut jenis dan objek pajak sebagai berikut :



**Tabel 1.5**

Target dan Realisasi Sumber Pajak Daerah tahun 2022

Uraian	2022*		
	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% realisasi
<b>Pajak Daerah</b>	<b>376.125.487.471,00</b>	<b>440.544.499.280,00</b>	<b>117,13</b>
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	116.567.360.109,00	134.025.656.304,00	114,98
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	99.015.338.126,00	121.365.243.855,00	122,57
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	76.832.573.967,00	91.051.245.362,00	118,51
Pajak Air Permukaan	193.492.231,00	213.884.039,00	110,54
Pajak Rokok	134.023.924.605,00	93.888.469.720,00	70,05

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022 - \*Un-audited BPK

Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pajak daerah dengan kontribusi sebesar 30,42 persen dari total keseluruhan pajak daerah, sementara terendah yaitu pajak air permukaan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,05 persen dari total pajak daerah. Realisasi tertinggi yaitu pada sumber pajak BBNKN dan PKB yang masing-masing terrealisasi sebesar 122,57 persen dan 114,98 persen, sementara yang tidak tercapai yaitu penerimaan dari pajak rokok yang hanya terrealisasi sebesar 70,05 persen.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan pajak dari retribusi daerah sebesar Rp. 4.969.122.986,00, atau sebesar 67,1 persen dari target realisasi. Tidak tercapainya realisasi retribusi daerah, belum optimalnya unit-unit penghasil retribusi daerah, yang disebabkan oleh minimnya sarana prasarana maupun fasilitas layanan yang memadai. Penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi Jasa Umum dengan realisasi sebesar Rp. 2.865.024.400,00 dan realisasi jasa Usaha sebesar 2.104.098.586,00.

3) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Sumber pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD, dengan realisasi sebesar Rp.



5.590.830.014,00, atau sebesar terrealisasi sebesar 102,46 persen dari target yang ditetapkan.

4) Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah terrealisasi sebesar Rp. 58.882.584.817,83 atau tercapai sebesar 109,53 persen dari target. Sumber-sumber PAD tertinggi berasal dari Pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah sebesar Rp. 33.985.900.155,00. Sementara realisasi tertinggi dari Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.

**Tabel 1.6**

Target dan Realisasi Anggaran Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022

Uraian	2022*		
	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>53.761.642.909,00</b>	<b>58.882.584.817,83</b>	<b>109,53</b>
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	3.552.670.877,00	1184,22
Hasil Kerja Sama Daerah	200.000.000,00	2.170.972.465,00	1085,49
Jasa Giro	6.850.000.000,00	4.122.793.256,00	60,19
Pendapatan Bunga	9.500.142.909,00	6.949.325.000,00	73,15
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.300.000.000,00	4.808.853.066,63	369,91
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	286.771,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.330.500.000,00	2.639.785.474,00	60,96
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.276.000.000,00	651.997.753,20	51,10
Pendapatan BLUD	30.000.000.000,00	33.985.900.155,00	113,29

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (2022) – \*Unaudited BPK

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah didorong oleh kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Secara umum kebijakan pendapatan daerah dilakukan mengoptimalkan kinerja pendapatan antara lain sebagai berikut :





- a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan kemasyarakatan melalui Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembayaran secara online seperti E-Samsat dan Samolnas;
- b. Melaksanakan kerjasama dengan Ditlantas Polda, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, Door to Door, Samsat Keliling, Warkop Samsat;
- c. Memberikan kemudahan informasi pembayaran pemberi PKB melalui Whatsapp, Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo PKB (Surat PKB);
- d. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah;
- e. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;
- f. Memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui pemberian insentif pembebasan BBN-KB dan denda pajak;
- g. Mengoptimalkan kinerja BUMD/perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- h. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, bagi hasil PBB sektor pertambangan, Pajak Bahan Bakar sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi;
- i. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif;
- j. Peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan;
- k. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplayer effect kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah;



- l. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif;
- m. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan;
- n. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.
- o. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah.

Kebijakan yang telah dilaksanakan juga didukung dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan serta penyederhanaan prosedur pelayanan menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik, sekaligus menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

### **1.3.5 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja**

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp. 1.932.990.091.188,20, meningkat 3,58% dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 1.866.246.072.482,85, atau terrealisasi sebesar 91,08 persen dari target Belanja Daerah. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja terdiri atas : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Tahun 2022, proporsi belanja operasi sebesar 71,76 %, belanja Modal sebesar 16,46%, belanja transfer sebesar 10,91 % dan belanja tak terduga sebesar 0,86% dari total realisasi belanja. Tahun 2022 Belanja Operasi mengalami penurunan -3,69 persen dibandingkan tahun 2021, sementara belanja modal meningkat sebesar 80,50 persen tahun 2022. Untuk Belanja Tak Terduga meningkat 0,08 persen dibanding tahun 2021, dan belanja transfer meningkat sebesar 4,24 persen.



**Tabel 1.13**  
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022

NO.	Urutan	Realisasi TA. 2021		TA. 2022		% Kenaikan
			Anggaran	Realisasi	%	
	<b>BELANJA</b>	<b>1.834.700.516.350,85</b>	<b>2.122.278.456.084,00</b>	<b>1.932.079.807.810,20</b>	<b>91,08</b>	<b>5,31</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.439.357.233.290,37</b>	<b>1.507.374.787.844,00</b>	<b>1.386.174.889.096,22</b>	<b>92,02</b>	<b>-3,69</b>
1	Belanja Pegawai	625.036.929.705,00	693.156.866.730,00	637.738.706.092,20	92,00	2,03
2	Belanja Barang	581.954.863.475,37	757.205.020.613,00	696.435.484.998,40	91,97	13,51
	Belanja Bunga		3.892.510.408,00	1.469.490.961,00	37,75	0,00
3	Belanja Hibah	206.792.150.175,00	37.957.390.433,00	37.588.548.351,62	99,03	-81,82
4	Belanja Bantuan Sosial	25.573.289.935,00	15.162.999.660,00	13.853.492.071,00	91,36	-45,83
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>176.360.030.440,48</b>	<b>382.695.940.984,00</b>	<b>318.331.581.107,98</b>	<b>83,18</b>	<b>80,50</b>
1	Belanja Modal Tanah	6.068.182.962,00	7.626.108.400,00	10.039.248.350,00	131,64	65,44
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.665.381.688,34	97.782.053.443,00	97.128.220.674,91	99,33	55,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.780.849.607,51	81.028.295.576,00	61.497.516.707,95	75,90	62,77
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.123.653.299,77	188.164.669.640,00	143.809.154.618,12	76,43	108,05
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	721.962.882,86	8.094.813.925,00	5.857.440.757,00	72,36	711,32
<b>C</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>16.703.054.982,00</b>	<b>20.978.895.685,00</b>	<b>16.716.126.244,00</b>	<b>79,68</b>	<b>0,08</b>
1	Belanja Tak Terduga	16.703.054.982,00	20.978.895.685,00	16.716.126.244,00	79,68	0,08
<b>D</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>202.280.197.638,00</b>	<b>211.228.831.571,00</b>	<b>210.857.211.362,00</b>	<b>99,82</b>	<b>4,24</b>
1	Belanja Bagi Hasil	200.830.197.638,00	211.228.831.571,00	210.857.211.362,00	99,82	4,99
2	Belanja Bantuan Keuangan	1.450.000.000,00	134.434.800,00	0,00	0,00	-100,00

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

\*2022 – Unaudited BPK

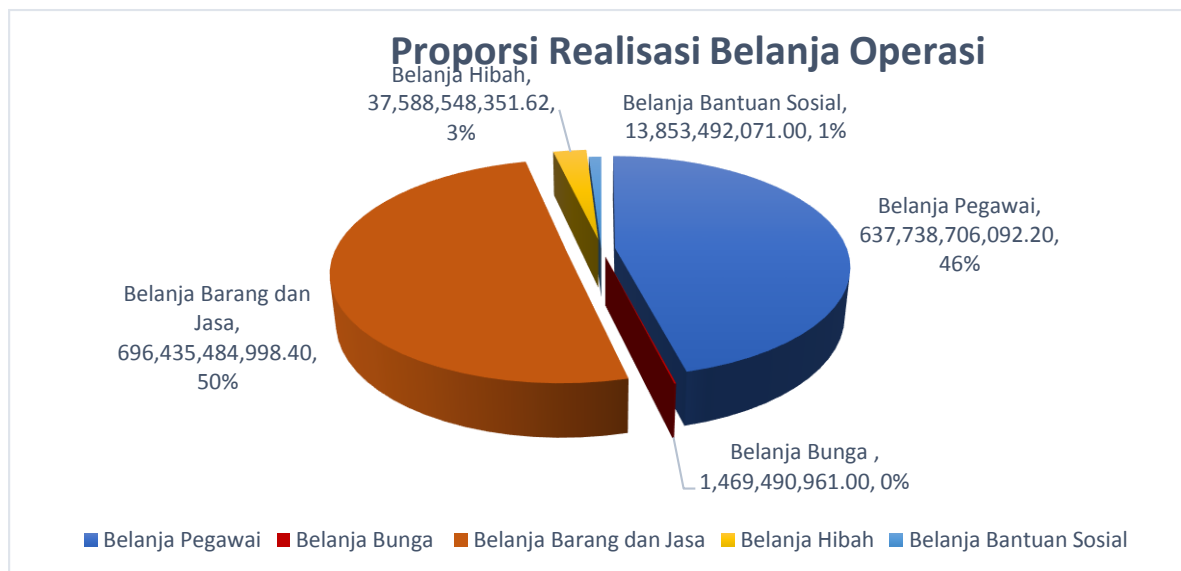
### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Alokasi belanja operasi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.507.374.787.844,00, dengan Realisasi sebesar Rp. 1.387.085.722.474,22 atau sebesar 92,01 % dari target. Realisasi belanja operasi tahun 2022, meliputi :



**Grafik 1.3**

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022



Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

Dari 5 komponen belanja operasi, realisasi belanja barang dan jasa sebesar 50,17 persen dari proporsi belanja operasi dan 35,99 persen dari total belanja daerah. Diikuti oleh belanja pegawai sebesar 46 persen dari Belanja Operasi, dan 33 persen terhadap total belanja. Selanjutnya untuk Belanja Hibah 2,7 persen, belanja bantuan sosial sebesar 0,99 persen, dan belanja bunga sebesar 0,1 persen terhadap total belanja operasi.

**Tabel 1.7**

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.507.374.787.844,00</b>	<b>1.386.174.889.096,22</b>	<b>91,96</b>
1	Belanja Pegawai	693.156.866.730,00	637.738.706.092,20	92,00
2	Belanja Barang dan Jasa	757.205.020.613,00	696.435.484.998,40	91,97
3	Belanja Bunga	3.892.510.408,00	1.469.490.961,00	37,75
4	Belanja Hibah	37.957.390.433,00	37.588.548.351,62	99,03
5	Belanja Bantuan Sosial	15.162.999.660,00	13.853.492.071,00	91,36

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022



1) Belanja Pegawai

Sebagaimana PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Pegawai menjadi salah satu komponen belanja operasi. Tahun 2022 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 693.156.866.730,- dapat terrealisasi sebesar Rp. 637.738.706.092 atau 92 persen, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.8**  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>693.156.866.730,00</b>	<b>637.738.706.092,20</b>	<b>92,00</b>
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	406.706.003.046,00	374.672.076.840,20	92,12
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	158.270.089.229,00	144.453.816.445,00	91,27
1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100.370.967.583,00	91.358.904.536,00	91,02
1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.150.863.844,00	25.758.923.305,00	98,50
1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	334.038.510,00	90.038.900,00	26,95
1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.324.904.518,00	1.227.486.066,00	92,65
1.7	Belanja Pegawai BOS	0,00	177.460.000	100

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

Terdapat penambahan komponen belanja pegawai yang semula tidak dialokasikan, yaitu Belanja Pegawai BOS yang direalisasikan sebesar Rp. 177.460.000 yang dialokasikan dari belanja pegawai.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada masyarakat atau pihak lain, Belanja Barang Jasa BOS dan BLUD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 696.435.484.998,40 atau sebesar 91,97 persen dari alokasi anggaran.



**Tabel 1.9**  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah  
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>757.205.020.613,00</b>	<b>696.435.484.998,40</b>	<b>91,97</b>
2.1	Belanja Barang	147.160.734.755,50	133.782.177.292,90	90,91
2.2	Belanja Jasa	276.485.555.026,50	255.917.855.288,00	92,56
2.3	Belanja Pemeliharaan	48.173.394.763,00	43.176.832.439,00	89,63
2.4	Belanja Perjalanan Dinas	145.145.149.704,00	137.305.873.818,00	94,60
2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.078.430.807,00	11.373.872.874,00	86,97
2.6	Belanja Barang dan Jasa BOS	64.966.098.104,00	54.014.759.143,00	83,14
2.7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.195.657.453,00	60.864.114.143,50	97,86

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

3) Belanja Bunga

Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp. 3.892.510.408,00, dengan realisasi anggaran sebesar 1.469.490.961,00 atau 37,75 persen dari target alokasi anggaran.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik. Realisasi Belanja Hibah Provinsi Gorontalo mencapai Rp. 37.588.548.351,62 atau sebesar 99,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 37.957.390.433,00.



**Tabel 1.10**  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah  
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>4</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>37.957.390.433,00</b>	<b>37.588.548.351,62</b>	<b>99,03</b>
4.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.857.404.000,00	17.842.389.000,00	99,92
4.2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	600.000.000,00	565.245.323,62	94,21
4.3	Belanja Hibah kepada BUMD	80.000.000,00	0,00	0,00
4.4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	18.347.853.355,00	18.108.780.950,00	98,70
4.5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.072.133.078,00	1.072.133.078,00	100,00

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja Bantuan sosial kepada masyarakat baik individu, keluarga, maupun Lembaga Non Pemerintahan. Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebagai berikut Rp. 15.162.999.660,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 13.853.492.071 atau sebesar 91,36 persen. Rincian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah sebagai berikut :



**Tabel 1.11**  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah  
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>5</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>15.162.999.660,00</b>	<b>13.853.492.071,00</b>	<b>91,36</b>
5.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.227.884.160,00	9.007.255.241,00	88,07
5.2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.255.000.500,00	3.254.965.000,00	100,00
5.3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	802.500.000,00	776.511.830,00	96,76
5.4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	877.615.000,00	814.760.000,00	92,84

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

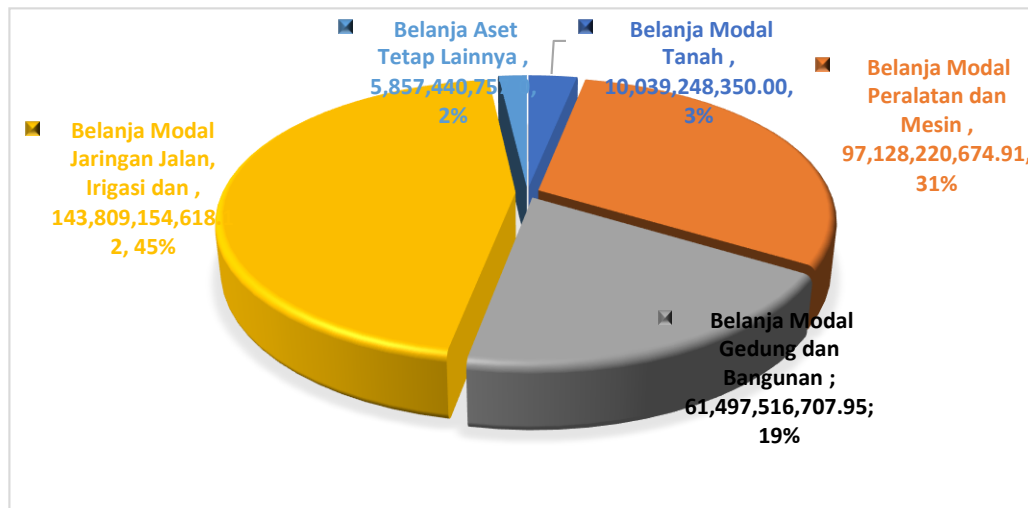
## 2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Alokasi Belanja modal Tahun 2022 mencapai Rp. 382.695.940.984,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 318.331.581.107,98 atau 83,18 %.





**Grafik 1.4**  
Realisasi Komponen Belanja Modal Tahun 2022



Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

Komponen belanja modal tahun 2022 lebih besar pada belanja modal jaringan jalan dan irigasi sebesar 45 persen terhadap total belanja modal dan belanja APBD, diikuti oleh belanja modal peralatan dan mesin sebesar 31 persen, belanja modal Gedung dan bangunan sebesar 19 persen, belanja modal tanah 3 persen dan belanja asset tetap lainnya sebesar 2 persen dari total belanja Modal.

### 3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp. 20.978.895.685,00, dengan realisasi Belanja sebesar Rp. 16.716.126.244,00 atau 79,68%.

### 4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran bagi hasil pendapatan maupun bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota atau bantuan keuangan lainnya.

Belanja bagi hasil Kepada Kabupaten/Kota merupakan belanja yang bersumber dari



pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alokasi belanja transfer Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 211.228.831.571,00 dengan rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 211.094.396.771,00 dengan realisasi sebesar 99,89 persen dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah ke Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp. 1.344.34.800,00 akan tetapi tidak dapat terrealisasi.

**Tabel 1.12**  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
D	<b>Belanja Transfer</b>	<b>211.228.831.571,00</b>	<b>210.857.211.362,00</b>	<b>99,82</b>
1	Belanja Bagi Hasil	211.228.831.571,00	210.857.211.362,00	99,82
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	211.094.396.771,00	210.857.211.362,00	99,89
2	Belanja Bantuan Keuangan	134.434.800,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	134.434.800,00	0,00	0,00

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022

Realisasi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2022 mencapai Rp. 1.958.116.647.401 atau sebesar 94,19 persen dari alokasi anggaran, dengan capaian realisasi fisik sebesar 98,07 persen atau dengan kategori Sangat Tinggi. Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk masing-masing OPD :

**Tabel 1.14**  
Alokasi dan Realisasi Belanja OPD Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2022	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	275.556.058.150	582.214.358.422	517.799.171.874	88,94	100
2	Dinas Kesehatan	103.276.952.286	154.337.251.790	142.396.876.884	92,26	99,94
3	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	77.734.914.041	129.160.944.071	126.339.770.546	97,82	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.038.808.997	258.735.549.782	209.983.215.254	81,16	84,82
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.167.668.576	17.274.069.043	15.907.902.267	92,09	99,55
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	11.354.934.098	10.609.237.574	10.039.368.606	94,63	100



No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2022	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.185.693.475	12.341.281.680	11.983.062.168	97,10	100
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.129.492.571	20.171.788.876	19.902.996.134	98,67	100
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44.926.521.922	25.653.548.061	23.800.982.970	92,78	72,83
10	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	29.144.389.223	30.618.239.268	27.823.531.257	90,87	100
11	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	5.711.822.643	5.687.469.763	5.287.602.036	92,97	98,59
12	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi	23.459.544.160	25.373.790.220	24.825.556.654	97,84	100
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	9.787.458.015	2.498.009.971	11.929.288.072	94,60	100
14	Dinas Pangan	10.188.844.813	11.745.585.345	11.586.723.964	98,65	100
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39.302.456.388	50.918.269.478	48.334.620.564	94,93	100
16	Dinas Perhubungan	11.643.678.711	12.328.622.635	12.204.595.213	98,99	100
17	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	15.822.637.762	23.537.500.798	22.640.094.278	96,19	100
18	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	23.601.777.508	38.167.659.012	36.173.738.155	94,78	98,13
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.863.166.759	10.038.939.304	9.962.687.577	99,24	100
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.568.264.030	48.866.763.551	43.397.036.659	88,81	95,42
21	Dinas Pariwisata	13.014.978.905	16.712.329.911	15.538.186.165	92,97	100
22	Dinas Pertanian	53.549.644.524	76.927.787.736	75.196.902.567	97,75	99,28
23	Biro Hukum	7.705.555.802	7.561.708.690	7.360.658.282	97,34	100
24	Biro Pengadaan	5.287.147.168	5.708.084.516	5.668.196.170	99,30	100
25	Biro Umum	18.947.642.082	21.049.605.281	19.467.735.668	92,49	98,53
26	Pimpinan Sekretariat Daerah	39.478.589.305	37.188.085.566	28.677.977.826	77,12	100,00
27	Badan Penghubung	7.807.096.396	9.728.275.765	9.405.878.429	96,69	100,00
28	Biro Organisasi	6.164.834.080	5.811.117.663	5.482.220.767	94,34	99,94
29	Sekretariat DPRD	83.379.098.142	97.649.086.685	90.331.706.599	92,51	97,50
30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.755.676.289	10.592.401.969	10.131.387.710	95,65	100
31	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	289.196.938.440	329.048.496.940	316.299.684.106	96,13	93,26
32	Badan Kepegawaian Daerah	11.530.530.293	6.044.333.956	5.649.750.191	93,47	96,49



No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD 2022	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17.549.925.934	16.677.580.864	16.167.435.276	96,94	100
34	Inspektorat	18.906.440.281	21.146.649.150	20.420.106.514	96,56	100
	<b>TOTAL</b>	<b>1.475.739.181.769</b>	<b>2.142.124.423.336</b>	<b>1.958.116.647.401</b>	<b>94,19</b>	<b>98,07</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo (Diolah), 2022

Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Adapun alokasi dan realisasi anggaran dan fisik Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

**Tabel 1.15**

Pagu dan Realisasi Fisik Anggaran Standar Pelayanan Minimal

No	Bidang Urusan	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Pendidikan	232.802.726.687,00	223.394.359.181	95,96
2	Kesehatan	2.092.392.311	2.019.418.196	94,55
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.350.033.906	2.153.908.413	93,24
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.369.512.965	1.297.369.487	94,73
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	- Satpol PP Linmas	3.274.353.404	3.253.241.545	99,35
	- BPBD (Kebencanaan)	3.213.445.561	3.137.707.398	97,64
6	Sosial	4.350.903.377	4.242.060.162	97,49
	<b>TOTAL</b>	<b>249.453.368.211</b>	<b>239.498.064.382</b>	<b>96,01</b>

Sumber : Laporan SPM masing-masing OPD Pengampu SPM, Tahun 2022.



Dalam penerapannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil pencapaian indikator SPM sebagaimana Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

**Tabel 1.16**

Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Bidang/ Indikator	Target	Realisasi	% Kinerja	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>				
	- Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang ada disatuan Pendidikan	62.404	50.850	81,49	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>				
	- Pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana Provinsi	45.585 jiwa	45.585 jiwa	100%	
	- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa	8.792 jiwa	8.792 jiwa	100%	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
	- Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAMRegional	-	- 1 Dokumen Rispam - 1 Dokumen Jakstrada AirMinum	N/A	Belum memiliki SPAM Regional
	- Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	Tidak dianggarkan		N/A	Belum Memiliki SPALD Regional Pengelolaan Sanitasi basis Rumah Tangga menjadi kewenangan Kab/Kota



<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				
	- Jumlah unit rumah yang terbangun/rehab bagi korban bencana alam dan dampak pembangunan Provinsi	25 Unit	N/A	N/A	Tidak Terrealisasi karena terkendala penetapan status bencana
<b>5</b>	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				
	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	6 orang	6 orang	100%	
	<b>Kebencanaan</b>				
	- Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	1 dok	1 dok	100%	
	- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 dok	1 dok	100%	
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	2 Lap	2 Lap	100%	
	- Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Logistik penyelamatan dan evaluasi Korban Bencana	100 korban	100 korban		
<b>6</b>	<b>Sosial</b>				
	- Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	6841 org	32 org	0,47	
	- Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	1207 org	969 org	80,28	
	- Jumlah Warga Negara lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial lanjut usia didalam panti	44256 org	23046 org	62,07	
	- Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial didalam panti	0	0	0	
	- Jumlah Warga Negara korban bencana Provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	13279 org	13279 org	100	

Sumber : Laporan SPM masing-masing OPD Pengampu SPM, Tahun 2022.



### **1.3.6 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Pengeluaran Pembiayaan daerah meliputi : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2021, sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2022. Untuk tahun 2022 Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp. 235.787.137.656,00, sedangkan Penerimaan Pinjaman Daerah yang berasal dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi sebesar Rp. 115.725.137.313,00.

Kebijakan Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 ditujukan untuk penyertaan modal daerah kepada Bank Sulutgo sebesar Rp. 10.590.830.014,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebesar Rp. 12.823.554.920,00.



**Tabel 1.17**  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah  
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	% Kenaikan
		Anggaran	Realisasi	%		
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>361.554.840.656,00</b>	<b>351.512.274.969,00</b>	<b>97,22</b>	<b>139.046.607.347,37</b>	<b>152,80</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	235.787.137.656,00	235.787.137.656,00	100	134.277.026.084,37	75,60
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	125.767.703.000,00	115.725.137.313,00	92,01	4.769.581.263,00	2.326,32
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>23.414.383.654,00</b>	<b>23.414.384.934,00</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>134,14</b>
1	Penyertaan Modal Daerah	10.590.830.014,00	10.590.830.014,00	100	10.000.000.000,00	5,91
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.823.553.640,00	12.823.553.640,00	100	-	100
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>338.140.457.002,00</b>	<b>328.097.890.035,00</b>	<b>97,03</b>	<b>129.046.607.347,37</b>	<b>154,25</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>243.346.691.563,63</b>	<b>100</b>	<b>235.787.137.656,04</b>	<b>3,59</b>

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2022 – Unaudited





## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan keuangan atau anggaran daerah disusun berdasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran pembangunan daerah memberikan gambaran kebijakan penganggaran yang diperlukan untuk mendanai pelaksanaan program kegiatan dalam kerangka pembangunan daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2022 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022.

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a) Pendapatan daerah, semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang sah;
- b) Belanja daerah, merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;



- c) Pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022, yang dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya APBD Provinsi Gorontalo terdapat beberapa perubahan sebagai berikut :

- Pertama, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022, dengan pertimbangan bahwa akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 01 tanggal 1 Desember 2021 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, telah disetujui dan disepakati pemberian Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah berupa uang sebesar Rp. 296.307.417.280,00. Selanjutnya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 050/PUPR-SEK/22/1/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Permohonan Penginputan Pinjaman PEN 2021 pada Aplikasi SIPD dan SIMDA-NG 2022. Pertimbangan lainnya yaitu Telaah Direktur RSUD dr. Hasri Aimun Habibie Provinsi Gorontalo Nomor 045/800/RSUD-HAH/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Perihal Permohonan Penganggaran Kembali Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya Melalui Pendanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- Kedua, Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan tanggal 21 April 2022, dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/ SKPD, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang



bersumber dari pergeseran anggaran berdasarkan Surat Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/688/IV/2022 Tanggal 18 April 2022;

- Ketiga, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

Perubahan APBD dilaksanakan sebagaimana ketentuan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan merupakan tindak lanjut dari perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama DPRD. Dasar Perubahan APBD 2022 yaitu keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan penyesuaian-penyesuaian atas capaian target kinerja atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya yang belum terakomodir dalam APBD Induk, serta keadaan lainnya yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.757.290.537.108, bertambah sebesar Rp. 392.095.293.656 menjadi Rp. 2.149.385.830.764 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.757.290.537.108,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 26.847.461.974,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.784.137.999.082,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.739.466.983.468,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 382.811.472.616,00</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 2.122.278.456.084,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembayaran	
- Semula	Rp. 0,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 361.554.840.656,00</u>



Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 361.554.840.656,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
- Semula	Rp. 17.823.553.640,00
- Berkurang	<u>Rp. 5.590.830.014,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 23.414.383.654,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 338.140.457.002,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00,00

Rincian Perubahan APBD dari masing-masing komponen Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, sebagai berikut :

**1. Pendapatan Daerah**

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 446.441.807.108,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 3.692.991.026,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 442.748.816.082,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp. 1.306.608.191.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 29.160.453.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 1.335.768.644.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp. 4.240.539.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 380.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah Perubahan	Rp. 5.620.539.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a. Pajak Daerah	
- Semula	Rp. 376.125.487.471,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 376.125.487.471,00
b. Retribusi Daerah	
- Semula	Rp. 11.098.089.991,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 3.692.991.026,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 7.405.098.965,00



c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
-	Semula	Rp. 5.456.586.737,00
-	Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
	Jumlah HPKD yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 5.456.586.737,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
-	Semula	Rp. 53.761.642.909,00
-	Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
	Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan	Rp. 53.761.642.909,00

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a.	Transfer Pemerintah Pusat	
-	Semula	Rp. 1.306.608.191.000,00
-	Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>29.160.453.000,00</u>
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp. 1.335.768.644.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud, bersumber dari :

a.	Pendapatan Hibah	
-	Semula	Rp. 2.240.539.000,00
-	Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>1.380.000.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 3.620.539.000,00
b.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
-	Semula	Rp. 2.000.000.000,00
-	Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan- peraturan perundangundangan setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00

## **2. Belanja**

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a.	Belanja Operasi	
1.	Semula	Rp. 1.405.414.442.755,00
2.	Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>101.960.345.089,00</u>
	Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp. 1.507.374.787.844,00



b. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 110.498.488.385,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 272.197.452.599,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 382.695.940.984,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 12.459.655.557,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 8.519.240.128,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 20.978.895.685,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp. 211.094.396.771,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 134.434.800,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp. 211.228.831.571,00

Belanja operasi sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	
- Semula	Rp. 652.700.830.506,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 40.456.036.224,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 693.156.866.730,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
- Semula	Rp. 620.116.810.160,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 137.088.210.453,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 757.205.020.613,00
c. Belanja Bunga	
- Semula	Rp. 0,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.892.510.408,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 3.892.510.408,00
d. Belanja Hibah	
- Semula	Rp. 115.924.050.429,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 77.966.659.996,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 37.957.390.433,00



e. Belanja Bantuan Sosial	
- Semula	Rp. 16.672.751.660,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 1.509.752.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 15.162.999.660,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah	
- Semula	Rp. 5.337.673.649,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.288.434.751,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp. 7.626.108.400,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
- Semula	Rp. 28.952.923.391,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 68.829.130.052,00</u>
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp. 97.782.053.443,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
- Semula	Rp. 24.987.689.623,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 56.040.605.953,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung & Bangunan setelah perubahan	Rp. 81.028.295.576,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
- Semula	Rp. 48.258.963.147,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 139.905.706.493,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah perubahan	Rp. 188.164.669.640,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
- Semula	Rp. 961.238.575,00
- Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 7.133.575.350,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 8.094.813.925,00



setelah Perubahan

f. Belanja Modal Aset Lainnya		
- Semula	Rp.	2.000.000.000,00
- Bertambah / (berkurang)	(Rp.)	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp.	0,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

- Semula	Rp.	12.459.655.557,00
- Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>8.519.240.128,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	20.978.895.685,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil		
- Semula	Rp.	211.094.396.771,00
- Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	211.094.396.771,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
- Semula	Rp.	0,00
- Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>134.434.800,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	134.434.800,00

### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>361.554.840.656,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	361.554.840.656,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	17.823.553.640,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>5.590.830.014,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	23.414.383.654,00





Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya		
	- Semula	Rp.	0,00
	- Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>361.554.840.656,00</u>
	Jumlah Sisa Lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	361.554.840.656,00
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	- Semula	Rp.	0,00
	- Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>125.767.703.000,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	125.767.703.000,00

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a.	Penyertaan Modal Daerah		
	- Semula	Rp.	5.000.000.000,00
	- Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>5.590.830.014,00</u>
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp.	10.590.830.014,00
b.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	- Semula	Rp.	12.823.553.640,00
	- Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	12.823.553.640,00

Sesuai peraturan perundang-undangan, diatur pengelolaan keuangan daerah berupa Mandatory Spending yang wajib dialokasikan dengan besaran pesentase tertentu. Tujuan Mandatoy spending diantaranya untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Alokasi anggaran Mandatory Spending, dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji sebagaimana UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Anggaran Infrastruktur dialokasikan 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah berkaitan langsung dengan percepatan



pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Berdasarkan amanah dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dalam penjabaran APBD dan APBD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ketiga komponen Mandatory Spending telah sesuai dan melampaui dari besaran alokasi yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
Alokasi Mandatory Spending dalam APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun 2022

NO	Mandatory Spending	APBD Induk 2022		Perubahan APBD 2022	
		Anggaran	% terhadap APBD	Anggaran	% terhadap APBD-P
1	Pendidikan	539.402.839.723,00	31,01	582.490.659.422,00	27,40
2	Kesehatan	178.267.980.248,00	13,11	262.859.427.336,00	15,30
3	Infrastruktur	270.515.194.514,00	28,20	463.084.973.996,00	48,08

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Evaluasi APBD dan APBD Perubahan 2022.

Keterangan :

- Mandatory Spending Bidang Pendidikan, baik pada APBD Induk maupun perubahan dialokasikan diatas 20% dari APBD Provinsi Gorontalo;
- Dibidang Kesehatan, dalam APBD Induk dialokasikan sebesar 13,11 persen, dan APBD Perubahan sebesar 15,30 % dari Total APBD diluar Gaji sebesar Rp. 1.717.869.492.597;
- Bidang Infrastruktur mencapai dialokasikan sebesar 28,20 % dari total APBD Induk, dan pada APBD Perubahan meningkat dengan besaran 48,08 % dari total APBD Perubahan.

Pokok-pokok perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Dari Sisi Pendapatan, yaitu :

- Penyesuaian besaran pendapatan asli daerah, dimana diperkirakan adanya penurunan dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah sebesar 33



persen khususnya pada pendapatan Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang semua dialokasikan sebesar Rp. 6.731.129.991,00, disesuaikan menjadi Rp. 3.038.138.965,00 atau turun sebesar 55 %, dan Retribusi Jasa Umum dari semula Rp. 7.231.129.991,00, menjadi Rp. 3.538.138.965,00 atau turun 51%.

- Penyesuaian terhadap pendapatan transfer daerah, khususnya pada komponen Dana Insentif Daerah. Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 35.755.763.000,00, atau bertambah dari semula yang dialokasikan sebesar Rp. 8.801.355.000,00.
2. Peruntukan belanja yang bersumber dari Silpa 2021 dan Dana Insentif Daerah, yang difokuskan untuk membiayai beberapa kebutuhan yang belum dialokasikan pada APBD induk yaitu antara lain :
- Tambahan alokasi Gaji dan tunjangan ASN, dan Tunjangan P3K Guru;
  - Honorarium PTT (Bulan November – Desember);
  - Tambahan Belanja Premi Jamkesta;
  - Belanja Operasi BLUD pada RSUD Ainun Habibie;
  - Hibah ke Ormas dan Dukungan Pilkada Serentak 2024;
  - Dukungan anggaran untuk keikutsertaan dalam penyelenggaraan MTQ Nasional pada bulan November 2022)
  - Beberapa program kegiatan prioritas dan strategis serta memiliki tingkat urgensi yang dipandang mendesak dan perlu segera dialokasikan ditahun 2022 seperti Bantuan Modal Usaha Koperasi, UMKM, Pasar Murah, Bantuan IKM, Penambahan anggaran pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan beberapa kegiatan prioritas lainnya.
  - Penambahan anggaran untuk kebutuhan dukungan sarana dan prasarana serta fasilitas kantor, seperti Pemenuhan kebutuhan Ruang Aula Inspektorat, Rehab Kantor Satpol PP dan lainnya.
3. Dari komponen pembiayaan,
- Perubahan pada penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 361.554.840.656,00, dan penerimaan pinjaman daerah yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 125.767.703.000,00, yang belum tercantum pada APBD induk 2022.



- Pada pengeluaran pembiayaan, perubahan pada penyertaan modal daerah yang semula dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000, bertambah menjadi Rp. 10.590.830.014.



**BAB III**

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**3.A Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022**

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022, terdapat 9 Indikator Kinerja Utama Daerah, dengan target dan realisasi kerjanya dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Target Indikator Kinerja Utama  
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator	RPJMD 2017-2022	Target		Realisasi 2022	%	Realisasi Tahun 2021
			RKPD Induk 2022	RKPD Perubahan 2022*			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,27	6,3 – 7,0	4,01 – 5,92	4,04	100,75	2,41
2	Indeks Gini	0,36	0,412-0,391	0,412-0,391	0,423	97,40	0,409
3	Indeks Pembangunan Manusia	69,62	69,62	69,62	69,81	100,27	69,00
4	Persentase Angka Kemiskinan (%)	14,69	14,91 – 14,33	14,91 – 14,33	15,51	96,13	15,41
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,86	4,11-3,91	3,91 – 3,01	2,58	116,67	3,01
6	Inflasi (%)	3,42	2 - 3	2 - 3	5,15	58,25	2,59
7	PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	39,89	39,89	39,89	39,89	100	34,213
8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
9	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	B	80	B
<b>Rata-rata Realisasi</b>						<b>94,39</b>	

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, RKPD Induk 2022, dan RKPD Perubahan 2022.

**1. Pertumbuhan Ekonomi**

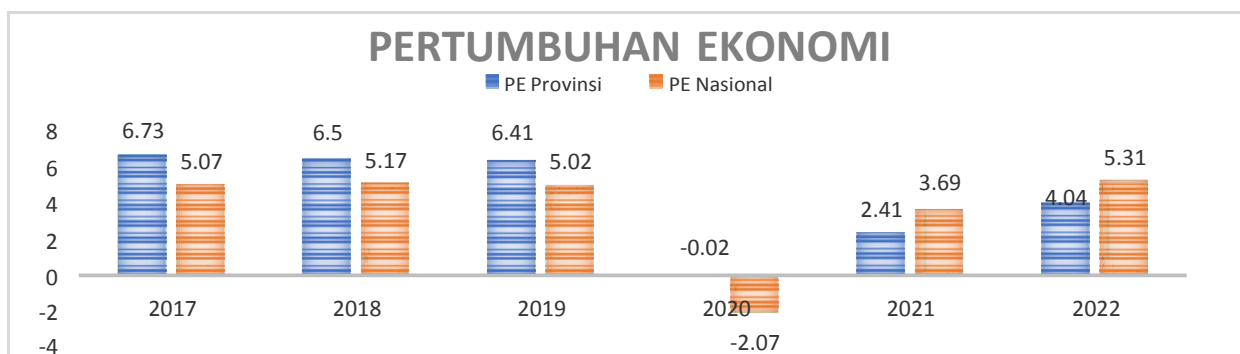
Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,04 %, tercapai 100,75% dari target yang ditetapkan sebesar 4,01-5,92 % tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,41 persen.



**Grafik 3.1**

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional dan Gorontalo 2022

Perekonomian Gorontalo berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp 47.574,43 milyar, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 43.896,37 milyar. Sementara PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2022 mencapai Rp. 30.286,45 milyar meningkat dibanding tahun 2021 sebesar Rp 29.109,96 milyar.

**Tabel 3.2**  
PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		PDRB ADHB			PDRB ADHK		
		2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.188,12	17.085,46	18.073,68	10.481,78	10.665,78	10.909,94
B	Pertambangan dan Penggalian	468,20	483,23	519,28	332,18	339,34	353,96
C	Industri Pengolahan	1799,86	1.936,07	2.169,94	1.172,89	1.235,69	1.331,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,44	22,00	23,96	25,01	25,67	27,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	26,18	26,88	27,76	18,21	18,10	18,49
F	Konstruksi	4.399,36	5.597,26	5.189,74	3.059,83	3.097,66	3.274,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.100,30	5.386,86	6.221,61	3.326,04	3.439,37	3.757,84
H	Transportasi dan Pergudangan	2.245,93	2.325,26	2.668,65	1.551,39	1.578,04	1.693,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964,41	1.008,92	1.076,22	659,74	685,96	720,57
J	Informasi dan Komunikasi	1.145,00	1.184,00	1.286,08	997,07	1.029,70	1.095,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.869,83	2.140,55	2.192,18	1.266,77	1.380,46	1.302,73
L	Real Estate	778,97	756,45	820,71	563,73	543,51	566,46
M,N	Jasa Perusahaan	36,49	37,54	42,80	24,86	25,16	27,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.628,17	2.644,99	2.802,94	2.072,27	2.076,81	2.165,30
P	Jasa Pendidikan	1.974,54	2.018,18	2.125,46	1.328,11	1.360,67	1.415,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.628,89	1.642,18	1.717,14	1.105,94	1.161,38	1.176,97



R,S,T, U	Jasa lainnya	581,08	600,63	616,29	437,30	447,15	448,33
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>41.729,77</b>	<b>43.896,37</b>	<b>47.574,43</b>	<b>28.425,38</b>	<b>29.110,05</b>	<b>30.286,45</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi di hampir semua kategori. Adapun pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Perusahaan sebesar 9,93 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,26 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 7,80 persen. Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2022 (c-to-c), kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,09 persen; diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,84 persen.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,99 persen), hal ini karena potensi pertanian yang dimiliki dan juga program pemerintah dalam penguatan lapangan usaha pertanian seperti peningkatan produktifitas melalui penyediaan bantuan benih padi dan jagung, dan penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan. Berikutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,08 persen dan Konstruksi sebesar 10,91 persen.

**Tabel 3.3**  
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2022 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,63	1,78	2,29	-0,61	0,66	0,84
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,50	2,16	4,31	-0,01	0,03	0,05
C	Industri Pengolahan	1,12	5,35	7,80	0,05	0,22	0,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,71	2,62	6,12	0,01	0,00	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,19	-0,58	2,13	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	-0,17	1,24	5,70	-0,02	0,13	0,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,38	3,41	9,26	-0,16	0,40	1,09
H	Transportasi dan Pergudangan	-4,61	1,72	7,34	-0,26	0,09	0,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,08	3,98	5,04	-0,03	0,09	0,12
J	Informasi dan Komunikasi	7,16	3,27	6,43	0,23	0,11	0,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,46	8,97	-5,63	0,53	0,40	-0,27



L	Real Estate	0,87	-3,59	4,22	0,02	-0,07	0,08
M,N	Jasa Perusahaan	-6,49	1,22	9,93	-0,01	0,00	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,01	-0,03	4,26	0,00	0,00	0,30
P	Jasa Pendidikan	5,17	2,45	4,01	0,23	0,11	0,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,95	5,01	1,34	0,07	0,20	0,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,65	2,25	0,26	-0,08	0,03	0,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>-0,02</b>	<b>2,41</b>	<b>4,04</b>	<b>-0,02</b>	<b>2,41</b>	<b>4,04</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2022 terhadap kumulatif triwulan IV-2021 (c-to-c) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,95 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,45 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,02 persen. Struktur PDRB Gorontalo menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo (61,64 persen).

Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (27,80 persen); Ekspor Barang dan Jasa (26,24 persen); serta Komponen P-KP (18,72 persen). Sedangkan kontribusi Komponen Perubahan Inventori dan Komponen PK-LNPRT relatif kecil, masing-masing sebesar 1,44 persen dan 0,73 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa (sebagai faktor pengurang di dalam struktur PDRB) berkontribusi sekitar 36,56 persen.

**Tabel 3.4**  
Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK  
Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2022

Lapangan Usaha	PDRB ADHB			PDRB ADHK		
	2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.860,27	27.128,56	29.323,23	17.463,23	17.878,94	18.598,13
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	310,49	321,78	349,11	219,13	221,81	231,69
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.246,40	8.679,49	8.903,88	5.272,83	5.411,62	5.418,50
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.691,59	12.383,79	13.225,57	8.474,68	8.714,47	8.874,28
5 Perubahan Inventori	731,45	644,81	685,41	372,74	320,17	327,07
6 Ekspor Barang dan Jasa	10.087,26	11.441,53	12.482,78	6.100,35	6.771,62	7.242,12
7 Impor Barang dan Jasa	15.201,61	16.703,59	17.395,55	9.479,59	10.208,54	10.405,33
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>41.725,90</b>	<b>43.896,37</b>	<b>47.574,43</b>	<b>28.425,38</b>	<b>29.110,05</b>	<b>30.286,45</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara





Dari sisi Pengeluaran Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,95 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,45 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,02 persen. Aktivitas permintaan PDRB sisi pengeluaran masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo (61,64 persen). Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (27,80 persen); Ekspor Barang dan Jasa (26,24 persen); serta Komponen P-KP (18,72 persen). Sedangkan kontribusi Komponen Perubahan Inventori dan Komponen PK-LNPRT relatif kecil, masing-masing sebesar 1,44 persen dan 0,73 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa (sebagai faktor pengurang di dalam struktur PDRB) berkontribusi sekitar 36,56 persen.

**Tabel 3.5**

Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Tahun 2021-2022

No	Komponen	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,10	2,38	4,02	0,06	1,46	2,47
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(1,26)	1,22	4,45	-0,01	0,01	0,03
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(6,84)	2,64	0,13	-1,36	0,49	0,02
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(0,99)	2,83	1,83	-0,03	0,84	0,55
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	(2,45)	10,97	6,95	-0,54	2,35	1,62
7	Impor Barang dan Jasa	(6,89)	7,69	1,93	-2,47	2,56	0,68
❖	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>-0,02</b>	<b>2,41</b>	<b>4,04</b>	<b>-0,02</b>	<b>2,41</b>	<b>4,04</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Pertumbuhan Provinsi Gorontalo didorong oleh pelaksanaan Program Kegiatan yang fokus pada upaya penguatan ekonomi masyarakat, diantaranya :

- Disektor pertanian, perikanan dan kehutanan melalui peningkatan produksi pertanian melalui penyaluran bibit dan benih, peningkatan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kelautan, serta memfasilitasi distribusi pertanian dan perikanan melalui bantuan motor coolbox, fasilitasi layanan jaringan logistik ikan.
- Penguatan sektor UMKM, melalui fasilitasi pemodal, kerjasama, pemberdayaan usaha dan akses pemasaran.
- Peningkatan ekspor dan perdagangan antar pulau.

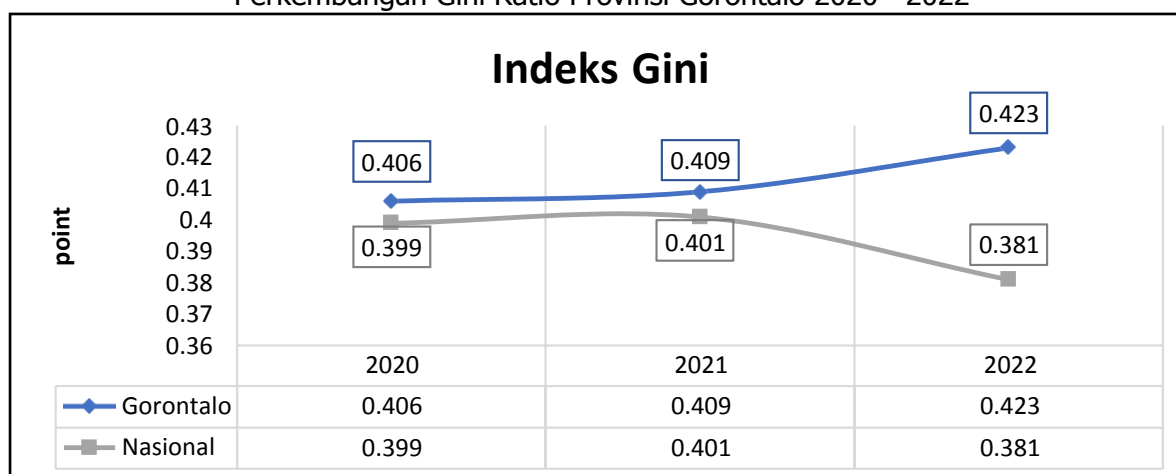


## 2. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo ketimpangan pendapatan yang diukur Indeks Gini tahun 2022 berada pada angka 0,423, masih berada diatas rata-rata Nasional sebesar 0,381. Indeks Gini atau rasio gini Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dan masih berada pada kategori “ketimpangan sedang” atau moderat.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan berada pada angka 0,406. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,409. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan yang tidak signifikan yakni sebesar 0,002 poin dari Gini Ratio sebesar 0,407. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2022 adalah sebesar 0,395, angka ini tidak jauh berbeda dengan Maret 2022. Namun angka tersebut naik sebesar 0,005 poin pada September 2021.

**Grafik 3.2**  
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo 2020 - 2022



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, 2022

Selain Gini Rasio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Tingkat Ketimpangan di bagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di



bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,45 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan sedang. Kondisi ini turun 0,48 poin persen jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 sebesar 16,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan selama periode Maret 2021-Maret 2022 semakin melebar.

Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode September 2021-Maret 2022, diantaranya yaitu berdasarkan data Susenas, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk Gorontalo periode September 2021-Maret 2022 mengalami penurunan mencapai 3,76 persen. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan yang paling besar hingga mencapai 4,06 persen dibandingkan kelompok lainnya. Adapun penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 6,73 persen dan kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 4,24 persen.

### **3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

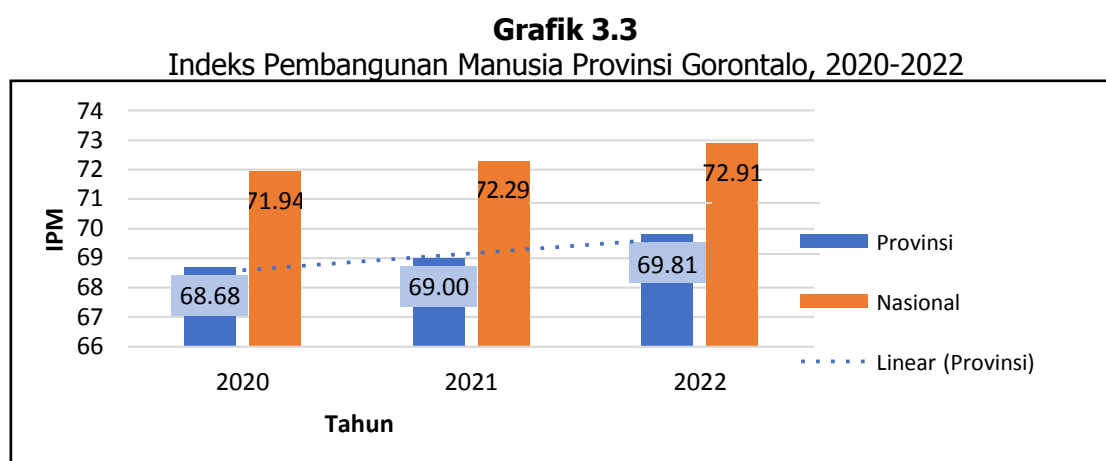
1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (a long and healthy life)  
Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (life expectancy at age)
2. Pengetahuan (knowledge) Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
  - a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
  - b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)



3. Standar Hidup Layak (decent standard of living)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan manusia (IPM) Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan. IPM Gorontalo meningkat dari 68,68 pada tahun 2020 menjadi 69,81 pada tahun 2022 atau dalam kategori “sedang”. Selama periode tersebut, IPM Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,11 persen per tahun.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022

No	Indikator	2021	2022
<b>1</b>	<b>Kesehatan</b>		
	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,19	68,51
<b>2</b>	<b>Pendidikan</b>		
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,11	13,12
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,90	8,02
<b>3</b>	<b>Standar Hidup Layak</b>		
	Pengeluaran perkapita riil disesuaikan	10.157	10.687
	<b>IPM</b>	<b>69,00</b>	<b>69,81</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022



a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Tahun 2022 UHH Provinsi Gorontalo mencapai 68,51 tahun meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 69,19, namun masih lebih rendah dibawah rata-rata Nasional yang mencapai 71,85 tahun. Peningkatan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam peningkatan akses layanan kesehatan melalui Unit Kesehatan perorangan (UKP) dan Unit Kesehatan Masyarakat (UKM).

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Harapan lama sekolah tahun 2022 sebesar 13,11 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,11 tahun atau setara dengan diploma I. Sedangkan Rata-rata lama Sekolah Tahun 2022 meningkat menjadi 8,02 tahun, artinya siswa yang mengenyam pendidikan formal rata-rata 8 tahun atau setara dengan Kelas VII (Sekolah Menengah Pertama).

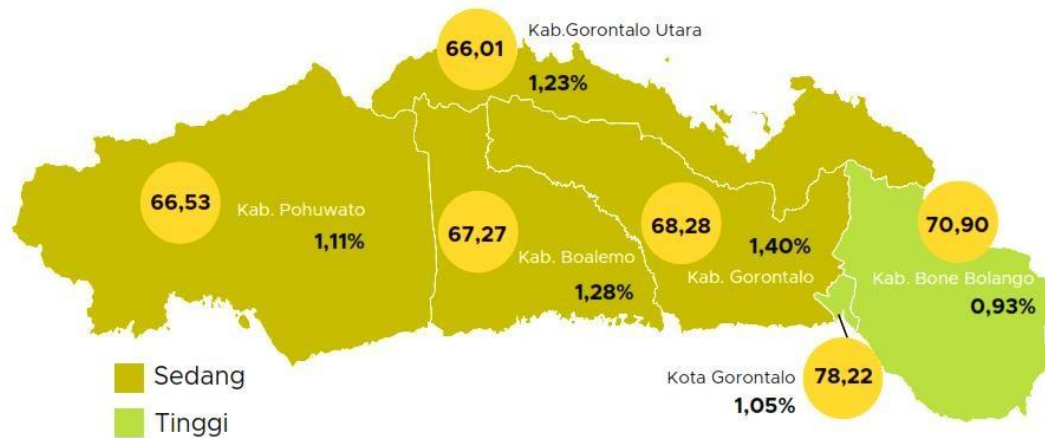
c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Gorontalo mencapai Rp 10,69 juta per tahun. Angka ini meningkat 5,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

IPM Provinsi Gorontalo juga didorong oleh Tingkat IPM di Kabupaten/Kota. Jika dilihat pada tahun 2022, IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 66,01 (Kab. Gorontalo Utara) hingga 78,22 (Kota Gorontalo). Status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota menjadi 4 kabupaten yang berstatus "sedang" dan 2 wilayah (Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango) yang berstatus "tinggi" pada tahun 2022. Sementara Provinsi Gorontalo sendiri masih berstatus "sedang".



**Gambar 3.1**  
 Capaian Indikator Pembangunan Manusia  
 Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022



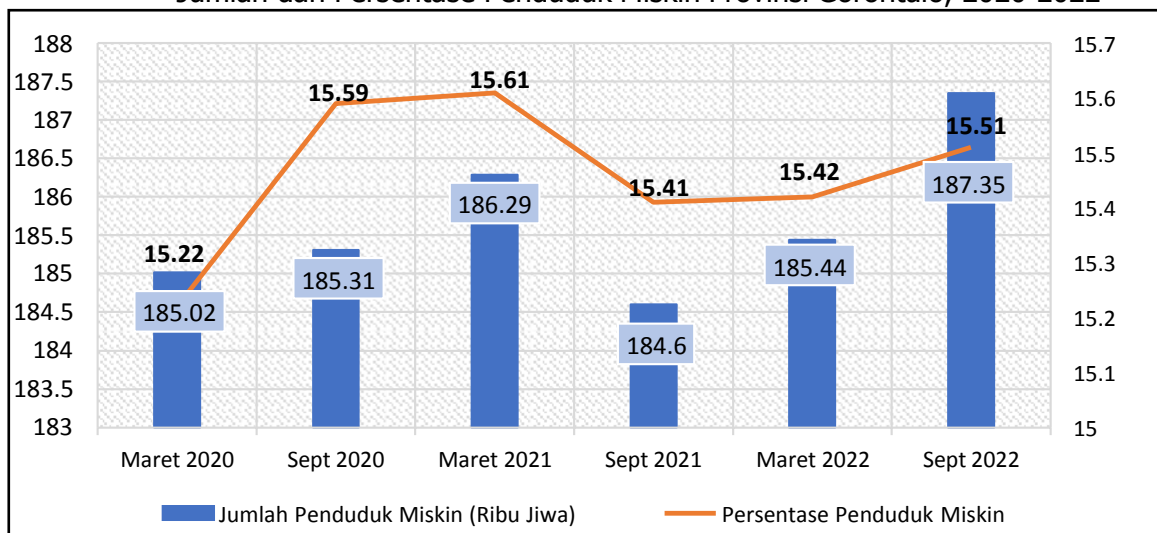
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

#### 4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Secara periodik tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo masih fluktuatif. Tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2022 sebesar 15,52 persen, mengalami peningkatan 0,1 persen dibanding September 2021 dan 0,09 dibanding Maret 2022. Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih jauh diatas rata-rata Nasional sebesar 9,57 persen, dan target dalam RKPD tahun 2022 sebesar 14,91 – 14,33 persen. Sementara, jika dilihat dari jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 187,35 ribu orang. Dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,75 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,06 ribu orang.



**Grafik 3.4**  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal antara perdesaan dan perkotaan terdapat gap yang cukup besar dimana kemiskinan perkotaan sebesar 4,49 persen atau sebanyak 24,40 Ribu orang, sementara di perdesaan sebesar 24,52 persen atau sebanyak 162,95 ribu jiwa. Pada periode September 2021-September 2022, jumlah dan persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen sedangkan di daerah perdesaan juga naik sebesar 0,14 persen.

**Tabel 3.8**

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022

Daerah Tempat Tinggal/Periode	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
<b>Perkotaan</b>		
September 2021	4,06	21,51
Maret 2022	3,97	21,01
September 2022	4,29	24,40
<b>Perdesaan</b>		
September 2021	24,38	163,09
Maret	24,42	164,43
September 2022	24,53	162,95
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>		
September 2021	15,41	184,60
Maret 2022	15,42	185,44
September	15,51	187,35

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021, Maret 2022 dan September 2022



Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh perubahan garis kemiskinan makanan maupun non makanan. Dalam pengukuran angka kemiskinan makro, garis kemiskinan digunakan sebagai besaran / batas untuk mengelompokkan penduduk yang dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah (atau lebih rendah) dari Garis Kemiskinan.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin Provinsi Gorontalo pada September 2022, dipengaruhi oleh adanya peningkatan Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 8,60 persen dibanding September 2021. Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 434.961 perkapita perbulan, naik sebesar Rp 34.457 dibanding September 2021 sebesar Rp. 400.504 perkapita per bulan. Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan yaitu Beras dengan persentase sebesar 25,67 persen di perkotaan dan 27,55 persen di perdesaan. Komoditi lainnya yaitu seperti Ikan, Cabai, telur juga memberikan kontribusi pada kenaikan garis kemiskinan.

Indikator kemiskinan lainnya diukur berdasarkan Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukup berhasilnya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penurunan angka kemiskinan. Meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menyebabkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan. Pada periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 2,850 turun sebesar 0,189 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 3,039, jika dibandingkan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 2,918, nilai ini turun 0,068 poin. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan 0,157 poin dari 0,848 pada Maret 2022 menjadi 0,692 pada September 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,772 nilai ini turun sebesar 0,081 poin.





**Tabel 3.9**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  
Provinsi Gorontalo September 2021 – September 2022

Indikator / Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</b>			
September 2021	0,550	4,792	2,918
Maret 2022	0,317	5,181	3,039
September 2022	0,668	4,634	2,850
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</b>			
September 2021	0,087	1,315	0,772
Maret	0,049	1,477	0,848
September 2022	0,153	1,132	0,692

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021, Maret 2022, September 2022

Salah satu agenda prioritas pembangunan Nasional yaitu percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di bawah US\$1,9 per hari. Dalam laporan Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019) disebutkan bahwa pada 2017, nilai US\$1,9 PPP setara dengan Rp11.941 per kapita per hari, yang untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode tahun yang bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagaimana formulasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Gorontalo sebesar 8,17 persen. Terdapat 3 (tiga) wilayah yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstem di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.



**Tabel 3.10**

Jumlah dan Persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Kemiskinan Ekstrem (%)	Lokus Prioritas (1/0)
Kab. Boalemo	31,63	18,57	6,30	0
Kab. Gorontalo	66,73	17,56	12,27	1
Kab. Pohuwato	28,92	17,62	7,89	1
Kab. Bone Bolango	25,72	15,81	10,46	1
Kab. Gorontalo Utara	19,56	16,88	6,17	0
Kota Gorontalo	12,46	5,59	1,04	0
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>187,35</b>	<b>15,51</b>	<b>8,17</b>	<b>1</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik dan TNP2K (diolah)

Upaya penurunan kemiskinan ini Provinsi Gorontalo terus dilakukan melalui strategi dan kebijakan yang fokus pada program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui :

1. Pemberian bantuan sosial melalui program BLP3G (Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo) sejumlah 45.000 sasaran penerima manfaat di tahun 2022;
2. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 500 sasaran penerima manfaat
3. Pemberdayaan Perempuan kepala keluarga (PEKKA) kepada 200 Kepala Keluarga Perempuan;
4. Pemberian bantuan jaminan kesehatan (PBI) Pemerintah Provinsi dengan jumlah sasaran 89.200 jiwa di tahun 2022;
5. Bantuan motor coolbox 45 unit pada pedagang ikan bersepeda;
6. Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik sejumlah 375 RTS;
7. Pemanfaatan data P3KE dalam rangka pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui upaya koordinasi serta menyusun program kegiatan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Pembangunan database kemiskinan melalui tata kelola Gorontalo Satu Data dari desa sebagai tindak lanjut dari amanat Perpres No.39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia;



9. Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi; Tantangan dalam penanganan kemiskinan yang cukup krusial yaitu terkait updating data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan yang masih jauh dari harapan. Permasalahan keakuratan dan keabsahan data penerima manfaat menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan program kegiatan. Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota hingga pada level kecamatan dan desa masih perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan status kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode September 2021-Maret 2022 antara lain adalah:

- a. Terjadi kenaikan harga BBM sejak awal bulan September sesuai dengan Keputusan menteri ESDM tanggal 3 September 2022 Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 dimana Peralite naik 30,72 persen, Solar naik 32,04 persen, dan Pertamina (non-subsidi) naik 16,00 persen
- b. Selama periode Maret 2022-September 2022, angka inflasi umum Kota Gorontalo tercatat sebesar 3.82 persen. Terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 4,58 persen; kelompok Transportasi sebesar 12,34 persen; kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 4,52 persen.
- c. Nilai Tukar Petani (NTP) kondisi September 2022 tercatat sebesar 103,32, mengalami penurunan dibanding Maret 2022 yang tercatat sebesar 104,44
- d. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan mengalami penurunan dari 100,70 pada bulan Maret 2022 menjadi 97,98 pada bulan September 2022;
- e. Pada September 2022, biaya transportasi umum online dan angkutan umum mengalami kenaikan.

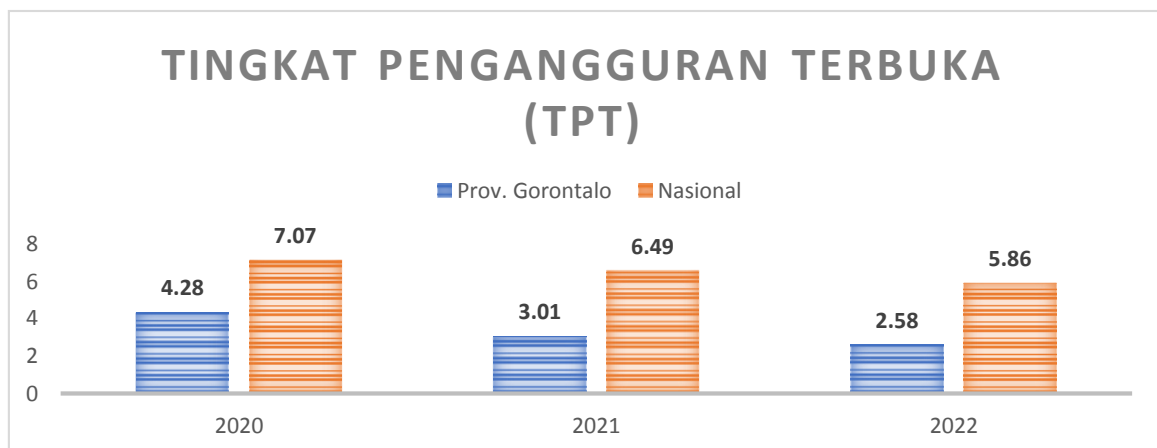
## **5. Tingkat Pengangguran terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo pada Agustus tahun 2022 menunjukkan trend yang



cukup baik yaitu diangka 2,58 persen atau melampaui target sebesar 3,01 persen. TPT Agustus 2022 mengalami penurunan 0,43 persen poin dibandingkan Agustus 2021 sebesar 3,01 persen, dan berada dibawah rata-rata nasional sebesar 5,86 persen.

**Grafik 3.5**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi dan Nasional Tahun 2020 - 2022



Sumber : Sakernas Badan Pusat Statistik, 2022

Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan semakin meningkatnya penduduk usia kerja yang bekerja, mengindikasikan bahwa semakin tinggi daya serap tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa, penduduk usia kerja yang bekerja tahun 2022 sebanyak 614.250 atau naik sebesar 35,421 orang dibandingkan tahun 2021. Sementara jumlah penganggur tahun 2022 sebanyak 16.284, turun sebanyak 1.657 orang dibanding tahun 2021.



**Tabel 3.11**  
Komposisi Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	<b>893.745</b>	<b>905.361</b>	<b>914.951</b>
Angkatan Kerja	593.973	596.968	630.534
Bekerja	568.563	579.009	614.250
Pengangguran	25.410	17.959	16.284
Bukan Angkatan Kerja	299.772	308.393	284.417
Sekolah	67.189	64.609	61.506
Mengurus Rumah Tangga	194.191	200.250	180.088
Lainnya	38.392	44.534	42.823
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>4,28</b>	<b>3,01</b>	<b>2,58</b>
Perkotaan	6,42	4,34	3,52
Perdesaan	2,73	2,01	1,86
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>66,46</b>	<b>65,94</b>	<b>68,91</b>
Laki-laki	83,02	81,60	85,30
Perempuan	49,95	50,41	52,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Berdasarkan wilayah, Tingkat pengangguran perkotaan sebesar 3,52 persen atau lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan sebesar 1,86 persen. TPT di wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing menurun sebesar 0,82 persen poin dan 0,15 persen poin. Sementara jika dilihat dari jenis kelamin, Tingkat pengangguran Laki-laki sebesar 85,30 persen lebih tinggi dibanding TPT perempuan yaitu sebesar 52,64 persen. Akan tetapi TPT laki-laki menurun sebesar 0,77 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 0,13 persen poin.

## 6. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

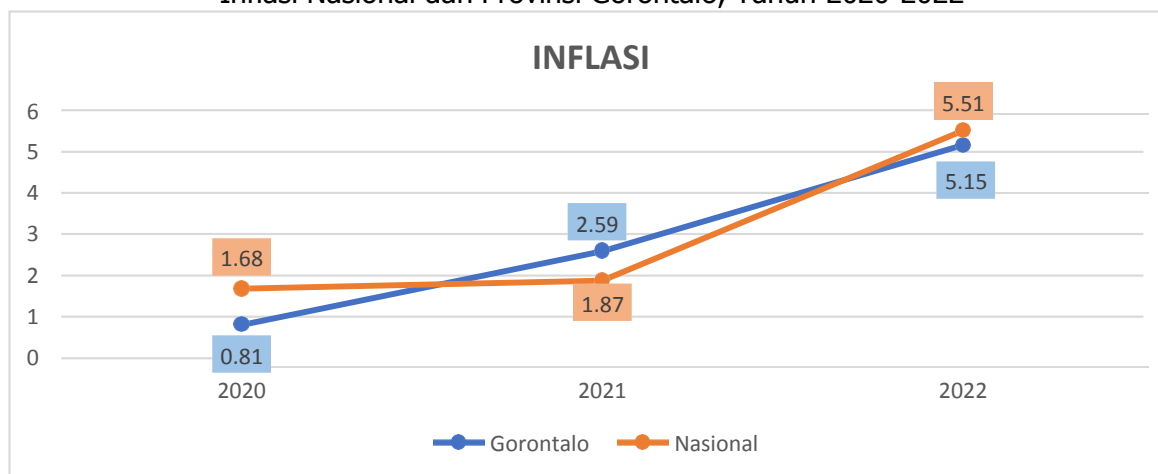
Laju inflasi tahun kalender Provinsi Gorontalo yang dihitung di wilayah Kota Gorontalo pada Desember 2022 dan laju inflasi year on year (Desember 2022 terhadap Desember 2021) masing-masing sebesar 5,15 persen, mengalami kenaikan 2,56 persen poin dibanding posisi tahun 2021. Peningkatan inflasi Provinsi Gorontalo juga seiring dengan peningkatan inflasi secara nasional, yang mencapai 5,51 persen. Hal ini diantaranya sebagai dampak dari



kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, yang berpengaruh terhadap biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan inflasi yang cukup signifikan ditahun 2022.

Secara umum perkembangan inflasi Nasional dan Gorontalo sebagai berikut:

**Grafik 3.6**  
Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Inflasi yoy Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks tertinggi yaitu transportasi sebesar 14,08 persen yang terdampak secara langsung dari kenaikan BBM, selanjutnya kelompok makanan sebesar 6,24 persen. Inflasi komoditas Volatile Foods (VF) didorong oleh meningkatnya harga tomat dan beberapa komoditas ikan tangkap. Kenaikan harga tomat dan beras disebabkan oleh gagal panen akibat cuaca yang kurang kondusif. Selain itu, kenaikan harga BBM pada bulan September 2022 juga menjadi faktor peningkatan harga beras. Sedangkan komoditas ikan mengalami peningkatan harga seiring berkurangnya pasokan akibat cuaca buruk pada beberapa musim disepanjang tahun 2022.

Dalam hal pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang terdiri dari KPw Bank Indonesia, Satgas Pangan, Bulog, dan stakeholder lainnya, dengan melaksanakan berbagai kebijakan diantaranya:

1. Germas Batari (Gerakan Masyarakat Batanam Rica Sandiri), melalui Dinas Pangan Provinsi Gorontalo telah menyalurkan bibit cabai ke kantor-kantor, sekolah, pesantren, kelompok Wanita tani, dan lainnya sebanyak 39.816 bibit;



2. Program Bazar Pangan Murah yang dilaksanakan dengan anggaran DAU Rp. 36.640.000,00 dan DID Rp. 497.200.000,00;
3. Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo; sudah dilaksanakan dengan anggaran DID sebanyak Rp.4,4 miliar, DAU sebanyak Rp496 juta, BTT sebanyak Rp1 miliar;
4. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait Pengendalian Inflasi Daerah untuk komoditas cabai rawit;
5. Pelaksanaan MoU secara B to B antara Cindy (Kota Gorontalo) dan UD. Rebi (Kota Makassar) terkait Perdagangan Dalam Penyediaan Komoditas Bawang Merah.

## **7. PDRB Perkapita**

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, PDRB Perkapita Tahun 2022 mencapai Rp. 39,89 Juta atau senilai dengan 2.686,36 US\$. PDRB Perkapita meningkat 7,31 % dibanding tahun 2021. Tahun 2022 PDRB perkapita mencapai atau sama dengan target yang ditetapkan sebesar 39,89 Juta Rupiah.



**Tabel 3.12**  
 Nilai PDRB Perkapita ADHB Provinsi Gorontalo

Uraian	2020	2021	2022
Nilai (Rupiah)	35.693.264,29	37.170.549,65	39.886.776,66
Nilai (US\$)	2.452,16	2.597,75	2.686,36
Persentase kenaikan	4,33%	4,14%	7,31%

Sumber data BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

## 8. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam hal pengelolaan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menjaga akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP memberikan gambaran terhadap tata kelola Pemerintahan yang baik dari segi pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

## 9. Indeks Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan perbaikan dan perubahan tata kelola pemerintahan melalui perubahan pola dan budaya kerja yang menjadi sasaran delapan area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi 2010-2025. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) disebutkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 66,33 persen, meningkat dibanding capaian RB tahun 2020 sebesar 63,36 %.

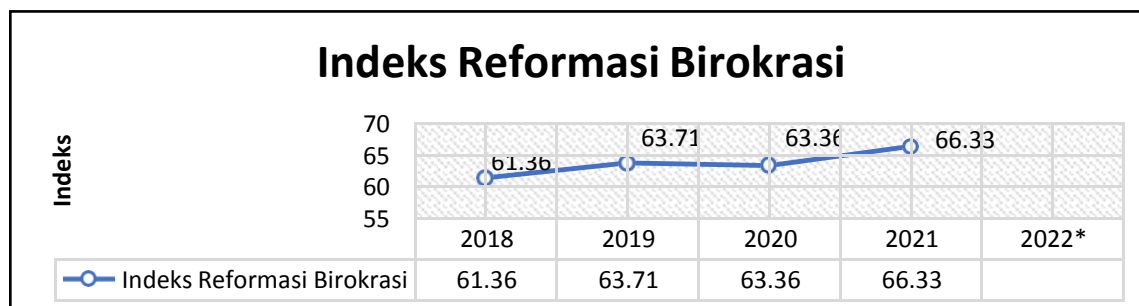




Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada Komponen pengungkit yang terdiri dari unsur pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan Reform dengan capaian sebesar 34,95% atau meningkat 4,16 persen poin dibanding tahun 2021. Sementara untuk komponen hasil mengalami penurunan dari 32,57 persen tahun 2021 menjadi 31,38 persen ditahun 2022. Komponen hasil terdiri dari Akuntabilitas kinerja dan keuangan meningkat 0,02 persen menjadi 7,76 persen, sementara komponen lainnya yaitu kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih, dan kinerja organisasi mengalami sedikit penurunan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

**Grafik 3.7**

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022



Sumber : Kemenpan-RB 2021  
 \*Data 2022 belum di rilis

Berdasarkan indikator antara penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, pada beberapa indikator menunjukkan kinerja yang cukup baik seperti Indeks Merit sistem yang mengalami peningkatan menjadi 260 atau dengan kategori Baik. Namun demikian untuk beberapa indikator lainnya dinilai masih belum optimal diantaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengalami penurunan dari 2,51 menjadi 2,48 tahun 2022.



**Tabel 3.13**

Indikator Antara Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	260 (Baik)*	Komisi ASN
2	Kualitas Kebijakan	0-100	36,11	Lembaga Administrasi Negara
3	ASN Profesional	0-100	31,27 (Sangat Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1-5	2,48 (Cukup)*	Kementerian PAN/RB
5	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0-100	82,14	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
6	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,06	Kementerian PAN/RB
7	Kapabilitas APIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	Maturitas SPIP	0-5	3 (terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	67,58	Ombudsman RI
10	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	62,48 (Baik)	Arsip Nasional RI

Sumber Data : LHE RB – 2022 (update) - \*data 2022

Perbaikan tata Kelola pemerintahan dan sistem manajemen dalam kerangka reformasi birokrasi berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (outcome), yang diukur melalui penyelenggaraan SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi KemenPAN-RB, Akuntabilitas kinerja Provinsi Gorontalo Tahun 2021 masih berada pada kategori "B" dengan



nilai sebesar 67,63 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 68,05 persen. Untuk Penilaian SAKIP Tahun 2022 belum dirilis.

**B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PER URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2022**

**I. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**

**1. Pendidikan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo**

- Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus
- Peningkatan kualitas tata Kelola administrasi, SDA dan sarana prasarana

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.14**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan akses layanan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus	Indikator Sasaran : Presentase APK SM	96.50%	105.38%	95.83%	98.86%	109.20%
		Persentase APM SM	78.00%	81.49%	77.63%	77.75%	104.47%
		Rasio siswa perkelas SM (1:32)	1:29 siswa	1:29 siswa	1:29 Siswa	1:24 Siswa	100%
Program Pengelola Pendidikan	Persentase APK Dikus	96.50%	138.68%	95.83%	98.86%	143.71%	
	Persentase APM Dikus	78.00%	100%	77.63%	77.75%	128.21%	
2	Sasaran : Meningkatkan mutu layanan dan lulusan pendidikan menengah dan Dikus	Indikator Sasaran : Persentase SM dan DIKSUS menyelenggarakan pendidikan karakter sesuai tuntutan ketrampilan abad 21	27.42%	100%	27.42%	100%	364.70%
		Rata-rata lama sekolah	7.90%	8.02%	7.70%	7.90%	101.52%
		Indeks Integritas UN Siswa	-	-	74.60%	-	-
		Persentase prestasi Siswa Non Akademik	2%	-	2%	4.2%	-
		Persentase Warga Belajar Dikus terlayani di sekolah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rata-rata nilai siswa minimal 6	-	-	-	-	-
		Rasio guru persiswa (1 : 15)	(1:15) Siswa	(1:15) Siswa	(1:19) siswa	(1:22) siswa	100%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	
	Jumlah GTK Yang Dibina	4.093	4.093	2.645	4.798	100%	



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
3	<b>Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dikbudpora</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - Bantuan dan kerjasama/ penerima bantuan Beasiswa	-	-	3 Jenis	3 Jenis	-
		- Dokumen Perencanaan, pendataan, Monitoring evaluasi dan Pelaporan	6 Jenis	15 Jenis	6 Jenis	15 Jenis	250%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	71.68%	71.68%	75.00	71.30	100%
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
4	<b>Sasaran : Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi, SDA dan Sarana Parasarana</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> <b>Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja (Pelayanan Administrasi/ Jasa, Sarana prasarana perkantoran dan SDA)</b>	<b>A</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	-	<b>BB</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.15**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>321.265.433.444</b>	<b>278.771.647.977</b>	<b>86.77</b>	<b>100</b>	<b>99.21</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	981.963.029	977.865.061	99.58	100	99.62	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	308.007.275.228	270.992.410.812	87.98	98.67	99.36	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.498.000	111.262.994	99.79	100	90.54	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.439.888.695	1.185.302.281	18.41	18.48	98.77	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.724.808.492	5.504.806.829	96.16	100	87.20	100
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>245.019.441.049</b>	<b>223.231.721.833</b>	<b>91.11</b>	<b>100</b>	<b>92.25</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	126.530.064.919	114.358.644.399	90.38	100	92.96	100
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	103.760.263.685	95.714.266.723	92.25	100	87.34	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	14.729.112.445	13.158.810.711	89.34	100	-	-
<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>	<b>93.999.931</b>	<b>86.308.549</b>	<b>91.82</b>	<b>99.26</b>	-	-
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	93.999.931	86.308.549	91.82	99.26	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>566.378.874.424</b>	<b>502.166.007.158</b>	<b>88.66</b>	<b>100</b>	<b>95.68</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output : tersusunnya dokumen Renstra, Renja, DPA, RKA, LKPJ, LPPD, Sakip, Profl Pendidikan, Perjanjian Kinerja, Data Sektor, Cascading, Rencana Aksi, Buku Saku, Kalender Pendidikan, Dokumen e-Monev.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output : Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan bagi 2.369 PNS terdiri dari 214 PNS Dinas Dikbudpora dan 2.155 PNS Satuan Pendidikan.

- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Output : adalah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Bulanan Triwulan dan Semesteran.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output : Jumlah PNS yang mengikuti (Pendidikan dan pelatihan).

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : meningkatnya Prasarana Perkantoran yang memadai dalam pelaksanaan tugas ASN.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Output : Jumlah pelayanan jasa administrasi perkantoran Dinas Dikbudpora.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Outcome dari program adalah terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah.

Output : terbangunnya 1 (satu) ruang di Sekolah SMAN 1 Suwawa.

- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula.

Output : terbangunnya 4 (empat) ruang di Sekolah SMAN 1 Kabila, SMA N 1 Lemito, SMAN 2 Limboto dan SMAN 2 Paguyaman Pantai.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas.

Output : jumlah peserta didik SMA yang menerima biaya personil peserta didik.

- ✓ Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.

Output : terlaksananya lomba-lomba peserta didik tingkat Nasional antara lain Debat Bahasa, FLS2N, KOSN, KSN dan LKSN.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Output : jumlah guru tidak tetap 666 orang, PTT SMA Non S1 139 orang, PTT SMA S1 175 orang dan PLK SMA 161 orang.

- ✓ Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Output : penerima beasiswa guru sebanyak 12 orang.

- ✓ Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas.

Output : jumlah sekolah menengah atas sederajat yang dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sebanyak 136 Satuan Pendidikan.

- ✓ Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru.

Output : terbangunnya 9 (sembilan) ruang di MA Al-Khairaat Gentuma, SMAN 1 Biluhu, SMAN 1 Tibawa, SMAN 1 Marisa, SMAN 1 Kabila, SMAN 1 Dulupi, SMAN 5 Gorontalo Utara, SMAN 1 Pulubala, SMAN 1 Hulonthalangi.



- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.  
Output : terbangunnya 2 (dua) ruang di SMAN 7 Gorontalo Utara, SMAN 9 Gorontalo Utara.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi.  
Output : terbangunnya 2 (dua) Ruang di SMAN 1 Biluhu dan SMAN 1 Tolangohula.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika.  
Output : terbangunnya 2 (dua) Ruang di SMAN 5 Gorontalo Utara dan SMAN 1 Paguyaman Pantai.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia  
Output Sub Kegiatan : terbangunnya 2 (dua) Ruang di SMAN 9 Gorontalo Utara dan SMAN 3 Wonosari.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  
Output Sub Kegiatan : terbangunnya 8 (delapan) Ruang di SMAN 1 Wonosari, SMAN 1 Randangan, SMAN 6 Gorontalo Utara, SMAN 5 Gorontalo Utara, SMAN 4 Gorontalo Utara, SMAN 1 Tolangohula, SMAN 1 Paguyaman Pantai, SMAN 9 Gorontalo Utara.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah  
Output : terbangunnya 8 (delapan) Ruang SMAN 1 Asparaga, SMAN 2 Gorontalo Utara, SMAN 9 Gorontalo Utara, SMAN 10 Gorontalo Utara, SMAN 1 Paguyaman SMAN 3 Wonosari, SMAN 1 Pulubala, SMAN 1 Kabila. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah.  
Output : terbangunnya 7 (tujuh) ruang di SMAN 1 Biluhu, SMAN Tolangohula, SMAN 1 Asparaga, SMAN 1 Pulubala, SMAN 1 Popayato Barat, SMAN 4 Gorontalo Utara, SMAN 3 Wonosari.
- ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  
Output : terbangunnya 8 (delapan) Ruang di SMAN 3 Gorontalo, SMAN 1 Tibawa, SMAN 1 Tolangohula, SMAN 1 Lemito, SMAN 1 Randangan, SMAN 1 Paguyaman, SMAN 1 Tilamuta, SMAN 1 Wonosari.
- ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  
Output : terbangunnya 6 (enam) Ruang di SMAN 1 Telaga, Ruang Guru SMAN





- 1 Marisa, SMAN 1 Wonosari, Tata Usaha SMAN 1 Marisa, SMAN 1 Wonosari.
- ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang di SMAN 1 Kabila.
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia.  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang di SMAN 1 Telaga.
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang di SMAN 1 Telaga.
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium.  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang di SMAN 3 Gorontalo.
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Asrama Sekolah.  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang di SMAN 7 Gorontalo Utara
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.  
Output : terbangunnya 4 (empat) ruang rehab jamban SMAS Muhammadiyah Gorontalo, rehab ruang ibadah SMAS Muhammadiyah Gorontalo, SMAN 1 Marisa, SMAN 1 Paguat.
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah.  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang SMAN 1 Kabila.
  - ✓ Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.  
Output : terpenuhinya Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA.
  - ✓ Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas.  
Output : tersalurnya dana BOS di satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- ✓ Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.  
Output : terpenuhinya Pengadaan Peralatan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.
  - ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (KURIKULUM).  
Output : jumlah peserta didik SMA yang menerima biaya personil peserta didik.
  - ✓ Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK (PESERTA DIDIK).



Output : terlaksananya lomba-lomba peserta didik tingkat Nasional antara lain FLS2N, LKS, KOSN, Penguatan Pendidikan Karakter.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.  
Output : jumlah guru tidak tetap 630 orang, TAS SMK Non S1 96 orang, TAS SMK S1 96 orang dan PLK SMK 117 orang.
- ✓ Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.  
Output : jumlah penerima beasiswa guru sebanyak 18 orang.
- ✓ Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah.  
Output : terbangunnya Ruang Kelas.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Praktik Siswa.  
Output : terbangunnya RPS.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Laboratorium.  
Output : terbangunnya 2 (dua) ruang SMKN 1 Boalemo, SMKN 1 Pulubala.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  
Output : terbangunnya 34 (tiga puluh empat) ruang.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah.  
Output : terbangunnya 2 (dua) Ruang SMKN 1 Botumoito, SMKN 1 Bulango Selatan.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.  
Output : Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja  
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.
- ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah.  
Output : terbangunnya 3 (tiga) ruang SMKN 1 Gorontalo, SMKN 1 Paguyaman, SMKS Parawisata Bubohu.
- ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU  
Output : terbangunnya 3 (tiga) ruang Tata Usaha SMKN 1 Paguyaman, Ruang Kepala Sekolah SMKN 1 Paguyaman dan Ruang Guru SMKN 1 Paguyaman.
- ✓ Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan.  
Output : tersalurnya dana BOS di satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).



- ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa.  
Output : Pemeliharaan Gedung Bangunan, Gedung Tempat Kerja, Gedung Tempat Pendidikan.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus
  - ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus.  
Output : jumlah guru tidak tetap 139 orang, TAS SLB Non S1 12 orang, TAS SLB S1 13 orang, PLK SLB 24 orang dan Instruktur 11 orang.
  - ✓ Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah.  
Output : terbangunnya 10 (sepuluh) ruang SLB Sentra Pk-Lk Slb Negeri Kabupaten Gorontalo, SLB Negeri Bonepantai, SLB Negeri Kota Gorontalo, SLB Negeri Pohuwato, SLB Negeri Gorontalo Utara, SLBN Paguyaman, Ruang Pembelajaran Khusus SLBN Bonepantai, Ruang Pembelajaran Khusus SLBN Pohuwato, Ruang Pembelajaran Khusus SLBN Boalemo.
  - ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.  
Output : terbangunnya 5 (lima) ruang Guru SLBN Paguyaman, Ruang Guru SLBN Pohuwato, Ruang Tata Usaha SLBN Kab. Boalemo, Ruang Tata Usaha SLBN Bonepantai, Ruang Tata Usaha SLBN Pohuwato.
  - ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang UKS SLBN Gorontalo Utara.
  - ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Kantin Sekolah.  
Output : terbangunnya 2 (dua) ruang SLBN Bonepantai, SLBN Pohuwato.
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang SLB Sentra Pk-Lk Slb Negeri Kabupaten Gorontalo.
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.  
Output : terbangunnya 1 (satu) ruang Rehab Jamban SLB Sentra Pk-Lk Slb Negeri Kabupaten Gorontalo.
  - ✓ Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.  
Output : terpenuhinya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.
  - ✓ Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus.  
Output : tersalurnya dana BOS di satuan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus (DIKSUS).



3. Program Pengembangan Kurikulum

Outcome dari program adalah terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

- ✓ Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.

Output : Presentase Angka Partisipasi Sekolah.

**3) Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan :**

1. Program Pengelolaan Pendidikan :

- Terdapat kegiatan SMK yang sangat penting untuk pengembangan SMK Vokasi yaitu Penyelarasan Kurikulum SMK dengan Dunia Usaha, Industri dan Dunia kerja yang tidak teranggarkan pada APBD Tahun 2022.
- Kegiatan lomba-lomba peserta didik masih dilaksanakan secara Daring sehingga ada beberapa belanja yang di revisi dan tidak terpakai.
- Anggaran yang terbatas.
- Ada beberapa kegiatan yang tidak ada anggarannya.

**Solusi :**

- Perlu di Programkan Program Kegiatan tersebut pada APBD-P untuk menunjang Program Pendidikan Vokasi SMK di Provinsi Gorontalo.
- Kegiatan lomba-lomba peserta didik dilaksanakan secara luring atau tatap muka.
- Anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Khusus Indikator Kinerja Tahun 2022**

**Tabel. 3.16**

Indikator kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan  
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Rata-rata Lama sekolah	7.90%	8.02%	7.70%	7.90%
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah	78.00%	81.49%	77.63%	77.75%
3	Rasio Guru Persiswa (1:15)	(1:15) Siswa	(1:15) Siswa	(1:9 siswa)	(1:22 siswa)
4	Persentase layanan Pendidikan khusus bagi penduduk berkebutuhan khusus	1.290 Siswa	100%	100% (1.033 siswa)	100%



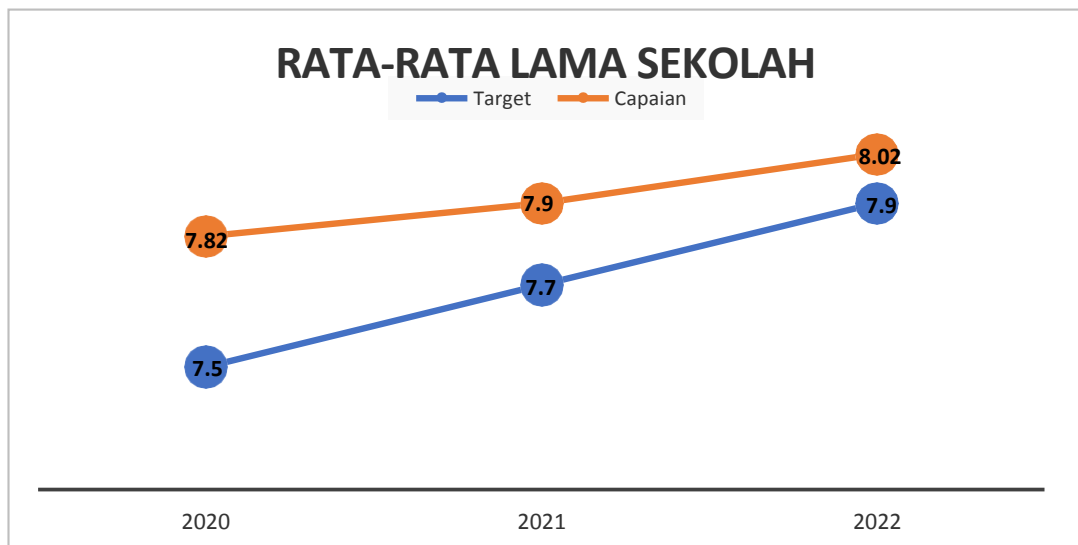
**5) Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan**

a. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan Rata-rata umlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan, tahun 2022 mencapai 8,02 tahun berada diatas target sebesar 7,9 tahun. Namun demikian angka ini berada dibawah rata-rata nasional sebesar 8,69 tahun.

**Grafik 3.8**

Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

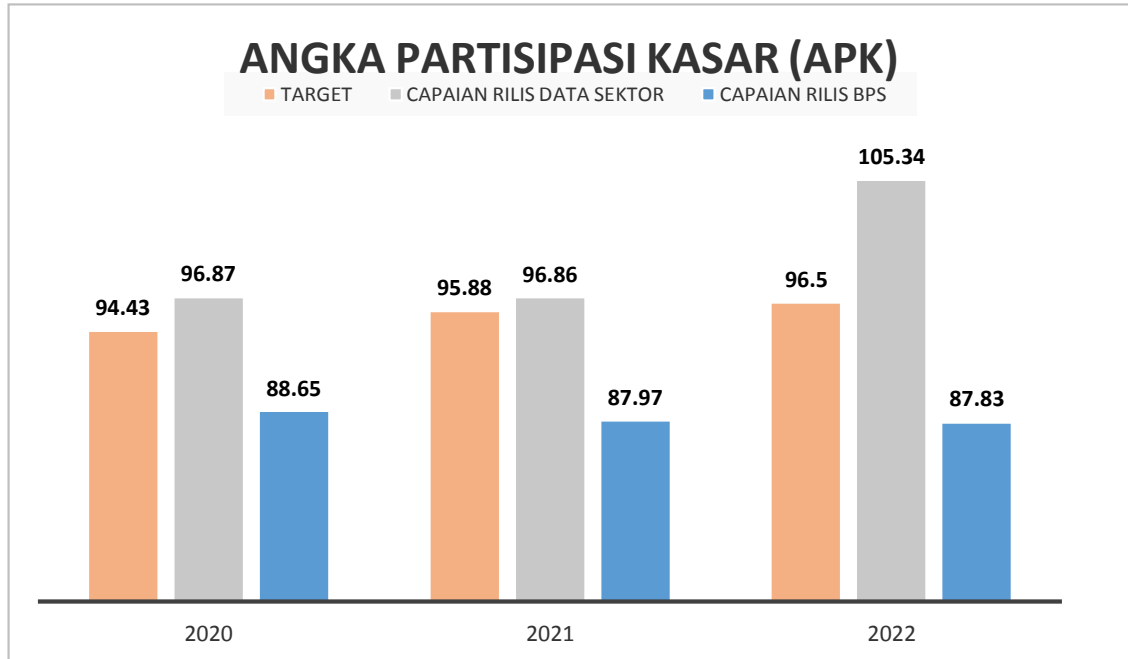
b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Tahun 2022, sesuai data Dinas Pendidikan sebesar 105,34 persen meningkat dibanding tahun 2021, sedangkan berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo APK SMA/SMK/MA sederajat Tahun 2022 sebesar 87,83 persen mengalami penurunan 0,14 persen poin dibanding tahun sebelumnya.



**Grafik 3.9**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022



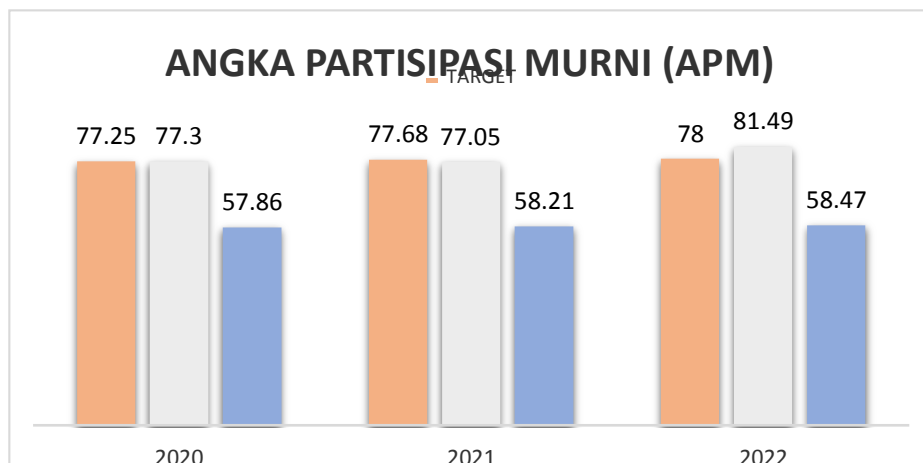
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2022

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

**Grafik 3.10**

Angka Partisipasi Murni Provinsi Gorontalo 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2022



Sebagaimana grafik diatas bahwa sesuai rilis data BPS provinsi Gorontalo selang tahun 2020-2022 terjadi peningkatan Angka Partisipasi Murni menjadi 58,47 persen, dan berdasarkan data Dinas Pendidikan sebesar 81,49 persen. Angka ini melampaui target sebesar 78%.

Jika dilihat dari data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan 0,38 yakni tahun 2021 sebesar 71,30 naik menjadi 71,68 Tahun 2022.

#### **6) Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2022**

- Peringkat V pada Lomba FLS2N Menyanyi Solo, siswa SMKN 1 Gorontalo
- Peringkat V pada Lomba LKS FARMASI, Siswa SMKS Kesehatan Bakti Nusantara
- Peringkat V pada Lomba LKS Elektronika, Siswa SMKN 1 Gorontalo
- Peringkat VI pada Lomba LKS Kabel Jaringan Komputer Informasi, Siswa SMKN 1 Gorontalo
- Peringkat VI pada Lomba LKS Teknik Pemasangan Batu, Siswa SMKN 1 Gorontalo

#### **7) Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2022**

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Yayasan Pendidikan Islam Dwiwarna tentang Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Gorontalo.

NOMOR:420/DIKBUDPORA/494.c/II/2020

NOMOR:05/KU/YPID/II/2020

- Nota Kesepahaman Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dengan MAN Insan Cendekia Gorontalo tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Di Provinsi Gorontalo melalui Program Peningkatan Potensi Siswa.  
Nomor : 420/Dikbudpora/7271/P.SMA & DIKSUS/2022
- Nota Kesepahaman Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dengan SMA Terpadu Wirabhakti Gorontalo tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Di Provinsi Gorontalo melalui Program Peningkatan Potensi Siswa.  
Nomor : 420/Dikbudpora/927.h/P.SMA & DIKSUS/2022

**2. Kesehatan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.17**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan.</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - <b>Persentase Persalinan di fasyankes</b>	88%	92%	87%	86%	104.55
		- <b>Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik</b>	2%	4.7%	2%	6.60%	50%
	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	82%	82%	81%	73.60%	100%
		Presentase Kunjungan Bayi	93%	101.5%	92.5%	54.20%	109.14%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dan CSR	80%	83%	75%	83%	103.75%
		Persentase Kabupaten Kota yang 40% desa/ kelurahannya melaksanakan STBM	6%	6%	6%	5%	100%
	2	<b>Sasaran : Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak menular dan Masalah Kesehatan Jiwa</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - <b>Angka prevalensi Tuberkulosis (Tb) per 100.000 penduduk</b>	244	291	244%	208%
- <b>Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%)</b>			0.05%	0.0016%	0.05%	0.00016%	100%
- <b>Persentase Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)</b>			35%	90%	35%	25%	61%
- <b>Prevalensi tekanan darah tinggi</b>			27%	50.5%	27%	42%	53.4%
- <b>Prevalensi kegemukan dan obesitas pada</b>			33%	27.7%	33%	30%	122%





No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
		<b>penduduk usia 18+ tahun</b>					
		- <b>Persentase FKTP yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sesuai standar</b>	<b>60%</b>	<b>88%</b>	<b>60%</b>	<b>88%</b>	<b>146.67%</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	93%	79%	93%	78.95%	84.95%
		Persentase angka kasus HIV yang diobati	94%	93%	94%	95%	98.94%
		Persentase anak usia (0-11 bulan) yang mendapat imunisasi dasar lengkap	90%	85%	80%	79%	94.44%
		Persentase Jumlah kasus KLB/Wabah yang ditangani < 1 x 24 jam	100%	99%	100%	90%	99%
		Persentase Kab/Kota memiliki puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan haji	100%	100%	100%	82%	100%
		Persentase Kabupaten Kota yang 80% Puskesmasnya melaksanakan pengendalian PTM terpadu	70%	33%	60%	44%	101%
		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah	70%	83.30%	60%	83.30%	119%
		Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100%	100%	100%	88%	100%
<b>3</b>	<b>Sasaran : Tersedianya akses dan mutu pelayanan kesehatan</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>99%</b>
		- <b>Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang tersertifikasi Nasional</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>
		- <b>RS Kab/Kota yang tersertifikasi akreditasi nasional</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>
		- <b>Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Jamkesta/Jamkesta</b>	<b>205.000</b>	<b>89.200</b>	<b>205.584</b>	<b>92.415</b>	<b>100%</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah FKTP yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Permenkes 75/2014	93%	92%	93%	80%	99%
		Persentase fasyankes menyelenggarakan	100%	91%	83.3%	89.0%	91%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
		Kesehatan Tradisional					
		persentase Rumah Sakit Kabupaten Kota yang memenuhi Sarana Prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	66%	72.7%	66%	72.73%	110.15%
		Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya	6%	6%	100%	100%	100%
		Persentase capaian Retribusi Labkesda	100%	119%	100%	79.20%	119%
		Persentase Sarana Prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	100%	100%	-	-	100%
		Layanan Kelas RS meningkat dari Kelas D ke C	100%	100%	-	-	100%
		Peningkatan Retribusi RS	100%	102%	-	-	102%
		Penduduk yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	240.000	240.000	-	-	100%
<b>4</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan yang merata</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - <b>Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>98%</b>
		- <b>RS kabupaten/kota kelas C dan D yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
		- <b>Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>129.87%</b>
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang sudah memiliki pemetaan perencanaan dan distribusi nakes di FKTP	100%	100%	80.6%	100%	100%
		Persentase Rumah Sakit yang sudah memiliki pemetaan perencanaan dan distribusi nakes	70%	70%	60%	100%	100%
		Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	73%	62%	70%	84.31%	84.93%
<b>5</b>	<b>Sasaran : Terwujudnya Kinerja Aparatur Dikes yang Profesional dan</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>75%</b>	<b>76%</b>	<b>72%</b>	<b>73%</b>	<b>101.33%</b>



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	<b>Berkinerja Tinggi</b>						
		- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Kesehatan	90%	91%	89%	87%	101.11%
		- Persentase temuan pemeriksaan dari total anggaran	0%	0%	0%	0%	0%
		- Tingkat penyerapan anggaran	96%	91.6%	95%	88.26%	95.42%
	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	5%	5%	5%	5%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.18**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>53.697.362.774</b>	<b>48.230.512.083</b>	<b>89.82</b>	<b>100</b>	<b>95.0</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.349.593.032	2.200.874.636	93.67	100	83.5	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	1.063.225.947	1.003.003.193	94.34	100	87.2	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	581.598.000	508.987.103	87.52	100	75.9	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD Ainun Habibie)	704.769.085	688.884.340	97.75	100	97.1	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.953.454.923	34.242.317.248	87.91	100	98.2	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dikes dan RS Ainun)	38.013.178.203	33.316.859.918	87.64	100	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Kesehatan)	219.848.000	219.577.034	99.88	100	99.7	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (RSUD Ainun Habibie)	720.428.720	705.880.296	97.98	100	97.6	100
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	1.020.060.482	908.448.088	89.06	100	88.9	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Daerah						
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Kesehatan)	498.158.000	412.059.848	82.72	100	82.6	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (RSUD Ainun Habibie)	521.902.482	496.388.240	95.11	100	96.7	100
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.218.173.617	2.073.417.554	93.47	100	73.9	82
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	1.551.721.496	1.442.492.926	92.96	100	64.8	64
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSUD Ainun Habibie)	666.452.121	630.924.628	94.67	100	96.6	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.156.080.720	8.805.454.557	96.17	100	84.3	99
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	3.484.421.238	3.315.558.367	95.18	100	77.5	98
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan (RSUD Ainun Habibie)	5.672.659.482	5.489.896.190	96.78	100	89.1	100
6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (RSU Ainun)	83.991.499.787	83.991.499.787	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSU Ainun)	83.991.499.787	83.991.499.787	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>88.785.898.082</b>	<b>86.223.667.356</b>	<b>97.11</b>	<b>99.98</b>	<b>92.1</b>	<b>97.52</b>
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19.009.767.143	18.405.437.929	96.82	99.95	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	2.238.168.663	1.972.275.409	88.12	99.75	-	-
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RSUD Ainun Habibie)	695.151.117	682.830.000	98.09	100	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD Ainun Habibie)	5.158.766.163	5.086.396.338	98.6	100	-	-
	Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.741.644.000	3.615.760.841	96.64	100	-	-
	Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (RSUD Ainun Habibie)	7.176.037.200	7.048.175.331	98.22	100	-	-
2	Kegiatan Penyediaan Layanan	68.990.462.939	67.130.701.495	97.3	100	92.4	99.9



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan)	857.648.000	829.659.670	96.74	100	95.7	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan)	1.234.744.311	1.189.758.526	96.36	97.91	87.5	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	974.743.428	844.056.017	86.59	100	91.5	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	899.216.000	843.899.895	93.85	99.9	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	260.316.000	234.523.595	90.09	100	95.5	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	578.102.000	556.756.491	96.31	100	95.6	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.721.226.000	1.707.085.063	99.18	100	95.8	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dinas Kesehatan)	126.804.000	124.001.050	97.79	100	84.8	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	529.257.000	513.181.645	96.96	98.73	91.2	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	59.148.379.200	57.646.636.467	97.46	99.64	92.7	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2.660.027.000	2.641.143.076	99.29	100	101.7	100
3	Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit KELAS B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	785.668.000	687.527.932	87.51	100	84.5	93
	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	785.668.000	687.527.932	87.51	100	84.5	93
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>10.264.321.934</b>	<b>6.471.684.340</b>	<b>63.05</b>	<b>100</b>	<b>87.2</b>	<b>95.3</b>
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.313.468.000	1.655.078.533	31.15	100	84.3	100
	Sub Kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.313.468.000	1.655.078.533	31.15	100	84.3	100
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.950.853.934	4.816.605.807	84.26	100	95.4	90.74



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	180.654.000	126.839.600	70.21	100	86.9	81.84
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD Ainun Habibie)	4.770.199.934	4.689.766.207	98.31	100	95.6	100
<b>4</b>	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	<b>352.768.000</b>	<b>325.477.050</b>	<b>92.26</b>	<b>100</b>	<b>98.8</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	352.768.000	325.477.050	92.26	100	98.8	100
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	352.768.000	325.477.050	92.26	100	98.8	100
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>990.173.000</b>	<b>945.150.020</b>	<b>95.45</b>	<b>100</b>	<b>94.2</b>	<b>100</b>
1	Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	990.173.000	945.150.020	95.45	100	94.2	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	990.173.000	945.150.020	95.45	100	94.2	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>238.082.023.577</b>	<b>226.187.990.636</b>	<b>95.00</b>	<b>99.94</b>	<b>92.4</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kesehatan yang profesional dan berkinerja tinggi, yang diukur dengan indikator sebagai berikut :

- Nilai akuntabilitas kinerja mencapai 76% dari target 75% pada tahun 2022
- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) mencapai 91,1% dari target 90% pada tahun 2022
- Temuan hasil pemeriksaan 0 (Nol), mencapai target pada tahun 2022
- Tingkat penyerapan anggaran 91,6% pada tahun 2022

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Output Kegiatan : terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi



Kinerja Perangkat Daerah dengan target 5 Dokumen dan tercapai semuanya yakni (Dokumen Renja, RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD).

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Output Kegiatan : terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 1 dokumen laporan keuangan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Output Kegiatan : terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya melalui Diklat/Bimtek (Dikes :15 org, Labkes : 5 orang, RS Ainun : 10 orang) melalui aktifitas pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tercapai sesuai target.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Output Kegiatan : terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 1 dokumen penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dikes & Labkesda dari target 100%, realisasinya 100% Dan RS Ainun Mencapai 100%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Output Kegiatan : terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 1 dokumen layanan dan manajemen Administrasi perkantoran Dikes & Labkesda dari target 100%, dengan realisasi Mencapai 100%.

6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (RSU Ainun)

- Output Kegiatan : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (RSU Ainun) dengan target 1 dokumen hasil Pelayanan dan Penunjang BLUD Rumah Sakit target 100% , dengan realisasi Mencapai 100%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Outcome dari program, terdiri dari :

a) Kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang diukur keberhasilannya dengan indikator :

- Persentase ibu hamil yang mendapatkan yang mencapai 92% pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan sebesar 88%
- Penurunan angka ibu hamil KEK menjadi 4,7% dari tahun sebelumnya 6%, meskipun angka belum mencapai target 2% tetapi tren menurun 3 tahun terakhir.



- b) Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan masalah kesehatan jiwa, dengan indikator :
- Prevalensi TB 291 per 100.000 penduduk di pada tahun 2022, diatas angka prevalensi yang ditargetkan sebesar 243 per 100.000 penduduk
  - Prevalensi HIV pada populasi dewasa 0.0016% pada tahun 2022 dengan target < 0.05%
  - Kasus PD3I (penyakit yang Dapat DI cegah dengan Imunisasi) yang ditemukan 90% di tahun 2022 diatas target yang seharusnya hanya 30% pada tahun 2022
  - Prevalensi hipertensi 50,5% pada tahun 2022 diatas dari target sebesar 30%
  - Prevalensi obesitas 27,7% pada penduduk usia 18+ tahun dari target 30% pada tahun 2022
  - 100% FKTP menyeleggarakan kesehatan jiwa sesuai standar dari 70% yang ditargetkan pada tahun 2022
- c) Tersedianya akses dan mutu fasyankes, dengan indikator :
- 92 puskesmas telah tersertifikasi NASional dari 93 puskesmas yang ada di Provinsi Gorontalo tahun 2022
  - 9 Rumah sakit Kabupaten/ Kota tersertifikasi akreditasi Nasional pada tahun 2022
  - 89.200 penduduk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan Nasional (JKN)/jamkesta.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

No	Sub Kegiatan	Ouput
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukung	100% jumlah sarana prasarana rumah sakit dibangun dan ditingkatkan
2	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah sakit	100% sarana prasarana yang dilakukan pemeliharaan
3	Pengadaan dan pemeliharaan alat – alat kesehatan/ peralatan laboratorium kesehatan	5 layanan labkesmas dilaksanakan
4	Distribusi alat, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya (Dikes)	77% instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin





- 5 Distribusi alat, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya (RSUD Hasri Ainun)
- 100% pelayanan medik RSUD dr. Hasri Ainun HABIBIE

2. Kegiatan Penyediaan Layanan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

No	Sub Kegiatan	Ouput
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	6 Kabupaten / kota memperoleh dukungan upaya pencegahan dan penanggulangan risiko akibat krisis kesehatan
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100% kabupaten / Kota kasus KLB/wabah ditangani 1 x 24 jam
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 545 bumil berisiko didampingi mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022</li> <li>- 35 bidan yang dilatih penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi</li> <li>- 6 kabupaten / kota tidak ada puskesmasnya yang uci</li> </ul>
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	500 bumil KEK dan 500 balita gizi kurang mendapatkan PMT
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	6 Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	73% sarana air minum dan sanitasi lingkungan dilakukan pengawasan
7	Pengelolaan penyakit menular dan tidak menular	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2000 kasus penyakit menular ditemukan dan ditangani</li> <li>- 1000 populasi umum yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM</li> </ul>
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan haji	Melaksanakan 4 kali monev istithaah kesehatan haji
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 165 siswa SMA/SMK /sederajat yang memahami bahaya rokok dan napza di sekolah</li> <li>- 6 kabupaten/kota memiliki 50% PKM yang menyelenggarakan</li> </ul>



		kesehatan jiwa
10	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 jenis keluhan jaminan kesehatan ditangani</li> <li>- Tidak ada perda yang direvisi</li> <li>- 89.200 jiwa menerima manfaat dari target 205.584 jiwa</li> <li>- Tidak ada RS yang mempunyai MoU dalam pelayanan rujukan</li> </ul>
11	Pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	- 6 kabupaten/kota memperoleh penguatan program pelayanan kesehatan primer

3. Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit KELAS B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi

No	Sub Kegiatan	Ouput
1	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	6 kabupaten/kota melakukan penguatan program pelayanan kesehatan primer

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Outcome dari program adalah Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan yang merata diukur keberhasilannya dengan indikator :

- 49 FKTP telah mempunyai minimal 9 jenis tenaga sesuai standar pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 98% dari target yang ditetapkan 50 FKTP.
- 100% atau 7 RS kabupaten/Kota kelas C dan D yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang.
- 100% Instalasi farmasi atau 6 kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar.



a. Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

No	Sub Kegiatan	Ouput
1	Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia Kesehatan	6 kabupaten kota mempunyai dokumen perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan di FKTP dan FKTL tingkat provinsi gorontalo.

- 2) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

No	Sub Kegiatan	Ouput
1	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	54 tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo mengikuti seleksi tenaga Kesehatan 200 tenaga medis, paramedis, penunjang medis yang dikontrakkerjakan dan digunakan pengetahuan dan ketrampilannya

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Outcome dari program adalah tersedianya akses dan mutu pelayanan kesehatan.

a. Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

No	Sub Kegiatan	Ouput
1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK.	86% produk alkes dan PKRT yang beredar di kabupaten/kota memenuhi syarat.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Outcome dari program adalah :

- a) Meningkatnya Kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang diukur keberhasilannya dengan indikator :

- Persentase ibu hamil yang mendapatkan yang mencapai 92% pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan sebesar 88%.



- Penurunan angka ibu hamil KEK menjadi 4,7% dari tahun sebelumnya 6%, meskipun angka belum mencapai target 2% tetapi tren menurun 3 tahun terakhir.
- Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan masalah kesehatan jiwa, dengan indikator :
- Prevalensi TB 291 per 100.000 penduduk di pada tahun 2022, diatas angka prevalensi yang ditargetkan sebesar 243 per 100.000 penduduk
- Prevalensi HIV pada populasi dewasa 0.0016% pada tahun 2022 dengan target < 0.05%
- Kasus PD3I (penyakit yang Dapat DI cegah dengan Imunisasi) yang ditemukan 90% di tahun 2022 diatas target yang seharusnya hanya 30% pada tahun 2022.
- Prevalensi hipertensi 50,5% pada tahun 2022 diatas dari target sebesar 30%.
- Prevalensi obesitas 27,7% pada penduduk usia 18+ tahun dari target 30% pada tahun 2022.
- 100% FKTP menyeleggarakan kesehatan jiwa sesuai standar dari 70% yang ditargetkan pada tahun 2022.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

No	Sub Kegiatan	Ouput
1	Peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 kabupaten / kota melakukan penyebarluasan informasi PHBS dan isu-isu kesehatan melalui media elektronik dan media cetak.</li> <li>- 83% atau 5 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo memiliki kebijakan PHBS dan CSR.</li> <li>- 6 Kabupaten/Kota telah melaksanakan STBM pada 40% desa atau kelurahannya.</li> </ul>

**3) Permasalahan dan Solusi**

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Selang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Permasalahan :**

- Prevalensi TB pada tahun 2022 mencapai angka 291 per 100.000 penduduk, lebih tinggi dibandingkan dengan target Nasional.
- Angka prevalensi HIV yang berada jauh dibawah target nasional < 0.05% merupakan



kinerja baik akan tetapi bisa saja masih banyak hidden population/ populasi tersembunyi yang merupakan populasi yang mempunyai resiko tinggi tertular dan ditularkan oleh HIV AIDS sehingga terencana prevalensinya sangat kecil dan menjadi sulit untuk dilakukan penjangkauan untuk pemeriksaan.

- Pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM belum maksimal karena keterbatasan BMHP dan ada beberapa PKM yang belum mengirim laporan di aplikasi SIPTM.
- Capaian puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM baru mencapai 33 % atau baru 2 kab/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan pandu PTM dikarenakan tenaga nya yang belum dilatih atau sudah dilatih tapi pindah / mutasi setelah dilatih.
- Penerapan kebijakan KTR di sekolah dikarenakan belum adanya panutan dalam menerapkan perilaku ini karena masih adanya Guru yang masih merokok, perokok dari luar, misal penjemput /abang bentor merokok di halaman sekolah serta petugas puskesmas atau petugas yang bekerja di fasyankes masih merokok.
- Target 6 kabupaten / kota yang 100% nya puskesmas UCI tahun 2022 tidak ada karena UCI adalah indikator tingkat desa.
- Akses pelayanan persalinan yang sulit, Kebijakan Persalinan Harus di Faskes sedangkan Faskes tempat pelayanan Persalinan belum semuanya sesuai standar sehingga kualitas pelayanan persalinan masih kurang dan persalinan harus dilaksanakan di Puskesmas/RS.
- Mobilisasi penduduk yang cukup cepat dan faktor ekonomi dan sosial meyebabkan ibu hamil tidak bisa secara lengkap melakukan pelayanan antenatal.

**Solusi :**

- Memaksimalkan Investigasi Kontak pada pasien TB
- Mengupayakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya penemuan kasus
- Peran tenaga penjangkau lapangan yang terlatih khusus populasi tersembunyi ini, sehingga proses deteksi dini dapat dilaksanakan untuk mencegah proses penularan lebih luas
- Memaksimalkan peran tokoh masyarakat dan lintas sektor dalam melakukan kunjungan rumah pada pasien yang mangkir dalam pengobatan serta perluasan layanan ARV.
- Kab/kota dapat mengakomodir BHP untuk PKM, pengelola di PKM untuk selalu dapat mengirim laporan di aplikasi SIPTM, KIE dimaksimalkan, melakukan kolaborasi berupa pelayanan antara DD FR PTM dengan vaksinasi.
- Perlu dilakukan pelatihan tenaga kesehatan di Puskesmas yang petugas/pengelola belum dilatih Pandu PTM, dan komitmen untuk tidak dimutasi setelah dilatih minimal sampai yang



bersangkutan melakukan bimbingan kepada penggantinya.

- Perlu edukasi dan publikasi terkait penyebaran informasi kesehatan yang lebih massif lagi
- Meningkatkan Kualitas pelayanan Faskes dan mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat dengan memaksimalkan fungsi rumah tunggu dan rujukan terencana untuk ibu hamil risiko tinggi.
- Memaksimalkan promosi kesehatan mengenai pelayanan kesehatan termasuk pelayanan persalinan yang aman di masa Pandemi pada masyarakat.
- Meningkatkan kegiatan sweeping ibu hamil dan meningkatkan kualitas pembinaan pra nikah agar calon pengantin bisa segera melakukan pemeriksaan antenatal ke nakes jika hamil nanti.
- Meningkatkan jejaring koordinasi lintas Kabupaten akan adanya ibu hamil luar wilayah yang dilayani dan mendekatkan akses pelayanan antenatal ke wilayah penduduk yang kurang mampu.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan pemdes adanya kebijakan yang berpihak pada peningkatan akses masyarakat menjangkau faskes dan Posyandu untuk pelayanan kunjungan bayi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

**Permasalahan :**

- Sarana, prasarana dan SDM Puskesmas tidak lengkap
- Upaya pemenuhan nakes pada faskes yakni melalui program nusantara sehat individu dan program PIDI sehingga ketika selesai masa tugas maka akan terjadi kekurangan nakes tertentu sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan nakes yakni target pemenuhan tidak tercapai
- Rumah sakit belum lengkap untuk pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 penunjang, dan sebagian besar dokter spesialis menggunakan Sip dan SP dimana mereka telah bekerja di beberapa rumah sakit untuk pemenuhan nakes, adapun program kemenkes dalam upaya pemenuhan nakes spesialis melalui PGDS yang penempatan dilaksanakan selama 1 tahun, kurangnya minat spesialis untuk bekerja di Gorontalo
- Keterbatasan SDM khususnya yang sub spesialis

**Solusi :**

- Pemenuhan sarana prasarana harus mengacu pada aplikasi ASPAK
- Pemenuhan SDM oleh masing-masing pemda Kabupaten/Kota
- Diharapkan program Nusantara Sehat, program PIDI oleh kemenkes akan tetap berlanjut



ditahun berikutnya. Diharapkan program kemkes ini bisa diperpanjang waktu penempatan, Dan pemerintah daerah dapat mengadopsi program pemenuhan nakes Nusantara Sehat dengan pembiayaan APBD. Diharapkan pemerintah kabupaten/kota khususnya Faskes dapat memenuhi nakes dengan perekrutan menggunakan dana BOK Program Promkes

- Membuka peluang dengan merekrut spesialis dengan insentif lebih baik agar diminati untuk ditempatkan di Gorontalo mengusulkan kebutuhan spesialis melalui program PGDS memberikan peluang bagi dokter umum untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan spesialis mengatur dan melakukan distribusi bagi jenis spesialis dari rumah sakit yang berlebihan ke rumah sakit yang membutuhkan dengan membuat kebijakan serta regulasi daerah
  - Beberapa RS sudah menyekolahkan SDM yang ada dan sudah melakukan MOU dengan universitas untuk pemenuhan Spesialis
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

**Permasalahan :**

- Indikator PKRT belum dapat benar – benar dijadikan ukuran untuk mendukung keberhasilan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

**Solusi :**

- Bekerja terintegrasi dengan program lain atau sektor lain terkait.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

**Permasalahan :**

- Terkait pencapaian indikator posyandu aktif belum berbanding lurus dengan keberhasilan program lainnya khususnya dalam hal penemuan penderita dan penatalaksanaan kasus.

**Solusi :**

- Strategi dibuat lebih detil sehingga ukuran kinerja bahwa posyandu dikatakan aktif apabila kader dan aktifitas dalam psoyandu benar benar mendukung pencapaian program prioritas Kesehatan.



**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 , khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.19**  
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan  
 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Usia Harapan Hidup	68	68.51	67.92	68.19

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- a. Usia harapan hidup di provinsi Gorontalo tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 68,19 menjadi 68,51. UHH di pengaruhi oleh angka kematian ibu dan angka kematian bayi, angka kematian ibu di Provinsi Gorontalo tahun 2022 turun menjadi 195/100.000 kelahiran hidup jika di bandingkan tahun 2021 yang hanya 252/100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi tahun 2022 turun 0,1% dari 11.1% menjadi 11/1000 kelahiran hidup.
- b. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017-2021 menunjukkan angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total di Provinsi Gorontalo turun menjadi 2,4 pada tahun 2021. Sebelumnya pada periode survei SDKI tahun 2019 TFR Gorontalo ad pada angka 2,5.
- c. Dalam rangka percepatan penurunan stunting Kemenkes mendorong 11 intervensi yang dilakukan pada periode sebelum kelahiran dan setelah kelahiran dengan sasaran remaja putri, ibu hamil dan balita. 11 intervensi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  1. Screening anemia remaja putri
  2. Konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri
  3. Pemeriksaan kehamilan
  4. Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil
  5. Pemeberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK
  6. Pemantauan tumbuh kembang balita
  7. ASI Eksklusif
  8. Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta
  9. Tata laksana balita dengan masalah gizi
  10. Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi

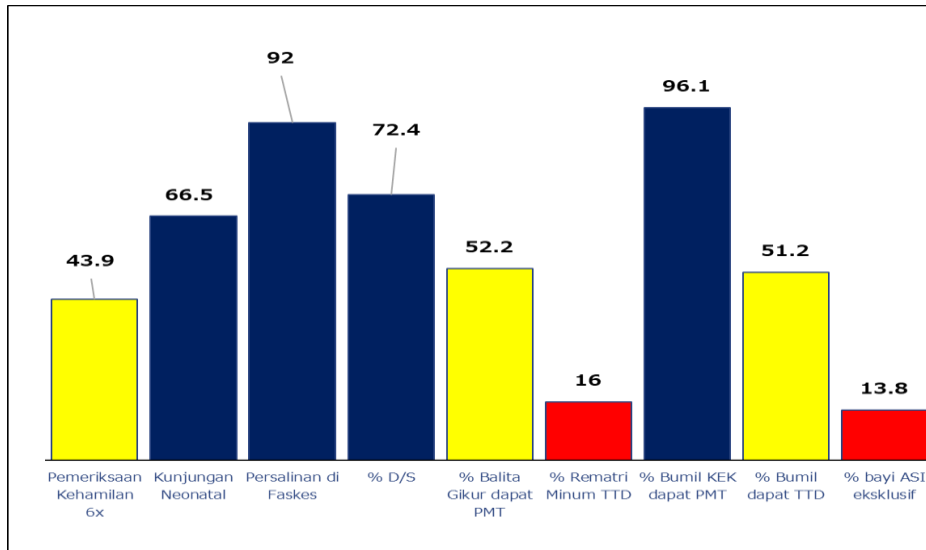




11. Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita

Beberapa indikator yang dijadikan indikator intervensi stunting adalah sebagai berikut :

**Grafik 3.11**  
Indikator intervensi dalam rangka menurunkan Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo tahun 2022

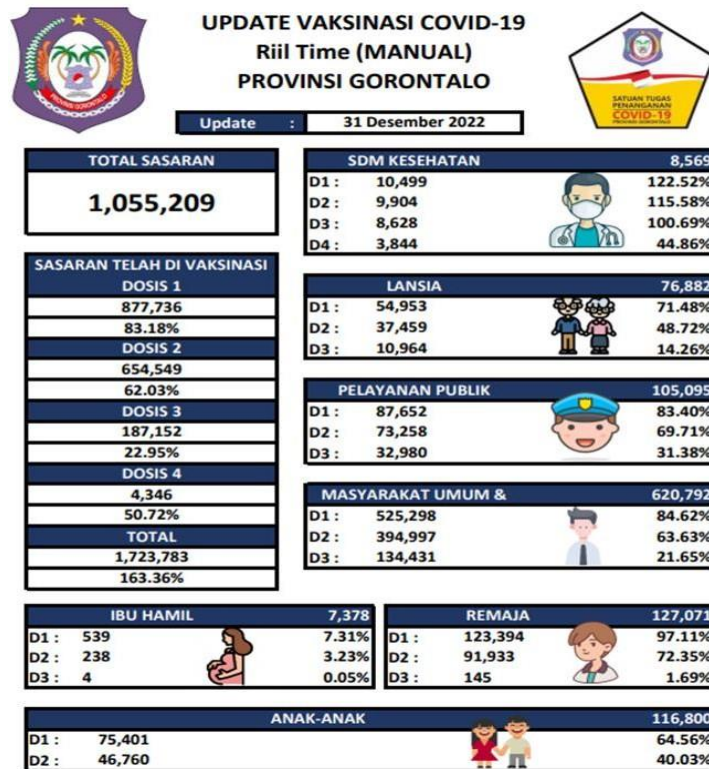


Sumber : Ditjen Kesmas Kemenkes 2022

Pemeriksaan kehamilan merupakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota.

- d. Dalam rangka penanganan pandemi covid-19, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terus melakukan kegiatan vaksinasi covid sampai dengan boster kedua bagi tenaga kesehatan di tahun 2022. Tahun 2022, alokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid 19 diintegrasikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga penatalaksanaannya disesuaikan dengan kegiatan rutin Dinas Kesehatan Provinsi, berikut infografis cakupan vaksinasi di Provinsi Gorontalo sampai 31 Desember 2022.

**Gambar 3.2**  
 Infografis cakupan vaksinasi & Sebaran Kasus Covid  
 di Provinsi Gorontalo Tahun 2022 (Update 31 Desember 2022)

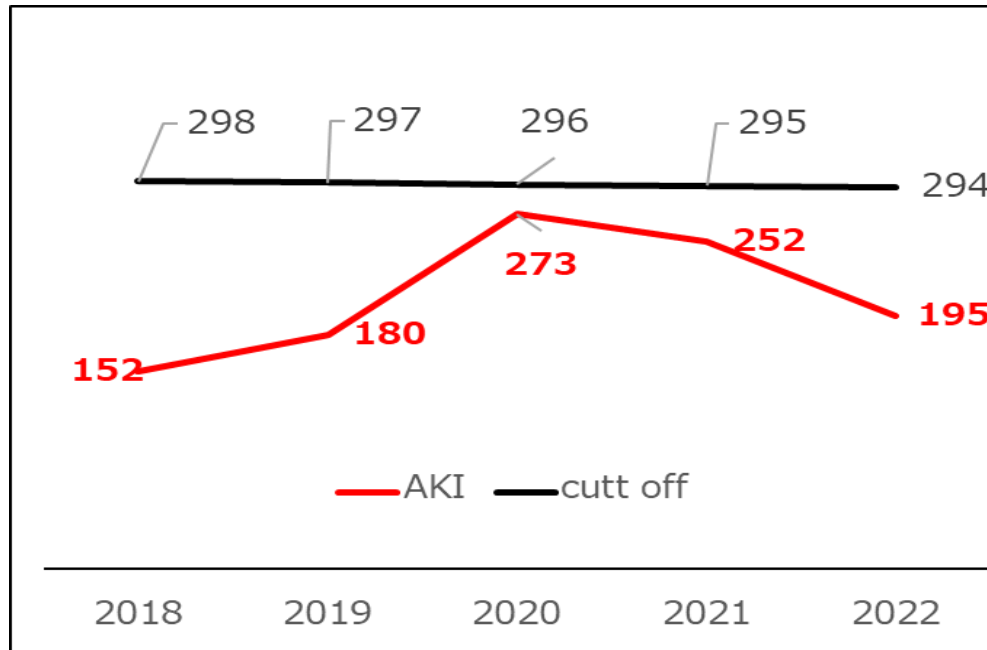


Sumber : Satgas Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2022

- e. Tujuan OPD meningkatkan derajat kesehatan & gizi masyarakat yang tertuang dalam dokumen ada 4 Indikator utama RESNTRA 2018-2022 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :



**Grafik 3.12**  
 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup  
 Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022



Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

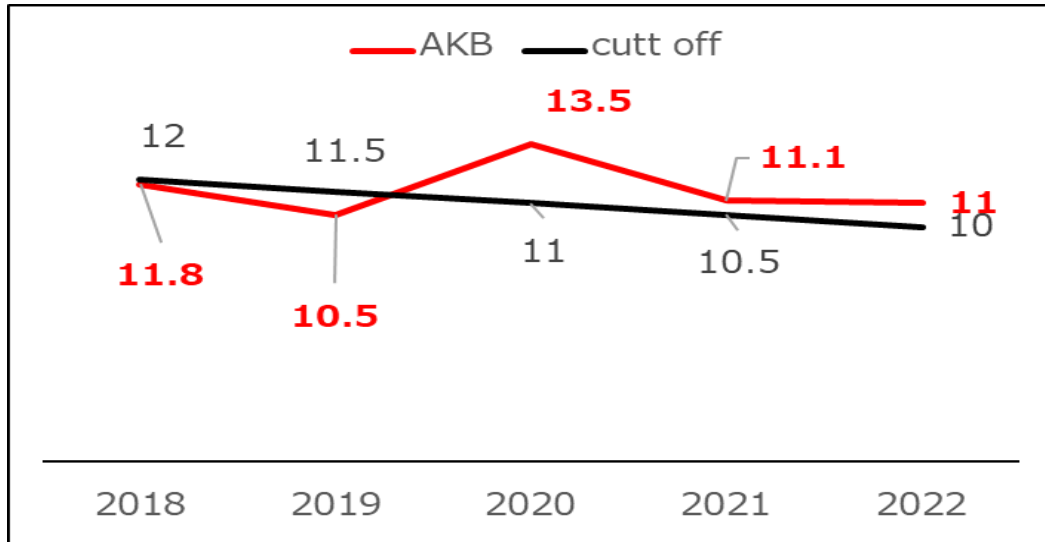
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup merupakan salah satu ukuran keberhasilan upaya pelayanan kesehatan ibu yang juga menjadi agenda utama SDGs, 5 tahun terakhir AKI per 100.000 KH di Provinsi Gorontalo fluktuatif, tetapi 3 tahun terakhir trendnya menurun. Tahun 2022 AKI Provinsi Gorontalo masih dibawah rata – rata nasional yang angkanya berkisar 305 per 100.000 KH tetapi angka 195 per 100.000 KH pada tahun 2022 juga masih membutuhkan upaya yang lebih baik lagi untuk mencapai target 183 pada tahun 2024.

Berbagai kebijakan saat ini telah diupayakan oleh Kemenkes seperti menetapkan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali dan 2 diantaranya dilakukan oleh dokter dan dilakukan USG, yang dulu hanya dilakukan di RS dan klinik saat ini ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan dengan USG di puskesmas. Kemenkes dalam proses menyediakan USG melalui anggaran DAK Fisik samapai tahun 2024. pemeriksaan USG ini perlu didukung dengan penguatan kolaborasi layanan ANC (Ante Natal Care) antara bidan, dokter umum dan dokter spesialis kebidanan serta jejaring PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif).



**Grafik 3.13**

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022

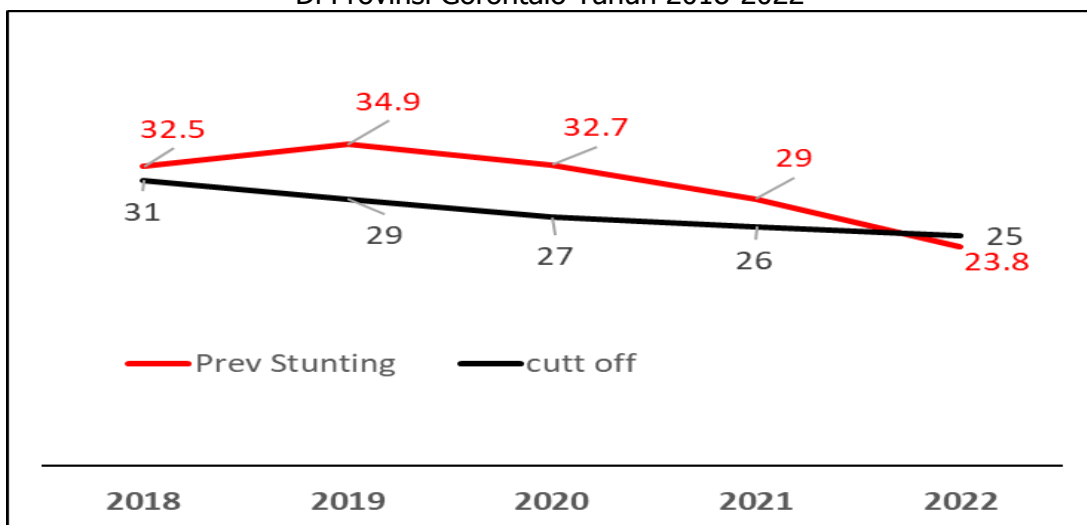


Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. AKB Provinsi Gorontalo tahun 2022 mencapai 11 per 1.000 KH di Provinsi Gorontalo meskipun hanya turun 0.1% dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi menunjukkan 3 tahun terakhir trendnya menurun.

**Grafik 3.14**

Prevalensi Stunting Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022



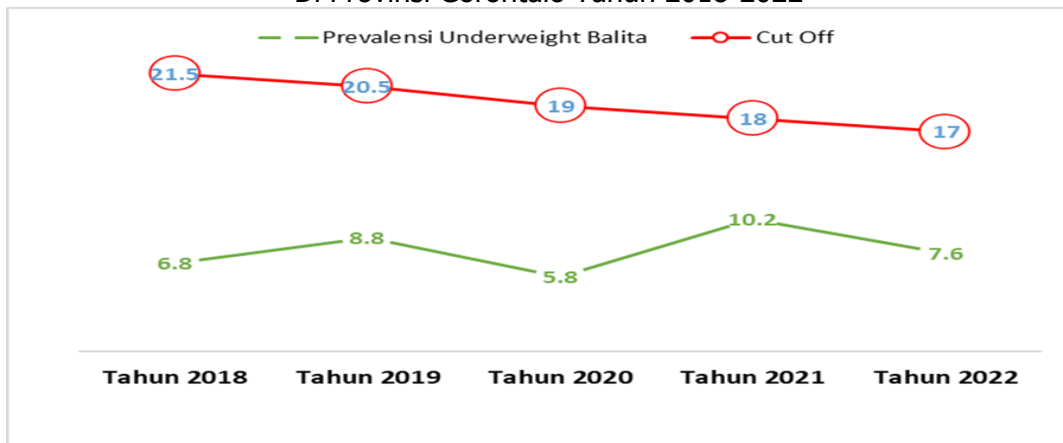
Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo



Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilaksanakan tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo turun menjadi 23.8% dari angka 29% di tahun 2021, secara Nasional prevalensi stunting 21,6% pada tahun 2022 dan menargetkan 14% pada tahun 2024. Angka ini tidak sulit dicapai jika dilakukan secara terintegrasi.

Dinas Kesehatan Provinsi sebagai perwakilan Kementerian Kesehatan di daerah membantu Pemerintah daerah melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun.

**Grafik 3.15**  
Prevalensi Stunting  
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022



Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo

Prevalensi underweight di Provinsi Gorontalo fluktuatif selama 5 tahun terakhir, meskipun angkanya masih dibawah angka yang menjadi batas tertingginya. Kondisi fluktuatif menggambarkan bahwa indikator ini harus dilakukan evaluasi secara intensif. Underweight adalah kegagalan bayi mencapai berat badan ideal, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya.

**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun 2022**

- a. Pemimpin perubahan terbaik tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dari Gubernur Gorontalo
- b. Peringkat ke-3 kinerja terbaik dalam pengelolaan SKDR wilayah Sulawesi, Maluku, Papua oleh Kementerian Kesehatan
- c. Peringkat ke-3 regional timur pada poster session inovasi pembudayaan germas oleh



Kemenkes

- d. Peringkat ke-3 prestasi dalam SIPNAP terbaik oleh Kemenkes
- e. Peringkat ke-3 Provinsi dengan cakupan pelaporan PBF terbaik oleh Kemenkes

**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan**

- I. Perjanjian Kerjasama antara Dinkes Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten / Kota tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Program Jaminan Kesehatan Non Teregister Tanggal 4 Januari 2022
  - 1. RSUD Zainal Umar Sidiki  
Nomor : 800/DIKES/0026/I/2022 - 445/RSUDZUS/034.b/I/2022
  - 2. RSUD Iwan Bokings  
Nomor : 800/DIKES/0035/I/2022 - 800/04.a/RSIB/I/2022
  - 3. RSUD Toto Kabila  
Nomor : 800/DIKES/0033/I/2022 - 800/RSUD/TK/06/I/2022
  - 4. RSUD Tani dan Nelayan  
Nomor : 800/DIKES/0028/I/2022 - 800/10/RSUDTN/I/2022
  - 5. RSUD Otanaha  
Nomor : 800/DIKES/0032/I/2022 - 445/RSUD.O/343/I/2022
  - 6. RSUD Bumi Panua Pohuwato  
Nomor : 800/DIKES/0027/I/2022 - 800/RSUD-BP/06/I/2022
  - 7. RSUD Boliyohuto  
Nomor : 800/DIKES/0036/I/2022 - 445/RSUD-BOL/004.a
  - 8. RSUD Aloe Saboe  
Nomor : 800/DIKES/0031/I/2022 - 12/RSAS/I/2022
  - 9. RSUD M.M Dunda Limboto  
Nomor : 800/DIKES/0029/I/2022 - 445/6/I/RSUD-DUNDA
  - 10. RSUD Hasri Ainun Habibie  
Nomor : 800/DIKES/0030/I/2022 - 800/RSUD-HAH/SPK/401/I/2022
  - 11. RSUD Tombulilato  
Nomor : 800/DIKES/0034/I/2022 - 800/RSUDT-BB/I/2022
- II. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kab/Kota tentang Sharing Pembiayaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) Pemerintah Daerah Tahun 2022. (Tanggal 15 Maret 2022)



1. Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 156/Pemkesra/PK/III/2022 - 180/PKS/05/HKM-KS/III/2022
  2. Kabupaten Gorontalo Utara  
Nomor : 157/Pemkesra/PK/III/2022 - 02/GORUT-PKS/III/2022
  3. Kabupaten Pohuwato  
Nomor : 154/Pemkesra/PK/III/2022 - 100/PEM-PHWT/PKS/19/III/2022
  4. Kabupaten Gorontalo  
Nomor : 153/Pemkesra/PK/III/2022 - MOA/05/Bag.K.S/III/2022
  5. Kabupaten Boalemo  
Nomor : 155/Pemkesra/PK/III/2022 - 441.92/DIKES/282.a/III/2022
  6. Kota Gorontalo  
Nomor : 158/Pemkesra/PK/III/2022 - 100/PEM-KSD/II.a/2022
- III. Rencana Kerja antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang diDaftarkan oleh Pemerintah Provinsi tahun 2022. (Tanggal 16 Desember 2022)  
Nomor : 188/KTR/X-02/1221 - 746/PEMKESRA/RK/XII/2022
- IV. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan CV. JASA MAFATIH MAKASSAR tentang Paket Pelayanan Jenazah Pasien Rujukan Luar Daerah asal Provinsi Gorontalo tahun 2021 (Tanggal 25 MEI 2022)  
Nomor : 800/DIKES/2780/V/2022
- V. Perjanjian Kerjasama antara RSPAD GATOT SOEBROTO dan PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO tentang Pelayanan Medical Check Up bagi Gubernur beserta Keluarga, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. (Tanggal 25 Juli 2022)  
Nomor : PKS/243/VII/2022 - 418/PEMKESRA/PK/VII/2022

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **1) Tujuan dan Sasaran**

##### **a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo**

- Membangun infrastruktur Sumberdaya Air yang Efisien, Efektif, Produktif dan Ramah Lingkungan.



- Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan.
- Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang Sehat dan Ramah Lingkungan, Serta Meningkatnya Kualitas Kawasan Strategis.
- Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Organisasi untuk Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.
- Meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan ketaatan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah provinsi serta pengadaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi
- Membangun sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi.
- Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah di Kawasan Strategis.

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.20**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Efisien, Efektif, produktif dan Ramah Lingkungan	Indikator Sasaran : Persentasi Layanan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap	95%	89.11%	100%	80%	93.80
		Persentasi Pengaman sungai dan Pantai sesuai standart yang dibangun	100%	100%	100%	74%	100%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luasan Sawah yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan Jaringan Irigasinya	11.074 Ha	9.868 Ha	11.074 Ha	5.048 Ha	89.11%
		Jumlah Panjang Pengaman Sungai dan Pengaman Pantai yang dibangun	11.400 M	13.812 M	4.400 M	4.404 M	121.16%
2	Sasaran : Meningkatnya dan Terpeliharanya Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Indikator Sasaran : Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis (Provinsi)	70.22%	60.05%	65.2%	58%	85.52%
		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis (Strategis)	50.00%	42.82%	-	-	85.64%
		Persentasi Jembatan Kondisi Baik pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis	100%	78.17%	100%	100%	78.17%





No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
		(Provinsi)					
		<b>Persentasi Jembatan Kondisi Baik pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis (Strategis)</b>	<b>90%</b>	<b>49.38%</b>	-	-	<b>54.87%</b>
	Program Penyelenggaraan Jalan	Kondisi mantap jalan	70.22%	60.05%	65.2%	58%	85.52%
<b>3</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang Sehat dan Ramah Lingkungan, Serta Meningkatnya Kualitas Kawasan Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran : Cakupan Layanan Air Minum</b>	-	-	<b>100</b>	<b>81.4</b>	-
		<b>Indikator Sasaran : Cakupan Layanan Sanitasi</b>	<b>3.981</b>	<b>496</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>12.46%</b>
		<b>Indikator Sasaran : Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Jumlah jiwa yang terlayani air bersih	3.988	-	3.988	24.416	-
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah kawasan yang terfasilitasi layanan umum	1	4	-	-	400%
	Program penataan bangunan Gedung	Jumlah Gedung serta sarana dan prasarana Gedung perkantoran yang dibangun	1 Unit	2 Unit	1 Unit	4 Unit	200%
	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah kawasan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang dibangun/ditingkatkan	1 Kws	6 Kws	1 Kws	6 Kws	600%
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Jumlah jiwa yang terlayani sanitasi	3.981	496	3.981	24.118	12.46%
<b>4</b>	<b>Sasaran : Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah Yang Terencana dan Terkendali Serta Tersedianya Tanah Untuk Kebutuhan Pembangunan</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi</b>	<b>3%</b>	<b>25%</b>	<b>22%</b>	<b>17%</b>	<b>833.33%</b>
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	4	1	-	400%
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	3	3	3	6	100
		Jumlah Laporan	18	7	6	14	38.89%
<b>5</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia jasa konstruksi</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase SDM Jasa Konstruksi Tersertifikasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>
	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase peningkatan pelayanan jasa konstruksi	100%	100%	100%	97%	100%
<b>6</b>	<b>Sasaran :</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	<b>Meningkatnya Kompetensi Kinerja SDM Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Organisasi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</b>					
		<b>Indikator Sasaran : Jumlah SDM Terlatih Bidang Teknis dan Administrasi</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>50%</b>
		<b>Indikator Sasaran : Persentasi Ketersediaan dan Capain Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	99%	100%
		Persentase Peningkatan layanan Administrasi, Sarpras dan SDM Aparatur UPTD TPA Talumelito	100%	100%	100%	93%	100%
		Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium	100%	100%	100%	95%	100%
		Persentase Pelayanan Jasa admin perkantoran	100%	100%	-	-	100%
		Persentase Peningkatan Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah masyarakat yang tersosialisasi dan volume sampah yang dikelola	100%	100%	100%	95%	100%

## 2) Program dan kegiatan

**Tabel. 3.21**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>78.848.022.094</b>	<b>59.759.708.302</b>	<b>75.79</b>	<b>90.77</b>	<b>30.7</b>	<b>99.09</b>
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.796.189.072	5.513.645.162	95.13	100	82.70	98.87
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	14.320.833.000	10.697.339.133	74.70	100	97.57	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DAK)						
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.731.000.022	7.849.858.038	89,91	87,6	90,9	100
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	50.000.000.000	35.698.865.969	71,40	85,43	-	-
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>120.955.247.406</b>	<b>97.814.965.130</b>	<b>80,87</b>	<b>91,42</b>	<b>32,9</b>	<b>83,62</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	30.042.253.406	26.530.187.200	88,31	91,39	77,8	83,62
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (DAK)	15.145.291.000	7.937.208.580	52,41	79,45	73,68	77,32
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi (PEN)	75.767.703.000	63.347.569.350	83,61	93,33	-	-
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>2.310.033.906</b>	<b>2.153.908.413</b>	<b>93,24</b>	<b>100</b>	<b>94,7</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Lintas kab/kota	2.310.033.906	2.153.908.413	93,24	100	94,7	100
<b>4</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya</b>	<b>4.252.718.797</b>	<b>1.682.001.806</b>	<b>39,55</b>	<b>55,59</b>	<b>89,5</b>	<b>86,32</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/kota	4.252.718.797	1.682.001.806	39,55	55,59	89,5	86,32
<b>5</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>8.347.580.481</b>	<b>6.207.880.948</b>	<b>74,37</b>	<b>96,87</b>	<b>87,5</b>	<b>97,56</b>
	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis daerah Provinsi	8.347.580.481	6.207.880.948	74,37	96,87	87,5	97,56
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	<b>4.820.802.590</b>	<b>4.295.997.150</b>	<b>89,11</b>	<b>98,57</b>	<b>88,9</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Provinsi	4.820.802.590	4.295.997.150	89,11	98,57	88,9	100
<b>7</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>965.677.352</b>	<b>918.960.344</b>	<b>95,16</b>	<b>100</b>	<b>97,1</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai	965.677.352	918.960.344	95,16	100	97,1	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Lintas Daerah kab/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						
<b>8</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>2.229.033.153</b>	<b>2.186.395.203</b>	<b>98.09</b>	<b>98.74</b>	<b>98.9</b>	<b>96.72</b>
	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	611.089.917	595.279.272	97.41	99.88	-	-
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	384.302.965	380.043.164	98.89	100	99.5	99.5
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	529.802.139	526.707.277	99.42	97.85	98.5	92.62
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	703.838.132	684.365.490	97.23	97.73	98.7	95.17
<b>9</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>879.789.439</b>	<b>857.996.466</b>	<b>97.52</b>	<b>99.40</b>	<b>96.6</b>	<b>99.95</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	382.052.278	371.294.450	97.18	100	98.2	99.92
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi jasa Konstruksi (SIPJAKI)	497.737.161	486.702.016	97.78	98.94	94.3	100
<b>10</b>	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>6.811.641.810</b>	<b>6.629.487.247</b>	<b>97.33</b>	<b>97.26</b>	<b>95.3</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.811.641.810	6.629.487.247	97.33	97.26	95.3	100
<b>11</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>30.544.035.907</b>	<b>29.662.309.448</b>	<b>97.11</b>	<b>100</b>	<b>99.0</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.647.029.165	2.612.743.423	98.70	100	96.7	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD LAB	671.177.494	659.683.587	98.29	100	94.7	100
	Kegiatan Umum Perangkat Daerah LAB	1.250.611.922	1.087.725.069	86.98	100	92.7	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	852.709.386	839.933.793	98.50	100	99.8	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	739.894.690	727.742.658	98.36	100	96.4	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	22.673.880.986	22.034.589.418	97.18	100	99.3	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.708.732.264	1.699.891.500	99.48	100	99.7	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	<b>JUMLAH</b>	<b>260.964.582.935</b>	<b>212.169.610.457</b>	<b>81.30</b>	<b>100</b>	<b>43.6</b>	<b>-</b>

### 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Outcome dari program adalah Luasan Sawah yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan Jaringan Irigasinya.

1) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

Output : Jumlah Dok. data base SDA dan dok, perencanaan serta pengawasan sebanyak 5 Dokumen Database SDA, Perencanaan dan Pengawasan, target 9 dokumen, yaitu :

- Database SDA, Dokumen AKNOP D.I TALUDUYUNU
- Database SDA, Dokumen AKNOP D.I TABULO
- Database SDA, Dokumen AKNOP D.I TOLINGGULA
- Dokumen Supervisi Kanal Banjir Tanggidaa
- Dokumen Supervisi Stasiun Pompa Air

- ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Output : Luasan Sawah yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan Jaringan Irigasinya seluas **151,018** Ha Luas Jaringan yang di rehabilitasi dan ditingkatkan dari target **11074 Ha**, yaitu: Daerah Irigasi Tabulo Latula

- ✓ Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

Output : Jumlah Luas operasi jaringan irigasi pertanian yang dipelihara Seluas 9868 Ha Luas Operasi Jaringan Irigasi Pertanian yang dipelihara dari target 11074 Ha. Rincian sebagai berikut :

- Daerah Irigasi Bongo
- Daerah Irigasi Bulia
- Daerah Irigasi Huludupitango
- Daerah Irigasi Pilohayanga
- Daerah Irigasi Tabulo Latula
- Daerah Irigasi Taluduyunu
- Daerah Irigasi Tolinggula



Hal ini disesuaikan dengan PermenPUPR nomor **14/PRT/M/2015** tentang **Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang didalamnya diatur Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi.**

2) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi

Output : Jumlah Dok Perencanaan dan Pengawasan untuk bangunan pegendali banjir sebanyak **2 dokumen** dari target 6 dokumen, yaitu :

- Dokumen Penanggulangan Banjir Sungai Rumbia
- Dokumen Pekerjaan Abrasi Pantai Pentadu

- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Breakwater

Output : Jumlah Panjang Tanggul pengaman pantai yang dibangun sebanyak **109 m** dari target 900 m dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggul pengaman pantai Pantai Pentadu Kabupaten Pohuwato Sepanjang 109 m.

- ✓ Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai

Output : Jumlah Panjang Pengamanan Sungai/Tebing yang dibangun sepanjang **10.462 m** dari target 3500 m. dengan rincian sebagai berikut :

- Normalisasi Sungai Taluhubongo 892 m
- Penanggulangan Banjir Sungai Desa Bhakti 187m
- Normalisasi Sungai Desa Wonggasari 743m
- Penanggulangan banjir Sungai Isimu Utara 345m
- Normalisasi Sungai Jatimulya 308m
- Normalisasi Sungai Desa Limehe 1045m
- Rehab Tanggul Pasangan Batu Desa Bumbulan 105,6m
- Normalisasi Sungai Desa Tolongio 492m
- Tanggul Pasangan Batu Desa Tolongio 83 m
- Normalisasi Sungai desa Tapodu 649 m
- Galian Sedimen Sungai Balaata 1490 m
- Normalisasi Sungai Desa Barakati 523 m
- Perkuatan Tebing Sungai Desa Barakati 75 m
- Pemeliharaan Checkdam Desa Timbuolo Tengah 75 m



- Perkuatan Tebing Desa Pulahenti 720 m
- Perkuatan Tebing Desa Bualemo 50 m
- Perkuatan Tebing Sungai Desa Buti 71,5 m
- Saluran Pembuang Banjir Desa Tuladenggi 108 m
- Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Timuato 36 m
- Perkuatan Tebing Sungai Bionga 36m
- Normalisasi Sungai Limehe 1300 m
- Perkuatan Tebing Sungai Desa Bhakti 12 m
- Normalisasi Sungai Desa Bongo 400 m
- Perkuatan Tebing Desa Isimu Utara 30 m
- Tanggul Pasangan Batu Sungai Desa Bongo (Bobohu) 55m
- Penanggulangan Banjir Desa Lululo 24 m
- Penanggulangan Banjir Desa Bongopini 40 m
- Normalisasi Sungai Luluo 350 m
- Normalisasi Sungai Bionga 152 m
- Normalisasi Sungai Motoduto 400 m
- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi  
Output : Jumlah Keg. Wokshop, Koordinasi dan sosialisasi SDA lintas sektoral sebanyak **1 Kegiatan** dari target 3 kegiatan.yaitu: Komisi Irigasi Provinsi dan Sumber daya Air Provinsi Pada 12 Desember 2022 di Hotel Aston
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Kanal Banjir  
Output : Jumlah Panjang Pengamanan Sungai/Tebing yang dibangun sepanjang 2516 m dari target 3500 m yaitu:
  - Kanal Banjir Tanggidaa

## 2. Program Penyelenggaraan Jalan

Outcome dari program adalah Kondisi mantap jalan

### 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.  
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan sebanyak 21 **dokumen** dari target 10 dokumen. Dengan rincian sebagai berikut:
  - DED Jalan Akses Bandara-Imboddu



- DED Jalan Tangkobu-Pentadu (Seg. Bubaa-Limbatihu)
- DED Jalan Pilololenga-Biluhu Tengah
- DED Jalan Mulyonegoro-Karya Mukti
- DED Jalan Labanu-Tolongio
- DED Jembatan Pilolalenga
- DED Jembatan Momala
- DED Jembatan Harapan
- DED Jembatan Bakti
- Survey Kondisi Jalan 2022
- Survey BMS Jembatan 2022
- Feasibility Studi Jalan Tangkobu-Pentadu (Seg. Girisa-Olibuu)
- Pengawasn Jalan DAK 2022
- Pengawasan Jalan Tangkobu-Pentadu (Seg. Bubaa - Olibuu)
- Pengawasan Jalan Provinsi (PEN 2021)
- Pengawasan Jembatan Kramat – Bolihutuo
- AMDAL Pwmbangunan Jalan Akses Bandara – Imbodu
- DED Jembatan Saritani Ds. Banjar Sari
- DED Jembatan Saritani Ds. Gunung Sari
- Penyelidikan Tanah Jemb. Saritani Ds. Banjar Sari
- Penyelidikan Tanah Jemb. Saritani ds. Gunung Sari
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan  
Output : Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang Dibangun/Ditingkatkan
- ✓ Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi sepanjang **2,6 Km** dari target 9.5 Km, yaitu : Ruas Jalan Apitalau-Olibuu.
- ✓ Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan  
Output : Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang rutin dipelihara sepanjang **443,64 Km** dari target 50 Km. dengan rincian sebagai berikut:
  - 39 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Taluditi-Wanggarasi.
  - 5,2 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Teratai-Sipatana.
  - 29,2 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Duhidaa-Imbodu.
  - 24 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Tangkobu-Pentadu.
  - 33,6 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Molombulahe-Bubaa.
  - 8 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Bongo nol-bongo Satu.





- 7,7 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Gorontalo Batudaa.
- 24,9 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Batudaa-Isimu.
- 13,3 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Kabila-Tapa.
- 32 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Boidu-Longalo-Dulamayo.
- 52 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Gorontalo Suwawa-Tulabolo.
- 7 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Saleh Kadir (Dehuwalolo-Hunggulawa).
- 18,4 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Labanu-Tolongio.
- 6,6 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Akses Perkantoran Botu.
- 29,4 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Talumolo-Buata-Duano.
- 17,2 Km Pekerjaan Perbaikan Campuran Aspal Panas Pilohayanga-Dulamayo Selatan.
- 1,2 Km Pekerjaan Perbaikan Campuran Aspal Panas Toto Utara.
- 23,2 Km Pekerjaan Perbaikan Campuran Aspal Panas Runi-Hemeto.
- 40 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Pilolalenga-Biluhu Tengah.
- 13 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan ruas Bandara.
- 4,59 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Parungi-Sidomulyo.
- 2 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Imboddu- Patilanggio.
- 12 Km Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Tabulo-Karangetan
- ✓ Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan (DAK)  
Output : Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang rutin dipelihara sepanjang 6 Km dari target 5 Km. dengan rincian sebagai berikut:
  - 3,2 Km Pangadaa – Bhakti
  - 2,8 Km Tangkobu – Karya murni
- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan  
Output : Jumlah Panjang Jembatan Provinsi yang Dibangun/Diganti sebanyak 1 buah dari target 1 buah, yakni : Jembatan Kramat-Bolihutuo
- ✓ Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan.  
Output : Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara sepanjang **620,29 m** dari target 300 m. rincian sebagai berikut :
  - Gorontalo–Suwawa Tulabolo terdapat 9 buah dengan Panjang 125,01 m.
  - Toto utara terdapat 2 buah dengan Panjang 11,6 m.
  - Pangadaa - Bakti terdapat 1 buah dengan Panjang 15 m.
  - Wonggahu Saritani terdapat 1 buah dengan Panjang 18.31 m.
  - Dehuwalolo - Hunggulawa terdapat 3 buah dengan Panjang 48,05 m.



- Pilohayanga – Dulamayo Selatan terdapat 2 buah dengan Panjang 14,01 m.
  - Aloei Saboe terdapat 2 buah dengan Panjang 26 m.
  - Gorontalo – Batudaa- Isimu terdapat 9 buah dengan Panjang 94,96 m.
  - Buidu – Longalo – Dulamayo terdapat 3 buah dengan Panjang 106,86 m.
  - Pongongaila – Buhu terdapat 3 buah dengan Panjang 42,50 m.
  - Tangkobu – Pentadu terdapat 1 buah dengan Panjang 15 m.
  - Pilolalenga – Biluhu Tengah terdapat 1 buah dengan Panjang 9 m.
- ✓ Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan (PEN)
- Output : Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang Dibangun/ Ditingkatkan 11,9 Km dari target 9,5 Km, yakni :
- 9,2 Km Ruas Taluditi – Wonggarasi
  - 2,7 Km Ruas J.A Katili

### **3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum**

Outcome dari program adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Jumlah Kegiatan Koordinasi Keciptakarya dan Pelaksanaan Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi dengan Kab/ Kota, Jumlah jiwa yang terlayani air bersih dan Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. mulai di tahun 2019 s/d 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan fisik air minum dan sanitasi karena pembangunan fisik yang selama ini dilaksanakan bukan lagi menjadi kewenangan Provinsi.

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Lintas kab/kota. Pada tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan.

Mulai di tahun 2019 s/d 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan fisik air minum dan sanitasi karena pembangunan fisik yang selama ini dilaksanakan bukan lagi menjadi kewenangan Provinsi. Data pada laporan adalah hasil dari 6 kabupatem/kota yang dikutip dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

- ✓ Sub Kegiatan : Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
- Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Sebanyak 2 Dokumen dari Target 2 Dokumen dengan rincian : Dokumen Rispam dan Dokumen Jakstrada Air Minum.

### **4. Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya**

Outcome dari program adalah Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/kota



- ✓ Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan  
Output : Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum sebanyak 1 dari 1 Kawasan.  
Rincian sebagai berikut: - Kawasan City Center.
- ✓ Sub Kegiatan : Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  
Output : Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum sebanyak 4 dari 1 Kawasan.  
Rincian sebagai berikut :
  - Kawasan Kota Gorontalo
  - Kawasan Kabupaten Gorontalo
  - Kawasan Kabupaten Bone Bolango
  - Kawasan Kabupaten Gorontalo Utara

## **5. Program Penataan Bangunan Gedung**

Outcome dari program adalah Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran yang dibangun.

- 1) Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan gedung untuk Kepentingan Strategis daerah Provinsi
  - ✓ Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.  
Output : Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran yang dibangun sejumlah 2 dari target 1 buah, yaitu:
    - Gedung TUK (Tes Uji Kompetensi) BPSDM Provinsi Gorontalo yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango
    - Gedung Aula Inspektorat di Kota Gorontalo
  - ✓ Sub Kegiatan : Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.  
Output : Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran yang dibangun sejumlah 2 dari target 1 bangunan.
    - Gedung DPRD Provinsi berlokasi di Kota Gorontalo
    - Asrama Mahasiswa Malang Berlokasi di kota Malang, Jawa Timur

## **6. Program Pengembangan Permukiman**

Outcome dari program adalah Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di kawasan Strategis Daerah Provinsi
  - ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di



Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

Output : Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan sejumlah 6 dari target 1 kawasan. Yaitu:

- Kawasan Kota Gorontalo
- Kawasan Kabupaten Gorontalo
- Kawasan Kabupaten Bone Bolango
- Kawasan Kabupaten Gorontalo Utara
- Kawasan Kabupaten Pohuwato
- Kawasan Kabupaten Boalemo

- ✓ Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

Output : Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 2 dari target 12, yakni : dokumen pengawasan jalan dan City Center.

- ✓ Sub Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

Output : Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 1 dari target 3 Laporan, Yakni : Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan Strategis Daerah Provinsi.

## **7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Outcome dari program adalah Jumlah jiwa yang terlayani sanitasi.

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah kab/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi. Mulai di tahun 2019 s/d 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan fisik air minum dan sanitasi karena pembangunan fisik yang selama ini dilaksanakan bukan lagi menjadi kewenangan Provinsi. Data pada laporan adalah hasil dari 6 kabupaten/kota yang diambil oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan

Output : Jumlah jiwa yang terlayani Sanitasi sebanyak 496 jiwa yang tersebar. Dari target 7180 Jiwa.



## **8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Outcome dari program adalah Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Pelaksanaan Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium.

### 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.

- ✓ Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang  
Output : 0 perda, Pelaksanaan Kegiatan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang diselenggarakan melalui penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
- ✓ Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang  
Output : 0 perda, kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Bidang penataan ruang belum dapat dilaksanakan dikarenakan Perda revisi RTRW Provinsi Gorontalo masih dalam tahapan sinkronisasi data dengan dokumen RZWP3K sehingga kegiatan di alihkan untuk percepatan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Gorontalo.

### 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang

- ✓ Sub Kegiatan : Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota.  
Output : 0 Laporan, dikarenakan kegiatan evaluasi rancangan perda RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan dikarenakan Perda revisi RTRW Provinsi Gorontalo masih dalam tahapan sinkronisasi data dengan dokumen RZWP3K sehingga kegiatan di alihkan untuk percepatan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Gorontalo
- ✓ Sub Kegiatan : Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang  
Output : 0, kegiatan belum dapat dilaksanakan untuk peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang dikarenakan Perda revisi RTRW Provinsi Gorontalo masih dalam tahapan sinkronisasi data dengan dokumen RZWP3K sehingga kegiatan di alihkan untuk percepatan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Gorontalo.

### 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah.  
Output : Jumlah Laporan sejumlah 4 laporan dari target 1 Laporan, yakni :
  - Berita Acara Forum Penataan Ruang



- Berita Acara TKPRD Jalan Nasional
- Berita Acara TKPRD Pemuktahiran RIP (Rencana Induk Pelabuhan Anggrek)
- Rapat Koordinasi Pemenuhan Readiness Criteria Rencana Pengembangan Pelabuhan Talamuta.

✓ Sub Kegiatan : Sistem informasi penataan ruang

Output : Jumlah 1 Laporan, yakni : SIPETARUNG TANGKAS (Sistem Informasi Pengelolaan Tata Ruang Pertanahan).

4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Output : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang sejumlah **3 Kegiatan** dari target 3 kegiatan.

- Laporan Audit Tata Ruang Tahun 2022
- Pengumpulan Bahan dan Keterangan Audit Danau Limboto
- Pengumpulan Bahan dan Keterangan Pengendalian GORR

## 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi.

1) Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

✓ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Output : Jumlah Tenaga Jasa Konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing sejumlah 97 orang dari target 240 orang

- Pelatihan ketrampilan tukang pada bulan maret (25 orang), Juli (25 Orang), 50 Orang.
- Pelatihan Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung sebanyak 47 Orang.

✓ Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Output : Jumlah Badan Usaha yang Berkualitas sejumlah 100 orang dari target 105 orang.

- Kegiatan Sosialisasi Jasa Konstruksi sebanyak 50 Orang
- Kegiatan Workshop Jasa Konstruksi sebanyak 50 Orang

2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi jasa Konstruksi (SIPJAKI)

✓ Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI

Output : Jumlah Kegiatan sejumlah 1 dari target 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Bimbingan



Teknis SIPJAKI, 18-20 Oktober 2022 di Kota Gorontalo.

## **10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**

Outcome dari program adalah Persentase Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan Volume Sampah yang Dikelola.

### 1) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan  
Output : Jumlah Volume Sampah Yang Dikelola sejumlah **37.016 Ton** dari target 25.880 Ton.
  - Akumulasi jumlah sampah Kabupaten Gorontalo dari bulan Januari-Desember sejumlah 7421 Ton
  - Akumulasi jumlah sampah Polda dari bulan Januari-Desember sejumlah 0,164 Ton
  - Akumulasi jumlah sampah Bank Indonesia dari bulan Januari-Desember sejumlah 0,024 Ton
  - Akumulasi jumlah sampah Desa Tenggela dari bulan Januari-Desember sejumlah 0,137 Ton
  - Akumulasi jumlah sampah Desa Lupoyo dari bulan Januari-Desember sejumlah 0,056 Ton
  - Akumulasi jumlah sampah Kota Gorontalo dari bulan Januari-Desember sejumlah 26.334 Ton
  - Akumulasi jumlah sampah Kabupaten Bonebolango dari bulan Januari-Desember sejumlah 3.157 Ton
- ✓ Sub Kegiatan : Fasilitas Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota  
Output : Jumlah Volume Sampah Yang Dikelola sebanyak **1439 Ton** dari target 640 Ton.
- ✓ Sub Kegiatan : Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan.  
Output : Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan pelatihan pengelolaan Persampahan **0 orang** dari target 650 orang.

## **11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan**

Outcome dari program adalah :

- Persentase Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
- Persentase Peningkatan Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

### 1) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



Output : Presentase Pelayanan Jasa admin perkantoran sejumlah 100% dari target 100%.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD LAB)

Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sejumlah 3 Kegiatan dari target 3 kegiatan.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sejumlah 3 Kegiatan dari target 3 kegiatan.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (UPTD LAB)

Output : Jumlah kegiatan pelayanan jasa pengujian UPTD LAB sebanyak 1 kegiatan dari target 1 kegiatan.

3) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek sejumlah 75 orang dari target 150 orang, yakni kegiatan Sosialisasi SKP Pegawai.

4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sejumlah 1 kegiatan dari target 1 kegiatan

- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD.

Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sejumlah 1 kegiatan dari target 1 kegiatan

5) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sejumlah 6 kegiatan dari target 3 kegiatan, yaitu Penyusunan Dokumen Renstram Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan

- ✓ Sub Kegiatan : Evaluasi kinerja perangkat daerah

Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sejumlah 4 kegiatan dari target 1 kegiatan, yang terdiri dari LKPJ, LPPD, LAKIP, Kegiatan Penyusunan Dokumen Realisasi Fisik

### 3) **Permasalahan dan Solusi**

#### Permasalahan :

Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi diawali dengan tahapan proses pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini proses lelang yang cukup menyita waktu disebabkan oleh tahapan review paket lelang dari Pokja Pengadaan yang dilakukan beberapa kali sebelum dapat ditayang pada





website LPSE. Hal ini akan berdampak pada waktu pelaksanaan yang tidak optimal (berkurang) sehingga progres pelaksanaan fisik di lapanganpun sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai 100%.

Solusi :

- Proses penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilaksanakan sebelum masuk tahun anggaran berkenaan, sehingga proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan/lelang dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran dan paling lambat Bulan Maret sudah selesai dengan memprioritaskan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya sampai dengan sembilan bulan.
- Jumlah Personil Pokja Pengadaan perlu disesuaikan dengan rata-rata jumlah paket pengadaan/lelang yang akan dievaluasi dan menyampaikan jadwal revidi paket lelang ke KPA.
- Untuk pekerjaan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai akan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya/ luncuran anggaran, sedangkan untuk lanjutan pekerjaan fisik lapangan akan diberlakukan pemberian kesempatan (50 Hari) sesuai peraturan yang berlaku.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 , khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.22**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Jaringan Irigasi Pertanian	100%	89,11%	100%	89,11%
2	Persentase Pengaman Sungai Yang Sesuai Standar	100%	129,36%	100%	120%
3	Persentase Tanggul Pengaman Pantai Yang Sesuai Standar	100%	25,4%	100%	24%
4	Persentase Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Dalam Kondisi Baik	70,22%	60,05%	65.02%	58.02%
5	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis	70,22%	60,05%	65.02%	58.02%
6	Persentase Jumlah Kawasan Permukiman Yang Mempunyai Sanitasi Air Bersih	100%	0%	100%	10.49%
7	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%

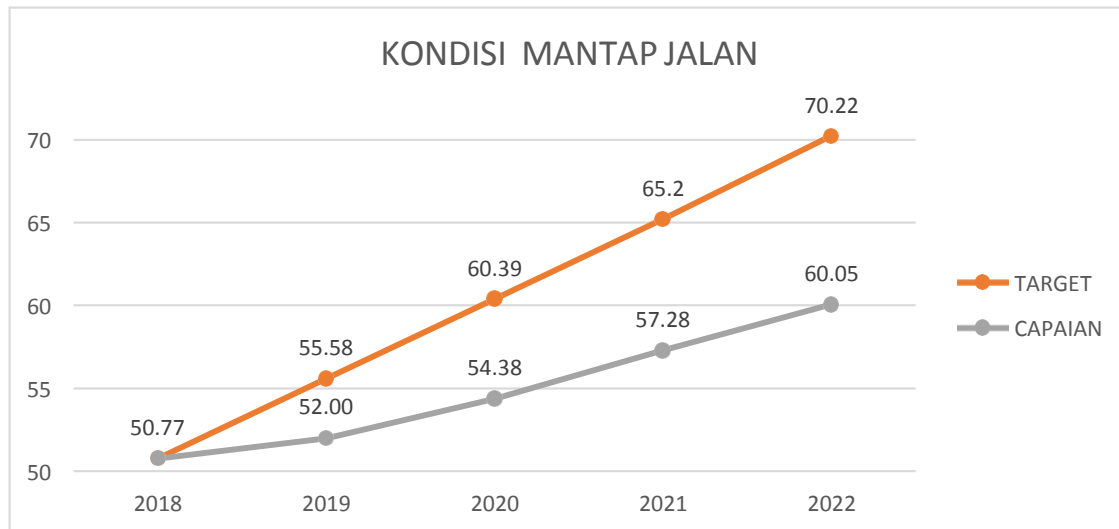


**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

1. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai 2022 sebagai berikut :

**Grafik 3.16**

Target dan Capaian Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PRKP Provinsi Gorontalo, 2022

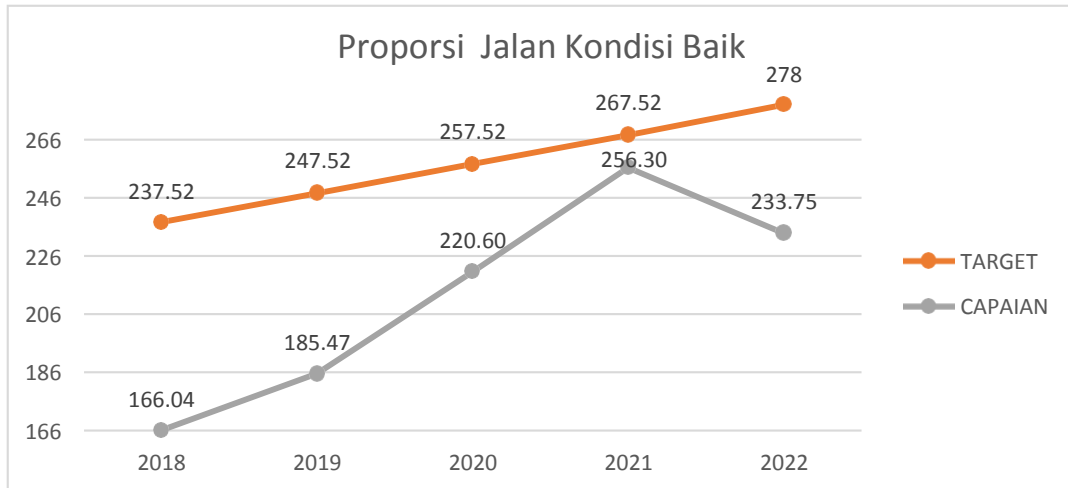
Kondisi mantap Jalan dari tahun ketahun terjadi trend peningkatan tetapi masih dibawah target RPJMD dikarenakan Permasalahan Anggaran, Formula Perhitungan kondisi Mantap jalan dihitung dari jumlah panjang jalan dengan kondisi Baik dan sedang pada jalan kewenangan Provinsi dibagi Total panjang jalan Kewenangan provinsi di kali 100%. Sebagai informasi panjang Jalan kewenangan Provinsi diatur Berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi di Provinsi Gorontalo. Total Panjang Jalan menurut Keputusan Gubernur tersebut sepanjang 467,17 Km dari 40 Ruas jalan tersebar.

2. Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik di Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai dengan 2022 Sebagai berikut :



**Grafik 3.17**

Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022



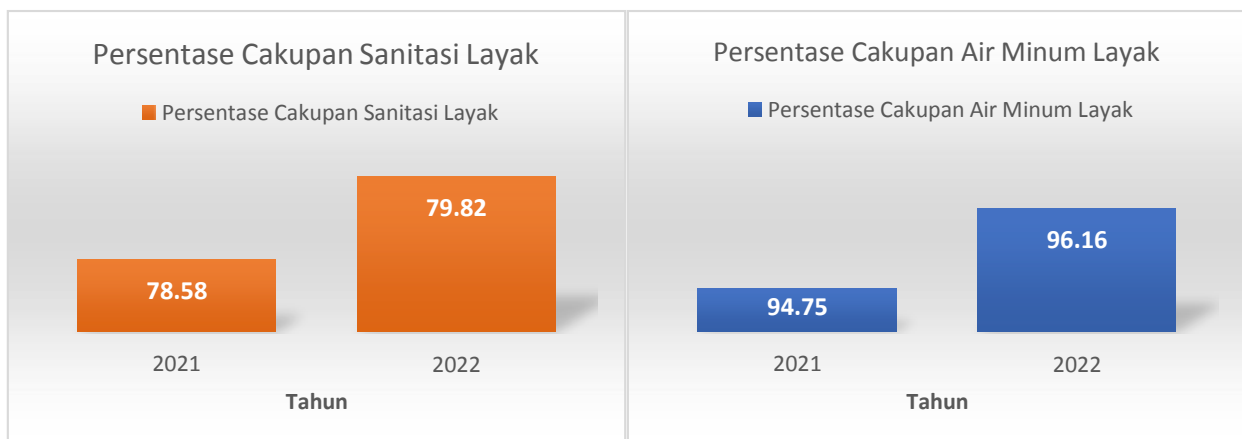
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PRKP Provinsi Gorontalo, 2022

Tahun 2022 terjadi penurunan jalan dalam kondisi baik tahun 2022 dari 256,30 Km menjadi 233,75 Km atau terjadi penurunan kondisi jalan sepanjang 22,55 km dibanding tahun 2021. Hal ini diantaranya disebabkan oleh terjadinya banjir dan longsor di beberapa lokasi. Selain itu aktivitas kendaraan berat yang semakin tinggi juga mempengaruhi terhadap penurunan kondisi jalan.

3. Persentase Cakupan Sanitasi dan Air Minum Layak

**Grafik 3.18**

Persentase Cakupan Sanitasi dan Air Minum Layak Provinsi Gorontalo 2021-2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Persentase cakupan sanitasi layak dan cakupan air minum layak Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, masing-masing yaitu untuk Persentase Cakupan Sanitasi Layak sebesar 79,82 persen, dan cakupan air minum layak sebesar 96,16 persen. Akan tetapi dari sisi kewenangan, kegiatan pengelolaan air minum tidak dapat dilaksanakan karena untuk sambungan rumah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, hal ini karena Pemerintah Provinsi belum mempunyai layanan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional. Untuk kegiatan fisik pengelolaan air minum tidak dilaksanakan tahun 2022, namun dilaksanakan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya. Sementara untuk sanitasi, jumlah jiwa yang terlayani Sanitasi sebanyak 496 jiwa yang tersebar, dari target 7180 Jiwa. Perhitungan Jumlah Jiwa yang terlayani Sanitasi didasarkan dari Panjang drainase yang dibangun, dengan asumsi setiap 10 meter dapat melayani sanitasi sebanyak 1 KK (5 jiwa).

Pada Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, terdapat subkegiatan Evaluasi Rancangan Perda Tentang RTRW dan RRTR Kab/Kota dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang keduanya realisasi masih 0 dikarenakan kegiatan evaluasi rancangan perda RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan Perda revisi RTRW Provinsi Gorontalo masih dalam tahapan sinkronisasi data dengan dokumen RZWP3K sehingga kegiatan di alihkan untuk percepatan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Gorontalo dan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang dikarenakan Perda revisi RTRW Provinsi Gorontalo masih dalam tahapan sinkronisasi data dengan dokumen RZWP3K sehingga kegiatan di alihkan untuk percepatan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan kegiatan ini dari tahun ketahun sebagai berikut :

Berikut ini adalah Kronologis dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR khususnya Bidang Penataan Ruang dalam Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi gorontalo.

- 1) Penetapan Peninjauan Kembali (PK) Pada Tahun 2016 (Kewenangan Masih di Bappeda) Dalam Peninjauan kembali, merekomendasikan dilakukannya Revisi RTRW Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2016.
- 2) Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Provinsi Gorontalo mulai dilaksanakan pada tahun 2017.
- 3) Melakukan Pengumpulan data dan informasi. Terhadap instansi dan stakeholder pada tahun 2017.
- 4) Melakukan Penyusunan Administrasi berupa Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah



- dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara Pada Tahun 2017.
- 5) Melakukan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Provinsi Gorontalo, kemudian dilanjutkan dengan tahapan Validasi Pada Akhir Tahun 2017.
  - 6) Melakukan Asistensi Peta di Badan Informasi Geospasial (BIG) dan telah mendapatkan Rekomendasi Peta dari BIG Pada Tahun 2017 – 2018.
  - 7) Melakukan Asistensi / Konsultasi Pertama, Kedua dan Ketiga terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan ke Kementerian ATR/BPN, khususnya Subdit Binwil III Pada Tahun 2018.
  - 8) Melakukan sinkronisasi terhadap muatan Revisi RTRW Provinsi dengan Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2018.
  - 9) Melakukan Asistensi lanjutan terhadap Dokumen Teknis dengan Subdit Binwil III Kementerian ATR/BPN pada Tahun 2019.
  - 10) Revisi RTRW Provinsi sudah siap untuk Lintas Sektor pada tahun 2019. Namun dikarenakan Pengajuan dokumen pada akhir tahun 2019 dan antrian untuk Lintas sektor begitu banyak, maka Kementerian ATR/BPN menjadwalkan kembali Lintas Sektor pada tahun 2020.
  - 11) Penganggaran Dokumen RTRW mengalami pemangkasan untuk Penanggulangan Covid 19. Pada tahun yang sama juga terbit Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Yang mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam muatan Revisi RTRW Provinsi Gorontalo, sehingga Progress Revisi RTRW mengalami perlambatan Pada Tahun 2020.
  - 12) Perbaikan Peta Kawasan Hutan dan Asistensi Peta dasar dan Garis Pantai tetap dilanjutkan bersamaan dengan penyelesaian konflik terhadap kawasan perbatasan (Kabupaten Pohuwato – Kabupaten buol, Kabupaten Gorontalo Utara – Kabupaten Buol) pada tahun 2021.
  - 13) Berdasarkan amanat dari UU Cipta kerja No. 11 Tahun 2020 dan PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Regulasi Turunannya, mengharuskan adanya perubahan terhadap muatan Substansi Revisi RTRW Provinsi Gorontalo yang harus terintegrasi dengan Muatan RZWP3K yang telah disetujui oleh Kementerian KKP.
  - 14) Pembahasan integrasi Materi teknis RTRW provinsi, penyesuaian peta dan Materi Teknis RZWP3K dimulai berdasarkan pedoman PP No. 21 Tahun 2021, Permen 14 tahun 2021 dan Permen KP No. 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang Laut.
  - 15) Bersamaan dengan Terbitnya PP No. 21 Tahun 2021, terbit juga Permen KP No. 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagai pedoman Perubahan Materi



- Teknis RZWP3K yang sudah berproses sejak Bulan September 2021 sampai dengan keluarnya persetujuan teknis dari Kementerian KKP pada bulan Agustus 2022.
- 16) Pada Awal Tahun 2022 dilakukan konsultasi ke Bappeda terkait Penganggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Naskah Akademis, yang belum termuat dalam Penganggaran Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Dari diskusi yang dilakukan, didapatkan saran untuk melakukan persegeseran anggaran untuk alokasi kegiatan KLHS.
  - 17) Pendekatan pada Tim Penyusun KLHS dilakukan pada awal tahun 2022. Pada pertengahan tahun 2022, Anggaran Tenaga Ahli Penyusun KLHS siap dan dapat digunakan. Pada bulan September dimulai Penyusunan Dokumen KLHS Integrasi Revisi RTRW Provinsi Gorontalo.
  - 18) Proses Penyusunan Dokumen KLHS sudah sampai pada tahapan akhir dan juga sudah melalui Konsultasi Publik 1 dan 2. Selanjutnya tahapan validasi KLHS dijadwalkan pada Bulan Januari-Februari 2023 oleh Kementerian LHK.
  - 19) Pada Rapat Koordinasi antara Tim Revisi RTRW dan Kementerian ATR/ BPN di Bulan November 2022, Provinsi Gorontalo ditargetkan untuk melaksanakan Lintas Sektor pada bulan Maret 2023 dikarenakan ada beberapa penyesuaian muatan substansi. berikut merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka mempercepat proses pembentukan perda RTRW Provinsi Gorontalo
    - a. Menyelesaikan kegiatan Validasi Integrasi KLHS oleh tim Pokja KLHS di Kementerian KLHK di Bulan Januari-Februari 2023.
    - b. Mendorong Kabupaten/Kota untuk segera menetapkan luasan KP2B (Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan) dalam bentuk Berita Acara.
    - c. Melakukan Harmonisasi dengan Lembaga Hukum.
    - d. Membentuk tim Pokja RTRW oleh DPRD Provinsi Gorontalo.
    - e. Membuat Konsultasi Publik ke III
    - f. Mendorong TIM RTRW dalam hal ini adalah Tenaga Ahli Peta dan Dokumen Ranperda dan Indikasi Program untuk dikarantina selama bulan Januari dan Februari untuk penyelesaian sinkronisasi data.
    - g. Melakukan kegiatan pra linsek dengan Kementerian ATR di Bulan Februari 2023.
    - h. Melakukan Kegiatan Linsek dengan Kementerian ATR di Bulan Maret Tahun 2023.
    - i. Melakukan Kegiatan Perbaikan Hasil Linsek di Bulan Maret 2023, dan
    - j. Melakukan Persetujuan Substansi di Bulan April 2023
    - k. Perda (Peraturan Daerah) di Bulan Mei Tahun 2023.



4. Pada Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi output masih 0 dikarenakan Pelaksanaan Kegiatan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang diselenggarakan melalui penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Bidang penataan ruang belum dapat dilaksanakan dikarenakan Perda revisi RTRW Provinsi Gorontalo masih dalam tahapan sinkronisasi data dengan dokumen RZWP3K sehingga kegiatan di alihkan untuk percepatan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Gorontalo.

#### **6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tidak menerima penghargaan nasional.

#### **7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tidak melaksanakan perjanjian Kerjasama/MOU.

### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

#### **1) Tujuan dan Sasaran**

##### **a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Gorontalo**

1. Meningkatkan ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan
2. Meningkatkan Kualitas Permukiman Provinsi Gorontalo
3. Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana dan prasarana dan SDM yang berkompeten
4. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan



**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.23**  
Target dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
<b>1</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan</b>	<b>Indikator Sasaran : Rasio Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Misk</b>	<b>800 Unit</b>	<b>50 Unit</b>	<b>800 Unit</b>	<b>150 Unit</b>	<b>6.75</b>
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Hunian yang terbangun bagi masyarakat miskin	800 Unit	50 Unit	800 Unit	150 Unit	6.75
		Jumlah unit rumah yang terbangun/ rehab bagi korban bencana alam dan dampak pembangunan Provinsi	25 Unit	-	N/A	N/A	0
<b>2</b>	<b>Sasaran : Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo</b>	<b>Indikator Sasaran : Presentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>24 Ha</b>	<b>24 Ha</b>	<b>100</b>
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan yang ditangani	35%	35%	24 Ha	24 Ha	100
<b>3</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>Indikator Sasaran : Tersedianya Layanan Administrasi, sarana prasarana dan SDM yang berkompeten</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Sasaran : Terselenggaranya Perencanaan ,Monitoring , evaluasi dan pengendalian serta terlaksanannya koordinasi dan kerja sama dilingkungan dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD, lintas kab/ kota maupun K/L</b>	<b>Indikator Sasaran : Terwujudnya optimalisasi pelayanan dan manejerial pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>100</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100





**2) Program dan Kegiatan**

**Tabel. 3.24**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penataan Ruang  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.369.512.965</b>	<b>1.297.369.487</b>	<b>94.73</b>	<b>100</b>	<b>99.25</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	190.795.649	181.640.681	95.20	100	99.65	100
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	112.970.073	108.150.420	95.73	100	99.42	100
	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	N/A	N/A	N/A	N/A	99.94	100
	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	N/A	N/A	N/A	N/A	99.65	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	77.825.576	73.490.261	94.43	100	N/A	N/A
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	554.313.822	496.466.347	89.56	100	99.28	100
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	190.794.987	171.607.120	89.94	100	99.40	100
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	228.173.122	205.289.625	89.97	100	99.12	100
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	135.345.713	119.569.602	88.34	100	N/A	N/A
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	624.403.494	619.262.459	99.18	100	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	624.403.494	619.262.459	99.18	100	N/A	N/A
<b>2</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>7.347.491.099</b>	<b>6.656.365.801</b>	<b>90.59</b>	<b>100</b>	<b>78.64</b>	<b>82.55</b>
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan	2.064.454.636	2.002.318.515	96.99	100	99.37	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	534.823.041	526.596.261	98.46	100	99.99	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.529.631.595	1.475.722.254	96.48	100	98.94	100
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.283.036.463	4.654.047.286	88.09	100	76.67	82
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	95.96	100
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.532.679.654	2.507.334.968	99.00	100	74.51	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.750.356.809	2.146.712.318	78.05	100	80.28	100
<b>3</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>8.557.064.979</b>	<b>7.954.166.979</b>	<b>92.95</b>	<b>100</b>	<b>98.44</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	517.230.684	514.775.711	99.53	100	98.21	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.761.684	64.279.796	99.26	100	94.29	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	452.469.000	450.495.915	99.56	100	99.77	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.065.620.223	5.493.780.730	90.57	100	99.40	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.018.904.633	5.447.181.145	90.50	100	99.41	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46.715.590	46.599.585	99.75	100	98.84	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.392.000	70.408.330	98.26	100	98.36	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	71.392.000	70.408.330	98.26	100	98.36	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Tugas dan Fungsi						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.436.295	456.790.300	98.35	100	99.73	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	464.436.295	456.790.300	98.35	100	99.73	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.438.385.777	1.418.411,908	98.61	100	94.75	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.438.385.777	1.418.411.908	98.61	100	94.75	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.274.069.043</b>	<b>15.907.902.267</b>	<b>92.09</b>	<b>99.55</b>	<b>86.89</b>	<b>87.77</b>

1. Program Pengembangan Perumahan

Outcome dari program adalah 3 Dokumen dan 2 Laporan, antara lain :

- Tersedianya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
- Tersedianya Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Catatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 fokus melaksanakan Pendataan dan Sosialisasi di 6 Kabupaten Kota, untuk tersedianya 3 Dokumen dan 2 Laporan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Berikut Penjelasan selengkapnya.

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Output kegiatan adalah 3 (tiga) dokumen kegiatan, terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.  
Output Sub Kegiatan : 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi.
- ✓ Sub Kegiatan : Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.  
Output Sub Kegiatan : 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.



- ✓ Sub Kegiatan : Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.

Output Sub Kegiatan : 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus.

2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Output kegiatan adalah 2 (dua) laporan kegiatan dan 1 (satu) Surat Keputusan, terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Sub Kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.

Output Sub Kegiatan : 1 (satu) laporan yaitu Laporan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.

- ✓ Sub Kegiatan : Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

Output Sub Kegiatan : 1 (satu) laporan yaitu Laporan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

- ✓ Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator.

Output Sub Kegiatan : 1 (satu) Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator.

3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Output kegiatan adalah 1 (satu) laporan kegiatan, terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Output Sub Kegiatan : 1 (satu) laporan yaitu Laporan Pembangunan Rumah Korban Bencana.

2. Program Kawasan Permukiman

Outcome dari program adalah Persentase luasan kawasan yang ditangani pada tahun 2022 sebesar 35% di Kabupaten Boalemo, dimana besaran persentase luasan kawasan yang ditangani sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

- 1) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.

Output kegiatan adalah 2 (dua) laporankegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) Sub



Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan : Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

Output Sub Kegiatan : 1 (satu) laporan yaitu Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Output sub Kegiatan : 1 (satu) laporan yaitu Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- 2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.

Output kegiatan adalah 2 Dokumen, Terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- ✓ Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.

Output Sub Kegiatan : Tahun 2022 penanganan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin sejumlah 50 unit dilaksanakan melalui metode Swakelola Kelompok Masyarakat (Pokmas swakelola tipe IV Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan perubahan pertama No. 12 Tahun 2021 dan perubahan kedua No. 93 Tahun 2022) dengan biaya Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unit rumah dengan cakupan luas minimal 30 M<sup>2</sup> dan hanya dapat ditangani di Kota Gorontalo 10 unit, Kab. Gorontalo 30 Unit dan Kab. Boalemo 10 Unit sesuai dengan lokasi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- Kota Gorontalo 10 Unit : - Kelurahan Leato Selatan 4 Unit;  
- Kelurahan Donggala 6 Unit
- Kabupaten Gorontalo 30 Unit : - Desa Mongolato 3 Unit;  
- Desa Dulohupa 9 Unit;  
- Kelurahan Dutulanaa 4 Unit;  
- Kelurahan Bongohulawa 5 Unit; dan  
- Kelurahan Bolihuangga 9 Unit.
- Kabupaten Boalemo 10 Unit : - Desa Piloliyanga 5 Unit; dan  
- Desa Hungayonaa 5 Unit.

- ✓ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.



Output Sub Kegiatan : 24Ha Luasan Permukiman Kumuh yang diremajakan/dipugar, dengan jenis pekerjaan dan lokasi diantaranya:

Kabupaten Boalemo di 2 (dua) Desa/Kelurahan dengan Total Panjang Pekerjaan Jalan Lingkungan Paving Block Color Mix K300 3.451, M<sup>2</sup>. Berikut penjelasannya :

- Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta : Pekerjaan Jalan Lingkungan Paving Block Color Mix K300 Volume 9 Lokasi yang masing-masing lokasi sepanjang 910 M<sup>2</sup> dengan total panjang pekerjaan adalah 3.031 M<sup>2</sup>
- Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta : Pekerjaan Jalan Lingkungan Paving Block Color Mix K300 Volume 1 Lokasi dengan total panjang pekerjaan 420 M<sup>2</sup>

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Persentase Peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur sebesar 100%
  - Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Output kegiatan adalah Jumlah Laporan kegiatan sebanyak 7 laporan. Terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.  
Output Sub Kegiatan : 4 (empat) laporan yaitu Laporan Perencanaan Perangkat Daerah.
    - ✓ Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Output Sub Kegiatan : 3 (tiga) laporan yaitu Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Output kegiatan adalah Jumlah Laporan kegiatan sebanyak 1 laporan keuangan.
    - ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Output Sub Kegiatan : 12 bulan yaitu ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
    - ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.  
Output Sub Kegiatan : 1 (satu) laporan yaitu Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Output kegiatan adalah Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan sebanyak 3 Orang. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :



- ✓ Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output Sub Kegiatan : 3 Orang Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan : 1 Kegiatan yang disediakan pada Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output kegiatan adalah Persentase Peningkatan layanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan : 100% Persentase peningkatan layanan administrasi perkantoran.

### 3) Permasalahan dan Solusi

a. Program Pengembangan Perumahan

Permasalahan :

- DPA induk Dinas PRKP Provinsi Gorontalo TA. 2022 terdapat rencana pembangunan rumah bagi korban bencana sebanyak 25 Unit dengan spesifikasi rumah layak huni (mahyani) dengan luas 36 meter persegi dan harga satuan 50 juta rupiah. Perencanaan ini berdasarkan PermenPUPR No 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR, dan hasil pendataan rumah korban bencana atas kejadian bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.
- Penyiapan readiness criteria telah selesai, antara lain permohonan bantuan dari Bupati Bone Bolango kepada Gubernur Gorontalo, dokumen Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) atas kejadian bencana di Bulawa, bukti kepemilikan pemda atas lahan lokasi pembangunan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) ada, SK Bupati Penetapan Lokasi Pembangunan di Desa Mopuya dan Mamungaa, dan SK Bupati Penetapan Penerima Layanan untuk Lokasi Desa Mopuya.
- Pergeseran Anggaran diajukan, diantaranya jenis bantuan sosial diubah menjadi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat karena korban bencana dinilai tidak harus masuk dalam daftar DTKS; jumlah unit rumah dari 25 Unit rumah konvensional dengan harga satuan Rp. 50.000.000,00 menjadi 12 Unit Risha dengan harga satuan Rp. 103.550.000,00 karena





jenis Risha dinilai ramah bencana dan tahan gempa, dan penyiapan dokumen DED Risha oleh Konsultan Individu. Pergeseran ini disetujui oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo pada Tanggal 18 April 2022.

- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyiapkan lahan lokasi pembangunan di Desa Mopuya. Namun pada Tanggal 21 April 2022 dilakukan kunjungan stake holder OPD Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango ke lokasi pembangunan di Desa Mopuya, Desa Mamungaa, dan Desa Mamungaa Timur Kecamatan Bulawa. Hasil kunjungan bahwa lokasi Desa Mopuya dinilai tidak layak karena rawan longsor dan merupakan tanah sengketa. Lahan di Desa Mamungaa dipilih sebagai lokasi pengganti, karena lebih datar namun harus dilakukan land clearing terlebih dahulu.
- Permohonan proses lelang Pembangunan RKB di Desa Mamungaa Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango kepada Kepala UKPBJ Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo pada Tanggal 30 Juni 2022.
- Hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) kegiatan Pemantauan Penerapan SPM Tahun 2022, dan Pengintegrasian SPM Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri pada Tanggal 7 Juli 2022, bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak dapat membangun Rumah Korban Bencana jika Bukan Status Darurat Bencana Tingkat Provinsi. Penyediaan rumah bagi korban bencana seharusnya sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota/provinsi. Bencana di Kecamatan Bulawa adalah bencana kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten Bone Bolango yang seharusnya melaksanakan pembangunan. Solusi dari hasil Rakorpusda adalah pemindahan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana di Desa Mamungaa Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.
- Pada Tanggal 9 Agustus 2022, Asisten II Setda Provinsi Gorontalo memimpin rapat dan memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar menyurat resmi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, terkait kesiapan melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana di Bone Bolango, dan rencana pemindahan anggaran akan ditindaklanjuti dengan rapat di tingkat TAPD Provinsi Gorontalo. Tertanggal yang sama, Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, atas nama Bupati Bone Bolango kepada Penjabat Gubernur Gorontalo perihal Penyampaian Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango siap melaksanakan pembangunan fisik rumah bagi korban bencana di Desa Mamungaa Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.
- Rapat KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 antara OPD, TAPD, dan Banggar DPRD Provinsi





Gorontalo pada Tanggal 6 September 2022 di Ruang Dulohupa Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, diantaranya adalah Banggar DPRD tidak menyetujui pemindahan anggaran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, karena Pemerintah Provinsi Gorontalo masih membutuhkan anggaran untuk melaksanakan program strategis lainnya, dan anggaran ditarik ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu pembangunan rumah bagi korban bencana tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas PRKP Provinsi Gorontalo.

**Solusi :**

- Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Perumahan Rakyat harus berdasarkan status bencana skala provinsi
- Selalu mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan terkait SPM di kabupaten/kota.
- Melakukan rapat dan koordinasi lintas sektor terhadap penyelenggaraan SPM (Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi).
- Menyiapkan penyusunan Rencana Induk SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo.

**Program Kawasan Permukiman**

**Permasalahan :**

- Sering terjadi perubahan lokasi di Desa Piloliyanga Kabupaten Boalemo pada saat pelaksanaan pembangunan yang disebabkan lahan yang menjadi lokasi pembangunan adalah milik masyarakat dan tidak adanya pembebasan lahan.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di Desa Hungayonaa Kabupaten Boalemo disebabkan oleh penyedia jasa yang tidak menguasai dan belum berpengalaman.
- Sasaran penerima bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin tahun 2021 sesuai dengan nomenklatur kegiatan dalam SIPD yaitu Rehap atau Perbaikan dengan persyaratan :
  - WNI dan berdomisili tetap;
  - Keluarga/KK Terdaftar dalam DTKS (pencatatan data kemiskinan);
  - Menempati Rumah/tempat tinggal dalam kondisi tidak layak huni (RTLH);
  - Mengusai lahan tempat berdirinya bangunan rumah dan bebas sengketa; dan
  - Tidak masuk dalam kawasan rawan bencana dan lokasi pengembangan provinsi/kabupaten kota.
- Pemohon tidak/belum tercatat dan terdaftar dalam data kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Pemohon tidak/belum memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah (rumah dan lahan/tanah berstatus budel);



- Lokasi pemohon menempati lahan pendirian bangunan dilokasi rawan bencana;
- Lokasi Pemohon tidak masuk dalam lokasi kewenangan Pemerintah Provinsi (kawasan permukiman)

**Solusi :**

- Lebih mengintensifkan koordinasi dan sosialisasi
- Anggaran yang ditetapkan tidak berubah sehingga sesuai dengan lokasi yang menjadi rencana.
- Adminitrasi/Surat Keputusan bahwa lokasi tersebut sudah ditetapkan.
- Mendorong Pemerintah setempat untuk didaftarkan atau diusulkan dalam pencatatan data kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Mendorong Pemerintah setempat untuk dapat memfasilitasi penyediaan lahan dan bukti penguasaan tanah dengan atas hak yang sah;
- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerintah pusat agar dapat diintervensi melalui penganggaran sesuai dengan lokasi kewenangan masing-masing;
- Mensosialisasikan kegiatan agar kedepannya dapat dipersiapkan lebih awal;
- Meningkatkan koordinasi terhadap pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten dan kecamatan terhadap program pemerintah provinsi terkait penanganan permukiman kumuh kenenangan provinsi;
- Berharap dalam penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuholeh kepala daerah Kabupaten/Kota lebih memperhatikan wilayah penanganan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- Memperbanyak kegiatan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- Mengedepankan sosialisasi terhadap segala bentuk perubahan yang berkaitan erat dengan perencanaan pada setiap kegiatan;
- Melakukan koordinasi terhadap penyediaan lahan dengan difasilitasi oleh pemerintah desa terhadap pergantian lokasi (lahan) dengan mengoptimalkan perangkat desa dan aparat terhadap pengenalan untuk pengentasan kawasan kumuh dalam hal untuk penyediaan lokasi sebelum pembangunan dimulai;
- Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan perangkat desa terhadap peningkatan kawasan permukiman kumuh yang masuk dalam kewenangan provinsi;
- Meningkatkan koordinasi terhadap pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten dan kecamatan terhadap program pemerintah provinsi terkait penanganan permukiman kumuh kenenangan provinsi.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.25**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Rumah Hunian yang terbangun bagi masyarakat miskin	800 Unit	50 Unit	800 Unit	150 Unit
	Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehab bagi Korban bencana alam Provinsi dan dampak pembangunan provinsi	25 Unit	N/A	5 Unit	N/A
2	Luasan Kawasan yang di tangani	38 Ha	38 Ha	24 Ha	24 Ha

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Pada awal tahun anggaran 2022 **berdasarkan Nomor DPA: DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.08.0000/001/2022** mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 18,966,249,043,00** dan pada bulan Oktober 2022 dimana **berdasarkan Nomor DPA: DPPA/B.1/1.04.0.00.0.00.08.0000/001/2022** alokasi pagu anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp. 17.274.069.043,00**. Berikut beberapa hal – hal lain yang dilaporkan diantaranya

- a. Pada tahun 2022 seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026. Dikarenakan hal itu, kami melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi di Kabupaten/Kota sebagai pengumpulan data yang dituangkan pada 2 dokumen tersebut;
- b. Pada awal tahun anggaran 2022 berdasarkan keputusan rapat pembahasan TAPD alokasi anggaran Gaji Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami pengurangan yang semula OPD merencanakan untuk 12 Bulan, berubah menjadi 10 Bulan, dan pada bulan Oktober 2022 sisa 2 Bulan dialokasikan kembali sehingga dapat terakomodir sampai dengan bulan Desember 2022 untuk Gaji Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK). Dikarenakan hal itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 200.420.000,00;
- c. Dalam rangka mengoptimalkan progress kegiatan sampai dengan bulan Desember di tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan tahapan pergeseran dan perubahan anggaran;



- d. Penanganan terkait Rumah Korban Bencana pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak tersedia atau N/A (Not Available) dikarenakan tidak terjadinya bencana skala provinsi untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal), dan untuk penjelasan di tahun 2022 sudah dituangkan pada permasalahan Program Pengembangan Perumahan pada poin penjelasan diatas; dan
- e. Rekapitulasi Capaian Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Provinsi Gorontalo

**Tabel 3.26**  
Rekapitulasi Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Gorontalo

NO.	KOTA / KAB.	KECAMATAN	KAWASAN	KUMUH AWAL			KUMUH AKHIR			CAPAIAN PENGURANGAN LUAS KUMUH (Ha) 12=6-11
				LUAS (Ha)	SKOR	TINGKAT KEKUMUHAN	SKOR	TINGKAT KEKUMUHAN	LUAS (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KAB. BOALEMO	TILAMUTA	HUNGAYONAA	14,56	20	KUMUH RINGAN	18	TIDAK KUMUH	0,00	14,56
2	KAB. BOALEMO	TILAMUTA	PILOLIYANGA	13,93	23	KUMUH RINGAN	18	TIDAK KUMUH	0,00	13,93
3	KAB. GORONTALO	LIMBOTO	BOLIHUANGGA	10,89	27	KUMUH RINGAN	18	TIDAK KUMUH	0,00	10,89
4	KAB. GORONTALO	LIMBOTO	BONGOHULAWA	10,89	25	KUMUH RINGAN	15	TIDAK KUMUH	0,00	10,89
5	KAB. GORONTALO	LIMBOTO	DUTULANAA	10,14	23	KUMUH RINGAN	9	TIDAK KUMUH	0,00	10,14
6	KAB. GORONTALO	TELAGA	DULOHUPA	10,12	23	KUMUH RINGAN	18	TIDAK KUMUH	0,00	10,12
7	KAB. GORONTALO	TELAGA	MONGOLATO	14,47	23	KUMUH RINGAN	18	TIDAK KUMUH	0,00	14,47
8	KOTA GORONTALO	HULONTHALANGI	DONGGALA	12,90	25	KUMUH RINGAN	14	TIDAK KUMUH	0,00	12,90
9	KOTA GORONTALO	DUMBO RAYA	LEATO SELATAN	11,23	30	KUMUH RINGAN	18	TIDAK KUMUH	0,00	11,23
REKAPITULASI KAB. BOALEMO				28,49					-	28,49
REKAPITULASI KAB. GORONTALO				56,51					-	56,51
REKAPITULASI KOTA GORONTALO				24,13					-	24,13
REKAPITULASI PROVINSI GORONTALO				109,13					-	109,13
PERSENTASE PENGURANGAN LUAS KUMUH										100,00%

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka capaian pengurangan luas kawasan kumuh Provinsi Gorontalo yaitu :

- ❖ Perbaikan RTLH;
- ❖ Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman di Kawasan Kumuh; dan
- ❖ Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik kepada masyarakat.

### 6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional.



**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama/MOU.

**5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

**(A) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo**

- Menurunkan risiko bencana
- Peningkatan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana
- Memulihkan daerah terdampak bencana melalui rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.27**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Terwujudnya masyarakat terlatih dan sadar ancaman bahaya	Indikator Sasaran : - Persentase meningkatnya kapasitas dalam upaya pengurangan risiko bencana	100%	100%	20%	0	100%
		- Persentase pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	100%	100%	20%	5%	100%
	Program Penanggulangan Bencana	Proporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan risiko bencana	100%	100%	85%	60%	100%
2	Sasaran : Meningkatnya Respon Time dan SDM terlatih	Indikator Sasaran : - Rata-rata respon kejadian	3 Jam	3.5 Jam	3.5 Jam	4 Jam	116.67%
		- Proporsi personal penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten	100%	100%	85%	60%	100%
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Darurat Secara Cepat, Tepat, Terpadu Dan Menyeluruh di Daerah	100%	100%	75%	60%	100%
3	Sasaran : Meningkatnya pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana	Indikator Sasaran : Persentase kerusakan yang terehabilitasi (Struktural/Non Struktural) dan terekonstruksi (Struktural)	100%	100%	80%	35%	100%
		Program Penanggulangan Bencana	Proporsi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi dan	100%	100%	70%	70%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
		Terpadu					
4	Sasaran : Meningkatkan administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya	Indikator Sasaran : - Persentase pelayanan administrasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase Sarana Prasarana dan sumber daya yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana & SDM aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.28**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>3.271.980.103</b>	<b>3.157.707.398</b>	<b>96.51</b>	<b>100</b>	<b>89.22</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	492.749.476	485.620.471	98.55	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Resiko Bencana Daerah	492.749.476	485.620.471	98.55	100	-	-
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.667.816.370	1.566.067.255	93.90	100	88.82	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	551.284.018	512.157.459	92.90	100	-	-
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	727.551.345	665.055.410	91.41	100	99.69	100
	Sub Kegiatan Penanganan Pasca bencana Provinsi	388.981.007	388.854.386	99.97	100	88.42	100
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000.395.549	995.293.542	99.49	100	100	100
	Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	357.738.388	356.468.289	99.64	100	100	100

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	417.096.161	414.446.498	99.36	100	100	100
	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	225.561.000	224.378.755	99.48	100	-	-
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	111.018.708	110.726.130	99.74	100	-	-
	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	111.018.708	110.726.130	99.74	100	-	-
<b>2</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>9.069.301.577</b>	<b>8.825.354.770</b>	<b>97.31</b>	<b>100</b>	<b>98.98</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	634.361.084	632.815.306	99.76	100	99.95	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	634.361.084	632.815.306	99.76	100	99.95	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.658.352.889	5.528.305.347	97.70	100	99.19	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56.366.346	56.357.664	99.98	100	-	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.040.000	102.936.324	99.90	100	-	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	103.040.000	102.936.324	99.90	100	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.747.581.257	1.659.556.443	94.96	100	97.68	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	869.600.001	845.383.686	97.22	100	99.35	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	869.600.001	845.383.686	97.22	100	99.35	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.341.281.680</b>	<b>11.983.062.168</b>	<b>97.10</b>	<b>100</b>	<b>95.32</b>	<b>100</b>

1) Program Penanggulangan Bencana

Outcome dari program adalah :

- Persentase Penanganan Darurat Secara Cepat, Tepat, Terpadu Dan Menyeluruh di Daerah
- Proporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan risiko bencana
- Proporsi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi dan Terpadu

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.



- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi  
Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi. Sub kegiatan ini merupakan hasil pemetaan yang berkaitan dengan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tahun 2022 alokasi anggaran yang disediakan adalah Rp.492.749.476,- dan realisasi keuangan adalah Rp.485.620.471,-. (98,55%). Dalam pelaksanaannya hasil output kegiatan berupa dokumen Kajian Resiko Bencana sudah selesai pada tahun 2022 dan akan dilanjutkan dengan melegalisasi dokumen KRB tersebut
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana  
Output Sub Kegiatan : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang legal dan Sikronisasi RPB dalam RPMD Provinsi Gorontalo 2023-2026
  - ✓ Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.  
Output Sub Kegiatan : jumlah aparatur terkait dengan kebencanaan di provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.  
Pada kegiatan tahun 2022 ada beberapa Kabupaten/Kota yang dilakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.
  - ✓ Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana Provinsi.  
Output Sub Kegiatan : jumlah dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun.  
Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan advokasi ke Kabupaten/Kota dengan melakukan pertemuan atau audensi langsung dengan Kepala Daerah masing-masing. Dokumen Jitupasna pada tahun 2022 belum bisa dirampungkan karena keterbatasan data oleh pihak OPD teknis.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- ✓ Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.  
Output Sub Kegiatan : laporan pelaksanaan aktivasi komando penanganan darurat bencana.
  - ✓ Sub Kegiatan : Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana.  
Output Sub Kegiatan : laporan pelaksanaan respon cepat penanganan darurat bencana di Provinsi Gorontalo.





Kejadian bencana banjir dan tanah longsor masih mendominasi di kejadian tahun 2022 dengan 60 kejadian serta mengeluarkan status darurat untuk kejadian bencana banjir dan tanah longsor pada Desember 2022 untuk dua Kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.  
Output Sub Kegiatan : jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam tahun 2022 ini jumlah korban bencana yang tertangani adalah 13.812 Jiwa untuk seluruh Provinsi Gorontalo.

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Daerah.

- ✓ Sub Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana.

Output Sub Kegiatan : dokumen kerjasama antar lembaga, dunia usaha serta lembaga kemitraan lainnya.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana & SDM aparatur
- Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan PD

Output Sub Kegiatan : - Jumlah Dokumen Renstra BPBD Tahun 2023-2026

- Jumlah Dokumen Evaluasi Tahunan
- Persentase Dokumen Kebencanaan dalam SPM Sub Urusan Bencana
- Hasil Penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo Kategori B

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Output Sub Kegiatan : Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Thd Pelayanan Administrasi Keuangan.

- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Output Sub Kegiatan : Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.



Output Sub Kegiatan : Presentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Rencana.

4. Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Perawatan & Operasional Pemeliharaannya.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan : - Jasa kantor yang tersedia tepat waktu.

- Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan jasa administrasi perkantoran dan sarana prasarana.
- Data base yang diselesaikan tepat waktu.
- Dokumen Kepegawaian
- Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pengelolaan Kepegawaian.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan :**

- Program Penanggulangan Bencana
  - a. Dokumen Kebencanaan yang sudah dibuat harus bersifat legalitas sesuai Permendagri Nomor 50 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - b. Kegiatan yang bersifat darurat lebih fokus ke dana penyediaan Belanja Tak Terduga (BTT) tetapi tidak bisa menjadi bagian dalam perhitungan capaian indikator kinerja dari BPBD itu sendiri.
  - c. Penganggaran berbasis kegiatan yang bisa mendorong percepatan capaian indikator kinerja.
  - d. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler
  - e. Tim reaksi cepat (TRC) multisektor masih kurang dari sisi SDM nya karena jumlah yang sangat terbatas sehingga perlu didukung untuk pengoptimalisasi kegiatan di lapangan
  - f. Kurangnya peralatan dan tenaga SDM dalam mengoperasikan alat-alat yang berada di BPBD Provinsi Gorontalo karena peralatan sudah memasuki masa operasi diatas 10 Tahun.

#### **Solusi :**

- a. Perlu adanya koordinasi tingkat lanjutan dengan pihak pengambilan kebijakan karena waktu yang cukup mepet karena dokumen RPB dan KRB adalah dokumen yang sangat strategis di penyusunan dokumen RPMD tahun 2023-2026 nantinya.
- b. Dalam kondisi yang darurat bisa mengoptimalkan proposal pengusulan bantuan baik dana



- Hibah dan Dana Siap Pakai (DSP).
- c. Peran aktif stekholder dalam sistem koordinasi komando dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan perlu dimaksimalkan sehingga dalam kondisi anggaran yang terbatas bisa terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan.
  - d. Perlu adanya Pelatihan SDM tentang Manajemen Data Kebencanaan yang handal.
  - e. Perlu tambahan SDM yang berkompeten dibidang kebencanaan.
  - f. Pengadaan peralatan yang sudah memasuki masa uzur untuk perlu dibackup dengan barang baru, sehingga diperlukan prioritas pengadaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

**Permasalahan :**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler
  - b. Pemenuhan sarana prasarana dalam hal pemeliharaan kendaraan kantor dalam hal penanganan bencana banyak dalam kondisi rusak berat
  - c. Dengan banyaknya kendaraan serta barang yang sudah berumur diatas 10 Tahun keatas sangat dibutuhkan pemeliharaan kendaraan yang sangat besar
  - d. Peralatan penunjang lainnya masih minim karena masih berharap dari bantuan pusat dalam hal ini BNPB

**Solusi :**

- a. Penambahan SDM yang berkompeten di lingkup BPBD Provinsi Gorontalo karena dalam penanganan kebencanaan dan juga fungsi koordinasi sangat diperlukan tenaga yang cekatan, lincah dan sigap.
- b. SDM diberikan pelatihan baik sektor kebencanaan dan administarsi lainnya karena sangat berpengaruh dalam hal membackup kegiatan kebencanaan dilapangan.

**4) Indikator Kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.29**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks resiko bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00)	0.3-0.65	0.53	0.37-0.71	0.48-0.83



No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Persentase Meningkatnya Kapasitas dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana	100%	100%	20%	0%
3.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	100%	100%	20%	0%
4.	Rata-rata Respon Kejadian	3 Jam	3.5 Jam	3.5 Jam	4 Jam
5.	Proporsi personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten	100%	100%	85%	60%
6.	Persentase Kerusakan yang terehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (structural)	100%	100%	75%	35%
7.	Persentase pelayanan administrasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase sarana prasarana dan sumber daya yang memadai	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%	100%

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- a. Indeks Resiko Bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00) yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra OPD merupakan nilai yang di input sejak awal perencanaan berupa angka kerentanan yang dihitung berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta jenis ancaman.
- b. Angka inputan dalam IRB Provinsi Gorontalo dalam INARISK adalah kondisi IRB kondisi sedang.
- c. Sedangkan Indeks Resiko Bencana (IRB) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$RISK = HAZARD \times \frac{VULNERABILITY}{CAPACITY}$$

Di mana, Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan



- kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan system informasi, diklat dan logistic; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan system pemulihan bencana. Untuk Indeks Risiko Bencana Indonesia kali ini dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup sembilan jenis ancaman yaitu: Gempabumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi.
- d. Secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Risiko 123.06 (sedang) atau turun dari tahun sebelumnya.
  - e. Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo tampaknya masih akan berlanjut karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk yang padat menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor.

**Grafik 3.19**  
Indeks Resiko Bencana Provinsi Gorontalo



**ANCAMAN BENCANA:**

Gempabumi, tsunami, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.

**NILAI IRB 2021:**  
**123.06**  
(SEDANG)

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, 2022



- f. Dalam perjalanan Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu Provinsi atau kabupaten/kota. Selanjutnya, perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain. Informasi tingkat resiko bencana untuk memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di tingkat Provinsi berupa penurunan IRB.
- g. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang belum dilakukan update sehingga perlu adanya penyusunan atau update data terbaru untuk bisa melihat kondisi terbaru Indeks Resiko Bencana (IRB), dengan kondisi IRB Provinsi Gorontalo terkahir yang tercatat dalam INARISK kondisi sedang mungkin dengan kondisi sekarang akan berubah menjadi tinggi jika melihat kondisi 5 tahun terakhir kejadian yang terjadi.

**6) Penghargaan nasional yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022**

Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional.

**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022**

Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian Kerjasama/MOU.

**(B) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo**

- Terwujudnya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakkan Perundang-undangan Daerah
- Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dan Pelayanan Publik terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya
- Meningkatnya Aparatur Polisi Pamong Praja yang Kompeten dan Profesional
- Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.30**  
Target dan Realisasi indikator kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<b>Sasaran Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan tindak Kriminal.</b>	<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada</b>	100	100	100	100	100
		<b>Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Gangguan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	45	37	40	40	82
2	<b>Sasaran Meningkatkan perlindungan masyarakat dan pelayanan publik terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya</b>	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat Tupoksi	100	54	100	100	54
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100	100	100	100	100
3	<b>Sasaran Meningkatkan Potensi Sumber Daya Aparatur Yang Kompeten dan Profesional</b>	<b>Persentase Petugas Linmas yang memahami Tupoksi</b>	100	50	100	50	50
4	<b>Sasaran Meningkatkan Sarana Prasarana dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Satpol PP, Linmas dan Kebakaran</b>	100	98	85	83	98
		<b>Persentase Aparatur yang Mengikuti Diklat dan Bimtek</b>	100	88	90	78	88
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100	98	100	83	98
		Persentase pelaksanaan	100	100	100	78	100

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan					

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.31**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>3.638.654.933</b>	<b>3.594.239.319</b>	<b>98.78</b>	<b>98.68</b>	<b>97.37</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.233.610.855	3.212.784.070	99,36	99,97	97,49	100
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	2.375.673.077	2.360.850.255	99,38	100	93,38	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	15.639.371	14.087.598	90,08	94,38	71,78	100
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	533.285.933	530.430.030	99,46	100	98,43	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	108.289.764	107.594.152	99,36	100	99,76	100
	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	51.487.519	51.296.340	99,63	100	97,62	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	149.235.191	148.525.695	99,52	100	70,43	100
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	364.301.529	340.997.774	93,60	100	96,17	100
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	132.827.837	131.697.774	99,15	100	94,52	100
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	231.473.692	209.300.000	90,42	100	96,66	100
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	40.742.549	40.457.475	99,30	100	96,25	100
	Sub Kegiatan Pengembangan	40.742.549	40.457.475	99,30	100	96,25	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kapasitas dan Karier PPNS						
<b>2</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>399.499.200</b>	<b>399.063.756</b>	<b>99,89</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	399.499.200	399.063.756	99,89	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	399.499.200	399.063.756	99,89	100	100	100
<b>3</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>6.571.083.441</b>	<b>6.046.065.531</b>	<b>92.01</b>	<b>100</b>	<b>93.65</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.543.100	88.241.847	99,66	100	99,59	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.981.491	53.789.472	99,64	100	99,99	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.561.609	34.452.375	99,68	100	99,36	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.672.647.958	4.205.785.701	90,01	100	99,66	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.497.997.923	4.031.231.615	89,62	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	174.650.035	174.554.086	99,95	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.284.000	187.105.773	95,81	100	93,79	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.284.000	187.105.773	95,81	100	93,79	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	899.404.564	861.614.698	95,80	100	94,72	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	899.404.564	861.614.698	95,80	100	94,72	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	715.203.819	703.317.512	98,34	100	91,16	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	715.203.819	703.317.512	98,34	100	91,16	100
	<b>TOTAL</b>	<b>10.609.237.574</b>	<b>10.039.368.606</b>	<b>94.63</b>	<b>100</b>	<b>96.28</b>	<b>100</b>

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Outcome dari program adalah :

- Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Persentase capaian program ini adalah 45% dari target adalah 38%
- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - ✓ Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan



Pengawalan

Output sub kegiatan : adalah Jumlah Laporan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun para tamu VIP/VVIP dengan capaian dan target 75 Laporan. Indikator Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada pejabat pusat maupun pejabat daerah serta pengamanan asset daerah di Provinsi Gorontalo.

- ✓ Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Output sub kegiatan : 8 (delapan) Laporan Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari-hari Besar Keagamaan, Pengeadalian aksi unjuk rasa. Pengamanan dan pengendalian aksi unjuk rasa yang di tangani Satpol PP Provinsi Gorontalo selama tahun 2022, meliputi :

- Unjuk rasa pada tanggal, 3 Januari 2022 oleh Aliansi Masyarakat Peduli keamanan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti masalah investasi yang bermasalah di provinsi gorontalo serta meminta kepada pihak agar dapat menyurat ke OJK untuk pengembalian dana.
- Unjuk rasa pada tanggal, 2 Februari 2022 oleh aliansi perangkat desa dan mahasiswa 25 orang melakukan aksi unjuk rasa, menuntut peninjauan kembali Perbup No. 10 dan 20 Tahun 2019 yang diduga bermasalah.
- Unjuk rasa pada tanggal, 16 Februari 2022 oleh sebanyak 80 Massa aksi dari Federasi serikat pekerja metal indonesia melakukan Aksi Unjuk Rasa dengan tuntutan pencabutan menteri ketenagakerjaan No. 02 Tahun 2022 tentang tatacara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua.
- Unjuk rasa pada tanggal, 14 Maret 2022 oleh sebanyak 500 orang massa Aksi yang tergabung dalam Aliansi rakyat penambang suwawa, menuntut meminta pihak luar tidak melakukan intervensi urusan pertambangan rakyat suwawa, meminta PT. Gorontalo Mineral memberikan ruang bagi masyarakat suwawa dalam pengelolaan kekayaan alam atau pertambangan suwawa.
- Unjuk rasa tanggal, 31 Agustus 2022 oleh Sebanyak 200 orang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gorontalo melaksanakan Aksi Unras dengan tuntutan Menolak Kenaikan BBM, Kenaikan tarif dasar listrik, dan mafia migas.
- Unjuk rasa pada tanggal, 6 September 2022 oleh Sebanyak 300 orang massa Aksi



yang tergabung dalam Barisan Bersama Rakyat (BBM) melaksanakan aksi UNRAS di Kantor Gubernur Gorontalo dengan tuntutan Meminta Pertanggung jawaban Tambahan Anggaran IKN serta dana PEN di Provinsi Gorontalo. dan menolak kenaikan BBM dan Harga Bahan Pokok.

- Unjuk rasa pada tanggal, 14 November 2022 oleh Sebanyak 100 orang massa Aksi yang tergabung dalam Aliansi Penambang Rakyat Suwawa melaksanakan aksi UNRAS di Kantor Gubernur Gorontalo dengan tuntutan meminta pihak luar tidak melakukan intervensi, meminta pihak forkopimda kabupaten bone bolango dan provinsi tidak mengekang aktivitas penambang rakyat suwawa.
- Unjuk rasa pada tanggal, 15 Desember 2022 oleh Sebanyak 250 orang massa Aksi yang tergabung dalam asosiasi nelayan pedagang ikan gorontalo melaksanakan aksi UNRAS di Kantor Gubernur Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo dengan tuntutan masalah BBM yang selalu di persulit dipertamina walaupun sudah ada izin, pemecah ombak di TPI inengo, yang sekarang ini sudah hancur oleh ombak, mengharapkan pelayanan 1 pintu di TPI inengo dan bias memfasilitasi gedung baru di Kabupaten Bone Bolango untuk tempat pengurusan izin.
- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi  
Output sub kegiatan : adalah 50 Orang Peserta Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo. Rakor trantibum telah dilaksanakan sebanyak 1 kali pada hari/tanggal, Rabu, 25 Mei 2022 bertempat di Rumah Makan Mawar Sharon, Kota Gorontalo dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 45 orang yang dihadiri oleh perwakilan anggota satpol pp kabupaten/kota yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum. Pelaksanaan Rapat Koordinasi bertujuan mengevaluasi kinerja Satpol PP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Gorontalo.
- ✓ Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Output sub kegiatan : adalah jumlah operasi penanganan PGOT, dengan realisasi output 4 (empat) Kegiatan dengan persentasenya 100%. Operasi Penanganan Pengemis, gelandangan dan orang terlantar bertujuan dalam rangka memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban umum di daerah. Pelaksanaan Operasi PGOT telah dilaksanakan 4 (empat) kali dengan tahapan pelaksanaan di berbagai lokasi di Kabupaten



dan Kota Se –Provinsi Gorontalo, meliputi :

- Operasi PGOT Tahap 1 dilaksanakan diwilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo pada hari/anggal, Rabu, 12 Januari 2022.
  - Operasi PGOT Tahap 2 dilaksanakan diwilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Pada hari/anggal Kamis, 3 Februari 2022.
  - Operasi PGOT Tahap 3 dilaksanakan diwilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Pada hari/tanggal Selasa, 1 Maret 2022.
  - Operasi PGOT Tahap 4 dilaksanakan diwilayah Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Pada hari/tanggal Rabu, 23 November 2022.
- ✓ Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
- Output sub kegiatan : adalah 750 Orang Anggota Satpol PP, Linmas dan Kebakaran dari Kabupaten/Kota yang melaksanan Apel Gelar Pasukan. kegiatan ini bertujuan dalam Rangka memperingati HUT Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Tahun 2022 bertempat dilapangan Tenis Indoor Eks Kantor Gubernur Gorontalo dengan personil Satpol PP yang hadir sebanyak 100 orang.
- ✓ Sub Kegiatan : Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- Output sub kegiatan : adalah 100 Personil Satlinmas Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo yang ikut dalam Rakor Kemitraan Perlindungan Masyarakat. Dengan realisasi output 50 Personil Satlinmas dengan persentase 50%. Output Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran fungsi satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) di Kabupaten/Kota. Rakor tersebut telah dilaksanakan sebanyak 1 kali yang dihadiri oleh Satlinmas Kabupaten/Kota pada tanggal Selasa, 29 maret 2022 bertempat di RM. Salsa Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- ✓ Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- Output sub kegiatan : adalah 10 (Sepuluh) Kali Pelaksanaan Pengawasan Perda/Pergub Provinsi yaitu :
- Pengawasan Perda Nomor, 4 Tahun 2022 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus



- Disease 2019. Dan pengawasan terhadap penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Kabupaten Bone Bolango, Tanggal 9 Februari 2022.
- Pengawasan Perda Nomor, 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Tanggal 16 Februari 2022.
  - Pengawasan Perda Nomor, 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pohuwato. Tanggal 13-14 Juli 2022.
  - Pengawasan Perda Nomor, 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Ainun Habibe dan Ruma sakit Toto Kabupaten Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango . Tanggal 21-22 September 2022.
  - Pengawasan Perda Nomor, 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berlokasi di sepanjang jalan Gorontalo Outer Ring Road Kabupaten Gorontalo. Tanggal 11 Oktober 2022.
  - Pengawasan Perda Nomor, 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1, SMK Negeri 1 Suwawa, dan SMA Negeri 5 , SMA Negeri 1 Kabupaten Gorontalo Utara. Tanggal 3-4 November 2022.
- ✓ Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- Output sub kegiatan : adalah 5 Laporan Pelaksanaan Operasi Yustisi dan Non Yustisi Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Provinsi Gorontalo. Dengan realisasi output 5 Laporan dengan persentase 100%. Operasi Yustisi dan Non Yustisi Penyakit Masyarakat (PEKAT) telah dilaksanakan sebanyak 6 Kali :
- Operasi Non Yustisi Pada Tanggal 25 Mei 2022 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
  - Operasi Non Yustisi Pada Tanggal 3-4 Juni 2022 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat di wilayah Kota Gorontalo dan Boalemo.
  - Operasi Non Yustisi Pada Tanggal 23-25 Agustus 2022 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat, Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo.
  - Operasi Non Yustisi Pada Tanggal 5 Oktober 2022 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat, Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kota



Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango.

- Operasi Non Yustisi Pada Tanggal 8 Oktober 2022 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat, Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango.
- Operasi Non Yustisi Pada Tanggal 9 November 2022 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2003 tentang pencegahan maksiat, Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

- ✓ Sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Output sub kegiatan : Jumlah Peserta Rakor PPNS 50 Orang PPNS Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh PPNS Satpol PP Kabupaten/Kota sejumlah 25 Orang. Rakor PPNS bertujuan dalam Rangka Meningkatkan Peran Fungsi dan Evaluasi Kinerja PPNS Satpol PP Kab/Kota Se Provinsi Gorontalo serta pembentukan sekretariat PPNS. Rapat Koodinasi PPNS dilaksanakan Pada hari/tanggal, Rabu-kamis Tanggal 23-25 Maret 2022 bertempat di Hotel Marina Beach Resort.

2. Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Outcome dari program adalah Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dengan capaian 100%.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

- ✓ Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Output sub kegiatan : adalah 24 Kejadian Kebakaran di Provinsi Gorontalo yang ditangani oleh Pemadam Kebakaran Provinsi di Wilayah Provinsi Gorontalo. Realisasi outputnya 24 kejadian, dengan persentase 100%. Kejadian kebakaran di provinsi gorontalo berdasarkan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani langsung oleh Aparat pemadam Kebakaran Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 24 kejadian kebakaran.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur.



- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Keuangan. Realisasi output adalah 1 Dokumen dengan persentase capaiannya adalah 100%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output sub kegiatan : tersedianya biaya gaji/tunjangan ASN selama 12 bulan
- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

Output sub kegiatan : 1 Dokumen Laporan Forum Koordinasi. Realisasi output adalah 1 Dokumen dengan persentase capaiannya adalah 100%.

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output sub kegiatan : 20 Orang Aparatur Satpol PP yang mengikuti Diklat dan Bimtek dengan realisasinya 20 Orang, dengan persentase capaiannya adalah 100%.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output sub kegiatan : 20 Jenis Ketersediaan Sarana Prasarana yang dilaksanakan. Realisasi output 20 jenis, dengan persentasenya 100%.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output sub kegiatan : Persentase jasa administrasi perkantoran 12 selama bulan. Realisasi output 100%.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### Permasalahan :

1. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi ASN dalam memahami tujuan organisasi
2. Belum optimalnya kerjasama Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Gorontalo.
3. Pelaksanaan PATROLI Rawan Trantibum belum tepat sasaran.





4. Belum tersedianya pemetaan/ informasi tingkat kerawanan Trantibum.
5. Masih rendahnya pelaksanaan penegakan perda/perkada terutama bagi perda yang memuat sanksi.
6. Masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Perda/Perkada.
7. Masih lemahnya peranan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Satlinmas.
8. Belum tersedianya Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) dan kurangnya sosialisasi, komunikasi, informasi masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dimasyarakat.
9. Masih minimnya sosialisasi/edukasi terhadap masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadinya kebakaran.
10. Masih minimnya sarana prasarana pemadam kebakaran serta penyajian data kejadian dan dampak kebakaran.

Solusi :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur melalui bimtek dan pelatihan
2. Peningkatan kerjasama melalui koordinasi dengan unsur Satpol PP Kabupaten/Kota dan TNI/Polri.
3. Perlu adanya dokumen Rencana Aksi
4. Penyusunan dokumen Peta Rawan Trantibum
5. Peningkatan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan penegakan perda.
6. Merencanakan sosialisasi perda/perkada terhadap masyarakat di provinsi gorontalo.
7. Penguatan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dalam membentuk peran satlinmas
8. Pemanfaatan layanan informasi kebakaran melalui media masa dan media elektronik
9. Merencanakan sosialisasi/edukasi terhadap pencegahan terjadinya kebakaran.
10. Peningkatan sarana prasana dan peningkatan kualitas kompetensi aparatur pemadam kebakaran.





**4) Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.32**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	45%	45%	35%	35%
2	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100%	89%	100%	75%
3	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat Tupoksi	100%	54%	100%	60%

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- Indikator kinerja kunci urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  1. IKK Outcome : Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.  
 Jumlah Pengaduan yang diselesaikan sebanyak 120 dan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 120 dengan persentase capaian 100%. Tindak lanjut terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Povinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dengan prinsip non yustisi atau para pelanggar hanya dikenakan / dilakukan pembinaan dan tidak sampai pada tahap penuntutan dan persidangan.
  2. IKK Outcome : Persentase perda perkara yang ditegakkan.  
 Jumlah perda perkara yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 8 perda dan jumlah keseluruhan perda dan perkara yang memuat sanksi sebanyak 29 Perda/Perkada. Dengan persentase capaian 27,59%
  3. Daftar jumlah perda/perkada yang memuat sanksi sampai dengan tahun 2022
    - Perda Nomor 10 tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat
    - Perda Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perda Nomor 15 Tahun 2003
    - Perda Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo
    - Perda Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Gorontalo.
    - Perda Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu di



Provinsi Gorontalo

- Perda Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang di Provinsi Gorontalo
- Perda Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto
- Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
- Perda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030
- Perda Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Perda Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo
- Perda Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publikasi Provinsi Gorontalo
- Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan
- Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
- Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Provinsi Gorontalo
- Perda Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Perda Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Perda Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo
- Perda Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga
- Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Perda Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Tanah
- Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan / atau Produk Ternak
- Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
- Perda Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing



- Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
- Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)
- Perkada Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disaese 2019 (covid-19).

**6) Penghargaan yang diterima Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan ditahun 2022.

**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo pada tahun 2022**

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian Kerjasama/MOU ditahun 2022.

**6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo)**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

1. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar
2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya
3. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.33**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan keterampilan keluarga miskin dan rentan melalui pendampingan dan penyediaan kebutuhan dasar</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan layanan bantuan sosial pemenuhan dasar</b>	70%	100%	65%	100%	142.85%
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan layanan bantuan sosial KUBE	70%	100%	65%	100%	142.85%
2	<b>Sasaran : Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase (%) pemberdayaan sosial bagi PSKS</b>	90%	87.25%	85%	88.25%	96.94%
	Program Pemberdayaan Sosial	- Persentase PSKS yang mampu diberdayakan	90%	87.25%	85%	88.25%	96.94%
3	<b>Sasaran : Meningkatnya perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial</b>	95%	94.57%	95%	100%	99.54%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga	95%	89.59%	95%	100%	94.30%
	Program Penanganan Bencana		95%	99.55%	-	-	104.78%
4	<b>Sasaran : Meningkatnya kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase (%) penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial</b>	89%	97.09%	88%	88.08%	109.09%
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) PMKS anak, lanjut usia terlanjar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam	89%	97.09%	88%	88.08%	109.09%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
		Lembaga dan LKS termasuk layanan KPO					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	87%	100%	85%	91.11%	114.85%
		- Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	87%	100%	85%	97.24%	114.85%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.34**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>3.226.028.365</b>	<b>3.100.194.142</b>	<b>96.10</b>	<b>100</b>	<b>92.68</b>	<b>100</b>
a.	Keg. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	682.949.391	682.321.618	99.91	100	97.40	100
	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	682.949.391	682.321.618	99.91	100	97.40	100
b.	Keg. Administrasi keuangan perangkat daerah	149.973.218	149.791.196	99.88	50	96.20	100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	149.973.218	149.791.196	99.88	50	96.20	100
c.	Keg. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	94.412.000	94.082.750	99.65	100	85.13	93.84
	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.412.000	94.082.750	99.65	100	85.13	93.84
d.	Keg. Administrasi umum perangkat daerah	1.523.431.818	1.473.918.661	96.75	100	95.36	100
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.523.431.818	1.473.918.661	96.75	100	95.36	100
e.	Keg. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	775.261.938	700.079.917	90.30	100	81.97	90.16
	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	775.261.938	700.079.917	90.30	100	81.97	90.16
<b>2</b>	<b>Program pemberdayaan sosial</b>	<b>1.481.208.610</b>	<b>1.453.231.508</b>	<b>98.65</b>	<b>87.25</b>	<b>90.23</b>	<b>100</b>
a.	Keg. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	65.103.089	64.608.956	99.24	75	98.98	100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	65.103.089	64.608.956	99.24	75	98.98	100
b.	Keg. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi	1.416.105.521	1.388.622.552	98.06	100	89.92	98.92
	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan provinsi	737.382.101	710.546.995	96.36	100	99.18	100
	Sub kegiatan peningkatan kemampuan	678.723.420	678.075.557	99.90	85	82.14	90.36



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan provinsi						
<b>3</b>	<b>Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan</b>	<b>166.834.759</b>	<b>140.662.020</b>	<b>84.31</b>	<b>60</b>	<b>78.68</b>	<b>86.55</b>
a.	Keg. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	166.834.759	140.662.020	84.31	60	78.68	86.55
	Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	166.834.759	140.662.020	84.31	60	78.68	86.55
<b>4</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>3.623.564.146</b>	<b>3.517.975.541</b>	<b>97.08</b>	<b>97.09</b>	<b>97.47</b>	<b>100</b>
a.	Keg. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	197.399.109	195.158.227	98.86	47.06	88.74	97.62
	Sub kegiatan penyediaan alat bantu	197.399.109	195.158.227	98.86	47.06	88.74	97.62
b.	Keg. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	871.660.780	867.809.766	99.56	100	99.07	100
	Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	871.660.780	867.809.766	99.56	100	99.07	100
c.	Keg. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	942.615.010	882.756.490	94	100	93.43	100
	Sub kegiatan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	942.615.010	882.756.490	94	100	93.43	100
d.	Keg. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.611.889.247	1.572.251.058	98	87.20	100	100
	Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.611.889.247	1.572.251.058	98	87.20	100	100
<b>5</b>	<b>Program perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>12.164.687.470</b>	<b>10.898.182.932</b>	<b>89.59</b>	<b>100</b>	<b>95.93</b>	<b>100</b>
a.	Keg. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	12.164.687.470	10.898.182.932	89.59	100	95.93	100
	Sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	10.378.467.181	9.113.448.980	87.81	100	95.72	100
	Sub kegiatan pengelolaan fakir miskin lintas daerah kab/kota	1.786.220.289	1.784.733.952	99.92	100	99.82	99.82
<b>6</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>727.339.231</b>	<b>723.174.621</b>	<b>99.45</b>	<b>99.55</b>	<b>99.47</b>	<b>100</b>
a.	Keg. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	727.339.231	723.174.621	99.45	99.55	99.47	100
	Sub kegiatan penyediaan tempat penampungan pengungsi	432.011.522	429.105.621	99.33	100	99.03	100
	Sub kegiatan pelayanan dukungan Psikososial	295.327.709	294.979.000	99.57	100	99.98	100
<b>7</b>	<b>Program pengelolaan taman makam pahlawan</b>	<b>775.770.856</b>	<b>763.141.078</b>	<b>98.37</b>	<b>98.84</b>	<b>99.88</b>	<b>100</b>
a.	Keg. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi	775.770.856	763.141.078	98.37	98.84	99.88	100
	Sub kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi	775.770.856	763.141.078	98.37	98.84	99.88	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.165.433.437</b>	<b>20.597.471.842</b>	<b>92.93</b>	<b>85.15</b>	<b>95.58</b>	<b>100</b>



1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Outcome dari program adalah :

- Persentasi peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur dengan target dan capaiannya sebesar 100%
- Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan dengan target dan capaiannya sebesar 100%

1) Kegiatan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

- ✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan MONEV dan pelaporan yang dihasilkan sebanyak 2 laporan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output sub kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan yang disusun sebanyak 1 dokumen laporan.

3) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah

- ✓ Sub kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output sub kegiatan adalah Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis. Mencapai sebanyak 18 orang dari target 12 orang.

4) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

- ✓ Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana yang dilaksanakan sebanyak 13 paket.

5) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- ✓ Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output sub kegiatan adalah Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan sebanyak 1 paket (12 Bulan).

2. Program Pemberdayaan Sosial

Outcome dari program adalah : Persentase PSKS yang yang mampu di berdayakan dengan capaian 87.25% dari target 100%

1) Kegiatan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

- ✓ Sub kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan



pengumpulan uang atau barang

Output sub kegiatan adalah Jumlah pelayanan pengawasan dan perizinan PSDBS (UGB dan PUB) sebanyak 9 pelaku UGB/PUB.

2) Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

- ✓ Sub kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

Output sub kegiatan adalah :

- Jumlah TKSM yang diberdayakan sebanyak 77 orang
- Terlaksananya Identifikasi, Verifikasi, Monev Pekerja Sosial dan Mitra ( TKSK, PSM, CSR, WKSMB) dll
- WKSMB yang di berdayakan melalui Bantuan Sosial Uang dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga, pembangunan kesejahteraan sosial diwilayah WKSMB.

- ✓ Sub kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Wewenangan Provinsi

Output sub kegiatan adalah : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan.

- Jumlah Lembaga atau Organisasi termasuk Karang Taruna yang diberdayakan sebanyak 17 Organisasi/lemb/KT.
- Jumlah PSKS yang di beri bantuan (LKS,LKKS,Karang Taruna) dgn rincian :
  - 1) Jumlah Lembaga atau Organisasi termasuk Karang Taruna yang diberdayakan sebanyak 17 organisasi/lembaga/KT
  - 2) Jumlah PSKS yang di beri bantuan (LKS,LKKS,Karang Taruna) dgn rincian:
    - Jumlah Organisasi Karang Taruna yang mendapat bantuan sosial untuk 10 Organisasi
    - LKS/LKSA 6 Lembaga yang mendapatkan bantuan sosial
    - LKKS yang mendapat bantuan sosial berupa Hibah Uang 1 Lembaga
    - Monitoring dan evaluasi guna mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dilapangan

3. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Outcome dari program adalah Persentase (%) PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga dan LKS termasuk layanan KPO.

- 1) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasaan Dari Titik Debarkasih





di Daerah Provinsi untuk di Pulangkan ke Daerah Kab/Kota Asal

- ✓ Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasih di Daerah Provinsi untuk di Pulangkan ke Daerah Kab/Kota Asal  
Output sub kegiatan adalah Fasilitasi peulangan pekerja migran dan orang terlantar sebanyak 15 orang ke daerah asal.

#### 4. Program Rehabilitasi Sosial

Outcome dari program adalah Persentase (%) PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga dan LKS termasuk layanan KPO.

##### 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di dalam Pant

- ✓ Sub kegiatan : Penyediaan alat bantu  
Output sub kegiatan adalah Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh alat bantu fisik sebanyak 32 orang.

##### 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Pant

- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant  
Output sub kegiatan adalah :
  - Bantuan Hibah Uang kepada LKS Ummu Syahidah
  - Bantuan sosial permakanan kepada 36 LKSA
  - Bantuan Permakanan kepada LKS-ABH "Ummu Syahidah"
  - Bantuan Permakanan kepada RPSA "Amal Sholeh"
  - Bantuan Sandang di RPSA "Amal Sholeh" sebanyak 26 anak

##### 3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Pant

- ✓ Sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari  
Output sub kegiatan adalah :
  - Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh pelayanan, pemenuhan kebutuhan hak dasar di dalam pant sebanyak 23 orang
  - Bantuan komda lansia 1 paket
  - Bantuan LKS LU Beringin

##### 4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA Di Dalam Pant

- ✓ Sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial  
Output sub kegiatan adalah :



- jumlah korban penyalagunaan NAPZA yang memperoleh pelayanan dan rehabilitas sosial melalui Lembaga IPWL sebanyak 109 orang
- Bantuan Hibah Kepada Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sebanyak 1 Lembaga
- Tersosialisasinya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba 11 kali kegiatan/275 orang

5. Program perlindungan dan jaminan sosial

Outcome dari program adalah Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga.

1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Output sub kegiatan adalah :

- Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) sebanyak 45.000 KPM.

- Rapat sinkronisasi DTKS kab/kota sebanyak 6 kegiatan

- ✓ Sub Kegiatan : Pengolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/Kota

Output sub kegiatan adalah :

- Teridentifikasi 500 KPM penerima bantuan UEP tahun 2022 yang memenuhi persyaratan berdasarkan kriteria yang tersebar di kab/kota se provinsi Gorontalo
- Terlaksananya bimbingan teknis bagi penerima bantuan UEP sebanyak 500 KPM di Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo
- Terlaksananya penyaluran bantuan sosial UEP kepada 500 KPM di Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerima bantuan UEP di kab/kota Se-Provinsi Gorontalo

6. Program Penanganan Bencana

Outcome dari program adalah Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga.

1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Output sub kegiatan adalah :

- Operasional Dapur Umur sebanyak 1 paket



- Terlaksananya penanggulangan bencana di wilayah yang terdampak bencana
- Tersedianya satuan tugas sosial khusus yang mampu, tangguh dan handal dalam memberikan layanan kepada korban bencana
- Termenuhinya kebutuhan logistik minimum korban bencana alam dalam waktu cepat dan tepat
- Tersalurkannya pemberian bantuan lauk pauk kepada korban bencana secara tepat dan tepat dan
- Tersedianya perlengkapan/pakaian kerja lapangan bagi petugas perlintsos sebanyak 250 paket, sehingga dapat maksimal dalam pelayanan
- ✓ Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial  
Output sub kegiatan adalah Terselurnya penerima bantuan fasilitas isi rumah bagi korban bencana sosial kebakaran sebanyak 29 kk :
  - Jumlah yang mendapatkan bantuan bencana sosial sebanyak 5 lokasi
  - Jumlah bantuan bagi korban bencana sosial 29 KK

7. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Outcome dari program adalah Persentase PSKS yang mampu diberdayakan dengan capaian sebesar 100%

1) Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi  
Output sub kegiatan adalah :
  - Jumlah keluarga pahlawan dan veteran yang memperoleh pelayanan sosial sebanyak 67 orang
  - Terlaksananya pemeliharaan Bangunan Sejarah seperti MPN/TMP
  - Terlaksananya pengusulan gelar Pahlawan Nasional Aloe Saboe dan HB Jassin

**3) Permasalahan dan Solusi**

Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi khusus untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo) tahun 2022 antara lain :

Program Pemberdayaan Sosial

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Permasalahan : Adanya keterlambatan dalam penyerahan HTDP (Hadiah Tidak Diambil Pemenang) serta pelaporan hasil undian gratis berhadiah yang dilakukan oleh pihak



penyelenggara tidak dilaporkan ke kementerian.

Solusi : - Perlu dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan patroli dan monitoring  
 - Melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggaran terkait keterlambatan dalam pelaporan hasil undian gratis berhadiah yang dilakukan oleh penyelenggara

➤ Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

Permasalahan : - Lambatnya pemasukan laporan kegiatan TKSK, sehingga terkendala dengan pembayaran tali asih  
 - Sering terjadi usulan pengganti TKSK di Kab/Kota  
 - WKSBM yang difasilitasi masih kurang dari jumlah yang ada di 729 desa/kel  
 - Pemberdayaan atau tali asih untuk PSM yang bertugas ditingkat desa/kel belum mendapat perhatian  
 - Database PSM, Forum CSR dan WKSBM belum ter-update dengan baik  
 - Masih banyak TKSK yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya

Solusi : - Tali Asih TKSK dengan nilai Rp. 300.000/org/bln menjadi 500/bln selama 12 bulan  
 - Pemutahiran Data base TKSk,PSM, Forum CSR, WKSBM sudah menjadi Fokus perhatian setiap akhir tahun  
 - Perlunya kegiatan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas pekerja sosial dalam rangka penyegaran kembali dan peningkatan pemahaman tugas  
 - Perlunya penunjang peningkatan kemampuan, dukungan peralatan seperti Laptop atau android dan kendaraan lapangan

➤ Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

Permasalahan : - Tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemerintah  
 - Pemutahiran Data base kelembagaan sosial seperti Karang taruna, LKSA/LKS, LKKS dan lain-lain belum menjadi Fokus perhatian setiap akhir tahun  
 - Lambatnya pemasukan LPJ terkait bantuan sosial yang telah diterima

Solusi : - Melakukan sosialisasi bimbingan terhadap penerima bantuan  
 - Membuat Teguran kepada penerima yang sering terlambat memasukan LPJ

Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Permasalahan : - Belum tersedia Rumah Singgah di beberapa kab/kota sehingga klien Orang Terlantar sulit diasesmen mendalam ditingkat kabupaten



- Belum tersedia lembaga/panti penanganan gelandangan pengemis di Provinsi Gorontalo

- Tidak lengkapnya identitas klien orang terlantar

Solusi : - Koordinasi Kab/Kota agar menyiapkan Rumah Singgah sebagai resedensial sementara untuk melakukan assesmen bagi klien OT

- Pembangunan lembaga pelayanan gelandangan
- Asesment yang lebih dalam lagi mengenai daerah asal klien

#### Program Rehabilitasi Sosial

##### ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu

Permasalahan : - Belum adanya panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas  
 - Belum maksimalnya pelayanan peyandang disabilitas oleh Pemerintah Kab/Kota sehingga Klien langsung mengakses pelayanan di Provinsi

Solusi : - Mengupayakan layanan rehabilitasi peyandang disabilitas terpadu dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya  
 - Memaksimalkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kab/Kota

##### ➤ Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

Permasalahan : - Belum tersedianya Panti Sosial Anak Terlantar sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar untuk meningkatkan persentase Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial

- Dari 45 LKSA yang terdaftar, hanya 15 LKSA yang sertifikat akreditasi lembaganya masih panjang masa berlakunya, sementara 8 LKSA sudah harus mengikuti re-akreditasi lembaga, 6 LKSA masa berlaku akreditasi lembaga akan berakhir tahun ini, dan 16 LKSA belum mengikuti proses akreditasi
- Belum tersedianya data populasi Anak Terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk bahan penentuan sasaran program
- Kurangnya kesadaran PSKS dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bahwa sebagai mitra Dinas Sosial dalam penanganan masalah sosial, perlu berpartisipasi aktif dalam penanganan masalah Anak Terlantar
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM LKSA terkait standar pengasuhan



Anak Terlantar dalam panti

- Kurangnya kemandirian lembaga sehingga masih bergantung pada donatur dan bantuan pemerintah

- Solusi :
- Untuk mengantisipasi proses pendirian Panti Sosial Anak Terlantar sebagai layanan teknis Dinas Sosial Provinsi yang memerlukan waktu yang cukup panjang, maka Bidang Rehabilitasi Sosial mengupayakan proses layanan rehabilitasi sosial berbasis panti bekerja sama dengan LKS milik masyarakat dalam hal ini LKSA
  - Melakukan pendampingan terkait akreditasi lembaga terhadap lembaga yang belum mengikuti proses akreditasi lembaga dan lembaga yang harus mengikuti proses re-akreditasi lembaga sebagai dukungan terhadap tersedianya layanan LKSA yang sesuai standar pelayanan yang baik dan berkualitas
  - Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan Dinas Sosial Kab/Kota dan Pemerintah Pusat
  - Koordinasi dan sinergi program dengan bidang lainnya di internal Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
  - Memberikan penguatan kapasitas bagi SDM LKSA untuk meningkatkan kemampuan praktek terkait pengasuhan Anak Terlantar dalam panti
  - Untuk menjamin kemampuan praktek SDM LKSA agar pelayanan yang diterima sesuai standar pelayanan kesejahteraan sosial, dilakukan pendampingan bagi SDM LKSA untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) sebagai pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki
  - Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan

➤ Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

- Permasalahan :
- Belum tersedianya lahan dan bangunan gedung untuk lansia, karena tahun 2022 masih melakukan peminjaman gedung Pemerintah Kota
  - Masih kurangnya kualitas SDM
  - Sarana dan prasarana belum memadai

- Solusi :
- Sudah mengajukan permohonan untuk pembangunan panti dengan dasar penyiapan lahan untuk panti
  - Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dengan mengoptimalkan SDM yang ada di Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo



- Melakukan kerjasama dengan puskesmas disekitarnya untuk memenuhi pemenuhan kesehatan dasar lanjut usia
- Telah memenuhi sebagian sarana dan prasarana lainnya

➤ Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

Permasalahan : Belum tersedianya SDM yang kompeten melaksanakan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial.

Solusi : Kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Agama.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

➤ Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Permasalahan : - Pada Proses tender sering terjadi kegagalan dalam proses lelang disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Tidak terpenuhinya spesifikasi teknis oleh penyedia
- Perubahan harga komoditas bahan pangan yang fluktuatif program

Solusi : - Untuk masalah tidak terpenuhinya spesifikasi teknis oleh penyedia pihak ULP telah melakukan upaya untuk memberikan waktu yang lebih lama bagi penyedia dalam memenuhi beberapa syarat-syarat teknis dalam penyediaan barang dan jasa.

- Untuk masalah perubahan harga yang terjadi secara tiba-tiba, solusi yang sudah dilaksanakan adalah dengan melakukan lelang ulang dan melakukan adendum agar komoditas yang harganya berubah untuk disubstitusi dengan komoditas lain yang memiliki standar harga yang hampir sama.

➤ Sub Kegiatan : Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan : KPM yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum semua termasuk pada kategori keluarga miskin, sehingga perlu dilakukan verifikasi untuk menentukan penerima bantuan

Solusi : Perlu melakukan verifikasi kepada KPM yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial

Program Penanganan Bencana

➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Permasalahan : - Kurangnya sarana dan prasana penunjang dalam kegiatan PB

- Terbatasnya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan PB
- Belum tersedia dokumen kebencanaan yang bisa dijadikan dasar dalam penyelenggaraan PB



Solusi : - Penguatan kemitraan pemerintah dengan para pihak dalam penanggulangan bencana

- Memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana
- Menyusun dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) sebagai dokumen dasar yang akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

➤ Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial

Permasalahan : Keterbatasan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Program kegiatan bantuan bencana sosial kebakaranmpil dan professional belem

Solusi : - Jumlah penerima bantuan lebih di tingkatkan dari tahun tahun sebelumnya

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Permasalahan : Adanya keterlambatan serta sulitnya pencairan dana kerekening veteran

Solusi : Melakukan koordinasi dengan bendahara pengeluaran perihal keterlambatan transfer dana ke para veteran

**4) Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.35**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan layanan bantuan sosial KUBE	70%	100%	65%	100%
2	Persentase PSKS yang mampu diberdayakan	90%	98.11%	85%	88.25%
3	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga	95%	94.57%	95%	100%
4	Jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai	45.000 KPM	45.000 KPM	40.000 KPM	90.000 KPM
5	Jumlah PMKS anak, lanjut usia terlanter, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam Lembaga dan LKS termasuk layanan KPO	35 LKSA	- 15 Orang Terlanter - 32	46 LKSA	- 12 Orang Terlanter - 46 Orang Disabilitas - 36 LKSA





No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Orang Disabilitas - 36 LKSA - 23 Lansia Terlantar		
6	- Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	70%	100%	85%	91.11%
	- Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan	70%	100%	85%	97.24%

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

**Indikator kinerja SPM Bidang Sosial sebagai berikut :**

**Tabel. 3.36**

Indikator Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022

NO	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	6841	32	Orang	0,47
2	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	1207	969	Orang	80,28
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial lanjut usia didalam panti	44256	23046	Orang	52,07
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial didalam panti	0	0	Orang	0
5	Jumlah Warga Negara korban bencana Provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	13279	13279	Orang	100



**4) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional ditahun 2022.

**5) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo pada tahun 2022**

Rencana Kerja tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

**II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

**1. Ketenagakerjaan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan norma ketenagakerjaan, k3 serta peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh
- Meningkatkan serapan tenaga kerja

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.37**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	Indikator Sasaran : Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	20%	27,27%	20%	54.54%	136.35%
	Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan perusahaan yang menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja	7%	12.22%	6%	12.04%	174.57%
2	Sasaran : Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh	Indikator Sasaran : Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	20%	12.73%	20%	33.33%	63.65%
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan	12.02%	2.32%	7.56%	2.28%	19.30%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
3	<b>Sasaran : Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja</b>	20%	12.99%	20%	15.59%	64.95%
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja magang	57.06%	90.88%	48.10%	78.24%	159.27%
		Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih	45.94%	37.06%	35.74%	34.35%	80.67%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan memperoleh informasi kesempatan kerja	31.69%	101.82%	-	-	321.30%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.38**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>429.999.434</b>	<b>425.838.107</b>	<b>99.03</b>	<b>100</b>	<b>99.33</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	79.999.796	79.918.450	99.90	100	98.95	100
	Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	79.999.796	79.918.450	99.90	100	98.95	100
	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK)	349.999.638	345.919.657	98.83	100	99.44	100
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	349.999.638	345.919.657	98.83	100	99.44	100
2	<b>Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>149.999.677</b>	<b>143.444.089</b>	<b>95.63</b>	<b>100</b>	<b>98.74</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	149.999.677	143.444.089	95.63	100	98.74	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja diPerusahaan	149.999.677	143.444.089	95.63	100	98.74	100
3	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>1.293.982.531</b>	<b>1.287.766.118</b>	<b>99.52</b>	<b>100</b>	<b>99.58</b>	<b>100</b>



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	64.999.677	64.096.808	98.61	100	99.55	100
	Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	64.999.677	64.096.808	98.61	100	99.55	100
	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.228.982.854	1.223.669.310	99.57	100	99.58	100
	Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.228.982.854	1.223.669.310	99.57	100	99.58	100
<b>4</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>99.999.626</b>	<b>98.662.429</b>	<b>98.66</b>	<b>100</b>	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	99.999.626	98.662.429	98.66	100	-	-
	Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	99.999.626	98.662.429	98.66	100	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.973.981.268</b>	<b>1.955.710.743</b>	<b>99.07</b>	<b>100</b>	<b>99.46</b>	<b>100</b>

1. Program Hubungan Industrial

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan perusahaan yang menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebesar 12,22%. Tercatat sampai dengan tahun 2022 perusahaan yang telah menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 13.951 perusahaan.

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 70 kasus perselisihan/sengketa hubungan industrial yang diselesaikan.

- ✓ Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output Sub Kegiatan : 70 kasus perselisihan/sengketa hubungan industrial yang masuk dan diselesaikan 70 kasus dengan rincian sebagai berikut :

- 200 Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan
- 13.951 perusahaan yang ikut program jamsostek

2. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota



(UMSK)

Output kegiatan adalah 1 dokumen UMP dan 530 perusahaan yang telah menerapkan menerapkan Upah Minimum Provinsi sampai dengan tahun 2022.

✓ Sub Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Output Sub Kegiatan : 1. 1 dokumen UMP dengan Nilai UMP tahun 2022 adalah Rp. 2.800.580,- Grafik kenaikan UMP Provinsi Gorontalo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

## 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Outcome dari program adalah Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan sebesar 2,32%. Tercatat sampai dengan tahun 2022 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 2.340 perusahaan.

### 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Output kegiatan adalah 793 perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan.

✓ Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja diPerusahaan

Output Sub Kegiatan :

- a. 793 perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan
- b. 7 kasus Penyelidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan yaitu pada :
  - PT. Mandiri Tunas Finance Gorontalo (Kota Gorontalo)
  - PT. Agro Arta Surya (Kabupaten Gorontalo)
  - CV. Titian Pratama (Kabupaten Gorontalo)
  - PT. Masindo Solaris Nusantara (Kabupaten Gorontalo)
  - Perumda Tirta Limutu (Kabupaten Gorontalo)
  - PT. Trijaya Tanggul (Kabupaten Gorontalo)
  - PT. Global Gemilang Expres (JNT) (Kaupaten Gorontalo)

## 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja magang sebesar 90,88%. Sampai dengan tahun 2022 tercatat tenaga kerja yang dimagangkan mencapai 2.444 orang. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo. Selain terserapnya tenaga kerja, melalui program ini para pencari kerja mendapatkan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam dunia kerja.



1. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah.

Output kegiatan adalah 5 UKM yang dilatih/dibina.

- ✓ Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Output Sub Kegiatan : 5 UKM yang dilatih/dibina dengan total peserta adalah 30 peserta, 25 peserta adalah perwakilan dari masing- masing UKM dan 5 Fasilitator yaitu Pimpinan dari masing-masing UKM.

Adapun 5 (lima) UKM tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) RM Olivia, jenis usaha pengolahan makanan Nasi Kuning, kue, dll (Kab. Pohuwato)
- 2) RM Safirah Jenis Usaha Pengolahan Makanan "Ayam Geprek, Kentaky, Nasi Kuning, dll (Kab. Gorontalo)
- 3) CV. Kreatif Jok Jenis Usaha Revarasi Jok Mobil, dll (Kab. Gorontalo)
- 4) Tahu Berkah Jenis Usaha Pengolahan Tahu (Kab. Bone Bolango)
- 5) RM Ijan Aqib Jenis Usaha Pengolahan Makanan "Nasi Campur, Ikan Bakar, Gorengan, dll (Kota Gorontalo)

2. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Output kegiatan adalah 150 orang pencari kerja yang dimagangkan dan 30 orang tenaga kerja yang dilatih.

- ✓ Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Output Sub Kegiatan :

- (a) 150 orang pencari kerja yang dimagangkan di beberapa perusahaan yang ada di Kota Gorontalo.
- (b) 30 orang tenaga kerja yang dilatih yang terdiri dari 2 paket pelatihan pembuatan Pakan Ikan dan Unggas dimana masing- masing paket 15 orang. Adapun lokasi pelatihan yaitu di Desa Ayuhulalo Kec. Tilmuta Kab. Boalemo dan di Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Outcome dari program adalah Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan memperoleh informasi kesempatan kerja sebesar 101,82%.



1) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

- ✓ Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

Output Sub kegiatan adalah 18.598 orang pencari kerja yang memperoleh informasi pasar kerja online.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

- Struktur OPD urusan ketenagakerjaan tidak ada dalam nomen klatur dinas, sehingga mempengaruhi alokasi anggaran kementerian kedaerah untuk peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
- Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah Angkatan kerja.
- Belum tersedianya Balai latihan kerja ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo yang memadai.
- Adanya pengaduan perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Pemerintah Provinsi, dimana seharusnya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.
- Banyaknya kasus ketenagakerjaan yang harus ditangani akan tetapi terkendala dengan terbatasnya mediator perselisihan hubungan industrial sehingga sulitnya untuk menangani kasus melalui perjanjian bersama.

Solusi :

- Usulan perubahan Struktur OPD yang menangani urusan ketenagakerjaan.
- Peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui magang berbasis pengguna.
- Kerjasama dengan kab/kota untuk rekrutmen dan sosialisasi peserta magang.
- Pemerintah Provinsi tetap menerima pengaduan dan kemudian dikoordinasikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.
- Penambahan jumlah personil mediator Hubungan Industrial.



**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.39**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan  
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

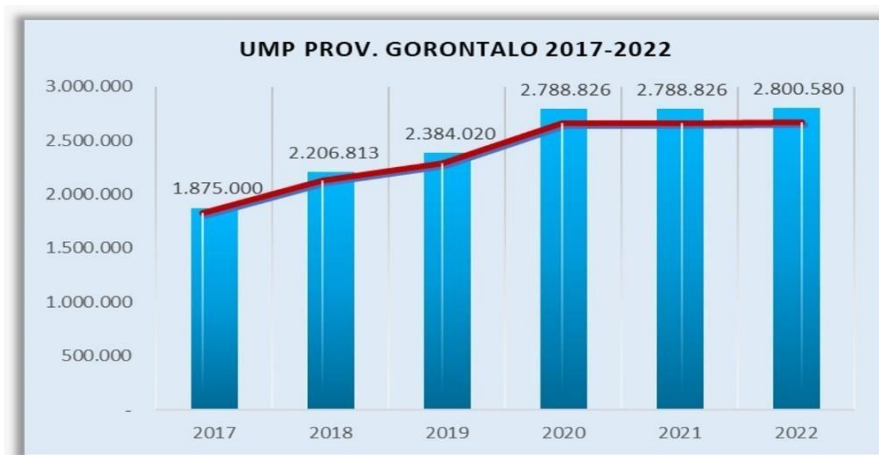
No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3.25%	2.58%	3.04%	3.01%
2	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	20%	12.99%	20%	15.59%
3	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	20%	27.27%	20%	54.54%
4	Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	20%	12.73%	20%	33.33%

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2022 meningkat 0,42 persen dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.800.580,00.

**Grafik 3.20**

Upah Minimum Provinsi



Sumber : Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi





**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk urusan ketenagakerjaan tidak menerima penghargaan nasional.

**7) Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2022**

Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk urusan ketenagakerjaan tidak melakukan perjanjian Kerjasama/MOU.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

- Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta upaya perlindungan perempuan dan tindak kekerasan
- Meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.40**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
<b>1</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	<b>Indikator sasaran :</b> Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>	-	<b>100%</b>
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Persentase perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi	0.02%	0.02%	0.02%	-	100%
		- Persentase ARG dalam APBD	7.24%	7.24%	6.33%	4.34%	100%
<b>2</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas dan pemenuhan hak perempuan dan anak	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta Kabupaten/Kota yang mencapai status kota layak anak (KLA) Pratama	<b>90%</b>	<b>47.96%</b>	<b>85%</b>	<b>61.21%</b>	<b>53.28%</b>
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase forum anak yang dibentuk serta lembaga layanan perlindungan (pusat pelayanan terpadu) yang aktif	90%	47.96%	85%	61.21%	53.28%

**2) Program dan Kegiatan**

**Tabel 3.41**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>2.594.128.229</b>	<b>2.579.272.445</b>	<b>99.43</b>	<b>100</b>	<b>99.45</b>	<b>100</b>
a.	Keg. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	170.000.006	168.864.472	99.33	75.56	97.06	100
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	170.000.006	168.864.472	99.33	75.56	97.06	100
b.	Keg. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.087.475.707	2.075.967.219	99.45	100	99.81	100
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.087.475.707	2.075.967.219	99.45	100	99.81	100
c.	Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	336.652.516	334.440.754	99.34	85.71	98.86	100
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	336.652.516	334.440.754	99.34	85.71	98.86	100
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>62.458.756</b>	<b>61.357.110</b>	<b>98.24</b>	<b>68.18</b>	<b>85.19</b>	<b>93.70</b>
a.	Keg. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	62.458.756	61.357.110	98.24	68.18	85.19	93.70
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	62.458.756	61.357.110	98.24	68.18	85.19	93.70
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>99.999.435</b>	<b>90.041.261</b>	<b>90.04</b>	<b>100</b>	<b>91.92</b>	<b>100</b>
a.	Keg. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	99.999.435	90.041.261	90.04	100	91.92	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	99.999.435	90.041.261	90.04	100	91.92	100
<b>4</b>	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>731.528.204</b>	<b>472.840.312</b>	<b>63.91</b>	<b>47.96</b>	<b>77.24</b>	<b>84.96</b>



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
a.	Keg. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	429.728.204	405.223.970	94.30	100	97.76	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Kewenangan Provinsi	429.728.204	405.223.970	94.30	100	97.76	100
b.	Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	301.800.000	67.616.342	22.40	36.87	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	175.044.000	5.384.070	3.08	-	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	51.306.000	24.050.000	46.88	100	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	75.450.000	38.182.272	50.61	100	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.488.114.624</b>	<b>3.203.511.128</b>	<b>91.84</b>	<b>71.31</b>	<b>99.76</b>	<b>100</b>

#### 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Outcome dari program adalah :

- Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi
- Persentase ARG dalam APBD

##### 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Output sub kegiatan adalah Jumlah perangkat daerah (SKPD) yang di latih PPRG 34 OPD

##### 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan



dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Output sub kegiatan :

- Terlaksananya bimtek penerima bantuan PEKKA
- Tersalurnya bantuan kepada penerima PEKKA 206 Orang
- Tersalurnya hibah uang kepada organisasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW), Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD) dan Dharma Wanita

3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Output sub kegiatan adalah Jumlah layanan perlindungan perempuan dan anak yang mendapatkan penguatan kapasitas 6 Lembaga

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Outcome dari program adalah Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi

1) Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wiyah Kerjanya Lintas Daerah Kab/Kota

- ✓ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Konrenhensif bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota

Output sub kegiatan adalah Jumlah 30 lembaga DUDI yang mendukung pembangunan daerah urusan PPA

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Outcome dari program adalah Persentase ARG dalam APBD

1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender Anak dan Provinsi

Output sub kegiatan adalah 1 Dokumen SIGA yang tersedia

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Outcome dari program adalah Persentase forum anak yang dibentuk serta lembaga layanan perlindungan (pusat pelayanan terpadu) yang aktif.

1) Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi



- ✓ Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  
Output sub kegiatan :
  - Terbentuknya Forum Anak dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Kelurahan/Desa
  - Jumlah anak korban kekerasan yang terlayani 10 Orang
- 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota
  - ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  
Output sub kegiatan adalah Jumlah pembekalan Bagi Pengurus Forum Anak se-Provinsi Gorontalo.
  - ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  
Output Sub Kegiatan : - Mengedukasi warga terhadap pentingnya kesadaran akan kekerasan perempuan dan anak.
    - Jumlah Unit Layanan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak 1 Lembaga
  - ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.  
Output sub kegiatan : - Meminimalisir Angka terjadinya kekerasan Perempuan dan Anak.
    - Jumlah Unit Layanan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak 1 Lembaga

### 3) Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi khusus untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo) tahun 2022 antara lain :

#### **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

1. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

**Permasalahan** : Kurangnya pemahaman tentang Gender maupun PUG belum maksimal dipahami oleh seluruh pemangku kebijakan dan perencana atau vocal point, sehingga dalam



memilah dan memilih anggaran yang responsif gender masih perlu diberikan penguatan ataupun advokasi dalam menganalisis RKA dalam dokumen Gender Analisis Patway (GAP) dan Gender Badjeting Statement (GBS)

**Solusi** : - Memberikan / melaksanakan sosialisasi, advokasi terhadap pemangku kebijakan dan memberikan pendampingan dalam membuat analisis RKA kedalam dokumen Gender Analisis Patway (GAP) dan Gender Badjeting Statement (GBS)

- Perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi OPD Lintas Sektor tentang PUG

2. Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam pilitik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi

**Permasalahan** : - Keakuratan Data PEKKA penerima bantuan dari kab/kota  
- Sebagian KPM tidak memahami bantuan yang telah di terima sesuai pemanfaatan usaha

**Solusi** : - Perlu memperbaharui data yang di usulkan oleh kab/kota, di identifikasi maupun di verifikasi

- Perlu mengevaluasi secara bertahap pada penerima bantuan

3. Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi

**Permasalahan** : Kurangnya koordinasi lembaga layanan dan lembaga pengampuh dlaam omplementasi penanganan kasus perempuan dan anak.

**Solusi** : Perlu melaksanakan kegiatan pendampingan maupun advokasi bagi lembaga layanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak.

### **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

1. Sub kegiatan Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

**Permasalahan** : Dunia Usaha dan Dunia Industri tidak memahami program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Solusi** : Perlu adanya advokasi terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri yang ada di kab/kota terhadap program pemberdayaan perempuan dan perlindungana anak.

### **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

1. Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

**Permasalahan** : Provinsi gorontalo belum memiliki aplikasi yang berbasis WEB dalam penyedia data gender dan anak



**Solusi** : Perlunya aplikasi WEB untuk penyedia data

**Program Perlindungan Khusus Anak**

1. Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

**Permasalahan** : - Belum terbentuknya forum anak sampai ke tingkat desa  
- Masih kurangnya pemahaman tentang pemenuhan hak anak

**Solusi** : - Perlu adanya sosialisasi tentang forum anak ditingkat desa  
- Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang pemenuhan anak di kab/kota

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.

**Permasalahan** : Provinsi Gorontalo belum memiliki UPTD PPA

**Solusi** : Provinsi Gorontalo wajib membentuk UPTD PPA

3. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.

**Permasalahan** : - Provinsi Gorontalo belum memiliki UPTD PPA  
- Kurangnya pemahaman terhadap penanganan kasus

**Solusi** : - Provinsi Gorontalo wajib membentuk UPTD PPA

- Perlu adanya sosialisasi/bimtek manajemen penanganan kasus

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  
Permasalahan : Kurangnya pemahaman dalam masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak

Solusi : Perlu dilaksanakan sosialisasi/bimtek perlindungan dan pemenuhan hak anak



**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.42**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi	0.02%	0.02%	0.02%	-
2	Persentase ARG dalam APBD	7.24%	6.33%	6.33%	4.34%

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

**Tabel 3.43**

Capaian Output Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022

NO	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	%
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	6841	32	Orang	0,47
2	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	1207	969	Orang	80,28
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial lanjut usia didalam panti	44256	23046	Orang	52,07
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial didalam panti	0	0	Orang	0
5	Jumlah Warga Negara korban bencana Provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	13279	13279	Orang	100



**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional ditahun 2022.

**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo pada tahun 2022**

Rencana Kerja tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

**3. Pangan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo**

- Terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat
- Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok
- Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.44**

Target dan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal dan akses pangan masyarakat	Indikator Sasaran : Pemenuhan Pangan Di Daerah Rawan Pangan (27 Daerah Rawan Pangan)	27 daerah rawan pangan	22 daerah rawan pangan	27 daerah rawan pangan	18 daerah rawan pangan	81.48%
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya	27 daerah rawan pangan	22 daerah rawan pangan	27 daerah rawan pangan	18 daerah rawan pangan	81.48%
		Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan	2.250 paket	1.345 paket	2.000 paket	1.250 paket	59.78%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
		(Rumah tangga miskin)					
2	Sasaran : Penyediaan pangan dengan harga terjangkau	Indikator Sasaran : Harga pangan pokok (beras dan jagung) di tingkat produsen	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	100%
		Harga Pangan Pokok (Beras, Cabe, Bawang Merah, Gula Pasir dan Minyak Goreng) ditingkat konsumen	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 2.01%, Cabe 22.34%, Bawang Merah 25.76%, Gula Pasir 2.5%, minyak goreng 24.95%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 1.20%, Cabe 25.44%, Bawang Merah 11.91, Gula Pasir 1.59%, Minyak Goreng 11,82%)	60 %  (khusus komoditi Bawang Merah dan Minyak Goreng CV berada di atas karena target terjadi lonjakan harga
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	100%
		Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 2.01%, Cabe 22.34%, Bawang Merah 25.76%, Gula Pasir 2.5%, minyak goreng 24.95%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 1.20%, Cabe 25.44%, Bawang Merah 11.91, Gula Pasir 1.59%, Minyak Goreng 11,82%)	60% (khusus komoditi Bawang Merah dan Minyak Goreng CV berada di atas target terjadi lonjakan harga
		Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	CPPD 50 Ton, CPM 100 Ton	CPPD 24 Ton, CPM 5 Ton	CPPD 50 Ton, CPM 200 Ton	CPPD 14 Ton, CPM 5 Ton	CPPD =48 % CPM = 5 %
3	Sasaran : Peningkatan Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga pada daerah rawan pangan	Indikator Sasaran : Sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga pada daerah rawan pangan	27 daerah rawan pangan	24 daerah rawan pangan	27 daerah rawan pangan	18 daerah rawan pangan	88.89%
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	persentase/jumlah konsumsi 2 energy per kapita perhari (Kkal/kapita/hari)	2.150	2.100	2.150	2.045	99.76%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	Masyarakat						
		persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)	56,6	57	56.6	58.9	100.71%
		Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	5 Sertifikat/registrasi	10 Sertifikat dan 55 Sampel	5 Sertifikat/registrasi	12 Sertifikasi/ 11 Registrasi	200 % +

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.45**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pangan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>8.421.313.916</b>	<b>8.306.255.821</b>	<b>98.63</b>	<b>100</b>	<b>98.81</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	483.992.207	483.014.393	99.80	100	99.86	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	483.992.207	483.014.393	99.80	100	99.86	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.150.127.309	7.052.325.968	98.63	100	99.18	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.247.411	6.959.466.062	98.61	100	99.06	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	92.879.898	92.859.906	99.98	100	99.29	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.400.000	49.925.460	99.06	100	98.42	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.400.000	49.925.460	99.06	100	98.42	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.155.887	318.501.069	99.48	100	98.30	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.155.887	318.501.069	99.48	100	98.30	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.638.513	402.488.931	96.60	100	98.30	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.638.513	402.488.931	96.60	100	98.30	100
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>2.685.976.807</b>	<b>2.643.069.900</b>	<b>98.40</b>	<b>100</b>	<b>99.00</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan	782.038.519	745.552.300	95.33	100	97.40	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	656.329.388	619.931.635	94.45	100	94.86	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	125.709.131	125.620.665	99.93	100	99.93	100
	Kegiatan Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	385.061.264	384.748.400	99.92	100	99.92	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	385.061.264	384.748.400	99.92	100	99.92	100
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Seusai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	1.518.877.024	1.512.769.200	99.60	100	99.68	100
	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	866.461.800	860.442.500	99.31	100	99.86	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	652.415.224	652.326.700	99.99	100	99.49	100
<b>3</b>	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>402.289.775</b>	<b>401.957.650</b>	<b>99.92</b>	<b>100</b>	<b>99.79</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	70.159.969	70.078.300	99.88	100	99.75	100
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	70.159.969	70.078.300	99.88	100	99.75	100
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	332.129.806	331.879.350	99.92	100	99.84	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	241.639.834	241.410.500	99.91	100	99.92	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90.489.972	90.468.850	99.98	100	99.75	100
<b>4</b>	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>236.004.847</b>	<b>235.440.593</b>	<b>99.76</b>	<b>100</b>	<b>98.76</b>	<b>99.50</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	236.004.847	235.440.593	99.76	100	98.76	99.50
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	159.239.826	159.014.353	99.86	100	98.48	99.00
	Sub Kegiatan Rekomendasi	76.765.021	76.426.240	99.56	100	99.03	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.745.585.345</b>	<b>11.586.723.964</b>	<b>98.65</b>	<b>100</b>	<b>99.09</b>	<b>99.88</b>

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Outcome dari program adalah :

- Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya
- Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga miskin)

1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi

Output kegiatan adalah

- Tenaga pengelola analisis ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang berkualitas dan Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- Tenaga Pengelola Analisis Ketersediaan yang tersedia berjumlah 2 (dua) Orang.
- Laporan Analisis Ketersediaan yang tersedia adalah Laporan Neraca Bahan Makanan, Angka Kecukupan Gizi dan Skor PPH Ketersediaan, Pola Panen Bulanan, Prognosa HBKN.

2) Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

Output dari kegiatan adalah Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD).

Tahun 2022 Paket Bantuan untuk Kios Akses Pangan berjumlah 15 LKD dari target 27 LKD yang tersebar di Kabupaten/Kota. Total bantuan yang diberikan terdiri dari 4 jenis komoditi dengan rincian yaitu Beras 1.500 Kg, Gula 750 Kg, Minyak Goreng 375 Liter dan Telur Ayam 2.400 butir.

Penentuan lokasi penerima manfaat dipilih berdasarkan Desa yang berada dalam kawasan daerah rawan pangan yang terdapat dalam Peta FSVA dan Peta SKPG, yang kemudian diusulkan oleh Dinas Pangan Kab/Kota dan diverifikasi oleh Dinas Pangan Provinsi.

Kriteria penerima manfaat kios akses antara lain :

- Penduduk asli setempat yang berada di daerah rawan pangan
- Menjalani usaha jual beli minimal 2 tahun dan mampu mengelola usaha dagang
- Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lain



- Tidak mendapat bantuan untuk kegiatan yang sama pada saat bersamaan
- Respon aktif terhadap kegiatan kios akses pangan
- Mempunyai jaringan usaha dengan distributor bahan pangan untuk menjamin keberlangsungan usaha
- Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Tim Teknis Dinas Pangan
- Bersedia mengembangkan secara berkelanjutan menyediakan bahan pangan dan kegiatan kios akses pangan
- Bersedia melaporkan perkembangan kios akses pangan ke Kabupaten dan Provinsi secara rutin setiap bulan
- Menandatangani Surat Pernyataan Pemanfaatan bantuan
- Nomor telp aktif yang bisa dihubungi

Penerima Bantuan Kios Akses Pangan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 97/23/III/2022 tanggal 4 Maret 2022. Dimana untuk 15 kios akses pangan tersebut masing-masing Kota Gorontalo mendapat alokasi 1 unit, Kabupaten Gorontalo 4 unit, Kab. Bone Bolango 2 unit, Kabupaten Gorontalo Utara 2 unit, Kabupaten Boalemo 3 unit dan Kabupaten Pohuwato 3 unit.

Jenis bantuan yang diberikan untuk masing-masing kios akses terdiri dari Beras 100 Kg, Minyak Kelapa 25 Liter, Gula Pasir 50 Kg dan Telur 160 butir. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi stimulant untuk kios-kios pangan yang ada di desa-desa rawan pangan.

**Tabel. 3.46**

**Alokasi Bantuan Kios Akses Pangan Tahun 2022**

NO	JADWAL PENYALURAN	NAMA PENERIMA	JENIS BANTUAN YANG DITERIMA	KABUPATEN	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN
1		2		3	4
1	Kamis, 31 Maret 2022	Selvi Adjuai	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir	Kota Gorontalo	Leato Selatan, Kel. Dumbo Raya
2	Selasa, 29 Maret 2022	Ice Kasim	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir	Kab. Gorontalo	Limboto, Desa Tilihuwa
3		Emi Husain	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Telaga, Desa Dulamayo Barat
4		Sariyah Wontami	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Bilato, Desa Musyawarah
5		Nikson Ali	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Mootilango, Desa Huyula
6	Kamis, 24 Maret 2022	Yulin Usman	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir	Kab. Boalemo	Paguyaman Pantai, Desa Apitalawu
7		Aswin Maakore	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Paguyaman Pantai, Desa Bangga
8		Inde Launuhu	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Paguyaman Pantai, Desa Towayu
9	Jumat, 23 Maret 2022	Sahrin Maire	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir	Kab. Pohuwato	Dengilo, Desa Padengo
10		Risna Ayuba	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Taluditi, Desa Malango
11		Dewinta Hasan	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Taluditi, Desa Kalimas
12	Rabu, 30 Maret 2022	Haidar Tabiba	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir	Kab. Bone Bolango	Bone Pantai, Desa Pelita Hijau
13		Halima Adiko	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Bone Pantai, Desa Pelita Hijau
14	Senin, 28 Maret 2022	Santy Abdjul	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir	Kab. Gorontalo Utara	Sumalata, Desa Pulohenti
15		Rohani Husain	Beras 100 Kg, Gula Pasir 50 Kg, Minyak Goreng 25 Liter dan Telur Ayam 160 Butir		Sumalata, Desa Puncak Mandiri

3) Kegiatan Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Provinsi.

Output dari kegiatan adalah jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien).

Paket bantuan PDRP yang menjadi target tahun 2022 yaitu berjumlah 2.250 paket bantuan dengan sasaran 27 daerah rawan pangan, namun karena keterbatasan anggaran, capaian tahun 2022 yaitu sejumlah 11 daerah rawan pangan dengan jumlah bantuan sebanyak 1.345 paket, dengan rincian 1.000 paket berasal dari pagu APBD induk dan 345 paket



berasal dari pagu APBD perubahan dengan jumlah daerah yang berhasil ditangani yaitu berjumlah 22 daerah rawan pangan.

Penentuan lokasi penerima manfaat adalah Desa yang terindikasi mengalami rawan pangan berdasarkan Peta FSVA, Analisis SKPG dan Data DTKS yang kemudian diusulkan oleh Dinas Pangan Kab/Kota dan diverifikasi oleh Dinas Pangan Provinsi.

Kriteria penerima manfaat adalah penduduk asli yang berada di lokasi rawan pangan berdasarkan data DTKS dan BDT yang berada di masing-masing desa.

Bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari Beras 7 Kg, Gula Pasir 1 Kg dan Minyak Goreng 1 Liter. Penyaluran bantuan sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2021.

Penerima Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 117/23/III/2022 tanggal 16 Maret 2022. Dimana untuk 1.000 paket bantuan tersebut masing-masing Kota Gorontalo mendapat alokasi 75 Paket, Kabupaten Gorontalo 200 Paket, Kab. Bone Bolango 150 Paket, Kabupaten Gorontalo Utara 200 Paket, Kabupaten Boalemo 175 Paket dan Kabupaten Pohuwato 200 Paket.

Sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD-Perubahan ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 370/23/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022, dengan jumlah paket yang diberikan berjumlah 345 dengan rinciannya 200 Paket untuk Kab. Pohuwato dan 145 Paket untuk Kab. Gorontalo. Bantuan pangan yang diberikan terdiri dari Beras 6 Kg, Telur 10 butir, Minyak Kelapa 1 Liter dan Gula Pasir 1 Kg. Penyaluran bantuan sudah dilaksanakan pada bulan Desember 2022.

Kejadian kerawanan pangan yang terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi krisis pangan, sehingga permasalahan ini harus menjadi perhatian dari berbagai sektor. Keadaan ini antara lain diakibatkan oleh bencana alam yang masih berlanjut dalam skala luas di berbagai wilayah, serta daya dukung alam untuk menghasilkan produk pangan yang cenderung terus berkurang dan rentan terhadap berbagai macam perubahan, senantiasa mengancam masyarakat Indonesia ke arah kekurangan pangan. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.



**Tabel.3.47**  
Alokasi Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2022

NO	JADWAL PENYALURAN	PENERIMA	JENIS BANTUAN YANG DITERIMA	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENERIMA
1	2	3	4	5	6
<i>Sumber Dana Pagu APBD Induk Rp. 125.000.000,-</i>					
1	Kamis, 31 Maret 2022	Kel. Tanjung Keramat Kec. Hulontalo	Beras 525 Kg, Gula Pasir 75 Kg, Minyak Goreng 75 Liter	Kota Gorontalo	75 KK
2	Senin, 28 Maret 2022	Desa Dulamayo Barat Kec. Telaga Desa Huyula Kec. Mootilango	Beras 1.400 Kg, Gula Pasir 200 Kg, Minyak Goreng 200 Liter	Kab. Gorontalo	200 KK
3	Rabu, 30 Maret 2022	Desa Pelita Hijau Kec. Bone Pantai Desa Batu Hijau Kec. Bone Pantai	Beras 1.050 Kg, Gula Pasir 150 Kg, Minyak Goreng 150 Liter	Kab. Bone Bolango	150 KK
3	Selasa, 29 Maret 2022	Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Desa Durian Kec. Gentuma Raya	Beras 1.400 Kg, Gula Pasir 200 Kg, Minyak Goreng 200 Liter	Kab. Gorontalo Utara	200 KK
4	Kamis, 07 April 2022	Desa Sari Tani Kec. Wonosari Desa Suka Mulya Kec. Wonosari	Beras 1.225 Kg, Gula Pasir 175 Kg, Minyak Goreng 175 Liter	Kab. Boalemo	175 KK
5	Jumat, 08 April 2022	Desa Marisa Kec. Popayato Timur Desa Bohusami Kec. Wonggarasi	Beras 1.400 Kg, Gula Pasir 200 Kg, Minyak Goreng 200 Liter	Kab. Pohuwato	200 KK
<i>Sumber Dana APBD Perubahan Rp. 45.000.000,-</i>					
1	8 dan 17 Desember 2022	Desa Kalimas Kec. Taluditi Desa Mekarjati Kec. Taluditi Desa Bohusami Kec. Wanggarasi Desa Marisa Kec. Popayato Timur	Beras 1.200 Kg, Telur 2.000 Butir, Gula Pasir 200 Kg, Minyak Goreng 200 Liter	Kab. Pohuwato	200 KK
2	12 dan 13 Desember 2022	Desa Kayu Merah Kec. Bongomeme	Beras 1.015 Kg, Telur 1.450 Butir, Gula Pasir 145 Kg, Minyak Goreng 145 Liter	Kab. Gorontalo	145 KK
<b>Jumlah Total Bantuan dan KK Penerima</b>			<b>Beras 9.215 Kg, Telur 3.450 Butir, Gula Pasir 1.345 Kg, Minyak Goreng 1.345 Liter</b>		<b>1.345 KK</b>

Penanganan kerawanan pangan kronis dan transien yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena: (1) belum adanya persepsi yang sama tentang kerawanan pangan; (2) sumberdaya dalam penanganan kerawanan pangan masih terbatas, dan (3) koordinasi dan sinkronisasi penanganan rawan pangan masih belum optimal.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Bidang Distribusi).

Outcome dari program adalah :

- Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen
- Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen
- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

a. Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok Lokal lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Output dari kegiatan adalah :



- Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang dibina dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen;
- Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan;
- Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan;
- Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil.

Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat yang dibina dalam upaya Stabilisasi harga adalah sekitar 12 Gapoktan yaitu dengan cara mensuplai sumber bahan pangan yang dijual melalui Toko Tani Indonesia Center dan Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan sebanyak 32 kali di 34 Lokasi baik di daerah rawan pangan maupun di lokasi tertentu dalam rangka menekan terjadinya inflasi, dengan jenis komoditi pangan yang distabilkan harganya sebanyak 6 komoditi yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Daging, Telur dan Cabe (pada beberapa kesempatan ada tambahan komoditi lain seperti bawang merah, bawang putih dan juga tomat yang hingga kini harga perkilonya masih diatas Rp. 10.000,- ).

**Tabel. 3.48**  
Daftar Pelaksanaan Gelar Pangan Sepanjang Tahun 2022

NO	TANGGAL	LOKASI DESA/KELURAHAN /KECAMATAN	KAB/KOTA	KET.
1	25 Januari 2022	Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Sabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
2	17 Februari 2022	Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasarMurah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
3	22 Februari 2022	Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
		Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
4	24 Februari 2022	Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
5	8 Maret 2022	Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
6	14 Maret 2022	Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
7	17 Maret 2022	Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.



NO	TANGGAL	LOKASI DESA/KELURAHAN /KECAMATAN	KAB/KOTA	KET.
8	18 Februari 2022	Kompleks Perkantoran Pemprov Gorontalo di Desa Ayula Kec. Bulango Selatan	Kab. Bone Bolango	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
9	23 Juni 2022	Kelurahan Tilihuwa Kec. Limboto	Kab. Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Hari Raya Idul Adha 1443 H)
		Desa Polohungo Kec. Limboto	Kab. Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Hari Raya Idul Adha 1443 H)
10	27 Juni 2022	Desa Tupa Kec. Bulango Utara	Kab. Bone Bolango	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Hari Raya Idul Adha 1443 H)
11	27 Juni 2022	Desa Huidu Kec. Limboto Barat	Kab. Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Hari Raya Idul Adha 1443 H)
12	5 Juli 2022	Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Hari Raya Idul Adha 1443 H)
13	6 Juli 2022	Desa Bongoime Kec. Tilongkabila	Kabupaten Bone Bolango	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Hari Raya Idul Adha 1443 H)
14	7 Juli 2022	Kel. Dembe I Kec. Kota Selatan	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Hari Raya Idul Adha 1443 H)
15	29 Juli 2022	Masjid Algazali Kel. Limba U2, Kec. Kota Selatan	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Tahun Baru Islam 1444 H)
16	2 Agustus 2022	Kel. Dembe I Kec. Kota Selatan	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HBKN (Tahun Baru Islam 1444 H).
17	7 Agustus 2022	Lapangan Taruna Remaja, Kec. Hulonthalangi.	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
18	13 Agustus	Kel. Ipilo Kec. Kota Timur	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 77.
19	17 Agustus	Masjid Islamic Center Wahdah Islamiyah Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 77.
20	25 Agustus	Desa Ombulo Kec. Limboto Barat	Kab. Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 77
21	4 Oktober 2022	Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone	Kab. Bone Bolango	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
22	6 oktober 2022	Desa Lawonu Kec. Tilango	Kab. Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
23	20 Oktober	Desa Dumati Kec. Telaga	Kab. Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar



<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>LOKASI DESA/KELURAHAN /KECAMATAN</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>KET.</b>
	2022	Biru		Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
24	26 Oktober	Desa Timbuolo Tengah, Kec. Botupinge	Kab. Bone Bolango	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
25	5 November 2022	Kelurahan Wongkaditi Kec. Kota Utara	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dalam rangka Hari Pangan Sedunia Untuk Pengendalian Inflasi
26	23 NOVEMBER 2022	Universitas Pohnato	Kec. Marisa Kab. Pohnato	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Menekan Laju Inflasi sepanjang Tahun 2022
27	30 NOVEMBER 2022	Dinas Perhubungan dan Infokom	Kab. Bone Bolango	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Menekan Laju Inflasi sepanjang Tahun 2022
28	2 DESEMBER 2022	Kel. DembeKec. Kota Timur	Kota Gorontalo	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Menekan Laju Inflasi sepanjang Tahun 2022
29	12 Desember 2022	Kompleks Kantor Pelabuhan Nusantara Kwandang	Kab. Gorontalo Utara	Pelaksanaan GPM dan pasar Murah dalam rangka Menekan Laju Inflasi sepanjang Tahun 2022
30.	21 Desember 2022	Kel, Leato Selatan , Kel. Leato Utara	Kota Gorontalo	Dalam rangka stabilisasi dan harga pangan menjelang HBKN 2022
31.	22 Desember 2022	Kel. Pohe dan Kel. Tenda	Kota Gorontalo	Dalam rangka stabilisasi dan harga pangan menjelang HBKN 2022
32.	23 Desember 2022	Kel. Biawu	Kota Gorontalo	Dalam rangka stabilisasi dan harga pangan menjelang HBKN 2022

**Tabel. 3.49**  
**Rerata Harga Ecer Provinsi, Januari-Juli Tahun 2022**

NO	KOMODITI	B U L A N													
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI	
		HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV
1	Beras Premium	11,287	0.44	11,227	0.09	11,268	0.33	11,225	0.10	11,259	0.10	11,311	0.22	11,230	0.26
2	Beras Medium	10,220	0.59	10,236	0.31	10,263	0.18	10,289	0.19	10,342	0.17	10,344	0.35	10,208	0.50
3	Bawang Merah	37,169	7.49	37,299	5.07	39,155	5.54	33,583	1.69	41,299	6.60	59,057	26.25	72,106	5.91
4	Bawang Putih	32,625	1.77	32,133	1.18	33,383	4.24	34,187	1.76	34,658	1.52	32,787	2.41	30,941	1.00
5	Cabe Merah Kriting	40,752	9.62	41,467	10.14	46,162	5.24	40,313	16.44	37,735	2.63	52,778	16.84	45,955	9.43
6	Cabe Rawit Merah	47,067	19.60	51,258	17.08	61,888	3.52	45,332	29.52	37,030	12.61	77,222	20.15	61,765	12.94
7	Daging Sapi Murni	125,651	0.37	126,009	0.01	128,980	0.75	132,026	1.25	138,618	0.22	138,377	0.36	138,031	0.40
8	Daging Ayam Ras	32,002	2.30	31,770	3.13	33,554	0.96	35,421	1.64	37,603	3.21	35,404	5.78	29,754	1.61
9	Telur Ayam Ras	27,365	3.72	25,726	2.41	25,102	0.68	27,467	5.35	28,760	2.98	28,765	0.91	27,754	1.65
10	Gula Pasir Lokal	14,117	3.46	14,269	0.55	14,369	1.26	15,203	0.93	15,337	0.45	15,038	0.73	14,945	0.10
11	Minyak Goreng	19,941	0.66	18,375	2.62	20,340	13.64	26,020	3.80	23,072	6.60	20,511	1.98	14,110	10.56
12	Tepung Terigu	7,688	1.14	7,805	1.29	9,377	4.29	9,676	0.60	9,714	0.37	9,855	1.35	10,273	0.72

3. Untuk semester pertama tahun 2022, dari 12 komoditi pangan yang ada, khusus komoditi minyak goreng yang mengalami fluktuasi pada Bulan Maret, Mei dan Juli. Masih tingginya harga minyak goreng di pasaran tidak lepas dari distribusi yang terbatas. Hingga kini, stok yang masuk ke pasar juga masih terbatas. Menteri Perdagangan menerangkan bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO). Hingga Januari 2022, harga rata-rata CPO dunia mencapai R13.244 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar 77% dibandingkan Januari 2021. Dengan kenaikan harga minyak goreng ini akan mendorong inflasi secara umum yang berdampak akan menimbulkan beberapa sektor, di antaranya sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Oleh karena itu, dampaknya juga akan lebih terasa terhadap inflasi yang terjadi



**Tabel. 3.50**  
**Rerata Harga Ecer Provinsi, Agustus-Desember Tahun 2022**

NO	KOMODITI	B U L A N										OLAH DATA			
		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		HARGA (Rp)	MAX	MIN	CV
		HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV	HARGA (Rp)	CV				
1	Beras Premium	11,230	0.07	11,264	0.32	11,275	0.03	11,706	2.02	12,127	1.41	11,367	12,127	11,225	2.40
2	Beras Medium	10,302	0.52	10,267	0.23	10,295	0.17	10,590	1.52	10,937	1.31	10,358	10,937	10,208	2.01
3	Bawang Merah	47,269	9.67	36,324	7.73	36,065	6.90	41,342	9.88	42,524	5.64	43,599	72,106	33,583	25.76
4	Bawang Putih	31,006	2.50	30,737	1.20	30,970	1.02	30,727	2.00	31,904	3.35	32,171	34,658	30,727	4.28
5	Cabe Merah Kriting	40,831	7.83	45,174	15.50	32,849	11.51	23,935	3.07	23,499	7.49	39,287	52,778	23,499	22.34
6	Cabe Rawit Merah	62,100	9.18	56,330	3.30	51,039	17.28	40,753	3.25	45,843	5.24	53,136	77,222	37,030	21.18
7	Daging Sapi Murni	138,543	0.28	137,376	0.12	137,660	0.00	137,588	0.10	137,662	0.00	134,710	138,618	125,651	3.78
8	Daging Ayam Ras	29,063	3.65	24,518	2.10	24,882	4.84	29,346	3.97	31,658	0.88	31,248	37,603	24,518	12.87
9	Telur Ayam Ras	30,173	10.22	33,124	2.51	30,337	0.97	28,977	1.83	30,183	4.71	28,644	33,124	25,102	7.64
10	Gula Pasir Lokal	14,872	0.72	14,705	0.26	14,807	0.39	14,967	0.31	14,849	0.33	14,790	15,337	14,117	2.50
11	Minyak Goreng Curah	13,834	0.56	13,437	0.64	13,450	0.50	13,583	0.16	14,198	1.05	17,573	26,020	13,437	24.95
12	Tepung Terigu	10,656	1.30	10,941	1.27	11,138	0.60	11,377	0.65	11,438	0.36	9,995	11,438	7,688	12.59

2) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

Output kegiatan adalah Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan dan Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan PLDPM.

Dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan yang tersedia berjumlah 2 (dua) dokumen.

Tahun 2022 Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat disalurkan ke 5 (lima) Gapoktan/Poktan melalui Dana APBD Provinsi dengan jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 5 Ton beras Cadangan Pangan Masyarakat, dimana masing-masing Gapoktan/Poktan mendapatkan tambahan bantuan untuk penguatan Unit Cadangan Pangan sebanyak 1 Ton per Gapoktan/Poktan.

Sasaran kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2022 adalah 5 (lima) Gapoktan/Poktan yang sudah ada/telah eksis, dan telah mengembangkan Unit Cadangan Pangannya bukan bentukan baru dan memenuhi kriteria yaitu memiliki gudang untuk sarana penyimpanan atau lahan untuk dapat dibangun sarana penyimpanan (gudang). Lahan tersebut adalah milik Gapoktan/Poktan atau tanah yang dihibahkan untuk Gapoktan/Poktan atau



lahan/gudang dengan status pinjam pakai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Mekanisme penetapan penerima bantuan sesuai yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan, yaitu dilakukan secara berjenjang :

- Pihak Kabupaten melalui Tim Teknis membuat inventarisasi terhadap calon-calon Gapoktan/Poktan diwilayahnya sebagai daftar panjang (long list). Berdasarkan data-data Gapoktan/Poktan tersebut kemudian dilakukan identifikasi kebenaran dari keberadaan Gapoktan/Poktan yang mencakup nama Gapoktan/Poktan, nama Ketua Gapoktan/Poktan, alamat Gapoktan/Poktan, jenis-jenis usaha yang dimiliki.
- Dari hasil identifikasi tersebut kemudian direkap ke dalam daftar sedang (medium list) untuk kemudian diusulkan sebagai calon penerima ke tingkat provinsi.
- Tim Pembina Provinsi melakukan verifikasi berdasarkan data usulan dari Kab/Kota, kemudian menentukan Gapoktan yang berhak menerima bantuan Cadangan Pangan Masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

**Tabel. 3.51**

Alokasi Penerima Manfaat Cadangan Pangan Masyarakat Untuk Gapoktan LDPM Tahun 2022

NO.	NAMA GAPOKTAN PENERIMA/ NAMA KETUA KELOMPOK	VOL BANTUAN (Kg)	LOKASI	WAKTU PENYALURAN
1	Maju Bersama/ Abubakar Tuli	Beras 1 Ton	Desa Bontula Kec. Asparaga Kab. Gorontalo	31 Maret 2022
2	Karya Manunggal Sae/ Agus Pindriat Utama	Beras 1 Ton	Desa Jatimulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo	31 Maret 2022
3	Sumber Tani/ Rustam Ahmad	Beras 1 Ton	Desa Dudepo Kec. Patilaanggio Kab. Pohuwato	31 Maret 2022
4	Tani Makmur/ Djafar Siribuah	Beras 1 Ton	Desa Bongoime, Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	31 Maret 2022
5	Maju Bersama/ Udin Talipi	Beras 1 Ton	Desa Kasia Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara	31 Maret 2022

Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat dan pemberian pendampingan serta pembinaan secara berjenjang diharapkan dapat memberikan dampak antara lain terwujudnya stabilisasi harga pangan terutama di tingkat petani anggota Gapoktan dan terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui peningkatan



pendapatan dan peningkatan akses pangan anggota Gapoktan. Peningkatan peran Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program swasembada padi dan jagung melalui upaya pengembangan agribisnis padi dan jagung.

Melalui kegiatan Penguatan-LDPM, Gapoktan/Poktan juga didorong agar mampu menyisihkan hasil produknnya untuk dapat disimpan sebagai cadangan pangan yang dapat diakses oleh anggotanya disaat musim paceklik atau tidak ada panen. Disamping diberikan bantuan, Gapoktan/Poktan juga memperoleh bimbingan dari pendamping (penyuluh pertanian atau petugas lapangan yang diutamakan adalah pendamping yang telah berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian), tim teknis kabupaten/kota dan tim pembina provinsi.

- 3) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Output dari kegiatan adalah Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat untuk kelompok Lumbung Pangan dan Gudang Cadangan Pangan Provinsi.

Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun ini dialokasikan sebanyak 8 Ton beras melalui APBD Induk dan 16 Ton Beras melalui APBD Perubahan. Untuk 8 Ton APBD Induk, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak rawan pangan kronis berdasarkan data FSVA sebanyak 800 KK dan masing-masing menerima 10 Kg beras, dengan rincian Kab. Gorontalo Utara sebanyak 340 KK, Kab. Boalemo 119 KK, Kab. Pohuwato 40 KK, Kab. Gorontalo 160 KK dan Kab. Bone Bolango 141 KK.





**Tabel. 3.52**  
Alokasi Penerima Manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Dana APBD  
Induk

NO.	URAIAN	VOL BANTUAN (Kg)	LOKASI	WAKTU PENYALURAN
<b>III</b>	<b>Kab. Pohuwato</b>	<b>400</b>		
1	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (40 KK)	400	Desa Karya Baru kec. Dengilo	25 April 2022
<b>IV</b>	<b>Kab. Gorontalo</b>	<b>1600</b>		
1	Bantuan Beras Korban Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (30 KK)	300	Desa Pilomonu Kec. Mootilango	11 April 2022
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (20 KK)	200	Desa Huyula Kec Mootilango	11 April 2022
3	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (45 KK)	450	Desa Pangahu Kec. Asparaga	11 April 2022
4	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (25 KK)	250	Desa Ayumolingo Kec. Pulubala	11 April 2022
5	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (20 KK)	200	Desa Bukit Aren Kec. Pulubala	11 April 2022
6	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (20 KK)	200	Desa Bakti Kec. Pulubala	11 April 2022
<b>V</b>	<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>1410</b>		
1	Bantuan Beras Masyarakat Korban Bencana Banjir (50 KK)	500	Desa Boidu Kec. Bulango Utara	27 April 2022
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (41KK)	410	Desa Talango, Kec. Kabila	27 April 2022
3	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (25 KK)	250	Desa Toto Selatan Kec. Kabila	27 April 2022
4	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (25 KK)	250	Desa Poowo Barat Kec. Kabila	27 April 2022
<b>JUMLAH</b>		<b>8000</b>		



NO.	URAIAN	VOL BANTUAN (Kg)	LOKASI	WAKTU PENYALURAN
<b>I</b>	<b>Kab. Gorontalo Utara</b>	<b>3400</b>		
1	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (40 KK)	400	Desa Pulohenti Kec. Tomilito	29 Maret 2022
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (35 KK)	350	Desa Buluwato Kec. Sumalata Timur	29 Maret 2022
3	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (45 KK)	450	Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur	29 Maret 2022
4	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (47 KK)	470	Desa Deme Satu Kec. Sumalata Timur	29 Maret 2022
5	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (79 KK)	790	Desa Dulukapa Kec. Sumalata timur	29 Maret 2022
6	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (31 KK)	310	Desa Koluwoka Kec. Sumalata Timur	29 Maret 2022
7	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (51 KK)	510	Desa Buladu Kec. Sumalata Timur	29 Maret 2022
8	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (12 KK)	120	Desa Bubalango Kec. Sumalata Timur	29 Maret 2022
<b>II</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>1190</b>		
1	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (35 KK)	490	Desa Tenilo Kec. Tilamuta	25 April 2022
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (35 KK)	350	Desa Mananggu Kec. Mananggu	25 April 2022
3	Bantuan Beras Korban Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (49 KK)	490	Desa Bangga Kec. Paguyaman Pantai	25 April 2022

Sedangkan 16 Ton sumber dana APBD Perubahan, sejumlah 10 Ton 280 kg sudah disalurkan ke masyarakat di 3 Kabupaten yaitu Kab. Gorontalo Utara sebanyak 137 KK untuk masyarakat pasca bencana banjir, Kab. Bone Bolango sebanyak 375 KK untuk masyarakat pasca bencana banjir juga dan Kab. Boalemo sebanyak 516 KK untuk masyarakat terdampak rawan pangan kronis. Sisanya sebanyak 5 Ton 720 Kg masih disimpan sebagai buffer stock.

**Tabel. 3.53**  
Alokasi Penerima Manfaat Cadangan Pangan Masyarakat Daerah  
Dana APBD Perubahan

NO.	URAIAN	VOL. (Kg)	LOKASI	WAKTU PENYALURAN
<b>I</b>	<b>Kab. Gorontalo Utara</b>	<b>1370</b>		
1	Bantuan Beras Masyarakat Korban Banjir (137 KK)	1370	Desa Tolongio Kec. Anggrek	15 November 2022
<b>II</b>	<b>Kab. Boalemo</b>	<b>5160</b>		
1	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (44 KK)	440	Desa Bangga Kec. Paguyaman Pantai	8 Desember 2022
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (100 KK)	1000	Desa Apitalawo Kec. Paguyaman Pantai	8 Desember 2022
3	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (130 KK)	1300	Desa Limbatihu, Kec. Paguyaman Pantai	8 Desember 2022
4	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (52 KK)	520	Desa Towayu, Kec. Paguyaman Pantai	8 Desember 2022
5	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (70 KK)	700	Desa Lito, Kec. Paguyaman Pantai	8 Desember 2022
6	Bantuan Beras Korban Masyarakat Terdampak Rawan Pangan Kronis (120 KK)	1200	Desa Olibu, Kec. Paguyaman Pantai	8 Desember 2022
<b>III</b>	<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>3750</b>		
1	Bantuan Beras Masyarakat Korban Banjir (66 KK)	660	Desa Boidu Kec Bulang Utara	15 2022 November
2	Bantuan Beras untuk Masyarakat Korban Banjir (45KK)	450	Desa Kopi Kec Bulang Utara	15 2022 November
3	Bantuan Beras untuk Masyarakat Korban Banjir (65 KK)	650	Desa Lomaya Kec Bulang Utara	15 2022 November
4	Bantuan Beras untuk Masyarakat Korban Banjir (199 KK)	1990	Desa Tupa Kec Bulang Utara	15 2022 November
<b>JUMLAH</b>		<b>10280</b>		

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Cadangan pangan terdiri atas 2, yaitu : cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik DKP Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan dimana salah satunya dimanfaatkan untuk upaya penanganan kerawanan pangan transien.



#### 4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Bidang Konsumsi)

Outcome dari program adalah :

- persentase/jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kkal/kapita/hari)
- persentase/jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)
- Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan

##### 1) Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Output kegiatan adalah :

- Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina
- Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

Untuk mencapai output pertama, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan yaitu :

- Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Berantas Kemiskinan (P2L Taskin) sebanyak 150 Paket (100 Paket sumber dana APBD Induk dan 50 Paket dari APBD Perubahan). Dengan penerima manfaat yang tersebar di Kab. Gorontalo sebanyak 80 paket dan Kab. Bone Bolango sebanyak 20 Paket.

Paket yang diberikan kepada berupa 20 ekor ayam beserta kandang pembesaran, tempat makan dan minum serta pakan. Sedangkan untuk yang sumber dana APBD Perubahan, jumlah penerima sebanyak 50 KK yang ada di Kab. Gorontalo. Untuk jenis bantuan yang diberikan masih sama yaitu ternak ayam tapi dengan jumlah yang berbeda yaitu 25 ekor per KK.

Penentuan lokasi penerima manfaat dipilih berdasarkan Desa yang berada dalam kawasan daerah rawan pangan yang terdapat dalam Peta FSVA dan Peta SKPG, yang kemudian diusulkan oleh Dinas Pangan Kab/Kota dan diverifikasi oleh Dinas Pangan Provinsi.



**Tabel. 3.54**

Alokasi Penerima Manfaat Kegiatan Peкарangan Pangan Lestari Pengentasan Kemiskinan (P2L Taksin)

NO	PENERIMA	JENIS BANTUAN YANG DITERIMA	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENERIMA
1	2	3	4	5
<i>Sumber Dana Pagu APBD Induk Rp. 152.300.000,-</i>				
1	Desa Puncak Kec. Pulubala	400 ekor Ayam, 20 Unit Kandang, 20 Unit tempat makan, 20 unit tempat minum dan 600 Kg pakan	Kab. Gorontalo	20 KK
2	Desa Tilihuwa Kec. Limboto	400 ekor Ayam, 20 Unit Kandang, 20 Unit tempat makan, 20 unit tempat minum dan 600 Kg pakan	Kab. Gorontalo	20 KK
3	Desa Huidi Kec. Limboto Barat	400 ekor Ayam, 20 Unit Kandang, 20 Unit tempat makan, 20 unit tempat minum dan 600 Kg pakan	Kab. Gorontalo	20 KK
4	Kel. Polohungo Kec. Limboto	400 ekor Ayam, 20 Unit Kandang, 20 Unit tempat makan, 20 unit tempat minum dan 600 Kg pakan	Kab. Boalemo	20 KK
5	Desa Tupa Kec. Bulango Utara	400 ekor Ayam, 20 Unit Kandang, 20 Unit tempat makan, 20 unit tempat minum dan 600 Kg pakan	Kab. Bone Bolango	20 KK
<i>Sumber Dana APBD Perubahan Rp. 100.000.000,-</i>				
1	Desa Puncak Kec. Pulubala	500 ekor Ayam, 25 Unit Kandang, 25 Unit tempat makan, 25 unit tempat minum dan 500 Kg pakan	Kab. Pohuwato	25 KK
2	Desa Daenaa Kec. Limboto Barat	500 ekor Ayam, 25 Unit Kandang, 25 Unit tempat makan, 25 unit tempat minum dan 500 Kg pakan	Kab. Gorontalo	25 KK
		<b>Ayam 3.000 ekor, Kandang 150 Unit, 150 unit tempat makan, 150 unit tempat minum dan 4.000 Kg pakan</b>		<b>150 KK</b>

- Kegiatan P2L Gertam Cabe. Kegiatan ini merupakan gerakan tanam cabai dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah agar masyarakat bisa memenuhi sendiri kebutuhan cabe secara mandiri dan berdampak pada upaya menekan inflasi yang disumbang oleh cabai merah. Dengan menanam cabai di pekarangan masing-masing, selain masyarakat tidak perlu lagi membeli cabai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, juga dapat menghemat pengeluaran belanja sehari-hari. Gerakan menanam cabai, bertujuan untuk terus menekan inflasi. Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2022 melalui dana APBD-perubahan menyalurkan bibit cabe kepada masyarakat sebanyak 35.000 yang diberikan kepada masyarakat umum, Kelompok Wanita Tani, Pesantren,



Sekolah-sekolah serta instansi terkait lainnya.

**Tabel. 3.55**  
Alokasi Penerima Manfaat Kegiatan P2L Gertam Cabe

No	Instansi/Lembaga	Alamat			Diterima			
		Kab/Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Bibit (Pohon)	Pupuk (Kg)	Polibag	Pot
1	Korem 133 Nani Wartabone	Kab.Gorontalo	Tibawa	Bhakti	625	625		
2	Brimob Polda		Tibawa	Isimu	5,000	5,000		
3	RS. Bayangkara Polda		Limboto	Hutuo	1,000	1,000		
4	SMK Pulubala		Pulubala	Molalahu	1,000	1,000		
5	KWT Nurul Hidayah		Limboto	Bulota			200	
6	KWT Mandiri I		Limboto	Bongohulawa			200	
7	Desa Daenaa		Pulubala	Daenaa			200	
8	Pesantren Hubulo	Kab. Bone Bolango	Tapa	Kramat	3,500	3,500		10
9	Pesantren Miftahul Khaerat		Tilongkabila	Bongoime	1,500	1,500		
10	Pesantren Moosalamati		Bulango Timur	Bulotalangi Barat	875	875		
11	Pesantren Sabrun Jamil		Botupingge	Luwohu	500	500		
12	Al Hidayah		Suwawa Selatan	Bulontala Timur	1,000	1,000		
13	SMK Bulango Utara		Bulango Utara	Boidu	4,000	4,000		
14	SMK Model Botupingge		Botupingge	Panggulo Barat	500	500	100	
15	Desa Bendungan		Bulango Utara	Bendungan			215	
16	Desa Suka Maju		Bulango Utara	Suka Maju			215	
17	Desa Helumo		Suwawa	Helumo			500	
18	KWT Lestari Jaya		Tapa	Huntu Utara			500	
19	KWT Cendana		Tapa	Huntu Selatan			500	
20	KWT Cemara		Bulango Selatan	Sejahtera			200	
21	UBM		Toto Selatan	Tilongkabila	500	500	100	
22	TP PKK Provinsi Gorontalo	Toto Selatan	Tilongkabila			870	290	
23	KWT Belimbing 25	Kota Gorontalo	Kota Timur	Ipilo	1,000	1,000		
24	Dasawisma Terong 21		Kota Utara	Dulomo Utara	1,000	1,000		
25	Dasawisma Terong 22		Kota Utara	Dulomo Utara			1,000	
26	KWT Palma		Dungingi	Libuo			200	
27	KWT Bilqis		Kota Timur	Kampung Bugis			200	
28	KWT Bukit Indah		Dumbo Raya	Leato			200	
29	Karang Taruna ILOMATA		Sipatana	Tapa			200	
30	TNI AL		Dumbo Raya	Leato			200	
31	Biro Umum		Kota Timur	Botu	1,000	1,000		
32	Dharma Wanita		Kota Selatan	Biawao			800	200
33	BKOW		Kota Selatan	Biawao			600	400
34	Rumah Quran BMH		Kota Selatan	Limba U1			600	
35	KODIM		Kota Tengah	Wumialo			200	
36	UNG		Kota Tengah	Dulalowo Timur				100
37	Univ Pohuwato	Kab. Pohuwato	Marisa	Palopo	3,000	3,000		
<b>Total</b>					26,000	26,000	8,000	1,000

Sedangkan untuk mencapai output kedua, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan yaitu :

- Kegiatan OPAL P2L Edukasi Pondok Pesantren. Kegiatan ini berupa pembagian pangan lokal dan buah serta telur ayam kepada 6 pesantren yang ada di Kota Gorontalo, Kab. Bone Bolango dan Kab. Gorontalo masing-masing 2 unit ponpes. Paket yang diberikan berupa Pangan Lokal (Ubi Jalar, Ubi Kayu, Jagung dan Olahan Pisang) sebanyak 6 Paket, Telur 3.960 butir, Buah Apel 120 Kg dan Buah Pear 160 Kg.

Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tubuh kita memerlukan pola makan yang bergizi dan seimbang. Saat ini kenyataannya konsumsi umbi-umbian di masyarakat masih rendah



khususnya sebagai sumber pangan karbohidrat non-beras. Disamping itu sebagian masyarakat beranggapan kalau mengkonsumsi umbi-umbian, jagung atau sagu dianggap **inferior** (makanan orang miskin). Padahal tidak demikian halnya, karena sumbangan energi yang dihasilkan oleh kelompok umbi-umbian tersebut setara dengan energy yang dihasilkan oleh nasi. Sebagai perbandingan kalori 100 gram nasi setara dengan 100 gram singkong atau 50 gram jagung atau 200 gram kentang atau 50 gram sagu atau 150 gram ubi.

**Tabel. 3.56**

Alokasi Penerima Manfaat Kegiatan OPAL P2L Edukasi Pondok Pesantren

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan/Desa	Penerima Manfaat (Pondok Pesantren)	Pimpinan
1.	Kota Gorontalo	Kota Barat Desa Buladu	Hidayatullah	Risman Y. Halid
		Kota Barat Desa Buliide	Darul Quran Moosalamati	Niko Ismail
2.	Kab. Gorontalo	Limboto Barat Desa Tenilo	Hidayatullah	Moh. Fadlan
3.	Kab. Bone Bolango	Bulango Timur Desa Bulotalangi	Al-Hamim Moosalamati	Abdul Rahman
		Suwawa Timur Desa Lompotoo	Al-Muhaarib	Suwandi Kaiha
		Tilongkabila Desa Bongoime	Miftahul Khairat	Dewi Pomalango
Jumlah Total			6 Pondok Pesantren	

Penerima manfaat OPAL P2L Edukasi untuk Pondok Pesantren diberikan berdasarkan SK Kepala Dinas Pangan Nomor 18/SK/B2SA/Pangan-B/APBD/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

- 2) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Promosi

Output dari kegiatan adalah :

- Jumlah Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan masyarakat berdasarkan PPH
- Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya.

Tenaga Pengelola Analisis Pola Konsumsi Pangan yang tersedia berjumlah 10 Orang, sedangkan Laporan Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat berdasarkan PPH yang disusun terdiri dari data Provinsi dan Data per Kabupaten/Kota.



**Tabel. 3.57**  
Capaian Skor PPH Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	325.2	1,253	62.3	59.7	0.5	31.2	29.8	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	32.3	42	2.1	2.0	0.5	1.0	1.0	2.5	1.0
3	Pangan Hewani	126.5	179	8.9	8.5	2.0	17.8	17.1	24.0	17.1
4	Minyak dan Lemak	30.6	276	13.7	13.1	0.5	6.9	6.6	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	6.3	35	1.8	1.7	0.5	0.9	0.8	1.0	0.8
6	Kacang-kacangan	12.6	30	1.5	1.4	2.0	3.0	2.9	10.0	2.9
7	Gula	21.1	77	3.9	3.7	0.5	1.9	1.8	2.5	1.8
8	Sayur dan Buah	186.4	87	4.3	4.1	5.0	21.7	20.7	30.0	20.7
9	Lain-lain	52.5	30	1.5	1.4	-	-	-	-	-
	Total		2,009	100.0	95.7		84.4	80.7	100.0	74.3

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Capaian skor PPH provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah 74,3, hal ini menandakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Gorontalo masih kurang beragam bergizi seimbang dan aman.

Pada tahun 2022 ini, melalui dana APBD-Perubahan, telah dilaksanakan kegiatan B2SA Stunting, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak stunting antara lain : beras Nutrizink, Telur Ayam, Kacang Hijau dan Susu untuk anak balita. Anak penerima bantuan berjumlah 1.051 orang yang tersebar di Kota Gorontalo 136 anak, Kab. Gorontalo 347 anak, Kab. Bone Bolango 212 anak dan Kab. Gorontalo Utara 356 anak.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Kondisi ini dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, stunting bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Anak





tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak mencukupi juga memengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, Prevalensi Balita stunting sebesar 24,4% pada 2021. Artinya, hampir seperempat balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu. Namun, demikian, angka tersebut lebih rendah dibanding 2020 yang diperkirakan mencapai 26,9%. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Irma Ardiana mengungkapkan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Semoga kedepannya pemerintah Provinsi Gorontalo bisa memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak terutama dari segi pemenuhan gizi agar bisa menekan perkembangan angka stunting di daerah.

3) Kegiatan Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Litas Daerah Kabupaten/Kota

Output dari kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Dokumen Pengawasan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan tersedia berjumlah 2 (dua) dokumen dan data pangan segar yang diuji tingkat cemarannya yang berjumlah 55 jenis komoditi.

Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pangan yang berisiko tinggi terhadap cemaran kimia, salah satunya residu pestisida yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan dimulai dari tempat produksi sampai ke tingkat pedagang. Pengambilan sampel PSAT meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan yang diuji kandungan pestisidanya dengan menggunakan Uji Rapid Test Kit. Rapid Test Kit Pestisida merupakan alat uji cepat kualitatif keamanan pangan untuk mendeteksi kandungan pestisida yang terdapat dalam bahan pangan. Hasil uji akan menunjukkan positif atau negatif kandungan pestisida. Selama kurun waktu tahun 2022 telah dilakukan pengujian sampel sebanyak 21 kali untuk 55 jenis komoditi.

4) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi

Output dari kegiatan adalah jumlah Serifikat Mutu dan Keamanan Pangan Segar.

Tahun ini capaian jumlah sertifikat Mutu yang diterbitkan untuk pelaku usaha tani pangan segar asal tumbuhan berjumlah 9 untuk sertifikasi dan 11 untuk registrasi.

Dalam upaya menyediakan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi, Pemerintah membuat regulasi yang tertuang dalam Peraturan



Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Permentan No. 53 tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mendukung penguatan dan pemanfaatan sistem keamanan pangan. Secara umum regulasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat selaku konsumen, karena masyarakat akan mudah memilih Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman, yaitu pangan yang memiliki nomor registrasi atau sertifikasi.

Pendaftaran/Registrasi PSAT merupakan salah satu bentuk penjaminan suatu bentuk ijin edar dengan pemberian dokumen yang menyatakan bahwa produk pertanian tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dengan adanya Registrasi PSAT ini akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat/konsumen, serta akan mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk. Apabila terjadi sesuatu maka pemerintah mudah untuk melacak dan melakukan penelusuran kemungkinan terjadinya penyimpangan mutu maupun keamanan Pangan dari hulu hingga hilir.

OKKPD Provinsi Gorontalo melalui UPTD BPMKP pada tahun 2022 telah menerbitkan Sertifikat sebanyak 10 terhadap kelompok tani yang sudah melakukan proses sertifikasi prima 3. Sertifikat prima 3 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKPP-D) dengan persyaratan memenuhi aspek Produk aman untuk dikonsumsi.

**Tabel. 3.58**  
Daftar Komoditi Yang Di Sertifikasi Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT)  
Tahun 2022

No	No. Sertifikat/ Registrasi PSAT	Tanggal Terbit	Jenis Sertifikasi/ Registrasi	Pelaku Usaha / Kelompok Tani	Alamat	Komoditi	Batas Masa Berlaku s/d	Ket
1	75.02- b.I.21.001.06/2022	9 Juni 2022	Prima 3	Tugiran	Desa Pangeya SP 2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo	Jambu Biji	9 Juni 2025	
2	75.02- b.I.23.002.06/2022	9 Juni 2022	Prima 3	Tugiran	Desa Pangeya SP 2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo	Jeruk	9 Juni 2025	
3	75.01- b.II.36.008.10/2022	14 Oktober 2022	Prima 3	Kelompok tani kecil	Desa Helumo Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo	Kacang Panjang	14 Oktober 2022	
4	75.02- b.I.23.003.10/2022	14 Oktober 2022	Prima 3	Maryadi	Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	Jeruk	14 Oktober 2022	
5	75.02- b.II.17.004.10/2022	14 Oktober 2022	Prima 3	Maryadi	Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	Cabai Rawit	14 Oktober 2022	
6	75.02- b.II.08.005.10/2022	14 Oktober 2022	Prima 3	Slamet	Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo	Bawang Merah	14 Oktober 2022	



7	75.02- b.II.77.006.10/2022	14 Oktober 2022	Prima 3	Slamet	Desa Jatimulya Kecamatan Wonosarri Kabupaten Boalemo	Terung	14 Oktober 2022	
8	75.03- b.II.17.010.10/2022	14 Oktober 2022	Prima 3	Ishak Amruna	Desa Tunas Jaya Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango	Cabai Rawit	14 Oktober 2022	Re-Sertifikasi
9	75.03- b.I.53.015.10/2022 Bone Boalango	14 Oktober 2022	Prima 3	Abd Aziz Hasan	Desa Molintogupo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango	Sirsak	14 Oktober 2022	
10	75.04- b.I.52.006.12/2022	13 Desember 2022	Prima 3	Sucipto	Desa Makarti Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato	Semangka	13 Desember 2022	Sertifikat

### 3) Permasalahan dan Solusi

#### **Permasalahan :**

- UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sejak disahkan pada tahun 2018 hingga kini masih belum memiliki kantor sendiri dan hanya menempati 1 (satu) ruangan pada Kantor Dinas Pangan
- Kurangnya Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota
- Dukungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah masih belum sesuai dengan target kebutuhan daerah
- Mobil Operasional Dinas Pangan rata-rata sudah mengalami kerusakan sehingga membutuhkan biaya perawatan yang mahal

#### **Solusi :**

- Dibutuhkan bangunan yang memadai untuk bisa dijadikan Kantor UPTD BPMKP dan bila perlu dilengkapi dengan peralatan Laboratorium untuk pengujian sampel pangan segar
- Dibutuhkan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota untuk menjamin keberhasilan program
- Dibutuhkan Cadangan Pangan Pangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah
- Dibutuhkan mobil operasional dinas yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari



**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.59**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan  
Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Skor PPH Ketersediaan	66.89	76.6	66.6	76.66
2	Skor PPH Konsumsi	86	74.3	84.4	75.5

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- Skor PPH Ketersediaan merupakan indikator ketersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Skor PPH Ketersediaan di Provinsi Gorontalo periode tahun 2018 - 2022 capaian yang diperoleh selalu melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2022 dari target yang ditetapkan 66.89%, capaiannya adalah sebesar 76.6%.

Hingga posisi Desember tahun 2022 dari hasil analisis data neraca pangan dapat diketahui bahwa dari 11 komoditi pangan (Beras, Jagung, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Bessar, Cabe Rawit, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam, Gula Pasir, Minyak Goreng) semuanya dalam kondisi surplus. Namun yang perlu diingat adalah bahwa beberapa komoditi buah dan sayur masih bergantung dari suplay luar daerah karena belum tersedia di Gorontalo.

- Skor PPH Konsumsi Provinsi Gorontalo periode tahun 2018-2022 capaiannya mengalami kenaikan pada awal periode dan turun pada tahun keempat dan kelima. Tahun 2018 capaian 76.3 kemudian tahun berikutnya 2019 naik 89.3% kemudian 2020 naik lagi pada 90.7% kemudian tahun 2021 turun ke angka 75.5 dan tahun 2022 turun ke angka 74.4

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan. Disamping itu juga masih tingginya konsumsi beras dan rendahnya daya beli masyarakat imbas dari pandemi Covid 19, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya Skor PPH konsumsi.



**Tabel 3.60**  
Perkembangan Penurunan dan Peningkatan  
Jumlah Daerah Rawan Pangan berdasarkan Skala Prioritas  
Tahun 2018-2021

P rioritas K omposit	2018		2019		2020		2021		2022	
	J uumlah K ecamatan	%	J uumlah K ecamatan	%	J uumlah K ecamatan	%	J uumlah K ecamatan	%	J uumlah K ecamatan	%
P1	8	38.10	24	20.51	15	10.87	15	11.45	0	0.00
P2	2	9.52	37	31.62	44	31.88	45	34.35	35	24.31
P3	11	52.38	56	47.86	79	57.25	71	54.20	109	75.69
T otal K ec	21		117		138		131		144	

Berdasarkan tabel diatas, secara umum dapat dilihat bahwa jumlah daerah rawan pangan di Provinsi Gorontalo berdasarkan skala prioritas 1 – 3 terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022, dimana awalnya 21 kecamatan meningkat menjadi 144 kecamatan. Namun untuk kategori prioritas 1 pada tahun 2022 sudah tidak terdapat lagi, dimana pada tahun 2020 dan 2021 tercatat berjumlah 15 kecamatan. Sedangkan untuk prioritas 2 dan 3 fluktuatif mengalami penurunan dan peningkatan. Daerah rawan pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Faktor yang menyebabkan kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan dari tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan dapat memperburuk konsumsi energi dan protein sehingga menyebabkan gizi buruk. Dengan demikian, dampak dari keadaan rawan pangan adalah meningkatnya gizi buruk.

Langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan ketahanan pangan di Desa agar tidak terjadi rawan pangan antara lain :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa
- c. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal
- d. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa



**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Tahun 2022 Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional.

**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2022**

- Kerjasama dengan Universitas Pohuwato dalam rangka Gertam 3.000 Bibit Cabe.

**4. Pertanahan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang wilayah Provinsi, serta pengadaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.61**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah yang Terencana dan Terkendali Serta Tersedianya Tanah untuk Kebutuhan Pembangunan</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi</b>	3%	25%	22	15	8.33%
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan	22	14	22	15	63.64%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Laporan	22	5	-	-	22.73%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.62**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertanahan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	<b>16.545.020.785</b>	<b>14.216.547.486</b>	<b>85.93</b>	<b>89.15</b>	<b>40.5</b>	<b>88.98</b>
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	16.545.020.785	14.216.547.486	85.93	89.15	40.5	88.98
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	16.545.020.785	14.216.547.486	85.93	89.15	40.5	88.98
<b>2</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>221.490.967</b>	<b>221.490.967</b>	<b>100</b>	<b>92.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	221.490.967	221.490.967	100	92.08	-	-
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	221.490.967	221.490.967	100	92.08	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.766.511.752</b>	<b>14.438.038.453</b>	<b>86.02</b>	<b>89.19</b>	<b>40.5</b>	<b>88.98</b>

### 1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Outcome dari program adalah Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan.

#### 1) Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Output : Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan sejumlah 14 bidang tanah dari target 22 bidang Tanah, yaitu :

- 2 bidang tanah untuk RS bhayangkara Seluas 14.239 m persegi berlokasi di desa Hutuo kecamatan Limboto Kab. Gorontalo.
- 1 bidang tanah untuk TPU Sibatana seluas 7.186 m persegi yang berlokasi di bulotadaa barat.
- 4 Bidang tanah untuk TPU Makassar seluas 6.901 meter Persegi yang berlokasi



di Kab. Gowa. Provinsi Sulawesi Selatan.

- 1 Bidang Tanah untuk Lahan Jalan Iluta-Tenilo-Pilolodaa seluas 3.819 meter persegi yang berlokasi di kelurahan lekobalo kota Gorontalo.
- 2 Bidang tanah untuk Pengembangan Asrama haji Provinsi Gorontalo seluas 3.105 meter persegi yang berlokasi di kelurahan bulotadaa barat, kecamatan Sibatana kota gorontalo.
- 2 Bidang tanah untuk Gedung Pusat Rehabilitasi Sosial seluas 5.338 meter persegi yang berlokasi di desa Ulantha Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango.
- 1 Bidang tanah untuk lahan Bandara seluas 7.879 meter persegi yang berlokasi di kabupaten Gorontalo.
- 1 bidang tanah untuk Stasiun Pompa banjir yang berlokasi di Kota Gorontalo.

## 2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Outcome dari program adalah Jumlah laporan penyelesaian sengketa tanah Garapan.

### 1) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- ✓ Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output : terdapat 5 bidang tanah yang difasilitasi terkait sengketa, konflik dan perkara pertanahan pada tahun 2022 dengan target 22 bidang tanah :

- 2 Bidang tanah untuk RS Bhayangkara.
- 1 bidang tanah untuk Stasiun Pompa banjir yang berlokasi di Kota Gorontalo.
- 2 Bidang tanah untuk Gedung Pusat Rehabilitasi Sosial seluas 5.338 meter persegi yang berlokasi di desa Ulantha Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango.

### 3) Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat permasalahan.





**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.63**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah bidang tanah yang tersedia untuk pembangunan	22 Bidang Tanah	14 Bidang Tanah	22 Bidang Tanah	15 Bidang Tanah
2	Jumlah laporan	22 Bidang Tanah	5 Bidang Tanah	22 Bidang Tanah	-

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- Pada sub kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Output Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan 5 Bidang Tanah dari target 22 bidang tanah  
Sub kegiatan sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi merupakan subkegiatan baru yang baru ada pada tahun 2022, sehingga tidak ada capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo tahun 2022**

Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo untuk urusan pertanahan tidak menerima penghargaan nasional.

**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo pada tahun 2022**

Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo untuk urusan pertanahan tidak melakukan perjanjian Kerjasama/MOU.

**5. Lingkungan Hidup**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan
- Meningkatkan Pengendalian dan Penegakan Hukum Pencemaran, Kerusakan



Lingkungan dan Kehutanan

- Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten
- Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan.

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel. 3.64**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
<b>1</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Indikator Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>73.61</b>	<b>79.79</b>	<b>73.39</b>	<b>77.32</b>	<b>108.40</b>
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	44.60/90.83	58.07/94.47	43.5/98.86	53.46/93.96	130%/104%
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Indeks Kualitas Air dan Udara	44.60/90.83	58.07/94.47	43.5/98.86	53.46/93.96	130%/104%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Indeks Kualitas Air dan Udara	44.60/90.83	58.07/94.47	43.5/98.86	53.46/93.96	130%/104%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Air dan Udara	44.60/90.83	58.07/94.47	43.5/98.86	53.46/93.96	130%/104%
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase SDM yang di tingkatkan kapasitasnya	21,41%	21,41%	20.15	20.15	100
<b>2</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase peningkatan kualitas pelayanan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase keselarasan dokumen perencanaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	100	100	100	100

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.65**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>30.462.734.887</b>	<b>28.027.521.783</b>	<b>91,94</b>	<b>100</b>	<b>93.99</b>	<b>99.39</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1.176.125.170	1.175.499.602	99.95	100	99.71	100
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	955.708.266	955.300.065	99.96	100	99.52	100
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.416.904	220.199.537	99.90	100	99.93	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.397.891.368	22.984.066.665	90,50	100	93.43	99.32
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.247.891.612	22.834.066.966	90.44	100	93.40	100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	149.999.756	149.999.699	100	100	97.42	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.908.856.795	1.899.778.018	99.52	100	98.61	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas)	1.486.154.980	1.481.880.280	99.71	100	99.03	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH I & II Gobar)	41.280.000	41.279.998	100	100	100	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH III Pohuwato)	100.150.532	96.790.946	96.65	100	96.45	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH IV Gorut)	84.548.550	84.511.155	99.96	100	99.96	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH V Boalemo)	50.274.997	49.392.419	98.24	100	93.47	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH VI Gorontalo)	61.346.659	61.216.220	99.79	100	99.03	100
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH VII Bone Bolango dan Kota)	85.101.077	84.707.000	99.54	100	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.979.861.554	1.968.177.498	99,41	100	98.85	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas)	1.028.318.617	1.023.581.999	99.54	100	100	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH I dan II Gobar)	114.509.783	113.706.630	99,30	100	98.65	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH III Pohuwato)	168.752.530	168.199.575	99,67	100	94.35	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	162.868.822	162.860.300	99.99	100	99.97	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kantor (KPH IV Gorut)						
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH V Boalemo)	188.718.502	185.889.181	98.50	100	96.75	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH VI Gorontalo)	125.245.877	125.129.512	99.91	100	99.60	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH VII Bone Bolango dan Kota)	191.447.423	188.810.301	98.62	100	99.85	100
<b>2</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>540.629.180</b>	<b>536.485.706</b>	<b>99,23</b>	<b>100</b>	<b>98.68</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	274.848.055	270.918.240	98,57	100	96.05	100
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	274.848.055	270.918.240	98,57	100	96.05	100
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	265.781.125	265.567.466	99.92	100	99.94	100
	Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	265.781.125	265.567.466	99.92	100	99.94	100
<b>3</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>68.531.660</b>	<b>68.192.420</b>	<b>99.50</b>	<b>100</b>	<b>99.60</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68.531.660	68.192.420	99.50	100	99.60	100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	68.531.660	68.192.420	99.50	100	99.60	100
<b>4</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>579.627.519</b>	<b>579.617.324</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>73.26</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	579.627.519	579.617.324	100	100	73.26	100
	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	392.921.562	392.912.724	100	100	69.39	100
	Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	186.705.957	186.704.600	100	100	100	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>728.472.111</b>	<b>676.925.110</b>	<b>92.92</b>	<b>100</b>	<b>98.59</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	728.472.111	676.925.110	92.92	100	98.59	100
	Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	728.472.111	676.925.110	92.92	100	98.59	100
<b>6</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>182.331.742</b>	<b>182.203.731</b>	<b>99.93</b>	<b>100</b>	<b>99.94</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	182.331.742	182.203.731	99.93	100	99.94	100
	Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	182.331.742	182.203.731	99.93	100	99.94	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.562.327.099</b>	<b>30.073.946.074</b>	<b>92.27</b>	<b>100</b>	<b>92.99</b>	<b>99.92</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah 100% peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur serta perencanaan monev dan pelaporan.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah 7 (tujuh) laporan perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi, melebihi target yang telah ditetapkan (6 laporan). 7 laporan tersebut terdiri dari 4 (empat) laporan perencanaan dan penganggaran serta 3 (tiga) laporan monitoring dan evaluasi.

✓ Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output sub kegiatan : 4 laporan perencanaan yang terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

✓ Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output sub kegiatan : 3 laporan monitoring dan evaluasi, melebihi target yang telah ditetapkan (2 laporan), yang terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah tahun 2021 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah (LPPD) Tahun 2021, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah 1 (satu) laporan keuangan OPD yang sesuai SAP.

- ✓ Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output sub kegiatan : Pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan.

- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Output sub kegiatan : 1 (satu) laporan keuangan OPD yang sesuai SAP.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah 823 unit sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan di Dinas dan KPH. Realisasi ini melebihi dari target yang telah ditetapkan (31 unit).

- ✓ Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output sub kegiatan : 823 unit sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan di dinas dan KPH. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan (328 unit). Sarana prasarana tersebut yakni : 1) penyediaan 1 paket bahan-bahan bangunan dan konstruksi untuk perbaikan kantor dinas; 2) perbaikan pintu pagar 1 unit; 3) belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas operasional dinas sebanyak 3 unit, BBM untuk kendaraan operasional lapangan dinas sebanyak 2 unit, BBM untuk kendaraan dinas Sekretaris Dinas sebanyak 1 unit, BBM untuk kendaraan Dinas Kepala Dinas sebanyak 1 unit, pelumas kendaraan dinas Kepala Dinas sebanyak 4 paket, pelumas kendaraan dinas operasional dinas sebanyak 20 paket, pelumas kendaraan operasional lapangan dinas sebanyak 16 paket, pelumas untuk kendaraan Sekretaris Dinas sebanyak 4 paket. BBM untuk kendaraan dinas lapangan KPH Boalemo sebanyak 1 unit, pelumas untuk kendaraan dinas lapangan KPH Boalemo sebanyak 4 paket, BBM kendaraan dinas lapangan KPH Gorontalo sebanyak 1 unit, pelumas untuk kendaraan dinas KPH Gorontalo sebanyak 4 paket, BBM untuk kendaraan dinas lapangan KPH Gorontalo Utara sebanyak 2 unit, pelumas untuk kendaraan dinas lapangan KPH Gorontalo Utara sebanyak 6 paket, BBM untuk kendaraan dinas lapangan KPH Pohuwato sebanyak 2 unit, pelumas untuk kendaraan dinas lapangan KPH Pohuwato sebanyak 8 paket, BBM untuk kendaraan dinas lapangan



KPH Gorontalo Barat sebanyak 1 unit, pelumas untuk kendaraan dinas lapangan KPH Gorontalo Barat sebanyak 4 paket, BBM untuk kendaraan dinas lapangan KPH Bone Bolango sebanyak 1 unit, pelumas untuk kendaraan dinas lapangan KPH Gorontalo Barat sebanyak 8 paket; 4) penyediaan pakaian dinas sebanyak 270 buah; 5) penyediaan rak lemari arsip sebanyak 2 unit; 6) penyediaan sound system sebanyak 2 unit; 7) penyediaan tabung pemadam kebakaran sebanyak 2 unit; 8) penyediaan gelas sebanyak 19 buah dan sendok/garpu sebanyak 24 buah; 9) penyediaan pakaian kerja lapangan sebanyak 40 buah; 10) penyediaan jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum di dinas sebanyak 1 orang dan di KPH Pohuwato sebanyak 3 orang; 11) pembayaran pajak kendaraan dinas KPH Boalemo sebanyak 1 unit, KPH Pohuwato 2 unit, KPH Gorontalo Barat 1 unit, dan pembayaran STNK kendaraan dinas KPH Gorontalo Utara sebanyak 1 unit; 12) penyediaan suku cadang kendaraan dinas operasional sebanyak 34 paket dan jasa service sebanyak 25 paket, penyediaan suku cadang kendaraan dinas Kepala Dinas sebanyak 7 paket dan jasa service sebanyak 5 paket, penyediaan suku cadang kendaraan dinas Sekretaris Dinas sebanyak 7 paket, penyediaan suku cadang kendaraan dinas operasional KPH Boalemo sebanyak 6 paket dan jasa service sebanyak 2 paket, penyediaan suku cadang kendaraan dinas operasional KPH Gorontalo sebanyak 7 paket dan jasa service sebanyak 7 paket, penyediaan suku cadang kendaraan dinas operasional KPH Gorontalo Utara sebanyak 11 paket dan jasa service sebanyak 9 paket, penyediaan jasa service kendaraan dinas operasional KPH Pohuwato sebanyak 18 paket, penyediaan suku cadang kendaraan dinas operasional KPH Gorontalo Barat sebanyak 7 paket, penyediaan suku cadang kendaraan dinas operasional KPH Bone Bolango sebanyak 4 paket dan jasa service sebanyak 4 paket; 12) penyediaan beban jasa kir kendaraan dinas dan kendaraan operasional lapangan sebanyak 5 unit; 13) jasa service pemeliharaan perawatan AC sebanyak 25 unit, jasa service perawatan notebook/laptop sebanyak 9 unit dan jasa pemeliharaan printer sebanyak 8 unit; 14) pengadaan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit; 15) pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 1 unit; 16) pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu dispenser sebanyak 1 unit, komputer sebanyak 4 unit, keyboard computer sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 12 unit, kursi rapat sebanyak 95 buah, printer sebanyak 8 unit, televisi sebanyak 2 unit, AC sebanyak 2 unit, kipas angin





sebanyak 2 buah, meja reception sebanyak 1 unit, piring makan sebanyak 24 buah, kursi kerja pejabat sebanyak 1 unit, hardisk eksternal sebanyak 2 unit, LCD projector sebanyak 1 unit, peralatan webinar fullset sebanyak 1 paket, dan Active speaker sebanyak 1 unit.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output kegiatan adalah 20 (dua puluh) jasa kantor yang tersedia. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan (18 jasa kantor).

✓ Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output sub kegiatan : 20 jasa kantor yang tersedia, yaitu 1) jasa penggandaan/fotocopy; 2) jasa penyediaan makan dan minum rapat; 3) jasa penyediaan makan dan minum tamu; 4) jasa penyediaan makan dan minum kegiatan; 5) jasa penyediaan ATK; 6) jasa penyediaan benda-benda pos; 7) jasa tenaga pelayanan umum; 8) jasa tenaga kebersihan; 9) jasa tenaga keamanan; 10) jasa penyambungan/pemasangan listrik; 11) jasa pemakaian air/tagihan air; 12) jasa pemakaian listrik/tagihan listrik; 13) jasa pemakaian internet; 14) jasa pembayaran pajak kendaraan; 15) jasa angkut sampah; 16) jasa pengadaan alat kebersihan; 17) jasa service perawatan AC; 18) jasa penyediaan perlengkapan kantor; 19) jasa cetak spanduk; dan 20) jasa penyediaan alat-alat listrik.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Outcome dari program adalah Indeks Kualitas Air (IKA) senilai 58.07 poin (kategori SEDANG) dan menduduki peringkat ke-5 nasional serta Indeks Kualitas Udara (IKU) senilai 94.47 poin (kategori SANGAT BAIK) dan menduduki peringkat ke-4 nasional. Meskipun capaian IKU Provinsi Gorontalo berada pada kategori SANGAT BAIK, namun untuk capaian target belum memenuhi target hal ini disebabkan di tahun 2022 DLHK Provinsi Gorontalo menyesuaikan dengan model perhitungan sesuai ketentuan Permen LHK No.27 Tahun 2021 tentang IKLH sehingga DLHK Provinsi Gorontalo melakukan penyesuaian target.

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Output kegiatan adalah laporan status mutu air dan status mutu udara di 61 titik pemantauan. 61 titik tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan (39 titik).

✓ Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Output sub kegiatan : 5 (lima) titik sungai pemantauan kualitas air dan 24 (dua





puluh empat) titik lokasi pemantauan kualitas udara ambien yang tersebar di 6 (enam) kabupaten/kota.

Adapun untuk titik lokasi pemantauan kualitas air berada di 37 titik yakni :

**Tabel 3.66**  
Titik Pemantauan Kualitas Air

NO	Kab/Kota	STATUS MUTU			
		KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
1	Sungai Tamalate 2 Kota Gorontalo	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
2	Sungai Tamalate 1 Kota Gorontalo	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
3	Sungai Bone 1 Kota Gorontalo	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
4	Sungai Bone 2 Kota Gorontalo	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
5	Sungai Bulango 1 Kota Gorontalo	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
6	Sungai Bulango 2 Kota Gorontalo	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
7	Sungai Taluduyunu Kabupaten Pohuwato	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
8	Sungai Taluduyunu Kabupaten Pohuwato	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
9	Sungai Taluduyunu Kabupaten Pohuwato	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
10	Sungai Biyonga Kabupaten Gorontalo	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
11	Sungai Biyonga Kabupaten Gorontalo	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
12	Sungai Biyonga Kabupaten Gorontalo	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
13	DANAU LIMBOTO Stasiun ONLIMO Suwawa : KLHK 38 Kabupaten Bone Bolango	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
14	LIMBOTO Stasiun ONLIMO Kabila : KLHK 37 Kabupaten Bone Bolango	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
15	Alopuhu DAS Limboto, Sungai Alopuhu Limehu Kec Tabongo Kabupaten Gorontalo	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
16	DAS Limboto, Sungai Pulubala Molowahu Kec Tibawa Kabupaten Gorontalo	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
17	DAS Limboto, Sungai Alopuhu Limehu Kec Tabongo Kabupaten Gorontalo	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
18	DAS Limboto, Sungai Pulubala Molowahu Kec Tibawa Kabupaten	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI



NO	Kab/Kota	STATUS MUTU			
		KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
	Gorontalo				
19	DAS Limboto, Sungai Pohnu, Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI
20	BOLANGO Limboto Kabupaten Gorontalo	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
21	Sungai Andagile Kota Jin Kabupaten Gorontalo Utara	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
22	Sungai Andagile Kota Jin Kabupaten Gorontalo Utara	CEMAR SEDANG	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
23	ANDAGILE Jembatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
24	ANDAGILE Desa Pinontoyangan Kabupaten Gorontalo Utara	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
25	ANDAGILE Dekat Pembuatan Talud Desa Butana Kabupaten Gorontalo Utara	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI
26	ANDAGILE Desa Buata Kabupaten Gorontalo Utara	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
27	ANDAGILE Bendungan Buko Kabupaten Gorontalo Utara	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
28	RANDANGAN Dutula Kabupaten Pohuwato	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
29	RANDANGAN Duhiadaa Kabupaten Pohuwato	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
30	RANDANGAN Duhiadaa Utara Kabupaten Pohuwato	CEMAR SEDANG	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN
31	RANDANGAN Dutula Kabupaten Pohuwato	CEMAR RINGAN	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI
32	RANDANGAN Jembatan Jalan Trans Kabupaten Pohuwato	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
33	RANDANGAN Desa Sukamakmur Kabupaten Pohuwato	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
34	RANDANGAN Jembatan Taluditi Kabupaten Pohuwato	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
35	SUNGAI PAGUAT HULU KEC. DENGILLO Kabupaten Pohuwato	CEMAR RINGAN	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
36	SUNGAI PAGUAT TENGAH KEC. PAGUAT Kabupaten Pohuwato	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI
37	SUNGAI PAGUAT HILIR KEC. PAGUAT Kabupaten	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI	MEMENUHI



NO	Kab/Kota	STATUS MUTU			
		KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
	Pohuwato				

Sumber : Aplikasi IKLH-KLHK 2022

Untuk 24 lokasi titik pemantauan kualitas udara, yakni :

**Tabel 3.67**  
Titik Pemantauan Kualitas Udara

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KAB/KOTA	STATUS MUTU
1	Transportasi	Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu Depan Kantor BPBD, Kab. Boalemo	Kabupaten Boalemo	IKU = 96.17 (Sangat Baik)
2	Industri / Agro Industri	Jl. Trans Sulawesi, Pasar Minggu Desa Hungayonaa	Kabupaten Boalemo	
3	Permukiman	Perumnas Desa Piloliyanga	Kabupaten Boalemo	
4	Perkantoran / Komersial	Jl. Nani Wartabone, Depan Kantor Dinas DLHK, Kab. Boalemo	Kabupaten Boalemo	
5	Transportasi	Menara Keagungan, Kel. Kayu Bulan, Kec. Limboto	Kabupaten Gorontalo	IKU = 93.64 (Sangat Baik)
6	Industri/Agro Industri	Pabrik Tepung Kelapa, PT. Tri Jaya Tangguh, Kec. Tibaida/Isimu	Kabupaten Gorontalo	
7	Permukiman	Perumahan Bumi Limboto Indah, Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto	Kabupaten Gorontalo	
8	Perkantoran/ Komersial	Kantor Bupati Kab. Gorontalo, Kel. Kayu Bulan, Kec. Limboto	Kabupaten Gorontalo	
9	Transportasi	Komplek Terminal Marisa, Desa Marisa Utara, Kec. Marisa	Kabupaten Pohuwato	IKU = 95.84 (Sangat Baik)
10	Industri / Agro Industri	Pabrik Tahu, Pasar Tua, Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa	Kabupaten Pohuwato	
11	Permukiman	Pemukiman Desa Botubilotahu, Kec. Marisa	Kabupaten Pohuwato	
12	Perkantoran / Komersial	Halaman Kantor Bupati Pemda Pohuwato, Desa Palopo, Kec. Marisa	Kabupaten Pohuwato	
13	Transportasi	Jl. Pasar Minggu Desa Bubeya, Depan Indomaret	Kabupaten Bone Bolango	IKU = 93.55 (Sangat Baik)
14	Industri / Agro Industri	PT. Sinar Ponula Deheto, Jalan Trans Sulawesi, Kec. Kabila Bone	Kabupaten Bone Bolango	
15	Permukiman	Perumahan Padengo Permai III Kaliba, Desa Dutohe, Kec. Kaliba	Kabupaten Bone Bolango	
16	Perkantoran / Komersial	Kompleks Kantor Bupati	Kabupaten Bone Bolango	



NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KAB/KOTA	STATUS
17	Transportasi	Jl. Trans Sulawesi, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara	IKU = 95.51 (Sangat Baik)
18	Industri/Agro Industri	Komplek Pabrik/Gudang Jagung, Desa Ilangata, Kec. Anggrek	Kabupaten Gorontalo Utara	
19	Permukiman	Perum Villa Gorontalo Utara, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara	
20	Perkantoran/Komersial	Komplek Blok Plan Kompleks Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kec. Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara	
21	Transportasi	Jl. Sudirman	Kota Gorontalo	IKU = 92.15 (Sangat Baik)
22	Industri / Agro Industri	PLTD	Kota Gorontalo	
23	Permukiman	Perum Balkin Permai	Kota Gorontalo	
24	Perkantoran / Komersial	DLHK Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo	

Sumber : Aplikasi IKLH-KLHK 2022

2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Output kegiatan adalah 3 (tiga) dokumen informasi kinerja lingkungan hidup yang disusun.

- ✓ Sub kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Output sub kegiatan : 3 (tiga) dokumen informasi kinerja lingkungan hidup yang disusun yakni terdiri dari Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022, Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dan Laporan Valuasi ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Tahun 2022.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Bencana (Limbah B3)

Outcome dari program adalah Indeks Kualitas Air (IKA) senilai 58.07 poin (kategori SEDANG) dan menduduki peringkat ke-5 nasional serta Indeks Kualitas Udara (IKU) senilai 94.47 poin (kategori SANGAT BAIK) dan menduduki peringkat ke-4 nasional. Meskipun capaian IKU Provinsi Gorontalo berada pada kategori SANGAT BAIK, namun untuk capaian target belum memenuhi target hal ini disebabkan di tahun 2022 DLHK Provinsi Gorontalo menyesuaikan dengan model perhitungan sesuai ketentuan Permen LHK No.27 Tahun 2021 tentang IKLH sehingga DLHK Provinsi Gorontalo melakukan penyesuaian target.



- 1) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 75 persen Kinerja pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Jumlah fasyankes di Provinsi Gorontalo adalah sejumlah 110 fasyankes yang terdiri dari 13 rumah sakit, 93 puskesmas dan 4 klinik.

- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

Output sub kegiatan : 12 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang ditingkatkan kinerjanya dalam pengelolaan limbah B3.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Outcome dari program adalah Indeks Kualitas Air (IKA) senilai 58.07 poin (kategori SEDANG) dan menduduki peringkat ke-5 nasional serta Indeks Kualitas Udara (IKU) senilai 94.47 poin (kategori SANGAT BAIK) dan menduduki peringkat ke-4 nasional. Meskipun capaian IKU Provinsi Gorontalo berada pada kategori SANGAT BAIK, namun untuk capaian target belum memenuhi target hal ini disebabkan di tahun 2022 DLHK Provinsi Gorontalo menyesuaikan dengan model perhitungan sesuai ketentuan Permen LHK No.27 Tahun 2021 tentang IKLH sehingga DLHK Provinsi Gorontalo melakukan penyesuaian target.

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 70 (tujuh puluh) persen peningkatan kinerja Pelaksanaan administrasi proses amdal oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) kab/kota dan 27 Kegiatan/Usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH.

- ✓ Sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Output sub kegiatan : 5 (lima) Komisi Penilai Amdal (KPA) yang ditingkatkan kapasitasnya dan 30 orang pelaku usaha/kegiatan yang ditingkatkan pemahamannya tentang ketentuan dan kewajiban izin lingkungan.

- ✓ Sub kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.



Output sub kegiatan : 27 usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dari 27 usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan tersebut masih ada 10 usaha/kegiatan yang TIDAK TAAT dan 2 usaha/kegiatan yang KURANG TAAT.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Outcome dari program adalah Indeks Kualitas Air (IKA) senilai 58.07 poin (kategori SEDANG) dan menduduki peringkat ke-5 nasional serta Indeks Kualitas Udara (IKU) senilai 94.47 poin (kategori SANGAT BAIK) dan menduduki peringkat ke-4 nasional. Meskipun capaian IKU Provinsi Gorontalo berada pada kategori SANGAT BAIK, namun untuk capaian target belum memenuhi target hal ini disebabkan di tahun 2022 DLHK Provinsi Gorontalo menyesuaikan dengan model perhitungan sesuai ketentuan Permen LHK No.27 Tahun 2021 tentang IKLH sehingga DLHK Provinsi Gorontalo melakukan penyesuaian target.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 250 (dua ratus lima puluh) orang masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan (200 orang masyarakat).

✓ Sub kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Output sub kegiatan : 250 orang masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan (190 orang masyarakat).

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Outcome dari program adalah 21,41 persen sumber daya manusia yang ditingkatkan kapasitasnya tentang lingkungan hidup.

1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 6 (enam) kabupaten/kota lokasi penilaian ADIPURA dan 20 (dua puluh lima) Sekolah Adiwiyata.

✓ Sub kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Output sub kegiatan : 6 (enam) kabupaten/kota lokasi penilaian ADIPURA dan 20



(dua puluh lima) Sekolah Adiwiyata.

### **Penilaian Adiwiyata**

Untuk sekolah penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Gorontalo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 275/21/VIII/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan/Reward Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2022. sekolah-sekolah tersebut adalah sebagai berikut :

- Kabupaten Pohuwato :
  1. MTs 1 Pohuwato
  2. SDN 1 Popayato Barat
- Kabupaten Gorontalo :
  1. SMA Negeri 1 Telaga Biru
  2. SDN 13 Telaga Biru
- Kabupaten Bone Bolango :
  1. SMP Negeri 1 Tilongkabila
  2. SDN 7 Tilongkabila
  3. SMP Negeri 1 Bulango Timur
- Kabupaten Gorontalo Utara :
  1. SDN 9 Sumalata Timur
  2. SDN 5 Gentuma Raya SDN 1 Popayato Barat
- Kota Gorontalo :
  1. SDN 81 Sipatana

Untuk Calon Sekolah Adiwiyata Nasional ditetapkan dan diusulkan setelah dilakukan evaluasi administrasi dan memiliki bobot nilai minimal 90% sesuai dengan kriteria Sekolah Adiwiyata berdasarkan Permen LHK Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Usulan calon Sekolah adiwiyata Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Gorontalo. Daftar sekolah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Nasional pada Tahun 2022 sejumlah 2 sekolah sebagai berikut :

Kabupaten Gorontalo : SMP Negeri 1 Batudaa

Kabupaten Boalemo : MTS Negeri 1 Boalemo

Berdasarkan hasil penilaian tim sekretariat Adiwiyata Nasional, untuk Provinsi



Gorontalo belum dinyatakan lolos karena dari hasil evaluasi administrasi memiliki bobot nilai kurang dari 90%, sehingga pada Tahun 2022 Provinsi Gorontalo belum mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional.

Untuk Tahun 2022, Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri tidak ada usulan karena masing-masing sekolah masih sibuk dengan kegiatan penerimaan calon siswa baru dan pelaksanaan ANBK.

### **Penilaian Adipura**

Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang berlingkup Nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Di tahun 2022, Tim ADIPURA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Tim ADIPURA DLHK Provinsi Gorontalo melakukan verifikasi/pemantauan. Wilayah yang dilakukan verifikasi yakni di Kabupaten Pohuwato (Kota Marisa) dan Kota Gorontalo. Adapun tujuan dari kegiatan Pembinaan dan Penilaian Program Adipura adalah memperoleh data dan informasi tentang kondisi fisik wilayah kabupaten/kota dari aspek lingkungan (pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan kebersihan) serta terlaksananya pemerintahan yang baik dan selalu memperhatikan masalah lingkungan dalam segala kegiatan (Good Environmental Governance). Dengan adanya Program Adipura diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Pemerintah ditingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa akan pentingnya pengelolaan lingkungan.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### Permasalahan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Masih kurangnya SDM yang menguasai IT dalam mengelola data berbasis aplikasi dan design-design kekinian dalam menunjang informasi Dinas maupun KPH;
  - Terdapat beberapa kerusakan pada gedung dan halaman kantor yang memerlukan perbaikan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Sesuai dengan RPJMN KLHK Tahun 2020 – 2024 bahwa perhitungan nilai IKLH mengalami perubahan perhitungan, sejak tahun 2020 perhitungan nilai IKLH menambah parameter Indeks Kualitas Air Laut, selanjutnya untuk perhitungan nilai





Indeks Kualitas Udara yang semula menggunakan 2 parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>, di tahun ini menambahkan nilai PM<sub>2.5</sub>, sementara untuk parameter kualitas air yang menjadi parameter kunci untuk perhitungan nilai IKA bertambah dari 7 parameter bertambah menjadi 8 parameter, demikian juga untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang keseluruhannya menggunakan hasil perhitungan KLHK sehingga nilai IKTL dan IKAL menggunakan hasil perhitungan IKLH Nasional. Pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo masih menggunakan 2 parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>, namun untuk kualitas air telah memenuhi parameter yang diperhitungkan saat ini;

- Hal yang menghambat peningkatan nilai IKLH Provinsi Gorontalo adalah kurangnya keterlibatan sektor lain dalam berkontribusi pada kegiatan pengendalian dan perlindungan kualitas air sungai seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. Program sanitasi dan pengolahan air limbah yang diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo lebih banyak difokuskan pada lokasi yang memiliki nilai IPM atau PHBS rendah dan bukan pada lokasi/daerah yang memiliki status mutu kualitas lingkungan yang rendah. Selain itu juga, faktor tekanan lingkungan yang semakin tinggi, ikut berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan sehingga pada akhirnya berpengaruh pada nilai IKLH Provinsi;
- Belum tersedianya laboratorium penguji di Provinsi Gorontalo menyebabkan pengujian kualitas air dan kualitas udara harus dikirim ke laboratorium di luar Gorontalo;
- Peralatan tiang passive sampler sering diambil oleh masyarakat untuk dijadikan tiang bendera dan juga kondisi iklim dan angin yang cukup ekstrim pada periode pengukuran memungkinkan jatuhnya shelter passive sampler;
- Selain usaha kegiatan BUMN, dukungan manajemen dalam menetapkan alokasi anggaran perusahaan dalam pengelolaan lingkungan belum maksimal;
- Data swapantau yang dilaporkan oleh perusahaan belum lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- Sebagian besar perusahaan belum memahami mekanisme pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi terbaru;
- Perizinan lingkungan dan/atau kepemilikan dokumen lingkungan masih sering



dianggap sebagai persyaratan perizinan semata dan bukan sebagai ketentuan persyaratan lingkungan yang wajib ditaati.

Solusi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Mengusulkan kebutuhan SDM yang menguasai IT;
  - Mengusulkan anggaran untuk perbaikan gedung dan halaman kantor di tahun 2023.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Melakukan penyesuaian target IKLH;
  - Mengembangkan mekanisme sosialisasi & ekspose hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup agar dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan Program sanitasi dan pengolahan air limbah yang diprakarsai oleh 2 perangkat daerah ini;
  - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan/atau lembaga negara lainnya dalam rangka pengawasan kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu mendorong pembentukan laboratorium lingkungan di Provinsi Gorontalo yang memenuhi persyaratan sebagai laboratorium uji kualitas lingkungan;
  - Penggunaan metode passive sampler direkomendasikan untuk terus didukung melalui pendanaan APBD agar frekuensi dan jumlah sampel kualitas udara ambien daerah representatif untuk menggambarkan indeks pencemaran udara provinsi;
  - Mendorong pelaku usaha untuk membentuk divisi lingkungan dalam struktur kelembagaan/organisasi perusahaan;
  - Memberikan sanksi bagi kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan dan/atau memiliki izin lingkungan;
  - Sosialisasi pelaksanaan sistem pelaporan secara elektronik (SIMPEL) dan mekanisme pengelolaan limbah B3;
  - Memastikan aspek perlindungan lingkungan dan/atau ketentuan izin lingkungan menjadi bagian substansi dari perizinan suatu kegiatan dan/atau usaha.



**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel. 3.68**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73.61	79.79	73.39	77.32

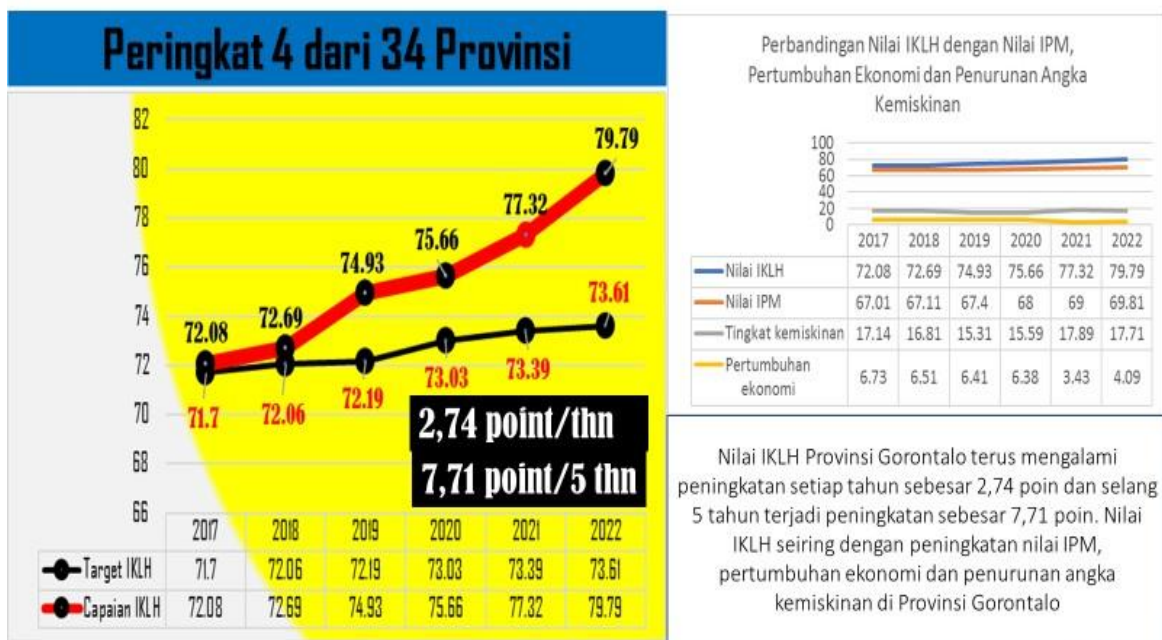
Sumber Data : IKLH 2022

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

**Grafik 3.20**

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo

**TARGET & CAPAIAN IKLH PROVINSI GORONTALO 2017-2022**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2022



## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1) Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

#### b. Sasaran dan Program

Sasaran untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah:

- Terlaksananya fasilitasi pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencapil serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP-el dan Data Kependudukan kepada lembaga pengguna di provinsi.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

**Tabel 3.69**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<b>Sasaran :</b> Terlaksananya fasilitasi pelayanan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Pencapil serta rencana pelayanan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna di provinsi	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase peningkatan SKPD Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	80%	80%	100%
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang diberikan peningkatan kualitas	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi</b>	<b>Persentase keselarasan dokumen perencanaan</b>	100%	100%	100%	100%	100%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase pelaksanaan program, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.70**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Admindak Capil Provinsi Gorontalo  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>152.840.323,-</b>	<b>152.614.860,-</b>	<b>99.85</b>	<b>100</b>	<b>99.99</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	152.840.323,-	152.614.860,-	99.85	100	99.99	100
	Sub Kegiatan Koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pendaftaran penduduk	152.840.323,-	152.614.860,-	99.85	100	99.99	100
<b>2</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>9.452.271.986</b>	<b>8.933.730.677</b>	<b>94.51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.384.515.085,-	1.378.370.221,-	99.56	100	99.40	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.384.515.085,-	1.378.370.221,-	99.56	100	99.40	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.681.581.958,-	1.668.708.350,-	99.23	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.681.581.958,-	1.668.708.350,-	99.23	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.464.223,-	40.434.900,-	99,93	100	100	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.702.223,-	7.700.400,-	99,98	100	100	100
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.762.000,-	32.734.500,-	99,92	100	100	100
	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	306.277.534,-	305.338.782,-	99,69	100	100	100
	Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	306.277.534,-	305.338.782,-	99,69	100	100	100
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	6.039.433.186	5.540.878.424	91,75	100	100	100
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	15.696.964,-	15.639.971,-	99,64	100	100	100
	Sub kegiatan penyediaan gaji	6.023.736.222,-	5.525.238.453,-	91,72	100	100	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	dan tunjangan ASN						
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.605.112.309,-</b>	<b>9.086.345.537,-</b>	<b>98.87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Catatan :**

Terdapat alokasi DID yang dialokasikan pada 2 Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 477.700.000
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 550.754.800

1. Program pendaftaran penduduk

Outcome dari program adalah Persentase aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang diberikan peningkatan kualitas.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk

Output sub kegiatan : Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 6 Kab/Kota Yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang terdapat di Provinsi Gorontalo. Target Kinerja adalah 6 Kab/Kota.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Persentase peningkatan pelayanan administrasi, Sarana dan Prasarana dan SDM Aparatur
- Presentase Pelaksanaan Program, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub kegiatan adalah Jumlah jasa kantor yang tersedia dengan target dan capaian sebanyak 5 jasa kantor dari target 5 jasa kantor.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output Sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan sebanyak 10 unit.



- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan : Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  - ✓ Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Output Sub Kegiatan adalah 12 orang sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek.
- 4) Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - ✓ Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Output sub kegiatan adalah jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adala sebanyak 5 Dokumen . Target Kinerja adalah 5 Dokumen. Adapun 5 Dokumen tersebut adalah LKIP, LKPJ, RENSTRA, RENJA dan LPPD.
- 5) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
  - ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.  
Output sub kegiatan adalah tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebanyak 5 Laporan. Target Kinerja adalah 5 Laporan.
  - ✓ Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Output sub kegiatan adalah Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN adalah 100 % . Target Kinerja adalah 100 %.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil tahun 2022 terlaksana dengan baik.



**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.71**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Berkaitan dengan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PMD-Admindukcapil Provinsi Gorontalo dalam hal ini berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan proses Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta berkoordinasi dalam rangka memperoleh informasi secara berkala yang berkaitan dengan progres data kependudukan yang sementara dilaksanakan pencatatannya oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Dokumen Database Kependudukan diterbitkan secara berkala 2 kali dalam setahun. Untuk skala Nasional, skala Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kalender Berdasarkan Release resmi dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan kabupaten/kota, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka Pembangunan Database Penduduk Nasional.





**7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil Provinsi**

- Meningkatkan status perkembangan desa/kelurahan

**b. Sasaran dan Program**

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 – 2022 untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa, adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat;
- 2) Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas;

**Tabel 3.72**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
<b>1</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase desa/kelurahan yang sudah memiliki profil desa/kelurahan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	<b>11.5%</b>	<b>11.5%</b>	<b>9.2%</b>	<b>9.2%</b>	<b>100%</b>
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	11.5%	11.5%	9.2%	9.2%	100%
		Persentase desa berkembang	11.5%	11.5%	9.2%	9.2%	100%
		Persentase desa yang meningkat statusnya	11.5%	11.5%	9.2%	9.2%	100%
<b>2</b>	<b>Sasaran :</b> Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase desa yang masyarakat dan kelembagaan masyarakatnya ditingkatkan kapasitasnya	<b>34.5%</b>	<b>34.5%</b>	<b>30.4%</b>	<b>30.4%</b>	<b>100%</b>
	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa yang ditingkatkan statusnya	11.5%	11.5%	9.2%	9.2%	100%
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan hukum adat	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	11.5%	11.5%	9.2%	9.2%	100%
		Persentase desa yang ditingkatkan statusnya	11.5%	11.5%	9.2%	9.2%	100%
		Jumlah kelompok usaha ekonomi dan lembaga masyarakat yang berdaya dan	20 Kelompok	20 Kelompok	25 Kelompok	20 Kelompok	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		meningkat pendapatannya					
		Persentase PKK atif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga	100%	100%	100%	100%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.73**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pemerintahan Desa Administrasi</b>	<b>967.359.175,-</b>	<b>965.780.642,-</b>	<b>99,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	967.359.175,-	965.780.642,-	99,84	100	100	100
	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan asset desa	106.661.934,-	105.996.315,-	<b>99,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	483.883.629,-	483.847.739,-	<b>99,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub kegiatan pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	376.813.612,-	375.936.588,-	<b>99,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Program peningkatan kerjasama desa</b>	<b>252.498.102,-</b>	<b>251.485.338,-</b>	<b>99,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	252.498.102,-	251.485.338,-	99,60	100	100	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	170.498.504,-	169.931.253,-	99,67	100	100	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	81.999.598,-	81.554.085,-	99,46	100	100	100
<b>3</b>	<b>Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan hukum adat</b>	<b>3.201.113.508,-</b>	<b>3.158.767.015,-</b>	<b>98,68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.201.113.508,-	3.158.767.015,-	98,68	100	100	100
	Sub kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	149.792.230,-	149.528.502,-	99,82	100	100	100
	Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	217.970.315,-	217.907.465,-	99,97	100	-	-



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.996.372,-	54.892.166,-	99,81	100	100	100
	Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	115.506.085,-	113.981.394,-	98,68	100	100	100
	Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	186.665.399,-	186.068.793,-	99,68	100	100	100
	Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.476.183.107,-	2.436.388.695,-	98,39	100	100	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.420.970.785,-</b>	<b>4.376.032.995,-</b>	<b>99.51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Catatan :**

Ada 1 Sub Kegiatan yang mendapat alokasi anggaran DID yang tidak terinput di e-Monev, yaitu:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar **Rp. 592.450.000**

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Outcome dari program adalah :

- Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya
- Persentase desa berkembang
- Persentase desa yang meningkat statusnya

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- ✓ Sub kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Output sub kegiatan adalah Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa sebanyak 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Target Kinerja adalah 5 Kabupaten.

- ✓ Sub kegiatan : fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan sebanyak 6 Dokumen. Target Kinerja adalah 6



Dokumen.

- ✓ Sub kegiatan : pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis sebanyak 2 Laporan. Target Kinerja adalah 2 Laporan.

## 2. Program peningkatan kerjasama desa

Outcome dari program adalah Persentase desa yang meningkat statusnya dengan target dan capaian sebesar 11.5%

### 1) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

- ✓ Sub kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan adalah jumlah lembaga yang difasilitasi dalam Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota sebanyak 3 Lembaga. Target Kinerja adalah 3 Lembaga.

- ✓ Sub kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebanyak 3 Dokumen. Target Kinerja adalah 3 Dokumen.

## 3. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan hukum adat

Outcome dari program adalah :

- Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya
- Presentase desa yang meningkat statusnya
- Jumlah kelompok usaha ekonomi dan lembaga masyarakat yang berdaya dan meningkat pendapatannya
- Persentase PKK atif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga
- Jumlah Desa Lokasi Stunting di Provinsi Gorontalo

### 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- ✓ Sub kegiatan : Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat.

Output sub kegiatan adalah Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat di 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Target



Kinerja adalah 5 Kab/Kota.

- ✓ Sub kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Output sub kegiatan adalah 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo . Target Kinerja adalah 3 Kabupaten.

- ✓ Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Output sub kegiatan adalah jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 6 Lembaga, yakni RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna . Target Kinerja adalah 6 Lembaga.

- ✓ Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Output sub kegiatan adalah jumlah Bumdes yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebanyak 20 Bumdes. Target Kinerja adalah 20 Bumdes.

- ✓ Sub kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Output sub kegiatan adalah Fasilitasi kepada 20 Orang peserta lomba Teknologi Tepat Guna. Target Kinerja adalah 20 Orang.

- ✓ Sub kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Output sub kegiatan adalah Persentase Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga adalah 100%. Target Kinerja adalah 100 %.



**3) Permasalahan dan Solusi**

(Tidak ada)

**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.74**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah desa tertinggal yang dientaskan	5 Desa	37 Desa	5 Desa	29 Desa

Sumber Data : Berdasarkan data IDM Tahun 2022

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Hasil pemutakhiran data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, menunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2021 masih ada satu desa dengan status sangat tertinggal, maka tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal di Gorontalo.

Secara keseluruhan IDM dengan status mandiri pada tahun 2021 sebanyak 6 Desa, kemudian naik menjadi 44 desa pada tahun 2022. Untuk desa maju dari 127 naik menjadi 253 desa, desa berkembang semula 417 kemudian menjadi 336 desa. Demikian juga desa dengan status tertinggal yang ditahun 2021 ada sebanyak 61 desa pada tahun 2022 menjadi 24 desa, jadi ada 37 desa dengan status tertinggal yang berhasil dientaskan. Keberhasilan membangun desa ini berkat sinergi, kolaborasi, dan kerja sama seluruh aparatur pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan, serta partisipasi yang luar biasa dari masyarakat terlebih lagi ditunjang dengan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Berikut ini adalah perkembangan status desa yang ada di Provinsi Gorontalo berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 :



**Tabel 3.75**

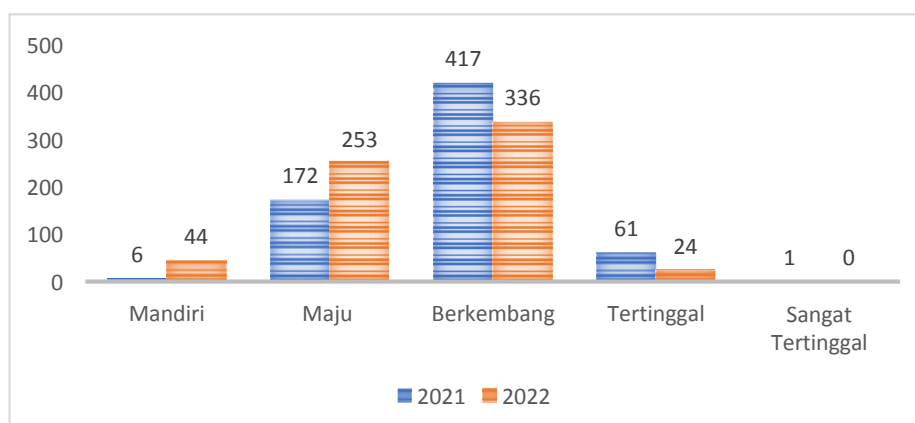
Status Desa Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

KODE KAB.	TAHUN	KABUPATEN	Σ KECAMATAN	Σ DESA	Σ DESA STATUS MANDIRI	Σ DESA STATUS MAJU	Σ DESA STATUS BERKEMBANG	Σ DESA STATUS TERTINGGAL	Σ DESA STATUS SANGAT TERTINGGAL
7501	2021	GORONTALO	18	191	0	19	58	4	1
7502	2021	BOALEMO	7	82	4	76	72	8	0
7503	2021	BONE BOLANGO	18	160	0	38	131	22	0
7504	2021	POHUWATO	13	101	2	18	89	14	0
7505	2021	GORONTALO UTARA	11	123	0	21	67	13	0
<b>PROVINSI GORONTALO</b>			<b>67</b>	<b>657</b>	<b>6</b>	<b>172</b>	<b>417</b>	<b>61</b>	<b>1</b>

KODE KAB.	TAHUN	KABUPATEN	Σ KECAMATAN	Σ DESA	Σ DESA STATUS MANDIRI	Σ DESA STATUS MAJU	Σ DESA STATUS BERKEMBANG	Σ DESA STATUS TERTINGGAL	Σ DESA STATUS SANGAT TERTINGGAL
7501	2022	GORONTALO	18	191	13	72	98	8	0
7502	2022	BOALEMO	7	82	2	23	52	5	0
7503	2022	BONE BOLANGO	18	160	17	86	54	3	0
7504	2022	POHUWATO	13	101	0	25	71	5	0
7505	2022	GORONTALO UTARA	11	123	12	47	61	3	0
<b>PROVINSI GORONTALO</b>			<b>67</b>	<b>657</b>	<b>44</b>	<b>253</b>	<b>336</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

**Grafik 3.21**

Perkembangan Status Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022



Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1) Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi

##### Gorontalo Tahun 2022

- Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat

#### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.76**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Menurunnya angka kelahiran	Indikator Sasaran : Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	83%	75.2%	80%	47.40%	90.60%
	Program Peningkatan Layanan KB	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	83%	80%	80%	47.40%	96.39%

### 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.77**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>83.412.000</b>	<b>80.184.668</b>	<b>96.13</b>	<b>100</b>	<b>38.3</b>	<b>50</b>
1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	83.412.000	80.184.668	96.13	100	38.3	50
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	83.412.000	80.184.668	96.13	100	38.3	50
2	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>163.316.000</b>	<b>120.201.367</b>	<b>73.6</b>	<b>99.6</b>	<b>38.0</b>	<b>50</b>
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	163.316.000	120.201.367	73.6	99.6	38.0	50
	Sub Kegiatan Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Inas Kesehatan)	131.190.000	92.723.087	70.68	99.2	45.4	80
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran	32.126.000	27.478.280	85.53	100	-	-





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	serta dan Kerja sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB						
	<b>JUMLAH</b>	<b>246.728.000</b>	<b>200.386.035</b>	<b>81.22</b>	<b>100</b>	<b>38.15</b>	<b>50</b>

1. Program Pengendalian Penduduk

Outcome dari program adalah menurunnya angka kelahiran.

1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

✓ Sub Kegiatan : Penyusunan pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Provinsi

Output Sub Kegiatan : 1 dokumen GDPK tingkat Provinsi Gorontalo

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Outcome dari program adalah Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif

1) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

✓ Sub Kegiatan : Pengembangan strategi operasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Output Sub Kegiatan : 20 bidan dilatih pelayanan KB pasca salin.

✓ Sub Kegiatan : Peningkatan peran serta dan kerja sama organisasi masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Output Sub Kegiatan : 137 fasilitator kesehatan reproduksi remaja yang dilatih.

**3) Permasalahan dan Solusi**

a. Program Pengendalian Penduduk

Permasalahan : - GDPK sebagai keluaran tidak dapat dilaksanakan karena leadingnya instansi lain dan seharusnya ada perda.

Solusi : - Masih menggunakan dokumen sebelumnya meskipun belum diperdakan

b. Program Keluarga Berencana (KB)

Permasalahan : - Masih kurangnya pendataan PUS ber KB



- Akses mendapatkan Alat Kontrasepsi yang sesuai dengan kesehatan dan pilihan akseptor masih kurang sehingga minat ber KB menjadi berkurang
- Belum semua akseptor memiliki jaminan kesehatan sehingga membebani akseptor dalam pembiayaan alkon yang akan digunakan

Solusi :

- Memasukkan kegiatan pendataan PUS dan PUS ber KB menjadi program wajib puskesmas bekerjasama dengan PLKB di wilayah masing-masing.
- Meningkatkan jumlah alkon yang dibutuhkan dan diminati akseptor dengan melakukan perencanaan yang baik oleh puskesmas dan BKKBN.
- Mengupayakan semua akseptor KB, terutama akseptor KB Resti 4 T memiliki jaminan Kesehatan.
- 

**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.78**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB  
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021		Keterangan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Angka Kelahiran Total (Fertility Rate)	2.40	2,30	2.45	2,4	

**9. Perhubungan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo**

- Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan
- Meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.79**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
<b>1</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah sapras kantor yang tersedia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/bimtek	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org	100%
		<b>Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100%
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Jumlah laporan keuangan OPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>2</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya layanan transportasi</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase sarana dan prasarana transportasi yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>81.7%</b>	<b>81.7%</b>	<b>100%</b>
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah lintasan perintis yang dilayani	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Lintasan	100%
		Jumlah penertiban izin angkutan secara terpadu bersama Polda dan Dishub Kab/Kota	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%
		<b>Presentase peningkatan kapasitas keselamatan transportasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80.8%</b>	<b>80.8%</b>	<b>100%</b>
		Jumlah ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ	2 Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	100%
		Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang dipelihara di ruas jalan Provinsi	14 TL 9 WL	14 TL 9 WL	14 TL 9 WL	14 TL 9 WL	100%
		Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi	2 Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	100%
<b>3</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya kapasitas keselamatan transportasi</b>	<b>Indikator Sasaran : Presentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>68 %</b>	<b>68 %</b>	<b>100%</b>
	Program Penyelenggaraan	Jumlah laporan hasil pengamanan dan pengaturan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kelancaran lalu lintas					
	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan sapsras perhubungan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel. 3.80**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perhubungan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>7.453.328.289</b>	<b>7.378.483.591</b>	<b>99.00</b>	<b>100</b>	<b>98.41</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.487.829.858	5.449.873.909	99.31	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.414.888.698	5.376.934.809	99.30	100	96.64	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	72.941.160	72.939.100	100	100	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.121.238	456.572.443	97.95	100	94.15	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	466.121.238	456.572.443	97.95	100	94.15	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	774.451.193	751.886.901	97.09	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	774.451.193	751.886.901	97.09	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.516.000	62.373.000	98.20	100	-	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.516.000	62.373.000	98.20	100	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	661.410.000	657.777.338	99.45	100	98.18	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	661.410.000	657.777.338	99.45	100	98.18	100
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>4.655.070.568</b>	<b>4.602.452.249</b>	<b>98.87</b>	<b>100</b>	<b>96.39</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.004.631.600	1.995.418.453	99.54	100	99.48	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.469.255.600	1.462.983.044	99.57	100	99.48	100
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	535.376.000	532.435.409	99.45	100	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	1.733.988.968	1.725.500.839	99.51	100	100	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Jalan Provinsi						
	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	492.384.000	486.526.557	98.81	100	97.66	100
	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.241.604.968	1.238.974.282	99.79	100	99.62	100
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	881.450.000	846.632.957	96.05	100	82.15	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	881.450.000	846.632.957	96.05	100	82.15	100
	Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	35.000.000	34.900.000	99.71	100	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.000.000	34.900.000	99.71	100	-	-
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>220.223.778</b>	<b>218.895.272</b>	<b>96.40</b>	<b>100</b>	<b>96.76</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penertiban Izin Usaha Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	220.223.778	218.895.272	96.40	100	96.76	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Dinas Perhubungan)	220.223.778	218.895.272	96.40	100	96.76	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.328.622.635</b>	<b>12.199.831.112</b>	<b>98.96</b>	<b>100</b>	<b>97.67</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome dari program adalah :

- Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur target 100%.
- Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan dengan target 100%.



a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu, 12 Laporan.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Jumlah sapas kantor yang tersedia, 1 Kegiatan.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output Sub Kegiatan : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/bimtek, 12 Orang.

4) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi, 7 Dokumen.

5) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan : Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia, 1 Tahun.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD.

Output Sub Kegiatan : Jumlah laporan keuangan OPD, 12 Laporan

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Outcome dari program adalah :

- Persentase sarana dan prasarana transportasi yang tersedia dengan target 100%
- persentase peningkatan kapasitas keselamatan transportasi dengan target 100%
- Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi dengan target 100%

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output Sub Kegiatan :

- Jumlah lintasan perintis yang dilayani, 5 lintasan terdiri dari :
  - Pusat Kota – Kampus Poligon



- Pusat Kota – Poduwoma
- Pusat Kota – Boidu – Dulamayo
- Pusat Kota – Mongiilo
- Pusat Kota – Pangea
- Layanan Bus Pariwisata terdiri dari :
  - Gorontalo – Botutonuo
  - Gorontalo - Lombongo
- Pelayanan Bus Siswa NKRI Gratis

Layanan antar jemput siswa SMU ini tersebar di lima daerah terpencil yang dilintasi setiap harinya yang terdiri dari :

- SMA Negeri 1 Biluhu Kab. Gorontalo
- SMA Negeri 1 Kab. Bone Bolango
- SMAN 4 Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara
- SMK Negeri 1 Taluditi Kab. Pohuwato
- SMK Negeri 1 Wanggarasi

Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi

Output Sub Kegiatan : Jumlah penertiban izin angkutan secara terpadu bersama Polda Gorontalo dan Dishub Kab./Kota, 5 kali.

2) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

Output Sub Kegiatan : Jumlah laporan hasil pengamanan dan pengaturan kelancaran lalu lintas, 12 laporan.

Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Output Sub Kegiatan : Jumlah ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ, 2 Ruas Jalan yaitu :

- Pengadaan Traffic Light S3 Centra Media Jln. Cokroaminoto - Jln. P. Hidayat - Jln. Jend Sudirman
- Pengadaan RPPJ Tiang Portal (Model Gawang) Jln. Thayeb M Gobel – Simpang 3 Kawasan Perkantoran Pemprov



- Pengadaan Rambu Jln. Cokroaminoto - Jln. P. Hidayat - Jln. Rusli Datau - Jln St. Botutihe - Jln. Piola Isa
- Pita Penggaduh yang terdapat pada titik :
  - Jln. Thayeb M Gobel (1 Titik)
  - Jln Thayeb M Gobel / Simpang Tiga Mesjid At'Tabiin (2 Titik)
  - Jln Thayeb M Gobel / Simpang 3 MTS Negeri Gorontalo
  - Jln. Saleh Kadir / Kantor PDI Perjuangan (1 Titik)
  - Desa Limehe Barat (2 Titik)
  - Wonosari (4 Titik)
- ZOSS Jln. Raden Saleh (SMA 3 Kota Gorontalo), Jln. Thayeb M Gobel (SDN 5 Bulango Selatan)
- Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang dipelihara di ruas jalan Provinsi, 14 TL 9 WL.

3) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Output Sub Kegiatan : Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi, 1 ruas jalan yaitu :

- Pengadaan tiang dan Pemasangan Lampu PJU di ruas jalan Sawah Besar Kabupaten Pohuwato

4) Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Output Sub Kegiatan :

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi dengan target 100%.

a. Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Penertiban Izin Usaha Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas





Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Dinas Perhubungan)

Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan sapsras perhubungan, 12 laporan.

**3) Permasalahan dan Solusi**

(Tidak ada)

**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.81**  
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan  
Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021		Keterangan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah lintasan perintis yang dilayani	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Lintasan	
2	Jumlah pembangunan /peningkatan terminal tipe B	2 Terminal	-	1 Terminal	-	Target tidak tercapai karena keterbatasan fiskal daerah (Target strategi RPJMD Provinsi)
3	Jumlah ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ	3 Ruas Jalan	3 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	
4	Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang dipelihara di ruas jalan Provinsi	14 TL, 9 WL	14 TL, 9 WL	14 TL, 9 WL	14 TL, 9 WL	
5	Jumlah penertiban izin angkutan secara terpadu bersama Polda Gorontalo dan Dishub Kab/Kota	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	
6	Jumlah aplikasi layanan publik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
7	Jumlah Kelompok jenis usaha jasa angkutan di perairan sesuai ketentuan	4 Kelompok Jenis Usaha	4 Kelompok Jenis Usaha	4 Kelompok Jenis Usaha	4 Kelompok Jenis Usaha	
8	Jumlah Dokumen Perencanaan terminal tipe B di kab/kota se- Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
9	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	



No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021		Keterangan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Studi Pelayanan BRT yang tersedia			Dokumen		
10	Jumlah laporan hasil pengamanan dan pengaturan kelancaran lalu lintas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
11	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan sapras perhubungan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
12	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi	310 Orang	310 Orang	300 Orang	300 Orang	
13	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
14	Jumlah laporan keuangan OPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
15	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
16	Jumlah sapras kantor yang tersedia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
17	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

(Tidak ada)

**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2022**

Pada tahun 2022 Penghargaan / Prestasi yang telah didapatkan selama tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Pemenang dalam Kategori Pemerintah Daerah sebagai Katalisator tumbuhnya Trayek Kapal Penumpang Komersial Terbaik dalam Perintis Awards 2022.

**Gambar 3.3**  
Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Perhubungan  
Katalisator Tumbuhnya Trayek Kapal Penumpang Komersial Terbaik Tahun 2022



b. Penghargaan untuk Instansi oleh Gubernur Gorontalo

- Penghargaan yang diberikan kepada pimpinan OPD berdasarkan hasil nilai SAKIP dan nilai Reformasi Birokrasi yang telah di nilai oleh Tim Evaluasi SAKIP dan RB Provinsi Gorontalo dengan capaian nilai LAKIP A (80,51) dan nilai Reformasi Birokrasi (RB) 99,98.
- Penghargaan Agen Perubahan Terbaik Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2022 kepada Bapak Abdul Karim Rauf, ST. M. Si sebagai role model Agen Perubahan terbaik tingkat Provinsi Gorontalo dengan nilai 98.

**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2022**

- a. Perpanjangan Kerjasama Peningkatan SDM Transportasi dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

**Gambar 3.4**  
Penandatanganan Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat



- b. Perjanjian Kerja sama Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

**Gambar 3.5**  
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur Bidang Perhubungan





**10. Komunikasi dan Informatika**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo**

- Peningkatan Kualitas Penyediaan dan penyebarluasan Informasi

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.82**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatnya Kualitas penyediaan dan penyebarluasan informasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Indikator Sasaran : Indeks E-Government</b>	<b>3.85</b>	<b>2.48</b>	<b>3.83</b>	<b>2.51</b>	<b>64.42%</b>
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	- 12 bulan - 1 Kantor - 261 Org	- 12 bulan - 1 Kantor - 261 Org	12 bulan 1 Kantor - 1 Videotron - 261 Org	12 bulan 1 Kantor - 1 Videotron - 261 Org	100%
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Infrastruktur dan akses jaringan e-Governmen	- 330 Titik Akses - 38 Layanan - 50 Domain	- 330 Titik Akses - 38 Layanan - 50 Domain	310 Titik Akses - 80% - 36 Layanan - 50 Dok	310 Titik Akses - 80% - 36 Layanan - 50 Dok	100%
	Program : Penyelenggaraan statistik sektoral	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.83**

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>11.061.029.467</b>	<b>10.342.427.254</b>	<b>93.50</b>	<b>100</b>	<b>98.47</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.634.451	900.233.929	99.96	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	266.903.055	266.887.179	99.99	100	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	633.731.396	633.346.750	99.94	100	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.595.782.017	4.920.925.908	87.94	100	99.73	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	445.734.201	453.473.172	101.74	100	99.98	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.150.047.816	4.467.452.736	86.75	100	99.70	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	294.539.979	293.314.779	99.58	100	87.58	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	294.539.979	293.314.779	99.58	100	87.58	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.389.394.803	1.379.673.207	99.30	100	90.86	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.389.394.803	1.379.673.207	99.30	100	90.86	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.880.678.217	2.848.279.431	98.88	100	98.47	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.880.678.217	2.848.279.431	98.88	100	98.47	100
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Komunikasi Publik</b>	<b>3.421.254.922</b>	<b>3.395.210.102</b>	<b>99.24</b>	<b>100</b>	<b>98.31</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.421.254.922	3.395.210.102	99.24	100	98.31	100
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	1.223.019.110	1.197.631.039	97.92	100	98.10	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.198.235.812	2.197.579.063	99.97	100	98.55	100
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>8.282.708.825</b>	<b>8.131.283.887</b>	<b>98.17</b>	<b>100</b>	<b>94.53</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	185.440.000	185.279.350	99.91	100	100	100
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	185.440.000	185.279.350	99.91	100	100	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	8.097.268.825	7.946.004.537	98.13	100	94.35	100
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	67.586.614	67.537.227	99.93	100	97.61	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	8.029.682.211	7.878.467.310	98.12	100	94.31	100
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>582,492,715</b>	<b>581,613,118</b>	<b>99.85</b>	<b>100</b>		
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	582,492,715	581,613,118	99.85	100		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	191,574,564	190,982,118	99.69	100		
	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	204,732,721	204,474,347	99.87	100		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	186,185,430	186,156,653	99.98	100		
	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi</b>	<b>190,014,869</b>	<b>189,559,917</b>	<b>99.76</b>	<b>100</b>		
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	190,014,869	189,559,917	99.76	100		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	190,014,869	189,559,917	99.76	100		
	<b>JUMLAH</b>	<b>23,537,500,798</b>	<b>22,640,094,278</b>	<b>96.19</b>	<b>100</b>	<b>99.52</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan layanan administrasi, penyusunan laporan keuangan, sarana prasarana dan SDM aparatur dengan target kinerja 100%.

a. Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Output Kegiatan : optimalnya pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 6 Dokumen.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Output Kegiatan : optimalnya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas dengan Target kinerja sebesar 100 %.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Output Kegiatan : meningkatnya kualitas pegawai di lingkup Dinas Kominfo Dan



Statistik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan target kinerja 100%.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output Kegiatan : tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan peralatan penyebar luasan informasi dengan target kinerja 100%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output Kegiatan : tersedianya jasa penunjang peralatan dan perlengkapan perkantoran dengan target kinerja 100%.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Outcome dari program adalah Optimalnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dengan target kinerja 100%.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Gorontalo

Output Kegiatan : terlaksanakannya pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta terselenggarakannya hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas media dengan target kinerja 100 %.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Outcome dari program adalah Optimalnya pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain serta optimalnya pengelolaan e-govt di lingkup Provinsi Gorontalo.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah Provinsi Gorontalo.

Output Kegiatan : tertatanya pelaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub nama domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo dengan target kinerja 100%.

2) Kegiatan Pengelolaan e-govtment di Lingkup Pemetintah Daerah Provinsi.

Output Kegiatan : Tertatanya pelaksanaan dan pengawasan e-government dan terlaksanakannya pengelolaan pusat data Pemerintahan Provinsi Gorontalo dengan target kinerja 100%

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Outcome dari program adalah Optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral khususnya lingkup Daerah Provinsi Gorontalo dengan target kinerja 100%.





- a. Pelaksanaan Program
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi  
Output kegiatan adalah meningkatnya kapasitas SDM Pemerintah Daerah khususnya mutu statistik di lingkup Daerah Provinsi dan berdirinya Metadata Statistik Sektoral serta meningkatnya kapasitas kelembagaan statistik sektoral dengan target kinerja 100%.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  
Outcome dari program adalah Terbentuknya keamanan informasi yang bersifat rahasia pemerintah Provinsi Gorontalo dengan target kinerja 100%.
  - a. Pelaksanaan Program
    - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.  
Output kegiatan adalah terlaksankannya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berbasis elektronik dan non elektronik dengan target kinerja 100%.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan :**

- Pemerintah Provinsi Gorontalo masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE. Penerapan Manajemen SPBE masih memiliki kekurangan pada indikator Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Perubahan, dimana penerapan manajemen belum dilaksanakan. Hal ini menyebabkan Layanan yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya.
- SDM untuk validata di Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo perlu ditingkatkan baik itu kualitas maupun kuantitas;
- Sering bergantinya walidata di lingkup Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo;
- Pengelolaan kelistrikan videotron di bandara masih dibantu UPBU kemenhub Bandara Djalaludin sehingga dalam proses pembayaran tagihan listrik harus menyesuaikan dengan proses pembayaran kelistrikan di tempat tersebut;
- Tempat pemasangan Billboard di sepanjang jalan Trans Sulawesi masih menyewa dengan pihak ketiga;
- Belum adanya kesatuan data antar Lembaga pengelola data di daerah;
- Belum adanya regulasi tentang 1 data di Provinsi Gorontalo;



- Kurangnya SDM yang tersertifikasi (SDM IT);
- Kurangnya SDM yang SANDIMAN;
- Masih menggunakan pihak ke 3 dalam pengelolaan server;
- SDM Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan PPID yang masih belum memadai;
- Ruang server belum memadai;
- Pengelolaan sarana Komunikasi dan Informatika baik berupa media elektronik diantaranya adalah melalui videotron yang sangat terbatas dari ketersediaan sarana dan prasarana;
- Adanya rasionalisasi anggaran disetiap OPD menyebabkan tertundanya pelaksanaan sub kegiatan dibeberapa kegiatan;
- Terdapat beberapa penyedia yang tidak dapat melengkapi dokumen pendukung sehingga terhambatnya kegiatan khususnya pada bagian sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

**Solusi :**

- Perlunya Peran Tim Koordinasi SPBE dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penerapan TIK di dalam menjalankan proses penyelenggaraan di internal Instansi.
- Peran strategis, taktis dan operasional perlu dipetakan dan diorganisasi kembali ke masing-masing OPD, sehingga tanggung jawab penerapan SPBE di masing-masing instansi tidak hanya diampu oleh Dinas Kominfo saja.
- Diakannya rekrutmen terkhusus walidata di bidang statistik Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo;
- Memberikan pembinaan sektoral melalui Bimtek dan Pelatihan kepada pengalolah, wali data OPD, agar semua unsur data memenuhi standar data, metadata, intreroperabilitas data, dan satu kode referensi;
- Dibuatkannya tempat khusus pemasangan Billboard Pemda Provinsi Gorontalo di tempat yang startegis;
- Perlu adanya penambahan SDM yang berkompetensi dalam bidang Statistik;
- Berkoordinasi dengan BPS untuk kevalidan data-data pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Membuat regulasi tentang 1 data atau keseragaman data di wilayah Provinsi Gorontalo;
- Membuat forum data Provinsi Gorontalo maupun Kab/Kota;
- Melaksanakan Bimtek untuk SDM IT yang tersertifikasi;



- Melaksanakan Bimtek pengelolaan server bagi SDM IT;
- Diperlukannya renovasi untuk ruangan server sesuai dengan ISO 27001;
- Perlu adanya kegiatan pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan PPID;
- Meningkatkan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah menjadi mitra kerja Diskominfotik Provinsi Gorontalo atau memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pihak ketiga yang baru terlebih dahulu sebelum memulai kontrak kerjasama.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.84**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022  
Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks E-Government/SPBE	3.85	2.48	3.83	2.51

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

(Tidak Ada)

**6) Penghargaan nasional yang diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

- Keamanan Digital Terbaik 2021
- Pengelola Media Center Daerah Terbaik tahun 2022, Peringkat pertama pada kategori foto terbanyak dan Peringkat kedua foto terbaik
- Mencapai skor literasi digital 3.59 atau berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 3,1 Berdasarkan hasil survei Status Literasi Digital Nasional 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama Katadata Insight Center (KIC) di 34 provinsi.
- Posisi ke-9 dari 34 provinsi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Gorontalo tahun 2022

- Juara ke-2 Statistik Awards 2022 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan menjadi OPD terbaik dalam penyelenggaraan statistik sectoral.

## 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

### 1) Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

- Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM

#### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.85**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target (4)	Realisasi (5)	Target (6)	Realisasi (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya Koperasi Sehat	Indikator Sasaran : Persentase Koperasi Sehat	10%	34.38%	10%	30.03%	343.8%
	Sasaran : Meningkatnya Koperasi Yang Menjalin Kemitraan	Indikator Sasaran : Persentase Koperasi Yang Menjalin Kemitraan di Berbagai Sektor Usaha	10%	2.38%	10%	2.26%	23.8%
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi Aktif	728 Koperasi	985 Koperasi	708 Koperasi	957 Koperasi	135.30%
		Jumlah Koperasi Berkualitas	10 Koperasi	20 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	200%
		Jumlah Koperasi Berprestasi	10 Koperasi	20 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	200%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan	7 Dokumen	12 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	171.43%
		Jumlah Satgas Pengawas Koperasi Yang Terbentuk dan Dilatih	1 Satgas (Prov)	1 Satgas (Prov)	1 Satgas (Prov)	1 Satgas (Prov)	100%
		Jumlah Koperasi Berprestasi dan koperasi Percontohan	10 Koperasi	20 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	200%
		Jumlah Pemeriksaan KSP/USP	10 Koperasi	12 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	120%
2	Sasaran : Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Indikator Sasaran : Rata-Rata UKM Naik Kelas	50 UKM	66 UKM	50 UKM	64 UKM	132%
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi dan UMKM Yang Mengakses Permodalan	1500 KUKM	4867 KUKM	1.250 KUKM	1.250 KUKM	324.47%
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha	Jumlah UKM Yang Dibina/Naik Kelas	50 UKM	75 UKM	50 UKM	75 UKM	150%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Mikro (UMKM)						
	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Yang Dibina/Naik Kelas	50 UKM	75 UKM	50 UKM	75 UKM	150%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan jasa administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

- Persentase Koperasi sehat di tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun buku 2022 sebanyak 252 koperasi dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 733 koperasi (dimana jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebanyak 985 koperasi) dikali 100 persen.
- Persentase Koperasi sehat di tahun 2021 dihitung berdasarkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun 2021 sebanyak 221 koperasi dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 736 koperasi (dimana jumlah koperasi aktif tahun 2021 sebanyak 957 koperasi) dikali 100 persen.
- Koperasi yang menjalin kemitraan diberbagai sektor usaha dihitung berdasarkan jumlah koperasi aktif yang menjalin kemitraan dibagi jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun n di kali 100 persen.
- Rata-Rata UKM Naik Kelas dihitung berdasarkan total UKM naik kelas tahun n dibagi dengan tahun n.

Tahun 2022 jumlah total UKM Naik Kelas sebanyak 330 UKM dibagi tahun ke 5.

Tahun 2021 jumlah total UKM Naik Kelas sebanyak 255 UKM Naik kelas tahun ke 4.

Pencapaian indikator kinerja yang dikemukakan hanya bisa tercapai jika didukung oleh pendanaan yang memadai yang ditunjang dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran kegiatan dalam mencapai sasaran. Pendanaan dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2022.

## 2) Program dan Kegiatan

Pagu Awal Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 20.849.834.518,-. Dalam tahun anggaran 2022 ini urusan koperasi usaha kecil menengah dalam melaksanakan program/kegiatan melakukan revisi-revisi pada beberapa item belanja dengan total sebesar Rp. 67.899.399,- dan tambahan APBD-P sebesar Rp. 717.123.636,- Sehingga pagu

anggaran sumber dana APBD berjumlah sebesar Rp. 21.634.857.553,-

Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah mendapat tambahan anggaran melalui sumber dana DID yaitu DID Periode 1 sebesar Rp. 400.00.000,- pada program pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dan DID periode 2 sebesar Rp. 1.194.707.874,- (pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi) sehingga total anggaran 2022 pada urusan ini menjadi sebesar Rp. 23.229.565.427,-

Untuk DID periode 1 Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022).

Adapun dari total Pagu Anggaran Tahun 2022 untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar **Rp. 23.229.565.427,-** rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 9.525.980.406,-
- Belanja Belanja Modal Rp. 4.181.424.008,-
- Belanja Barang & Jasa Rp. 9.522.161.013,-

Realisasi anggaran per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 22.028.383.594,-**

Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan untuk urusan koperasi usaha kecil menengah tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.86**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>2.625.870.358</b>	<b>2.588.426.886</b>	<b>98.57</b>	<b>100</b>	<b>99.99</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.625.870.358	2.588.426.886	98.57	100	99.99	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.625.870.358	2.588.426.886	98.57	100	99.99	100
<b>2</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>331.539.238</b>	<b>330.865.850</b>	<b>99.80</b>	<b>100</b>	<b>99.85</b>	<b>100</b>



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	331.539.238	330.865.850	99.80	100	99.85	100
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	331.539.238	330.865.850	99.80	100	99.85	100
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>404.017.104</b>	<b>403.682.324</b>	<b>99.92</b>	<b>100</b>	<b>99.31</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	404.017.104	403.682.324	99.92	100	99.31	100
	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	404.017.104	403.682.324	99.92	100	99.31	100
<b>4</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>318.627.570</b>	<b>315.048.665</b>	<b>98.88</b>	<b>100</b>	<b>98.50</b>	<b>99.04</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	318.627.570	315.048.665	98.88	100	98.50	99.04
	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	318.627.570	315.048.665	98.88	100	98.50	99.04
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>1.943.329.233</b>	<b>1.936.243.999</b>	<b>99.64</b>	<b>100</b>	<b>96.57</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.943.329.233	1.936.243.999	99.64	100	96.57	100
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.943.329.233	1.936.243.999	99.64	100	96.57	100
<b>6</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>17.606.181.924</b>	<b>16.454.115.870</b>	<b>93.46</b>	<b>95.97</b>	<b>97.27</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.039.901.853	1.026.585.976	98.72	100	99.48	99.93
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.039.901.853	1.026.585.976	98.72	100	99.48	99.93



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Perangkat Daerah						
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.675.980.407	9.358.855.442	96.72	100	99.78	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.525.980.406	9.210.213.660	96.69	100	99.80	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	148.641.782	99.09	100	98.10	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.656.000	210.719.912	98.17	100	98.21	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	214.656.000	210.719.912	98.17	100	98.21	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.106.160.962	4.384.588.379	85.87	86.27	88.70	98.44
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.106.160.962	4.384.588.379	85.87	86.27	88.70	98.44
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.569.482.702	1.473.366.161	93.88	99.49	93.54	99.30
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.569.482.702	1.473.366.161	93.88	99.49	93.54	99.30
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.229.565.427</b>	<b>22.028.383.594</b>	<b>94.83</b>	<b>96.95</b>	<b>96.49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel diatas maka total anggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebesar Rp. **23.229.565.427,-** dari total anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Tahun 2022 sebesar Rp. 38.167.659.012,- atau sebesar 60,86%. Dengan realisasi sebesar Rp. **22.028.383.594,-** atau sebesar 60,89 % dari total realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 36.173.738.155,-

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2022 urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Outcome dari program adalah jumlah dokumen laporan hasil pengawasan 7 dokumen, jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk dan dilatih sebanyak 1 satgas (provinsi), jumlah koperasi berkualitas/koperasi berprestasi 20 koperasi.

Pagu untuk kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 331.539.238,-. dengan realisasi sebesar Rp. 330.865.850,-. Dengan silva sebesar Rp. 673.388,- (sisa pada item belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- dan belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat, perjalanan dinas biasa dan dalam kota).





1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Output Kegiatan :

- Rakor Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dengan peserta Pembina Koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawasan Koperasi Se-Provinsi Gorontalo berjumlah 30 Orang.
- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan pengawasan/monev koperasi penerima bantuan/penghargaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kabupaten/Kota serta pemeriksaan KSP/USP dilakukan pada 12 Koperasi Primer Provinsi Gorontalo.
- Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Koperasi yang menghasilkan laporan hasil pengawasan koperasi Se-Provinsi Gorontalo baik yang didanai APBD dan APBN (Satgas Pengawas Koperasi Se-Provinsi Gorontalo) sebanyak 42 laporan.
- Penilaian Koperasi Berprestasi, yang menghasilkan 20 koperasi berprestasi Se-Provinsi Gorontalo dan sebagai penerima penghargaan koperasi berprestasi.

**Tabel 3.87**  
Daftar Koperasi Berprestasi Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1	KOPERASI KONSUMEN "WANITA KASIH IBU"	Jl. Madura Kel. Dulalowo Kota Gorontalo
2	KSU "CITRA JAYA"	Kel. Tenda Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
3	KOPERASI KARYAWAN "QUALITY SEJAHTERA"	Jl. Prof. Dr. HB Jassin Kota Gorontalo
4	KOPERASI KONSUMEN "WINDU JAYA MANDIRI"	Desa Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
5	KPRI "PENGAYOMAN PEGAWAI DEP. KEHAKIMAN"(KPPDK) (KPPDK) GORONTALO	Kel. Donggala Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo
6	KSU "BHAKTI JAYA"	Kec. Limboto Kab. Gorontalo
7	KSU "TIRTA MALEO"	Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato
8	KSU "TIRTA LIMUTU"	Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
9	KPRI "BERINGIN"	Jl. Sawah Besar Desa Oluhuta Kab. Bone Bolango



NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT
10	KOPERASI WANITA "ANNUR"	Desa Karya Indah Kec. Asparaga Kab. Gorontalo
11	KOPERASI KONSUMEN "TRI PUTRA GUSTET"	Desa Hulawa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo
12	KOPERASI KARYAWAN "TIRTA AYUHULALO"	Kec. Tilamuta Kab. Boalemo
13	KUD "KESRAT"	Kec. Tilamuta Kab. Boalemo
14	KOPERASI USAHA TERNAK "LEMBU KAROMAH"	Desa Pancakarsa I Kec. Taluditi Kab. Pohuwato
15	KSP "HIDUP"	Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Wonggaditi Barat Kota Gorontalo
16	KSP "HEMAT"	Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
17	KSP "SENTOSA"	Jl. Pasar Minggu Kel. Tingkohubu Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
18	KSP. "HANDAYANI JAYA"	Kel. Botupingge Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango
19	KSP "MEMBANGUN HIDUP"	Desa Manunggal Karya Kab. Pohuwato
20	KPRI "WIYATA MANDALA"	SMA Tilamunta Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

**Tabel 3.88**

Daftar Pemeriksaan Kesehatan KSP/USP  
Koperasi Primer Provinsi Gorontalo  
Tahun 2022

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	HASIL
1	KSP AL-HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	Kel. Dulomo Selatan Kota Gorontalo	Sehat
2	KSP KARYA CIPTA DANA	Desa Bulota Kab. Gorontalo	Sehat
3	KSU KARYA PRASETYA	Kel. Limba U 2 Kota Gorontalo	Sehat
4	KPRI WIRA USAHA BARU	Desa Toto Kab. Bone Bolango	Sehat
5	KOP. TRANSPORTASI ANGKASA GORONTALO	Desa Tolotio Kab. Gorontalo	Cukup Sehat
6	KOP. KONS. BERKAT JAYA MANDIRI	Desa Poowo	Cukup



NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	HASIL
		Kab. Bone Bolango	Sehat
7	KOP. JASA ANGKUTAN KRAWANG JAYA BERSAMA	Kel. Huangobotu Kota Gorontalo	Cukup Sehat
8	KOP. KONS. ANUGERAH DEHETO MANDIRIO	Kel. Bugis Kota Gorontalo	Cukup Sehat
9	KSP TENANT MANDIRI	Kota Tengah Kota Gorontalo	Cukup Sehat
10	KOP. KONSUMEN SYARIAH EL MADANI BAPPEDA GORONTALO	Desa Karya Indah Kec. Asparaga Kab. Gorontalo	Sehat
11	KOP. TINELO HULAWA ABADI	Kel. Tumbihe Kab. Bone Bolango	Cukup Sehat
12	KPRI WIYOWA	Kel. Limba U 2 Kota Gorontalo	Sehat

## 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Outcome dari program adalah Jumlah koperasi & UKM yang mengakses permodalan sebanyak 1500 koperasi.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha berjumlah Rp. 404.017.104,- dengan realisasi hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp. 403.682.324,-. Sisa kegiatan berjumlah Rp. 334.780,- yaitu item belanja yang tidak dapat dibelanjakan lagi yaitu sisa belanja ATK, bahan cetak, alat listrik, makan minum rapat, makan minum aktivitas lapangan serta sisa perjalanan dinas dalam kota Rp. 287.500,-. Adapun realisasi Fisik dari kegiatan 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,92%.

### 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output Kegiatan :

- Forum Koordinasi Akses Pembiayaan tahun 2022, dilaksanakan di 6 Kab/Kota se Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta 90 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi permasalahan terhadap Koperasi dan UKM dalam hal akses pembiayaan serta sebagai media koordinasi dan konsolidasi dengan Pihak Perbankan dan Pegadaian untuk mempercepat realisasi pinjaman melalui Program KUR, LPDB dan UMI.



- Pemberian Penghargaan atau hadiah kepada Koperasi Sehat Kepatuhan, yang telah dinilai yang dianggap mampu mengembangkan Koperasi dan telah melaksanakan kewajiban sebagai suatu badan hukum koperasi melalui pelaksanaan RAT Koperasi, dengan total hadiah sebesar Rp.150.000.000,- dengan 15 Koperasi penerima masing-masing koperasi sebesar 10 juta rupiah.
- Rapat Koordinasi Permodalan tahun 2022, dilaksanakan di Provinsi Gorontalo sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 60 orang. Kegiatan ini sebagai media koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Kab/Kota serta Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dengan Pendamping KUKM dalam rangka mencari solusi permasalahan terhadap akses pembiayaan.
- Jumlah pelaku usaha yang mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Ultra Mikro (UMI) berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan RI sebanyak 42.578 dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.276.353.434.079,- dan Outstanding sebesar Rp. 927.825.738.419,-.
- Akses Permodalan, Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses Permodalan di tahun 2022 adalah 4867 KUKM berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi melalui iklan dan penyiaran di media (RRI dan Koran) dengan sumber dana APBD.

**Tabel 3.89**

Koperasi Penerima Hadiah Penilaian Koperasi Sehat Kepatuhan Tahun 2022

No	Binaan Kab/Kota/Provinsi Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat
		Nomor	Tanggal	
<b>I</b>	<b>KOTA GORONTALO</b>			
1	Koperasi Konsumen Primkoppabri Cahaya Abadi	AHU-0009266.AH.01.26.TA HUN 2021	23/03/2021	Kec. Duingingi Kota Gorontalo
2	Koperasi Serba Usaha Damay	32/BH/XXII.3/12/1/2012	13/01/2012	Kec. Biawao Kota Gorontalo
<b>II</b>	<b>KABUPATEN GORONTALO</b>			
1	Koperasi Produsen Bandayo Ar Rahman Moosalamati	381/BH/DKPP/2011	05/12/2011	Kec. Telaga Kab. Gorontalo
<b>III</b>	<b>KABUPATEN BOALEMO</b>			
1	Koperasi Simpan Pinjam	1691/BH/V	30/12/197	Kec.



No	Binaan Kab/Kota/Provinsi Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat
		Nomor	Tanggal	
	Pelita		1	Paguyaman Kab. Boalemo
2	Koperasi Konsumen Fisheris Bahari Mohupomba	30/BH/VIII/2004	18/08/2004	Kec. Tilamuta Kab. Boalemo
<b>IV</b>	<b>KABUPATEN POHUWATO</b>			
1	Koperasi Produsen Salfa Helumo Mandiri	AHU- 0010055.AH.01.26.TA HUN 2021	28/04/2021	Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato
2	Koperasi Produsen Sinar Harapan Wanggarasi	010471/BH/M.KUKM.2/ XI/2018	12/11/2018	Kec. Wanggarasi Kab. Pohuwato
<b>V</b>	<b>KABUPATEN BONE BOLANGO</b>			
1	Koperasi Produsen Sinar Mustika Laut	001490/BH/M.KUKM.2/ VI/2016	15/06/2016	Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango
<b>VI</b>	<b>KABUPATEN GORONTALO UTARA</b>			
1	Koperasi Perikanan Kramat Jaya Hutakalo	194/DISKOP.PKM/2003	31/12/2003	Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara
2	Koperasi Produsen Agro Wilis Mandiri	010331/BH/M.KUKM.2/ X/2018	29/10/2018	Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
3	Koperasi Produsen KSU Lamahu Jaya	AHU- 0004121.AH.01.26. TAHUN 2020	09/07/2020	Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
<b>VII</b>	<b>PROVINSI GORONTALO</b>			
1	Koperasi Jasa Angkutan Krawang Jaya Bersama	012522/BH/M.KUMK.2/ II/2019	28/02/2019	Kec. Duingingi Kota Gorontalo
2	Koperasi Simpan Pinjam Tenant Mandiri	29/BH/XXII/II/2014	26/02/2014	Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
3	Koperasi Konsumen Berkat Jaya Mandiri	009273/BH/M.KUKM.2/ VIII/2018	09/08/2018	Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
4	Koperasi Konsumen Barokah Provinsi Gorontalo	AHU- 0013945.AH.01.26.TA HUN 2021	11/12/2021	Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango

### 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Outcome dari program adalah jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi berkualitas, jumlah koperasi berprestasi. Ditahun 2022 Jumlah koperasi aktif mencapai 985 koperasi aktif dari



target 728 koperasi dan Jumlah Koperasi berprestasi berjumlah 20 Koperasi dari target 10 koperasi.

Dukungan anggaran tahun 2022 untuk pelaksanaan program kegiatan ini berjumlah Rp. 2.625.870.358,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.588.426.886,- atau 98,57% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik. Pada program ini terdapat 2 sumber dana yaitu APBD dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp.2.452.964.000,-

1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output Kegiatan : Kegiatan Pembinaan dan Bedah Koperasi yang di ikuti 30 anggota koperasi kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, Oktober dan November tahun 2022.

- Kegiatan FGD Peningkatan Kualitas SDM dan Penataan Kelembagaan Koperasi yang di ikuti 150 orang yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada bulan November tahun 2022.

- Revitalisasi Koperasi (Bedah Koperasi)

Di tahun 2022 revitalisasi koperasi berjumlah 6 (enam) koperasi yaitu :

- Kopwan Ilomata Desa ilomata Kecamatan Atinggola. Kab. Gorontalo Utara.
- Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati, ds. pilohayanga. Kec. Telaga. Kabupaten Gorontalo.
- Koperasi Pertanian Motongolito, Kecamatan Bongomeme. Kab. Gorontalo.
- Koperasi Produsen Puncak Nawacita, Desa Lito. Kec. Paguyaman Pantai. Kab. Boalemo.
- Koperasi Makmur Bersama Kapet, desa Harapan. Kec. Wonosari. Kab. Boalemo.
- Koperasi Produsen Simanagi Cahaya Abadi, Desa Siduwonge. Kec. Randangan. Kabupaten Pohuwato.

- Kegiatan Pembinaan kepada Pengurus, Pengawas Koperasi serta Koperasi pengelola dan anggota Koperasi dilaksanakan di Kabupaten/Kota yaitu :

• Kabupaten Gorontalo Utara :

1. Koperasi Perikanan Kramat Jaya Hutakalo, Desa Hutakalo Kec. Sumalata.
2. Koperasi Papualangi Expres, Desa Papualangi Kec. Tolinggula.

• Kota Gorontalo :

1. Koperasi Produsen Berkah Mandiri Hulonthalo, Kel. Talumolo Kec. Dumbo



Raya.

2. Koperasi Konsumen Semoga Berkah Selalu, Kel. Donggala Kec. Hulonthalangi.
  3. Koperasi Konsumen Murni Lestari Sejahtera, Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sibatana.
- Kabupaten Pohuwato :
    1. Koperasi Simpan Pinjam Al-Ihlas, Desa Soginti Kec. Paguat.
  - Kabupaten Bone Bolango :
    1. Koperasi Produsen Multi Prima Jaya, Koperasi Produsen Multi Prima Jaya.

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta Pelaku Usaha Bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK).

Dengan jumlah pagu Anggaran Rp. **2.452.964.000,-** penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 berjumlah Rp. **2.415.630.995,-** dengan persentase keuangan 98,48 % dan persentase fisik 100 %, dengan silva berjumlah Rp. **37.333.005,-**. Pencairan dana sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tahapan yaitu Pencairan Tahap I sesuai Rencana Arus Kas (RAK) berjumlah **Rp. 1.225.482.400,-** Dan Tahap II berjumlah **Rp. 1.227.481.600,-** **Terdiri atas :**

a. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

Pagu anggaran kegiatan ini adalah **Rp. 1.339.603.524,-** dengan pencairan 2 (dua) Tahap I, **Rp. 681.939.663,-** dan Tahap II, **Rp. 657.663.861,-** penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2021 Rp. **1.308.915.165,-** . capaian **97,71%** Dengan silva sebesar Rp. 30.688.359- (sisa belanja makan minum aktivitas lapangan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Koperasi).

Output kegiatan ini adalah dilaksanakan 13 DIKLAT diikuti oleh 167 koperasi yang pesertanya dari pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dengan jumlah 390 peserta yang terdiri dari IV (empat) Angkatan yaitu sebagai berikut:

Angkatan I : Pelaksanaan Tanggal 27 s.d 30 Mei 2022 :

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| 1. Diklat Akses Permodalan Koperasi          | : 30 | Peserta |
| 2. Diklat Pemeriksaan Kesehatan Koperasi     | : 30 | Peserta |
| 3. Diklat Kompetensi Bagi Juru Buku Koperasi | : 30 | Peserta |
| 4. Diklat Restrukturisasi Usaha Koperasi     | : 30 | Peserta |



Angkatan II : Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 17 Juli 2022 :

1. Diklat Akuntansi Koperasi : 30 Peserta
2. Diklat Dasar Koperasi : 30 Peserta

Pelaksanaan Tanggal 17 s.d 20 Juli 2022 :

3. Diklat Manajemen Perkoperasian : 30 Peserta

Angkatan III : Pelaksanaan Tanggal 27 s.d 30 Oktober 2022 :

1. Diklat Mekanisme Penyelenggaraan RAT (1) : 30 Peserta
2. Diklat Akuntansi Koperasi : 30 Peserta
3. Diklat Kewirausahaan Koperasi : 30 Peserta

Angkatan IV : Pelaksanaan Tanggal 31 Oktober s.d 03 November 2022 :

1. Diklat Mekanisme Pelaksanaan RAT (2) : 30 Peserta
2. Diklat Akuntansi Koperasi Berbasis IT : 30 Peserta
3. Diklat Pengawasan Koperasi : 30 Peserta

b. Peningkatan Kapasitas SDM UMKM

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.113.360.476,- . Penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 Rp. 1.106.715.830,- atau 99,40% Dengan silva sebesar Rp. 6.644.646,-. Outcome : meningkatnya kapasitas SDM UMKM (300 orang/peserta). Output kegiatan ini adalah pelaksanaan 11 kegiatan pelatihan Bagi Pelaku Usaha di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, dan kabupaten Pohuwato, dengan jumlah peserta sebanyak 330 peserta dan 1 (satu) diklat layanan hukum yang terdiri dari 1 (satu) angkatan yaitu :

Angkatan I : Pelaksanaan Tanggal 24 s.d 27 Mei 2022 :

1. Diklat Strategi Manajemen Pemasaran : 30 Peserta
2. Diklat Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi UMKM : 30 Peserta
3. Diklat Pengenalan Sistem Pembayaran Digital : 30 Peserta
4. Diklat Membangun Mindset Wirausaha : 30 Peserta
5. Diklat Sertifikasi Keamanan Pangan Bagi UMKM : 30 Peserta

Pelaksanaan Tanggal 21 s.d 24 Juli 2022 :

1. Diklat Inovasi Packaging produk Bagi UMKM : 30 Peserta

Pelaksanaan Tanggal 28 s.d 31 Oktober 2022

2. Diklat Sistem Jaminan Halal Bagi UMKM : 30 Peserta

Pelaksanaan Tanggal 28 s.d 31 Oktober 2022





3. Diklat Layanan Bantuan & Pendampingan Hukum : 30 Peserta
  4. Diklat Fotografi Produk bagi UMKM : 30 Peserta
  5. Diklat Strategi manajemen Pemasaran Produk bagi UMKM : 30 Peserta
  6. Diklat Mindset & manajerial Bisnis Bagi UMKM : 30 Peserta
  7. Diklat Teknik Pemasaran Digital bagi UMKM : 30 Peserta
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- Outcome dari program adalah jumlah UKM yang dibina/naik kelas dengan mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,50%.
- Pagu anggaran 2022 pada program ini berjumlahmu Rp. 318.627.570,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2022 berjumlah Rp. 315.048.665,- dan silva sebesar Rp. 3.578.905,-. (berupa sisa belanja atk, bahan cetak, honorarium narasumber yang tidak dapat direalisasikan) adapun untuk capaian kinerja Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi keuangan mencapai 98,88% dari target 100%.
- 1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- Output Kegiatan :
- Kegiatan Bimtek OSS (online Submission System) yang diikuti oleh 25 UKM di Kabupaten Gorontalo Utara
  - Terlaksananya Coaching Clinic di Kota Gorontalo sebanyak 4 kali yaitu :
    - Memulai Bisnis dengan benar Peserta 15 UMKM tanggal 31 Agustus Lokasi Mes Haji Provinsi Gorontalo
    - Produk dan Marketing Peserta 13 UMKM tanggal 9 September Lokasi YUMME O Mart
    - Intelegency Financial Peserta 6 UMKM tanggal 19 Oktober lokasi Hotel Grand Q Kota Gorontalo
    - Operation excellent Peserta 8 UMKM tanggal 20 Oktober lokasi Hotel Grand Q Kota Gorontalo
  - Fasilitasi Legalisasi Asosiasi UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang diserahkan kepada 6 (enam) asosiasi UMKM se Provinsi Gorontalo yaitu :
    - Asosiasi Cemerlang, di Kabupaten Bone Bolango
    - Asosiasi Asyik-Go di Kabupaten Gorontalo



- Asosiasi Smart City di Kota Gorontalo
- Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Boalemo
- Asosiasi UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara
- Asosiasi Geraha EK Kreatif di Kabupaten Pohuwato

Fasilitasi legalisasi asosiasi UMKM ini bertujuan untuk mendorong UMKM disetiap wilayah mempunyai wadah kelembagaan yang sudah terlegalisasi sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

- Pemutakhiran Data UMKM yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi data UMKM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo "SiapAku". Yang berisi tentang data UMKM se-Provinsi Gorontalo yang up-date.

#### 5. Program Pengembangan UMKM

Outcome dari program adalah UKM yang dibina/naik kelas sebanyak 75 UKM naik kelas tahun 2022. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.

Pagu awal untuk program ini berjumlah Rp. 1.220.927.275,- kemudian direvisi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu gedung ruang produksi factory sharing yang semula penganggarannya terdapat di program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi direvisi ke program pengembangan UKM dengan alasan yaitu gedung ruang produksi (factory sharing) merupakan bantuan/belanja yang akan diserahkan ke masyarakat produksi ini akan dikelola oleh desa dan akan menjadi tempat produksi bersama para pelaku UKM serta menjadi galeri promosi UKM dan tidak menjadidi aset dinas. Di tahun 2022 program ini mendapat tambahan APBD-P sebesar Rp. 222.401.958,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang diperuntukkan untuk keikutsertaan pada pelaksanaan G-20 Bali Summit, verifikasi penerima manfaat UKM/IKM serta tambahan honor untuk tenaga pelayanan umum sehingga total anggaran yang bersumber dari DAU 2022 pada program ini berjumlah Rp. 1.543.329.23,- kemudian, melalui sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) yang diperuntukkan untuk bantuan ekonomi produktif bagi UMKM di Provinsi Gorontalo. Untuk DID periode 1 ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan



Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2021 Sehingga total anggaran program ini tahun 2022 sebesar Rp. 1.943.329.233,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Dengan capaian kinerja fisik 100% dan realisasi keuangan 99,64% dari target 100%.

1) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Output Kegiatan :

- Terlaksananya Kegiatan Gebyar UMKM pada tanggal 25 s/d 28 Februari Grand Q dan City Mall Kota Gorontalo dengan jenis Kegiatan sebagai berikut :
  - Lomba Inovasi Prodak Bagi UMKM dengan jumlah peserta 35 UMKM
  - Lomba Foto Produk dengan jumlah peserta 21 UMKM
  - Lomba Vidio Produk dengan jumlah peserta 10 UMKM
  - Lomba membuat Hampers dengan jumlah peserta 6 UMKM
  - Serta Pameran Produk UMKM tingkat Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta 64 UMKM
  - Fasilitasi Layanan UMKM (UMKM service) diantaranya :
    1. Fasilitasi Desain Kemasan Dari Dinas KUMPERINDAG Prov. Gorontalo
    2. Fasilitasi rumah Kemasan ke Bela Pengadaan UMKM Gorontalo
    3. Fasilitasi Pelayanan Perizinan melalui OSS dari DMPTSP Prov. Gorontalo
    4. Fasilitasi PIRT dan MD dan dari BPOM
    5. Fasilitasi HAKI dan Perseroan perorangan dari KEMENKUMHAM Provinsi Gorontalo
    6. Fasilitasi Halal dari BPJPH KEMENAG dan MUI serta LPPOM Provinsi Gorontalo
- Terlaksananya Kegiatan kelas Bisnis bagi pelaku UMKM di kecamatan Wonosari yang di laksanakan 4 kali dengan Jumlah peserta sebanyak 100 UMKM :
  1. Branding Produk bagi UMKM Aula Desa Trirukun 25 Peserta UMKM
  2. HPP (Harga Pokok Produksi) Wiasat Religi Desa trirukun 25 Peserta UMKM
  3. Laporan Keuangan Aula Desa Bongo III 25 Peserta UMKM
  4. BMC (Bisnis Model Canvas) Aula Desa harapan 25 Peserta UMKM
- Terlaksananya kegiatan Mentoring Bisnis UMKM Berbasis Syariah bagi 10 PONTREN dan LKSA yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tema "Pentingnya



Mindset Wirausaha bagi Pelaku UMKM di Pondok Pesantren dan LKSA” dan “  
Membangun Branding Produk bagi Pelaku UMKM di Pondok Pesantren dan LKSA.

- Terlaksananya Bantuan Bahan Produksi bagi UMKM pada tahun 2022 Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo di bagi menjadi tiga wilayah yaitu Kota dan Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara serta Pohuwato dan Boalemo dengan jumlah UMKM yang diberikan bantuan sejumlah 385 UKM dengan Total anggaran Rp. 770 .000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh juta rupiah).
- Bantuan Alat dan Bahan Produksi bagi PONTREN dan LKSA sejumlah 10 Pontren dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yaitu :
  1. LKS Ummu Syahidah. Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Sawit Kel. Buladu Kec. Kota Barat. Kota Gorontalo
  2. LKSA Harapan Umat. Jenis produksi industri pengolahan. Kel. Tamalate Kec. Kota Timur. Kota Gorontalo
  3. LKSA Moosalamati . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Kancil Kel. Buliide Kec. Kota Barat. Kota Gorontalo
  4. Sanggar Tuna Runggu . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Yusuf Hasiru Kec. Sapatana. Kota Gorontalo
  5. Pondok Pesantren Khairul Hikmah. Jenis produksi industri pengolahan. Desa Longalo Kec. Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango
  6. LKSA Al-Inayah . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Mukhlis Rahim Desa Timbuolo Timur Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango
  7. LKSA Aisyiah. Jenis produksi industri pengolahan. Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo
  8. LKSA Amal Sholeh . Jenis produksi industri pengolahan. Desa tilote Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo
  9. LKSA Ar- Rahman . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Arifin Badu Desa Iluta Kec. Batudaa. Kabupaten Gorontalo
  10. Pondok Pesantren Darul Madinah, Jenis produksi industri pengolahan. Desa Jatimulya Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo.
- Terlaksananya 1 (satu) Factory Sharing di Kecamatan Wonosari Desa Trirukun dengan Pagu anggaran Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- Terlaksananya Bantuan 10 buah Both bagi pelaku UMKM di lingkungan kantor Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo



- Terlaksanakannya kegiatan Side Event Pameran Presidensial G20 di Bali
- Terfasilitasinya pembentukan Asosiasi UMKM kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan pelaporan.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pagu awal untuk program ini berjumlah Rp. 1.043.901.853 kemudian total revisi sebesar Rp. 9.280.000,- ke kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta tambahan APBD-P sebesar Rp. 5.280.000,- berupa tambahan honorarium PTT. Uraian kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 98,72%. Biaya kegiatan berjumlah Rp. 13.315.877,- antara lain terdiri atas sisa ATK, bahan cetak, honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas yang tidak dapat dibelanjakan.

Output Kegiatan :

- Forum OPD Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Tingkat Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten Boalemo tanggal 29 -31 Maret 2022 yang diikuti oleh aparat Pembina Dinas Kumperindag Kabupaten/kota
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Koperasi UMKM Perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Tanggal 20 Juli 2022
- Forum Group Discussion (FGD) tematik "Membumikan Koperasi Berbasis Syariah dalam Memberdayakan Ekonomi di Provinsi Gorontalo TA. 2022 tanggal 19 April 2023 di Kota Gorontalo.
- Terlaksananya 1 (satu) aplikasi sistem informasi yang berisi tentang data kegiatan untuk memudahkan melakukan evaluasi kinerja (evaluasi renja, Laporan Kinerja Pertanggungjawaban). Ketersediaan data kinerja ini untuk mengontrol , memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dengan realisasi kegiatan adalah :

- 7 Dokumen perencanaan dan koordinasi lintas sektor/SKPD/Pusat yaitu Dokumen renja, renstra, RAK, RKA, KAK, RAB, SIRUP.
- 8 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi renja per triwulan, E-Monev, Lakip, Laporan Tahunan (LAPKIN APBN), laporan tahunan APBD masing-masing bidang.



2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output kegiatan : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan

3) Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah

Output kegiatan : penyediaan sarana prasarana perkantoran (belanja modal), perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, suku cadang alat angkutan dan bahan bakar/pelumas. dengan target dan capaian 100%.

Pagu awal sebesar Rp. 3.599.993.432,- kemudian revisi senilai (10.121.440,-) dan tambahan APBD-P senilai Rp. 321.581.096,- yang diperuntukkan untuk tambahan suku cadang alat angkutan, pengawasan gedung UPTD BPSMB (retensi), belanja modal komputer serta retensi pekerjaan gedung UPTD BPSMB sebesar Rp. 159.844.790,- dan tambahan DID Periode 2 sebesar Rp. 1.194.707.874,- berupa belanja modal dan jasa konsultasi konstruksi untuk ART galery. Adapun realisasi fisik 86,27% dan keuangan 85,87% dari target 100%. Untuk ketidakcapaian pada realisasi fisik ini karena masih ada belanja modal berupa kendaraan bermotor penumpang senilai Rp. 700.000.000,- yang belum terealisasi dan telah dimintakan untuk dapat dianggarkan kembali di tahun 2023.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output Kegiatan : keikutsertaan pada diklat PPID di Makassar (4 orang), Bimtek penyusunan DIp & DIK di Kabupaten Pohuwato (8 orang), Sosialisasi Srikandi di Bonebolango (2 orang), Sosialisasi retensi arsip dan penggunaan aplikasi srikandi (5 orang), sosialisasi penggunaan aplikasi SIM-PD (3 orang), Diklat BMD di Kabupaten Bone Bolango (1 orang) dan peningkatan kapasitas melalui studi banding SSH di Surabaya (3 orang).

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output Kegiatan : penyediaan jasa administrasi perkantoran (belanja rutin kantor Dinas Kumperindag dan UPTD BPSMB) dengan target fisik 100% dan capaian 99,49% serta realisasi keuangan 93,88%.

### 3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus dan Pengawas koperasi untuk menjalankan organisasi koperasi dengan baik, sehingga masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi
2. Terbatasnya pengetahuan SDM/ASN pengawas dan pemeriksa koperasi baik



Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo terutama dalam pengisian kertas kerja pemeriksaan koperasi, sehingga pelaksanaan pengawasan belum maksimal.

3. Tidak berfungsinya Perangkat organisasi/kelembagaan koperasi terutama Pengurus, dimana ada rangkap jabatan di Koperasi sehingga ini yang menyebabkan organisasi koperasi tidak jalan
4. Kurangnya rasa memiliki anggota koperasi sehingga usaha yang dijalankan tidak mendapat dukungan dari anggota sebagai pemilik koperasi
5. Kurang lengkapnya legalitas kelembagaan dan usaha koperasi sehingga kesulitan untuk mengakses permodalan di pihak pembiayaan
6. Banyak koperasi yang belum menerapkan Standar operasional prosedur (SOP) khusus simpan pinjam sehingga banyak koperasi yang mengalami permasalahan terutama kredit macet
7. Terbatasnya modal koperasi sehingga usaha koperasi lambat berkembang
8. Konektivitas program belum maksimal sehingga pembinaan masih parsial.
9. Informasi program pemberdayaan dan pengembangan UMKM dari seluruh kementerian/lembaga belum tersampaikan secara optimal.
10. Ketersediaan gedung kantor yang belum representatif, sehingga mempengaruhi produktivitas kerja.

Solusi :

1. Melakukan Penguatan SDM melalui Pendampingan dan pelatihan oleh pembina teknis koperasi wilayah kabupaten.kota dan Provinsi serta Perlu adanya pemahaman bagi pengurus tentang pentingnya pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota melalui RAT
2. Dibutuhkan penyelenggaraan bimtek untuk peningkatan kapasitas bagi pengawas koperasi dan pembina (ASN) koperasi, sehubungan dengan teknis pengawasan dan kertas kerja pemeriksaan koperasi
3. Dibutuhkan penyelenggaraan Bimtek/pelatihan dan pembinaan bagi pengurus koperasi terkait manajemen organisasi koperasi
4. Perlu adanya edukasi dan pendampingan, pembinaan/pelatihan ke anggota koperasi
5. Dibutuhkan pendampingan/pembinaan langsung ke koperasi terkait akses permodalan
6. Dibutuhkan penyelenggaraan bimtek/pelatihan terkait penyusunan SOP Simpan pinjam koperasi
7. Perlu adanya jalinan kemitraan koperasi dengan pihak pembiayaan

8. Dibutuhkan Kolaborasi dan sinergitas program pembinaan dengan stakeholder
9. Mengoptimalkan penyediaan informasi program pemberdayaan dan pengembangan UMKM dari seluruh kementerian/lembaga ke seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo
10. Penataan/renovasi gedung kantor perlu untuk dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik sehingga tujuan OPD dapat tercapai.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.90**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Berprestasi	728 Koperasi 10 Koperasi	985 Koperasi 20 Koperasi	708 Koperasi 10 Koperasi	957 Koperasi 10 Koperasi
2	Jumlah UKM Yang Dibina/Naik Kelas	50 UKM	75 UKM	50 UKM	75 UKM

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Data Capaian indikator kinerja program/kegiatan urusan koperasi tahun 2022 Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.91**

Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	- Jumlah Koperasi Aktif	<b>728</b>	<b>Koperasi</b>	<b>985</b>	<b>Koperasi</b>	<b>135,30</b>
	- Jumlah Koperasi berkualitas	<b>10</b>	<b>Koperasi</b>	<b>20</b>	<b>Koperasi</b>	<b>200</b>
	- Jumlah Koperasi berprestasi	<b>10</b>	<b>Koperasi</b>	<b>20</b>	<b>Koperasi</b>	<b>200</b>
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	150	pengurus dan pengelola yang dilatih	390	pengurus dan pengelola yang dilatih	260



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
	Jumlah Revitalisasi Koperasi	10	Koperasi	7	Koperasi	70
<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>jumlah dokumen laporan hasil pengawasan</b>	<b>7</b>	<b>Dok</b>	<b>12</b>	<b>Dok</b>	171,43
	<b>Jumlah satgas koperasi yang terbentuk &amp; dilatih</b>	<b>1</b>	<b>satgas (provinsi)</b>	<b>1</b>	<b>satgas (provinsi)</b>	100
	<b>Jumlah koperasi berprestasi &amp; koperasi percontohan</b>	<b>10</b>	<b>koperasi</b>	<b>20</b>	<b>koperasi</b>	200
	<b>Jumlah pemeriksaan KSP/USP</b>	<b>10</b>	<b>Koperasi</b>	<b>12</b>	<b>Koperasi</b>	120
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7	Dok	12	Dok	171,43
	Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1	satgas (provinsi)	1	satgas (provinsi)	100
	Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10	koperasi	20	koperasi	200
	Jumlah pemeriksaan KSP/USP	10	Koperasi	12	Koperasi	120
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan</b>	<b>1.500</b>	<b>KUKM</b>	<b>4.867</b>	<b>KUKM</b>	324,47
	<b>Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan</b>	<b>-</b>	<b>kali</b>	<b>6</b>	<b>kali</b>	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan	1.500	KUKM	4.867	KUKM	324,47
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan		kali	6	kali	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Jumlah UKM yang dibina/naik kelas</b>	<b>50</b>	<b>UKM</b>	<b>75</b>	<b>UKM</b>	150
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran	200	UKM	67	UKM	33,50
		0	UKM Yang Dimagangkan	-	UKM Yang Dimagangkan	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas</b>	<b>50</b>	<b>UKM</b>	<b>75</b>	<b>UKM</b>	150
Kegiatan Pengembangan Usaha	Jumlah UMKM yang dibina	50	UKM	75	UKM	150



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/dipasarkan di dalam & luar daerah	20	produk UKM/IKM	35	produk UKM/IKM	175
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase peningkatan layanan jasa administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag	100	%	100	%	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana SKPD	100	%	86,27	%	86,27
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang di latih	20	ASN	26	ASN	130
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi lintas sektor/SKPD/Pusat	8	Dokumen	8	Dok	100
	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD	7	Dokumen	7	Dok	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	2	Dokumen	1	Dok	50

1. Tahun 2022 terdapat 5 (lima) koperasi yang telah menjalin kemitraan yaitu :

- Koperasi Transportasi Angkasa Gorontalo, Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Nomor Badan Hukum 005994/BH/M.KUKM.2/X/2017
- Koperasi Konsumen Graha Usaha Mandiri, Kelurahan Paguyaman. Kecamatan Kota Tengah. Kota Gorontalo. Nomor Badan Hukum AHU-0001764.AH.01.26.TAHUN 2020
- Koperasi Konsumen Syariah El Madani Bappeda Provinsi Gorontalo. Kelurahan Tamalate. Kecamatan Kota Timur. Kota Gorontalo. Nomor Badan Hukum AHU-0009265.AH.01.26.TAHUN 2021
- KSU Samudera Jaya, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi. Kota Gorontalo.



Nomor Badan Hukum 40/BH/XXII/III/2016

- Koperasi Konsumen Cahaya Mitra Sejahtera, Nomor Badan Hukum AHU-0005342.AH.01.29.TAHUN 2022, Kel. Wonggaditi Timur, Kecamatan Kota Utara. Kota Gorontalo

Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2022 sebanyak 252 koperasi. Tahun 2021 : Koperasi yang menjalin kemitraan sebanyak 5 (lima) koperasi yaitu koperasi konsumen anugerah deheto mandiri, koperasi serba usaha samudra jaya, koperasi segala sagela, KPRI Wiyowa, KSP Tenan Mandiri. Dan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2021 sebanyak 221 koperasi.

2. Ditahun 2022 telah tersedia aplikasi sistem informasi data UMKM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo "SiapAku". Yang berisi tentang data UMKM se-Provinsi Gorontalo yang up-date
3. Perkembangan Koperasi Tahun 2022 mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.92**

Jumlah Koperasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022

No	Kabupaten / Kota	2021				2022			
		Aktif (Unit)	Tidak Aktif (unit)	Total Kop	R A T (unit)	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (unit)	Total Kop	R A T (unit)
1	KOTA GORONTALO	180	146	326	88	187	145	332	93
2	KAB. GORONTALO	346	76	422	64	351	76	427	67
3	KAB. BOALEMO	92	61	153	13	92	61	153	14
4	KAB. POHUWATO	101	37	138	6	101	37	138	18
5	KAB. BONE BOLANGO	100	57	157	25	103	57	160	31
6	KAB. GORONTALO UTARA	86	40	126	16	90	40	130	15
7	PROV. GORONTALO	52	13	65	9	61	13	74	14
	<b>JUMLAH</b>	<b>957</b>	<b>430</b>	<b>1.387</b>	<b>221</b>	<b>985</b>	<b>429</b>	<b>1.414</b>	<b>252</b>

Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu :

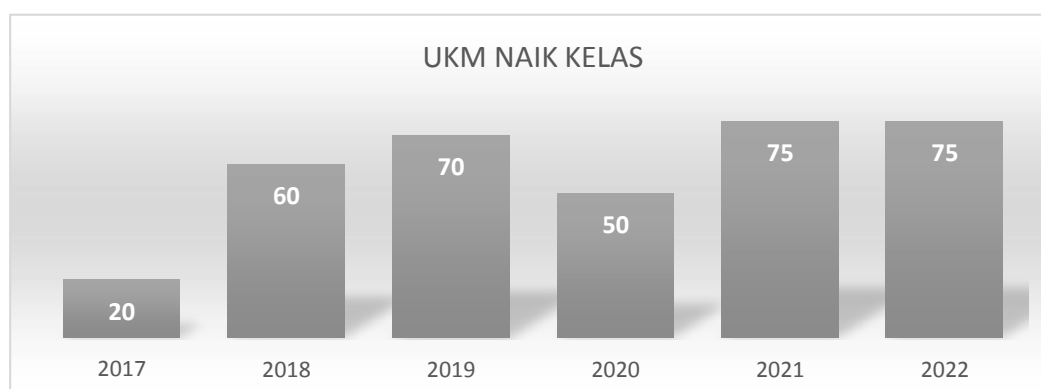
- a. Melaksanakan restrukturisasi usaha dan akses permodalan
- b. Membuka peluang usaha terhadap koperasi untuk membangun kemitraan lagi kepada seluruh stakeholder
- c. Memprogramkan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM melalui program stimulan dan bedah koperasi untuk pengembangan KUKM kedepan pasca pandemi covid-19

Tahun 2023 kemudahan-kemudahan tersebut mulai diberikan kepada pelaku usaha agar koperasi dapat menuju koperasi modern dan UKM Naik kelas.

Selang tahun 2017 – 2022 jumlah koperasi naik kelas terus mengalami kenaikan. Hal ini didorong oleh kegiatan-kegiatan antara lain coaching klinik, stimulan yang diberikan kepada UMKM. Adapun perkembangan jumlah ukm naik kelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Grafik 3.22**

Perkembangan UMKM Naik Kelas Provinsi Gorontalo 2017-2022



Ditahun 2020 jumlah UKM naik kelas ini mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya anggaran yang diberikan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan UKM.

4. Untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperas UKM Perindustrian dan perdagangan pada urusan koperasi di tahun 2022 mendapat tambahan anggaran melalui sumber dana DID yaitu :
  - Melalui sumber dana DID Periode 1, pada program/kegiatan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm), sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi sebesar Rp. 400.000.000,- yang diperuntukkan untuk bantuan ekonomi produktif bagi UMKM di Provinsi Gorontalo.



Untuk DID periode 1 ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2021.

Sumber dana DID Periode 2 sebesar Rp. 1.194.7907.874,- (mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022) yaitu pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperuntukkan untuk sarana/prasarana Art Gallery Dekranasda. ART galery untuk menampung, memasarkan dan mempromosikan produk-produk UKM/IKM. Art Gallery juga sebagai wadah untuk Mendukung perkembangan UMKM dengan memfasilitasi proses pemasarannya.

5. Jumlah revitalisasi koperasi di tahun 2022 belum tercapai disebabkan kan tidak adanya usulan dari kabupaten/kota untuk koperasi yang akan di revitalisasi. Beberapa koperasi tidak ada kesiapan dari koperasi untuk dibedah karena faktor internal. Sehingga untuk koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif ini hanya dilakukan pola pembinaan kepada para pengurusnya.
6. Pada urusan koperasi ini terdiri atas 6 (enam) program dan 10 kegiatan, 11 sub kegiatan. Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target fisik 100% yaitu :

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Realisasi fisik 86,27 %, Realisasi Keuangan 85,87 %.

Ketidakcapaian fisik ini dikarenakan ada item belanja yang tidak terealisasi yaitu :

- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (jasa KIR) sebesar Rp. 1.000.000,-. terealisasi pada Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (pajak STNK) sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Belanja modal kendaraan bermotor penumpang (kendaraan operasional dinas), senilai Rp. 700.00.000,-

Ketidakcapaian fisik ini dikarenakan untuk harga mobil plat merah masih menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk dirilis harganya sehingga belum dapat dicantumkan harganya pada E-katalog sehingga untuk proses pengadaannya tidak



dapat dilaksanakan hingga 31 Desember tahun 2022.

Belanja modal kendaraan bermotor penumpang ini teranggarkan melalui sumber dana DID Keuangan Tahun Berjalan Periode ke 2, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022).

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasi fisik 99.49 %, Realisasi Keuangan 93,88 %. Ketidakefektifan fisik ini dikarenakan item belanja Jasa keamanan (pengemudi) pada penambahan anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 5.478.000,- tidak di belanjakan sesuai nomor rekeningnya tapi tertagih pada rekening jasa tenaga pelayanan umum pada sehingga untuk penganggaran ini tidak ada realisasi fisik.

#### **6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022**

Tahun 2022 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak menerima penghargaan nasional.

#### **7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2022**

Tahun 2022 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo untuk Urusan Koperasi dan Usaha tidak melaksanakan perjanjian kerjasam/MOU.

## **12. Penanaman Modal**

### **1) Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan kegiatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo
- Meningkatkan akuntabilitaskinerja dan pelayanan prima DPM-ESDMT

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.93**

Target dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran</b> : <b>Meningkatnya Nilai Investasi</b>	<b>Indikator Sasaran</b> : - Persentase peningkatan realisasi investasi - Jumlah PMA/PMDN	20%	26.81%	20%	25.76%	134.05%
			2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	100%
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah realisasi investasi	11.345 Trilyun	14.475 Trilyun	10.145 Trilyun	11.473 Trilyun	127.59%
	Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah investor	100%	102.98%	98%	100%	102.98%
2	<b>Sasaran</b> : <b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja &amp; pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi</b>	<b>Indikator Sasaran</b> : Nilai LKIP DPM-ESDMT	90%	80.26%	85%	77.26%	89.18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

**2) Program dan Kegiatan**

**Tabel 3.94**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penanaman Modal Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>379.865.010</b>	<b>364.327.284</b>	<b>95.91</b>	<b>100</b>	<b>93.34</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	379.865.010	364.327.284	95.91	100	93.34	100
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	379.865.010	364.327.284	95.91	100	93.34	100
2	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>99.998.675</b>	<b>99.120.006</b>	<b>98.12</b>	<b>100</b>	<b>97.44</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	99.998.675	99.120.006	98.12	100	97.44	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	99.998.675	99.120.006	98.12	100	97.44	100
<b>3</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>815.073.527</b>	<b>724.213.781</b>	<b>88.85</b>	<b>100</b>	<b>92.90</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	815.073.527	724.213.781	88.85	100	92.90	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	149.956.527	149.680.677	99.82	100	94.75	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	438.666.824	364.506.191	83.09	100	94.75	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	226.450.176	210.026.913	92.75	100	88.24	100
<b>4</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>388.259.801</b>	<b>388.135.915</b>	<b>99.97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	388.259.801	388.135.915	99.97	100	100	100
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	388.259.801	388.135.915	99.97	100	100	100
<b>5</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>2.810.525.380</b>	<b>2.521.543.424</b>	<b>89.72</b>	<b>100</b>	<b>97.47</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	429.404.363	423.179.442	98.55	100	98.14	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	256.387.182	253.613.982	98.92	100	98.02	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.017.181	169.565.460	98.00	100	98.30	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	102.256.004	101.898.580	99.65	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi)	102.256.004	101.898.580	99.65	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.184.000	78.238.364	98.81	100	63.63	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.184.000	78.238.364	98.81	100	63.63	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	787.423.956	538.205.550	68.35	100	97.47	100
	Penyediaan Peralatan dan	787.423.956	538.205.550	68.35	100	97.47	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Perlengkapan Kantor						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.412.257.057	1.380.021.488	97.72	100	99.29	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.412.257.057	1.380.021.488	97.72	100	99.29	100
		<b>4.493.722.393</b>	<b>4.097.340.410</b>	<b>91.18</b>	<b>100</b>	<b>96.90</b>	<b>100</b>

1. Program Promosi Penanaman Modal

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan jumlah investor dengan capaian 100%.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 2 investor yang berminat yaitu :

- PT. Tri Sapta Jaya (Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk manusia) Jalan Raja Wadipala Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara.
- PT. Puncak Emas Gorontalo (Perusahaan Holding) Dusun Melati Kab. Pohuwato.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan jumlah investor sebesar 100%.

- 1) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Output kegiatan : tersusunnya 1 (satu) dokumen buku Peta Potensi Investasi Provinsi Gorontalo 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah potensi investasi di Provinsi Gorontalo terhadap komoditas unggulan daerah khususnya bidang pertanian berdasarkan data hasil survey di kabupaten/kota dengan basis kecamatan.

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Outcome dari program adalah Jumlah Realisasi Investasi sebesar Rp. 14.475.937.011.786 dari target Rp. 11.345.000.000.000 yang terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar Rp 3.588.744.482.758 dan PMDN sebesar Rp 10.887.192.529.028.

Realisasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 26,81% dari Target 20%, terlihat telah melebihi target yang di tetapkan.

- 1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Output Kegiatan adalah sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) PMA/PMDN



yang telah dipantau, dibina dan diawasi.

- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Output sub kegiatan : 2 Perusahaan PMA/PMDN yang di pantau dibina dan diawasi dengan realisasi 93 PMA/PMDN.

- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)

Output sub kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, sebanyak 350 Pelaku Usaha.

- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)

Output sub kegiatan : Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, sebanyak 54 kali pengawasan.

#### 4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Outcome dari program adalah Jumlah Realisasi Investasi sebesar Rp. 14.475.937.011.786,- dari target Rp. 11.345.000.000.000,- yang terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar Rp 3.588.744.482.758,- dan PMDN sebesar Rp 10.887.192.529.028.

Realisasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 26,81% dari Target 20%, terlihat telah melebihi target yang di tetapkan.

##### 1) Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Output Kegiatan adalah 1.275 Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan yang terdiri atas izin di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 29 izin, sektor perikanan dan kelautan sebanyak 534 izin, sektor Perindustrian sebanyak 446 izin, sektor Perdagangan sebanyak 14 izin, sektor Perhubungan sebanyak 41 izin, sektor Kesehatan sebanyak 15 izin, sektor Pendidikan sebanyak 1 izin, sektor Pariwisata sebanyak 61 izin, sector Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Sistem & Transaksi Elektronik sebanyak 1 izin, sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 60 izin, sektor ESDM sebanyak 71 izin, dan sektor PUPR sebanyak 2 izin.

Dari target 520 izin dengan realisasi 1.275 izin, terlihat telah melebihi target yang di tetapkan.



#### 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase pelaksanaan perencanaan evaluasi monitoring dan pelaporan serta Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kepegawaian 100%.

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah 20 sarana prasarana yang tersedia dan 100% tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana.

2) Kegiatan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah

Output kegiatan adalah 6 Jasa kantor yang tersedia tepat waktu dan 100% administrasi UPT BLK tertata dengan baik.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana 100%.

4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah 1 dokumen laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dan 100% tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan.

5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output sub kegiatan : - 3 Dokumen Perencanaan

- 1 Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

- 1 Kegiatan Review Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja

Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output sub kegiatan : 5 Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
- Laporan Bulanan
- Laporan Hasil Evaluasi Renja

Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat BB dengan nilai 80,26 dari target nilai 90, namun AKIP 80,26 merupakan nilai tertinggi dari seluruh SKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2022.

**Grafik 3.23**

Nilai SAKIP Dinas PMESDMT Provinsi Gorontalo



### 3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : dalam pencapaian target urusan penanaman modal tahun 2022, antara lain rendahnya realisasi investasi bidang PMA/PMDN :

- Berkurangnya proyek investasi yang beroperasi/berjalan karena pandemi Covid-19.
- Kurangnya pemahaman dan kesadaran pada pelaku usaha dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Terdapat beberapa proyek investasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai izin yang telah didapat oleh pelaku usaha.
- Kelembagaan Penanaman Modal dan PTSP dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya (tidak sesuai dengan permendagri Nomor 100 tahun 2016).
- Kurangnya promosi oleh dinas baik secara regional, nasional dan internasional.
- Terbatasnya jumlah aparatur pendukung pelayanan perizinan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Lokasi kantor perizinan yang terletak di luar ibu kota provinsi dan status kantor pinjam.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha terhadap system pelayanan perizinan berbasis IT.

Solusi : Dalam pencapaian target dan peningkatan kinerja urusan penanaman modal,



Belum maksimal pelaksanaan pelayanan perizinan/pelayanan investor yang menggunakan OSS

- Pengawasan dan pembinaan terhadap realisasi investasi pada setiap kegiatan investasi harus terus ditingkatkan agar capaian realisasi investasi cepat tercapai sesuai target.
- Untuk mengurangi mal administrasi terhadap investor akibat regulasi yang tumpah tindih dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait di tingkat pusat dan instansi vertikal/OPD teknis terkait di daerah.
- Peningkatan koordinasi kepemerintah pusat terhadap penerbitan dan ketentuan teknis yang harus dilengkapi oleh pemohon izin sektor pertambangan perlu dilakukan secara intensif.
- Pada APBD Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi 2023 sebaiknya dialokasikan anggaran untuk tim teknis pada OPD terkait, Satgas percepatan investasi dan promosi potensi investasi.
- Perlu dibentuk Satgas Percepatan Investasi yang terdiri atas berbagai unsur/pihak terkait yang tujuannya untuk menyelesaikan debottlenecking yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya.
- Promosi terhadap berbagai potensi investasi yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo.
- Perubahan struktur OPD Kelembagaan Penanaman Modal dan PTSP (sesuai dengan permendagri Nomor 100 tahun 2016).
- Mengembangkan promosi dengan menggunakan TI.
- Meningkatkan pelatihan terhadap aparatur pendukung pelayanan perizinan.
- Relokasi PTSP kepusat kota.
- Sosialisasi dan meningkatkan kapasitas aparatur FO dalam membantu layanan perizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- Sosialisasi/Workshop LKPM kepada para calon usaha.



**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.95**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal  
 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	20%	26.81%	20%	25.76%
2	Jumlah PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN

Dari data diatas terlihat bahwa persentase peningkatan realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar 26,81% dari target 20%. Terlihat telah melebihi target yang ditetapkan.

**5) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Piagam penghargaan diberikan kepada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai :

- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mendapat predikat Pelayanan PRIMA dengan nilai 4,52%. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Nominasi 2022 sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha di Daerah dengan nilai 95,50 oleh Kemeterian Investasi/BKPM
- Menerima Penghargaan Terbaik ke 3 (tiga) dalam rangka Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pengelola Keuangan Terbaik
- Hasil Penilaian MCP oleh KPK-RI dengan nilai 99,60%

**6) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2022**

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Urusan Penanaman Modal tidak melakukan perjanjian Kerjasama/MOU.

### 13. Kepemudaan dan Olahraga

#### 1) Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022

- Peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga

##### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.96**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatnya prestasi, produktifitas dan kemandirian pemuda</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - Pemuda yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	150 Org	750 Org	51.242 Org	51.242 Org	500%
		- Pembinaan kelompok usaha pemuda Produktif	7 kelompok	17 Kelompok	-	-	242.86%
		Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda dan olahraga yang dibina	791 Org	905 Org	791 Org	905 Org
		Pembinaan kelompok usaha pemuda Produktif	7 Kelompok	17 Kelompok	-	-	242.86%
		Pemuda yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	150 Org	750 Org	51.242 Org	51.242 Org	500%
2	<b>Sasaran : Meningkatnya Pembinaan dan prestasi olahraga</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - Medali Tertimbang Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Internasional	8 Medali	35 Medali	8 Medali	12 Medali	437.5%
		- Pelestarian Olahraga Tradisional	4 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	75%
		Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda dan olahraga yang dibina	791 Org	905 Org	791 Org	859 Org

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.97**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>1.096.212.508</b>	<b>1.080.969.312</b>	<b>98.61</b>	<b>100</b>	<b>94.23</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	907.234.557	898.483.398	99.04	100	95.76	100
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	188.977.951	182.485.914	96.56	100	87.06	100
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>10.063.235.515</b>	<b>10.046.360.884</b>	<b>99.83</b>	<b>100</b>	<b>98.67</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.811.070.408	1.803.373.670	99.58	100	99.83	100
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	1.478.203.728	1.476.248.233	99.87	100	98.32	100
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	6.773.961.379	6.766.738.981	99.89	100	98.55	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.159.448.023</b>	<b>11.127.330.196</b>	<b>99.71</b>	<b>100</b>	<b>98.31</b>	<b>100</b>

### 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Outcome dari program adalah terlaksananya pengembangan kapasitas pembinaan pemuda dan olahraga.

#### 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.

Output : Jumlah Peserta Paskibraka terdiri dari 1 kegiatan yang terdiri Peserta Paskibraka 112 Orang dan TNI/Polri.





2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

Output : jumlah peserta PPAN, PPAP, Festival kreatifitas Pemuda sebanyak 90 orang.

2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Outcome dari program adalah Terlaksananya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha.

Output : peserta yang mengikuti kompetisi olahraga rekreasi tingkat provinsi dan tingkat nasional.

2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional

- Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi.

Output : jumlah atlet yang dibina di PPLP sebanyak 60 orang.

3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- Sub Kegiatan : Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait.

Output : jumlah atlet yang mengikuti kompetisi sesuai cabang olahraga yang dibina.

## 2) Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan :

1. Program Pembinaan dan Pemuda Olahraga :

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi



- Adanya otonomi daerah sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2015, bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan olahraga pendidikan. Diantaranya kenakalan pelajar meningkat termasuk kebugaran rendah, olahraga belum menjadi gaya hidup lagi akibat pengaruh kemajuan teknologi (adanya games, media sosial, Internet dan lain-lain), kurangnya fasilitas untuk PJOK dan ekstrakurikuler olahraga, serta kurangnya aktivitas fisik/olahraga untuk pelajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa usia 10-12 Tahun Se-Kota Gorontalo tingkat kesegaran jasmani dalam kondisi kurang. (sumber data : Syarif Hidayat Program Studi PKO, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo).  
Belum didukung sepenuhnya dengan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program kegiatan, hal ini menyebabkan program kegiatan yang ada hanya dalam mempersiapkan berupa keikutsertaan pada event tingkat nasional seperti Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional dan Pekan Olahraga Tingkat Nasional.

**Solusi :**

1. Program Pembinaan dan Pemuda Olahraga :
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
    - Perlunya kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lembaga terkait dalam mendukung serta pengembangan olahraga disatuan pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA/SMK dan SLB, guna mencapai target sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 4 yakni keolahragaan bertujuan untuk :
      - 1) Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
      - 2) Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas,



kompetitif, dan disiplin;

- 3) Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) Memperkukuh ketahanan nasional;
- 5) Mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- 6) Menjaga perdamaian dunia.

Maka diperlukan :

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam mensupport serta melakukan edukasi melalui satuan pendidikan tentang pentingnya olahraga bagi peserta didik;
2. Penyediaan sarana dan prasarana baik di satdik maupun sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat pada ruang publik;
3. Penyiapan tendik yang memenuhi standart PJOK;
4. Kesiapan dalam setiap event regional/nasional maupun internasional.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.98**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pemuda dan Olahraga yang dibina	791 Org	905 Org	791 Org	905 Org

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Dalam rangka mendorong pembangunan kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menyajikan data Indeks pembangunan pemuda sebagai alat ukur pembangunan pemuda berdasarkan 5 domain dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan serta Gender dan Diskriminasi. Tahun 2021 pada Indeks Pembangunan Kepemudaan berada pada angka 53,17 persen, sedikit lebih rendah dari Nasional sebesar 53,33 persen, dengan indikator pembentuk Indeks pembangunan kepemudaan sebagai berikut :



**Tabel 3.99**

Indeks Pembangunan Kepemudaan Nasional dan Provinsi Tahun 2022

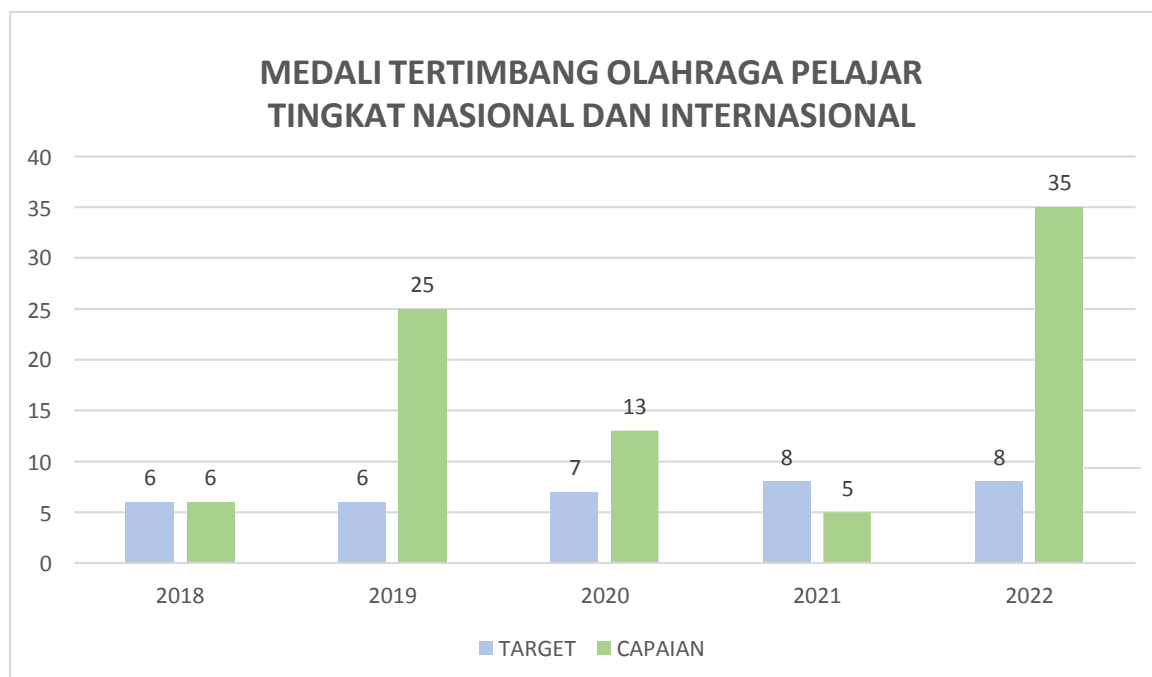
No	Indikator	Nasional	Provinsi
1	Pendidikan Pemuda	70,00	66,67
2	Kesehatan dan Kesejahteraan Pemuda	60,00	62,50
3	Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda	40,00	40,00
4	Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	43,33	46,67
5	Gender dan Diskriminasi Pemuda	53,33	50,00
6	Indeks Pembangunan Pemuda	53,33	53,17

Sumber : Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2022

Capaian pembangunan bidang olahraga, dilihat dari jumlah medali tertimbang yang diperoleh. Tahun 2022, jumlah perolehan medali sebanyak 35 medali, jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya dan dari target yang ditetapkan sebanyak 8 medali. Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan peningkatan kapasitas bidang olahraga, pelatihan pemberian Hibah terhadap KONI.

**Grafik 3.24**

Medali Tertimbang Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Internasional Provinsi Gorontalo



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2022



**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

- Sebagai peserta terbaik 1 pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Surakarta
- Sebagai peserta terfavorit pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Surakarta.
- Peringkat III Kategori Kriya Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 atas nama Abdul Aziz M. Hamim.
- Juara Favorit Kategori Musik Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 atas nama Siti Citra Afida Tolinggi.
- Juara Favorit Kategori Kuliner Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 atas nama Usman Kadir.
- Medali Emas, Medali Perak dan Medali Perunggu Cabang Olahraga Sepaktakraw pada Pelaksanaan Sea Games Tahun 2022 di Hanoi Vietnam.
- Medali Perak Cabang Olahraga Taekwondo pada Pelaksanaan Sea Games Tahun 2022 di Hanoi Vietnam.

**14. Kebudayaan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tahun 2022**

- Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.100**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya	Indikator Sasaran : - Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	3 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	133.33%
		- Jenis benda bersejarah tersimpan di Museum	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis (480 Koleksi)	8 Jenis (480 koleksi)	100%
	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya	3 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	133.33%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
		Gorontalo					
		Jenis benda bersejarah tersimpan di Museum	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis (480 Koleksi)	8 Jenis (480 Koleksi)	100%
		Presentase Nilai Budaya yang dikembangkan	12.67%	19%	12.67%	19%	149.96%
<b>2</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya peran bahasa daerah</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - <b>Dokumen budaya daerah Gorontalo</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>17 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>566.67%</b>
		- <b>Judul Buku cerita rakyat Gorontalo yang diterbitkan</b>	<b>1 Judul</b>	<b>5 Judul</b>	<b>1 Judul</b>	<b>1 Judul</b>	<b>500%</b>
	Program Pengembangan Kebudayaan	Dokumen budaya daerah Gorontalo	3 Jenis	17 Jenis	3 Jenis	5 Jenis	566.67%
		Judul Buku cerita rakyat Gorontalo yang diterbitkan	1 Judul	5 Judul	1 Judul	1 Judul	500%
		Presentase Nilai Budaya yang dikembangkan	12.67%	19%	12.67%	19%	149.96%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.101**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kebudayaan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>480.266.712</b>	<b>478.445.581</b>	<b>99.62</b>	<b>100</b>	<b>92.19</b>	<b>92.19</b>
	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	480.266.712	478.445.581	99.62	100	92.19	92.19
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>946.863.820</b>	<b>946.217.366</b>	<b>99.93</b>	<b>100</b>	<b>92.94</b>	<b>92.94</b>
	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	946.863.820	946.217.366	99.93	100	92.94	92.94
<b>3</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>351.783.566</b>	<b>351.153.206</b>	<b>99.82</b>	<b>100</b>	<b>98.09</b>	<b>98.09</b>
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	351.783.566	351.153.206	99.82	100	98.09	98.09
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>	<b>2.897.121.877</b>	<b>2.730.018.367</b>	<b>94.23</b>	<b>96.36</b>	<b>91.07</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	2.897.121.877	2.730.018.367	94.23	96.36	91.07	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.676.035.975</b>	<b>4.505.834.520</b>	<b>96.36</b>	<b>100</b>	<b>94.25</b>	<b>100</b>



1. Program Pengembangan Kebudayaan

Outcome dari program adalah Persentase Nilai Budaya yang dikembangkan.

1. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Output : Jumlah Dokumen yang tersusun dan diakui secara nasional dan internasional sebanyak 5 dokumen (upiya karanji, elengge, longgo, tili ayah, ilabulo).

- Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

Output : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Outcome dari program adalah jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan.

1) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

Output : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional.

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Outcome dari program adalah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola.

1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

- Sub Kegiatan : Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya.

Output : Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya.

- Sub Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya

Output : Penetapan Cagar Budaya

4. Program Pengelolaan Permuseuman

Outcome dari program adalah terlaksananya pelindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu serta peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap Museum.

1) Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi

- Sub Kegiatan : Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu.



Output : Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan.

- Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman.

Output : jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman.

- Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum.

Output : jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum

- Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum.

Output : jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan :**

1. Program Pembinaan Kebudayaan :
2. Beberapa Program Kegiatan (pertunjukan dan event) sudah bisa dilaksanakan, hanya saja menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
3. Bantuan terhadap komunitas budaya dan pelaku seni dalam rangka pemberdayaan dan pemanfaatan belum bisa dilaksanakan
4. Kesesuaian dalam pengelolaan cagar budaya yang belum optimal dengan anggaran yang sangat minim
5. Belum terpenuhi sumber daya manusia (ahli cagar budaya) yang ada di kab/kota

#### **Solusi :**

1. Fasilitasi kegiatan pertunjukan dan event tetap dilaksanakan dengan mengacu pada prokes covid 19.
2. Beberapa mata anggaran yang sudah tidak ada agar dapat dikembalikan lagi dalam rangka pembinaan dan pelestarian yg maksimal.





**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.102**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan  
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	3 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	1 Jenis
2	Jenis Benda Bersejarah tersimpan di Museum	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis (480 Koleksi)	8 Jenis (480 koleksi)
3	Dokumen Budaya Daerah Gorontalo	3 Jenis	17 Jenis	3 Jenis	5 Jenis

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Nilai indeks pembangunan kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 47,14 persen, masih dibawah rata-rata Nasional sebesar 51,90 persen (Tahun 2022 data IPK belum dirilis).

**Grafik 3.25**

Jumlah Pengakuan Nasional Terhadap Karya Seni Budaya Gorontalo Tahun 2022



Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2022

**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Terdapat 4 (empat) jenis karya Seni Budaya Gorontalo yang mendapatkan penghargaan nasional yang terdiri dari : Amongo, Longgo, Wunungo, Mongubingo.

**15. Perpustakaan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan minat baca masyarakat dan menyediakan akses informasi yang bermutu
- Meningkatkan tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga pustakawan

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.103**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Tersedianya tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga pustakawan sejumlah 280 orang	Indikator Sasaran : Jumlah tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga pustakawan	60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	100%
	Sasaran : Meningkatnya minat baca masyarakat sebanyak 107.000 orang dan tersedianya akses informasi yang bermutu sebanyak 10.500 eksemplar buku, 3.250 judul buku	Indikator Sasaran : Jumlah pemustaka yang mengunjungi layanan perpustakaan	22.500 Pemustaka	45.629 Pemustaka	22.000 Pemustaka	1.914 Pemustaka	202.7%
	Program Pembinaan Perpustakaan	Presentasi partisipasi Masyarakat dan Siswa Dalam Kegiatan Gemar Membaca	100%	100%	100%	99.51%	100%
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Karya Cetak dan Bibliografi /Katalog Induk Daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah	100%	100%	100%	89.04%	100%

**2) Program dan Kegiatan**

**Tabel 3.104**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	228.658.511	228.060.323	99.74	100	99.51	100
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	35.646.416	35.204.532	98.76	100	90.68	100
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	193.012.095	192.855.791	99.92	100	99.80	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
			<b>2</b>	<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>	<b>11.336.092</b>	<b>11.335.004</b>	<b>99.99</b>
	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di daerah Provinsi	11.336.092	11.335.004	99.99	100	89.04	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>239.994.603</b>	<b>239.395.327</b>	<b>99.75</b>	<b>100</b>	<b>99.19</b>	<b>100</b>

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Outcome dari program adalah Presentasi partisipasi Masyarakat dan Siswa Dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.

Output Sub Kegiatan : Rapat awal kegiatan, Identifikasi dan verifikasi tenaga pustakawan, bimtek

2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Output Sub Kegiatan : Layanan Perpustakaan keliling, Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan inklusi di desa-desa.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Outcome dari program adalah Jumlah Karya Cetak dan Bibliografi /Katalog Induk Daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah.

1) Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Output Sub Kegiatan : Identifikasi BID dan KID, Pendataan KID dan BID, Cetak bibliografi dan katalog induk daerah.



### 1) Permasalahan dan Solusi

#### a. Program Pembinaan Perpustakaan

Permasalahan : Kurangnya Koleksi Buku baik bentuk fisik maupun digital, kurangnya sarana dan prasarana pendukung layanan perpustakaan, kurangnya tenaga perpustakaan.

Solusi : Pengadaan buku baik fisik maupun digital, pengadaan sapsras penunjang layanan perpustakaan, lebih mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat melalui Pocadi ((Pojok baca digital)

#### b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Permasalahan : Kurangnya koleksi naskah kuno, kurangnya karya-karya tulis ataupun pengarang daerah yang meyerahkan hasil karyanya kepada perpustakaan daerah.

Solusi : Melakukan penelusuran atau pencarian naskah-naskah kuno, melakukan sosialisasi kepada pengarang buku dan penerbit buku.

### 2) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022

**Tabel 3.105**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan sekolah dan pustakawan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
2	Jumlah pemustaka yang mengunjungi layanan perpustakaan	22.500 Pemustaka	45.629 Pemustaka	22.000 Pemustaka	37.728 Pemustaka

### 3) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

- Dari jumlah Pemustaka sebanyak 45.629 dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu kategori masyarakat atau umum sebanyak 5.436 pemustaka dan kategori pelajar sebanyak 40.193 pemustaka.
- Indeks Pembagunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2021 sebesar 22,53 naik menjadi 57,92 pada tahun 2022 sedangkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 56,58 naik menjadi 58,72 pada tahun 2022.



**16. Kearsipan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo**

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.106**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Terwujudnya penataan arsip yang bernilai guna sebanyak 60 OPD dan sebanyak 136 SMA/SMK/MA sederajat	Indikator Sasaran : Jumlah SDM (390) peserta Aparatur yang memahami pengelolaan kearsipan berbasis TIK	78 Org	78 Org	78 Org	78 Org	100%
		Jumlah OPD yang melakukan penataan kearsipan	12 OPD 27 SMA/SMK/MA	12 OPD	18 OPD	18 OPD	100%
2	Sasaran : Terwujudnya upaya penelusuran, penyelamatan, penduplikasian sebanyak 1.000 dokumen	Indikator Sasaran : Jumlah arsip statis dan dinamis yang dikelola, diselamatkan dan dilakukan pemusnahan	200 Dok/Arsip	200 Dok/Arsip	200 Dok/Arsip	200 Dok/Arsip	100%
	Program Pengelolaan Arsip	Presentase penataan arsip statis dan dinamis	100	100	100	99.63	100%
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Presentase penataan arsip statis dan dinamis	100	100	100	100	100

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.107**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kearsipan  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>240.986.784</b>	<b>240.417.478</b>	<b>99.76</b>	<b>100</b>	<b>99.63</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Provinsi	72.017.962	71.813.226	99.72	100	99.34	100
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	168.968.822	168.604.252	99.78	100	99.92	100
<b>2</b>	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>97.011.462</b>	<b>96.933.670</b>	<b>99.92</b>	<b>100</b>	<b>99.99</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	97.011.462	96.933.670	99.92	100	99.99	100
<b>3</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>9.460.946.455</b>	<b>9.404.592.610</b>	<b>99.40</b>	<b>100</b>	<b>91.89</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.087.153.260	1.083.473.348	99.66	100	94.79	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	635.598.658	634.705.500	99.86	100	97.67	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360.752.539	360.688.065	99.98	100	99.97	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.377.441.998	7.325.725.697	99.30	100		
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.798.944.701</b>	<b>9.741.943.758</b>	<b>99.42</b>	<b>100</b>	<b>92.01</b>	<b>100</b>

### 1. Program Pengelolaan Arsip

Outcome dari program adalah Presentase penataan arsip statis dan dinamis.

#### 1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Output Sub Kegiatan : Menyiapkan SK Gubernur pengelola arsip seluruh OPD,

Melakukan Bimtek, Pendampingan kepada pengelola arsip



OPD, Monev.

2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

Output Sub Kegiatan : Penelusuran arsip, pengelolaan arsip statis, penyimpanan arsip, penduplikasian arsip, pembuatan daftar arsip.

2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Outcome dari program adalah Presentase perlindungan dan penyelamatan dan pemusnahan arsip.

1) Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun.

Sub Kegiatan : Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun.

Output Sub Kegiatan : Jumlah OPD Provinsi Gorontalo Yang Melakukan Penyusunan JRA dan Akuisisi Arsip.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur
- Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi monitoring dan pelaporan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Pembayaran honor PTT, Pelaksanaan rapat, Pelayanan surat menyurat, pembayaran biaya operasional kantor.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

3) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan : Dokumen Renstra, Renja, LPPD, Lakip dan dokumen perencanaan lainnya.

4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Output Sub Kegiatan : Penatausahaan keuangan, laporan keuangan,





pengadministrasian tagihan keuangan.

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Program Pengelolaan Arsip**

Permasalahan : Sering bergantinya personil pengelola arsip di setiap OPD, Kurangnya tenaga arsiparis dalam melakukan pendampingan kepada setiap OPD, Belum adanya Depo Arsip, Tidak adanya honor pengelola arsip setiap OPD sehingga tidak tuntasnya pekerjaan.

Solusi : Harus adanya komitmen Kepala OPD untuk tidak melakukan mutasi bagi pengelola arsip yang sudah melakukan bimtek.

#### **b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Permasalahan : Belum adanya tempat yang representative untuk penyimpanan arsip, kurangnya anggaran penelusuran arsip, kurangnya kepedulian OPD dalam pengelolaan arsip.

Solusi : Pembangunan Depo arsip agar tersedianya tempat yang representative untuk penyimpanan dokumen arsip.

#### **c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Permasalahan : kurangnya anggaran pengadaan barang untuk penunjang pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

Solusi : Melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan untuk menyiapkan honor bagi pengelola arsip OPD.



**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.108**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Tahun 2022  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah SDM Aparatur Yang Memahami Pengelolaan Kearsipan Berbasis TIK	78 Peserta	78 Peserta	78 Peserta	78 Peserta
2	Jumlah OPD yang melakukan penataan kearsipan	12 OPD 27 SMA/SMK/MA	12 OPD	12 OPD 27 SMA/SMK/MA	12 OPD
3	Jumlah arsip statis dan dinamis yang dikelola, diselamatkan dan dilakukan pemusnahan	200 Dok/Arsip	200 Dok/Arsip	200 Dok/Arsip	200 Dok/Arsip

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola sebanyak 1.487 Arsip
- Jumlah Arsip Inaktif sebanyak 228 Arsip
- Arsip Statis sampai dengan saat ini sejumlah 796 Arsip
- Arsip Foto sejumlah 321 Arsip
- Arsip Video / Film sebanyak 3 Arsip
- Arsip Inaktif diatas 10 Tahun sebanyak 11.000 Arsip

**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menerima penghargaan nasional di Tahun 2022 sebagai juara 12 sebagai pengelola arsip terbaik.

**I. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan**

**1. Kelautan dan Perikanan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan Yang Akan Dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

- Mewujudkan ketahanan pangan dengan peningkatan produksi perikanan
- Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Dengan Peningkatan Nilai



Tukar Nelayan, Pembudidaya (NTN-Pi).

Untuk mengukur kedua tujuan tersebut, maka ada dua indikator yang menjadi instrument pengukuran yaitu :

- Nilai pertumbuhan produksi perikanan dan konsumsi ikan (%).
- Nilai pertumbuhan nilai tukar nelayan, pembudidaya (NTN-Pi) (%)

**b. Sasaran dan Program**

Untuk mencapai tujuan dan indikator tujuan yang diharapkan maka perlu menetapkan sasaran dan indikator kinerja sasaran yang akan di capai. Sasaran dan indikator kinerja sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran yang akan dicapai untuk mencapai tujuan dan indikator tujuan pertama dan kedua adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap; Produksi perikanan budidaya; konsumsi ikan; Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di Kelola.
2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan daya saing produk hasil perikanan.

Indikator kinerja sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dari 121.122 ton pada tahun 2018 menjadi 129.817 ton pada tahun 2022.
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau dari 28,307 ton pada tahun 2018 menjadi 29.124 ton pada tahun 2022.
3. Peningkatan produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan dari 10 juta ekor pada tahun 2018 menjadi 18 juta ekor pada tahun 2022.
4. Peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat dari 55.3 kg/kapita/tahun pada tahun 2018 menjadi 59.9 kg/kapita/thn pada tahun 2022.
5. Peningkatan persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap perundang-undangan yang berlaku dari 72 % pada tahun 2018 menjadi 86 % pada tahun 2022.
6. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola dari 390 Ha pada tahun 2018 menjadi 11.196 Ha pada tahun 2022.

7. Peningkatan pendapatan nelayan dari Rp. 2.784.510,- per bulan pada tahun 2018 menjadi Rp. 4.211.837 per bulan pada tahun 2022.
8. Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau dari Rp. 2.587.500 per bulan pada tahun 2018 menjadi 4.097.973 per bulan pada tahun 2022.
9. Peningkatan Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dari Rp. 3.452.700 per bulan menjadi Rp. 4.262.835 per bulan pada tahun 2022.
10. Peningkatan produksi ikan yang di antar pulau/daerah atau ekspor dari 1.994 Ton pada tahun 2018 menjadi 2.518 Ton pada tahun 2022.

**Tabel 3.109**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan produksi perikanan tangkap; Produksi perikanan budidaya; konsumsi ikan ; Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku & Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola	<b>Indikator Sasaran :</b> - Produksi Perikanan Tangkap (Ton) - Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (Ton) - Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (Juta/ekor) - Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapt/thn) - Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%) - Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	129.817	132.051 26	126.651	132.225	101.50
			29.124	30.855	28.830	31.713	105.94
			18	18.11	15	31	100.61
			59.9	64.34	58.4	65.54	107.41
			86	86	82	83.64	100
			11.196	76.529,3 4	9.228	2.264,13	684
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	129.817	132.051 6	126.651	132.225	101.50
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (ton)	29.124	30.855	28.830	28.830	105.94
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD BPBLP)	Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (juta/ekor)	18	18.11	15	31	100.61
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapt/thn)	59.9	64.34	58.4	65.54	107,41
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Persentase kepatuhan (compliance)pelaku usaha KP	86	86	82	83,64	100

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	dan Perikanan	terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	11.196	76.529,34	9.228	2.264,13	684
<b>2</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan daya saing produk hasil perikanan</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> - <b>Pendapatan Nelayan (Rp./bln)</b> - <b>Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/bln)</b> - <b>Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Rp./bln)</b> - <b>produksi ikan yang di antar pulau/antar daerah atau ekspor (Ton)</b>	<b>4.211.837</b>	<b>4.464.547</b>	<b>3.641.883</b>	<b>3.896.815</b>	<b>106</b>
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendapatan nelayan (Rp./bln)	4.211.837	4.464.547	3.641.883	3.896.815	106
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/bln)	4.097.973	4.302.871	3.487.637	3.627.142	105
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Rp./bln)	4.262.835	4.859.577	3.956.228	4.154.039	114
		Produksi ikan yang di antar pulau/daerah/ekspor (Ton)	2.518	2.689	2.375	4.325	106,77

## 2) Program dan Kegiatan

Alokasi Anggaran APBD dan APBD-P TA. 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo sejumlah **Rp. 48.866.763.551,-** yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 10.953.569.716,00,-** (berupa belanja gaji dan tunjangan pegawai yang dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo) dan Belanja Langsung sebesar Rp. **37.913.193.835,-**

Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo) pada tahun 2022 memperoleh alokasi belanja langsung dana APBD dengan jumlah sebesar Rp. 48.866.763.551,- terbilang (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan rata-rata capaian realisasi fisik sebesar 95,42% dan realisasi keuangan sebesar 88,81% (Rp. 43.397.036.659), dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.110**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>16.960.506.080</b>	<b>16.154.929.192</b>	<b>95,25</b>	<b>100</b>	<b>77,42</b>	<b>95,52</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	673.005.584	656.166.360	97,50	100	76,01	95,79
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	479.759.958	463.273.723	96,56	100	90,46	92,99
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.245.626	192.892.637	99,82	100	88,13	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.103.569.771	10.614.431.613	95,59	100	88,13	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.953.569.716	10.464.810.963	95,54	100	94,30	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	150.000.055	149.620.650	99,75	100	91,72	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.024.000	117.796.640	94,98	100	97,79	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	124.024.000	117.796.640	94,98	100	97,79	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.237.449.555	2.148.796.221	96,04	100	95,86	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.237.449.555	2.148.796.221	96,04	100	95,86	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.822.457.170	2.617.738.358	92,75	100	99,81	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.822.457.170	2.617.738.358	92,75	100	98,63	100
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>22.372.276.712</b>	<b>18.100.388.487,65</b>	<b>80,91</b>	<b>91,14</b>	<b>99,42</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.845.646.964	3.422.618.760	89,00	98,35	94,49	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	363.577.355	358.291.990	98,55	100	95,31	95,95
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.482.069.609	3.064.326.770	88,00	98,18	95,71	100
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap	400.918.935	389.095.292	97,05	100	95,26	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						
	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	225.243.493	215.193.092	95,54	100	99,97	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30GT	175.675.442	173.902.200	98,99	100	99,97	100
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.125.710.813,00	14.288.674.435,65	78,83	89,42	93,77	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	17.358.256.554	13.555.474.321	78,09	89,02	94	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	767.454.259	733.200.115	95.54	100	82,18	100
<b>3</b>	<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>757.599.496</b>	<b>742.202.972</b>	<b>97,97</b>	<b>100</b>	<b>90,08</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	757.599.496	742.202.972	97,97	100	90,08	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	183.238.662	178.802.822	97,58	100	90,08	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	230.842.256	226.248.700	98,01	100	99,62	100
	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	343.518.578	337.151.450	98,15	100	99,75	100
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>2.929.576.399</b>	<b>2.909.980.367</b>	<b>99,33</b>	<b>99,76</b>	<b>97,79</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2.929.576.399	2.909.980.367	99,33	99,76	97,79	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	191.262.254	190.646.950	99,68	100	95,86	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan	1.033.213.000	1.030.548.043	99,74	100	99,81	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	799.035.720	794.765.674	99,47	100	98,63	100
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	586.000.000	578.291.000	98,68	98,80	99,42	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	320.065.425	315.728.700	98,65	100	94,49	100
<b>5</b>	<b>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>1.184.107.562</b>	<b>1.130.415.929</b>	<b>95,47</b>	<b>99,99</b>	<b>95,31</b>	<b>95,95</b>
	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	824.243.614	819.900.929	99,47	100	95,71	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	824.243.614	819.900.929	99,47	100	95,71	100
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	359.863.948	310.515.000	86,29	99,97	82,18	100
	Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	359.863.948	310.515.000	86,29	99,97	82,18	100
<b>6</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>4.662.697.302</b>	<b>4.359.119.710</b>	<b>93,49</b>	<b>96,38</b>	<b>90,08</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2.741.263.047	2.542.066.258	92,73	93,97	90,08	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2.585.833.797	2.387.263.549	92,32	93,62	99,62	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	155.429.250	154.802.709	99,60	99,82	99,75	100
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.921.434.255	1.817.053.452,90	94,57	99,83	99,65	100
	Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.526.743.120	1.468.045.745,90	96,16	99,78	97,79	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	394.691.135	349.007.707	88,43	100	97,79	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.866.763.551</b>	<b>43.397.036.659</b>	<b>88.81</b>	<b>95.42</b>	<b>91.12</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Terciptanya Pelayanan Peralatan dan Jasa Peralatan Perkantoran yang Prima, Meningkatnya SDM Aparatur di Bidang Kepegawaian, Pengelolaan Barang (Aset), Tersedianya Dokumen Perencanaan, dan Dokumen Monitoring / Evaluasi dengan persentase capaian 100%.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output dari kegiatan adalah Adanya Dokumen Perencanaan, dan Dokumen Monitoring / Evaluasi Pelaksanan Program / Kegiatan Serta Sistem dan Pelaporan Yang Baik dan Terciptanya pelayanan administrasi keuangan yang prima dan profesional,

Tersedianya SDM (Aparatur) Keuangan yang professional.

- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Output Sub Kegiatan : terlaksananya kegiatan koordinasi program dan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun. Dokumen yang tersusun dalam sub kegiatan ini sebanyak 6 dokumen dengan rincina sebagai berikut 1) Rencana Kerja TA. 2022, 2) RKA, 3) DPA, 4) LRA, 5) Laporan Aset, dan 6) Teppa. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.
- Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Output Sub Kegiatan : terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun. Tersusunnya dokumen Laporan Monev Program/Kegiatan Tahun 2022 sebanyak 6 Dokumen yaitu 1) Dokumen LAKIP, 2) LPPD, 3) LKPJ, 4) Laporan Realisasi Kegiatan, 5) Laporan Monev DAK, dan 6) Laporan Evaluasi Renja).

#### 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output dari kegiatan adalah Terciptanya Pelayanan administrasi keuangan yang Prima dan profesional selama 12 bulan.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Output Sub Kegiatan : tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo sebanyak 96 orang selama 12 bulan. Untuk capaian sudah sesuai target.
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan  
Output Sub Kegiatan : Terciptanya Pelayanan administrasi keuangan yang Prima dan profesional selama 12 bulan dan tersusunnya dokumen Laporan Keuangan sebanyak 1 Dokumen. Untuk capaian sudah sesuai target.

#### 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Melalui Bimbingan Teknis / Diklat Teknis dan pembinaan ASN. Untuk capaian sudah sesuai target.

#### 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output dari kegiatan adalah pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian sudah sesuai target.



- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat Dinas).  
Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk sekretariat Dinas dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Tenda)  
Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD PPI Tenda dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Gentuma)  
Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD PPI Gentuma dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Tilamuta)  
Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD PPI Tilamuta dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPBLP)  
Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD BPBLP dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BP2MDPP)  
Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD BP2MDPP dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.



5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output dari kegiatan adalah pelayanan administrasi berupa penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat Dinas)

Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk sekretariat Dinas dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Tenda)

Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD PPI Tenda dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Gentuma)

Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD PPI Gentuma dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP Tilamuta)

Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD PPI Tilamuta dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPBLP)

Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD BPBLP dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.



- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BP2MDPP).

Output Sub Kegiatan : pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk UPTD BP2MDPP dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Outcome dari program adalah peningkatan Nilai produktivitas produksi perikanan tangkap per tahun dan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan.

### 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

- Sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Output Sub Kegiatan : Tersedianya Sarana Perahu Fiber 3 GT Bermesin Tempel 15 PK sebanyak 24 unit dan sudah diserahkan kepada pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten/Kota, dengan rincian alokasi penerima sebagai berikut: 1) Kota Gorontalo sebanyak 8 Unit, 2) Kabupaten Gorontalo sebanyak 3 Unit, 3) Kabupaten Boalemo sebanyak 0 Unit, 4) Kabupaten Pohuwato sebanyak 2 Unit, 5) Kabupaten Bone Bolango sebanyak 8 unit, 6) Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 3 unit. Untuk alokasi bantuan perahu fiber 3 GT yang sudah disalurkan kepada pelaku usaha perikanan sejak tahun 2017-2022 sebanyak 420 unit. Disamping itu, sarana perikanan tangkap lainnya adalah pemberian bantuan mesin tempel 15 PK sebanyak 33 unit. Output kegiatan adalah Tersedianya Sarana Mesin Tempel 15 PK sebanyak 33 unit dan sudah diserahkan kepada pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten/Kota, dengan rincian alokasi penerima sebagai berikut: 1) Kota Gorontalo sebanyak 8 Unit, 2) Kabupaten Gorontalo sebanyak 3 Unit, 3) Kabupaten Boalemo sebanyak 7 Unit, 4) Kabupaten Pohuwato sebanyak 3 Unit, 5) Kabupaten Bone Bolango sebanyak 10 unit, 6) Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 2 uni.

Rincian aktivitas pada sub kegiatan ini adalah Verifikasi Calon Penerima Paket, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Prasarana, Penyerahan Paket Bantuan Sarpras Perikanan Tangkap, Pelayanan dan Pendampingan Bantuan Bidang Perikanan Tangkap, Jasa Konsultasi Perencanaan teknis dan pengawasan teknis Perahu Bermesin Katinting, Jasa Konsultansi Perencanaan teknis dan pengawasan



teknis Kapal Perikanan 3 GT Bermesin Tempel 15 PK. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan  
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Rapat Evaluasi Pemanfaatan Asuransi Nelayan dan Sertifikat Hak Tanah (SEHAT) Nelayan sebanyak 1 kegiatan, pelaksanaan Sinkronisasi Data Statistik Perikanan Tangkap sebanyak 1 kegiatan, pelaksanaan sosialisasi Perizinan dan Implementasi Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai 12 Mil sebanyak 1 kegiatan, Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 1 paket Untuk Penerbitan Izin Kapal, Andon kapal, STKA, Komputer Supplies sebanyak 1 paket Untuk Penerbitan Izin Kapal, Andon, STKA, Penerbitan Izin Kapal, Andon, STKA, Rapat Evaluasi Penerapan Log Book Tk. Provinsi sebanyak 1 kegiatan, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, Hibah DPD HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Provinsi Gorontalo sebanyak Rp.150.000.000,- untuk kegiatan operasional selama 1 tahun, Jasa Tenaga Pelayanan Umum untuk 3 orang, dan perjalanan dinas dalam kota dan biasa terkait dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi dibidang pengelolaan sumber daya ikan selama 1 tahun. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

2) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

- Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT.

Output Sub Kegiatan : terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Kapal, Andon dan STKA, sosialisasi perizinan implementasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 M, gerai fasilitasi penerbitan izin sampai dengan 10 GT, jasa tenaga pelayanan umum, perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi pusat dalam rangka penerbitan izin kapal, perjalanan dinas Koordinasi MOU Andon di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Selain itu, perjalanan dinas dalam rangka cek fisik kapal perikanan, sosialisasi perizinan implementasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 M, Verifikasi Penerbitan Izin kapal Perikanan, Verifikasi Penerbitan Izin Kapal Perikanan yang ada di Kabupaten/Kota.



- Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30GT.  
Output Sub Kegiatan : terlaksananya kegiatan pendapatan nelayan, tersedianya iuran Jaminan/Asuransi bagi Nelayan rapat evaluasi pemanfaatan asuransi nelayan dan SEHAT nelayan yang terdiri dari rapat evaluasi pemanfaatan asuransi nelayan dan rapat evaluasi pemanfaatan SEHAT nelayan.
- 3) Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda, UPTD PPI Gentuma dan UPTD PPI Tilamuta).
- Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD PPI Tenda, UPTD PPI Gentuma dan UPTD PPI Tilamuta)  
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Operasional di Pelabuhan Perikanan: 1 paket PDH Kepelabuhanan Perikanan (UPTD PP Tenda), 1 paket PDH Kepelabuhanan Perikanan (UPTD PPI Tilamuta), Jasa Keamanan Pada Wilayah Pelabuhan Perikanan Gentuma (UPTD PP GENTUMA) selama 1 tahun, Pengadaan Meubelair (UPTD PPI Tilamuta) sebanyak 1 paket, Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya - UPTD PPI Tilamuta sebanyak 1 paket, Belanja Alat Pendingin (UPTD PPI Tilamuta) sebanyak 1 paket, Belanja Alat Pendingin (UPTD PP Tenda) sebanyak 1 paket, Fasilitas Penunjang Kesyahbandaraan (UPTD PP Tenda) sebanyak 1 paket, Peralatan kesyahbandaraan (UPTD PPI Tilamuta) sebanyak 1 paket, Penunjang Data Pelabuhan (UPTD PPI Tilamuta) sebanyak 1 paket, Fasilitas Penunjang Kesyahbandaraan (UPTD PP Tenda) sebanyak 1 paket, Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD PP Gentuma) (DAK) sebanyak 1 paket, Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Dermaga PP Tilamuta (DAK) sebanyak 1 paket, Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Tenda (DAK) sebanyak 1 paket, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Gentuma (DAK) sebanyak 1 paket, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Tenda (DAK) sebanyak 1 paket, Jasa Konsultansi Pengawasan



Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Tilamuta (DAK) sebanyak 1 paket, Balai Pertemuan Nelayan PP Tenda (DAK) sebanyak 1 paket, Normalisasi Kolam Pelabuhan PP Tenda (DAK) sebanyak 1 paket, Pembangunan Dermaga PP Tilamuta (DAK) sebanyak 1 paket, Jalan kompleks (Beton) PP Tenda (DAK) sebanyak 1 paket, Fasilitas Air Bersih PP Gentuma (DAK) sebanyak 1 paket, Fasilitas Air Bersih PP Tilamuta (DAK) sebanyak 1 paket, Drainase PP Tenda (DAK) sebanyak 1 paket, Pembangunan Break Water (penahan gelombang) PP Gentuma (DAK) sebanyak 1 paket, Rehabilitasi Break Water (penahan gelombang) PP Tenda (DAK) sebanyak 1 paket, Jaringan dan Instalasi Listrik PP Tilamuta (DAK) sebanyak 1 paket, Peralatan kesyahbandaran (UPTD PPI Tilamuta) sebanyak 1 paket serta perjalanan dinas dalam kota dan biasa dalam rangka koordinasi dan konsultasi untuk menunjang kegiatan pengembangan sarana pelabuhan selama 1 tahun. Untuk capaian kegiatan mencapai 89,42%.

- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan pada tiga UPTD Pelabuhan Perikanan dengan rincian aktivitas kegiatan antara lain : ATK Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP GENTUMA) sebanyak 1 paket, Belanja Percetakan buku Form SLO, SPB dan e-loog book (UPTD PP GENTUMA) sebanyak 1 paket, Rapat Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP Tenda) sebanyak 1 paket, Jasa Tenaga Pelayanan Umum selama 1 tahun, Tagihan Listrik Pabrik Es dan Cool Storage selama 1 tahun: Lemito, Tilamuta, Tongo, Gentuma, Pengadaan Kursi Antrian Pelayanan (UPTD PP GENTUMA) sebanyak 1 paket, Pengadaan Scanner Untuk Teman SPB (Surat Perintah Berlayar) (UPTD PP Gentuma) sebanyak 1 paket, dan perjalanan dinas dalam kota dan biasa dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan fungsi pelabuhan perikanan selama 1 tahun. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

### 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Outcome dari program adalah 100% Optimalisasi Pengawasan SDKP di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi).





1) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- Sub Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil.

Output Sub Kegiatan : Terfasilitasinya BBM dan Pelumas 4 unit kapal pengawas selama 1 tahun, terlaksananya operasi pengawasan ruang laut sampai dengan 12 mil selama 1 tahun, terpasangnya instalasi air dan listrik di pos pengawasan tilamuta, terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota dan biasa dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan fungsi pelabuhan perikanan selama 1 tahun.

- Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.

Output Sub Kegiatan : terlaksananya operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 1 tahun, terfasilitasinya ATK dan komputer supplais sebanyak 1 paket untuk menunjang pelaksanaan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, terfasilitasinya makan minum kegiatan sebanyak 1 paket untuk menunjang pelaksanaan operasi pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka operasi pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil selama 1 tahun.

- Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) /(Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK).

Output Sub Kegiatan : terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa pembangunan perahu pokmaswas sebanyak 5 unit, dan sudah diserahkan kepada 5 pokmaswas yang ada di Kecamatan Biluhu Kab. Gorontalo, Pokmaswas yang ada di Kabupaten Pohuwato, Pokmaswas yang ada di Kabupaten Bone Bolango dan 2 Pokmaswas yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Outcome dari program adalah Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun (%).

1) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD BPBLP).



Output Sub Kegiatan : terlaksananya 1 Paket bahan kimia untuk perbenihan (UPTD BPBLP) untuk menunjang operasional Balai selama 1 tahun, terlaksananya desiminasi pembesaran nila saline (UPTD BPBLP) berupa benih dan pakan ikan selama 1 tahun, tersedianya pompa air sebanyak 2 unit, terfasilitasinya ATK untuk menunjang operasional kegiatan selama 1 tahun, terfasilitasinya bahan obat-obatan, vitamin dan probiotik (UPTD BPBLP) untuk menunjang operasional balai selama 1 tahun, terfasilitasinya pakan induk udang vaname (UPTD BPBLP) berupa cacing laut, cumi-cumi selama 1 tahun, terfasilitasinya pakan nila untuk payau (UPTD BPBLP) selama 1 tahun, terfasilitasinya pakan tambak uji genetik udang vaname (UPTD BPBLP) selama 1 tahun, terlaksananya hibah kepada masyarakat pembudidaya ikan berupa jaring, seser benih, seser induk, wadah sortir masing-masing 1 paket, terfasilitasinya jasa penunjang tenaga pelayanan umum sebanyak 3 orang untuk 1 tahun dan terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota untuk menunjang pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.

- Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar  
Output Sub Kegiatan : tersedianya sarana budidaya air tawar (pakan dan obat-obatan) sebanyak 2 paket, terlaksananya bantuan benih calon induk ikan lele dan ikan nila sebanyak 2 paket, dan terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembinaan pembudidaya payau dan tawar kegiatan selama 1 tahun.
- Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut.  
Output Sub Kegiatan : terlaksananya peningkatan kemitraan pelaku usaha perikanan sebanyak 1 kegiatan, terlaksananya bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan laut pada kelompok Molamahu, kelompok mutiara dan kelompok sikarimanang sebanyak 3 paket, terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota selama 1 tahun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.  
Output Sub Kegiatan : terlaksananya pengadaan calon induk udang vaname, pakan sebanyak 2 paket untuk UPTD BPBLP, terlaksananya jasa konsultasi pengawasan pembangunan / rehabilitasi unit perbenihan UPTD BPBLP sebanyak 1 paket, terlaksananya rehabilitasi bak pendederan lamu sebanyak 1 paket, rehabilitasi panti



benih lamu dan hatchery libuo sebanyak 2 paket, rehabilitasi tambak pemeliharaan calon induk lamu sebanyak 1 paket, dan rehabilitasi calon induk libuo sebanyak 1 paket, terlaksananya rehabilitasi saluran air pasok libuo sebanyak 1 paket, terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pengolahan limbah 1 paket serta terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota untuk menunjang pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.

5. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Outcome dari program adalah kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang terkelola dan Terimplementasinya PERDA RZWP3K dan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Gorontalo. Untuk capaian Program sudah sesuai target.

- 1) Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
  - Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.

Output Sub Kegiatan : terlaksananya 1 kegiatan FGD selama 1 tahun, Konsultasi Teknis dan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi kawasan Konservasi Perairan (Kab. Bone Bolango) sebanyak 1 kegiatan, pembinaan dan monev kelompok masyarakat konservasi sealama 1 tahun, Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi sebanyak 1 dokumen, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan RPZ sebanyak 1 paket, Peralatan Monitoring Kawasan Konservasi (Alat Selam) (DAK) sebanyak 1 paket, dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi selama 1 tahun. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

- 2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Output Sub Kegiatan : terlaksananya kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat sebanyak 1 paket, Percontohan Pembangunan Rumah Tunnel Garam Kelompok Bintang Sinergi sebanyak 1 paket, Penunjang DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat sebanyak 1 paket dan Jasa Tenaga Penunjang Pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 2 orang, Jasa Konsultansi



Perencanaan Teknis Kegiatan Revitalisasi Gudang Garam sebanyak 1 paket, Kegiatan Revitalisasi Gudang Garam sebanyak 1 paket, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat (DAK) sebanyak 1 paket, Identifikasi dan Supervisi serta Pengawasan ke Kab/Kota Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat (DAK) sebanyak 1 kegiatan selama 1 tahun. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

#### 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Outcome dari program adalah peningkatan konsumsi ikan masyarakat dan peningkatan pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan. Untuk capaian program sudah sesuai target.

##### 1) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Bidang & UPTD BP2MDPP)

Output dari kegiatan adalah Produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunnya.

- Sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (UPTD BP2MDPP).

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Kaji Terap Diversifikasi Produk Perikanan sebanyak 1 kegiatan. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

##### 2) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan : Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku Pemasar yang terfasilitasi sarana roda dua motor bercoolbox (Pedagang Ikan Bersepeda dan Penunjang Program SLIN) sebanyak 33 orang, pedagang ikan yang terfasilitasi bantuan coolbox yaitu : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Sistem Logistik Ikan Nasional, Pengumpulan Data Logistik Hasil Perikanan, Verifikasi Calon Penerima Bantuan, Pelayanan dan Pendampingan Bantuan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengadaan Sarana Pemasaran Program Sistem Logistik Ikan (bantuan motor bercoolbox (33 unit), Pengadaan coolbox dan perlengkapannya Program



Sistim Logistik Ikan (33 unit). Rincian alokasi penerima bantuan motor bercoolbox yang tersebar di kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut: 1) Kota Gorontalo sebanyak 3 Unit, Kabupaten Gorontalo sebanyak 18 Unit, 3) Kabupaten Boalemo sebanyak 4 unit, 4) Kabupaten Pohuwato sebanyak 0 unit, 5) Kabupaten Bone Bolango sebanyak 7 unit, dan 6) Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 1 Unit. Untuk alokasi bantuan motor coolbox yang sudah disalurkan kepada pelaku usaha perikanan sejak tahun 2017-2022 sebanyak 450 unit. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

- Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Gemarikan sebanyak 1 kegiatan, Terlaksananya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan lintas daerah sebanyak 1 kegiatan, Temu Koordinasi Gemarikan dalam rangka Peningkatan Konsumsi Ikan sebanyak 1 kegiatan, Tersedianya data statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebanyak 1 dokumen, Terlaksananya Validasi Data Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Pusat sebanyak 1 kali, dan terlaksana koordinasi pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota Provinsi Gorontalo selama 1 tahun. Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan :**

#### 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap :

- Sesuai amanat Undang–undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan bahwa penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dialihkan ke Pemerintah Daerah Provinsi., sehubungan hal tersebut belum sepenuhnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan amanat UU No 23 Tahun 2014 dalam hal ini pengalihan Sarana dan Prasarana Fungsional dan Penunjang yang berada di Kawasan Pelabuhan Perikanan. Hal ini mengakibatkan terkendalanya fungsi-fungsi pelayanan pembangunan pelabuhan perikanan dan pelayanan perizinan kapal perikanan tangkap.

**Solusi :**

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap :

- Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo terus melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang ada di Kabupaten/Kota., hal ini juga sudah difasilitasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dimana telah menghasilkan berita acara kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Penegasan bahwa pengelolaan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.111**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi*	Target	Realisasi
1	Produksi perikanan tangkap (Ton)	129.817	132.051	126.651	136.783
2	Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (Ton)	29.124	30.855	28.830	31.713
3	Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (Juta/Ekor)	18	18,11	15	16.50
4	Konsumsi ikan masyarakat (Kg/Kapt/thn)	60	64.34	58.4	61
5	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	86	86	82	86.10
6	Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang di Kelola (Ha)	11,196	76.529.34	9.228	10.058.52
7	Pendapatan Nelayan (Rp./Bulan)	4.211.837	4.464.547	3.641.883	3.860.395
8	Pendapatan Pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/Bln)	4.097.973	4.302.871	3.487.637	3.731.771
9	Pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan (Rp./Bln)	4.262.835	4.859.577	3.956.228	4.272.726
10	Produksi ikan yang diantar pulaukan/antar daerah atau ekspor	2.518	2.689	2.375	2.612.

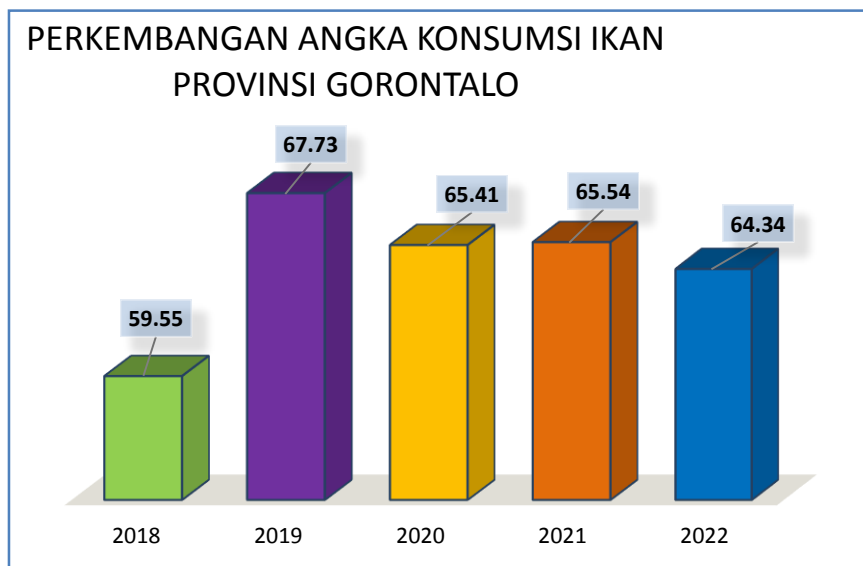
Catatan : \*Capaian Kinerja masih bersifat sangat sementara



**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- a. Nilai Tukar Nelayan / Pembudidaya Ikan Provinsi Gorontalo sejak adanya pandemic Covid – 19 di Tahun 2020 mencapai 93,35 Indeks, kemudian pada tahun 2021 capaian NTN-Pi berkisar di angka 96,92 Indeks selanjutnya pada tahun 2022 nilai NTN-Pi Provinsi mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai angka 100,29 indeks.
- b. Nilai Angka Konsumsi Ikan Provinsi Gorontalo sejak Tahun 2018 Sampai Tahun 2022 menunjukkan nilai yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka konsumsi ikan provinsi Gorontalo berkisar 58,48 kg/kapita, Tahun 2019 59,84 kg/kapita, Tahun 2020 sebesar 63.44 kg/kapita, dan tahun 2021 mencapai 65,44 kg/kapita serta pada tahun 2022 angka konsumsi ikan mencapai 61 kg/kapita. Hal ini dapat dilihat dari grafik pertumbuhan angka konsumsi ikan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

**Grafik 3.26**  
Perkembangan Angka Konsumsi Ikan  
Provinsi Gorontalo



**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Penghargaan nasional yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 antara lain :



**Tabel 3.112**

**Penghargaan Nasional yang diterima Tahun 2022**

No	Nama penghargaan	Tgl/bln/thn pemberian penghargaan	Pemberi penghargaan	Skala (internasional / nasional)	Tingkatan / juara ke	Keterangan (penghargaan diberikan terkait apa)	Foto sertifikat/piagam / piala
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penghargaan telah Mengikuti “Pembinaan Statistik Sektoral”	17 Juni 2022	- Badan Pusat Statistik Prov. Gtlo - Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gtlo	Skala Nasional	-	Penghargaan telah Mengikuti “Pembinaan Statistik Sektoral”	
2.	Penghargaan E-Monev Terbaik Tingkat Provinsi Gorontalo	Januari 2022	Biro PZE	Skala Provinsi	Juara III	Penghargaan Staf Entry E-Monev Terbaik Tingkat Provinsi Gorontalo	
3.	Penghargaan Penyusun LPPD Terbaik Tingkat Provinsi Gorontalo	Februari 2022	Biro Organisasi	Skala Provinsi	Juara IX	Penghargaan Penyusun LPPD Terbaik Tingkat Provinsi Gorontalo	
4.	Penghargaan Atas Capaian Realisasi Kinerja Kategori Satker Sedang	08 Februari 2022	KPPN Gorontalo	Skala Nasional	Juara II	Penghargaan Atas Capaian Realisasi Kinerja Kategori Satker Sedang	
5.	Penghargaan Atas Capaian Realisasi Kinerja Kategori Satker Kecil	08 Februari 2022	KPPN Gorontalo	Skala Nasional	Juara III	Penghargaan Atas Capaian Realisasi Kinerja Kategori Satker Kecil	

**7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2022**

- Kerjasama SIPI ANDON bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Gorontalo.

Objek perjanjian Kerjasama ini adalah andon penangkapan ikan.





Pelaksanaan perjanjian Kerjasama meliputi :

1. Alat penangkap ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan
2. Jumlah dan ukuran kapal yang diizinkan
3. Jumlah anak buah kapal (ABK)
4. Tempat pendaratan ikan
5. Persentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan
6. Monitoring dan evaluasi

## 2. Pariwisata

### 1) Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2022

- Mewujudkan Pariwisata Gorontalo Mendunia
- Meningkatkan Kinerja Pelayanan SKPD

#### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.113**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestik	Indikator Sasaran : Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestik	4 Hari	1.85 Hari	3 Hari	1.36 Hari	46.25%
		Indikator Sasaran : Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik	7.937 Wisman/759.023 Wisdom	75 Wisman/704.821 Wisdom	7.559 wisman/72.2879 wisdom	65 wisman/484.580 wisdom	91,91
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	4 Promosi Pariwisata	4 Promosi Pariwisata	4 Promosi pariwisata	4 Promosi pariwisata	100%
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang difasilitasi/ dikembangkan	3 Fasilitasi Obyek Wisata	3 Fasilitasi Obyek Wisata	3 Fasilitasi obyek wisata	3 Fasilitasi obyek wisata	100%
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi	100%	100%	-	-	100%

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	Pariwisata dan Ekonomi Kreati	Kreati					
<b>2</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD</b>	<b>Indikator Sasaran : Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.114**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pariwisata  
Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>2.292.363.769</b>	<b>2.239.543.132</b>	<b>97,69</b>	<b>100</b>	<b>97.27</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.292.363.769	2.239.543.132	97.69	100	97.27	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.261.753.244	1.247.719.120	98,89	100	95.71	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	293.033.960	269.592.023	92.00	100	92.61	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	737.576.565	722.231.989	97.92	100	99.64	100
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>4.069.198.824</b>	<b>3.159.214.063</b>	<b>77.64</b>	<b>100</b>	<b>94.89</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.090.747.530	2.194.315.877	71.00	100	94.48	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3.090.747.530	2.194.315.877	71.00	100	94.48	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	811.520.538	807.516.332	99.50	100	98.34	100
	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	500.000.000	499.957.556	99.99	100	98.12	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	311.520.538	307.558.776	98.73	100	98.92	100
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah	166.930.756	157.381.854	94.28	100	89.27	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	166.930.756	157.381.854	94.28	100	89.27	100
<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>840.933.011</b>	<b>781.748.250</b>	<b>92,96</b>	<b>100</b>	<b>94.68</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	840.933.011	781.748.250	92,96	100	94.68	100
	Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	840.933.011	781.748.250	92,96	100	94.68	100
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>450.472.631</b>	<b>433.560.872</b>	<b>96.25</b>	<b>100</b>	<b>96.81</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	450.472.631	433.560.872	96.25	100	96.81	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200.446.822	197.406.284	98,48	100	95.65	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	250.025.809	236.154.588	94,45	100	97.97	100
<b>5</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>9.059.361.676</b>	<b>8.924.119.848</b>	<b>98.51</b>	<b>100</b>	<b>98.72</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.332.559	479.669.461	96,84	100	99.33	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	495.332.559	479.669.461	96,84	100	99.33	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.531.126.606	6.496.419.462	99.47	100	98.67	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.365.748.227	6.334.757.418	99,51	100	98.65	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	165.378.379	161.662.044	97,75	100	99.83	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.002.000	32.161.650	91,89	100	-	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.002.000	32.161.650	91,89	100	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.112.446.182	1.086.767.267	97,69	100	99.55	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.112.446.182	1.086.767.267	97,69	100	99.55	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	885.454.329	829.102.008	93,64	100	97.71	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	885.454.329	829.102.008	93,64	100	97.71	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.712.329.911</b>	<b>15.538.186.165</b>	<b>92.97</b>	<b>100</b>	<b>97.74</b>	<b>100</b>

Catatan :

1. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pariwisata mendapatkan Dana Insentif Daerah yang terbagi 2 tahap. Pada tahap pertama jumlahnya sebesar Rp.1.000.000.000 yang realisasinya Rp. 990.943.666 dan tahap kedua sebesar Rp. 1.010.000.000 dan realisasinya Rp. 70.498.000.
2. Berikut adalah Output dari Dana Insentif Daerah :
  - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Jasa Service Kendaraan Bermotor Roda 4).
  - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata (BEBAN BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA)
  - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin)
  - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Rapat Koordinasi Bidang Kepariwisata)
  - Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Evaluasi Program dan Kegiatan)
  - Belanja Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata (Bimtek Pengembangan Sulam Karawo)
  - Dukungan Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan Pengembangan Usaha Pelaku Ekraf



- Belanja Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata (Belanja Manajemen Pengembangan Wisata Unggulan Provinsi)
- Belanja Jetski (Belanja Modal Peralatan Olahraga Air)
- Pekerjaan Lanjutan Pendestrian Edu Agro WisataLombongo (Belanja Modal bangunan Fasilitas Umum)
- Pembangunan Kamar Bilas Edu Agro Wisata (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan)
- Pembangunan Pagar di Kawasan Edu Agro Wisata (Belanja Modal Pagar)
- Pengawasan Paket Pekerjaan Pagar, Kamar Bilas dan Pendestrian Edu Agro Wisata Lombongo (Belanja Jasa Konsultansi)
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Pengembangan Sarana Prasarana Infrastruktur Wisata Unggulan berupa Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda Tiga (Viar) untuk POKDARWIS

#### 1) Program Pemasaran Pariwisata

Outcome dari program adalah jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan. Ada empat promosi yang dilaksanakan yaitu : Promosi Budaya, Promosi Wisata Bahari, Promosi Minat Khusus dan Promosi Wisata Digital.

##### 1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri

Output Sub Kegiatan : - Promosi pariwisata G20 di Bali

- Pembuatan Konten Foto dan Video Promosi Pariwisata
- Penyambutan Tamu
- Promosi Pariwisata Gorontalo Dalam Rangka G20 di Taman Mini Jakarta
- Tourism On The Spot (Talkshow)
- Lomba Konten Foto dan Video Promosi Destinasi Pariwisata Gorontalo
- Promosi Pariwisata Melalui Media Digital
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
- Event Gorontalo Carnival Karawo

Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri

Output Sub Kegiatan : - Rapat Koordinasi Data Pariwisata dan Ekraf

- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi
- Buku Profil Geopark Pariwisata
- Buku Profil Pariwisata Provinsi Gorontalo
- Pengembangan Web Visit Gorontalo

Sub Kegiatan : Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Output Sub Kegiatan :

- Training Of Trainer Pengelolaan Media Sosial; Terlatihnya SDM Pariwisata yang dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk pemasaran pariwisata yang baik, benar dan bijak
- FGD Pemasaran Pariwisata Geopark Gorontalo
- Brainstorming Strategi Pemasaran Pariwisata dengan Pentahelix
- Dukungan Event Pariwisata Provinsi Gorontalo (JWS, GKK, Fest. Pesona Saronde)
- Dukungan Event Kab/Kota Pariwisata Provinsi Gorontalo
- Dukungan Event Kabupaten Kota, Masyarakat dan Komunitas ; Dukungan Event Kabupaten Kota, Masyarakat dan Komunitas
- Penyusunan Travel Patern "Geopark Gorontalog

## 2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Outcome dari program adalah Jumlah obyek wisata yang difasilitasi/dikembangkan

### 1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

Sub Kegiatan : Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

Output Sub Kegiatan :

- Pekerjaan penataan dan peremajaan area hijau kawasan wisata edu agrowisata
- Pekerjaan pengecatan dan design jalur pedestrian kawasan edu agrowisata
- FGD Pendataan dan Infrastruktur Destinasi Berbasis Titik Koordinat
- Rakor Destinasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
- Pembuatan Kamar Bilas OW. Botutonuo
- Kegiatan Internasional Underwater Photography Competition
- Pembuatan Sumur Suntik dan Pengadaan Pompa Air Jaringan Air
- Pembuatan Pintu Gerbang Agro Edu Wisata
- Pekerjaan Lanjutan Pedestrian Edu Agro Wisata Lombongo



## 2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Sub Kegiatan : Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Output Sub Kegiatan :

- Design Pengembangan Perencanaan Edu-Agro Wisata Obyek Wisata Lombongo
- Design Perencanaan DED Obyek Wisata Botutonuo
- Design Perencanaan DED Obyek Wisata Bongo dan Obyek Wisata Minanga
- Pembuatan Dokumen DED OW Pendaratan Soekarno
- Pembuatan Dokumen DED OW Botubarani

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Output Sub Kegiatan :

- Bimtek Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Botutonuo' Lombongo, Minanga, Cakra Buana, Pantai Ratu, Olele, Batubarani, Biluhu, Karang Putih, Dulanga
- Sosialisasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Obyek Wisata di Bongo
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi melalui POKDARWIS

## 3. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pengelolaan Investasi Pariwisata

Output Sub Kegiatan :

- FGD Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- Sosialisasi Layanan Perizinan Usaha Pariwisata berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Sosialisasi Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan di Usaha Industri Pariwisata
- Rapat Koordinasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota

## 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Outcome dari program adalah Presentase Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



1. Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik  
 Sub Kegiatan : Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik.

Output Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Ruang Kreatif Publik bagi Pelaku Industri Kreatif
- Seminar Hak Kekayaan Intelektual
- Dukungan Kegiatan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Provinsi Gorontalo
- Bimtek Pengembangan Sulam Karawo ; Bimtek Pengembangan Sulam Karawo
- Pertunjukan Musik Tradisional
- Dukungan Biaya Kegiatan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif
- Fasilitasi Pendaftaran Paten Merek Produk Ekonomi Kreatif

- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Outcome dari program adalah Presentasi Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.

Output Sub Kegiatan :

- Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Tour Guide dengan Tenaga Kerja Hotel dan restoran
- Workshop Peningkatan Pemahaman kepariwisataan kepada masyarakat dan Mitra Pariwisata di destinasi wisata
- Pelatihan Diving bagi Pemandu Wisata Bawah Laut Tingkat Lanjut

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata.

Output Sub Kegiatan :

- Workshop Pendirian LSP P1 Bidang Pariwisata
- FGD Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kapasitas
- FGD Peningkatan Kapasitas LSP P1 dan P3 bidang Pariwisata
- Rapat Asosiasi Pariwisata

- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring





dan Pelaporan serta Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
 Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.  
 Output Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/ pelatihan/sosialisasi.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Output Sub Kegiatan : Presentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Output Sub Kegiatan : Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

### **3) Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo selama Tahun 2022 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut :

1. Program Pemasaran Pariwisata
  - Pelaksanaan event daerah yang bersifat massal tidak terlaksana akibat dampak covid 19, dialihkan menjadi virtual event yang dampaknya tidak terlalu maksimal
  - Minimnya sumber daya manusia dalam pemanfaatan media sosial guna mempromosikan pariwisata Gorontalo
  - Minimnya sarana mobilitas untuk keperluan pengumpulan data sektor pariwisata
  - Kurangnya fasilitas pengumpulan informasi berupa peralatan rekam audio visual dan lain sebagainya untuk keperluan promosi melalui media digital, media social



2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - Aksesibilitas dan amenities pariwisata belum maksimal karena terbatasnya sumber pendanaan/pembiayaan
  - Kesiapan pengelolaan obyek wisata yang belum mematuhi protokol kesehatan
  - Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
  - Belum optimalnya fasilitasi terhadap industri pariwisata
  - Kurangnya atraksi di obyek-obyek wisata
  - Belum adanya desain perencanaan pariwisata yang terintegrasi sehingga pembangunan pariwisata masih dilakukan secara parsial
  - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan sadar wisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Belum tersedianya ruang kreatif pelaku ekraf, pelaku seni dan pertunjukan untuk mengekspresikan kreatifitasnya
  - Minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pasar produk kreatif
  - Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak industri pariwisata belum dikelola secara optimal terutama pada destinasi-destinasi wisata di Gorontalo
  - Terbatasnya sumberdaya manusia bidang pariwisata baik hotel, restoran dan pemandu wisata

Dengan permasalahan tersebut diatas, maka untuk mencapai capaian kinerja tahun selanjutnya Dinas Pariwisata di dukung oleh empat program dengan rencana aksi meliputi :

- Meningkatkan kesiapan obyek wisata menyikapi pandemi covid-19
- Memaksimalkan Kerjasama antar stakeholder pariwisata
- Meningkatkan strategi promosi melalui media digital
- Menyiapkan sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai
- Memaksimalkan pengembangan ekonomi kreatif



**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.114**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata  
Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Wisatawan Mancanegara (Orang)	7.937	57	7.559	65
2	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	759.023	704.821	722.879	484.580

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

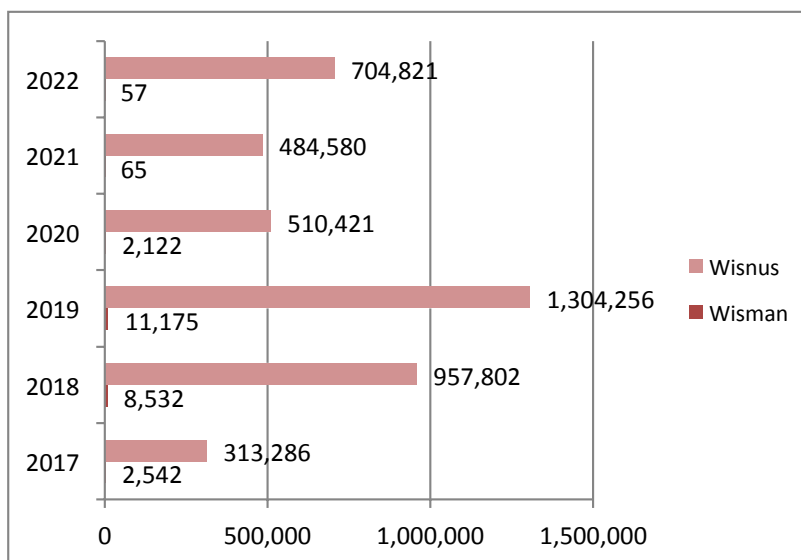
Grafik Kunjungan Wisatawan di Provinsi Gorontalo Kurun Waktu 2017 -2022

Wisnus = Wisatawan Nusantara

Wisman = Wisatawan Mancanegara

**Grafik 3.27**

Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Gorontalo



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2022



**Tabel 3.115**

Rata-rata lama tinggal tamu mancanegara dan nusantara Pada hotel/akomodasi lainnya di provinsi gorontalo Kurun waktu 2017-2021

Tahun	Rata-rata lama tinggal/menginap (hari)		
	Tamu Mancanegara	Tamu Nusantara	Tamu Mancanegara dan Nusantara
2017	3.60	1.82	1.85
2018	2.21	1.71	1.72
2019	1.62	1.68	1.68
2020	1.48	1.41	1.58
2021	1.61	1.37	1.49
2022	-	-	1,85

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2022

Salah satu sasaran strategis Dinas Pariwisata pada RENSTRA 2017 – 2022 adalah meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestik. Rata-rata lama tamu menginap (Average Length of Stay) adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai, dibagi dengan banyaknya tamu yang datang. Rata-rata lama tamu menginap ini bisa dibedakan antara tamu asing dan tamu dalam negeri. Target pada Indikator RPJMD dan Renstra tidak tercapai dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara hanya mencapai 57 orang dengan target 7937 orang atau selisih 7880 Orang. Untuk wisatawan Nusantara terdapat selisih 54.202 Kunjungan dengan target 759.023 dengan realisasi hanya mencapai 704.821 kunjungan. ( Sumber Data Dinas Pariwisata Kab/Kota 2022).
2. Target untuk rata-rata lama tinggal di tahun 2022 ini adalah 4 (Empat) hari, namun realisasi hanya mencapai 1,85 hari dengan persentase sebesar 46,25 %. ( Sumber Data BPS s/d November 2022).

Tahun 2022 Data rata-rata lama tinggal wisatawan yg di rilis dari BPS merupakan gabungan dari data Tamu Mancanegara dan Tamu Nusantara.

**6) Penghargaan nasional yang diterima Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Provinsi Gorontalo mendapatkan Penghargaan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Meraih Terbaik Peringkat ke tiga Desa Wisata Lonuo Bukit Arang Kabupaten BoneBolango yang terdiri dari 50 Finalis Desa Wisata.



### 3. Pertanian

#### 1) Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan produksi tanaman pertanian/populasi ternak
- Meningkatkan mutu dan daya saing produk pertanian
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian
- Meningkatkan manajemen kelembagaan, sarana prasarana, kapasitas SDM dan sinergitas antar stakeholder

##### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.116**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan Produksi tanaman Pertanian/populasi ternak	Indikator Sasaran : - Produksi Padi 2%/tahun (ton)	289,430	249,709	380,764	291,423	86.28
		- Produksi Jagung 2%/tahun (ton)	836,263	1,050,662	819,866	1,537,488	125.64
		- Produksi Kedelai 1%/tahun (ton)	173.13	1.293	4.109	882	746.84
		- Produksi Umbi-umbian 2,5%/Tahun (ton)	3.508	2.378	3.423	3.640	67.79
		- Produksi Kacang-kacangan 2,5%/tahun (ton)	673	168	656	58	24.96
		- Produksi Cabai 1.5%/Tahun (ton)	12.557	14.267	12.372	12.860	113.62
		- Produksi Bawang Merah 5%/Tahun (ton)	1.838	256	1.751	445.4	13.93
		- Produksi Tomat 5%/Tahun (ton)	1.545	4.356	1.522	2.932	281.94
		- Produksi Sayuran lainnya 1.5%/Tahun (ton)	4.629	2.986	4.560	1.923	64.51
		- Produksi Buah 1%/tahun (ton)	24.552	38.794	24.309	28.554	158.01
		- Produksi Gula (Hablur) 0.5%/tahun (Ton)	34.770	50.564	34.597	61.745	145.42



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
		- Produksi Tanaman Rempah 3 %/tahun (ton)	727	1.145	706	308	157.50
		- Produksi Kakao 2 %/tahun (ton)	5.421	3.009,3	5.315	3.435,8	55.51
		- Produksi Kelapa 1%/Tahun (ton)	58.240	65.432	57.664	61.745	112.35
		- Populasi Sapi 2.5%/Tahun (ekor)	245.802	265.821	239.806	260.404	108.14
		- Populasi Kambing 2 %/Tahun (ekor)	105.042	108.876	102.982	104.536	103.65
		- Populasi Unggas 5%/Tahun (ekor)	2.032.815	2.436.006	1.936.014	2.774.344	119.83
	Program: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Jumlah alat dan mesin pertanian (Unit)	2.790	2.790	2.790	2.790	100
		- Laporan pengawasan pupuk bersubsidi (Dok)	1	1	1	1	100
		- Luas areal lahan pertanian yang difasilitasi alsintan brigade (Ha)	4.283	273	4.283	119	6.37
		- Jumlah luas lahan sawah yang diasuransikan / AUTP (Ha)	1.000	3.527	1.000	3.990	352.70
		- Jumlah ternak sapi yang diasuransikan / AUTS (Ekor)	1.000	3.139	1.000	3.380	313.90
		- Laporan evaluasi kelompok PUAP (Dok)	1	1	1	1	100
		- Jumlah benih padi yang disalurkan (Ha)	69.666	9.343	69.666	24.839	13.41
		- Jumlah benih jagung yang disalurkan (Ha)	79.696	15.175	79.696	158.791	19.04
		- Jumlah benih kedelai yang disalurkan (Ha)	2.494	808	2.494	1.371	32.40
		- Jumlah benih kacang-kacangan yang disalurkan (Ha)	521	-	521	-	-
		- Jumlah benih umbi-umbian yang disalurkan (Ha)	210	-	210	-	-
		- Tersedianya benih sumber tanaman pangan (Kg)	55.500	118.268	55.500	24.895	213.10
		- Jumlah benih dasar (BD)	6.900	6.191	6.900	3.335	89.72
		- Jumlah benih pokok (BP)	48.600	112.077	48.600	21.560	230.61
<b>2</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya mutu dan daya saing Produk olahan Pertanian</b>	<b>Indikator Sasaran : Jumlah usaha hasil olahan pertanian yang bersertifikat (kelompok usaha)</b>	.....	.....	.....	.....	.....



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penguatan Usaha Produk Hasil Olahan Pertanian (Kelompok Usaha)					
<b>3</b>	<b>Sasaran : Menurunnya kasus penyakit yang disebabkan oleh Pangan Asal Hewan</b>	<b>Indikator Sasaran : Jumlah kasus yang disebabkan oleh Pangan Asal Hewan (Kasus)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>
	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bertambahnya jumlah ternak yang dipotong di RPH (ekor)	4.500	4.500	4.500	4.500	100
<b>4</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Pertanian</b>	<b>Indikator Sasaran : Jumlah SDM pertanian yang memiliki sertifikat keahlian (orang)</b>	<b>450</b>	<b>262</b>	<b>450</b>	<b>262</b>	<b>58.22</b>
	Program : Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	450	262	450	262	58.22
<b>5</b>	<b>Sasaran : Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran</b>	<b>Indikator Sasaran : Sarana Prasarana Perkantoran (Paket)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur</b>	<b>Indikator Sasaran : ASN yang mengikuti Diklat (orang)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
	Program : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan jasa administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur (%)	1	1	1	1	100
<b>7</b>	<b>Sasaran : Tersedianya laporan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan</b>	<b>Indikator Sasaran : Laporan Kinerja Keuangan (Dokumen)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>8</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan kualitas perencanaan, monev dan data statistic</b>	<b>Indikator Sasaran : Dokumen perencanaan, evaluasi dan data statistic (Dokumen)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	<b>pertanian</b>						
	Program : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan data statistik pertanian (dokumen)	12	12	4	4	100

Angka sementara Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2022

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.117**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertanian  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>39.175.941.897</b>	<b>38.574.653.140</b>	<b>98.47</b>	<b>100</b>	<b>98.01</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,528,733,059	1,506,842,711	98.57	100	98.57	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	682.340.616	677.037.679	99.22	100	99.22	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	846.392.443	829.805.032	98.04	100	98.04	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.938.327.296	32.554.058.312	98.83	100	98.87	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.788.327.296	32.405.089.066	98.83	100	98.87	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	150.000.000	148.969.246	99.31	100	98.98	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	440.991.673	427.008.211	96.83	100	93.00	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	440.991.673	427.008.211	96.83	100	93.00	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.509.993	458.921.896	97.74	100	98.42	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub Kegiatan <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	469.509.993	458.921.896	97.74	100	98.42	100
	Kegiatan <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	3.798.379.876	3.627.822.010	95.51	100	90.44	100
	Sub Kegiatan <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	3.798.379.876	3.627.822.010	95.51	100	90.44	100
<b>2</b>	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>32.208.177.227</b>	<b>31.799.079.466</b>	<b>98.73</b>	<b>99.88</b>	<b>97.42</b>	<b>99.88</b>
	Kegiatan <i>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>	22.020.797.186	21.938.280.549	99.63	100	99.19	99.52
	Sub Kegiatan <i>Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>	22.020.797.186	21.938.280.549	99.63	100	99.19	99.52
	Kegiatan <i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	4.638.008.547	4.495.920.558	96.94	100	96.11	100
	Sub Kegiatan <i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura</i>	1.514.983.025	1.471.978.314	97.16	100	95.77	100
	Sub Kegiatan <i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan</i>	2.423.262.996	2.326.721.948	96.02	100	95.63	100
	Sub Kegiatan <i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan</i>	699.762.526	697.220.296	99.64	100	98.50	100
	Kegiatan <i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	2.997.461.450	2.864.460.497	95.56	100	97.81	100
	Sub Kegiatan <i>Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i>	2.997.461.450	2.864.460.497	95.56	100	97.81	100
	Kegiatan <i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	2.551.910.044	2.500.417.862	97.98	100	96.31	100
	Sub Kegiatan <i>Pengadaan Benih /Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah</i>	2.166.342.044	2.115.283.662	97.64	100	96.31	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	<i>Provinsi Lain</i>						
	Sub Kegiatan <i>Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</i>	385.568.000	385.134.200	99.89	100	-	-
<b>3</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>220.913.747</b>	<b>220.771.849</b>	<b>99.94</b>	<b>100</b>	<b>91.90</b>	<b>100</b>
	Kegiatan <i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	220.913.747	220.771.849	99.94	100	91.90	100
	Sub Kegiatan <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	220.913.747	220.771.849	99.94	100	99.62	100
<b>4</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteliner</b>	<b>1.123.482.074</b>	<b>1.106.366.853</b>	<b>98.48</b>	<b>99.90</b>	<b>99.21</b>	<b>100</b>
	Kegiatan <i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	752.634.881	740.134.098	98.34	100	99.90	100
	Sub Kegiatan <i>Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	752.634.881	740.134.098	98.34	100	99.90	100
	Kegiatan <i>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</i>	370.847.193	366.232.755	98.76	99.74	98.35	99.74
	Sub Kegiatan <i>Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan</i>	370.847.193	366.232.755	98.76	99.74	98.35	99.74
<b>5</b>	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>851.716.765</b>	<b>794.397.121</b>	<b>93.27</b>	<b>100</b>	<b>96.59</b>	<b>100</b>
	Kegiatan <i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	851.716.765	794.397.121	93.27	100	96.59	100
	Sub Kegiatan <i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</i>	851.716.765	794.397.121	93.27	100	96.59	100
<b>6</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>3.347.556.026</b>	<b>2.701.634.138</b>	<b>80.70</b>	<b>99.85</b>	<b>83.09</b>	<b>99.85</b>



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian	334.417.609	329.153.425	98.43	100	99.71	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	334.417.609	329.153.425	98.43	100	99.71	100
	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian	2.829.714.438	2.189.581.661	77.38	99.54	79.56	99.54
	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	589.175.438	571.898.953	97.07	100	94.19	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh dan Pemberdayaan Petani (Readsi)	2.240.539.000	1.617.682.708	72.20	99.07	76.93	99.07
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	183.423.979	182.899.052	99.71	100	99.63	100
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	183.423.979	182.899.052	99.71	100	99.63	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>76.927.787.736</b>	<b>75.196.902.567</b>	<b>97.75</b>	<b>100</b>	<b>96.46</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Outcome dari program adalah Presentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan sdm aparatur serta perencanaan monev dan pelaporan 100%.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Output dari kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan data statistic pertanian 12 dokumen.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output dari kegiatan adalah Jumlah dokumen penatausahaan dan laporan keuangan 1 dokumen.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output dari kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur pertanian 30 Orang.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output dari kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana kantor 1 paket.



- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Output dari kegiatan adalah Jumlah layanan dan administrasi perkantoran 100%.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Outcome dari program adalah Produktivitas padi 1% per tahun 56.22 (Ku/Ha).
  - a. Pelaksanaan Program
    - 1) Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian  
Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.  
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan peredaran alsintan, pupuk dan pestisida dan sarana pendukung lainnya 1 Kegiatan.
    - 2) Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman  
Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan.  
Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura  
Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan  
Output Sub Kegiatan : Terawasinya mutu benih tanaman pertanian, terseiannya benih unggul, dan tersalurnya benih tanaman pertanian 3 kegiatan.
    - 3) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi  
Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.  
Output Sub Kegiatan : Tersedianya sapi indukan dan pakan ternak 10 ekor.
    - 4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain  
Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.  
Sub Kegiatan : Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.  
Output Sub Kegiatan : Tersalurnya ternak sapi 150 ekor.



3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini tidak terakomodir.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Outcome dari program adalah Produktivitas padi 1% per tahun 56.22 (Ku/Ha).

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi

Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya bimtek pengendalian OPT dan Identifikasi penyakit dan agen pengendali hayati pada tanaman jagung 1 (kegiatan).

5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteliner

Outcome dari program adalah Jumlah ternak yang dipotong di RPH 1400 (Ekor).

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.

Output Sub Kegiatan : Tersedianya obat-obatan untuk ternak 1 (Tahun).

2) Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan.

Sub Kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya pengujian ternak/sampel dan PAH ASUH 1 (tahun).

6. Program Penyuluhan Pertanian

Outcome dari program adalah Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN

Output Sub Kegiatan : tersedianya fasilitas ketenagaan penyuluhan pertanian 12 (bulan).

2) Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian



Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian  
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluh dan Pemberdayaan Petani.

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya metodologi penyuluhan, sekolah lapang dan bimtek peningkatan SDM pelaku utama pelaku usaha sebanyak 6 angkatan.

3) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani.

Output Sub Kegiatan : terlaksananya pembinaan kelompok tani 1(Kegiatan).

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan :**

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya beberapa target pada renstra adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya alokasi anggaran menyebabkan tidak tercapainya beberapa target yang sudah ditetapkan pada renstra.
2. Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Pengawas Benih Tanaman.
3. Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya tanaman sehingga berdampak pada produksi hasil pertanian.
4. Masih kurangnya koordinasi lingkup instansi terkait dalam perbaikan saluran irigasi yang berdampak pada pertanaman padi sehingga berpengaruh pada penurunan produksi dan produktivitas padi.
5. Subsidi input produksi (pupuk, benih dan bantuan alsintan) belum efektif dalam peningkatan produktivitas.
6. Disparietas harga di tingkat petani dan kelembagaan tataniaga.
7. Minat petani terhadap budidaya kedelai, umbi-umbian dan kacang-kacangan menurun karena harga rendah dan pemasaran sulit.

#### **Solusi :**

1. Peningkatan kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju melalui desiminasi teknologi serta optimalisasi peran dan kinerja petugas lapangan pertanian (penyuluh, PBT dan POPTP) yang diantaranya berupa upaya pelaksanaan Bimbingan Teknis secara kontinyu dan terintegrasi.
2. Mengsosialisasikan penerapan teknologi baru di tingkat petani sehingga petani bisa manfaat teknologi baru yang ada.



3. Meningkatkan koordinasi lintas instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dalam pelayanan irigasi pertanian, sehingga lebih optimal dalam pelayanan kepada petani sehingga terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas komoditi padi.
4. Adanya gerakan yang cepat tanggap dalam mengantisipasi gangguan hama dan penyakit tanaman di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
5. Melakukan analisis struktur dan perilaku pasar yang dihadapi oleh petani dimana mengarah kepada struktur pasar monopsoni karena sebagian besar petani memiliki hambatan dalam memilih saluran tataniaga secara bebas.
6. Perlu upaya sosialisasi yang lebih konkrit kepada masyarakat khususnya petani dalam budidaya serta pemasaran kedelai, umbi-umbian dan kacang-kacangan.
7. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi, penetapan kebijakan harga beli kedelai dan jaminan pasar.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.118**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian  
 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
 Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Produksi Padi 2%/ tahun (ton)	289.430	249.709	380.764	291.423
2	Produksi Jagung 2%/tahun (ton)	836,263	1,050,662	819,866	1,537,488
3	Produksi Kedelai 1 %/tahun (ton)	173.13	1,293	4,109	882
4	Produksi Umbi-umbian 2,5%/Tahun (ton)	3.508	2.378	3.423	3.640
5	Produksi Kacang-kacangan 2,5%/tahun (ton)	673	168	656	58
6	Produksi Cabai 1.5%/Tahun (ton)	12,557	14,267	12,372	12,860
7	Produksi Bawang Merah 5%/Tahun (ton)	1,838	256	1.751	445.4
8	Produksi Tomat 5%/Tahun (ton)	1.545	4.356	1.522	2.932
9	Produksi Sayuran lainnya 1.5%/Tahun (ton)	4.629	2.986	4.560	1.923
10	Produksi Buah 1%/tahun (ton)	24.552	38.794	24.309	28.554
11	Produksi Gula (Hablur) 0.5%/tahun (Ton)	34.770	50.564	34.597	61.745



No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
12	Produksi Tanaman Rempah 3 %/tahun (ton)	727	1.145	706	308
13	Produksi Kakao 2 %/tahun (ton)	5.421	3.009,3	5.315	3.435,8
14	Produksi Kelapa 1%/Tahun (ton)	58.240	65.432	57.664	61.745
15	Populasi Sapi 2.5%/Tahun (ekor)	245.802	265.821	239.806	260.404
16	Populasi Kambing 2 %/Tahun (ekor)	105.042	108.876	102.982	104.536
17	Populasi Unggas 5%/Tahun (ekor)	2.032.815	2.436.006	1.936.014	2.774.344

### 5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

- Capaian indikator program pada komoditi tanaman pangan, untuk tanaman jagung dimana pada tahun 2022 capaian produksi sebesar 1.050.662 ton mencapai 125,64% dari target 836,263 ton. capaian ini turun sebesar 46,34% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh turunnya intervensi alokasi anggaran baik yang bersumber dari dana APBN maupun dari APBD. Tanaman padi capaian pada tahun 2022 sebesar 249,709 ton mencapai 86,28%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 turun sebesar 16, 71%. Produksi padi belum memenuhi target yang sudah ditetapkan karena selain kurangnya intervensi alokasi anggaran, juga disebabkan oleh alih fungsih lahan.....tanaman kedelai dari target produksi 173.13 ton realisasi 1.293 ton dengan capaian 746.84% naik sebesar 31,79% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini di pengaruhi oleh pergeseran waktu panen dimana bantuan kedelai yang disalurkan dan ditanam di akhir tahun 2021 nanti di panen pada awal tahun 2022.
- Capaian indikator komoditi hortikultura untuk tanaman cabai dari target produksi sebesar 12,557 ton berhasil mencapai 14,267 ton atau 113.62% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 naik sebesar 9,86%. Hal ini disebabkan oleh melaksanakan pengembangan kawasan/kampung cabai dengan total luasan sebanyak 190 Ha yang dibagi pada lima kabupaten dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kabupaten Gorontalo 50 Ha
  2. Kabupaten Boalemo 40 Ha
  3. Kabupaten Pohuwato 30 Ha
  4. Kabupaten Bone Bolango 40 Ha
  5. Kabupaten Gorontalo Utara 30 Ha





- Capaian Produksi tanaman bawang merah tahun 2022 sebesar 256 ton atau sebesar 13.93% dari target. Capaian ini turun sebesar 73,98% jika dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya curah hujan yang tinggi pada bulan Juni – Juli sehingga banyak petani yang mengalami gagal pindah tanam. Selain itu juga adanya keterlambatan penanaman bawang merah di kelompok – kelompok penerima bantuan tahun 2022. Sebagian kelompok baru dapat melakukan penanaman pada bulan November sehingga panen dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Produksi Bawang Merah di Provinsi Gorontalo sangat tergantung pada bantuan pemerintah, hal ini dikarenakan harga benih bawang merah umbi yang cukup tinggi (untuk 1 ha lahan membutuhkan benih sekitar 20 sd 25 Juta/ha). Perlu penekanan pada petani penerima bantuan agar tidak langsung menjual hasil panennya dalam bentuk bawang merah konsumsi, para petani hendaknya menyisihkan 25% hasil panen untuk benih selanjutnya. Capaian produksi tanaman tomat tahun 2022 sebesar 4.356 ton atau 281.90%. capaian ini melebihi target. jika dibandingkan dengan tahun 2021 naik sebesar 32.69%.
- Komoditas perkebunan untuk produksi gula (hablur) dan produksi kelapa capaian indikator program melebihi target. tahun 2022 alokasi bantuan bibit kepala baik yang bersumber dari dana APBD dan APBN sebanyak 500 batang bibit kelapa genja dan perluasan areal tanaman kelapa 200 Ha atau sebanyak 22.000 batang bibit kelapa dan pupuk NPK sebanyak 40.000 Kg.
- Capaian indikator program komoditas peternakan secara keseluruhan rata-rata capaian melebihi target. dimana populasi sapi yang ditargetkan 245.802 ekor, mencapai 265,821 ekor atau 108.14% dari target, naik 2.04% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Samahalnya dengan populasi kambing yang ditargetkan 105,042 ekor mencapai 108,876 ekor atau 103,65% dari target. jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian naik 3.99%. populasi unggas yang ditargetkan 2.032.815 ekor mencapai 2.436.006 atau sebesar 119.83% dari target. walaupun capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 13.89%. bantuan ternak masyarakat secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan populasi.
- Berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas pertanian provinsi gorontalo untuk memberikan kinerja terbaik dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta terus memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi diprovinsi gorontalo.



Beberapa kebijakan dan program inovasi dinas pertanian, diantaranya :

1. Balintan SMART Mobile : Aplikasi yang di tujukan kepada semua steakholder dalam menjawab segala permasalahan mengenai Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI),Kemudahan dalam mengakses informasi mengenai OPT dan DPI serta manajemen strategi pengendalian yang cepat dan tepat.
2. SIPAKLAN : Sistem Aplikasi Pengawasan Perizinan dan Retribusi Lalulintas Ternak dan PAH Terintegrasi. Inovasi Pertama terkait sistem pengawasan lalulintas dan PAH, mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi serta peningkatan PAD dan bagi stakeholder dan masyarakat dapat mempermudah perizinan lalulintas ternak dan PAH, mengurangi resiko penyebaran penyakit hewan menular strategis sehingga kesehatan dan kamanan pangan lebih terjamin.

#### **6) Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

- Penghargaan dari Direktorat Perbenihan, direktorat jenderal tanaman pangan, kementerian pertanian RI : JUARA 2 Kinerja Terbaik Tahun 2022.
- Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kantor wilayah provinsi gorontalo ; Terbaik 3 Tahun 2022 Sebagai Satker Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Kecil.
- Penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Telah Mengikuti Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2022.
- Penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepada Dinas Pertanian sebagai Juara 3 Statistik Awards Kategori Sebagai OPD Terbaik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2022.
- Penghargaan Dari Mentri Pertanian RI sebagai Peringkat III Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tingkat Provinsi Gorontalo Sub Sektor Tanaman Pangan atas nama Syaipul Yusuf,SP (POPT Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo) tahun 2022.

#### **7) Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2022**

- Perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Sistem Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Nomor:



520/1945/DP-Sek/XI/2022 Nomor : 2352/414.4/XI/2022.

- Perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Fasilitas Pengembangan Sektor Pertanian Nomor : 120.23/76/PKS/011.3/2022 Nomor : 195/PEMKESRA/PK/III/2022

#### 4. Kehutanan

##### 1) Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan.

##### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.119**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sasaran : Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari	Indikator Sasaran : Indeks tutupan lahan/hutan	75.98	85.45	75.88	79.21	112.46% (Baik)
	Program Pengelolaan Hutan	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (Ha)	1.000 Ha	1.272 Ha	1.273 Ha	1.302 Ha	127%
		Jumlah pelaku usaha di dalam kawasan hutan yang diverifikasi dan difasilitasi	120 Pelaku Usaha	36 Pelaku Usaha	117 Pelaku Usaha	83 Pelaku Usaha	30%
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi	1.000 Ha	1.272 Ha	35 Ha	594 Ha	127%
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi	1.000 Ha	1.272 Ha	30 Ha	30 Ha	127%

Sumber data : Renstra OPD, Renja OPD, IKLH 2022 dan Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2022

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.120**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kehutanan

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>	<b>17.740.400.498</b>	<b>17.651.279.218</b>	<b>99.50</b>	<b>100</b>	<b>99.48</b>	<b>100</b>
a.	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	522.035.790	519.899.438	99.59	100	99.85	100
	Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi (Dinas)						
	Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Gorontalo Barat (DBH-DR)						
	Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Boalemo (DBH-DR)	99.983.598	99.975.890	99.99	100	-	-
	Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Gorontalo (DBH-DR)	60.573.971	60.567.700	99.99	100	-	-
	Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Bonebolango dan Kota (DBH-DR)	44.138.174	44.137.000	100	100	-	-
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	217.340.045	215.490.898	99.15	100	99.95	100
b.	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	271.608.315	270.993.088	99.77	100	99.98	100
	Sub kegiatan Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	165.058.680	164.520.338	99.67	100	99.96	100
	Sub kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan (DBH-DR)	106.549.635	106.472.750	99.93	100	99.99	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
c.	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15.554.524.447	15.481.846.648	99.53	100	99.48	100
	Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas-DAK Fisik)	2.206.928.000	2.206.928.000	100	100	100	100
	Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas-SHT DAK Fisik)	-	-	-	-	99.93	100
	Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Gorontalo Barat-DAK Fisik)	4.111.250.000	4.051.838.975	98.55	100	99.98	100
	Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Pohuwato-DAK Fisik)	1.012.000.000	1.011.160.389	99.92	100	-	-
	Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Gorontalo Utara-DAK Fisik)	2.213.750.000	2.213.747.000	100	100	-	-
	Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Boalemo-DAK Fisik)	2.530.000.000	2.529.810.000	99.99	100	100	100
	Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Gorontalo-DAK Fisik)	1.897.500.000	1.897.435.445	100	100	100	100
	Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Gorontalo Barat-DAU)	90.000.000	89.395.555	99.33	100	99.64	100
	Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Pohuwato-DAU)	73.700.000	71.424.924	96.91	100	95.55	100
	Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Pohuwato-DBH-DR)	100.000.000	99.170.000	99.17	100	-	-
	Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Gorontalo Utara-DBH-DR)	100.000.200	99.472.250	99.47	100	100	100
	Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Boalemo-DAU)	36.130.000	36.120.000	99.97	100	98.32	100
	Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (KPH Bone Bolango dan Kota-DBH-DR)	200.109.000	196.170.000	98.03	100	97.03	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	-	100	100
	Sub kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (KPH Pohuwato-DAM Penahan-DAK Fisik)	168.600.000	168.307.764	99.83	100	-	-
	Sub kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (KPH Pohuwato-Gully Plug-DAK Fisik)	77.400.000	76.288.020	98.56	100	-	-
	Sub kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (KPH Gorontalo Utara-DAK Fisik)	281.000.000	278.488.460	99.11	100	-	-
	Sub kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (KPH Boalemo-DAK Fisik)	90.600.000	90.599.996	100	100	-	-
	Sub kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (KPH Gorontalo-DAK Fisik)	281.000.000	280.988.170	100	100	-	-
	Sub kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	84.557.247	84.501.700	99.93	100	100	100
d.	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	405.280.422	404.843.710	99.89	100	99.56	100
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dinas)	137.509.229	137.382.836	99.91	100	100	100
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (KPH Gorontalo Utara-DAU)	67.240.369	66.952.000	99.57	100	-	-
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (KPH Gorontalo-DAU)	31.039.720	31.033.699	99.98	100	-	-
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (KPH Bone Bolango dan Kota-DAU)	72.000.000	72.000.000	100	100	-	-
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	97.491.104	97.475.175	99.98	100	98.71	100
e.	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	678.919.666	665.686.622	98.05	100	98.98	100
	Sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH Gorontalo Barat-	-	-	-	-	99.69	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	DAU)						
	Sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH Pohuwato-DAU)	99.065.043	93.030.000	93.91	100	100	100
	Sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH Gorontalo Utara-DAU)	57.296.368	57.095.980	99.65	100	100	100
	Sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH Boalemo-DAU)	135.174.365	131.500.900	97.28	100	98.19	100
	Sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH Gorontalo-DAU)	139.043.738	136.371.942	98.08	100	86.75	100
	Sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH Bone Bolango dan Kota-DAU)	248.340.152	247.687.800	99.74	100	99.67	100
f.	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	308.031.858	308.009.712	99.99	100	99.26	100
	Sub kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	201.481.888	201.476.584	100	100	99.06	100
	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DBH-DR)	106.549.970	106.533.128	99.98	100	99.59	100
2	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>464.403.566</b>	<b>461.423.832</b>	<b>99.36</b>	<b>100</b>	<b>96.77</b>	<b>100</b>
a.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	464.403.566	461.423.832	99.36	100	96.77	100
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	82.383.300	80.773.975	98.05	100	-	-



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan KPH Wilayah IV Gorontalo Utara	69.000.002	69.000.000	100	100	88.38	100
	Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan KPH Wilayah V Boalemo	-	-	-	-	99.80	100
	Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan KPH Wilayah VI Gorontalo (DBH-DR)	89.403.680	89.378.877	100	100	97.88	100
	Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota)	-	-	-	-	-	100
	Sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (Dinas)	123.616.584	123.616.584	100	100	99.75	100
	Sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (KPH Gorontalo Barat)	100.000.000	99.706.000	99.71	100	-	100
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>	<b>151.138.315</b>	<b>150.971.440</b>	<b>99.89</b>	<b>100</b>	<b>99.72</b>	<b>100</b>
a.	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	151.138.315	150.971.440	99.89	100	99.72	100
	Sub kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	151.138.315	150.971.440	99.89	100	99.72	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.355.942.379</b>	<b>18.263.674.490</b>	<b>99.50</b>	<b>100</b>	<b>98.98</b>	<b>100</b>

1. Program Pengelolaan Hutan

Outcome dari program adalah :

- 1.272 Ha (127%) cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi dari target 1.000 Ha.
- 36 pelaku usaha di dalam kawasan hutan yang diverifikasi dan difasilitasi. Capaian target ini hanya 30% dari capaian target yang telah ditetapkan yakni 120 pelaku usaha. Ketidacapaian target disebabkan terjadinya deregulasi peraturan perundang-undangan yang menyebabkan sebagian pelayanan kepada masyarakat yang tidak terpenuhi khususnya pelaku pemungutan HHBK perorangan sehingga hanya mencapai 30%. Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah memfasilitasi para pelaku usaha melalui Program Perhutanan Sosial agar pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dapat diakomodir.





1) Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.

Output kegiatan adalah 2 dokumen Laporan Pengawasan Pengendalian Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan.

- ✓ Sub kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (DBH-DR).
- ✓ Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH V Boalemo, KPH VI Gorontalo, serta KPH VII Bonebolango dan Kota.

Output sub kegiatan : 87 unit (capaian 105%) dari 83 unit sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan, yang rinciannya sebagai berikut:

- KPH I dan II Gorontalo Barat 11 unit sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan;
- KPH V Boalemo 36 unit sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan;
- KPH VI Gorontalo 3 unit sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan;
- KPH VII Bone Bolango dan Kota 37 unit sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan.

- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan.

Output sub kegiatan : 2 dokumen pelaksanaan monitoring dan pengawasan pemegang IPPKH. Monitoring dilakukan di 2 (dua) pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yaitu PPKH PT. Gorontalo Sejahtera Mining di Kabupaten Pohuwato dan PT. Gorontalo Minerals di Kabupaten Bone Bolango sedangkan pengawasan pemegang IPPKH dilakukan terhadap kegiatan penataan saluran air dan sanitasi Sungai Tolango di hutan lindung atas nama Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara; dan permohonan teknis PPKH atas nama Balai Wilayah sungai Sulawesi II Gorontalo di Desa Sigaso Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo utara.

2) Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Output kegiatan adalah : 12 dokumen (capaian 30%) dari 40 dokumen pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan. 12 dokumen terdiri dari 3 dokumen Pertimbangan Teknis PBPH, 3 dokumen Pertimbangan Teknis PTHHBK dan 6 dokumen Pertimbangan Teknis IPHKB pada Areal APL. Kendala dalam pencapaian target kegiatan ini adalah adanya deregulasi peraturan perundang-undangan yang menyebabkan sebagian



pelayanan kepada masyarakat tidak terpenuhi khususnya pelaku pemungutan HHBK perorangan sehingga pencapaian target hanya mencapai 30%. Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah memfasilitasi para pelaku usaha melalui Program Perhutanan Sosial agar pemungutan HHBK dapat diakomodir.

- ✓ Sub kegiatan : Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutanan.

Output sub kegiatan : 12 IPHHBK (capaian 30%) dari 40 dokumen pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan. 12 dokumen terdiri dari 3 dokumen Pertimbangan Teknis PBPH, 3 dokumen Pertimbangan Teknis PTHHBK dan 6 dokumen Pertimbangan Teknis IPHHBK pada Areal APL. Kendala dalam pencapaian target sub kegiatan ini adalah adanya deregulasi peraturan perundang-undangan yang menyebabkan sebagian pelayanan kepada masyarakat tidak terpenuhi khususnya pelaku pemungutan HHBK perorangan sehingga pencapaian target hanya mencapai 30%. Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah memfasilitasi para pelaku usaha melalui Program Perhutanan Sosial agar pemungutan HHBK dapat diakomodir.
- ✓ Sub kegiatan : Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan (DBH-DR).

Output sub kegiatan : 6 pemanfaat (capaian 120%) dari target 5 pemanfaat pemanfaatan HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan. 6 pemanfaat tersebut masing-masing, yakni 1) pemanfaat HHBK pada pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja KPH I-II Gorontalo Barat (Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato); 2) pemanfaat HHBK pada pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja KPH III Pohuwato (Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato); 3) pemanfaat HHBK pada pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja KPH IV Gorontalo Utara (Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara); 4) pemanfaat HHBK pada pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja KPH V Boalemo (Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo); 5) pemanfaat HHBK pada pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja KPH VI Gorontalo; 6) pemanfaat HHBK pada pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja KPH VII Bone Bolango dan Kota.



3) Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan. Output kegiatan adalah 1.222 Ha (85%) dari lahan yang direhabilitasi.

User  
2023-02-28 12:29:41  
Ha lahan yang  
seharusnya 1.222 Ha (85%)

- ✓ Sub kegiatan : Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (DAK Fisik). Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas, KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, dan KPH VI Gorontalo. Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara dilaksanakan di lahan-lahan penduduk dengan pola Agroforestry, yang pelaksanaan penanamannya dengan mengkombinasikan tanaman pertanian, perkebunan dan tanaman Kehutanan dalam satu areal penanaman, dimana bibit tanaman kehutanan ditanam pada areal-areal yang memiliki kemiringan tertentu untuk mengurangi laju run-off yang mengakibatkan erosi dan longsor di pegunungan dan mengurangi sedimentasi di sekitar danau. Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara dilaksanakan dengan menggunakan metode swakelola type 4, yakni mulai dari proses pengadaan bibit hingga penanaman dilaksanakan oleh kelompok tani secara swakelola.

Output sub kegiatan : 1.105 Ha (capaian 110%) dari target 1.008 Ha luas lahan yang direhabilitasi. Lokasi luas lahan yang direhabilitasi tersebut berada di :

- Desa Barakati Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo seluas 75 Ha, dengan penganggaran melalui Dinas. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 34.000 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Mahoni, Mangga Okulasi, Alpokat Okulasi, Jambu Kristal, Jambu Mente, Pala dan Nangka. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bontula Permai;
- Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo seluas 50 Ha, dengan penganggaran melalui Dinas. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 22.500 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Mahoni, Mangga Okulasi, Alpokat Okulasi, Jambu Kristal, Jambu Mente, Pala dan Nangka. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bukit Mahoni;
- Desa Dunggala Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo seluas 50 Ha, dengan penganggaran melalui Dinas. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 22.504 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun



- Jenis tanaman tersebut yakni Mahoni, Mangga Okulasi, Alpokat Okulasi, Jambu Kristal, Jambu Mente, Pala dan Nangka. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Dunggala Mekar;
- Desa Tunas Harapan Kabupaten Pohuwato seluas 175 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 77.000 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Nyatoh, Mahoni, Mangga Okulasi, Durian Okulasi, Rambutan Okulasi, Jambu Kristal. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Cahaya Tani;
  - Desa Wonggarasi Timur Kabupaten Pohuwato seluas 150 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 66.000 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Nyatoh, Mahoni, Mangga Okulasi, Durian Okulasi, Rambutan Okulasi, Jambu Kristal. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Wonggarasi Lestari;
  - Desa Makarti Jaya Kecamatan Dulupi Kabupaten Pohuwato seluas 80 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah III Pohuwato. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 31.181 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Jambu Mete, Rambutan Okulasi, Gamelina, Durian Okulasi, Jabon, dan Mangga Okulasi. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Pecinta Alam;
  - Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara seluas 125 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah IV Gorontalo Utara. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 55.000 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Nyato, Mahoni, Mangga Okulasi, Durian Okulasi, dan Klengkeng Okulasi. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Pecinta Alam;
  - Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara seluas 50 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah IV Gorontalo Utara. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 110.000 batang Mangrove. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Rhizophora sp. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Mangrove Jaya;
  - Desa Pangli Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo seluas 100 Ha, dengan



- penganggaran melalui KPH Wilayah V Boalemo. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 62.500 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Jambu Mente, Rambutan Non Okulasi, Pala, Durian Montong, Jabon. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Huyula;
- Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo seluas 50 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah V Boalemo. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 31.250 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Jabon, Jeruk Siam, Pala, Durian Okulasi, Durian Non Okulasi dan Alpukat. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Agro Mulya;
  - Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo seluas 50 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah V Boalemo. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 62.500 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Jabon, Jeruk Siam, Pala, Durian Okulasi, Durian Non Okulasi dan Alpukat. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Agro Makmur;
  - Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo seluas 50 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah VI Gorontalo. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 34.194 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Mangga Okulasi, Jati, Durian Okulasi, Rambutan Okulasi, Pala, Matoa, Nyatoh, Jeruk Ikan dan Jambu Mente. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Modelidu Lestari;
  - Desa Ulapato B Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo seluas 50 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah VI Gorontalo. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 34.343 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Mangga Okulasi, Rambutan Okulasi, Jati, Durian Okulasi, Pala, Matoa, Nyatoh, Jeruk Ikan, Jambu Mente dan Durian Rambutan. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Bukit Bayade;
  - Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo seluas 50 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah VI Gorontalo. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 37.108 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-



buah. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Mangga Okulasi, Aren, Mahoni, Rambutan Okulasi, Pala, Matoa, Mente, dan Nyatoh. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Jaya Lestari.

- ✓ Sub kegiatan : Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (DAU dan DBH-DR). Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo dan KPH VII Bone Bolango dan Kota.

Output sub kegiatan : 1) 432 Ha (capaian 101%) dari target 425 Ha luas lahan yang direhabilitasi dan 2) 100 Ha luas wilayah pengawasan kawasan hutan di wilayah kelola yang penganggarnya melalui KPH V Boalemo yang berlokasi di lokasi RHL Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta, serta Desa Panggi Kecamatan Dulupi. Untuk lokasi luas lahan yang direhabilitasi berada di :

- Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato seluas 175 Ha dan Desa Wonggarasi Timur Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato seluas 150 Ha , dengan penganggaran melalui KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat. Untuk lokasi ini dilakukan monitoring dan evaluasi penanaman hutan rakyat yang dianggarkan melalui DAK Fisik;
- Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato seluas 8 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah III Pohuwato. Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 1.909 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Durian Okulasi, Rambutan Okulasi, Mente, Jabon dan Nyatoh. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Dudepo Lestari;
- Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato seluas 44 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah III Pohuwato (DBH-DR). Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 17.600 batang Mangrove jenis Rhizophora dan Ceriops. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Berkah Lestari;
- Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara seluas 25 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah IV Gorontalo Utara (DBH-DR). Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 16.518 batang Tanaman Mangrove jenis Rhizophora sp;



- Desa Meranti Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango seluas 30 Ha, dengan penganggaran melalui KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota (DBH-DR). Jumlah tanaman yang disediakan yaitu 13.850 batang yang terdiri dari jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Adapun Jenis tanaman tersebut yakni Manggis, Mangga Okulasi, Rambutan Non Okulasi, Nyatoh, Durian Non Okulasi, Rambutan Non Okulasi dan Mahoni. Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Lembah Lestari.
- ✓ Sub kegiatan : Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (DAK Fisik). Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, dan KPH VI Gorontalo.  
Output sub kegiatan : 14 unit DAM Penahan yang terbangun dan 13 unit Gully Plug yang terbangun. Lokasi pembangunan DAM Penahan dan Gully Plug yang terbangun, yakni sebagai berikut :

Lokasi pembangunan DAM Penahan :

- Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sebanyak 3 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Hulawa Jaya;
- Desa Botuwombato sebanyak 2 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Vanille Jaya;
- Desa Otiola sebanyak 1 titik yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Lestari;
- Desa Buata sebanyak 2 titik yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Hijau Lestari;
- Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo sebanyak 1 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Maju Bersama;
- Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sebanyak 3 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Bulilopito;
- Desa Ulapato B Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sebanyak 1 Unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Batu Alam;
- Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebanyak 1 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Sukun.

Lokasi pembangunan Gully Plug :

- Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebanyak 3 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Bukit Indah;
- Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebanyak 3 unit yang





- dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Melati;
- Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebanyak 3 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Danau Delo;
  - Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo sebanyak 2 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Inar Sejahtera dan Kelompok Tani Hutan Tumba Jaya;
  - Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sebanyak 1 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Iloheluma;
  - Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 1 unit yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Hutan Barito Jaya.
- ✓ Sub kegiatan : Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan  
 Output sub kegiatan : 10 Ha lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan hutan rakyat. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan dilaksanakan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bubatolu. Bibit yang diadakan adalah sejumlah 4.200 batang dengan jenis tanaman Durian Okulasi dan Jambu Mente.
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
 Output kegiatan adalah 74 kali (capaian 308%) dari target 24 kali operasi pengamanan dan perlindungan hutan yang dilaksanakan serta 10 titik hotspot penurunan titik api karhutla.
- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.  
 Output sub kegiatan : 74 kali (capaian 308%) dari target 24 kali operasi pengamanan dan perlindungan hutan yang dilaksanakan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas, KPH IV Gorontalo Utara, KPH VI Gorontalo dan KPH VII Bone Bolango dan Kota. Operasi perlindungan hutan merupakan patroli partisipatif pengamanan hutan secara preventif yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan guna menjaga keutuhan kawasan hutan. Lokasi pelaksanaan operasi pengamanan dan perlindungan hutan adalah lokasi yang dianggap rawan terjadinya illegal logging, perambahan hutan dan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), pembalakan Kawasan Mangrove dan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak kejahatan kehutanan. Selain melakukan operasi, dilakukan pula koordinasi ke Kantor Seksi III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi di Manado





Propinsi Sulawesi Utara.

- ✓ Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Output sub kegiatan : 10 titik hotspot penurunan titik api karhutla. Penurunan titik api/hotspot dilakukan dengan melakukan pengecekan atau pemadaman di lokasi atau areal yang terdeteksi melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu <https://sipongi.menlhk.go.id>, selain itu juga informasi adanya titik api diperoleh melalui laporan masyarakat ataupun petugas kehutanan yang berada di lokasi atau wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan. Informasi yang diperoleh akan diolah dalam bentuk data serta dilakukan pengecekan awal oleh petugas Brigdalkarhutla Provinsi Gorontalo yang berada di lapangan, berdasarkan informasi awal tersebut dilakukan pengkajian dan penentuan lokasi adanya titik api/hotspot. Titik api/hotspot tahun 2022 yang telah dipantau sebanyak 10 (sepuluh) titik api, Kabupaten Gorontalo sebanyak 3 titik api, Kabupaten Boalemo sebanyak 2 titik api, Kabupaten Gorontalo 1 titik api dan Kabupaten Pohuwato 4 titik api.

5) Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Output kegiatan adalah 10 komoditas HHBK yang dikembangkan pada wilayah KPH.

- ✓ Sub kegiatan : Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya.

Output sub kegiatan : 10 komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, KPH VI Gorontalo, KPH VII Bone Bolango dan Kota.

10 komoditas yang dikembangkan di masing-masing KPH tersebut, yakni :

**Tabel 3.121**

Jenis Komoditi dan Lokasi yang dikembangkan KPH

No	KPH	Komoditas		Lokasi
1	KPH III Pohuwato	1.	Durian Okulasi	Desa Tirta Asri Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato
		2.	Pala	
2	KPH IV Gorontalo Utara	3.	Aren	Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
		4.	Madu	Desa Botuwombato Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
3	KPH V Boalemo	5.	Jamur	Desa Jati Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
		6.	Aren	Desa Botumoito Kecamatan Botumoito



				Kabupaten Boalemo
4	KPH VI Gorontalo	7.	Kopi	Dusun Bohulo Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
		8.	Pala	Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
		9.	Madu	Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
5	KPH VII Bone Bolango dan Kota	10.	Mente	Desa Bulontala Timur, Desa Bondaraya, Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango

6) Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun.

Output kegiatan adalah 5 laporan (capaian 166%) dari target 3 laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan.

✓ Sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun.

Output sub kegiatan : 5 Laporan (capaian 166%) dari target 3 Laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan, yakni Laporan PSDH, Laporan DR dan Laporan Penyusunan Target PNBPN serta 2 laporan pengawasan PUHH yakni Laporan pengangkutan Kayu Olahan dan Kayu Bulat Pemegang PBPHH se Provinsi Gorontalo.

✓ Sub kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DBH-DR).

Output sub kegiatan 4 dokumen (capaian 133%) dari target 3 dokumen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang difasilitasi. 4 laporan tersebut yaitu 2 Laporan Verifikasi Pemenuhan komitmen IUIPHHK melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Verifikasi Pemenuhan Komitmen Legalitas dan Kelestarian) UD.Djalal Persada dan CV.Putra Nugie Pratama di Kabupaten Gorontalo Utara dan 2 Laporan Verifikasi Pemenuhan komitmen IUIPHHK melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Verifikasi Pemenuhan Komitmen Legalitas dan Kelestarian) CV.Anugerah dan UD.Trikandi di Kabupaten Pohuwato.



2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Outcome dari program adalah 506,73 Ha dari target 506 Ha wilayah DAS yang direhabilitasi.

1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Output kegiatan adalah 506,73 Ha dari target 506 Ha wilayah perhutanan sosial yang dikelola.

- ✓ Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan.

Output sub kegiatan : 50 orang penyuluh kehutanan dan SDM kehutanan yang dilatih. Materi pelatihan yaitu penyusunan program penyuluh kehutanan dan peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan.

- ✓ Sub kegiatan : Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan. Output sub kegiatan : 4 KTH yang diberikan penguatan dan pendampingan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, KPH Wilayah VI Gorontalo (DBH-DR), dan KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota.

- ✓ Sub kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

Output sub kegiatan : 506,73 Ha dari target 506 Ha kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas dan KPH I dan II Gorontalo Barat. Akses Kelola perhutanan sosial yang difasilitasi di 2 (dua) desa yakni Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo seluas 136,43 Ha, dan di Desa Karya Indah Kecamatan asparaga Kabupaten Gorontalo dengan luas 370,30 Ha dalam bentuk skema Hutan Kemasyarakatan.

3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Outcome dari program adalah 50 Ha wilayah DAS yang direhabilitasi.

1) Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah areal 50 Ha areal DAS prioritas dan hutan rakyat yang direhabilitasi.

- ✓ Sub kegiatan : Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

Output sub kegiatan : 50 Ha pemeliharaan tanaman hutan dan MPTS di kawasan hutan dan lahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara tanaman yang telah



ditanam pada tahun sebelumnya. Lokasi pelaksanaan kegiatan ini yaitu di Desa Bulontala seluas 50 Ha, hal ini dilakukan karena pada daerah diperuntukkan untuk perlindungan mata air dan sebagian besar masyarakat tidak mengelola lahan tersebut untuk wilayah pertanian. Kegiatan Pemeliharaan ini dilaksanakan oleh Kelompok Tani Bukit Jaya. Pengadaan bibit tanaman pada kegiatan pemeliharaan sejumlah 6.250 batang dengan jenis tanaman yaitu Jambu Mente dan Mahoni.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### Permasalahan :

1. Program Pengelolaan Hutan
  - a. Faktor cuaca sangat menentukan dalam pelaksanaan penanaman, sehingga mempengaruhi tata waktu pelaksanaan penanaman;
  - b. Pemahaman tentang swakelola type 4 kepada masyarakat sangat terbatas dan tidak disetujuinya penggunaan dana pendamping 5% dari Dana Alokasi Khusus oleh Biro Perencanaan KLHK;
  - c. Pembukaan lahan Pertanian pada areal kemiringan diatas 30%;
  - d. Anggaran pelaksanaan operasi jika dibandingkan dengan luas wilayah kawasan hutan Provinsi Gorontalo serta sumber daya manusia dari personil polisi kehutanan ataupun masyarakat mitra polhut belum seimbang;
  - e. Alih fungsi lahan yang lebih didominasi oleh tanaman musiman, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi bisa menjadi salah satu penyebab tingginya kerawanan banjir di Provinsi Gorontalo, baik di Kabupaten maupun di kota Gorontalo;
  - f. Penanaman Mangrove yang telah dilakukan belum mampu mengimbangi luas Hutan mangrove yang kritis dengan capaian keberhasilan 70% sehingga belum memberikan pengaruh nyata terhadap perbaikan kondisi lahan kritis;
  - g. Minimnya sarana prasarana berupa mobil operasional lapangan sehingga dalam melaksanakan pengangkutan temuan masih kurang maksimal.
  - h. Dari target 425 Ha luas lahan yang direhabilitasi hanya 107 Ha lahan yang dilakukan rehabilitasi sedangkan 325 Ha hanya dilakukan monitoring dan evaluasi penanaman sebagai dana penunjang penanaman hutan rakyat yang berasal dari DAK Fisik, 100 Ha lainnya dilaksanakan pengawasan kawasan hutan di wilayah kelola yang penganggarannya melalui KPH V Boalemo yang berlokasi di lokasi RHL Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta,



serta Desa Pangi Kecamatan Dulupi.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
  - a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
  - b. Masih lemahnya pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan pada areal izin perhutanan sosial;
  - c. Kurangnya jumlah Penyuluh Kehutanan dan pendamping perhutanan sosial;
  - d. Belum efektifnya penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/instansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) belum optimal;
  - e. Belum sepenuhnya diimplementasikan regulasi/kebijakan dan aturan khusus Perhutanan Sosial di Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dan menjadi payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial yang menjadi landasan keberpihakan kepada akses kelola sumberdaya alam terutama hutan oleh masyarakat secara luas.

Solusi :

1. Program Pengelolaan Hutan
  - a. Penanaman dilaksanakan tepat di waktu musim penghujan, karena bibit yang baru ditanam di alam terbuka jika tidak memperoleh asupan air mudah stress dan mati;
  - b. Teknik Pelaksanaan Swakelola Type 4 untuk DAK Fisik memerlukan Pendampingan Kegiatan, sehingga dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya perlunya dana pendamping kegiatan, baik dari DAK Fisik/DAU;
  - c. Perlu pemahaman kepada masyarakat lahan/areal apa saja yang dapat dijadikan lahan pertanian serta melakukan edukasi mengenai system Agroforestry pada lahan-lahan yang memiliki kemiringan tertentu;
  - d. Penambahan sumberdaya dan anggaran dalam pelaksanaan patroli pengamanan dan perlindungan hutan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perusakan hutan yang lebih meluas serta melakukan penertiban industri dan tempat penampungan kayu illegal yang dilakukan secara kolaboratif antar penegak



- hukum;
- e. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dalam kawasan hutan atau pinggir kawasan hutan untuk berpartisipasi melakukan penanaman pohon yang menunjang perekonomian masyarakat sehingga tercipta kelestarian dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial;
  - f. Kegiatan penanaman Mangrove perlu ditunjang oleh sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas yang mengakibatkan rusaknya hutan mangrove serta menghimbau agar masyarakat menanam kembali tanaman mangrove pada lahan dengan kategori kritis;
  - g. Pengadaan kendaraan operasional lapangan;
  - h. Luas lahan kritis yang direhabilitasi telah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dijadikan sebagai pendukung pelaksanaan DAK Fisik tidak mengurangi luas lahan kritis yang direhabilitasi, namun dapat menunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi luas lahan kritis yang dianggarkan melalui DAK Fisik.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- a. Melakukan peningkatan pengetahuan dan informasi melalui sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat;
  - b. Melakukan identifikasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di kabupaten dengan meningkatkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai UPTD Dinas Kehutanan yang berlokus di tingkat tapak;
  - c. Penyediaan tenaga pendamping bagi Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Pendampingan Perhutanan Sosial berbasis komunitas kemitraan lingkungan (komunitas peduli lingkungan, kader lingkungan, kader konservasi, penerima penghargaan kalpataru, dan lain-lain);
  - d. Penting untuk penguatan lembaga/kelompok Perhutanan Sosial agar dapat beroperasi dan memiliki unit usaha yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) mutlak terus didorong dan diperluas;

- e. Perlu segera diimplementasikan regulasi/kebijakan dan aturan khusus Perhutanan Sosial di Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan dan menjadi payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial yang menjadi landasan keberpihakan kepada akses kelola sumberdaya alam terutama hutan oleh masyarakat secara luas.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.122**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	1.000 Ha	1.272 Ha	1.000 Ha	1.207 Ha

**5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan pemanfaatan energi dan air

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.123**

Target dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sasaran : Meningkatnya penyediaan sumber air bersih dan kebutuhan listrik bagi rumah tangga sasaran	Indikator Sasaran : - Jumlah rumah tangga sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik	375 RTS	375 RTS	450 RTS	450 RTS	100%
	Program pengelolaan ketenagalistrikan	- Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan	100%	89.68%	92%	85%	89.68%
		Indikator Sasaran : - Jumlah rumah tangga sasaran yang terpenuhi air	3 sumur bor	9 sumur bor	3 sumur bor	3 sumur bor	300%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<b>bersih</b>					
	Program pengelolaan aspek kegeologian	- Persentase pemenuhan air bersih di daerah sulit air	54%	65%	50%	56%	120.37%
	Program pengelolaan mineral dan batubara	- Persentase ketersediaan Data Wilayah prospek sumberdaya mineral dan Informasi Geologi	20%	20%	20%	20%	100%
		- Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar	100%	83.52%	82.91%	91.46%	83.52%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.124**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral  
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1.</b>	<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	<b>1.050.399.493</b>	<b>888.075.430</b>	<b>84.55</b>	<b>100</b>	<b>86.36</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.050.399.493	888.075.430	84.55	100	86.36	100
	Sub kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.050.399.493	888.075.430	84.55	100	86.36	100
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Energi Terbarukan</b>	<b>315.229.765</b>	<b>313.592.844</b>	<b>99.48</b>	<b>100</b>	<b>98.88</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	315.229.765	313.592.844	99.48	100	99.71	100
	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	315.229.765	313.592.844	99.48	100	99.71	100
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Aspek Kegeologian</b>	<b>1.648.978.620</b>	<b>1.648.070.756</b>	<b>99.94</b>	<b>100</b>	<b>99.96</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.648.978.620	1.648.070.756	99.94	100	99.96	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	1.648.978.620	1.648.070.756	99.94	100	99.96	100
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Mineral dan Batubara</b>	<b>689.914.893</b>	<b>687.744.899</b>	<b>99.72</b>	<b>100</b>	<b>99.91</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	689.914.893	687.744.899	99.72	100	99.91	100
	Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	494.954.932	493.200.599	99.65	100	99.82	100
	Sub kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	194.959.961	194.774.300	99.90	100	100	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.704.522.771</b>	<b>3.537.483.919</b>	<b>95.49</b>	<b>100</b>	<b>96.28</b>	<b>100</b>

#### 1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan sebesar 89,68%. Pada Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2017-2022, data awal tercatat rumah tangga yang belum berlistrik sebanyak 7.756 RTS dan sampai dengan tahun 2022 jumlah rumah tangga sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik telah mencapai 6.956 RTS. Dari realisasi 6.956 RTS dapat dilihat tidak mencapai target 7.756 RTS hal ini disebabkan di tahun 2020 karena adanya covid-19 anggaran untuk 1000 RTS dialihkan dan sisa anggaran yang tersedia hanya untuk 45 RTS.

- 1) Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan.



Output kegiatan adalah 375 RTS yang terpenuhi kebutuhan listrik

- ✓ Sub Kegiatan : Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.

Output Sub Kegiatan : 375 RTS yang terpenuhi kebutuhan listrik dari target 375 RTS sesuai SK Gubernur Gorontalo Nomor : 179/15/V/2022 dan SK Gubernur Gorontalo Nomor : 344/15/X/2022

- Kota Gorontalo : 14 RTS
- Kabupaten Gorontalo : 289 RTS
- Kabupaten Boalemo : 49 RTS
- Kabupaten Bonebolango : 23 RTS

## 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan sebesar 89,68%.

### 1) Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

- ✓ Sub kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

Output sub kegiatan : - 1 (satu) dokumen laporan hasil pemantauan pemanfaatan Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

- Laporan pengawasan terhadap Badan Usaha dan Non Badan Usaha penyedia energi yakni : 30 SPBU dan 18 Agen LPG.

## 3. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Outcome dari program adalah Persentase pemenuhan air bersih di daerah sulit air sebesar 65%. Pada Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2017-2022, data awal tercatat terdapat 100 titik daerah sulit air dan telah terakomodir sampai dengan tahun 2022 sebanyak 65 titik.

### 1) Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

- ✓ Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah.



Output Sub kegiatan : 9 (sembilan) titik sumur bor yaitu :

- 2 titik didesa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo
- 1 titik didesa Tingkohubu Timur Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango
- 1 titik didesa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
- 1 titik didesa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo
- 1 titik didesa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo
- 1 titik didesa Padengo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo
- 1 titik didesa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo
- 1 titik didesa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

#### 4. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Outcome dari program adalah Persentase ketersediaan Data Wilayah prospek sumber daya mineral dan Informasi Geologi sebesar 20%. Program tersebut merupakan program baru yang dirumuskan pada RPJMD Tahun 2017-2022 dan target atas program tersebut untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah tersedianya data wilayah prospek sumberdaya mineral dan informasi geologi di 5 (lima) lokasi di Provinsi Gorontalo.

2) Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.

- ✓ Sub Kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.

Output Sub kegiatan adalah : 1 (satu) laporan penyelidikan geologi teknik yang menunjang infrastruktur

- ✓ Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Output Sub Kegiatan : 71 izin usaha pertambangan yang dibina dan diawasi.

### 3) Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan energi ketenagalistrikan tahun 2022, antara lain :

- Banyaknya data pemohon pemasangan listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang tidak masuk verifikasi tahap 1
- Sejumlah pemohon pemasangan listrik gratis telah melakukan pemasangan



meteran listrik dan instalasi sendiri disebabkan lama menunggu.

**Solusi :**

- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemohon agar masyarakat yang belum diusulkan agar dapat segera diusulkan
- Melakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan untuk dilakukan lelang ulang
- Melakukan penggantian nama pemohon yang telah memenuhi syarat administrasi dan tehnik.

**Permasalahan :** dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan sumberdaya mineral tahun 2022, antara lain:

- Perizinan berusaha sektor sumber daya mineral belum dapat dilayani secara optimal dalam sistem OSS
- Tingginya penambahan usaha pertambangan rakyat jenis batuan yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo
- Rentang kendali untuk pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis yang terlalu panjang bagi usaha pertambangan (kewenangan di provinsi)
- Tingginya permintaan masyarakat untuk kebutuhan air bersih (sumurbor)

**Solusi :**

- Menyurat secara resmi ke kementerian investasi/BKPM
- Koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan bekerjasama dengan Inspektur Tambang
- Koordinasi dengan kementerian terkait melalui dana APBN

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.125**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Yang Terpenuhi Air Bersih	3 Sumur bor (150 RTS)	9 Sumur bor (450 RTS)	3 Sumur bor (150 RTS)	3 Sumur bor (150 RTS)
2	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik	375 RTS	375 RTS	450 RTS	450 RTS

### 5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik dan terpenuhi air bersih tahun 2022 tercapai sesuai target. Rasio Desa berlistrik di provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.126**

Rasio Desa Yang Teraliri Listrik Provinsi Gorontalo Tahun 2022

NO	KABUPATEN	JUM. KEC	JUMLAH DESA/KELURAHAN BERLISTRIK				BELUM BERLISTRIK
			KEL/DESA	LISTRIK PLN	LISTRIK NON PLN	TOTAL BERLISTRIK	
1	Kab. Boalemo	7	86	86	-	86	-
2	Kab. Bone Bolango	18	165	164	1	165	-
3	Kab. Gorontalo	19	207	206	1	207	-
4	Kab. Gorontalo Utara	11	123	122	1	123	-
5	Kab. Pohuwato	13	104	104	-	104	-
6	Kota Gorontalo	9	50	50	-	50	-
	Provinsi Gorontalo	77	735	727	3	735	

### 6. Perdagangan

#### 1) Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

- ❖ Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan

##### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.127**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri	Indikator Sasaran : Laju inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	2.15%	0.19%	2.15%	0.39%	8.84%
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	100%	100%	90%	97.96%	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah perdagangan antar pulau	3.600 Kali	4.033 Kali	3.360 Kali	3.808 Kali	120.03%
	Program : Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor	12 Komoditi	11 Komoditi	10 Komoditi	10 Komoditi	91.66 %
	Program : Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Sertifikat Mutu Barang	3 Sertifikat	12 Sertifikat	3 Sertifikat	-	400%

- Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli masyarakat diperoleh dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,15% dan inflasi tahun 2021 sebesar 2,59% . (gorontalo.bps.go.id) yaitu  

$$\text{Inf} = \frac{\text{inf}(n+1) - \text{inf}(n)}{\text{Inf}(n)} \times 100\%$$
- Untuk persentase barang beredar sesuai ketentuan diperoleh dari total hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 91 temuan dibagi dengan total temuan yang terjadi sebesar 91 temuan di tahun 2022.
- Jumlah perdagangan antar pulau merupakan nilai akumulasi dari jumlah perdagangan antar pulau tahun 2021 sebanyak 3.808 kemudian bertambah ditahun 2022 sebanyak 225 kali perdagangan antar pulau.
- Komoditi Export 2022 yaitu Ikan tuna, molases, kelapa parut, santan, biji kakao, ijuk, Siauw Nutmeg (biji pala), jagung, wood pelet, briket, gula aren.

## 2) Program dan Kegiatan

Total Pagu setelah perubahan 2022 untuk urusan Perdagangan sebesar Rp. 2.493.750.000,- dimana untuk urusan perdagangan ini terdiri atas 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Pagu awal untuk urusan perdagangan ini sebesar Rp. 3.239.297.002,- kemudian revisi pada beberapa belanja sebesar Rp. 27.500.000,-, tambahan anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 816.603.107. kemudian melalui sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 4.500.000.000,- dan DID periode 2

sebesar Rp. 2,493.750.000,-

Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

Total Pagu Anggaran Tahun 2022 urusan perdagangan adalah sebesar Rp. 11.022.150.109,- dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Belanja Pegawai : Rp. -
- ❖ Belanja Barang/Jasa : Rp. 11.022.150.109,-
- ❖ Belanja Modal : Rp. -

Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp 10.457.272.202,-

**Tabel 3.128**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perdagangan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>1</b>	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>8.684.927.048</b>	<b>8.150.596.558</b>	<b>93.85</b>	<b>100</b>	<b>99.94</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	8.684.927.048	8.150.596.558	93.85	100	99.94	100
	Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.684.927.048	8.150.596.558	93.85	100	99.94	100
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	88.645.191	83.495.100	94.19	97.34	-	-
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	88.645.191	83.495.100	94.19	97.34	-	-
<b>2</b>	<b>Program</b>	<b>284.130.413</b>	<b>271.011.547</b>	<b>95.38</b>	<b>98.59</b>	<b>99.52</b>	<b>100</b>



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	<b>Pengembangan Ekspor</b>						
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	284.130.413	271.011.547	95.38	98.59	99.52	100
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	284.130.413	271.011.547	95.38	98.59	99.52	100
<b>3</b>	<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>1.964.447.457</b>	<b>1.952.168.997</b>	<b>99.37</b>	<b>100</b>	<b>95.78</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.127.308.103	1.125.207.278	99.81	100	90.87	99.04
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.127.308.103	1.125.207.278	99.81	100	90.87	99.04
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	719.207.635	709.056.899	98.59	100	99.37	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	445.274.499	441.969.323	99.26	100	99.57	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi	273.933.136	267.087.576	97.50	100	98.94	100
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota	117.931.719	117.904.820	99.98	100	100	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	117.931.719	117.904.820	99.98	100	100	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.022.150.109</b>	<b>10.457.272.202</b>	<b>94.88</b>	<b>99.94</b>	<b>98.83</b>	<b>100</b>

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2022 urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting





Outcome dari program adalah jumlah perdagangan antar pulau dengan target 3600 kali dan capaian 4033 kali (Realisasi perdagangan antar pulau merupakan nilai akumulasi capaian tahun 2021 yaitu sebanyak 3808 kali ditambahkan dengan jumlah perdagangan antar pulau posisi sampai November 2022 sebanyak 225 kali).

1) Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

- ✓ Sub Kegiatan : Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
 Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 942.857.048,- kemudian bertambah melalui revisi sebesar Rp. 152.460.000,- dari sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan tambahan anggaran melalui APBD-P sejumlah Rp. 595.860.000, yang diperuntukkan untuk item belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 496.250.000,- dan operasional pelaksanaan operasi pasar (perjalanan dinas dalam daerah) Rp. 94.330.000,-, serta tambahan honorarium PTT. Sehingga total anggaran yang bersumber dari DAU 2022 untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.691.177.048,-  
 Kemudian dengan Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2021, sub kegiatan ini mendapat tambahan anggaran dari sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (peruntukkan untuk item belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 4.421.250.000,- dan belanja pendukung operasi pasar seperti belanja cetak kupon, spanduk dan sewa tenda Rp. 78.750.000,-) dan tambahan pada DID periode 2 (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022) sebesar Rp. 2.493.750.000,- yang diperuntukkan untuk item belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Sehingga total sampai Desember 2022 sejumlah Rp. 8.684.927.048,-



Output Kegiatan :

- ❖ Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2022 ditargetkan sebanyak 150 kali yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk sekali pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi, ditargetkan dapat melayani 1000 kpm hingga 2500 kpm (Kelompok Penerima Manfaat). Adapun total anggaran untuk mendukung pelaksanaan Operasi pasar Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi yaitu bahan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2022 sebanyak Rp. 8.212.500.000,- (dari sumber dana APBD 2022 sebanyak Rp. 801.250.000,-, finalisasi APBD-P Rp. 496.250.000,0 kemudian tambahan dari sumber dana DID periode 1 sejumlah Rp. 4.421.250.000 dan DID periode 2 sejumlah Rp. 2.493.750.000,-).

Penambahan anggaran pada sub kegiatan karena adanya situasi kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) secara internasional, yang mengakibatkan kelangkaan stok serta kenaikan harga minyak goreng secara nasional, ditambah lagi dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melalui Bidang Perdagangan mengalokasikan anggaran tersebut yang masuk secara bertahap baik melalui dana APBD-P hingga Dana Insentif Daerah (DID).

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dari Target 150 kali pelaksanaan, yang terlaksana hingga 28 Desember 2022 sebanyak 33 kali pelaksanaan dan melayani 65.000 KPM.

Outcome : memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya masyarakat



yang ada di Provinsi Gorontalo.

- ❖ Pemantauan Harga Barang Pokok di Pasar Rakyat di Kabupaten/Kota sebanyak 6x, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi ketersediaan stok barang pokok, sekaligus mengumpulkan informasi harga barang pokok yang berlaku saat itu di Pasar Rakyat, apakah terjadi kenaikan harga ataukah terjadi penurunan harga, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, ataupun dasar pelaksanaan Operasi Pasar/ Kebutuhan Pokok Bersubsidi.
- ❖ Honorarium pengolah data dan operator Sistem Perdagangan Antar Pulau untuk mengimput data bongkar muat antar muat/antar Provinsi yang sumber data dari pelabuhan bongkar muat di Provinsi Gorontalo.

2) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.

Anggaran untuk mendukung kegiatan ini tahun 2022 sebesar Rp. 88.645.191,- dari pagu induk sejumlah Rp. 241.105.191, kemudian direvisi ke sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 152.460.000,-

Output Sub Kegiatan :

- ❖ Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pengawasan dikhususkan untuk pupuk bersubsidi, mulai dari alokasi kuota pupuk bersubsidi di tiap Kabupaten/Kota, proses pendistribusiannya, penerapan harga eceran tertinggi, hingga kesesuaian penerima alokasi pupuk bersubsidi. Secara umum hasil kegiatan pengawasan berjalan dengan lancar, namun belum begitu efektif karna terbatas dengan ketersediaan anggaran. Permasalahan mulai adanya keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi, masih adanya petani yang ingin membeli pupuk subsidi, namun belum terdaftar dalam sistem E-RDCK, hingga adanya indikasi penjualan pupuk subsidi yang tidak sesuai (baik kuota, lokasi, hingga penerima pupuk), semuanya bisa diawasi dan dikoordinasikan dengan pihak produsen maupun distributor untuk penyelesaian permasalahannya, dan jika ada pelanggaran cukup ditindak-lanjuti dengan sanksi administrasi.



- ❖ Pelaksanaan Rapat koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida dilaksanakan sebanyak 2 kali di Provinsi Gorontalo.

## 2. Program Pengembangan Ekspor

Outcome dari program adalah Jumlah ekspor dengan target sebanyak 12 komoditi dan capaian 11 komoditi atau 91,66% capaian.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Output Kegiatan adalah :

- ❖ Kegiatan Misi Dagang di Provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan Misi Dagang dilaksanakan pada bulan maret tahun 2022 dan diikuti oleh 6 (enam) Pelaku Usaha Dari Gorontalo yaitu Rahida Cookies Gorontalo (Aneka Kue kering, Komunitas Bisa Ekspor Gorontalo (komoditi cengkeh, kelapa, kemiri, jagung, mente, kayu manis dan pala), IKM Madu Suwawa (Produk Madu), IKM Moringa Gorontalo (Teh celup daun kelor, sarabba kelor, serbuk daun kelor), IKM Azzarah (Bahan Karawo, Dasi Karawo, Kopianh Karanji), IKM Aren GO (Gula Aren).

- ❖ Pameran Dagang

Keikutsertaan pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke 37 yang merupakan agenda promosi di sektor perdagangan, pariwisata dan investasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan pameran diikuti 2 (dua) IKM yaitu IKM Belgina Collection (produk kerajinan karawo) dan UKM Say Factory (produk Pangan).

- ❖ Identifikasi komoditi ekspor di kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo
- ❖ Kegiatan Pembinaan UKM yang memahami prosedur ekspor tahun 2022 pelaksanaannya didukung melalui sumber dana APBN akan tetapi di tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan ini di refocusing anggarannya.



**Tabel 3.129**  
Rekap Realisasi Export Berdasarkan Komoditi  
Selang Bulan Desember 2022

No.	Jenis Komoditi	Jumlah komoditi (Kg)	Nilai Export (USD)	Negara Tujuan	Exportir
1	Ikan Tuna	17.279,10	190.320,80	Malaysia, Jepang, Malaysia, Bangkok	CV. Camar Laut, CV. Baris Anugerah
2	Molases	32.702.770	5.365.864	Vietnam, Filipina	PT. Pabrik Gula Gorontalo
3	Kelapa Parut	4.903.610	10.230.289,84	Wilayah Eropa, China	PT. Royal Coconut, PT. trijaya Tangguh
4	Santan	517.000	635.850,21	China	PT. Royal Coconut, PT. Trijaya Tangguh
5	Biji Kakao	5	214,29	Japan	
6	Ijuk	39	107,14	Japan	
7	Siauw Nutmeg (biji pala)	15.000.000	160.500,00	Belanda	
8	Jagung	82.950.000	25.097.450,00	Filipina	PT.Seger Agro Nusantara, PT Dwi Karya Makmur, PT. Sinar Pangan Abadi
9	Wood Pelet	20.704.777	3.204.193,00	Korea	
10	Briket	18.000	5.400,00	Arab Saudi	CV. Nature Birkah
11	Gula Aren	1.476	3.303,39	Dubai, Jepang	KTH unit VI Gorontalo (Aren Go)
	<b>JUMLAH</b>	<b>156.814.956,10</b>	<b>44.893.492,67</b>		

3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Outcome dari program adalah Jumlah sertifikasi mutu barang dengan target 3 sertifikat dan capaian 12 sertifikat.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan



Konsumen.

Output Sub Kegiatan : penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, monitoring dan evaluasi BPSK dan operasional BPSK.

- Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK.
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK yang dilaksanakan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato.
- Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di 3(tiga) Kabupaten/Kota, yakni BPSK Kabupaten Boalemo, BPSK Kabupaten Gorontalo Utara, BPSK Kabupaten Bone Bolango, dimana pelantikan dan pengambilan sumpah pada Bulan September Tahun 2022. BPSK ini beranggotakan 9 (Sembilan) Orang anggota dan Sekretariat BPSK beranggotakan 3 (tiga) orang anggota.
- Sosialisasi BPSK di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.  
Sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPSK juga di laksanakan oleh anggota BPSK di setiap pelaksanaan pasar murah di kabupaten kota sesuai dengan lokasi pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.
- Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo sebanyak 91 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 91 kasus antara lain tentang Pengaduan permasalahan pembiayaan, Pengaduan mengenai pengkreditan melalui Bank, Pengaduan Klausula Baku.
- Penyelesaian sengketa Konsumen :
  - BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2022 menerima 17 kasus dan diselesaikan secara mediasi.
  - BPSK Kota Gorontalo, 12 kasus dan penyelesaian sengketa secara mediasi 12 kasus.
  - BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2022, menerima 17 kasus, yang diselesaikan melalui mediasi 4 kasus, arbitrase 7 kasus, masih dalam proses 2 kasus, pembatalan permohonan 4 kasus.
  - BPSK Kabupaten Boalemo, menerima 12 kasus ditahun 2022. Masih dalam proses 3 kasus, mediasi 1 kasus, arbitrase 2 kasus dan 2 kasus dibatalkan



oleh pemohon, menunggu putusan 4 kasus.

- BPSK Kabupaten Bone Bolango yang dilantik di bulan September 2022 belum menerima kasus pengaduan di tahun 2022.
- Kabupaten Gorontalo Utara, 2 kasus telah diselesaikan dan 1 kasus dalam proses

## 2) Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Setifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Pengujian

Output Sub Kegiatan : - Pengambilan sampel komoditi di kabupaten/kota

- Pemeliharaan alat laboratorium yaitu penggantian baterai UPS 12.000 volt
- Kalibrasi peralatan uji laboratorium oleh lembaga kalibrasi terakreditasi
- Pengujian khusus untuk komoditi akreditasi sebagai komoditi ekport yaitu jagung sejumlah 83.250 ton dengan 12 SKM yang diterbitkan
- Fasilitasi kandungan gizi untuk UKM pangan berkemasan standar untuk tahun 2022 adalah sejumlah 53 UKM di kab/kota se Provinsi Gorontalo
- Uji profisiensi lada putih diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan RI.
- Magang pengujian proksimat di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Manado, Sulawesi Utara
- Penyediaan bahn kimia serta bahan penunjang pengujian laboratorium
- Mengikuti kegiatan Uji Banding antar Laboratorium, yaitu :
  - ❖ Uji banding beras yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Bandar Lampung pada tanggal 20 sd 23 juni 2022, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian



komoditi beras.

- ❖ Uji banding jagung yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi mutu barang gorontalo pada tanggal 26 sd 30 september 2022, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi jagung. Diantara 4 (empat) laboratorium, UPTD BPSMB Disperindag Provinsi sulsel, UPTD BPSMB Provinsi sulteng, UPT PSMB jember dan UPTD BPSMB Disperindag Lampung memperoleh hasil satisfactory (sangat memuaskan).
- ❖ Uji banding rumput laut yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi mutu barang samarinda pada tanggal 5 sd 9 desember 2022

Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Sertifikasi

Output Sub Kegiatan : jumlah pelaku usaha UKM yang menerapkan standar mutu barang, target 30 pelaku usaha dengan capaian sebanyak 51 pelaku usaha.

- Pengawasan mutu barang/komoditi ber-SNI di kabupaten/kota
  - Sosialisasi penerapan standardisasi mutu komoditi beras di kabupaten/kota
  - Sosialisasi tugas dan fungsi BPSMB melalui media cetak (Harian Gorontalo Post) dan media elektronik (TVRI)
  - Penerapan sistem manajemen mutu
  - Surveilans (audit eksternal) Sistem Manajemen Mutu oleh KAN
  - Studi banding komparasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dan BPSMB Manado, Sulawesi Utara
  - Jejaring kerja dengan Dinas Perindag kabupaten/kota
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen.

Output Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa dan pengawasan





perdagangan, lokasi pengawasan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.

1. Untuk Barang :
  - a. Standar
  - b. Label dalam bahasa Indonesia
  - c. Petunjuk Penggunaan
  - d. Jaminan Layanan Purna Jual
  - e. Cara Menjual
  - f. Pengiklanan
  - g. Kalusula Baku
2. Untuk Jasa :
  - a. Standar
  - b. Jaminan dan/ataugaransi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
  - c. Kalusula Baku
3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi :
  - a. Perizinan di bidang perdagangan
  - b. Perdagangan Barang yang diawasi,di larang dan/atau diatur
  - c. Distribusi
  - d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
  - e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
  - f. Pendaftaran Gudang
  - g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
  - h. Perdagangan melalui sistim elektronik

**Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :**

1. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin, Yang belum sesuai dengan Standar Nasional
2. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang di



Kabupaten Gorontalo, toko di Kabupaten Boalemo serta Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara.

**Pengawasan Perdagangan antara lain :**

1. Distribusi
  - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
    - Pola Distribusi dari Produsen
    - Distributor, Agen ke Pengecer
    - Distribusi Barang
  - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur
    - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya
  - c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting
2. Perijinan
  - Sarana perdagangan lainnya
3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
  - Pasar rakyat
  - Pusat-pusat perbelanjaan
  - Toko swalayan
  - Gudang
  - Sarana perdagangan lainnya

**Hasil Pengawasan**

1. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang.
2. Untuk kota Gorontalo tidak lagi mengeluarkan Tanda daftar gudang sebab daerah kota Gorontalo tidak memenuhi syarat lingkungan untuk didirikan gudang.
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin.
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnnya sudah menghampiri (dalam



proses penegakan Hukum oleh kepolisian)

6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET
7. Terdapatnya Toko-Toko yang menjual HP yang tidak Mempunyai Garansi.
8. Masih terdapatnya distributor besi yang menjual Besi Beton yang sudah mempunyai SNI namun ukuran panjang diameternya tidak sesuai dengan ukuran yang di janjikan.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### Permasalahan :

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan membutuhkan dukungan anggaran terutama pada pelaksanaan misi dagang yang bertujuan untuk menggenjot pertumbuhan ekspor dimana para pelaku usaha, eksportir akan mempromosikan produknya dan diharapkan terjadi transaksi dengan pembeli dari mancanegara begitupun halnya dengan dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan UKM/IKM/Pelaku Usaha agar dapat Memahami Prosedur Ekspor.
2. Masih kurangnya pemahaman eksportir dalam penggunaan aplikasi E-SKA untuk penerbitan surat keterangan Asal.
3. Komoditi ekspor Gorontalo masih dalam bentuk raw material dan berupa bahan baku sehingga nilai jual masih rendah.
4. Membutuhkan dukungan anggaran untuk kegiatan pengawasan barang beredar agar kegiatan pengawasan juga dapat menjangkau hingga ke ke daerah-daerah terpencil serta untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan konsumen yang belum memahami tentang peraturan perlindungan konsumen dan peraturan tentang pengawasan barang dan jasa serta pengawasan perdagangan.
5. Komoditi yang di antarpulaukan melalui angkutan darat tidak dapat di awasi dengan baik. Selama ini data antar pulau hanya berdasarkan data Bongkat Muat Pelabuhan. Padahal banyak komoditi yang diangkut melalui darat tujuan Makassar dan Manado yang tidak dapat di awasi dengan baik.
6. Keberadaan UPTD BPSMB belum tersosialisasi secara maksimal di kabupaten/kota.
7. Minimnya peralatan laboratorium pengujian mutu terutama instrumen analisis menyebabkan pelayanan kepada konsumen/pelanggan tidak maksimal. Banyaknya



permintaan pengujian dari pelanggan yang tidak dapat dilayani karena keterbatasan instrument analisis, seperti AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) dan HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Di tahun 2020 penyediaan instrumen analisis ini diakomodir melalui DAK Kementerian Perdagangan RI namun mengalami refocusing untuk penanganan Covid 19.

8. Minimnya peralatan instrumen analisis ini pula menyebabkan sulitnya tenaga fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) yang ada untuk memenuhi angka kredit yang sesuai dengan jenjang jabatannya (PMB Ahli).
9. Belum tersedianya kendaraan operasional, sehingga pelayanan permintaan pengujian yang relatif jauh dari pelanggan tidak dapat terpenuhi.

Solusi :

1. Memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan misi dagang serta mengupayakan kerjasama baik dengan direktorat perdagangan luar negeri untuk bisa mempertemukan eksportir walau hanya dalam virtual dalam hal membuka peluang ekspor seperti ke Timur Tengah dan korea selatan. Memberikan pelatihan yang narasumber dari anggaran APBN. Adapun untuk kegiatan pembinaan UKM/IKM juga perlu didukung dengan anggaran yang cukup dimana kegiatan ini dapat membuka peluang pada UKM sebagai calon eksportir di Provinsi Gorontalo untuk dapat memahami prosedur export.
2. Solusi mengantisipasi kurangnya pemahaman eksportir dalam penggunaan aplikasi E-SKA dengan mengikutkan pelatihan secara online mengenai penggunaan aplikasi E-SKA yang dilaksanakan oleh kementerian Perdagangan serta membuat liflet tentang tata cara penggunaan aplikasi E-SKA.
3. Perlu adanya pembinaan terhadap UIKM dalam rangka peningkatan produk untuk export serta membuka peluang kemudahan investasi di Provinsi Gorontalo.
4. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengawasan barang beredar sekaligus pemberian sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen tentang peraturan perlindungan konsumen dan peraturan tentang pengawasan barang dan jasa serta pengawasan perdagangan.
5. Perlunya kerjasama antara instansi terkait dalam hal pengawasan komoditi yang diantar pulauan melalui darat. Melalui pengawasan perdagangan di wilayah perbatasan.
6. Sosialisasi fungsi dan tugas pelayanan pegujian mutu barang UPTD BPSMB dalam



rangka pengawasan dan pengendalian mutu barang/komoditi ber SNI serta peningkatan ekspor impor, baik melalui media cetak dan elektronik maupun sosialisasi secara langsung melalui kunjungan-kunjungan kepada pelaku usaha di kabupaten kota, yang membutuhkan dukungan anggaran.

7. Penyediaan peralatan uji berupa instrumen analisis dan sarana operasional pada UPTD BPSMB sehingga mampu mendukung peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah serta menambah ruang lingkup pelayanan pengujian khususnya komoditi unggulan daerah.
8. Penyediaan peralatan uji ini berdampak pula pada kemudahan personil fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) untuk memperoleh angka kredit sesuai jenjang jabatannya. Penyediaan peralatan uji perlu dibarengi pula dengan peningkatan kompetensi para analis/ fungsional Penguji Mutu Barang melalui pendidikan dan pelatihan, upgrading, bimbingan teknis serta magang pengujian di lembaga-lembaga terkreditasi.
9. Menyediakan kendaraan operasional yang memudahkan pengambilan sampel uji pelaku usaha di wilayah-wilayah tertentu

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.130**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan  
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah perdagangan antar pulau	3.600 Kali	4.033 Kali*	3.360 Kali	3.808 Kali
2	Jumlah Ekspor	10 Komoditi	11 Komoditi	10 Komoditi	10 Komoditi
3	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	3 Sertifikat	12 Sertifikat	3 Sertifikat	- Sertifikat

\* Realisasi perdagangan antar pulau sebanyak 4033 kali adalah posisi akhir bulan November 2022

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk menekan inflasi daerah setiap tahun antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar untuk menjamin ketersediaan pasokan barang dan keteterjangkauan harga. Tahun 2022 terdapat kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh Dinas Kumperindag antara lain

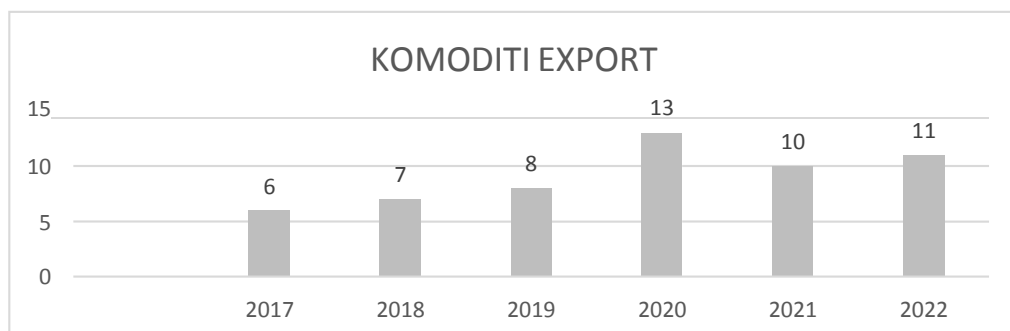


melalui kegiatan operasi pasar terhadap beberapa komoditi antara beras, minyak goreng dalam kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, selain itu kegiatan pemantauan harga dan pengawasan barang beredar.

- Data kinerja Sektor Perdagangan Luar Negeri yaitu pada jumlah komoditi ekport Selang Tahun 2017-2022 mengalami peningkatan disetiap tahun. Penurunan di tahun 2021 disebabkan dampak pandemi covid-19 yang terjadi yang menyebabkan berkurangnya komoditi yang di export. Adapun data jumlah komoditi export selang tahun 2017-2022 sebagai berikut :

**Grafik 3.28**

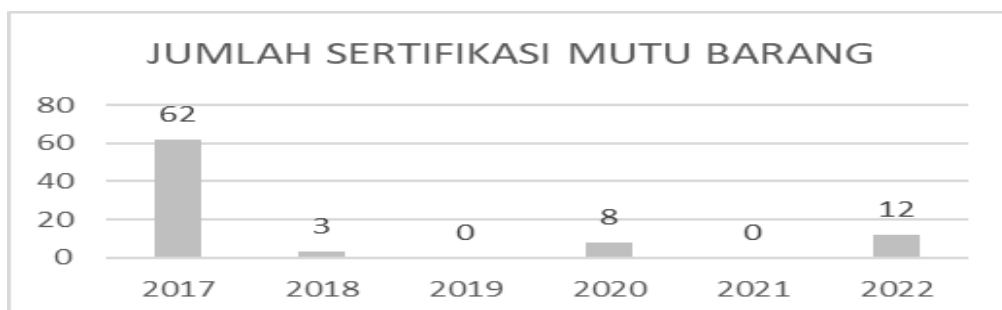
Jumlah Komoditi Ekspor Provinsi Gorontalo 2017-2022



- Jumlah sertifikasi mutu barang selang tahun 2017-2022 sebagai berikut :

**Grafik 3.29**

Jumlah Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo 2017-2022



Untuk pengurusan sertifikat mutu barang tergantung dari adanya pengajuan dari exportir jika ada komoditi barang yang akan diekspor. Beberapa upaya yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) untuk mendukung peningkatan ekspor yaitu meningkatkan sarana prasarana pengujian di laboratorium,

pengambilan sampel langsung dilokasi dan pemanfaatan teknologi informasi (sistem aplikasi) untuk kemudahan pengurusan pengujian mutu komoditi/produk.

- Data Capaian indikator kinerja program/kegiatan urusan perdagangan tahun 2022 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.131**  
Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persentase (%)
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Jumlah Perdagangan antar Pulau</b>	<b>3.600</b>	<b>kali</b>	<b>4033</b>	<b>kali</b>	<b>112,03</b>
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	150	kali Operasi Pasar	33	kali Operasi Pasar	22
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	17	kali	10	kali	58,82
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Jumlah Sertifikasi Mutu Barang</b>	<b>3</b>	<b>Sertifikat</b>	<b>12</b>	<b>Sertifikat</b>	<b>400</b>
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	120	Pelaku Usaha	120	Pelaku Usaha	100
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen	80	Kasus	91	Kasus	113,75
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang	1200	Kali	1.051	Kali	87,58
	Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang	30	Pelaku Usaha	51	Pelaku Usaha	170
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Jumlah Ekspor</b>	<b>10</b>	<b>Komoditi</b>	<b>11</b>	<b>Komoditi</b>	<b>110</b>



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Kinerja 2022		Realisasi Capaian Kinerja 2022		Persen tase (%)
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Misi dagang ekspor dan antar pulau	1	Misi Dagang	1	Misi Dagang	100
	Jumlah Komoditi Produk Ekspor yang dipromosikan	10	Komoditi	14	Komoditi	140
	Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor	20	Calon Eksporir	-	Calon Eksporir	-

Di tahun 2022 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo pada program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi mendapat tambahan anggaran dari sumber Dana DID periode 1 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk belanja barang yang dijual kepada masyarakat dan operasional pelaksanaan operasi pasar Dan DID Periode 2 sebesar Rp. 2.493.750.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (operasi pasar/pasar murah barang kebutuhan pokok bersubsidi. Dengan total realisasi anggaran untuk sumber dana DID periode 1 sejumlah Rp. 4.477.502.569,- dan realisasi DID periode 2 sebesar Rp. 1.985.862.104,-.

Realisasi capaian pelaksanaan operasi pasar 33 kali lebih rendah dari target renstra sebanyak 150 kali disebabkan karena anggaran yang tersedia di tahun 2022 hanya dapat untuk merealisasikan 33 kali pelaksanaan di Provinsi Gorontalo. Adapun jumlah anggaran untuk pelaksanaan operasi pasar di tahun 2022 sebesar Rp. 8.821.250.000,- yaitu melalui sumber dana APBD sejumlah Rp. 1.297.500.000,-. Kemudian tambahan melalui sumber dana DID periode 1 Rp. 4.421.250.000,- dan periode 2 Rp. 2.493.750.000,- Total Realisasi Rp. 7.691.714.673,- Jika di estimasi untuk 1 kali pelaksanaan dengan total subsidi (8 komoditi) sekitar Rp. 200.000.000,- maka jumlah pelaksanaan 33 kali tersebut hanya dapat dicukupi dengan jumlah anggaran tersebut.

Di Tahun 2022 telah terbentuk 3 (tiga) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo utara dan Kabupaten Bone Bolango. sehingga total jumlah BPSK yang terbentuk dari tahun 20221 hingga 2022 sebanyak 6 (enam) BPSK di





Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo. Di tahun 2022 ini juga telah diterbitkan daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bertugas untuk melindungi konsumen dari kerugian dari pemakaian barang dan/jasa yang diperdagangkan.

Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan bila ada pengaduan konsumen dan apabila terindikasi akan merugikan konsumen seperti ada promo penjualan, klausula baku yang akan merugikan konsumen, dan lain-lain sesuai peraturan perlindungan Konsumen maka penyelesaian sengketa konsumen dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan juga oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa serta Perdagangan masih lebih mengedepankan pembinaan sebab masih banyak pelaku usaha yang belum memahami peraturan-peraturan berlaku namun sudah beberapa pelaku usaha di cabut perijinan bahkan ada juga pelaku usaha yang khusus minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak mempunyai ijin sudah ditindaklanjuti sampai pada tahap penyidikan oleh Kepolisian.

Target 1200 kali pengujian standar mutu barang belum dapat dicapai di Tahun 2022 dimana realisasi capaian sebanyak 1051 kali (87,58%) hal ini disebabkan terdapat beberapa permohonan pengujian yang tidak dapat dilayani karena peralatan uji (instrumen analisis) yang belum tersedia. Pemanfaatan gedung laboratorium baru yang masih terkendala dengan penyediaan instalasi listrik untuk peralatan pengujian (instrumen analisis kromatografi gas) untuk pengujian minyak goreng dan senyawa hidrokarbon produk pangan, menyebabkan alat analisis ini belum dapat dioperasikan/difungsikan. Disamping itu rusaknya/tidak berfungsinya alat penyimpan daya (UPS) Kromatografi Gas ini ikut mempengaruhi jumlah permintaan pengujian yang terlayani.

Ketidakcapaian terhadap target jumlah UKM yang memahami prosedur export sebanyak 20 calon exportir disebabkan karena anggaran APBD 2022 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini tidak dianggarkan di tahun 2022 karena ada penganggarannya di kegiatan APBN akan tetapi dibulan Maret kegiatan dari sumber dana APBN ini mengalami refocusing sehingga target tidak tercapai.

Adapun jumlah Komoditi Produk Eksport yang dipromosikan sebanyak 14 komoditi yaitu kue kering, cengkeh, kelapa, kemiri, jagung, mente, kayu manis, pala, madu, teh celup daun kelor, sarabba daun kelor, serbuk daun kelor, karawo dan keripik ubi.



## 7. Perindustrian

### 1) Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2022

- peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah

#### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.132**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhannya IKM</b>	<b>Indikator Sasaran : Jumlah Penumbuhan IKM</b>	<b>50 IKM</b>	<b>212 IKM</b>	<b>50 IKM</b>	<b>329 IKM</b>	<b>424%</b>
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang di bina	15.339 IKM	15.767 IKM	15.139 IKM	15.555 IKM	102,79%
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan	15.339 IKM	15.767 IKM	15.139 IKM	15.555 IKM	102,79%
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	-	100%

Indikator kinerja urusan industri "jumlah penumbuhan IKM" Tahun 2022 diperoleh dari jumlah IKM tahun n (2022) sebanyak 15.767 IKM dikurangi dengan jumlah IKM tahun (n-1) yaitu tahun 2021 sebanyak 15.555 IKM. untuk penumbuhan IKM di tahun 2022 sebanyak 212 IKM telah tercapai dengan dukungan sumber dana APBD, serta jumlah IKM yang dibina telah mencapai target yang telah ditetapkan.

### 2) Program dan Kegiatan

Pagu awal anggaran urusan industri adalah sebesar Rp. 2.118.223.228,-. Kemudian pada APBD-P sebesar Rp. 532.508.206,- sehingga anggaran 2022 sumber dana APBD 2022 menjadi sebesar Rp. 2.650.731.434,-

Melalui sumber dana DID Periode 1 yaitu pada Program Perencanaan dan pembangunan Industri bertambah anggarannya sebesar Rp. 1.100.000.042,- dan DID Kinerja Tahun Berjalan periode 2 sebesar Rp. 165.212.000,-. Sehingga total anggaran per 31 Desember 2022 untuk urusan Perindustrian sebesar Rp. 3.915.943.476,- (tiga milyar sembilan ratus



lima belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Untuk penganggaran melalui Sumber Dana DID periode 1 Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2021) dan DID periode 2 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022.

Rincian pagu Anggaran Tahun 2022 untuk urusan industri sebesar Rp. 3.915.943.476,- rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. -
- Belanja Modal Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.915.943.476,-

Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 3.688.082.359,-**

Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan untuk urusan Perindustrian tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.133**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perindustrian  
Dinas umperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>3.760.598.076</b>	<b>3.535.773.259</b>	<b>94.02</b>	<b>100</b>	<b>87.71</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.760.598.076	3.535.773.259	94.02	100	87.71	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	251.852.183	229.102.893	90.97	100	98.46	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	876.168.575	867.551.443	99.02	100	71.60	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.157.566.939	1.967.417.472	91.19	100	98.99	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	475.010.379	471.701.451	99.30	100	96.03	100
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>155.345.400</b>	<b>152.309.100</b>	<b>98.05</b>	<b>100</b>	<b>93.38</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	155.345.400	152.309.100	98.05	100	93.38	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	155.345.400	152.309.100	98.05	100	93.38	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.915.943.476</b>	<b>3.688.082.359</b>	<b>94.18</b>	<b>100</b>	<b>88.15</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel diatas, maka total anggaran urusan industri adalah sebesar Rp. **3.915.943.476,-** dari total anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Tahun 2022 sebesar Rp. 38.167.659.012,- atau sebesar 10,26%. Dengan realisasi sebesar Rp. **3.688.082.359,-** atau sebesar 10,19 % dari total realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 36.173.738.155,-.

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2022 urusan industri yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Outcome dari program adalah jumlah IKM yang dibina dengan target renja 200 IKM dan target Renstra 15.339 IKM.

1) Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah industri agro terpadu.

✓ Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Output Sub Kegiatan :

- Kegiatan Pelatihan Perencanaan Pemasaran Produk IKM yang diikuti oleh 20 IKM Pangan, Kerajinan dan perbengkelan dengan anggaran
- Pembuatan Alat pakan



- Pemeliharaan Gedung KIAT
- Revitalisasi Peralatan KIAT (mesin pakan)
- Bahan Baku untuk kemasan senilai Rp. 29.790.203,- yang dipersiapkan untuk UPTD kemasan Berupa aluminium foil 10 roll, kertas sticker 450 lembar, toner color laserjet, palstik standing pouch 3000 lembar dengan 3 ukuran
- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan.

Output Sub Kegiatan :

- Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di laksanakan di Kabupaten Pohuwato yang diikuti oleh 20 IKM pada bulan Mei Tahun 2022.
- Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di laksanakan di Provinsi Gorontalo yang diikuti oleh 20 IKM dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.
- Pelatihan Pengembangan WUB IKM Pangan di Provinsi Gorontalo bulan Februari 2022 diikuti oleh 20 Peserta.
- Fasilitasi Kemasan untuk 20 IKM Pangan dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2022. Fasilitasi ini diberikan untuk meningkatkan daya saing produk IKM Pangan.
- Fasilitasi Halal untuk 20 IKM Pangan dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2022.
- Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik dan penerbitan izin usaha untuk 4 (empat) IKM Pangan yang dilaksanakan pada bulan Maret dan April Tahun 2022 yaitu :
  - IKM Irna Cookies & Bakery Kab.Pohuwato
  - IKM Mafahim Kab.Gorontalo
  - IKM Moringa Kab.Gorontalo
  - IKM Usaha Barokah Kab.Gorontalo Utara
- Bantuan Pengembangan WUB yaitu fasilitasi pembangunan rumah produksi, bahan dan peralatan, pemasangan listrik dan penerbitan izin usaha (akta notaris) untuk 1 (satu) IKM yaitu IKM Pongkep Jaya (Desa Otiola Ponelo Kepulauan Kab.Gorontalo Utara) dengan anggaran sebesar Rp 47.500.000,-
- Fasilitasi Peralatan Meubel dan Furniture bagi 4 (Empat) IKM Meubel dengan



anggaran total Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yaitu :

- Meubel Rivrey (Kab.Gorontalo)
- Meubel Kayu Nantu (Kab.Gorontalo)
- Meubel Kharisma (Kab.Bone Bolango)
- Meubel Ainan (Kota Gorontalo)
- Bantuan Pengembangan WUB yaitu fasilitasi pembangunan rumah produksi, bahan dan peralatan, fasilitasi pemasangan listrik dengan anggaran sebesar Rp 133.500.000,- untuk 3 (tiga) IKM Pangan yaitu :
  - IKM 3 Putra Cake & Cookies (Kab.Gorontalo)
  - IKM Ilham Cookies (Kab.Gorontalo)
  - IKM Mohoingo /Gula Semut (Kab.Gorontalo Utara)
 (sumber dana DID Periode 1)
- Sosialisasi Wira Usaha Baru di Provinsi Gorontalo sebesar Rp 14.377.402,- (sumber dana DID Periode 1)
- ✓ Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah industri kimia, kerajinan, sandang dan aneka yang dibina penguasaan teknologi.

Output Sub Kegiatan :

1. Pelatihan pengembangan Wirausaha Baru, untuk memberikan pengetahuan dan kompetensi SDM IKM Kerajinan sebanyak 30 orang.
2. Workhop E- Smart bagi IKM, yaitu pengetahuan dan kompetensi bagi SDM IKM Kerajinan sebanyak 25 orang pelaku usaha industri kimia sandang aneka dan kerajinan.
3. Pelatihan Desain dan Padu Padan Warna Sulaman Karawo : pengetahuan dan kompetensi SDM IKM Kerajinan sebanyak 25 orang.
4. Stimulasi sarana dan prasarana untuk penumbuhan dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah.
  - a. Stimulan yang diberikan melalui APBD tahun 2022 kepada 3 IKM yaitu :
    - IKM Sumber Usaha Karawo (Kab. Gorontalo)
    - IKM Dkorsase (Kota Gorontalo)
    - IKM Belgina (Kab. Bone Bolango)
 Adapun jenis stimulan masing-masing IKM sebesar Rp. 47.500.000 berupa



:

- Untuk pembuatan/renovasi bangunan usaha
- Peralatan dan bahan/ material penunjang usaha
- Pemasangan Listrik; dan
- Pembentukan Badan Usaha

b. Stimulan melalui APBDP tahun 2022 berupa Mesin Jahit kepada 8 IKM dengan anggaran sebanyak Rp. 62.000.000.- yaitu :

**Tabel 3.134**

Daftar Penerima Bantuan

No	Nama	Alamat
1	Tiar Craft	Kel. Limba U II Kecamatan Kec. Selatan Kota Gorontalo
2	Lala Craft	Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo
3	Hasni Mosii	Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
4	Irmayanti	Kecamatan Limboto. Kab. Gorontalo
5	Vidyatum Mboka	Kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya
6	Wirda Amin	Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo
7	Farida Mohamad	Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo
8	Nifralinsa Lamhairi	Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sibatana Kota Gorontalo

c. Stimulan melalui sumber dana Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 diberikan kepada 3 IKM Kerajinan masing masing sebesar Rp. 44.500.000.- yaitu :

- Hartati Bakri (Itatzs Mode) Kab. Gorontalo
- Alifah A. Sh Jusuf (Farabi Collection) Kab. Bone Bolango
- Gilbert (Gkarawo) Kab. Gorontalo
- Bantuan yang diberikan berupa :
- Untuk pembuatan/renovasi bangunan usaha
- Peralatan dan bahan/ material penunjang usaha
- Pemasangan Listrik

Output : meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat

5. Rakernas dan Pameran Dekranas di Jakarta

- ✓ Sub Kegiatan : Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri. Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah IKM Logam, Mesin dan elektronika yang dibina penguasaan teknologi.



Output Sub Kegiatan :

- Bantuan untuk kelompok IKM IIMEA
  - Bantuan Bahan dan peralatan IKM senilai Rp. 22.500.000,- (Abd. latif Yunus, Desa Boliohuto. Kabupaten Gorontalo)
  - Bantuan Bahan & peralatan IKM, Fasilitas pemasangan listrik, peneribitan izin tempat usaha, peralatan dan fasilitas tempat usaha senilai Rp. 45.000.000,- ( Sofyan Bahua. Kecamatan Limboto. Kabupaten Gorontalo)
  - Fasilitas bahan & peralatan IKM, pemasangan listrik & Fasilitas tempat usaha senilai Rp. 44.500.000 (M. Rafik. Zayn Motor Desa Dutulanaa. Kec. Limboto. Kabupaten Gorontalo)
- Bantuan Peralatan perbengkelan bagi 3 (tiga) IKM ILMEA yaitu :
  - Seprin Ahmad Desa Talango. Kabupaten Gorontalo Utara
  - Rizki Mooduto, Kabupaten Bone Bolango
  - Bengkel Al-Mutazam Desa Buntulia. Kabupaten Pohuwato
- Pelatihan Pembuatan Oven Pengering Olahan Pangan dengan jumlah peserta 20 IKM perbengkelan selama 3 hari
- Bantuan bagi kelompok peternakan/pembibitan ayam sumber dana DID Periode 1 yaitu bantuan bahan & peralatan IKM, Fasilitas Tempat Usaha dan Pakan ternak Ayam di Kabupaten Bone Bolango Rp. 51.262.640,-.

## 2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Outcome dari program adalah data informasi IKM. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

### 1) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- ✓ Sub Kegiatan : Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Output Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Aplikasi sistem informasi yang dilaksanakan di Kota Gorontalo. Peserta adalah Aparat pembina dari dinas Perindustrian dan operator Kabupaten/Kota
- Penganggaran untuk honorarium 2 (dua) orang pengumpul dan pengolah





data IKM di kab/kota yang dibayarkan setiap triwulan. Dimana tugas dari pengumpul data ini yaitu mengumpul

- Terlaksananya Pembuatan Aplikasi sistem informasi berbasis web Sistem Informasi Digital Industri Gorontalo (SIIDIG).  
Aplikasi Directory Data IKM Provinsi Gorontalo (jumlah IKM, Nilai investasi, nilai produksi, jumlah tenaga kerja, klasifikasi per cabang industri)

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### Permasalahan :

- a. Terbatasnya sarana pendukung berupa mesin peralatan untuk peningkatan produksi dan penjualan IKM
- b. Perizinan bagi IKM terutama untuk pengurusan Sertifikasi Halal, HaKi yaitu Merek & desain Industri
- c. Pengemasan Produk yang masih sederhana
- d. Terbatasnya jaringan kemitraan antara IKM dengan pihak swasta yang berpengaruh pada pemasaran produk serta mindset berfikir pelaku usaha untuk peningkatan usaha
- e. Terbatasnya kemampuan SDM dalam pengelolaan/manajemen usaha IKM (belum marketbale), dan masih rendahnya jiwa Entrepeneur dan kreativitas pengembangan usaha, serta pemanfaatan potensi bahan baku di Provinsi Gorontalo yang belum optimal
- f. Terbatasnya kemampuan dan jumlah aparat Pembina IKM

#### Solusi :

- a. Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan IKM yaitu penyediaan mesin dan peralatan untuk IKM olahan pangan
- b. Pengalokasian anggaran untuk fasilitasi perizinan bagi IKM olahan pangan
- c. Pengalokasian penganggaran untuk stimulan kemasan produk bagi IKM
- d. Membangun jaringan kemitraan antara IKM dengan pihak swasta bagi perluasan pemasaran produk dan mengikut sertakan para pelaku IKM pada pameran-pameran dan magang ke luar daerah yang potensial
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia para pelaku IKM serta berupaya untuk mengembangkan produk unggulan daerah dan meningkatkan pemasaran produk IKM yang diikuti dengan peningkatan anggaran pengembangan industri kecil menengah agar para IKM terbantu melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas



dan peningkatan kualitas SDM IKM melalui pelatihan/bimtek dan bantuan bahan serta peralatan

- f. Mengikutsertakan ASN sebagai aparatur pembina IKM dalam diklat-diklat pengembangan kapasitas SDM seperti penyuluh fungsional perindag, fasilitator GKM, GMP, HACCP dan mempertimbangkan penempatan ASN sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.135**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian  
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah IKM yang dibina	15.339 IKM	15.767 IKM	15.139 IKM	15.555 IKM

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

- a. Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, item belanja Pengadaan ATBM Alat Tenun Bukan Mesin Rp. 100.000.000. dan bahan produksi Rp. 28.000.000,- yang teranggarkan melalui sumber dana DID Periode 1 tahun 2022 yang disetujui pada bulan Nopember 2022 tidak terealisasi karena waktu pelaksanaan untuk pengadaan barang yang terbatas yang membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) bulan untuk pemesanannya. Sehingga pengadaan ATBM ini belum bisa dilaksanakan. Dan anggaran ini hanya untuk 4 unit dari output yang diusulkan 10 unit. Serta pertimbangan lainnya bahwa alat ini belum bisa dioperasikan oleh pengrajin karena untuk pelatihan pembuatan kain tenun belum teranggarkan.
- b. Untuk target 1 (satu) industri agro belum ada realisasinya di tahun 2022 karena Rencana untuk membentuk 1 (satu) UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan masih menunggu Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.
- c. Terlaksananya Pembuatan Aplikasi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Digital Industri Gorontalo (SIIDIG). Yang memuat Data IKM yang terus di up-date oleh pengolah data kabupaten/kota.
- d. Provinsi Gorontalo telah memiliki Art Gallery Yang diresmikan tanggal 28 Desember

2022, berlokasi di jalan Tinaloga No. 24. Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila. Kabupaten Bone Bolango. Art Gallery ini bertujuan untuk menampung, memasarkan dan mempromosikan produk-produk UKM/IKM. Art Gallery juga sebagai wadah untuk Mendukung perkembangan UMKM dengan memfasilitasi proses pemasarannya.

- e. Tahapan Penyusunan RPIP telah selesai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 Nomor 9 Tahun 2022 dengan nomor registrasi dari Kemendagri : 9-320/2022 yang akan dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda.

## 8. Ketransmigrasian

### 1) Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi

#### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.136**  
Target dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4 *100)
1	<b>Sasaran : Meningkatkan akses layanan publik dan ekonomi masyarakat transmigrasi</b>	<b>Indikator Sasaran : Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan</b>	<b>1 Kawasan</b>	<b>1 Kawasan</b>	<b>1 Kawasan</b>	<b>1 Kawasan</b>	<b>100</b>
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi yang dibina	100	102.52	80.25	92.55	102.52
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transmigrasi	100	100	88	100	100

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.137**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketransmigrasian  
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1.</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>164.239.717</b>	<b>163.789.434</b>	<b>99.73</b>	<b>100</b>	<b>99.10</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	164.239.717	163.789.434	99.73	100	99.10	100
	Sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	164.239.717	163.789.434	99.73	100	99.10	100
<b>2</b>	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>157.538.656</b>	<b>156.192.500</b>	<b>99.15</b>	<b>100</b>	<b>99.73</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	157.538.656	156.192.500	99.15	100	99.73	100
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	157.538.656	156.192.500	99.15	100	99.73	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>321.773.373</b>	<b>319.981.934</b>	<b>99.44</b>	<b>100</b>	<b>99.42</b>	<b>100</b>

### 1. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi yang dibina sebesar 102,52%.

#### 1) Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

Sub Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman.

Output Sub Kegiatan : Pembinaan Mental Spritual bagi 300 warga transmigrasi di 4 (empat) kawasan Kimtrans yaitu :

- Kimtrans Sandalan Kec. Taluditi Kab. Pohuwato
- Kimtrans Pangea SP-3 Kec. Wonosari Kab. Boalemo
- Kimtrans Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara
- Kimtrans Bukit Aren Kec. Pulubala kab. Gorontalo

### 2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan pembangunan di kawasan



transmigrasi sebesar 100%.

1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Output Sub Kegiatan :

a. Persebaran warga transmigrasi di 4 (empat) Kawasan Kimtrans yaitu :

- Kimtrans Bukit Aren Kec. Pulubala Kab. Gorontalo
- Kimtrans Pangea SP-3 Kec. Wonosari Kab. Boalemo
- Kimtrans Sandalan Kec. Taluditi Kab. Pohuwato
- Kimtrans Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi di 3 (tiga) Kawasan Kimtrans :

- Kimtrans Motihelumo Kec. Sumalata timur Kab. Gorontalo Utara sebanyak 155 bidang
- Kimtrans Pangea SP-3 Kec. Wonosari Kab. Boalemo sebanyak 175 bidang
- Kimtrans Sandalan Kec. Taluditi Kab. Pohuwato sebanyak 45 bidang

Dan untuk Kimtrans Bukit Aren Kec. Pulubala Kab. Gorontalo dilakukan identifikasi dan pengukuran kembali dan peroleh hasil sebanyak 450 bidang dan sementara proses SHM yang akan diusulkan di tahun 2023.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketransmigrasian tahun 2022, antara lain :

- Masih terdapat lahan warga yang belum dilakukan pengukuran ulang atau identifikasi kepemilikan lahan
- Kelompok yang di bentuk belum terdaftar pada Data Base Kelompok Tani sehingga lebih mengharapkan bantuan dari SKPD terkait
- Aksebilitas yang belum memadai mempengaruhi pemasaran hasil pertanian dan produksi

Solusi :

- Koordinasi dengan Kantor Pertanahan diwilayah binaan masing-masing untuk bias mendapatkan kuota pengukuran agar bias segera diterbitkan Sertifikat Hak Milik



(SHM)

- Kelompok yang telah di bentuk perlu di dampingi sehingga mencapai tahap mandiri
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kesejahteraan.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.138**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketransmigrasian  
Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan

**II. Urusan Pendukung**

**A. Sekretariat Daerah**

**1. Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo tahun 2022**

Mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan meningkatkan peran pemerintah dalam pendampingan dan penyelenggaraan bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.139**

Target dan realisasi indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Terbentuknya produk hukum daerah	Indikator Sasaran : Cakupan produk hukum daerah yang disusun	10 Perda, 50 Pergub/300 Pergub/SK	10 Perda & 50 Pergub/41 SK	2 Rancangan produk hukum	2 Rancangan produk hukum	100
	Program fasilitas	Jumlah produk	10 Perda,	10 Perda &	10	10 Perda &	100



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	dan koordinasi hukum	hukum daerah yang disusun	50 Pergub & 300 Pergub/SK	50 Pergub/44 1 SK	Perda & 300 Pergub/SK	55 Pergub/39 7 SK	
	Kegiatan fasilitasi bantuan hukum	Persentase MOU dan Perjanjian kerja sama	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Sasaran : Terwujudnya bantuan hukum bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat miskin</b>	<b>Indikator Sasaran : Cakupan pendampingan, layanan dan bantuan hukum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Program fasilitas dan koordinasi hukum	Persentase pendampingan kasus terkait penyelenggara pemerintahan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan fasilitasi bantuan hukum	Persentase peningkatan capaian pembinaan PPNS	100%	100%	100%	100%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.140**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung  
Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>	<b>3.304.906.112</b>	<b>3.271.917.387</b>	<b>99.00</b>	<b>99.69</b>	<b>90.66</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	1.366.419.999	1.339.236.337	98.01	99.43	99.85	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan	152.778.523	152.010.890	99.50	98.79	99.76	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	118.126.700	117.950.956	99.85	96.04	99.84	100
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	187.396.802	185.667.077	99.08	100	99.93	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	908.117.974	883.607.414	97.30	99.87	99.83	100
	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	1.938.486.113	1.932.681.050	99.70	99.87	88.26	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	1.327.468.735	1.323.044.356	99.67	99.81	85.81	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	611.017.378	609.636.694	99.77	100	98.84	100
<b>2</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>4.256.802.578</b>	<b>4.088.740.895</b>	<b>96.05</b>	<b>99.88</b>	<b>98.30</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.711.975	225.271.729	98.07	98.56	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.558.829	86.406.156	98.68	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72.649.900	70.971.137	97.69	95.86	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.503.246	67.894.436	97.69	99.56	100	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.303.717.541	3.144.179.814	95.17	99.95	98.87	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.205.404.884	3.047.335.387	95.07	99.95	98.87	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	98.312.657	96.844.427	98.51	100	98.87	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.546.120	132.488.011	99.21	100	99.08	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	109.326.120	108.486.011	99.23	100	99.00	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.220.000	24.002.000	99.10	100	99.69	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.176.400	238.390.966	99.67	100	97.49	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.942.400	29.494.350	98.50	100	98.87	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.234.000	208.896.616	99.84	100	88.98	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.668.000	112.558.300	99.90	100	98.58	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.800.000	4.778.300	99.55	100	98.58	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.868.000	107.780.000	99.92	100	98.79	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.718.542	127.910.575	99.37	100	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.718.542	127.910.575	99.37	100	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.264.000	107.941.500	98.79	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.750.000	6.104.500	90.44	100	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.514.000	101.837.000	99.34	100	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.561.708.690</b>	<b>7.360.658.282</b>	<b>97.34</b>	<b>100</b>	<b>92.44</b>	<b>100</b>

1. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum

Outcome dari program adalah berupa Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah, serta pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan dengan target 10 Perda, 50 Pergub & 300 Pergub/SK dan capaian sebanyak 10 Perda & 50 Pergub/ 441 SK serta 100% pendampingan kasus terkait penyelenggara Pemerintahan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dengan capaian sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Output Sub Kegiatan : jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk selama satu tahun dengan target 10 Rencana Peraturan Daerah dan capaian kinerja 10 Rencana Peraturan Daerah.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Output Sub Kegiatan : jumlah Peraturan Gubernur (Pergub) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang dibentuk selama satu tahun sebanyak 300 Pergub/ SK. Capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 50 Pergub dan 441 SK.

Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Output Sub Kegiatan : Jumlah Peraturan perundang undangan dan jumlah produk hukum dan peraturan perundang undangan yang dipublikasikan selama 1 tahun

(100%) melalui aplikasi JDIH.

Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

Output Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum yang di evaluasi dan difasilitasi sebanyak 5 Kabupaten dan 1 Kota yang tersebar di Provinsi Gorontalo.

2. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

Output Sub Kegiatan : jumlah laporan hasil pendampingan dan penyelesaian sengketa hukum yang ditangani selama 1 tahun sebanyak 6 (enam) laporan. Capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebanyak 6 laporan pendampingan kasus/sengketa hukum (100%).

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

Output Sub Kegiatan : Jumlah pasangan suami istri yang mengikuti sidang itsbat nikah, 100 Pasutri dengan capaian 100 %, Jumlah advokat OBH yang memperoleh peningkatan kapasitas 75 Orang dengan capaiann 100 % dan Jumlah OBH yang dipantau dan dievaluasi dalam pembarian bantuan hukum bagi masyarakat sebanya 17 OBH serta Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Gorontalo beserta data base dan Kabupaten/kota Se-Provinsi Gorontalo sehingga dukungan penegakan HAM dapat dimaksimalkan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan serta peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana, dan SDM Aparatur dengan target dan capaian sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Diklat sebanyak 20 orang.

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Output Sub Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan sebanyak 36 pakaian.

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang



Tersusun sebanyak 5 dokumen.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Output Sub Kegiatan : 1 Dokumen RKA -SKPD Tersusun

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan : 1 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi.

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan : 31 ASN yang Di Berikan Gaji dan Tunjangan

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

Output Sub Kegiatan : 2 Laporan Keuangan yang Tersusun

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : 1 Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output Sub Kegiatan : 3 kali Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output Sub Kegiatan : 1 Peralatan dan Mesin Lainnya yang di adakan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : 100% penyelenggaraan administrasi perkantoran

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Output Sub Kegiatan : 100 peralatan kantor yang disediakan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Output Sub Kegiatan : 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Output Sub Kegiatan : Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara.

3)

### **Permasalahan dan Solusi**

#### Permasalahan :

#### 1. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum.

Kurangnya informasi kepada masyarakat pada peraturan daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan ditetapkannya Perda ini, membuka peluang bagi semua Organisasi Bantuan Hukum untuk memperoleh bantuan berupa dana (uang) dalam rangka pendampingan perkara/ kasus kliennya yang terdata sebagai masyarakat miskin. Pada tahun 2022, respon Organisasi Bantuan Hukum untuk memanfaatkan fasilitas anggaran ini belum begitu terlihat bahkan cenderung pasif. Hal ini terjadi karena peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum tersosialisasikan secara massive di tengah-tengah masyarakat pada umumnya serta kalangan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara khusus. Para advokat OBH-pun masih kurang memahami mekanisme pemberian bantuan dana pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.

#### 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Masih banyak jabatan pelaksana yang belum terisi oleh PNS sebagaimana hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan fungsi khususnya dalam hal ketepatan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi di setiap sub. bagian kurang maksimal. Hampir semua sub. bagian di Biro Hukum dan organisasi masih membutuhkan pejabat pelaksana.

#### Solusi :

#### 1. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum

- Perlu untuk melakukan penguatan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang belum terakreditasi untuk segera melakukan pembenahan agar dapat segera masuk dalam kategori OBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada khalayak umum bahwa setiap warga yang sedang bermasalah hukum tetapi tidak mampu secara financial untuk menyelesaikan perkaranya dapat difasilitasi oleh pemerintah melalui OBH untuk pendampingan kasus/perkasa baik litigasi maupun non litigasi.
- Penyesuaian organisasi perangkat daerah sesegera mungkin dilakukan dilakukan mengingat masih terdapat OPD yang menyelenggarakan lebih dari 3 urusan pemerintahan. Selain itu terdapat beberapa OPD yang tidak efektif dalam



penyelenggaraan fungsi ketika menyelenggarakan lebih dari satu urusan pemerintahan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Dukungan anggaran sangat penting karena untuk mencapai misi “pemerintahan yang lebih melayani” harus ditunjang oleh Organisasi Perangkat Daerah yang Handal.
- Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian sebaiknya memperhatikan pemetaan jabatan yang sudah dilakukan oleh Biro Hukum.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.141**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung  
Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Produk Hukum Daerah yang disusun	10 Pergub/Perda 300 SK	50 Pergub/Perda 300 SK	2 rancangan Produk Hukum	3 rancangan Produk Hukum
2	Cakupan Pendampingan Layanan dan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%

**2. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan kualitas pengendalian ekonomi
- Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan



**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.142**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan</b>	<b>Indikator Sasaran : Efektivitas pendampingan SKPD, upgrade sistem, Rapim, Rakorev, konsolidasi dan monev pembangunan</b>	Seluruh SKPD, 1 aplikasi, 8x rapim, 4x rakorev, 6x monev kab./kota, 4x konsultasi	Seluruh SKPD, 1 aplikasi, 9x rapim, 3x rakorev, 6x monev kab./kota	Seluruh SKPD, 1 aplikasi, 8x rapim, 4x rakorev, 6x monev kab./kota, 4x konsultasi	Seluruh SKPD, 1 aplikasi, 8x rapim, 4x rakorev, 6x monev kab./kota, 4x konsultasi	100%
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	<b>Sasaran : Meningkatkan kualitas pengendalian ekonomi</b>	<b>Indikator Sasaran : Efektivitas koordinasi/ monitoring/ pengendalian bidang ekonomi, refleksi ekonomi, sosialisasi fakta dan angka, tersusunnya Buku Indikator Ekonomi, pembuatan/ penggunaan sistem SiagadiniGo</b>	3x rakorev bidang ekonomi, 3x HLM TPID, 2x rapat sidak BBM,	2x rakorev bidang ekonomi, 3x HLM TPID, 9xRapat Teknis TPID, 15x rapat Pengendalian Bidang Ekonomi, 11x Rakor TPID, 15x Rapat Penyehatan BUMD, 10x Rapat Penyusunan SK Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum, 3x Rapat	3x rakorev bidang ekonomi, 3x HLM TPID, 2x rapat sidak BBM	3x rakorev bidang ekonomi, 3x HLM TPID, 6x Rapat Teknis TPID, 3x rapat Pengendalian Bidang Ekonomi, 9x Rapat Penyehatan BUMD, 9x Rapat Penyusunan SK Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum, 1x sosialisasi	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
				Koordinasi BUMD		Permendagri No 79 tahun 2018 tentang BLUD	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase peningkatan aktivitas pengendalian ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk Capaian Kinerja Program Tahun 2021, baik target maupun realisasinya adalah sama dengan Capaian Kinerja Program Tahun 2022

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.143**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>4.165.014.768</b>	<b>3.856.806.798</b>	<b>92.60</b>	<b>100</b>	<b>96.24</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.878.746	394.467.209	99.64	100	92.15	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	395.878.746	394.467.209	99.64	100	92.15	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.289.298.484	2.991.673.943	90.95	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.289.298.484	2.991.673.943	90.95	100	-	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.640.000	19.640.000	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.640.000	19.640.000	100	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.140.800	67.057.700	99.88	100	94.33	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.140.800	67.057.700	99.88	100	94.33	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.056.738	383.967.946	97.69	100	99.30	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393.056.738	383.967.946	97.69	100	99.30	100
<b>2</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>999.765.840</b>	<b>917.393.497</b>	<b>91.76</b>	<b>92.00</b>	<b>82.78</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	810.239.297	808.168.940	99.74	100	82.78	100

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	810.239.297	808.168.940	99.74	100	82.78	100
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	189.526.543	109.224.557	57.63	57.79	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	189.526.543	109.224.557	57.63	57.79	-	-
<b>3</b>	<b>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</b>	<b>522.689.155</b>	<b>513.401.741</b>	<b>98.22</b>	<b>100</b>	<b>97.60</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	522.689.155	513.401.741	98.22	100	97.60	100
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	201.172.124	196.887.241	97.87	100	99.12	100
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	321.517.031	316.514.500	98.44	100	97.02	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.687.469.763</b>	<b>5.287.602.036</b>	<b>92.97</b>	<b>98.59</b>	<b>92.29</b>	<b>100</b>

Untuk realisasi fisik tahun 2021 untuk masing-masing program dan kegiatan adalah sama dengan realisasi fisik tahun 2022 yaitu 100%. Terkecuali untuk kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian BUMD dan BLUD yang hanya 57.79% dikarenakan anggaran untuk hibah uang kepada BUMD yang tidak bisa dicairkan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan. Target 100%, capaian 100%.

Program ini dilaksanakan oleh 5 kegiatan untuk mendukung terwujudnya kinerja Pengendalian Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi yang merupakan core bisnis atau TUSI BP-EKBANG.

Kinerja program dapat dilihat dari efektivitas pelayanan 1) administrasi perkantoran meliputi tata usaha, data kepegawaian 25 orang, keuangan dan aset biro, 2) pengelolaan sarana prasarana perkantoran, meliputi pemeliharaan dan pengadaan/belanja modal, 3) pengelolaan kapasitas SDM yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat/bimtek sebanyak 7 orang; dan 4) perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan biro meliputi Renja, RKA, ROK, LKIP, LKPJ, LPPD, laporan realisasi, laporan evaluasi, dan koordinasi/monev kabupaten/kota.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah





Output Kegiatan : Jumlah laporan perencanaan, koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan biro. Target 10 Laporan, capaian 10 laporan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai. Target 14 kali, capaian 14 kali.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat/bimtek. Target 10 orang, capaian 10 orang.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan prasarana Perkantoran. Target 100%, capaian 100%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output Kegiatan : Persentase Kebutuhan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Biro. Target 100%, capaian 100%.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan aktivitas pengendalian ekonomi. Target 100%, capaian 100%.

Sasaran pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas pengendalian ekonomi. Kinerja program dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian ekonomi, yaitu:

- Rakorev bidang ekonomi yang dilaksanakan setiap triwulan membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi, struktur PDRB Provinsi Gorontalo, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan IPM Provinsi Gorontalo.  
High Level Meeting (HIM) TPID dan rapat koordinasi dan teknis TPID, membahas terkait perkembangan inflasi gorontalo, penyebab tingginya inflasi dan kebijakan yang akan diambil dalam upaya menjaga kestabilan inflasi.
- Rapat Penyehatan BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri
- Rapat Penyusunan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Tahun 2023
- Rapat Koordinasi BUMD se- Provinsi Gorontalo bersama KP RI
- Workshop BUMD BLUD Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo
- Peninjauan Lapangan terhadap Aset-Aset BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri  
Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota



- Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan OPD sektor ekonomi, yaitu perjalanan dinas terkait monitoring ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dan elpiji menjelang hari-hari besar keagamaan, monitoring dan evaluasi bantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat di sektor ekonomi, serta Rumah Pangan Lestari di Kabupaten/Kota

Dampak dari pelaksanaan program/kegiatan Pengendalian Ekonomi, diantaranya; Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan 1-2022 tumbuh sebesar 3,17% (YoY), kemudian Pada Triwulan 11-2022 tumbuh sebesar 4,91% (YoY). Dan pada Triwulan 111-2022 tumbuh sebesar 4,09% (YoY) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi disisi penawaran terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan Lapangan Usaha (LU), Perdagangan Besar dan Eceran (PBE), Konstruksi, dan Transportasi. Sementara LU Pertanian sebagai LU dengan porsi terbesar (39,02%) dalam PDRB tercatat tumbuh meski melambat.

Tekanan inflasi Gorontalo sepanjang tahun 2022 cukup berfluktuasi sebagai dampak dari adanya perang Ukraina dan Rusia. Selama tahun 2022, Gorontalo mengalami 8 (delapan) kali inflasi dan 4 (empat) kali deflasi. Inflasi tertinggi pada bulan Juni 2022 sebesar 1,65% dan deflasi terendah pada bulan Agustus 2022 sebesar -0,53% (VoY). Tahun 2022 inflasi Provinsi Gorontalo menempati urutan ke-8 sebagai inflasi terendah secara nasional.

Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, berikut Perkembangan inflasi bulanan Gorontalo tahun 2021 dan 2022 (dalam persen).

Melaksanakan amanah Permendagri nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan tarif Air Minum, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penyusunan dan penetapan tarif batas atas dan taif batas bawah air minum Kabupaten/Kota tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.144**

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tarif Batas Atas	Tarif Batas Bawah
1.	Kabupaten Gorontalo	11.202	3.513,10
2.	Kabupaten Boalemo	11.202	4.669,02
3.	Kabupaten Pohuwato	11.202	4.509,99
4.	Kabupaten Bone Bolango	11.202	13.310,75
5.	Kabupaten Gorontalo Utara	11.202	3.202,35
6.	Kota Gorontalo	11.202	7.895,74

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Output Kegiatan : Jumlah Kegiatan Rakorev, Sosialisasi Fakta dan Angka, Refleksi Ekonomi, Rakor TPID dan Rapat Pengendalian bidang Jumlah Kegiatan Rakorev, Sosialisasi Fakta dan Angka, Refleksi Ekonomi, Rakor TPID dan Rapat Pengendalian bidang Ekonomi. Target 5 kegiatan, capaian 7 kegiatan.

2) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Output Kegiatan : Pelaksanaan Rakor BUMD, Rakor Jasa Keuangan, Rakor Aneka Usaha, dan Koordinasi/Monev BUMD/Jasa Keuangan/Aneka Usaha dan RUPS. Target 6 kegiatan, capaian 6 kegiatan.

3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Outcome dari program adalah Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota. Target 3 dokumen, capaian 3 dokumen.

- Sasaran pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan. Kinerja program dapat dilihat dari efektivitas pendampingan SKPD dalam penginputan target dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan ke Aplikasi e- monep, upgrade dan maintenance sistem e-Monep, pelaksanaan Pra Rapim dan Rapim Provinsi, Rakorev tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Rakor kegiatan strategis, monitoring dan evaluasi progres pembangunan yang di danai oleh dana APBD, dan konsultasi/konsolidasi, Roadshow ke Kab/Kota, Rakor Ekonomi dan Pembangunan dan penyusunan buku rekam jejak pengendalian pembangunan dana APBD dan APBN provinsi, serta APBD kabupaten/kota.



- Aplikasi eMonev telah menjadi alat pengendali percepatan penyerapan anggaran pembangunan di Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, dan telah menjadi acuan bagi Provinsi/kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
  - Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan (dipimpin langsung oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh masing-masing Kepala OPD) dengan melakukan koordinasi ke OPD provinsi yang memiliki tingkat serapan rendah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap paket pekerjaan provinsi yang berlokasi di kabupaten/kota.
  - BP-Ekbang juga menyelenggarakan dan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi antara pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemda Kab/Kota dan Instansi Vertikal yang strategis dimana pelaksanaannya berkenaan dengan program kerja pemerintah daerah.
- a. Pelaksanaan Program
- 2) Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Output Kegiatan : Jumlah pelaksanaan PraRapim, Rapim, Rakorev dan Rakor kegiatan strategis. Target 4 Kegiatan, capaian 4 kegiatan.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

Pada Tahun 2021 pelaksanaan semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan sasaran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, dan penggunaan anggaran telah dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi esensialitas pencapaian target pelaksanaan fisik program/kegiatan.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tahun Anggaran 2021 dan solusi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yaitu:

#### Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- Permasalahan :
- Fungsi pengendalian dan koordinasi tidak dilaksanakan secara optimal pada kegiatan pembangunan dana APBD, dimana Fungsi pengendalian dan koordinasi tidak didukung dengan pelaksanaan monitoring yang optimal di lapangan dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.
  - Fungsi pengendalian, koordinasi dan pelaporan tidak dilaksanakan secara optimal pada kegiatan pembangunan dana APBN, dimana pengendalian terbatas pada data dari DJPBN Wilayah XXVI Gorontalo.
  - Fungsi pengendalian, koordinasi dan pelaporan tidak didukung dengan



data input DIPA dan pelaporan progress fisik kegiatan APBN dari masing- masing satker APBN pada aplikasi e-Monep; juga tidak didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Solusi : - Diperlukan solusi peningkatan kualitas fungsi koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan dana APBD melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi, minimal pada on going process pada Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang ditemui di lapangan dapat segera dikoordinasikan dan dicarikan solusinya.

Pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki kontribusi yang besar untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah.

- Diperlukan solusi peningkatan kualitas fungsi koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan dana APBN diharapkan melalui pelaksanaan bimtek pendampingan penginputan DIPA APBN pada aplikasi e-Monep NG dari masing-masing Satker APBN diikuti pelaksanaan monitoring di lapangan.
- Peningkatan kualitas pengendalian kegiatan APBN sangat membantu dalam rangka implementasi dari PP RI No. 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Peningkatan kualitas pengendalian kegiatan APBN sangat membantu dalam rangka implementasi dari PP RI No. 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

#### Program Perekonomian dan Pembangunan

Permasalahan : - Kegiatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ruang lingkupnya menyangkut sektor Pertanian, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, dan Kehutanan belum bisa dilaksanakan secara optimal karena tidak didukung dengan porsi anggaran.

- Kegiatan pengendalian inflasi daerah, dimana sejak bulan Oktober 2022 setiap hari senin dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kemnedagri secara hybrid. Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan dihadiri Gubernur, anggota Forkopimda dan Pimpinan OPD teknis. Pelaksanaan Rakor tersebut tidak didukung dengan anggaran makan dan minum.



- BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri tidak dapat memberikan kontribusi sebagaimana yang di harapkan, semua indikator keuangan sudah tidak sehat demikian juga terhadap profitabilitas sudah tidak ada lagi karena perusahaan mengalami kerugian.
- Sampai dengan akhir tahun 2021 baru terdapat 3 PDAM yang telah mencapai Full Cost Recovery (FCR), berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Gorontalo. Peranan Pemerintah Daerah untuk mensubsidi tarif layanan menuju FCR sesuai Permendagri nomor 21 tahun 2020.
- Adanya beberapa unit pelaksana teknis Dinas/Badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat namun belum ditetapkan menjadi suatu Badan Layanan Umum Daerah dikarenakan oleh :
  - Kurangnya pemahaman pegawai tentang BLUD;
  - Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai bidang administrasi keuangan terutama untuk unit pelaksana teknis Dinas/Badan
  - Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan
  - Regulasi pendukung pelaksanaan BLUD yang belum tersusun.

Solusi : - Diperlukan solusi peningkatan kualitas fungsi koordinasi dan pengendalian ekonomi, karena berkontribusi besar untuk menjaga kestabilan inflasi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- Perlu adanya anggaran yang cuup untuk mendukung kinerja SDA dan pengendalian inflasi daerah.
- Berdasarkan kondisi BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membentuk tim penyehatan BUMD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.366/3/IX/2021 untuk melakukan **restrukturisasi** PT. Gorontalo Fitrah Mandiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.
- Melaksanakan amanah Permendagri nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri nomor 71 taun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan tarif Air Minum.
- Alternatif mengatasi permasalahan BLUD :
  - Melakukan sosialisasi/diklat atau pelatihan terkait penerapan/ pengelolaan BLUD bagi unit pelaksana teknis Dinas/Badan, OPD



terkait;

- Melakukan diklat atau pelatihan, mutase, rekrutmen pegawai secara bertahap terkait keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai;
- Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap;
- Melengkapi regulasi pendukung pelaksanaan BLUD secara bertahap.

Apabila kendala tersebut dapat teratasi dan suatu UPT Dinas atau Badan Daerah akhirnya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, diharapkan bahwa hal tersebut tidak hanya sekedar ganti nama dengan adanya fleksibilitas namun juga harus dapat memikirkan bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan mendorong kultur entrepreneur agar kinerja layanan dapat meningkat.

#### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Permasalahan : - Permasalahan Pembangunan dan Ekonomi khususnya inflasi yang menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat, dan penyehatan BUMD yang mana masa jabatan direksinya telah berakhir. Dimana anggaran untuk pelaksanaan rapat-rapat Ekonomi dan penyehatan BUMD, juga untuk perjalanan dinas yang tersedia saat ini sangat minim. Rapat-rapat dan perjalanan dinas dimaksud adalah dalam rangka memenuhi undangan yang menghadirkan BP-Ekbang dan anggarannya diaanggarkan pada kegiatan Perencanaan.

- Mobil dinas Eselon II yang sudah berumur 11 tahun dan sudah seringkali rusak, sehingga sering menghambat mobilitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Solusi : - Diperlukan jumlah anggaran yang cukup untuk pelaksanaan rapat dan Perjalanan Dinas Luar daerah dalam rangka koordinasi dan Konsolidasi ke Pusat maupun daerah lainnya.

- Agar dapat diberi anggaran untuk penggantian Kendaraan Dinas Eselon II.

#### **4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo tidak mempunyai indikator kinerja yang berkontribusi langsung pada Indikator RPJMD Provinsi Gorontalo.

### 3. Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo

#### 1) Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan yang akan dicapai Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo

Mewujudkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pusat Keunggulan (Center Of Excellence).

##### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.145**  
Target dan Realisasi Indikator kinerja tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan pengadaan dan strategi kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>	<b>Indikator Sasaran : Cakupan meningkatnya kualitas layanan pengadaan, pendampingan OPD dan strategi kebijakan serta informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana & SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Gorontalo	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%

#### 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.146**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Pemerintahan  
Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>4.704.786.008</b>	<b>4.675.262.974</b>	<b>99.37</b>	<b>100</b>	<b>98.58</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	144.123.450	142.964.171	99.20	100	97.90	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144.123.450	142.964.171	99.20	100	97.90	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.956.998.895	3.932.880.162	99.39	100	98.70	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.956.998.895	3.932.880.162	99.39	100	98.70	100
	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	107.000.000	103.074.015	96,33	100	99.99	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.000.000	103.074.015	96,33	100	99.99	100
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	496.663.663	496.344.626	99.94	100	97.50	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	496.663.663	496.344.626	99.94	100	97.50	100
<b>2</b>	<b>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.003.298.508</b>	<b>992.933.196</b>	<b>98.96</b>	<b>100</b>	<b>98.89</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	528.132.629	526.480.123	99.69	100	98.76	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	47.437.863	46.733.543	98.52	100	97.75	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	345.585.939	344.778.380	99.77	100	99.41	100
	Sub Kegiatan Pemantauan & Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	135.108.827	134.968.200	99.90	100	97.96	100
	Kegiatan Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	179.974.092	172.321.343	95.75	100	97.28	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	63.552.199	58.239.436	91.64	100	100	10011
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik	88.693.000	88.315.150	99.57	100	99.41	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	27.728.893	25.766.757	92.92	100	97.96	100
	Kegiatan Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	295.191.787	294.131.730	99.64	100	99.95	100
	Sub Kegiatan Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	61.054.979	60.487.860	99.07	100	100	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	122.433.314	121.953.001	99.61	100	100	100
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan	111.703.494	111.690.869	99.99	100	99.73	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.708.084.516</b>	<b>5.668.196.170</b>	<b>99.30</b>	<b>100</b>	<b>98.64</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan
- Persentase pelaksanaan perencanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Jumlah dokumen pelaksanaan perencanaan, evaluasi,



monitoring dan pelaporan.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan biro.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output Kegiatan : Persentase peningkatan pelayanan jasa administrasi perkantoran.

2. Program Kebijakan dan pelayanan Pengadaan barang dan jasa

Outcome dari program adalah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Gorontalo.

b. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Output Kegiatan : Jumlah paket yang diklarifikasi dan diverifikasi

2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Output Kegiatan : Persentase pelaksanaan lelang melalui SPSE (e-Tendering) dan e-Purchasing.

3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Output Kegiatan : Persentase layanan konsultasi PBJP

**3) Permasalahan dan Solusi**

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Permasalahan : 1. Keterbatasan sarana prasana antara lain :

- Kendaraan roda empat yang dimiliki saat ini hanya 1 (satu) unit yang digunakan sebagai kendaraan pimpinan OPD, sedangkan untuk operasional sehari-hari terutama untuk menunjang pokja pemilihan dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan pada paket-paket yang berlokasi di kota tidak dapat dibayarkan pada anggaran perjalanan dinas dalam daerah.
- Sarpras (personal computer, laptop, printer, meja, kursi, server, HDD, dll) yang digunakan untuk menunjang operasional kinerja biro sebahagian besar bersumber dari mutasi biro P2E dan dinas PU dengan kisaran tahun



pembelian 2002 dan 2003 yang saat ini umur ekonomisnya sudah habis.

- Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa hanya memiliki UPS sebagai penunjang listrik yang mensupport server, namun UPS tersebut telah mengalami penurunan kemampuan yang sekiranya dapat bertahan selama 3 (tiga) jam saat ini hanya mampu bertahan 1,5 jam. Sehingga dengan kondisi ini diharapkan dapat menganggarkan penambahan baterai UPSE atau genset sendiri sebagai penunjang listrik tambahan ketika terjadi mati listrik.
- Selain genset dan UPS yang diharapkan untuk menunjang server dibutuhkan juga keamanan data/system yang digunakan untuk menunjang ketika terjadi force majeure, melalui jasa dedicated colocation yakni berupa layanan penitipan server pelanggan yang disimpan pada data center pemilik penyedia layanan.

2 Keterbatasan SDM pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dari 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri atas :

- 1 (satu) orang kepala biro
- 3 (tiga) orang eselon III
- 1 (satu) orang eselon IV
- 8 (delapan) orang jabfung hasil penyetaraan merangkap sub coordinator
- 4 (empat) orang jabfung PBJ pertama
- 5 (lima) orang jabfung PBJ muda
- 8 (delapan) orang pelaksana dimana 4 (empat) diantaranya termasuk dalam pokja pemilihan sehingga pelaksana pada operasional biro hanya 4 (empat) orang.

b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan : 1. Dari formasi kebutuhan JF PPBJ rekomendasi LKPP RI sebanyak 43 (empat puluh tiga) Orang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) orang ahli pertama, 8 (delapan) orang muda dan 4 (empat) orang madya, sedangkan formasi yang terisi saat ini 4



(empat) orang ahli pertama, 8 (delapan) orang ahli muda dan 0 (nol) orang ahli madya yang berasal dari biro pengadaan barang dan jasa sedangkan yang berasal dari luar biro terdapat jabfung penyetaraan 3 (tiga) orang ahli muda sehingga formasi untuk ahli muda telah berlebih.

2. Keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan belum maksimalnya capaian-capaian kegiatan-kegiatan antara lain :
  - Anggaran klarifikasi dan verifikasi lapangan, yang seharusnya untuk setiap paket harus diklarifikasi oleh seluruh tim hanya dapat diwakili oleh beberapa orang, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah, terlebih lagi untuk wilayah kota tidak dapat dibayarkan.
  - Belum maksimalnya rakor UKPBJ tingkat provinsi yang seharusnya menghadirkan narasumber-narasumber terkait isu-isu strategis serta mengangkat permasalahan-permasalahan di daerah terkait PBJ, sehingga hal ini berdampak terhadap kurangnya informasi dan respon dari LKPP terutama pelaksanaan impasing/perpindahan dalam jabatan, pengembangan kompetensi SDM PBJ dan penilaian kinerja JF PPBJ, serta hal-hal lain yang sering menjadi permasalahan di daerah.
  - Belum maksimalnya kegiatan pembinaan/bimbingan teknis/sosialisasi bagi pelaku-pelaku kepentingan terhadap regulasi-regulasi dan aplikasi-aplikasi PBJ yang terbaru (update) antara lain SPSE Versi 4.4, e-Protracking, SIKAP untuk penyedia, dll.
3. Kurangnya perhatian dan pemahaman PPK (pemangku kepentingan) di OPD-OPD :
  - Mengupdate data SIRUP setiap kali ada perubahan
  - Melakukan proses pengadaan langsung secara elektronik melalui aplikasi SPSE
  - Melakukan proses pencatatan non tender maupun swakelola
  - Melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai



mekanisme/aturan pengadaan yang berlaku

- Keterlambatan OPD mempersiapkan dokumen perencanaan sehingga dokumen yang dibutuhkan pokja pemilihan untuk di tender belum sepenuhnya siap
- 4. Proses Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah lewat peran PA/KPA dan PPK, sehingga siklus proses pengadaan barang/jasa tidak dalam satu kewenangan, ketika terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/jasa proses pemilihan penyedia sering disalahkan sebagai penyebabnya.
- 5. Masih adanya ketidaksesuaian antara identifikasi kebutuhan organisasi, perencanaan dan eksekusi pengadaan termasuk strategi pengadaan atas pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa, hal ini terkait hak akses akun diberikan hanya pada staf yang pada akhirnya peran pemegang akses/akun PA/KPA dan PPK tidak memahami dan kurangnya penguasaan terkait penggunaan Aplikasi/Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
- 6. Proses pengumpulan informasi PBJ diambil dari beberapa aplikasi, SPSE, SIRUP, Katalog dan Informasi lainnya namun untuk perekapannya masih secara manual.
- 7. Sistem informasi PBJ (e-Protrack) belum berjalan maksimal, saat ini aplikasi belum mengakomodir kebutuhan evaluasi dan pengawasan.
- 8. Belum optimalnya proses pendampingan hokum terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang dan jasa

- Solusi :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1. Mengajukan permohonan ke sekretariat daerah untuk memfasilitasi kekurangan sapsras dan penambahan personil (SDM) ke instansi terkait, namun sampai dengan saat ini belum tercapai.



2. Mengajukan penambahan dan perencanaan anggaran, namun belum disetujui
- b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
  1. Memaksimalkan kegiatan klarifikasi, verifikasi lapangan, bimtek, sosialisasi terkait PBJ dan penguatan-penguatan kapasitas PA/KPA, PPK melalui via zoom meeting.
  2. Lebih proaktif menghubungi narahubung LKPP baik via sosial media maupun email
  3. Pembentukan Tim Penilai dan melaksanakan bimbingan teknis singkat terkait penyusunan DUPAK untuk JF PPBJ.
  4. Melakukan roadshow ke OPD dalam rangka pendampingan proses PBJ di OPD untuk persiapan tender dini.
  5. Mengoptimalkan jadwal pra review dan review paket PBJ untuk menjelaskan kembali alur proses pengadaan barang/jasa.
  6. Melakukan pendampingan pada proses penginputan RUP pada aplikasi SIRUP, SPSE Versi 4.4, e-Protracking, SIKAP dan aplikasi pendukung lainnya (bela pengadaan, katalog lokal).
  7. Membentuk ruang konsultasi public
  8. Melakukan pengembangan-pengembangan e-protrack dengan menyesuaikan regulasi-regulasi terbaru.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.147**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengadaan Fungsi Pendukung Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Paket yang di Klarifikasi dan di Verifikasi	215 Paket	468 Paket	215 Paket	411 Paket
2	Presentase pendampingan dan penerapan regulasi PBJP	100%	100%	100%	100%



3	Jumlah kategori baru e-katalog daerah dan upgrade aplikasi e-protrack	3 Kategori 1 Aplikasi	10 Kategori 1 Aplikasi	3 Kategori 1 Aplikasi	3 Kategori 1 Aplikasi
4	Persentase pelaksanaan lelang melalui SPSE (e-Tendering) dan e-Purchasing	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat /bimtek	30 Orang	38 Orang	30 Orang	30 Orang
6	Jumlah Pengelola PBJP yang diberikan penguatan	32 OPD	32 OPD	32 OPD	32 OPD
7	Persentase layanan konsultasi PBJP	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Dokumen pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan Pelaporan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
9	Persentase pemenuhan sarana & prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan program / kegiatan Biro pengadaan	100%	100%	100%	100%
10	Persentase peningkatan Layanan Jasa Administrasi Perkantoran pada Biro Pengadaan	100%	100%	100%	100%

### 5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Pencapaian tingkat kematangan UKPBJ Provinsi Gorontalo ke Level 3 Proaktif (9/9)

dengan penilai mandiri terdiri atas :

- Domain Kelembagaan terdiri dari pengorganisasi dan tugas/fungsi
- Domain SDM terdiri dari perencanaan SDM dan pengembangan SDM
- Domain Proses terdiri dari manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen resiko
- Domain Sistem Informasi terdiri dari unsur system informasi

Laporan Pelaksanaan Paket Tender (APBN dan APBD) dengan total **128 Paket** dengan nilai **Rp. 393.583.939.774,-** terdiri dari :

Konsultansi	: 14 Paket	Nilai Rp.	10.468.051.302
Konstruksi	: 95 Paket	Nilai Rp.	361.924.095.272
Barang	: 13 Paket	Nilai Rp.	14.459.723.200

Etalase produk katalog local Provinsi Gorontalo yang telah terbuka saat ini adalah 20 (dua Puluh) etalase dan yang telah bertransaksi sebanyak 5 (lima) etalase dengan 11 (sebelas) kategori.

berdasarkan sumber data MBIZ markrt untuk bela pengadaan dengan jumlah transaksi 6.185 dan nilai transaksi Rp. 18.196.519.593.

## 6) Penghargaan nasional yang diterima oleh Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo tahun 2022

Apresiasi terhadap pencapaian tingkat kematangan UKPBJ level proaktif



## 4. Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

### 1) Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan yang akan dicapai Biro Umum setda Provinsi Gorontalo

Mewujudkan pelayanan administrasi umum, pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, penyusunan dokumen perencanaan serta pelayanan perlengkapan Setda Provinsi Gorontalo dan rumah dinas pimpinan.





**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.148**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatkan pelayanan administrasi umum, pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, penyusunan dokumen perencanaan serta pelayanan perlengkapan Setda Provinsi Gorontalo dan rumah dinas pimpinan</b>	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase pelayanan administrasi umum yang berkualitas Persentase pengelolaan keuangan dan perencanaan yang transparan dan akuntabel Persentase Sarana dan parasarana yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo : Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

**2) Program dan Kegiatan**

**Tabel 3.149**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung  
Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>13.197.623.884</b>	<b>12.581.516.621</b>	<b>95.33</b>	<b>99.60</b>	<b>95.73</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.144.227	127.292.526	97.81	100	82.74	100
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.349.718	109.629.666	97.58	100	78.20	100
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.794.509	17.662.860	99.26	100	89.65	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.887.267	90.912.750	79.83	100	79.84	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	113.887.267	90.912.750	79.83	100	79.84	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.734.116	104.210.697	85.61	100	96.44	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan BMD pada SKPD	121.734.116	104.210.697	85.61	100	96.44	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.071.500	129.486.500	98.79	100	92.73	60
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	131.071.500	129.486.500	98.79	100	92.73	60
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.082.611.777	3.008.398.308	97.59	98.27	96.50	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.082.611.777	3.008.398.308	97.59	98.27	96.50	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.150.167.674	1.948.533.332	90.62	100	94.83	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.150.167.674	1.948.533.332	90.62	100	94.83	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.768.701.199	5.557.084.244	96.33	100	95.74	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	948.933.200	891.427.402	93.94	100	93.03	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.819.767.999	4.665.656.842	96.80	100	96.25	100
	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	1,699,306,124	1,615,598,264	95.07	100	97.31	100
	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	340.096.110	279.630.318	82.22	100	96.77	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	872.160.000	849.766.771	97.43	100	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	487.050.014	486.201.175	99.83	100	98.51	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.197.623.884</b>	<b>12.581.516.621</b>	<b>95.33</b>	<b>99.60</b>	<b>95.73</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur, dengan target dan capaian mencapai persentase 100 %.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan antara lain: Renstra 2023-2026, Renja 2023, RKA-SKPD/DPA-SKPD, PK



2022, RAD Tahun 2022, RKT 2022, RKAP SKPD/DPPA SKPD T.A 2022. LAKIP, LPPD, LKPJ.

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja berupa Dokumen Evaluasi Kinerja per Triwulan yang tertuang dalam Evaluasi Renja Tahun 2022 dan Dokumen Evaluasi Tahunan LAKIP, LPPD dan LKPJ.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Output Sub Kegiatan : jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan Setda.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Output Sub Kegiatan : jumlah asset dan bantuan Barang Hibah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terinventarisir yang dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi aset/hibah Barang Milik Daerah baik yang terdapat di dalam wilayah Provinsi Gorontalo maupun di luar wilayah Provinsi Gorontalo.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Jumlah pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran khususnya sarana prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Kantor Gubernur Gorontalo, Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Rumah Dinas Sekertaris Daerah dan VIP Bandara Djalaludin Gorontalo.

5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output Sub Kegiatan : Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek yang diikuti ASN antara lain Diklat dan Workshop Perencanaan, Diklat Kearsipan, Diklat Pelaporan Pengaduan Pelayanan Publik, Diklat Manajemen



Kepegawaian, dan diklat lainnya.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran pada Biro Umum dan lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Output Sub Kegiatan : jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara berupa service/perbaikan secara berkala, penggantian suku cadang, penggantian STNK dan pajak kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang merupakan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Output Sub Kegiatan : Persentase hasil pemeliharaan gedung/peralatan kantor berupa gedung Kantor Gubernur Gorontalo, Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Masjid Kantor Gubernur, Ruang Pertemuan dan Rapat serta pemeliharaan AC dan fasilitas sarana prasarana kantor Gubernur.

8) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Acara

Output Sub Kegiatan : Jumlah laporan koordinasi dan sinergitas Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya berupa laporan fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah. Selain itu sub kegiatan ini juga mendanai aktivitas pelayanan penyediaan fasilitas kegiatan pimpinan (Tenda, Meja dan Kursi, Lampu, Soundsystem, AC/Kipas Angin).

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan dan Dokumen Fasilitasi Tamu Kepala Daerah



dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan dan Dokumen Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan berupa Laporan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan baik Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

Penjelasan umum tentang kendala/permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 serta solusi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan, maka dengan melihat realisasi penyerapan anggaran baik fisik dan keuangan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, maka sebagian besar target program dan kegiatan mencapai target namun terdapat beberapa catatan yang dapat menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini mawadahi Belanja Modal Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dengan target realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi mencapai 97.59. Terdapat beberapa item Belanja Modal yang tidak dapat dilaksanakan seperti Belanja Genset Mobile, Tripot Kamera yang sampai dengan tahun anggaran tidak dapat terealisasi sesuai kebutuhan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan. Terdapat beberapa rekening belanja yang tidak dapat diserap dengan maksimal seperti Belanja Alat Kantor Lainnya, Belanja Tagihan Air, Belanja Internet, serta Belanja Paket/Pengiriman yang hingga tahun anggaran 2022 selesai, tidak dapat diserap dengan maksimal.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD. Terdapat beberapa rekening yang tidak dapat diserap dengan maksimal seperti Belanja Bahan Konstruksi dalam rangka Penandaan Aset Pemda dan Belanja Cetak serta Makan dan Minum Aktivitas Lapangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

#### Solusi :

1. Untuk memaksimalkan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan maka perlu untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan KAK yang telah disusun;
2. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun;
3. Efisiensi dalam penyusunan anggaran, sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan



kebutuhan;

4. Pemilihan penyedia sesuai dengan kualifikasi dan keahlian di bidangnya;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.150**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase pelayanan administrasi umum yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase pengelolaan keuangan dan perencanaan yang transparandan akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase sarana dan prasaranayang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %

**5. Pimpinan Sekretariat Daerah**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo**

Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.151**  
Target dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo</b>	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Kedinasan	100%	100%	100%	100%	100%

**2) Program dan Kegiatan**

**Tabel 3.152**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung  
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>37.188.085.566</b>	<b>28.673.248.826</b>	<b>77.10</b>	<b>100</b>	<b>71.13</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.439.781.028	1.115.924.966	77.51	100	94.72	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.116.104.518	1.025.866.066	91.92	100	93.83	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	323.676.510	90.039.900	27.81	100	99,34	100
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	35.748.304.538	27.557.323.860	77.09	100	70.11	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.935.345.661	4.791.865.608	69.09	100	81.52	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.089.730.583	1.035.915.457	95.06	100	71.17	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	27.723.228.294	21.729.542.795	78.38	100	67.86	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.188.085.566</b>	<b>28.673.248.826</b>	<b>77.11</b>	<b>100</b>	<b>71.13</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah persentase pelayanan kedinasan dengan persentase 100 %



- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator Persentase
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Output Sub Kegiatan : Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan target dan capaian sama-sama sebesar 100%.
  
- 2) Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)
  - Output Sub Kegiatan : jumlah kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur). Digunakan untuk memenuhi kebutuhan Operasional di Lingkup Rumah Dinas serta kegiatan rutin dalam rangka menunjang operasional Kepala Daerah, kegiatan pelayanan tamu dalam maupun luar daerah, kegiatan open house Idul Fitri/Idul Adha, kegiatan buka puasa bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo. Terdapat pula output lain berupa pengadaan kebutuhan rumah tangga gubernur seperti Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use), Pengadaan Mebelair dll.
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
  - Output Sub Kegiatan : jumlah kegiatan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) antara lain kegiatan rutin dalam rangka menunjang operasional Wakil Kepala Daerah dan operasional rumah dinas wakil gubernur, kegiatan pelayanan tamu dalam maupun luar daerah, kegiatan open house Idul Fitri/Idul Adha, kegiatan buka puasa bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo. Terdapat pula output lain yaitu Pengadaan Alat Pendingin, Pengadaan Alat Pembersih, Pengadaan Mebel Rumah Jabatan dan Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use).





Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Output Sub Kegiatan :

- jumlah kegiatan Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur) baik kegiatan kedinasan Gubernur didalam maupun luar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Jumlah kegiatan Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) baik kegiatan kedinasan Wakil Gubernur yang dilaksanakan didalam maupun luar daerah dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan.
- jumlah kegiatan kedinasan pemerintahan Provinsi Gorontalo antara lain kegiatan : Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Kab/Kota, Kegiatan Silaturahmi dan Halal Bi Halal KKIG, Pelayanan Tamu Luar dan dalam Provinsi, Tamu Kenegaraan, kegiatan kemahasiswaan, Studi banding dari daerah lain, kegiatan TAPD, kegiatan Sosialisasi dsb.
- jumlah kegiatan pemerintahan Provinsi antara lain : Kegiatan Evaluasi Pemeriksaan penyelenggaran pemerintahan, kegiatan Upacara Kenegaraan (HUT RI), lomba olahraga dan kesenian dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi RI, kegiatan dzikir dan tabligh akbar dalam rangka HUT Provinsi Gorontalo dan Kegiatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 tingkat Provinsi Gorontalo dan 1 Paket Jasa Event Organizer dalam rangka Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

### **3) Permasalahan dan solusi**

Permasalahan : Penjelasan umum tentang kendala/permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 serta solusi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan, maka dengan memperhatikan realisasi penyerapan anggaran baik fisik dan keuangan Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo, maka ada kegiatan yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan serapan anggaran mencapai 27.81% karena terdapat beberapa rekening belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penyerapan anggarannya tidak maksimal yang disebabkan karena masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Definitif pada Bulan Mei 2022.



- Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  - a. ada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, realisasi anggaran mencapai 69%, terdapat beberapa rekening belanja yang tidak dapat diserap dengan maksimal seperti Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Jasa Pelayanan Umum, Belanja Pemeliharaan Bangunan serta Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) yang disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga pimpinan.
  - b. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, terjadi Refocussing anggaran pada beberapa rekening belanja yang disebabkan karena kekosongan pejabat wakil gubernur definitif setelah masa jabatan Bapak Dr. Idris Rahim selesai pada Bulan Mei 2022 sehingga sisa anggaran yang semula dianggarkan dialihkan ke Kegiatan dan Sub kegiatan Pelayanan Pimpinan lainnya seperti Pelayanan Kepala Daerah dan Pimpinan Sekretariat Daerah.
  - c. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, realisasi anggaran mencapai 78% dikarenakan terdapat beberapa rekening belanja yang tidak dapat diserap dengan maksimal seperti Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Bahan Cetak, Belanja Cendera Mata, Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dan Aktivitas Lapangan, Belanja Sewa seperti Kendaraan Dinas, Sewa Bangunan, Sewa Hotel dan Sewa Bangunan Tempat Tinggal Lainnya yang penyerapan anggarannya belum maksimal dikarenakan adanya penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pimpinan.

Solusi: Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada program Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
- Efisiensi dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih maksimal
- Koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan guna kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan pimpinan

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Biro Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.153**  
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendukung  
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase pelayanan kedinasan	100 %	100 %	100 %	100 %

**6. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Gorontalo**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Gorontalo**

- Mewujudkan pelayanan pemerintahan dan otonomi daerah yang transparan dan akuntabel.

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.154**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah serta DPRD	Indikator Sasaran : Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Penetapan Tapal Batas dan Toponimi	Indikator Sasaran : Jumlah Pemasangan Tugu Batas antar Daerah sesuai Prioritas	100%	100%	100%	100%	100
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemasangan pilar batas daerah yang terpasang, koordinasi pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penataan Wilayah Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	Daerah						
3	<b>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemahaman Umat Beragama dan Pelestarian Adat dan Budaya</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Layanan Keagamaan, Adat dan budaya</b>	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan layanan keagamaan, adat dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%
4	<b>Sasaran : Meningkatnya layanan kesra dan pengendalian ekonomi yang dikoordinasikan</b>	<b>Indikator Sasaran : Meningkatnya layanan Kesra dan Pengendalian Ekonomi yang dikoordinasikan</b>	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase intensitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Bidang Kesra	100%	100%	100%	100%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.155**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1.303.485.676</b>	<b>1.251.551.845</b>	<b>96.02</b>	<b>100</b>	<b>94.94</b>	<b>100</b>
	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.290.037	192.864.494	90.00	100	91.60	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	214.290.037	192.864.494	90.00	100	91.60	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.829.464.869	3.744.423.073	97.78	100	97.70	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.829.464.869	3.744.423.073	97.78	100	97.70	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.022.000	157.687.780	98.54	100	94.56	100
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	160.022.000	157.687.780	98.54	100	94.56	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	433.171.628	421.121.918	97.22	100	94.68	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.171.628	421.121.918	97.22	100	94.68	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	496.002.011	479.877.653	96.75	100	96.39	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	496.002.011	479.877.653	96.75	100	96.39	100
<b>2</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>187.409.581</b>	<b>151.977.428</b>	<b>81.09</b>	<b>100</b>	<b>84.08</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	187.409.581	151.977.428	81.09	100	84.08	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	187.409.581	151.977.428	81.09	100	84.08	100
<b>3</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>1.833.045.229</b>	<b>1.694.386.644</b>	<b>92.44</b>	<b>100</b>	<b>95.47</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	752.850.501	683.820.189	90.83	100	93.52	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-	-	-	-	94.15	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	90.01	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	752.850.501	683.820.189	90.83	100	96.76	100
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	254.585.703	219.052.924	86.04	100	-	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	254.585.703	219.052.924	86.04	100	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	825.609.025	791.513.531	95.87	100	97.21	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	339.999.956	328.591.198	96.64	100	97.83	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	249.999.993	240.454.990	96.18	100	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	235.609.076	222.467.343	94.42	100	94.83	100
<b>4</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>23.464.833.913</b>	<b>20.981.192.267</b>	<b>89.42</b>	<b>100</b>	<b>91.35</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	15.755.753.644	14.282.964.368	90.65	100	81.75	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	15.755.753.644	14.282.964.368	90.65	100	81.75	100
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	7.609.082.159	6.628.224.043	87.11	100	80.69	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	7.609.082.159	6.628.224.043	87.11	100	80.69	100
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	99.998.110	70.003.856	70.01	100	84.39	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	99.998.110	70.003.856	70.01	100	84.39	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>30.618.239.268</b>	<b>27.823.531.257</b>	<b>90.87</b>	<b>100</b>	<b>83.33</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dengan capaian 6 dari target 6 dokumen.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output Kegiatan : jumlah SDM aparatur yang mengikuti bimtek dengan target dan capaian sebanyak 12 orang.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Persentase layanan administrasi perkantoran sebesar 97.22%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output Kegiatan : Persentase Peningkatan layanan perkantoran sebesar 100%.

2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Outcome dari program adalah :

- Persentase Pemasangan pilar batas daerah yang terpasang, koordinasi pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Persentase pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Output Kegiatan :

- Jumlah pilar batas yang terpasang sebanyak 25 Pilar dari target 10 pilar.
- Jumlah dokumen penamaan rupabumi (Toponimi) di kab/Kota sebanyak 1



dokumen.

### **Penegasan Batas Wilayah**

- Penegasan batas wilayah di Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan pemasangan dan perapatan pilar batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo sebanyak 25 (dua puluh lima) pilar yang terletak di Desa Mootilango Kabupaten Gorontalo, Desa Pontolo Atas Kabupaten Gorontalo Utara dan Desa Botuwombato Kabupaten Gorontalo Utara. Pelaksana pekerjaan adalah CV. Cosifera Konsultan berdasarkan SPK Nomor : 706/SPK/Pemkesra/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.
- Dalam pelaksanaan pemasangan pilar batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo terdapat masalah penempatan titik koordinat garis batas yang tidak disepakati oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo selaku pelaksana kegiatan memfasilitasi dengan melaksanakan rapat yang di hadiri oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil dari rapat tersebut terjadi kesepakatan yang dimuat dalam berita acara kesepakatan dan di tandatangi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Berita Acara Kesepakatan tersebut menerangkan bahwa sebanyak 15 titik koordinat berubah penempatannya. Perubahan titik koordinat pemasangan pilar batas tersebut tidak mempengaruhi garis batas yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo.
- Untuk segmen batas daerah antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 juni 2021 telah dilaksanakan rapat pembahasan dan sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan titik koordinat dan penarikan garis batas antara kabupaten gorontalo utara dengan kabupaten buol, bertempat di Gedung H Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh pejabat kemendagri, Gubernur Gorontalo, pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo dan pejabat dari Provinsi Sulawesi Tengah dan hasilnya sementara proses penerbitan Permendagri oleh Menteri Dalam Negeri



### **Data Wilayah**

- Terbitnya Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemuktahiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Yang merupakan lampiran dari Permendagri Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Pada lampiran Keputusan Nomor 050-145 Tahun 2022 telah dilakukan verifikasi oleh kabupaten/kota dan hasilnya masih ada beberapa kesalahan redaksional nama kecamatan, desa dan kelurahan. Terkait dengan hal tersebut ada 3 kabupaten/kota yang telah mengusulkan perbaikan redaksional ke Pemerintah Provinsi Gorontalo Yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo Dan Kabupaten Gorontalo Utara.
- Pada Tanggal 19 September 2022 Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan koordinasi dengan ditjen bina administrasi kewilayahan kementerian dalam negeri dan menyerahkan dokumen terkait dengan perbaikan redaksional nama kecamatan, desa dan kelurahan sebagai berikut :
  - Kota Gorontalo Nama Kelurahan **Tuladenggi** Tertulis **Tuladengi**, Dan Kelurahan **Molosipat U** Tertulis **Molosifat U**. Hal Ini Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Duingingi.
  - Kabupaten Boalemo Nama Kecamatan Botumoito Tertulis **Botumoita**. Hal Ini Tidak Sesuai Dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.
  - Kabupaten Gorontalo Utara Nama **Kecamatan Tomilito** Tertulis **Tomolito** Dan Di Kecamatan Sumalata Timur Desa **Deme I** Tertulis **Deme Satu** Dan Desa **Deme II** Tertulis **Deme Dua**. Hal Ini Tidak Sesuai Dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Tomilito Dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Sumalata Timur.

### **Toponimi**

- Badan Informasi Geospasial telah selesai melaksanakan tahapan penelaahan nama rupabumi pada tahun 2021 dari tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pembakuan Nama Rupabumi Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo telah melalui proses pengumuman yang akan ditetapkan sebagai nama rupabumi baku yang kemudian akan dipublikasikan





dalam bentuk gazeter Republik Indonesia Edisi 2021 sebagai dokumen resmi Nama Rupabumi Di NKRI.

Sebagai wujud keterbukaan informasi publik, Biro Pemerintahan Dan Kesra Setda Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan upaya dengan berkoordinasi dan meminta tanggapan atau masukan terkait daftar nama rupabumi di kabupaten/kota Se Provinsi Gorontalo.

- Pada Tanggal 9 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penegasan Status Pulau Di Jakarta yang menghadirkan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Tim pusat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan penelaahan bersama dan updating cakupan wilayah administrasi pulau yang ada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara Dan Kabupaten Pohuwato. Hasil updating data pulau di Provinsi Gorontalo Berjumlah 127 Pulau yang terletak Di Kabupaten Boalemo Berjumlah 20 Pulau, Kabupaten Gorontalo Utara Berjumlah 55 Pulau Dan Kabupaten Pohuwato Berjumlah 52 Pulau.

## 2) Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Output Kegiatan :

- Jumlah layanan administrasi dan pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; jumlah layanan administrasi dan kunjungan kerja bagi aparatur pemerintah dan legislative Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya, Legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 339.999.956.- realisasi sebesar Rp. 328.591.198.- persentase 96,64 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Administrasi Usulan Pemberhentian Bupati Gorontalo Utara karena meninggal dunia atas nama (Alm. Indra Yasin) yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2022.
  - Administrasi Usulan Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo Utara dan Pengangkatan Wakil Bupati Gorontalo Utara menjadi Bupati Gorontalo Utara atas nama (Thoriq Modanggu), yang dilaksanakan pada Bulan April s.d Mei 2022.
  - Administrasi Usulan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo atas nama (Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM) karena berakhir masa jabatan, yang dilaksanakan pada Bulan April s.d Mei 2022.
  - Administrasi Usulan Pemberhentian Bupati Boalemo atas nama (H. Anas Yusuf) karena berakhir masa jabatan, yang dilaksanakan pada Bulan April s.d Mei 2022.
  - Administrasi Usulan Pengangkatan Pj. Bupati Bolaemo yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2022.



- Administrasi Usulan Pensiun Pejabat Negara Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2022.
- Administrasi Usulan Pensiun Pejabat Negara Mantan Bupati Boalemo, yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2022.
- Administrasi Izin Keluar Negeri dengan alasan penting (menghadiri pernikahan keluarga) Wakil Walikota Gorontalo, yang dilaksanakan Bulan Juli s.d Agustus 2022.
- Administrasi Izin Keluar Negeri dengan alasan penting (Ibadah Umroh) Wakil Bupati Pohuwato, yang dilaksanakan Bulan Agustus 2022.
- Administrasi Usulan Pensiun Pejabat Negara Mantan Bupati Gorontalo Utara, yang dilaksanakan pada Bulan September 2022.
- Administrasi Izin Keluar Negeri dengan alasan penting (Ibadah Umroh) Bupati Pohuwato, yang dilaksanakan Bulan Oktober 2022.
- Pelantikan Pj. Gubernur Gorontalo (Bulan Mei 2022).
- Serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo kepada Pj. Gubernur Gorontalo (Bulan Mei 2022).
- Pelantikan Pj. Bupati Boalemo (Bulan Mei 2022).
- Pelantikan Wakil Bupati Gorontalo Utara menjadi Bupati Gorontalo Utara (Bulan Juni 2022).
- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I (Bulan Agustus 2022) dan Laporan Kinerja Triwulan II Pj. Gubernur Gorontalo (Bulan November s.d Desember 2022).
- Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Iuran APPSI Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 235.609.076.- realisasi anggaran Rp. 222.467.343.- persentase 94,42 %.
- Pembuatan SK Tim Penyusun LPPD Provinsi Gorontalo tahun 2022 terhadap LPPD tahun 2021, SK Tim Daerah tahun 2022 dan SK Tim Sekretariat Penyusun LPPD.
- Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksanaan urusan pemerintah kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD.
- Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (rancangan awal LPPD).
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Reviu Penyusunan LPPD Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohuwato.
- Melaksanakan koordinasi dengan TIMDA serta bagian Tata Pemerintahan



Kabupaten/Kota terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.

- Penyusunan rancangan LPPD berdasarkan catatan hasil revidi (rancangan akhir LPPD).
  - Penyusunan dan penginputan laporan penyelenggaraan pemerintahan melalui aplikasi SILPPD.
  - Penyampaian manual Dokumen LPPD tahun 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri RI.
  - Melaksanakan evaluasi LPPD Kabupaten/Kota Bersama TIMDA.
  - Konsultasi dan Koordinasi terkait pelaksanaan evaluasi oleh Timnas di Kementerian Dalam Negeri RI.
  - Rapat Asistensi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi tahun 2022 terhadap LPPD tahun 2021 oleh Timnas Kemendagri RI.
  - Pembayaran Iuran APPSI.
- Jumlah Laporan Pengembangan Otonomi Daerah dengan persentase sebesar 96.18%.

### 3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

Output Kegiatan : Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang di fasilitasi dengan capaian kinerja sebesar 24 dokumen Kerjasama atau 86.04%

- Melaksanakan dan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan kerja sama daerah.
- Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Draft, Pembahasan Draft dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, LOI dan MOU.
- Menfasilitasi rapat kerja sama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga.
- Menfasilitasi kerja sama luar negeri antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Ehime Prefecture.
- Menyelenggarakan kegiatan Rapat Inventarisasi Kerja Sama Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo.
- Menfasilitasi Kerja Sama daerah antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Tarakan Kalimantan Utara.
- Melaksanakan monitoring dan koordfinasi pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten/Kota.

### 3. Program Penataan Organisasi

Outcome dari program adalah Persentase pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



1) Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Output Kegiatan : jumlah SPM OPD dengan target dan capaian sebanyak 6 SPM OPD atau sebesar 81.09%.

- Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi terkait pelaporan SPM ke Kementerian Dalam Negeri.
- Melaksanakan fasilitasi penyusunan pelaporan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah provinsi Gorontalo
- Melaksanakan monitoring dan koordinasi pelaksanaan dan penyusunan laporan SPM di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo
- Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan penerapan SPM sesuai Regulasi terbaru Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo.

4. Program Kesejahteraan Rakyat

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan layanan keagamaan, adat dan budaya dengan capaian sebesar 100%

1) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual

Output Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang difasilitasi, Jumlah pelaksanaan kegiatan adat dan budaya yang di fasilitasi, Jumlah penerima bantuan dengan capaian sebesar 90.65%.

Aktivitas yang dilaksanakan :

- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan :
  - Pelaksanaan Tonggeyamo dalam rangka menentukan awal bulan Ramadhan
  - Pelaksanaan Tadarus Al-Qur'an dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
  - Pelaksanaan pembagian Takzil/makanan untuk Buka Puasa oleh seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
  - Pelaksanaan Safari Ramadhan dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
  - Pelaksanaan Doa dalam rangka malam Tumbilotohe
  - Pelaksanaan Tonggeyamo penentuan 1 Syawal
  - Pelaksanaan shalat Idul Fitri dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Fasilitasi keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo pada MTQ tingkat Nasional :
  - Provinsi Gorontalo mengirimkan sebanyak 44 orang peserta MTQ Nasional ke XXIX tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini memperoleh anggaran APBD-P untuk memfasilitasi transportasi, akomodasi dan konsumsi



kafilah selama pelaksanaan MTQ.

- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan adat dan budaya
  - Upacara adat “Mopotilolo atau upacara adat penyambutan tamu kepada pejabat negara atau tokoh penting yang baru pertama kali berkunjung di Provinsi Gorontalo
  - Upacara adat Mopotolungo Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Moloopu Penjabat Gubernur Gorontalo
  - Upacara Adat Modepito, merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan oleh masyarakat adat Gorontalo kepada Dr.Ir.H.Darda Daraba, M.Si yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Sekretaris Daerah
  - Penganugerahan gelar Adat Gorontalo kepada putra/putri daerah yang telah berjasa untuk Provinsi Gorontalo.

- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Embarkasi haji Antara  
Maksud diselenggarakan kegiatan penyelenggaraan EHA adalah dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada jamaah haji Provinsi Gorontalo yang akan menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah.

Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi diantaranya memfasilitasi transport lokal baik darat maupun udara serta pengadaan konsumsi jamaah haji selama berada di embarkasi haji antara.

Jumlah kuota Jamaah Haji Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebanyak 451 jamaah dengan pembagian kuota per kabupaten dan kota sebagai berikut :

**Tabel 3.156**

Jumlah Jamaah Haji Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Kab/Kota	Jumlah				
	Jamaah	KBIHU	Jumlah	Kloter 14	Kloter 17
Kota Gorontalo	153	-	153	153	-
Kab. Gorontalo	185	1	186	186	-
Kab. Boalemo	19	-	19	19	-
Kab. Pohuwato	26	-	26	-	26



Kab/Kota	Jumlah				
	Jamaah	KBIHU	Jumlah	Kloter 14	Kloter 17
Kab. Bone Bolango	34	-	34	2	32
Kab. Gorontalo	29	-	29	29	-
Petugas Kloter	-	-	4	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>450</b>	<b>1</b>	<b>451</b>	<b>393</b>	<b>58</b>
<b>Total</b>	<b>451</b>				

- Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

Hibah dan Bantuan Sosial diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan melalui SK Gubernur Gorontalo yakni :

- SK Gubernur No. 168/I/IV/2022
- SK Gubernur No. 358/I/XI/2022
- SK Gubernur No. 201/I/VI/2022
- SK Gubernur No. 339/I/X/2022

**Tabel 3.157**

Daftar Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2022

No	Kab/Kota	Hibah			Bantuan Sosial			Jumlah
		B/L/O	Tempat Ibadah	Yayasan	TPQ	Majelis Taklim	Pondok Pesantren	
1	Kota Gorontalo	5	51	10	5	8	1	80
2	Kabupaten Gorontalo	-	116	7	9	6	2	140
3	Kabupaten Boalemo	-	43	3	3	2	1	52
4	Kabupaten Pohuwato	-	40	4	3	2	1	50
5	Kabupaten Bone Bolango	-	55	7	10	17	3	92
6	Kab. Gorontalo Utara	-	26	1	1	1	-	29
7	Kota Manado	-	1	-	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>332</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>444</b>

2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Output Kegiatan : Jumlah koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD



sektor Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan, Sosial dan Ketahanan Keluarga, serta pemberian Bantuan Studi (Basiswa), dengan capaian 87.11%.

Kegiatan yang dilakukan berupa :

- Rapat revisi juknis pemberian Bantuan Studi
- Rapat penetapan penerima Bantuan Studi
- FGD kegiatan usaha Kesehatan Sekolah
- Rapat persiapan pembangunan aplikasi Bantuan Studi
- Umpan balik dan monitoring pelaksanaan Tindakan korektif LAHP oleh Ombudsmen Gorontalo.

**Tabel 3.158**

Bantuan Studi (Basiswa) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

**A. SK 302**

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>JUMLAH PENERIMA</b>
1	DIPLOMA TIGA (D3)	24 ORANG
2	STRATA SATU (S1)	582 ORANG
3	KEDOKTERAN / STRATA DUA (S2)	130 ORANG
4	STRATA TIGA (S3)	23 ORANG
<b>JUMLAH</b>		<b>759 ORANG</b>

**B. SK 365 (Tambahan)**

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>JUMLAH PENERIMA</b>
1	DIPLOMA TIGA (D3)	7 ORANG
2	STRATA SATU (S1)	49 ORANG
3	KEDOKTERAN / STRATA DUA (S2)	5 ORANG
4	STRATA TIGA (S3)	4 ORANG
<b>JUMLAH</b>		<b>65 ORANG</b>

3) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Output Kegiatan : Jumlah laporan pelaksanaan rakorev Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan capaian 70.01%.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kota Se-Provinsi Gorontalo.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar se-Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Gorontalo.
- Koordinasi dan konsultasi kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non



- Pelayanan dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Koordinasi dan konsultasi kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dengan Sekretariat Jendral kementerian Dalam Negeri RI.
- Koordinasi, Sinkronisasi serta Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Provinsi Gorontalo di Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar.

#### **4) Permasalahan dan Solusi**

##### **Permasalahan :**

- Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
  - Beban kerja dalam bidang kerja sama sangat besar, tapi belum diakomodir dalam 1 bagian
  - Jumlah SDM yang kurang dan belum memiliki pengetahuan yang cukup
  - Jumlah anggaran Kerja Sama yang belum memadai, karena dalam kerja sama harusnya tahapan-tahapan kerja sama tersebut dilaksanakan; mulai dari kegiatan sosialisasi permendagri tentang kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri, belum lagi harus memberikan bimtek untuk Pemetaan Kerja Sama, Fasilitasi setiap rapat rapat pembahasan dengan seluruh OPD yang melaksanakan kerja sama
  - Nama kegiatan dan sub kegiatan belum sesuai Kepmen 50 tahun 2020
  - Peran TKKSD yang belum maksimal khususnya dalam membahas daftar rencana kerja sama yang belum masuk dalam perencanaan pembangunan melalui program/kegiatan.
- Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
  - Jumlah SDM pada Biro Pemerintahan kurang memadai baik dari kuantitatif dan kualitatif
  - Anggaran belum maksimal
  - Peran Tim Penerapan SPM Provinsi Gorontalo belum maksimal khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi, rancangan Peraturan Gubernur ttg SPM
  - Kurangnya Pemahaman OPD terhadap peraturan yang baru ttg penerapan SPM khususnya dalam tahapan penerapan SPM
  - Peran OPD dalam melakukan pembahasan perencanaan dan penganggaran SPM kegiatan SPM juga belum maksimal
  - OPD kurang responsif dalam menindaklanjuti penginputan capaian SPM.
- Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual





Permasalahan terjadi pada aktivitas Penyaluran Hibah dan Bansos yakni :

- Penerima Hibah tidak didukung dengan legalitas dari Lembaga yang berwenang seperti Surat Keputusan pengangkatan pengurus, Akta Notaris dan pengesahan kepengurusan dari kemenkumham untuk Lembaga yang berbentuk Yayasan
- Penerima hibah tidak memiliki rekening bank atas nama badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan
- Dana hibah yang akan diterima lebih kecil dari biaya yang telah dituangkan dalam rencana anggaran biaya, sehingga penerima menunda untuk mencairkan dana hibahnya
- Sebagian penerima terlambat atau bahkan tidak mengetahui bahwa badan/lembaga/organisasi mereka adalah penerima hibah dari Provinsi Gorontalo
- Sebanyak 2 (dua) penerima hibah yang tidak dapat dilanjutkan proses penagihan pencairan dana hibahnya disebabkan karena adminitrasi pendukung pencairan tidak lengkap seperti surat keputusan pengangkatan pengurus yang sudah tidak berlaku atau habis masa kepengurusannya, serta adanya bencana banjir bandang di desanya sehingga pengurus tidak dapat melengkapi berkasnya sampai dengan batas waktu penagihan keuangan
- Penerima hibah juga ada yang beralasan bahwa jauhnya jarak dan besarnya biaya transport yang dikeluarkan pada saat mengurus berkas pencairan dana.
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
  - Permasalahan yang terjadi adalah pada pelaksanaan FGD yang seharusnya 3 Kali hanya dapat dilaksanakan 2 Kali karena waktu pelaksanaan kegiatan lebih banyak focus ke aktivitas beasiswa.
  - Pengurusan beasiswa sangat menyita waktu pada sub bagian Kesra Non Pelayanan Dasar karena masih awal-awal pelimpahan kegiatan dari Dinas Dikpora Provinsi Gorontalo.
  - Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM
  - Keterbatasan Anggaran Operasional
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 

Jalur Koordinasi yang terbatas dengan Kabupaten Kota, hal tersebut disebabkan perbedaan Nomenklatur Jabatan yang ada di Kabupeten Kota, Kabupaten Kota Tidak merujuk pada Kepmendagri 0550-5889 tahun 2021, Kabupaten Kota Masih mengacu pada struktur Lama. Sehingga Perlu ada penguatan kelembagaan dari



Kementerian Dalam Negeri melalui pelaksanaan.

**Solusi :**

- Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
  - Membuat permohonan pegawai ke Sekda untuk penambahan SDM
  - Menyesuaikan dengan kegiatan dan sub kegiatan pada Kepmen 50 tahun 2020
  - Mengajukan Anggaran melalalui perencanaan keuangan disesuaikan dengan jumlah kegiatan kepmen 50 tahun 2020
  - Membuat SK TTKSD sekaligus dengan pemberian Insentif
- Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
  - Permohonan pegawai ke Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
  - Perencanaan anggaran untuk kegiatan SPM khususnya yang berkaitan dengan rencana aksi, pembuatan rancangan peraturan gubernur dan sosialisasi secara berkelanjutan ttg penerapan SPM
  - Melakukan Evaluasi terhadap pencapaian SPM Provinsi
  - Mengajukan anggaran kegiatan melalui perencanaan
- Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual
  - Perencanaan kegiatan dan anggaran perlu dikaji dan dibahas lebih intensif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.
  - Untuk tahun 2023, perencanaan, pelaksanaan dan pencairan belanja hibah harus dilakukan diawal tahun maksimal di Laporan Tahunan Fasilitasi Bina Mental Spritual 2022 51 triwulan pertama, sehingga hibah dan bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan efektif sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan dengan intensif, agar program/kegiatan dapat diukur serta dapat mengidentifikasi dan meminimalisir hambatan/kendala.
  - Perlu kiranya mengoptimalkan SDM yang ada sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan target yang diharapkan.
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
  - Untuk pelaksanaan FGD kedepan akan dilaksanakan selama 3 kali yaitu pada awal tahun, pertengahan tahun dan pada akhir tahun sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - Untuk penyaluran beasiswa khususnya bagi penerima yang termasuk dalam SK



akan lebih awal diminta untuk melengkapi berkas administrasi sebagai dasar pencairan dana.

- Penambahan jumlah dan kualitas SDM
- Ketersediaan Anggaran Operasional
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
  - Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan
  - Menyusun Susunan Acara Rapat Mitra Bidang
  - Menetapkan Narasumber
  - Melakukan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Kab / Kota Terkait

**5) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.159**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemasangan Pilar Batas Daerah Yang Terpasang, Koordinasi Pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan TP	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkualitas	-	-	-	-
4	Persentase Peningkatan Layanan Keagamaan, Adat dan Budaya	100%	100%	100%	100%

**7. Biro organisasi Setda Provinsi Gorontalo**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo**

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui percepatan pelaksanaan Birokrasi

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.160**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : Terwujudnya Penataan Kelembagaan Yang Baik	Indikator Sasaran : Jumlah OPD yang telah melakukan penyesuaian struktur	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	100%
		Jumlah OPD yang telah menyusun Anjab/ABK	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	100%
	Terwujudnya Sistim Akuntabilitas Kinerja Yang Baik	Jumlah OPD yang telah menyusun dokumen ketatalaksanaan (Proses bisnis)	12 OPD	12 OPD	10 OPD	10 OPD	100%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Public Yang Baik	Jumlah OPD yang telah menyusun Dokumen ketatalaksanaan (SP)	12 OPD	12 OPD	10 OPD	10 OPD	100%
		Jumlah OPD yang telah menyusun Dokumen ketatalaksanaan (SOP)	12 OPD	12 OPD	10 OPD	10 OPD	100%
		Persentase peningkatan sistim akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (BB)	75%	75%	50%	50%	100%
		Jumlah OPD yang telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	6 OPD	6 OPD	3 OPD	11 OPD	100%
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah pada Biro Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Penataan Organisasi	Jumlah kelembagaan OPD provinsi dan kab/kota yang dilakukan penataan	32 OPD dan 6 Kab/Kota	32 OPD dan 6 Kab/Kota	32 OPD dan 6 Kab/Kota	32 OPD dan 6 Kab/Kota	100%

**2) Program dan Kegiatan**

**Tabel 3.161**  
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>4.442.231.170</b>	<b>4.116.290.983</b>	<b>92.66</b>	<b>100</b>	<b>99.28</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.919.901	316.521.108	100	100	99	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	316.919.901	316.521.108	100	100	99	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.561.392.992	3.264.889.092	91.67	100	99.48	100
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.400.000.562	3.103.783.212	91	100	99.47	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	161.392.430	161.105.880	99	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.500.000	70.072.500	99	100	99.95	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.500.000	70.072.500	99	100	99.95	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.401.987	226.873.062	91	100	98.43	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.401.987	226.873.062	91	100	98.43	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.016.290	237.935.221	98	100	98.19	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.016.290	237.935.221	98	100	98.19	100
<b>2</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>1.368.886.493</b>	<b>1.363.465.784</b>	<b>99.60</b>	<b>100</b>	<b>98.06</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	560.622.822	557.640.746	99.47	100	95.87	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	261.690.339	259.544.504	98	100	92.51	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan kab/kota	118.783.172	118.291.870	99	100	95.74	100
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	180.149.311	179.804.372	99	100	99.38	100
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	808.263.671	805.825.038	99.70	100	99.59	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	235.969.279	235.172.332	99	100	99.90	100
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100.004.217	99.650.628	99	100	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	112.570.897	112.248.635	99	100	99.67	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	139.450.243	138.963.566	99	100	99.97	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	220.269.035	219.789.877	99	100	99.02	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.811.117.663</b>	<b>5.479.756.767</b>	<b>94.30</b>	<b>100</b>	<b>99.04</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana, dan SDM Aparatur
- Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, nonitoring dan pelaporan

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Output Sub Kegiatan : persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor meliputi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang

perkantoran seperti, pengadaan alat kantor, meja, kursi, komputer, printer, dll.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output Sub Kegiatan : jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pengembangan kompetensi.

4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Output Sub Kegiatan : Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia untuk diberikan kepada ASN.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output Sub Kegiatan : laporan keuangan Biro Organisasi meliputi, LRA, CALK, LKPD, LKPJ, LPPD, LKIP

5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output Sub kegiatan : dokumen perencanaan perangkat daerah, meliputi RKA, DPA, RENJA, RENSTRA.

2. Program Penataan Organisasi

Outcome dari program adalah :

- Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah
- Presentase pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

1) Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sub Kegiatan : Fasilitasi penataan kelembagaan provinsi

Output Sub Kegiatan : tersusunnya dokumen pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi perangkat daerah.

Sub Kegiatan : fasilitasi penataan kelembagaan kab/kota

Output Sub Kegiatan : tersusunnya rekomendasi dan persetujuan pembentukan, penyempurnaan, dan pembubaran organisasi perangkat daerah kab/kota.

Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan

Output Sub Kegiatan : tersusunnya dokumen analisis jabatan dan ABK, Evaluasi



jabatan, standar kompetensi jabatan.

2)

Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Sub Kegiatan : Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup biro Pemprov Gorontalo dan pembinaan kab/kota.

Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Output Sub Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi dan monitoring evaluasi akuntabilitas kinerja.

Sub Kegiatan : Evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja

Output Sub Kegiatan : terlaksananya fasilitasi peningkatan budaya kerja dan budaya organisasi (Tim RB dan agen perubahan).

Sub Kegiatan : Pengelolaan tata laksana pemerintahan

Output Sub Kegiatan : terlaksananya penyusunan peta proses bisnis dan SOP.

Sub Kegiatan : Fasilitasi peningkatan pelayanan publik

Output Sub Kegiatan : terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan dan monev inovasi pelayanan publik.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Permasalahan : - Sarana dan Prasarana Penunjang pelayanan masih kurang memadai seperti laptop, meja dan kursi yang harusnya menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh SKPD.

- Pembenahan ruangan kerja dan ruangan rapat yang belum maksimal.

- Jumlah Personil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang berdasarkan Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga mengakibatkan adanya Personil ASN yang memiliki Beban Kerja Ganda.

Solusi : - Pada awal tahun anggaran 2023 telah direncanakan untuk penambahan sarana dan prasarana berupa 2 unit laptop walaupun masih terbilang kurang, namun kondisi ini sudah lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

- Pada tahun anggaran 2023 akan lebih ditingkatkan lagi



pemeliharaan dan perbaikan ruangan kantor.

- Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo telah menyampaikan Daftar Kebutuhan ASN yang berdasarkan pada Analisis Beban Kerja.

Kegiatan Koordinasi Laporan keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran

Permasalahan : - Jumlah gaji dan tunjangan yang tersedia sangat optimal namun pengelolaan pendapatan tunjangan masing-masing masing-masing ASN belum optimal karena kurang objektifnya penilaian kinerja ASN sehingga terdapat ASN yang tidak memiliki kinerja namun menerima tunjangan yang sama dengan ASN yang memiliki kinerja.

Solusi : - Perlu pengawasan terhadap pengelolaan penilaian kinerja individu ASN yang masuk dalam sistem kerja unit kerja seperti pembentukan Tim Penjamin Mutu Penilaian Kinerja ASN.

#### Program Penataan Organisasi

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan provinsi

Permasalahan : - Organisasi Perangkat Daerah yang tidak tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukurann.  
- Adanya Implementasi Penyederhanaan Birokrasi yang sesuai target waktu dari regulasi.

Solusi : - Menyesuaikan Perangkat Daerah sesuai Pasal 109 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.  
- Menindaklanjuti sesuai mekanisme penyederhanaan birokrasi

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan kab/kota

Permasalahan : - Organisasi Perangkat Daerah yang tidak tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.  
- Adanya Implementasi Penyederhanaan Birokrasi yang sesuai target waktu dari regulasi.

Solusi : - Menyesuaikan Perangkat Daerah sesuai Pasal 109 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.  
- Menindaklanjuti sesuai mekanisme penyederhanaan birokrasi

Kegiatan Penataan Analisis jabatan

Permasalahan : - Terbitnya PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Instansi Pemerintah Pusat dan





Pemerintah Daerah.

- Kurangnya SDM Aparatur yang belum memadai jumlahnya berdasarkan kompetensi.
- Analisis Jabatan dan ABK belum menjadi dasar dalam manajemen kepegawaian.

Solusi : - Perlu adanya Tim Anjab dan ABK;  
 - Perlu dilakukan Bimtek terkait dengan Penguatan Tim;  
 - Perlu komitmen bersama antara Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda, Badan Keuangan dan Sekretariat Daerah selaku pengambil kebijakan serta Inspektorat selaku pengawasan.

Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi :

Permasalahan : - Kurangnya pemahaman para ASN di lingkup unit kerja terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi  
 - Jumlah dokumen yang dihasilkan sesuai dengan jumlah Perangkat Daerah, Namun kualitas dokumen belum optimal karena orientasi RB ASN belum tepat sasaran.

Solusi : - Perlu diberikan penguatan dan evaluasi oleh pimpinan secara berkala terkait internalisasi RB lingkup ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo  
 - Kompetensi Para Pengelola dokumen perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang strategis (pendampingan).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja :

Permasalahan : - Belum terdapat sistem evaluasi kinerja di tingkat Pemerintah Daerah yang menggambarkan capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya itu tercapai sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja  
 - Belum terdapat penerapan reward & Punishment terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah  
 - Hasil monev Kab/Kota yang kurang maksimal

Solusi : - Membangun sistem evaluasi kinerja mulai di tingkat Perangkat Daerah sampai tingkat Pemerintah Daerah.  
 - Diperlukan komitmen Pimpinan membangun mekanisme pemberian



reward dan punishment

- Komitmen semua pimpinan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan terbawah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Bersama.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya kerja :

- Permasalahan :
- Belum kuatnya komitmen para pimpinan di tingkat unit kerja dalam pelaksanaan internalisasi dan implementasi Budaya Kerja
  - Hasil Evaluasi Budaya kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo masih dalam kategori Cukup Sehat
  - Ego sektoral yang masih melekat di perangkat-perangkat daerah dalam pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan Bersama yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.
  - Masih kurangnya komitmen pimpinan terhadap pentingnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan masih rendahnya crosscutting antar Perangkat Daerah utamanya para leading sector pengampu akuntabilitas kinerja.

- Solusi :
- Penguatan Budaya Kerja lebih intens dilakukan di setiap unit kerja.
  - Penguatan Komitmen pimpinan harus lebih intens.
  - Membangun pemahaman Bersama terhadap Fondasi Budaya Kerja Core Value ASN BerAKHLAK
  - Perlu perubahan strategi lebih fundamental dalam meningkatkan budaya kerja yang lebih mengena mencapai sasaran sampai pada individu ASN.
  - Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis perubahan dan perbaikan.
  - Membangun system kolaborasi diantara perangkat daerah untuk mencapai tujuan Bersama

Kegiatan Tata laksana Pemerintahan :

- Permasalahan :
- Penyusunan dan penerapan Peta Proses Bisnis belum optimal baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun OPD sehingga masih perlu diadakan pendampingan dalam proses penyusunan dan juga perlu adanya komitmen yang tinggi dalam penyusunan serta penerapan dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah



Provinsi Gorontalo

Solusi : - Dengan adanya perubahan SOTK berdasarkan pergub No 27 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah provinsi Gorontalo pada beberapa OPD sehingga diperlukan tambahan anggaran untuk dapat meningkatkan fasilitasi pendampingan pada masing-masing OPD dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen peta proses bisnis OPD maupun Pemda

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik :

Permasalahan : Masih kurangnya pemenuhan aspek kebijakan pelayanan, yang terdiri dari:

- Kurangnya pemahaman pentingnya Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan serta publikasinya kepada masyarakat sesuai amanah Peraturan Menteri PAN RB No. 15 Tahun 2014.
- Masih minimnya pemahaman pentingnya pelaksanaan Suvei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai amanah Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017. Dari 32 OPD hanya 11 OPD yang memasukkan laporan di batas waktu yang telah ditentukan
- Masih kurangnya pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik oleh OPD-OPD sesuai amanah UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik.
- Minimnya keikutsertaan OPD-OPD dalam melakukan inovasi pelayanan publik

Solusi : - Perlu dorongan dan fasilitasi dalam penyusunannya

- Perlu adanya pengawalan yang intens dan fasilitasi dalam pelaksanaan surveinya serta dalam penyusunan laporannya secara berkala (triwulan dan tahunan)
- Terus berupaya mendorong setiap instansi pemerintah agar menginput segala informasi pelayanan publik ke dalam Sistem



Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Karena dalam kebijakan Permen PAN-RB No.13 Tahun 2017 tentang SIPP menjelaskan bahwa, SIPP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

- Terus berupaya mendorong OPD-OPD dalam menciptakan ide-ide baru terkait inovasi pelayanan publik dan melakukan fasilitasi keikutsertaannya dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.

**1) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.162**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung  
Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2022	
		Target	Realisasi
1	Presentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100%
2	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana OPD	100%	100%
3	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	10 orang	100%
4	Jumlah dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	6 dok	100%
5	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 lap	100%
6	Jumlah gaji dan tunjangan yang tersedia	34 ASN	100%
7	Presentase penyusunan dokumen pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi PD	100%	100%
8	Presentase penyusunan dokumen pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi kab/kota	100%	100%
9	Jumlah dokumen analisis jabatan dan ABK, evaluasi jabatn, standar kompetensi jabatan yang tersusun	2 dok	100%
10	Jumlah peta proses bisnis, SP, SOP yang tersusun	1 dok	100%
11	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemprov Gorontalo dan Pembinaan kab/kota	1 dok	100%
12	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan budaya kerja dan budaya organisasi (Tim RB dan agen perubahan)	1 dok	100%



No	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2022	
		Target	Realisasi
13	Jumlah OPD dan kab/kota yang difasilitasi dan di monev akuntabilitas kinerjanya	32 SKPD dan 6 Kab/Kota	100%
14	Jumlah dokumen pengusulan dan monev inovasi pelayanan publik	3 dok	100%

**B. Sekretariat DPRD**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo**

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.163**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Presentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi / Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya Jumlah bahan komunikasi dan Publikasi Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Jumlah Bimtek dan Orientasi DPRD	20   152 kali  10	20   152 kali  8	100%   100%  80 %
		Jumlah Kerjasama Media Massa dan Media Elektronik	45 Anggota	45 Anggota	100 %
		Jumlah Pelaksanaan Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya	8 MOU  3	8 MOU  3	100 %  100 %
		Jumlah Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	96	96	100 %
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersosialisasinya Produk Hukum DPRD	10	10	100 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	100	100 %
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3	3	100 %
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek sesuai Tugas dan Fungsi	15	15	100 %



No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Presentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Unit Sarana yang di adakan	100	95	95 %
		Presentase Jasa Administrasi Perkantoran	100	100	100 %
		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas DPRD	40	40	100 %

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.164**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo  
Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>48.930.778.241</b>	<b>32.594.796.270</b>	<b>66.61</b>	<b>100</b>	<b>85.25</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5.694.801.785	4.034.774.809	70.85	100	70.36	100
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	18.706.707.145	17.378.798.492	92.90	100	96.07	100
	Sub Kegiatan Bimtek / Orientasi DPRD	15.351.297.889	14.063.574.779	91.61	100	96.07	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.355.409.256	3.315.223.713	98.80	100	-	-
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	22.697.440.786	20.953.137.327	92.31	100	82.83	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	11.354.011.250	11.013.330.590	97.00	100	85.47	100
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	11.343.429.536	9.939.806.737	87.63	100	80.13	100
	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	284.059.264	278.877.221	98.18	100	96.82	100
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	1.547.769.261	1.472.575.420	95.14	100	93.84	100
<b>2</b>	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>5.009.053.885</b>	<b>3.815.432.307</b>	<b>76.17</b>	<b>100</b>	<b>80.25</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	5.009.053.885	3.815.432.307	76.17	100	80.25	100
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>43.359.254.559</b>	<b>41.740.466.620</b>	<b>96.27</b>	<b>100</b>	<b>92.00</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	518.449.736	514.598.548	99.26	100	96.28	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.079.172.596	33.034.077.094	99.86	100	99.76	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.079.172.596	33.034.077.094	99.86	100	99.97	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	173.147.188	169.159.840	97.70	100	61.12	100
	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	745.582.108	707.630.456	94.91	100	98.58	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.530.603.481	4.035.750.230	89.08	100	66.96	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.913.316.811	1.817.596.085	95.00	100	87.33	100
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	2.398.982.639	2.119.298.770	88.34	100	83.75	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>97.299.086.685</b>	<b>90.331.706.599</b>	<b>92.84</b>	<b>97.50</b>	<b>88.70</b>	<b>100</b>



1. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Outcome dari program adalah :

- Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Persentase pelayanan Koordinasi/konsultasi Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Presentase Pelayanan Kehumasan dalam penyebarluasan Informasi

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Output kegiatan : Jumlah Peraturan Daerah (Perda). Jumlah Perda sesuai target 10 Perda dan tahun ini bisa dicapai dengan 8 Perda.

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis / Orientasi DPRD

Output Sub Kegiatan : Jumlah Bimbingan Teknis/Orientasi DPRD yang di ikuti 45 Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas.

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Output dari kegiatan

Output Sub Kegiatan : Jumlah Kerjasama dengan Media Massa dan Media Elektronik. Kegiatan ini berupa MOU antara Sekretariat DPRD dengan Pihak Media Cetak dan Media Elektronik, belanja surat kabar dan majalah yaitu Gorontalo Post dan Radar untuk 45 Anggota DPRD dan Pejabat di Sekretariat, belanja jasa penyiaran dan peliputan untuk TVRI Gorontalo, Mimoza TV dan RRI Gorontalo, kegiatan Coffe morning, Kopi lolango. Semua kegiatan dewan berupa Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD. MOU yang dilakukan sudah sesuai Target yaitu 8 MOU.

3) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub kegiatan : Pelaksanaan Reses

Output Sub Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. Kegiatan Reses dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing – masing



Anggota DPRD. Kegiatan Reses sudah sesuai target yaitu 3 kali Reses dalam satu masa persidangan (1 tahun).

Sub Kegiatan : Kunjungan Kerja DPRD

Output Sub Kegiatan : jumlah kunjungan kerja DPRD dalam daerah yang dilakukan Anggota DPRD guna mengevaluasi semua pekerjaan yang dilakukan Eksekutif. Kunjungan Kerja yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai target 96 kali.

Sub Kegiatan : Fasilitasi DPRD

Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan daerah lainnya, Koordinasi menambah pengetahuan dan wawasan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Koordinasi dan Konsultasi ke Sekretariat Kab/Kota dalam hal penyamaan persepsi dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dan Kegiatan ini dilakukan sebanyak 20 kali dan sudah sesuai target.

## 2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Outcome dari Program adalah Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

### a. Pelaksanaan Program

#### 1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Output Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. Kegiatan ini mensosialisasikan Peraturan Daerah yang telah disahkan DPRD ke Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini telah sesuai target sosialisasi perda sebanyak 10 Perda kepada masyarakat di Kab/Kota se Provinsi Gorontalo.

## 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Presentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan





- Persentase Peningkatan layanan administrasi ,Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
- Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Output Kegiatan : Jumlah dokumen Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan. Jumlah Dokumen berupa Laporan LKPJ, LPPD, Renja, LKIP, Data E Monev, Data Sirup dan Penginputan SIPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan : penyediaan dana untuk Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyediaan dana Gaji dan Tunjangan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output Sub Kegiatan : penyusunan laporan keuangan, neraca dan CaLK. Kegiatan ini sudah sesuai target yaitu 3 Dokumen Laporan Keuangan.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek sesuai Tugas dan Fungsi. Kegiatan dalam rangka menambah pengetahuan kepada PNS Sekretariat berupa Diklat, Bimtek dan Studi Komparasi untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal ini memberikan masukan dan arahan yang diperlukan kepada Anggota DPRD.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output Kegiatan : Jumlah Unit Sarana yang akan diadakan. Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan dibutuhkan dalam hal pelayanan terhadap kegiatan Dewan Ditahun 2021 Pengadaan berupa belanja modal yaitu : Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Pengadaan Alat Pendingin, Pengadaan Alat Rumah Tangga, Pengadaan Kursi Kerja Pejabat, Pengadaan Kursi Tamu, Pengadaan Komputer, Pengadaan 45 Tab Anggota DPRD, Pengadaan



Repeater dan Pengadaan Alat Musik. Kegiatan ini tidak bisa mencapai 100 % yakni Pengadaan meja kerja Pejabat DPRD tidak bisa dilaksanakan karena harga SHR kursi eselon cuma 2 Juta sehingga masih ditunda pengadaannya dan akan diadakan kembali di tahun anggaran 2023.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output Kegiatan : kegiatan rutin bagian kesekretariatan. Pembuatan surat menyurat, pengurusan administrasi kepegawaian, belanja rutin seperti listrik, telfon dan air. Kegiatan ini sesuai target yakni 100 % dalam pelaksanaannya.

6) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Output Kegiatan : Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas DPRD, kegiatan ini berupa Dialog Interaktif yang dilaksanakan Anggota DPRD untuk mengetahui masalah yang terjadi di masyarakat dan memberikan penyelesaiannya. Kegiatan ini di lakukan di Kab/Kota se Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini mencapai target yaitu 40 kali dalam setahun dan kegiatan ini kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan Komisi-komisi baik Komisi I,II,III dan IV dalam hal menerima permasalahan-permasalahan masyarakat, rapat kerja dengan SKPD Provinsi terkait program kerja Pemerintah Provinsi.

### 3) Permasalahan dan Solusi

#### **Permasalahan yang ditemui dalam kegiatan Kesekretariatan antara lain:**

- Dari Tahun ke tahun permasalahan yang ada adalah Sarana dan Prasarana, ini dikarenakan kebutuhan 45 Anggota DPRD berbeda-beda.

#### **Untuk mengatasi permasalahan, ada beberapa solusi yang dapat diambil yaitu**

:

- Mengusulkan rencana pengadaan Sarana dan Prasarana / Fasilitas guna menunjang kegiatan DPRD, dengan mengutamakan kepentingan Anggota DPRD per Individu atau keterwakilan Fraksi di DPRD.
- Selalu berupaya meningkatkan hubungan yang harmonis terhadap Dewan dengan



Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta memfasilitasi peningkatan lembaga kemitraan antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.165**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendukung  
Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas				
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hearing/Dialog	10 Perda	8 Perda	10 Perda	3 Perda
3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Alat Kelengkapan Dewan	84 Kali	84 Kali	84 Kali	84 Kali
4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Paripurna	40 Kali	32 Kali	40 Kali	26 kali
	Jumlah Penyampaian Risalah Rapat Paripurna	40 Kali	32 Kali	40 Kali	26 Kali
5	Jumlah Pelaksanaan Reses	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
6	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi, Studi Banding, Diklat dan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Anggota	45 Anggota	45 Anggota	45 Anggota
7	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kunjungan Kerja	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali
8	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali

### III. Urusan Penunjang

#### 1. Perencanaan

##### 1) Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

- Meningkatnya Mutu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

##### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.166**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase OPD yang memiliki Renstra selaras dengan RPJMD Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKP</b>	100	100	100	91.51	100
	Program: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKP dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100	100	100	91.51	100
2	<b>Sasaran : Meningkatkan keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan penganggaran</b>	<b>Indikator Sasaran : Tingkat Konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan</b>	100	100	100	92.89	100
	Program: Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase kesesuaian RKP dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian	100	100	100	98.35	100



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Renstra SKPD dengan RPJMD					
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan serta Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100	100	100	87.42	100

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.167**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perencanaan Fungsi Penunjang Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>14.472.752.970</b>	<b>13.961.728.668</b>	<b>96.47</b>	<b>100</b>	<b>87.42</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.861.858.077	1.772.240.523	95,19	100	94.29	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.706.767.455	1.647.595.223	96.53	100	91.63	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.090.622	124.645.300	80,37	100	101.89	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.268.149.915	9.054.567.013	97.70	100	91.71	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.198.153.031	8.991.261.847	97.75	100	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	69.996.884	63.305.166	90,44	100	91.71	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	269.999.233	250.192.100	92,66	100	87.59	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	269.999.233	250.192.100	92,66	100	87.59	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.918.532.416	1.827.844.667	95,27	100	83.99	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.918.532.416	1.827.844.667	95,27	100	83.99	100

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.154.213.329	1.056.884.365	91,57	100	84.70	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.154.213.329	1.056.884.365	91,57	100	84.70	100
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.204.575.530</b>	<b>1.122.545.798</b>	<b>93,19</b>	<b>100</b>	<b>91.51</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	549.222.666	528.706.583	96,26	100	94.14	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	549.222.666	528.706.583	96,26	100	94.14	100
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	286.659.296	236.533.502	82,51	100	-	-
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	286.659.296	236.533.502	82,51	100	-	-
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	368.693.568	357.305.713	96,91	100	88.24	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	148.832.411	142.580.193	95,80	100	89.25	100
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	219.861.157	214.725.520	97,66	100	95.81	100
<b>3</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.493.074.198</b>	<b>2.445.646.175</b>	<b>98,10</b>	<b>100</b>	<b>98.35</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	944.444.201	929.623.333	98,43	100	98.60	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	198.458.984	196.909.782	99,22	100	99.93	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.260.000	52.405.000	98,39	100	99.98	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	53.415.000	51.611.250	96,62	100	95.39	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Pemerintahan						
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	524.540.217	515.120.301	98,20	100	99,41	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	114.770.000	113.577.000	98,96	100	99,96	100
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	724.282.270	723.314.053	99,87	100	99,45	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	234.077.796	233.592.846	99,79	100	99,45	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	236.749.942	237.128.700	100,16	100	98,87	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	253.454.532	252.592.507	99,66	100	-	-
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	824.347.727	792.708.789	96,16	100	97,17	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	205.576.506	204.390.442	99,42	100	96,96	100
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.510.000	59.967.370	95,93	100	97,63	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	73.220.000	70.325.000	96,05	100	97,24	100
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	200.124.221	186.299.012	93,09	100	97,55	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	222.287.000	212.726.965	95,70	100	98.87	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.630.000	59.000.000	97,31	100	94.67	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.170.402.698</b>	<b>17.529.920.641</b>	<b>96.48</b>	<b>100</b>	<b>92.29</b>	<b>100</b>

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Outcome dari program adalah Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD, target 100%.

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Output Sub Kegiatan :

- Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
- Forum Gabungan OPD;
- Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Gorontalo;
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, Musrenbang Regional Sulawesi, Rakortekrenbang dan Musrenbang Tingkat Nasional;
- Proses koordinasi dan konsultasi selama proses penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD tahun 2022;
- Fasilitasi RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Kota serta keikutsertaan pada Musrenbang Kab/Kota.

2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Output Sub Kegiatan :

- Koordinasi Data Tingkat Provinsi Gorontalo dalam rangka Satu Data Indonesia;





- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Gorontalo.
- 3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
- Output Sub Kegiatan :
- Pengendalian Dokumen Perencanaan Provinsi dan Penguatan pengendalian dokumen perencanaan Kabupaten/Kota;
  - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional;
  - Pengendalian, Pengembangan Teknologi Informasi dalam Tahapan Perencanaan Pembangunan.
- Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- Output Sub Kegiatan :
- Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2021 baik secara internal Tim Penyusun LKPJ Gubernur maupun bersama dengan pihak terkait lainnya, meliputi SKPD Provinsi, Instansi vertikal, dll;
  - Evaluasi dan koordinasi teknis penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja/RKPD/Renstra/RPJMD se-Provinsi Gorontalo;
  - Evaluasi dan pelaporan terhadap hasil Perencanaan Pembangunan Jangka pendek secara triwulan ( Triwulan I,II, III, IV);
  - Evaluasi dan analisa terhadap progres capaian indikator pembangunan daerah sesuai target perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang; sehingga diharapkan proses pelaksanaan pembangunan secara periodik dapat di jaga koridor pelaksanaannya sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra, atau dalam RKPD maupun Renja;
  - Evaluasi terhadap program pembangunan daerah sesuai dengan program pembangunan nasional, ini sesuai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sehingga dapat berjalan secara berkualitas, efektif dan efisien;
  - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja program unggulan Provinsi Gorontalo,



mengingat Tahun 2021 adalah Tahun ketiga periode RPJMD 2017-2022 maka perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana progres pencapaian kinerja program unggulan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo termasuk apa saja yang menjadi kendala dan permasalahannya, sejauhmana capaiannya, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat dari program unggulan tersebut;

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan DAK provinsi Gorontalo, menjaga konsistensi pelaporan Kabupaten/Kota dan Provinsi atas pelaksanaan program dan kegiatan DAK di wilayah provinsi Gorontalo. Monev ini untuk mendorong pelaporan DAK kepada Pemerintah Pusat bisa lebih baik dari tahun 2021 yang terkategori masih rendah oleh Sekber DAK Kemendagri RI. Serta menginventarisir dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana DAK.

## 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome dari program adalah Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD, target 100%.

### 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output Sub Kegiatan :

- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Output Sub Kegiatan :

- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan di Kabupaten/Kota;
- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintahan.

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

Output Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Evaluasi Sinergitas Bidang Pemerintahan;
- Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi



Pencapaian SDG's di Provinsi Gorontalo;

- Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Bidang Pendidikan);
- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Output Sub Kegiatan :

- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia.

2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output Sub Kegiatan :

- Rapat Persiapan Penyusunan Renja, Asistensi dan Penajaman Renja SKPD Mitra Sub Bidang Dunia Usaha, ESDM dan Industri;
- Pengembangan Dunia Usaha, Industri dan ESDM Daerah, Regional, Nasional;
- Evaluasi Mitra Sub bidang Dunia Usaha, Industri dan ESDM;
- Rapat-rapat Penyusunan Renja, Review, Asistensi dan penajaman renja SKPD mitra sub industri;
- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif.

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output Sub Kegiatan :

- Rapat Persiapan Penyusunan Renja, asistensi dan penajaman dan Finalisasi Renja Bidang Pertanian dan Pangan;
- Identifikasi Lapangan dan Koordinasi Usulan Program/Kegiatan Bidang Pertanian Pangan dalam Renja 2022.
- Rapat Persiapan Penyusunan Renja, asistensi dan penajaman dan Finalisasi Renja Bidang Pertanian dan Pangan;
- Workshop dan FGD Bidang Pertanian dan Pangan;
- Evaluasi RAD-PG Provinsi dan Kab/kota se Gorontalo;
- Workshop dan FGD Tematik Bidang Pertanian dan Pangan;
- Rakor Teknis dengan SKPD Bidang Pertanian dan Pangan;
- Monev Awal dan Akhir Tahun dalam rangka evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Bidang Pertanian Pangan Tahun 2021/2022;
- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

Output Sub Kegiatan :

- Rapat Persiapan Penyusunan Renja, asistensi dan penajaman dan Finalisasi Renja Bidang Kelautan,Perikanan dan Pariwisata;
- Evaluasi Mitra Sub bidang Kelautan,Perikanan dan Pariwisata;
- Monev DAK di Kabupaten/Kota Subid Kelautan Perikanan dan Pariwisata;
- Penyusunan Renja, Assistensi dan penajaman renja SKPD mitra sub Bidang Kelautan,Perikanan dan Pariwisata;
- Koordinasi/Sinkronisasi/Rapat Koordinasi ke Kab/Kota terkait dengan Tugas dan fungsi Sub Bidang Kelautan,Perikanan dan Pariwisata;
- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kelautan,Perikanan dan Pariwisata.

3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Sektor CK dan PKP);



- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur (sektor Tata Ruang dan prasarana perhubungan);
- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.

Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Output Sub Kegiatan :

- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan infratraktur (sektor infrastruktur, perhubungan);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Sektor CK dan PKP);
- Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Output Sub Kegiatan :

- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Sektor CK dan PKP)
- Monev Perencanaan Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air;
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (sektor tata ruang, prasarana perhubungan);
- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output Sub Kegiatan :

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air;
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang kewilayahan (sektor Tata Ruang dan prasarana perhubungan);
- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;

- Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;

Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Output Sub Kegiatan :

- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan (sektor Tata Ruang dan prasarana perhubungan);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air;
- Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Output Sub Kegiatan :

- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan (Sektor Tata ruang dan prasarana perhubungan);
- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan, target 100%.

#### a. Pelaksanaan Program

##### 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan :

- Laporan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, 1 Dokumen;
- Laporan LAKIP, LPPD, RENSTRA dan Renja BAPPEDA, 4 Dokumen;
- Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi.



Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan :

- Forum BAPPEDA Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian Lembaga, 1 Kegiatan;
- Forum Lintas SKPD antar BAPPEDA Provinsi dengan Kabupaten/Kota, 3 Kegiatan;

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Output Sub Kegiatan :

- Jumlah dokumen keuangan bulanan/semesteran tahun berjalan.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output Sub Kegiatan :

- Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan :

- Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan :

- Jumlah kebutuhan administrasi dan pelayanan pada Sekretariat BAPPEDA.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun 2022.



**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.168**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Fungsi Penunjang Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan Renja PD	100%	100%	100%	91,51%
3.	Persentase kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	98,35%
4.	Persentase kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan kompetensi SDM	100%	100%	100%	87,42%

**5) Penghargaan nasional yang diterima Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Tahun 2022 Bappeda Provinsi Gorontalo menerima Penghargaan Nasional : Indonesia's SDGs Action Award 2022 Kategori Pemerintah Provinsi Sebagai "Terbaik III".

**2. Keuangan**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.169**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan	Indikator Sasaran : Opini WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%





No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	keuangan daerah						
		Ketepatan waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	26 desember 2022	Tepat Waktu	10 desember 2021	100%
		Persentase Aset Yang Dikelola dengan baik	100%	100%	90%	100%	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen BMD	1 Dokumen BMD	100%	100%	100%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7%	-6.67%	7%	18.49%	100%

Penjelasan :

Untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indicator Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan di tahun 2022, hal ini disebabkan sebagai berikut :

- Terjadinya penurunan dana transfer DAK Non Fisik Bos Reguler untuk SD dan SMP dimana pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp250.743.230.000,- sedangkan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp86.895.590.000,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp163.847.640.000,- atau 65,34%. Tahun 2022 dana transfer DAK Non Fisik Bos Reguler untuk SD dan SMP ditransfer langsung ke Kabupaten/Kota.
- Target pendapatan BLUD tahun 2022 sebesar Rp30.000.000.000,- mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp51.408.746.225,- atau 62,67% dimana tahun 2021 Target pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp82.031.930.832,-

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.169**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Keuangan Fungsi Penunjang  
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>77.000.245.246</b>	<b>73.787.254.550</b>	<b>95.83</b>	<b>95.81</b>	<b>94.13</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.238.628.930	1.219.338.644	98.44	100	95.86	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	758.695.344	748.592.263	98.67	99.41	98.15	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	479.933.586	470.746.381	98.09	99.00	98.37	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.978.828.742	59.656.218.800	96.25	94.27	94.16	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.878.829.133	59.563.566.339	96.26	95.89	94.15	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	99.999.609	92.652.461	92.65	92.65	97.99	100
	Kegiatan Administrasi Kependidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	447.860.526	366.824.520	81.91	83.29	94.46	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	447.860.526	366.824.520	81.91	83.29	94.46	100
	Kegiatan Administrasi Umum Daerah	8.990.584.778	8.596.886.366	95.62	96.62	96.42	96.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.990.584.778	8.596.886.366	95.62	96.62	96.42	96.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.344.342.270	3.947.986.220	90.88	93.30	90.49	92.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.344.342.270	3.947.986.220	90.88	93.30	90.49	92.00
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>244.364.631.278</b>					



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	FISIK (%)	Keu (%)	FISIK (%)
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.085.187.868	1.073.966.443	98.97	100	90.86	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo)	88.284.453	88.018.295	99.70	99.68	80.69	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	174.999.469	171.978.672	98.27	98.29	90.94	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	670.928.057	668.007.415	99.56	99.92	96.73	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	150.975.889	145.962.061	96.68	96.64	99.42	100
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	244.850.292	243.444.772	99.43	99.80	99.94	100
	Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	244.850.292	243.444.772	99.43	99.80	99.94	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	9.295.842.683	4.847.132.704	52.14	83.68	96.72	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	380.576.625	379.094.765	99.61	99.76	99.20	100
	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	194.986.964	193.937.984	99.46	99.48	98.71	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	7.822.890.402	3.460.103.786	44.23	44.23	99.37	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	897.388.692	813.996.169	90.71	91.23	88.11	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	878.477.501	860.970.524	98.01	97.81	97.83	75.00
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	365.815.971	361.576.743	98.84	98.69	99.16	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	315.971.338	307.593.113	97.35	97.69	97.50	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	196.690.192	191.800.668	97.51	96.36	96.71	25.00
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	232.073.292.456	227.573.337.606	98.06	85.66	96.29	100
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	20.978.895.685	16.716.126.244	79.68	71.36	98.39	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	211.094.396.771	210.857.211.362	99.89	99.96	96.10	100
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	652.545.678	636.582.945	97.55	97.07	99.28	100
	Sub Kegiatan Implementasi dan	652.545.678	636.582.945	97.55	97.07	99.28	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.529.725.717</b>	<b>1.462.251.351</b>	<b>95.59</b>	<b>95.98</b>	<b>88.97</b>	<b>64.00</b>
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.529.725.717	1.462.251.351	95.59	95.98	88.97	64.00
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	311.266.143	316.909.850	101.81	97.40	89.23	36.00
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	373.951.504	373.231.041	99.81	98.63	97.11	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	844.508.070	772.110.460	91.43	91.92	86.34	56.00
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6.288.329.499</b>	<b>5.814.743.211</b>	<b>92.47</b>	<b>85.88</b>	<b>90.37</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.288.329.499	5.814.743.211	92.47	85.88	90.37	100
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	230.851.992	160.124.650	69.36	69.12	77.35	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	637.969.354	512.240.500	80.29	98.64	71.36	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	367.338.862	361.155.323	98.32	75.20	93.29	100
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	162.910.105	160.407.714	98.46	93.65	99.38	100
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.889.259.186	4.620.815.024	94.51	92.77	94.60	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>329.048.496.940</b>	<b>316.299.684.106</b>	<b>96.13</b>	<b>93.26</b>	<b>95.74</b>	<b>91.92</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur serta perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Output Sub kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen tersebut berupa Renstra OPD Tahun 2023-2026, RKA SKPD Tahun 2022, DPA SKPD Tahun 2022, RKAP Tahun 2022, DPPA SKPD Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, Laporan peta Proses Bisnis Tahun 2022 dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022.

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah. Dokumen tersebut berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021, Laporan Evaluasi Renja Tahun 2022, Laporan Data Sektor Tahun 2022, Laporan Pencapaian Target Program dan Kegiatan SKPD, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan : Persentase Layanan Administrasi Keuangan. Tahun 2022 capaian serapan anggaran Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 59.563.566.339 atau 96.26%.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen laporan keuangan. Dokumen tersebut berupa Laporan Buku Kas Umum, Laporan Register SP2D, Laporan Pertanggungjawaban Administratif, Laporan Pertanggungjawaban Operasional, Laporan Realisasi Bulanan dan Kendali Kegiatan, Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Tahunan.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Output Sub Kegiatan : Jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Tahun 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan melalui Aplikasi SIPD bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Keuangan SKPD se-Provinsi Gorontalo. Adapun peserta yang mengikuti diklat sebanyak 50 peserta.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan : Persentase penyediaan sarana dan prasarana. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dalam penyediaan sarana dan prasarana tahun 2022 telah melaksanakan pengadaan belanja melalui e-Katalog dan Mbizmarket, dan untuk pengadaan Gedung dan bangunan melalui proses pengadaan langsung sehingga pelaksanaannya mencapai 95,62%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Persentase layanan administrasi perkantoran. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di dalamnya mencakup seluruh kegiatan yang ada pada UPTD Wilayah I, II dan III lingkup Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Adapun serapan keuangannya mencapai 90,88%.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Outcome dari program adalah persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah.

1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUA dan PPAS. Penyampaian Rancangan Awal KUA dan PPAS 2023 dari Kepala Daerah kepada DPRD dilaksanakan tepat waktu pada minggu ke II bulan Juli 2022.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Setelah penyampaian Rancangan Awal KUA dan PPAS 2023



dari Kepala Daerah kepada DPRD dilaksanakan tepat waktu pada minggu ke II bulan Juli 2022 selanjutnya dilaksanakan pembahasan bersama DPRD yang menghasilkan perbaikan atau perubahan atas Rancangan KUA dan PPAS 2023 sehingga untuk penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan pada minggu ke II bulan Agustus 2022.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Output Sub Kegiatan : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun. Adapun proses penyusunan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mulai dari penyampaian Rancangan Awal KUA PPAS 2023, pembahasan bersama DPRD yang menghasilkan Kesepakatan KUA PPAS dan dilanjutkan dengan proses penyusunan RKA-SKPD Tahun 2023, asistensi TAPD dan review APIP atas R-APBD kemudian pembahasan bersama DPRD dimana mencapai persetujuan bersama Gubernur dan DPRD.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Output Sub Kegiatan : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun. Telah dilaksanakannya evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI atas APBD Perubahan Tahun 2022 dimana Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Penjabaran Perubahan APBD telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ke DPRD telah sesuai dengan jadwal yaitu paling lambat 01 Oktober 2022, tapi Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan tanggal 23 September 2022.





2) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.

Output Sub Kegiatan : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan. Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 se-Provinsi Gorontalo secara maksimal, tepat waktu (15 hari kerja) dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota juga telah dilaksanakan tepat waktu.

3) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah. Terdapat jumlah dokumen SP2D yang terverifikasi sebanyak 49.302 Nomor SP2D.

Sub Kegiatan : Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD. Terdapat jumlah otorisasi SPD /Program/Kegiatan/SKPD lingkup Provinsi Gorontalo.

Sub Kegiatan : Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah. Jumlah realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah di bawah target disebabkan adanya belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan berupa Biaya Bunga Pinjaman yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan anggaran yang sudah tersedia pada DPA SKPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022, sudah dikompensasi pada saat penyaluran Dana PEN kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur, sedangkan untuk pembayaran



biaya provisi sebesar 1% telah dibayarkan sesuai dengan permintaan pembayaran/invoice melalui APBD Tahun 2022.

Sub kegiatan : Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kerjasama. Terdapat 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan PT. Bank SulutGo tentang Penempatan Dana Deposito.

4) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan sesuai SAP yang disusun. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Un Audited telah diserahkan kepada BPK RI sesuai dengan jadwal yang ditetapkan setelah sebelumnya dilaksanakan rekonsiliasi dan proses akuntansi lainnya sesuai dengan SAP. Telah dilaksanakan juga Workshop Aplikasi Sistim Akuntansi Persediaan Berbasis Akrual Tahun 2022 dengan menghadirkan seluruh Operator Aplikasi Persediaan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berjumlah 67 peserta.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Un Audited telah diserahkan kepada BPK RI sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Audited telah diperiksa oleh BPK RI dengan Nomor 01.A/LHP/XIX/.GOR/05/2022 tanggal 16 mei 2022.



Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Regulasi tentang Akuntansi yang disusun. Telah disahkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022.

5) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Output Sub Kegiatan : Jumlah Kabupaten/ Kota yang memperoleh Bantuan Keuangan Seluruh Kabupaten/Kota memperoleh bantuan keuangan.

Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi

Output Sub Kegiatan : Jumlah Kabupaten/ Kota yang memperoleh Bagi Hasil Seluruh Kabupaten/Kota memperoleh bagi hasil.

6) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

Output Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Pengelolaan Keuangan yang tersedia. Telah dilaksanakan Pelatihan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIM-PD) sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur gorontalo nomor 13 tahun 2022. Telah dilaksanakan pula Pelatihan Aplikasi SIMDA NEXT-G atau FMIS bagi operator FMIS OPD lingkup Provinsi Gorontalo.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Outcome dari program adalah persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah.

1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga



Output Sub kegiatan : Jumlah Buku Standarisasi Harga yang disusun.

- Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Standar Harga Satuan dan Finalisasi RKBMD Tahun 2023.
- Tersedianya dokumen berupa Buku Standar Harga Satuan telah dicetak sebanyak 50 buah buku.

Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kebijakan yang diterbitkan. Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah serta Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah

Output Sub Kegiatan : Inventarisasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

- Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Aset di lingkungan Provinsi Gorontalo khususnya pada proses lelang atau penjualan kendaraan bermotor
- Telah dilaksanakan proses lelang kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan KPKNL Gorontalo sebagai tindaklanjut hasil sensus tahun 2021
- Tersedianya aplikasi digitalisasi asset sebagai salah satu inovasi Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dalam rangka pemetaan lokasi asset dan pengamanan asset.

#### 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Outcome dari Program adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

##### 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Output Sub Kegiatan :

- Jumlah Dokumen NJKB tahun berjalan yang disusun.
- Jumlah Dokumen NJKB tahun berjalan yang disusun.
- Terupdatenya NJKB dan pemutakhiran data kendaraan pada Aplikasi Samsat.
- Diterbitkannya dokumen NKJB Tahun 2022



- Telah dibukanya Kantor Bersama Samsat Pembantu Boliyohuto guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pelaksanaan rapat koordinasi pendapatan daerah.

- Pada proses lelang notice pajak, harga penawaran yang diajukan di bawah sehingga nilai realisasi untuk pengadaan Notice Pajak rendah.
- Terlaksananya rekonsiliasi Pemakaian SKKP dan TBPKP
- Atas hasil rekonsiliasi menghasilkan Dokumen Berita Acara Pemakaian SKP dan SKKP yang ada pada Bidang Pendapatan dan UPTD/Samsat se-Provinsi Gorontalo.
- Dokumen Laporan Hasil penyaluran karcis Retribusi ke SKPD (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo)
- Dokumen berupa potongan karcis Retribusi yang diserahkan ke SKPD (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo)

Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen objek pajak tahun berjalan yang disusun. Tidak terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dengan PT. Pertamina karena adanya penundaan jadwal rekonsiliasi yang menyebabkan berkurangnya serapan anggaran.

Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi samsat.

- Tersedianya dokumen capaian dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Keuangan dan DID.
- Tersedianya dokumen laporan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok ke Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Output Sub Kegiatan : Persentase target PKB dan BBNKB yang tercapai.

- Telah dilaksanakan pemungutan piutang pajak



kendaraan bermotor melalui door to door dan Razia kendaraan bermotor.

- Adapun untuk realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami kenaikan sebesar 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami penurunan sebesar 1,19% dari tahun sebelumnya.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

- Permasalahan :
1. Kegiatan terkait peningkatan terhadap mutu pelayanan administrasi terhadap wajib pajak perlu ditingkatkan.
  2. Penggunaan aplikasi belum terintegrasi untuk perencanaan, evaluasi dan monitoring.
  3. Masih membutuhkan komunikasi lebih intens antar pembuat aplikasi.

- Solusi :
1. Membutuhkan usaha lebih intens untuk integrasi seluruh aplikasi baik itu perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  2. Perlu penyamaan persepsi antar OPD tentang pentingnya aplikasi terkoneksi.

#### **b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Permasalahan :
1. Kesalahan penginputan rekening belanja pada Aplikasi SIPD dan FMIS masih sering terjadi
  2. Sumber daya manusia yang memahami operasional SIPD dan FMIS masih sering berganti tanpa regenerasi yang berkala.
  3. Penganggaran kegiatan yang relatif berubah dan tidak sesuai dengan perencanaan

- Solusi :
1. Pelatihan penggunaan aplikasi FMIS dan SIPD secara berkala.
  2. Sosialisasi secara berkala tentang penempatan rekening belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Penggantian personil harus melihat tugas yang dilaksanakan
  4. Penganggaran kegiatan harus lebih selektif dengan perencanaan dan memperhatikan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.



c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Permasalahan :
1. Pemahaman tentang prosedur dalam pengelolaan barang milik daerah perlu ditingkatkan.
  2. Pemahaman tentang penggunaan aplikasi Simda BMD perlu ditingkatkan
  3. Kesalahan penginputan rekening belanja modal pada Simda BMD masih sering terjadi.
  4. Belum adanya integrasi antara Simda BMD dengan FMIS terkait akumulasi penyusutan

- Solusi :
1. Pelatihan penggunaan aplikasi Simda BMD secara berkala
  2. Sosialisasi tentang mekanisme pengelolaan barang milik daerah
  3. Penggantian personil harus melihat tugas yang dilaksanakan.
  4. Adanya integrasi antar aplikasi yang compatible dan efisien.

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Permasalahan :
1. Penganggaran masih minim untuk mengejar target pendapatan asli daerah.
  2. Potensi PAD belum tereksplorasi secara optimal
  3. Belum adanya integrasi antara Aplikasi SIPAMOR dengan FMIS sehingga data realisasi untuk pendapatan harus diinput lagi ke FMIS

- Solusi :
1. Membutuhkan penambahan anggaran terkait target pendapatan asli daerah yang terus meningkat dan untuk meminimalkan pengaruh eksternal.
  2. Sosialisasi pentingnya keterlibatan masyarakat wajib pajak terhadap pembangunan idealnya dilakukan secara berkala dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi maupun trend ekonomi
  3. Dilakukan pengkajian mendalam untuk eksplorasi dan eksploitasi potensi PAD secara optimal
  4. Perlu dibangun komunikasi yang lebih intens dengan pengembang aplikasi



**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Badan Keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.170**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang  
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan Pendapatan daerah (Rp. Trilyun)	1.78	1.84	1.88	1.96
2	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Bidang Anggaran :

1. Penyusunan APBD tepat waktu dan berkualitas yang menjadi salah satu penilaian dalam mendapatkan alokasi DID (Dana Insetif Daerah) sebanyak 2 (dua) kali
2. Penyampaian Ranperda APBD 2023 beserta dokumen terkait lainnya kepada Kementerian Dalam Negeri RI kedua di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi SIPD
3. Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2022 beserta dokumen terkait lainnya kepada Kementerian Dalam Negeri RI pertama di seluruh Indonesia yang juga menggunakan aplikasi SIPD
4. Penganggaran Mandatory Spending terpenuhi, yakni penganggaran belanja daerah yang sudah diatur oleh Undang-undang. Tujuan Mandatory Spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan social dan ekonomi daerah, antara lain penganggaran Pendidikan, kesehatan serta belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
5. Penyempurnaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIMPDI) memungkinkan adanya transparansi dan kurangnya tumpang tindih penugasan sehingga berdampak pada efisiensi belanja perjalanan dinas.





Bidang Aset :

1. Setelah dilaksanakannya Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2021 dan penilaian bagi aset yang akan dijual/lelang. Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan KPKNL Gorontalo melaksanakan Kegiatan lelang kendaraan bermotor.
2. Dengan dilaksanakannya sensus BMD dan dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, penatausahaan baik aset maupun dokumen pengadaan serta status BMD mejadi lebih jelas dan tertata dengan baik.
3. Kegiatan pengelolaan RKBMD & RKPMBD ini didasari adanya temuan Itjen Kemendagri atas pengelolaan yang kurang optimal khususnya pada perencanaan kebutuhan BMD dan pemeliharaan BMD. Di tahun 2021 telah dilaksanakan RKBMD & RKPMBD untuk tahun anggaran 2022, sebagaimana ketentuan Permendagri untuk pelaksanaan penelaahan RKBMD & RKPMBD.

Bidang Perbendaharaan :

1. Regulasi yang mengatur tentang Kasda Online yang telah diterapkan ditahun 2021 dengan versi terbaru dimana ada beberapa fitur tambahan dalam hal verifikasi dokumen berupa NPWP yang sudah terkoneksi dengan pajak, karena Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku PPKD dan bertindak sebagai BUD mempunyai fungsi Maker, Checker, Approved karena sudah menerapkan Kasda Online maka beralih fungsi menjadi tugas dan tanggung jawab BUD sebagaimana telah diatur dalam PKS antara Pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pihak Perbankan.
2. Penyampaian laporan alokasi DAU tahun 2022 dilakukan tepat waktu yakni setiap tanggal 14 dibulan berjalan untuk alokasi DAU bulan berikutnya.
3. Pembayaran Potongan Pihak Ketiga (PFK) tidak melewati tahun anggaran karena secara otomatis sudah terintegrasi dengan Kasda Online.
4. Penyampaian SPJ dari setiap OPD mengalami kemajuan yakni tidak melewati batas waktu 30 hari.
5. Tidak ada lagi pemeriksaan/verifikasi dokumen fisik tagihan karena telah diberlakukan ketentuan sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 dimana OPD yang mengajukan tagihan hanya melampirkan SPM, SPTJM dan Surat Pernyataan Verifikasi dari OPD yang bersangkutan.



6. Dengan adanya Kasda Online, pelaksanaan rekonsiliasi dapat dilakukan secara periodik  
Bidang Pendapatan :

1. Telah dibukanya Kantor Samsat Pembantu Boliyohuto Kabupaten Gorontalo untuk memperlancar, mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
2. Telah dilaksanakan rekonsiliasi data transfer bagi hasil pajak daerah antara Bidang Pendapatan Provinsi Gorontalo dengan Bidang Pendapatan Kab./Kota dan Bidang Akuntansi Provinsi Gorontalo dengan Bidang Akuntansi Kab./Kota.
3. Berdasarkan Instruksi Presiden RI terkait Penerapan Samsat Online, Provinsi Gorontalo adalah salah satu Provinsi yang telah menggunakan Aplikasi Signal (Sistem Digital Nasional) dimana aplikasi ini adalah kelanjutan dari Sanmolnas dimana terdapat peningkatan fitur dan dan tingkat securitas dari aplikasi tersebut.
4. Guna peningkatan pendapatan daerah telah dilakukan kegiatan penagihan pajak secara Door to door dan Razia bersama pihak Kepolisian dan UPTD Samsat se-Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini sangat efektif dan besar pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan daerah

Bidang Akuntansi :

1. Telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
2. Telah diterbitkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

#### **6) Penghargaan nasional yang diterima Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Provinsi Tahun 2022**

- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Capaian WTP
- Terbaik Satu dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 oleh Kementerian Keuangan RI
- Terbaik ketiga dalam Tren Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

#### **7) Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2022**

- Telah dilakukan penandatanganan MOU/PKS antara Pemerintah Provinsi Gorontalo



dengan PT. Pertamina (persero) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengawasan pemakaian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Gorontalo.

- Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI terkait Implementasi Rencana Aksi Peserta Program Internship Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

### 3. Kepegawaian

#### 1) Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo

- Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

##### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.171**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<b>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengembangan ASN</b>	<b>Indikator Sasaran : Prosentase Pegawai yang Kompeten</b>	95%	95%	90%	92%	100%
	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase Pengembangan Aparatur	95	95	90	92	100
2	<b>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan dan Pembinaan ASN</b>	<b>Indikator Sasaran : Rasio Peningkatan Layanan Kesejahteraan</b>	95 3.100 Org	84 2.607 Org	90 3.100 Org	99.65 3.971 Org	88%
		<b>Presentase Pegawai yang mendapatkan reward dan punishment</b>	10	0	10	0	0
			20 25 Org	12.8 16 Org	20 25 Org	0	64%
	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur	95 3.100 Org	84 2.607 Org	90 3.100 Org	99.65 3.971 Org	88



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Sasaran : Meningkatkan Sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kepegawaian	Indikator Sasaran : Presentase Teknologi Informasi Kepegawaian yang terintegrasi	100	100	100	100	100%
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan layanan Manajemen PNS (skala 50% - 100%)	95	100	92	92	105%
4	Sasaran : Menurunnya Jumlah Pengaduan	Indikator Sasaran : Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100	100	100	100	100
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	100	100	100	100

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.172**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kepegawaian Fungsi Penunjang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1.836.276.616</b>	<b>1.785.857.881</b>	<b>97,25</b>	<b>100</b>	<b>98,46</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.493.181	375.409.743	99,98	100	99,99	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.657.396	100.070.964	99,42	100	99,80	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	100	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	851.596.445	844.841.862	99,21	900	98,98	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.529.594	465.535.312	91,55	100	96,56	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>2</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>4.208.057.340</b>	<b>3.863.892.310</b>	<b>91,82</b>	<b>100</b>	<b>99,48</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.587.848.873	1.570.602.298	98,91	100	99,48	100
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	2.262.066.527	1.940.369.312	85,78	100	77,42	100
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	198.219.941	194.408.577	98,08	100	97,33	100
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	159.921.999	158.512.123	99,12	100	99,76	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.044.333.956</b>	<b>5.649.750.191</b>	<b>93,47</b>	<b>100</b>	<b>93,47</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Presentase layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur;
  - Presentase Pelaksanaan perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan pelaporan.
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Output Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi. Target 6 dokumen dengan capaian 6 dokumen. Terdiri dari Dokumen RENJA, LPPD, LAKIP, LKPJ, RKA, IKPK, serta kegiatan rapat-rapat evaluasi program dan kegiatan.
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Output Kegiatan : Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan. Target 2 laporan dengan capaian 2 laporan. Terdiri dari Laporan semesteran dan Laporan Tahunan 1 dokumen.
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Output Kegiatan : Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek. Target 20 orang belum tercapai pada tahun 2022 dikarenakan belum terlaksana.  
Output Kegiatan : Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan khusus pengelolaan Assesment belum tercapai pada tahun 2022 dikarenakan belum terlaksana.
  - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Output Kegiatan : Jumlah pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana



perkantoraan (jumlah unit/paket), dengan target 6 unit/paket dan capaian 54 unit/paket. Terdiri dari :

- Pembayaran biaya belanja modal AC Split 4 Unit
- Pembayaran biaya belanja modal meja kerja pejabat 1 biro 1 Unit
- Pembayaran biaya belanja modal Komputer unit lainnya (All in One Core i3) 1 unit
- Pengadaan modal alat pemadam kebakaran 2 unit
- Pembayaran biaya belanja modal kursi kerja stainless 25 unit
- Pembayaran biaya belanja modal Komputer PC dan Laptop server 3 unit
- Pembayaran biaya belanja modal AC Standing 1 PK 7 unit
- Pembayaran biaya belanja modal AC Standing 3 PK 2 unit
- Pembayaran biaya belanja modal kursi kerja pejabat 6 unit
- Pembayaran biaya belanja modal Printer 3 unit.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output Kegiatan : Persentase layanan dan manajemen administrasi perkantoraan. Target 100% dengan capaian 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sifatnya rutin berupa pengadaan dan pembiayaan berbagai keperluan kesekretariatan Instansi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran dan administrasi. Seperti pembayaran listrik, air, telp, makan minum kegiatan, makan minum tamu, makan minum rapat dsb.

2. Program Kepegawaian Daerah

Outcome dari program adalah :

- Presentase Pengembangan Aparatur;
- Prosentase Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur;
- Indeks kepuasan layanan Manajemen PNS (skala 50% - 100%)

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Output Kegiatan : - Jumlah Calon Praja yang mengikuti seleksi penerimaan Praja IPDN. Target 400 orang dengan capaian 309 orang.



- Jumlah Anggota KORPRI yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spritual. Target 3.000 orang dengan capaian 911 orang. Terdiri dari yang mengikuti seleksi MTQ 33 orang, yang mengikuti MTQ tingkat Nasional 17 orang, dan Apel Korpri dalam rangka HUT Korpri sebanyak 861 orang.
- Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti dan tata upacara persemayaman. Target 175 orang dengan capaian 207 orang.
- Jumlah Layanan Manajemen PNS. Target 5 layanan dengan capaian 6 layanan. Dimana terdiri dari: Layanan Kenpa, KGB, Cuti, Tugas Belajar, Karya Satya dan Layanan Pensiun
- Jumlah arsip kepegawaian yang terpelihara. Target 6.000 arsip dengan capaian 15.966 arsip.

2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

- Output Kegiatan :
- Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan. Target 150 orang dengan capaian 209 orang.
  - Jumlah jabatan yang diisi melalui seleksi terbuka. Target 5 jabatan dengan capaian 33 jabatan.
  - Jumlah Laporan Jabatan JPT, Administrator, Pegawai dan Fungsional di Provinsi Gorontalo. Target 2 laporan dengan capaian 2 laporan.
  - Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun. Target 2.500 SK dengan capaian 1.197 SK. Terdiri dari :
    - Kenaikan pangkat bulan April 711 orang
    - Kenaikan pangkat bulan Oktober 370 orang
    - Data Pensiun terdiri dari: Pensiun BUP 102 orang, Pensiun janda/duda 9 orang, dan Pensiun Dini 5 orang.
  - Jumlah SK, Nota Usul, Pernyataan Persetujuan/Persetujuan, Surat Perintah penugasan dan Penetapan Pindah Mutasi antar Instansi, Mutasi antar



SKPD, Mutasi antar Kabupaten/Kota, Pengalihan CPNS PNS dan PNS DPK/DPB. Target 750 SK/Persetujuan dengan capaian 157 SK/Persetujuan. Terdiri dari :

- Mutasi keluar : 50 orang
- Mutasi antar kab./kota : 39 orang
- Mutasi masuk provinsi : 26 orang
- Mutasi antar SKPD : 18 orang
- Nota usul : 24 orang

3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Output Kegiatan : Jumlah Aparatur yang mendapatkan Bantuan Studi Tugas Belajar dan izin belajar. Target 38 orang dengan capaian 80 orang. Terdiri dari :

- Bantuan tugas belajar : 10 orang
- Bantuan studi IPDN Angkatan I : 16 orang
- Bantuan studi IPDN Angkatan II : 10 orang
- Bantuan studi IPDN Angkatan III : 18 orang
- Bantuan studi IPDN Angkatan IV : 26 orang

4) Kegiatan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Output Kegiatan : - Jumlah aparatur yang dilayani kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspem, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE, dan TKD. Target 3.100 orang dengan capaian 2.607 orang. Terdiri dari :

- Jumlah ASN yang berkala : 1.865 orang
- Karpeg : 5 orang
- Karsi/Karsu : 12 orang
- Satya Lencana : 557 orang
- Cuti : 168 orang
- Jumlah Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS. Target 25 orang dengan capaian 16 orang.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan : - Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan juga terhambat karena anggaran yang kurang.





- Jaringan internet yang sering bermasalah sehingga menghambat pekerjaan.
- Ketidakterediaan fasilitas aplikasi CAT dan Asesment Center sehingga pelaksanaan ujian dinas, Tes Asesment Penerimaan ASN, Penerimaan Calon Praja IPDN masih menggunakan fasilitas pihak ketiga.
- Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki Asesor Kompetensi yang akan melaksanakan Asesment bagi PNS Provinsi Gorontalo.
- Kurangnya dukungan perangkat komputer berupa Laptop bagi staf teknis yang memungkinkan mereka bekerja diluar kantor.
- Beberapa perangkat yang tersedia namun masih kurang efektif karena performa mesin yang sudah perlu ditingkatkan.

- Solusi :
- Perlu adanya penambahan anggaran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan karena kurangnya anggaran.
  - Perlu adanya pembangunan gedung yang representatif untuk fasilitas CAT sehingga beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah tidak lagi menggunakan tempat lain seperti Ujian Penerimaan ASN, Ujian Dinas, Seleksi Jabatan struktural.
  - Pengadaan laptop bagi staf teknis.
  - Pengadaan perbaikan dan suku cadang perangkat sesuai kebutuhan.

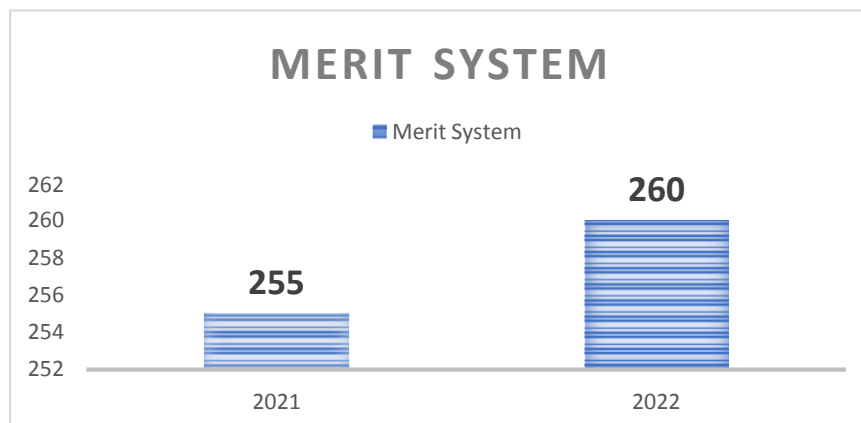
#### **4) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.



**Grafik 3.30**

Indeks Merit System Provinsi Gorontalo 2021-2022



Pada tahun 2022 nilai sistem merit mengalami peningkatan dari 255 menjadi 260. Untuk penjelasan terkait penilaian sistem merit dan aspek yang perlu didorong untuk peningkatan sistem merit dapat dilihat pada tabel Penilaian Sistem Merit sebagai berikut :

**Tabel 3.173**

Hasil Penilaian Aspek/Komponen Indeks Merit System

No	Aspek	Skor
1	Perencanaan Kebutuhan	37,5
2	Pengadaan	28
3	Pengembangan Karir	42,5
4	Promosi dan Mutasi	17,5
5	Manajemen Kinerja	65
6	Penggajian Penghargaan dan Disiplin	37,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	14
8	Sistem Informasi	18
	Hasil Penilaian Mandiri	292
	Hasil Verifikasi	260

### 5) Penghargaan nasional yang diterima Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo Provinsi Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan baik di tingkat nasional dan provinsi dengan



rincian sebagai berikut:

- ❖ Nasional :
  - Peringkat I Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian
  - Peringkat I Kategori Penilaian Kinerja
  - Peringkat III Kategori Implementasi Penilaian Kinerja
  - Peringkat IV Kategori Implementasi Pemanfaatan Data-Sistem Informasi & CAT
  - Special Mention – Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN
  - Penghargaan KASN atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
  - Penghargaan KASN atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021 pada tanggal 23 Januari 2022
- ❖ Provinsi :
  - Juara I Statistic Awards 2022 Kategori OPD Terbaik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
  - Penghargaan Pembinaan Statistik Sektoral.

#### 4. Pendidikan dan Pelatihan

##### 1) Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan yang akan dicapai Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo

- Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang Berkualitas

##### b. Sasaran dan Program

**Tabel 3.174**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	Sasaran : meningkatnya Profesionalisme aparatur sesuai	Indikator Sasaran : Indeks Profesionalitas ASN	70%	90%	60%	80.98%	129%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>kompetensi</b>						
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi manajerial	20.38% 126 Org	31% 196 Org	20.6% 125 Org	605.6% 757 Org	153%
		Persentase peserta yang memiliki sertifikasi kompetensi teknis, fungsional dan sociocultural	32.67% 330 Org	21% 221 Org	24.75% 250 Org	268.8% 672 Org	66.97%
2	<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Diklat</b>	<b>Indikator Sasaran : Nilai Akreditasi Lembaga Diklat (1=A, 2=B, 3=C)</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>100%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kapasitas Mutu dan Kerjasama kediklatan	100%	90%	100%	90%	90%
		Persentase Pengembangan Apikasi Sistem Informasi Kediklatan dan Jumlah dokumentasi karya tulis Ilmiah Kediklatan	100%	100%	100%	0%	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.175**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Penunjang  
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>12.515.704.481</b>	<b>12.114.548.119</b>	<b>96.79</b>	<b>100</b>	<b>76.10</b>	<b>98.57</b>
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.799.917	401.647.938	99,96	100	99,47	96.63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	401.799.917	401.647.938	99,96	100	99,47	96.63



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.720.934.446	8.563.270.580	98,19	100	70,17	99,93
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.395.209.029	8.239.024.000	98,14	100	69,92	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	325.725.417	324.246.580	99,55	100	98,71	92,18
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.730.000	83.075.000	96,90	100	39,75	41,72
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.730.000	83.075.000	96,90	100	39,75	41,72
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.004.143.556	1.857.921.526	92,70	100	93,08	93,04
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.004.143.556	1.857.921.526	92,70	100	93,08	93,04
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.096.562	1.208.633.075	92,75	100	94,80	99,91
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.303.096.562	1.208.633.075	92,75	100	94,80	99,91
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>4.161.876.383</b>	<b>4.052.887.157</b>	<b>97,38</b>	<b>100</b>	<b>98,45</b>	<b>99,26</b>
a.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	580.442.745	498.866.900	85,95	100	98,31	98,5
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100.479.930	99.361.928	98,89	100	100	95,02
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	479.962.815	399.504.972	83,24	100	98,04	99,06
b.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.581.433.638	3.554.020.257	99,23	100	98,49	99,49
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	340.479.986	339.881.636	99,82	100	99,73	97,96
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	99.998.368	99.992.452	99,99	100	99,98	100
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.140.955.284	3.114.146.169	99,15	100	98,27	99,65



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
		<b>16.677.580.864</b>	<b>16.167.435.276</b>	<b>96.94</b>	<b>100</b>	<b>80.07</b>	<b>98.92</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output : penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen perencanaan dimaksud terdiri dari Renstra, Renja, LKPJ, LPPD, dan LKIP, serta pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output : penyusunan dokumen laporan keuangan dalam bentuk SPJ dan LRA, serta pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output : jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya melalui diklat/bimtek. Pada tahun 2022, terdapat 8 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi, diantaranya 3 orang mengikuti pelatihan manajerial, 3 orang mengikuti pelatihan teknis, serta 2 orang mengikuti bimbingan teknis.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : 100% pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia. Adapun hasil dari pengadaan sarana prasarana pada tahun 2022 adalah pembangunan pagar, pos security, ruang makan peserta pelatihan, ruang fitness, lapangan olahraga, serta rehabilitasi gedung kantor.



5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : 100% pemenuhan jasa kantor yang tersedia tepat waktu. Adapun realisasi dari kegiatan ini mencapai 92,75%.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Outcome dari program adalah persentase peserta yang memiliki kompetensi teknis, fungsional, dan sosiokultural, persentase ASN yang memiliki sertifikasi, persentase peningkatan kapasitas mutu dan kerjasama kediklatan, serta persentase pengembangan aplikasi system informasi kediklatan dan jumlah dokumentasi karya tulis ilmiah kediklatan.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan : - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Output : jumlah dokumen AKD yang dihasilkan dan jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis. Pada pelaksanaan anggaran tahun 2022, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo melaksanakan 8 pelatihan teknis dengan total peserta sebanyak 221 orang yang merupakan ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun Pelatihan Pengelolaan Aset Angkatan II dilaksanakan dengan metode yang berbeda dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya, yaitu dengan Model Pembelajaran 10 : 20 : 70. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.176**  
Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi Teknis  
Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta			Waktu Pelaksanaan
		Lulus	Tidak Lulus	Total	
1	Pelatihan Pengelolaan Aset Angkatan I	30	-	30	2 s.d 4 Februari 2022
2	Pelatihan Menyusun Spesifikasi Teknik	22	2	24	7 s.d 10 Februari 2022
3	Pelatihan Menyusun Harga Perkiraan	22	2	24	14 s.d 17 Februari 2022
4	Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi	38	3	41	2 s.d 9 Juni 2022
5	Sertifikasi Calon Penyuluh Antikorupsi Jalur Pengalaman	6	-	6	7 s.d 8 Juni 2022
6	Sertifikasi Calon Penyuluh Antikorupsi Jalur Diklat	25	1	26	12 s.d 14 Juli 2022
7	Pelatihan Penyusunan Perencanaan Kontingensi di Provinsi Gorontalo Angkatan VII	30	-	30	1 s.d 5 Agustus 2022
8	Pelatihan Pengelolaan Aset Angkatan II	38	2	40	8 s.d 18 November 2022
<b>Total</b>				<b>221</b>	

1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan : - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar  
 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga  
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Output : • Jumlah Widyaiswara dan Fasilitator yang meningkat kapasitas dan kompetensinya;  
 • Jumlah Widyaiswara yang mengikuti orasi ilmiah;  
 • Jumlah Widyaiswara yang mengikuti diklat ke jenjang yang lebih tinggi;  
 • Jumlah kegiatan penjamin mutu pendukung akreditasi/reakreditasi;  
 • Persentase aplikasi sistem yang dibangun/dikembangkan;  
 • Jumlah perjanjian kerjasama penyelenggaraan diklat yang ditandatangani;  
 • Jumlah Pejabat Administrator yang memenuhi standar kompetensi jabatannya;  
 • Jumlah Pejabat Pengawas yang memenuhi standar kompetensi





jabatannya;

- Jumlah Calon ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional.

Dalam mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi, telah dibuat sebuah sistem yang memudahkan pengumpulan data peserta pelatihan yang dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai dengan menggunakan Sistem Informasi Pendaftaran Diklat (SILAT). Badan Pendidikan dan Pelatihan juga turut mengembangkan RUKO (Rumah Kompetensi) untuk mengoptimalkan penyusunan dokumen Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Selain itu, telah dirancang sebuah Learning Management System (LMS) untuk mengoptimalkan pelatihan teknis dengan metode pembelajaran 10 : 20 : 70.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan pengembangan kompetensi manajerial meliputi Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III sebanyak 3 gelombang yang terdiri dari 5 angkatan dengan peserta yang berasal dari Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 2 angkatan dengan peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Kota Kotamobagu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Adapun peserta yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi Gorontalo, mengikuti pengembangan kompetensi dengan turut membayar kontribusi pelatihan berdasarkan Pergub Gorontalo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo turut mengirim 3 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengikuti Pelatihan



Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I dan 1 orang Widyaiswara Ahli Utama untuk mengikuti Orasi Ilmiah di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Untuk lebih jelasnya, berikut keseluruhan pengembangan kompetensi manajerial yang telah dilaksanakan :

**Tabel 3.177**

Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Tahun 2022

No	Kegiatan	Angkatan	Waktu Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Dasar CPNS	Gol. II angkatan XVI	16 Mei s/d 16 Juli 2022	40
		gol. II Angk. XVIII & Gol III Angk. XLVIII	12 Juni s/d 11 Agustus 2022	63
		Gol. II angkatan XVII	19 Juni s/d 20 Agustus 2022	40
		GOL. III Angk. XLIX & L	3 Juli s/d 2 September 2022	73
		GOL III Angk. LI	10 Juli s/d 8 September 2022	42
		gol. II Angk. XIX & Gol III Angk. LII	17 Juli s/d 16 September 2022	49
		Gol. II Angk. XX	16 Oktober s/d 10 Desember 2022	40
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Angkatan I	28 Februari 2022 s/d 17 Juni 2022	40
		Angkatan II	15 Agustus 2022 s/d 2 Desember 2022	40
<b>Total Peserta</b>				<b>427</b>

Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, dilakukan perjanjian kerjasama serta Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan Instansi Pemerintah lainnya, baik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga. Selama Tahun 2022, terdapat perjanjian kerjasama dan MoU sebagai berikut :



**Tabel 3.178**

Perjanjian Kerjasama dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga selama Tahun 2022

No.	KEGIATAN	INSTANSI PEMERINTAH
1	Pelatihan Dasar CPNS	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Pemerintah Kabupaten Boalemo Pemerintah Kota Gorontalo Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Pemerintah Kabupaten Pohuwato
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Pemerintah Kabupaten Boalemo Pemerintah Kabupaten Pohuwato Pemerintah Kota Kotamobagu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
3.	Orientasi PPPK	BKKBN Perwakilan Provinsi Gorontalo

### 3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Terdapat permasalahan kecil yang dialami selama kegiatan dimaksud, yaitu pada capaian kinerja perangkat daerah yang belum dapat dipantau secara rinci dan optimal.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

Permasalahan yang dialami adalah tidak cukupnya anggaran yang tersedia untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN hingga akhir tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada APBD-P.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah

Anggaran yang tidak mampu memaksimalkan keikutsertaan seluruh pegawai dalam mengembangkan kompetensinya masing-masing, dikarenakan biaya



kontribusi pelatihan untuk satu orang yang tidak sedikit.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah cukup baik namun masih beberapa hal yang perlu dikembangkan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Penyediaan jasa dalam rangka menunjang urusan penunjang di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo sudah cukup baik.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis  
Tidak tercapainya target pelatihan yang dilaksanakan dengan sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil kontribusi Pemerintah Kab/Kota sehingga perlu dilakukan penyesuaian target PAD pada APBD-P. Adapun perubahan sistem akreditasi lembaga pelatihan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang merubah pola pelatihan dan sistem penyelenggaraan bagi lembaga pelatihan yang terakreditasi.
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional  
Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang menghasilkan PAD dari biaya kontribusi peserta berdampak pada kurang optimalnya proses perencanaan penganggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran di saat pelaksanaan anggaran sementara berlangsung. Sementara itu, belum terdapat kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pelatihan untuk jabatan fungsional penyeteraan sehingga menyulitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo dalam memenuhi hak pengembangan kompetensi manajerial bagi aparatur terkait.  
Adapun pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kesehatan yang dilakukan kepada Kementerian Kesehatan yang masih perlu dipelajari lebih lanjut terkait kategori-kategori penilaian yang ditentukan.

Solusi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Telah dilakukan pengembangan terhadap Sistem Informasi Terintegrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sister Mo'ela) yang mampu mengoptimalkan



evaluasi capaian kinerja perangkat daerah, adapun perolehan nilai SAKIP Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah sebesar 78,71 dimana pada tahun 2020 nilai yang diperoleh adalah sebesar 72,14.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah  
Berdasarkan permasalahan di atas, telah dilakukan penyesuaian anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah  
Dengan beragamnya model pengembangan kompetensi saat ini, seluruh ASN perlu mencari alternatif model pengembangan kompetensi yang tidak memerlukan biaya yang signifikan dan bahkan tidak memungut biaya sedikitpun. Sehingga sedikitnya anggaran yang tersedia tidak menjadi halangan bagi ASN untuk mengembangkan kompetensinya.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Telah dilakukan beberapa pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung, seperti lapangan olahraga, alat fitness, meja makan peserta pelatihan, komputer untuk uji kompetensi, meja kerja, pembangunan pagar dan rehabilitasi gedung kantor.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Untuk melanjutkan bahkan mengoptimalkan pengelolaan jasa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan, maka diperlukan peningkatan kinerja pada sub bagian umum dan kepegawaian di sekretariat.

## 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis  
Telah dilakukan penyesuaian target PAD sehingga seluruh kegiatan pelatihan teknis yang direncanakan bersumber dari kontribusi peserta telah dihapus. Adapun seluruh kegiatan yang bersumber dari DAU telah terlaksana dengan baik, Adapun pada Pelatihan Pengelolaan Aset Angkatan II dilakukan dengan metode pelatihan yang inovatif, yaitu Model Pembelajaran 10 : 20 : 70.
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.  
Terkait penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial yang menghasilkan PAD dari kontribusi peserta, telah dilakukan penyesuaian anggaran



oleh sub bagian perencanaan dan keuangan dengan sigap sehingga proses penyelenggaraan dapat lebih dioptimalkan. Adapun terkait pelatihan jabatan fungsional penyetaraan, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Instansi Pemerintah terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam mengoptimalkan penilaian akreditasi lembaga pelatihan Kesehatan, pihak Bidang Pengembangan Kediklatan selaku pengelola lembaga kediklatan dan Bidang Diklat Teknis dan Fungsional selaku penyelenggara pelatihan telah berkoordinasi dengan cukup baik sehingga penilaian akreditasi telah dioptimalkan.

**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Khusus Indikator Kinerja Tahun 2022**

**Tabel 3.179**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Penunjang  
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	70% 4162 Org	90% 5373 Org	60% 3567 Org	80.98% 4815 Org
2	Akreditasi Lembaga Diklat	A	A	B	A

Dengan tercapainya ke-dua target capaian kinerja di atas, diharapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo sebagai lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan semakin berkembang dari sisi pengelolaan kelembagaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo menargetkan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 adalah sebesar 70% dari total 5946 target ASN yang akan mengikuti pengembangan kompetensi hingga akhir periode RPJMD dan Renstra. Target ASN yang akan dipenuhi ini merupakan akumulasi tahunan dari seluruh ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kab/Kota, luar Provinsi Gorontalo maupun Instansi Vertikal. Dari target 70% ini, hingga tahun 2022 yang tercapai sebesar 90% atau sebanyak 5373 ASN. Terpenuhinya realisasi



tersebut disebabkan oleh banyaknya kegiatan diklat manajerial maupun teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN serta memenuhi hak pengembangan kompetensi bagi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Pemerintah lainnya.

Pada Tahun 2022, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo menerima pendapatan retribusi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 2.299.096.000 yang berasal dari Pelatihan Dasar Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan peserta dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Kota Kotamobagu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

#### **6) Penghargaan nasional yang diterima Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan tingkat nasional pada tahun 2022.

#### **7) Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan Gol. III Kabupaten Boalemon Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan Gol. III Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS GOI. II dan Gol. III Kota Gorontalo Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan Gol. III Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022.



- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKKBN Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Orientasi PPPK Tahun 2023.

## **5. Penelitian dan Pengembangan**

### **1) Tujuan dan Sasaran**

- a. Tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo**
  - Meningkatkan Mutu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah



**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.180**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
1	<b>Sasaran : Meningkatkan pemanfaatan hasil kegiatan Kelitbangan sebagai bahan Perencanaan pembangunan</b>	<b>Indikator Sasaran : Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam Perencanaan pembangunan</b>	100	100	100	98.20	100%
	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	100	100	100	98,20	100

**2) Program dan Kegiatan**

**Tabel 3.181**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penelitian dan Pengembangan Fungsi Penunjang Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	<b>1.620.152.302</b>	<b>1.592.728.916</b>	<b>98,31</b>	<b>100</b>	<b>98.20</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	650.661.367	633.438.484	97,35	100	98.65	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	650.661.367	633.438.484	97,35	100	98.65	100
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	406.921.657	405.275.492	99,60	100	98.90	100
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	361.260.420	359.618.992	99,55	100	98.14	100
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	45.661.237	45.656.500	99,99	100	-	-



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	295.661.416	293.008.390	99,10	100	95.71	100
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	151.815.900	151.038.890	99,49	100	90.08	100
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	84.525.316	82.711.600	97,85	100	98.56	100
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	59.320.200	59.257.900	99,89	100	-	-
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	266.907.862	261.006.550	97,79	100	97.57	100
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	193.902.760	192.624.650	99,34	100	98.09	100
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	73.005.102	68.381.900	93,67	100	96.89	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.620.152.302</b>	<b>1.592.728.916</b>	<b>98,31</b>	<b>100</b>	<b>98.20</b>	<b>100</b>

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Outcome dari program adalah Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti, target dan capaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Output Sub Kegiatan : - Mengumpulkan semua jenis hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh para peneliti;  
 - Menyusun dokumen data base kelitbangan;  
 - Pelaksanaan Forum Kelitbangan Prov dan Kab/Kota;  
 - Memberikan kesimpulan dan saran tentang data kelitbangan yang tervalidasi.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

Output Sub Kegiatan : - Mengidentifikasi potensi Cultural Diversity yang belum



tercatat pada penelitian sebelumnya;

- Memberikan rekomendasi akhir hasil penelitian dalam bentuk Policy Brief.

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

- Output Sub Kegiatan :
- Penyusunan Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Geopark;
  - Menyempurnakan dokumen Geopark aspek Cultural Diversity;
  - Memberikan rekomendasi akhir hasil penelitian dalam bentuk Policy Brief.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.

- Output Sub Kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
  - FGD Rapat Persiapan, Seminar Proposal, Seminar Antara, Seminar Akhir Kajian Pertanian;
  - Kajian Berorientasi Bidang Pengembangan Pertanian dan Pedesaan;
  - Laporan kegiatan memuat tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

- Output Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Kegiatan Geopark;
  - Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Geopark;
  - Rekomendasi penggunaannya dalam perencanaan kebijakan terkait.

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.

- Output Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Kegiatan Pembuatan Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark;
  - Rapat persiapan untuk Pembuatan Produk Teknologi



- Informasi untuk Pengembangan Geopark;
- Laporan Pembuatan Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark Gorontalo.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.

Output Sub Kegiatan : Laporan Pelaksanaan Diseminasi serta Kegiatan Innovative Government Award Tingkat Provinsi Gorontalo.

Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Output Sub Kegiatan : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Kelitbangan.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022.

**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Khusus Indikator Kinerja Tahun 2022**

**Tabel 3.182**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan Fungsi Penunjang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	98,20%

**6. Penghubung**

**1) Tujuan dan Sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Badan Penghubung Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas



**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.183**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
<b>1</b>	<b>Sasaran : Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas</b>	<b>Indikator Sasaran : Akuntabilitas Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>99.00</b>	<b>100</b>	<b>96.86</b>	<b>99.00%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	100	99.00	100	100	99.00%
		Meningkatnya kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan Pelaporan	100	99.00	100	100	99.00%
<b>2</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan Kualitas pelayanan kedinasan Stakeholder</b>	<b>Indikator Sasaran : Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>99.00</b>	<b>100</b>	<b>98.35</b>	<b>99.00%</b>
	Program Pemerintahan dan Otonomi daerah	Meningkatnya layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di luar dan dalam daerah	100	99.00	100	98.35	99.00%
<b>3</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan peran badan penghubung dalam menunjang promosi dan pembangunan daerah</b>	<b>Indikator Sasaran : Jumlah kegiatan dukungan promosi dan pembangunan daerah</b>	<b>100</b>	<b>99.00</b>	<b>100</b>	<b>89.56</b>	<b>99.00%</b>
	Program Penataan Organisasi	Persentase Kerjasama Dengan Beberapa Lembaga melalui Promosi dan Penyebaran Luasan Informasi	100	99.00	100	89.56	99.00%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.184**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penghubung Fungsi Penunjang  
Badan Penghubung Provinsi Gorontalo  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>7.753.197.716</b>	<b>7.452.168.715</b>	<b>96.12</b>	<b>96.14</b>	<b>96.86</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.085.539.973	4.824.804.796	95.50	100	96.84	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.105.198.358	2.876.937.702	93.00	100	98.76	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.980.341.615	1.947.869.094	98.36	98.42	93.85	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	100	100
	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	1.984.615.743	1.968.363.838	99.50	100	98.31	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.556.665.651	1.541.304.500	99.00	100	98.83	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	427.950.092	427.059.338	100	100	96.64	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.042.000	659.000.081	96.00	100	94.74	100
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	683.042.000	659.000.081	96.00	100	94.74	100
<b>2</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>714.279.834</b>	<b>707.368.572</b>	<b>99.00</b>	<b>100</b>	<b>89.56</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	714.279.834	707.368.572	99.00	100	89.56	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	714.279.834	707.368.572	99.00	100	89.56	100
<b>3</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>1.244.798.215</b>	<b>1.230.339.145</b>	<b>99.00</b>	<b>100</b>	<b>98.35</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.244.798.215	1.230.339.145	99.00	100	98.35	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.244.798.215	1.230.339.145	99.00	100	98.35	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.712.275.765</b>	<b>9.389.876.432</b>	<b>96.68</b>	<b>100</b>	<b>96.56</b>	<b>100</b>



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah meningkatnya kualitas manajemen administrasi dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan : meliputi Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional PNS, Tunjangan Beras PNS, dan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dengan capaian sebesar 93.00%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Output Sub Kegiatan : kegiatan rutin kantor yang meliputi Belanja Bahan Gas, ATK, Belanja Bahan Cetak, Alat listrik, Bahan pakai lainnya, MMR dan MMT, Belanja jasa tenaga pelayanan umum, jasa transaksi keuangan, jasa/jalan tol, tagihan telepon, tagihan listrik, paket pengiriman, asuransi BMD, iuran kebersihan, PBB knator dan alat kebersihan, dengan capaian sebesar 98.00%.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output Sub Kegiatan : jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 0,- setelah perubahan dengan Rincian Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- presentase 0%.

2) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan; Jumlah Penyelenggaraan Rapat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.556.665.651,- yang meliputi belanja BBM dan Pelumas, Sewa Sarana Mobilitas Darat, Sewa Bangunan Gedung Kantor, Sewa Rumah Dinas



Kepala Kantor, Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya, Belanja Modal Personal Komputer dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.541.304.500,- presentase 99,00 %.

Sub Kegiatan :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 Output Sub Kegiatan :jumlah laporan pelaksanaan Rapat dan Konsultasi keluar daerah, dengan Pagu Anggaran Rp. 427.950.092,- dengan Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota serta dana untuk kegiatan G20 oleh bidan promosi dan informasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 427.059.338,- presentase 100%.

3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Output Sub Kegiatan :jumlah penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah, dengan Pagu Anggaran Rp. 683.042.000,- dengan rincian Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Jasa Service, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 659.000.081,- presentase 96,00%.

2. Program Penataan Organisasi

Outcome dari program adalah Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/bimtek.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sub Kegiatan :Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

Output Sub Kegiatan :Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal dengan Pagu





Anggaran Rp. 714.279.834,- yang meliputi rincian Belanja Bahan Cetak, Cenderamata/Souvenir, Belanja Jasa Pungutan Pajak/Iuran, Belanja MMR dan MMT, Belanja Pakaian Dinas Lapangan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Sewa Mobilitas Darat Roda 4, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 707.368.572,- presentase 99,00%

### 3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Outcome dari program adalah Persentase Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.

#### a. Pelaksanaan Program

##### 1) Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sub Kegiatan :Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Output Sub Kegiatan :Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan pagu Anggaran Rp. 1.244.798.215,- berdasarkan rincian belanja BBM dan Pelumas, Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja ATK, Bahan Cetak, Materai, Catridge, Alat Listrik, Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, MMR dan MMT, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Jalan/Tol, Tagihan Telepon, Tagihan Listrik, Langganan Surat Kabar/majalah, Paket Pengiriman, Jasa Pembayaran PNBPN, Sewa Mobilitas Darat, Sewa Bangunan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang, Beban Pajak Kendaraan bermotor, Jasa Service, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Modal Kursi Tamu, dan Belanja Modal Personal Komputer. Serta ada tambahan anggaran untuk Badan Penghubung Manado yang anggarannya masih melekat di Subbid Badan Penghubung Makassar dengan realisasi Rp. 1.230.339.145,- presentase 99,00%.



**3) Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada Permasalahan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan ditahun 2022.

**4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan Renstra Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Khusus Indikator Kinerja Tahun 2022**

**Tabel 3.186**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penghubung Fungsi Penunjang Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan serta penyediaan Gaji ASN	100%	96.86%	100%	97.00%
2	Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek	100%	89.56%	100%	99.00%
3	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100%	98.35%	100%	99.00%

**IV. Urusan Pengawasan**

**1. Inspektorat Daerah**

**1) Tujuan dan sasaran**

**a. Tujuan yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo**

- Mewujudkan APIP yang mampu memberikan jaminan secara keseluruhan atas pengendalian interen
- Terselenggaranya pengendalian intern yang berkualitas

**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.187**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sasaran : Meningkatkan Pengelolaan SDM Yang Profesional	Indikator Sasaran : Presentase Pegawai Bersertifikat yang Ditetapkan dalam jabatan Fungsional Auditor/Pengawas	100%	100%	84.71%	100%	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Presentase Auditor/Pengawas yang bersertifikat Profesi Pengawasan	15%	7.6%	14%	1.39%	50.66%
		Presentase Auditor yang memiliki sertifikat keahlian audit manajemen risiko	29%	36.47%	24%	5.8%	125.75%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang berkualitas	Indikator Sasaran : Presentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan hasil pemeriksaan Lembaga Eksternal	75%	68.30%	70%	70.94%	91.06%
		Laporan Kinerja	Baik	Baik	Baik	Baik	100%
		Laporan Keuangan	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	100%
		Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan Audit Internal Berbasis Risiko	Hasil Telaah Sejawat Kategori Baik	Hasil Telaah Sejawat Kategori Baik	Hasil Telaah Sejawat Kategori Baik	Hasil Telaah Sejawat Kategori Baik	100%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja OPD, Kategori BB	32 OPD	27 OPD	25 OPD	20 OPD	85.38%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan Pelaporan	11	11	11	11	100%
3	Sasaran : Meningkatkan peran APIP terhadap efektivitas Pengendalian intern pemerintah	Indikator Sasaran : Jumlah SKPD dengan Maturitas SPIP Level 3	25	25	25	25	100%
		Tingkat Penyimpangan Pengelolaan keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahap Penuntutan oleh APH)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100%
4	Sasaran : Terselenggaranya Identifikasi Analisis dan Rancangan Penanganan Risiko	Indikator Sasaran : Persentase SKPD yang memiliki dokumen penilaian risiko yang memuat rencana penanganan risiko	100%	100%	78%	100%	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kasus Korupsi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100%

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.188**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pengawasan  
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>17.531.731.158</b>	<b>16.833.379.446</b>	<b>96.02</b>	<b>100</b>	<b>88.31</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.298.870	772.610.303	94.42	100	97.25	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	818.298.870	772.610.303	94.42	100	97.25	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.525.897.834	1.500.417.606	98.33	100	97.75	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.525.897.834	1.500.417.606	98.33	100	97.75	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	672.975.123	611.082.233	90.80	100	92.32	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	672.975.123	611.082.233	90.80	100	92.32	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.940.730	226.544.722	99.39	100	99.25	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.308.000	155.875.612	99.72	100	99.97	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.632.730	70.669.110	98.65	100	98.03	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.286.618.601	13.722.724.582	96.05	100	86.98	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.211.608.522	13.647.871.294	96.03	100	86.92	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	75.010.079	74.853.288	99.79	100	99.87	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Semesteran SKPD						
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>2.754.231.258</b>	<b>2.743.908.026</b>	<b>99.63</b>	<b>100</b>	<b>99.49</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.421.517.772	2.414.018.043	99.69	100	99.66	100
	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	413.600.000	413.579.017	99.99	100	100	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	536.610.079	536.063.955	99.90	100	99.93	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174.999.684	173.809.520	99.32	100	98.90	100
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	450.660.515	447.076.102	99.20	100	99.15	100
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	560.812.025	558.873.937	99.65	100	98.90	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	284.835.469	284.615.512	99.92	100	99.83	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	332.713.486	329.889.983	99.15	100	97.67	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	332.713.486	329.889.983	99.15	100	97.67	100
<b>3</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>860.686.734</b>	<b>842.819.042</b>	<b>97.01</b>	<b>100</b>	<b>97.87</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	732.983.447	720.666.017	98.54	100	97.63	100
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	407.878.663	399.257.659	97.89	100	97.09	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	165.116.896	162.364.278	98.33	100	96.81	100
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	159.987.888	159.044.080	99.41	100	99.87	100
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	127.703.287	122.153.025	95.65	100	99.35	100
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	127.703.287	122.153.025	95.65	100	99.35	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.146.649.150</b>	<b>20.420.106.514</b>	<b>96,56</b>	<b>100</b>	<b>90.25</b>	<b>100</b>



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah :

- Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur sebesar 100 %.
- Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : tersedianya 100% layanan dan manajemen administrasi perkantoran.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : tersedianya 100 % pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output Sub Kegiatan : jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat, Bimtek, dan Workshop sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

4) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan : 1 (satu) dokumen perencanaan, penugasan berbasis risiko.

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan : 8 (delapan) dokumen perencanaan dan evaluasi.

5) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan : pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 12 (dua belas) bulan.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan



Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Output Sub Kegiatan : 2 (dua) dokumen laporan keuangan

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Outcome dari program adalah 27 (dua puluh tujuh) OPD yang memiliki Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Kategori BB.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal

Output Sub Kegiatan : 12 (dua belas) Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan dalam rangka sinergitas Pengawasan tingkat Provinsi, Regional dan Nasional.

Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Output Sub Kegiatan : 33 (tiga puluh tiga) Laporan Hasil Opname Kas, 25 (dua puluh empat) Laporan Hasil Probitas Audit, 4 (empat) Laporan Hasil Audit Kinerja.

Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Output Sub Kegiatan : 18 (Delapan Belas) Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS.

Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja

Output Sub Kegiatan : 1 (satu) Laporan Hasil Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD), 1 (satu) Laporan Hasil Reviu RKPDP, 32 (tiga puluh dua) Laporan Hasil Reviu Renstra, 32 (tiga puluh dua) Laporan Hasil Reviu Renja, 32 (tiga puluh dua) Laporan Hasil Reviu RKA, 1 (satu) Laporan Hasil Reviu LKPD, 1 (satu) Laporan Hasil Reviu LPPD Provinsi, 32 (tiga puluh dua) Laporan Hasil Reviu LAKIP SOPD, 1 (satu) Laporan Hasil Reviu LAKIP Provinsi, 1 (satu) Laporan Hasil Reviu KUA PPAS, 8 (delapan) Laporan Hasil Reviu Dana DAK.

Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.



Output Sub Kegiatan : - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.  
 - Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP s/d tahun berjalan sebesar 87,55%.

Sub Kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota  
 Output Sub Kegiatan : 6 (enam) Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten/Kota, 6 (enam) Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 6 (enam) Laporan Hasil Monev Dana Desa.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu  
 Output Sub Kegiatan : 12 (dua belas) Laporan Pengaduan (kasus) yang ditindaklanjuti melalui Pemeriksaan Khusus.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Outcome dari program adalah tidak adanya (nihil) jumlah kasus korupsi.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas  
 Output Sub Kegiatan : 1 (satu) Laporan Hasil Edukasi Publik dan Inspeksi Berkala.  
 Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  
 Output Sub Kegiatan : 1 (satu) Dokumen RAD PPK, 1 (satu) Laporan Hasil Monitoring Laporan Gratifikasi, 1 (satu) Laporan Verifikasi LHKS/N/LHKPN.  
 Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.  
 Output Sub Kegiatan : 1 (satu) Laporan Monev Reformasi Birokrasi, 1 (satu) Laporan Penilaian Zona Integritas





2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan.

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Output Sub Kegiatan : 32 (tiga puluh dua) SKPD di Provinsi Gorontalo yang menerapkan SPIP pada level berkembang.

**3) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi setiap program tidak ada.

**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.189**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah kasus korupsi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja OPD, kategori BB	32 OPD	27 OPD	25 OPD	20 OPD

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Berdasarkan penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah 82,51% dengan rincian indikator sebagai berikut :



**Tabel 3.190**

Indikator dan Komponen MCP – KPK Provinsi Gorontalo Tahun 2021

<b>Indikator</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Perencanaan dan Penganggaran APBD	73,64	92,09
Pengadaan Barang dan Jasa	86,66	82,86
Perizinan	82,46	99,08
Pengawasan APIP	83,86	77,48
Manajemen ASN	78,37	63,16
Optimalisasi Pajak Daerah	69,75	73,89
Pengelolaan BMD	69,73	85,09
<b>Rata-rata MCP Provinsi Gorontalo</b>	<b>89,72</b>	<b>82,51</b>

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan kualitas penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP berada pada Level 3 (Terdefinisi).

## **V. Urusan Pemerintahan Umum**

### **1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo**

#### **1) Tujuan dan Sasaran**

##### **a. Tujuan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo**

- Meningkatkan pemahaman politik, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, ideologi pembauran kebangsaan, ketahanan sosial dan ekonomi.



**b. Sasaran dan Program**

**Tabel 3.191**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
<b>1</b>	<b>Sasaran : meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan</b>	<b>Indikator Sasaran : Presentase peningkatan pemahaman wasbang, ideologi dan pembauran kebangsaan</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96.66</b>	<b>100</b>
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase Capaian Penguatan Wasbang dan Cinta Tanah Air	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses demokrasi</b>	<b>Indikator Sasaran : Presentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada</b>	<b>82</b>	<b>86.48</b>	<b>82</b>	<b>86.48</b>	<b>105.46</b>
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase angka partisipasi politik masyarakat	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>Sasaran : Terwujudnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif</b>	<b>Indikator Sasaran : presentase potensi konflik yang diselesaikan capaian rencana aksi penanganan konflik sosial meningkatnya peran LSM dan Ormas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			<b>90</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
			<b>60</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>101.66</b>
	Program Peningkatan	Persentase potensi konflik yang	100	100	100	100	100



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2022		Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase Capaian Tahun 2022 (%) (8=5/4*100)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
	Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	terdeteksi dan tertangani secara terpadu					
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase partisipasi ketahanan sosial dan budaya masyarakat	100	100	100	100	100
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase capaian penguatan ketahanan ekonomi	100	100	100	100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100	100	100	100	100

Penjelasan Capaian Pada Sasaran dan Program

1. Sasaran : meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan. Dalam sasaran ini target sesuai renstra 95 sedangkan realisasi 92.5 dan capaian 102.77.
2. Sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses demokrasi ini merupakan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah, yang terurai dari data Komisi Pemilihan Umum dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.
3. Sasaran : Terwujudnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif, sasaran ini dicapai oleh 3 program dan 12 kegiatan yang tersebar di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dengan indikator sebagai berikut :

- a. Presentase potensi konflik yang diselesaikan yakni konflik yang terdeteksi dan terselesaikan.
- b. Skor rencana aksi penanganan konflik sosial yang hasil akhirnya B12 masih menunggu penilaian dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Kemendagri.
- c. Meningkatnya peran LSM dan Ormas yakni jumlah LSM/Ormas yang diberi penguatan dibagi jumlah LSM/Ormas yang aktif  $30/49 \times 100\% = 61,22$   
 $39/47 \times 100\% = 82,97$ .

## 2) Program dan Kegiatan

**Tabel 3.192**

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Umum

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
			<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>4.848.092.036</b>	<b>4.593.442.941</b>	<b>94.75</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191.691.920	191.594.820	99.95	100	99.74	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.691.920	191.594.820	99.95	100	99.74	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.765.628.598	3.520.766.170	93.50	100	98.96	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.655.277.304	3.410.474.138	93.30	100	98.95	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	110.351.294	110.292.032	99.95	100	99.35	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.918.000	48.443.689	99.03	100	-	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	48.918.000	48.443.689	99.03	100	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.533.105	298.994.835	98.83	100	96.70	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302.533.105	298.994.835	98.83	100	96.70	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.320.413	533.643.427	98.95	100	95.70	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	539.320.413	533.643.427	98.95	100	95.70	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
	Kantor						
<b>2</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>251.378.191</b>	<b>249.283.316</b>	<b>99.17</b>	<b>100</b>	<b>96.26</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	251.378.191	249.283.316	99.17	100	96.26	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	251.378.191	249.283.316	99.17	100	96.26	100
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>2.422.542.579</b>	<b>2.418.729.598</b>	<b>99.84</b>	<b>100</b>	<b>99.74</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	2.422.542.579	2.418.729.598	99.84	100	99.74	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.401.715.747	1.398.882.169	99.80	100	99.98	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	244.094.825	243.949.831	99.94	100	99.99	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	776.732.007	775.897.598	99.89	100	99.17	100
<b>4</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>2.132.876.970</b>	<b>2.131.670.077</b>	<b>99.94</b>	<b>100</b>	<b>96.76</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.132.876.970	2.131.670.077	99.94	100	96.76	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	2.132.876.970	2.131.670.077	99.94	100	96.76	100
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan budaya</b>	<b>855.993.885</b>	<b>855.456.702</b>	<b>99.94</b>	<b>100</b>	<b>99.50</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	855.993.885	855.456.702	99.94	100	99.50	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	462.490.053	462.309.811	99.96	100	99.99	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	366.239.847	366.002.867	99.94	100	99.08	100



No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27.263.985	27.144.024	99.56	100	99.24	100
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>9.660.905.215</b>	<b>9.654.413.500</b>	<b>99.93</b>	<b>100</b>	<b>99.65</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	9.660.905.215	9.654.413.500	99.93	100	99.65	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	300.439.011	297.895.463	99.15	100	96.36	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	126.286.526	124.899.731	98.90	100	99.59	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	41.359.381	39.911.206	96.50	100	97.32	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan	8.403.540.411	8.403.354.252	100	100	99.90	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	
			Anggaran	Keu	Fisik	Keu	Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di daerah.						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	789.279.886	788.352.848	99.88	100	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.171.788.876</b>	<b>19.902.996.134</b>	<b>98.67</b>	<b>100</b>	<b>99.19</b>	<b>100</b>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur serta perencanaan moneyv dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Output Sub Kegiatan : 4 (empat) jumlah dokumen perencanaan, 4 (empat) jumlah dokumen evaluasi Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat B.

2) Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan : penyediaan gaji dan tunjangan ASN lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang dilakukan pembayaran setiap bulan.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Output Sub Kegiatan : Jumlah laporan keuangan serta persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan.

3) Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.

Output Sub Kegiatan : jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. Dalam rencana kerja 2022 ditargetkan 8 orang yang mengikuti diklat dan yang terealisasi 9 orang yang terdiri dari diklat perencanaan



keuangan 5 orang, kearsipan 1 orang, pelatihan intelijen 1 orang dan kepegawaian 2 orang.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : persentase ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran yakni berupa pemeliharaan, operasional dan pengadaan barang dan jasa kantor.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran selama 12 bulan, sebagaimana dalam target 8 jasa dan terealisasi 8 jasa meliputi belanja barang dan jasa.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Outcome dari program adalah Persentase partisipasi politik masyarakat.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah masyarakat yang diberikan pemahaman politik melalui tatap muka yakni 210 orang, dalam pelaksanaan kegiatan ini yang menjadi sasaran yakni unsur Partai Politik, Unsur Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

Selain itu dalam pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyaluran bantuan keuangan partai politik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 321/31/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Rincian Besaran Bantuan Keuangan Bagi Masing-masing Partai



Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 Berdasarkan Jumlah Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu 2019. Adapun 10 Partai Politik yang menerima bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

**Tabel 3.193**  
Daftar Partai dan Perolehan Suara Hasil Pemilu  
Tahun 2019-2024

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARAH SAH</b>	<b>BESARAN BANTUAN PER SUARA</b>	<b>KET</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	14.214	1.643	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	55.306	1.643	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	90.847	1.643	
4	Partai Golongan Karya	140.292	1.643	
5	Partai Nasional Demokrat	74.350	1.643	
6	Partai Keadilan Sejahtera	53.441	1.643	
7	Partai Persatuan Pembangunan	74.961	1.643	
8	Partai Amanat Nasional	62.898	1.643	
9	Partai Hati Nurani Rakyat	36939	1.643	
10	Partai Demokrat	49.298	1.643	

Dalam penyaluran bantuan keuangan partai politik ini dilakukan verifikasi oleh tim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 114/31/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022. Tim verifikasi ini terdiri dari :

1. Ketua - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo
2. Sekretaris - Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
3. Anggota tim ada 4 yakni :
  - Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo
  - Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo



- Inspektur Wilayah I Inspektorat Provinsi Gorontalo
  - Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
4. Tim Sekretariat :
- Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik (Ketua)
  - Analis Kebijakan Ahli Muda (Sekretaris)
  - Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik.

Verifikasi ini bertujuan agar terlaksananya kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah dokumen yang dihasilkan dari rapat tim pengkaji dan tim internal terkait perkembangan situasi politik di Provinsi Gorontalo. Sesuai target yang direncanakan 6 dokumen telah terealisasi melalui hasil dalam rapat pembahasan tim pengkaji.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah pelaksanaan monitoring terkait dengan perkembangan situasi politik di Provinsi Gorontalo.

### 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Outcome dari program adalah Persentase Potensi Konflik yang terdeteksi dan tertangani secara terpadu. Berdasar hasil pemetaan pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

#### a. Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan



Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Output Sub Kegiatan : - jumlah rapat yang dilaksanakan sesuai target yang dilaksanakan yakni 2 (dua) kali pelaksanaan rapat koordinasi, berikut pelaksanaan :

- Rapat Koordinasi Kerjasama Intelijen Daerah hari Senin 23 Mei 2022 dengan agenda membahas perkembangan dinamika situasi keamanan dan politik di Provinsi Gorontalo di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo;
- Rapat Koordinasi Kerjasama Intelijen Daerah hari Selasa 6 Desember 2022 dengan agenda membahas kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam menghadapi Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 di Provinsi Gorontalo di RM. Grande Bistro Kota Gorontalo.

- jumlah dokumen hasil capaian rencana aksi penanganan konflik sosial yang dihimpun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo serta instansi vertikal selanjutnya dievaluasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS), dokumen dimaksud yakni 3 (tiga) dokumen rencana aksi yaitu :

- Dokumen data dukung B.04 (Jan-April)
- Dokumen data dukung B.08 (Mei-Agustus)
- Dokumen data dukung B.12 (Sept-Des)

Untuk B.12 tahun 2022 sampai dengan saat ini belum dipublikasi oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Kementerian Dalam Negeri. Berikut capaian data evaluasi renaksi :



<b>PERINGKAT TAHUN 2021</b>	<b>PERINGKAT TAHUN 2022</b>
Evaluasi B.12 : 32	Evaluasi B.12 : -

Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah rapat dan dokumen terkait pendataan dan pengawasan orang asing, terlaksananya kegiatan rapat koordinasi yakni 1 (satu) kali dan 1 (satu) dokumen. Dalam rapat koordinasi dengan agenda pemantauan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis 13 Oktober 2022 menghadirkan pemateri Kabinda dan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah rapat forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda 1 (satu) kali untuk menyamakan persepsi dalam penanganan kewaspadaan dini di Provinsi Gorontalo.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah peserta kegiatan, sebagaimana ditargetkan jumlah peserta kegiatan sebanyak 100 orang dalam rangka cegah dini potensi konflik yang terjadi di Wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini terdapat



penyaluran dana hibah kepada Pemerintah Pusat yakni Komando Resor Militer 133/NWB sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 5/31/I/2022 tentang penerima hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Pusat yang bersumber dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Output Sub Kegiatan : jumlah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, terlaksananya kegiatan rapat ini dalam tahun anggaran 2022 sebanyak 15 (lima belas) kali dari target 6 kali pelaksanaan rapat sesuai perjanjian kinerja. Pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo untuk memastikan situasi senantiasa aman dan nyaman bagi keberlangsungan pembangunan daerah, adapun pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) hari Selasa 4 Januari 2022 dalam rangka Silaturahmi Gubernur Sulawesi Utara dan Pangdam XIII/Merdeka di Kota Manado.
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) hari Rabu 17 Januari 2022 bertempat di Aula Kusno Danupoyo Makorem 133/NWB dalam rangka percepatan vaksinasi Covid 19 dan stabilitas keamanan di Provinsi Gorontalo.
3. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas hari Minggu 23 Januari 2022 membahas beasiswa bagi mahasiswa Gorontalo dan persoalan asrama mahasiswa Bandung di Hotel Interkontinental Dago Bandung Provinsi Jawa Barat.
4. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas hari Minggu 6 Februari 2022 membahas peninjauan pelaksanaan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat usia 6-11 tahun bertempat di Pendopo Villa



- Kencana Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
5. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas hari Senin 14 Maret 2022 isu kelangkaan minyak goreng menghadapi bulan suci ramadhan sampai lebaran dan ketersediaan BBM jenis Solar bagi nelayan dan petani.
  6. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas hari Jumat 10 Juni 2022 dalam rangka tindaklanjut arahan Presiden tentang lanjutan vaksinasi bertempat Ruang Rapat Makorem 133/NWB.
  7. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas hari Kamis 7 Juli 2022 membahas penanggulangan KLB Difteri dan penyakit PD31, percepatan vaksinasi covid 19 dan optimalisasi bulan imunisasi anak nasional yang bertempat di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo.
  8. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas bertempat di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo Jumat 15 Juli 2022 membahas persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
  9. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas hari Kamis 23 September 2022 dengan agenda persiapan pembentukan posko miras di wilayah perbatasan dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi covid 19 bertempat di Hotel Peninsula Kota Manado.
  10. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) hari Jumat 14 Oktober 2022 dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di aula rumah jabatan Wakil Gubernur.
  11. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas hari Senin 7 November 2022 membahas sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di





Gedung GPCC Kota Gorontalo.

12. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diperluas hari Kamis 22 Desember 2022 bertempat di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo dalam rangka persiapan pengamanan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
13. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) hari Sabtu 24 Desember 2022 bertempat di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo dalam rangka peninjauan tempat-tempat peribadatan Natal Tahun 2022.
14. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) hari Jumat 31 Desember 2022 bertempat Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo dalam rangka monitoring situasi dan kondisi keamanan pada malam tahun baru 2022.

#### 4. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Outcome dari program adalah Persentase Capaian Penguatan Wawasan Kebangsaan. Berdasar hasil pemetaan pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

##### a. Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

Output Sub Kegiatan : jumlah peserta sosialisasi yang dilakukan bertatap muka dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi pelajar SMA/SMK sederajat, mahasiswa, Ormas dan masyarakat. Selain itu kegiatan ini dirangkaikan dengan pencanangan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih kepada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja bahwa target 50 orang peserta dan realisasi sebanyak 100 orang.



5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Outcome dari program adalah Persentase Partisipan Ketahanan sosial dan Budaya Masyarakat. Berdasar hasil pemetaan pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah LSM/ORMAS yang diberi penguatan, dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 ada 30 Ormas yang akan diberikan penguatan dan 1 dokumen database Ormas yang terhimpun dalam Buku Direktori Organisasi Kemasyarakatan.

Daftar Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang dan Politik Prov. Gorontalo Desember 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.194**  
Daftar Organisasi Masyarakat Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Bentuk Ormas	Jenis Ormas	Masa Berlaku Badan Hukum dan SKT			Jumlah	Ket
			Badan Hukum Aktif	SKT Aktif	Tidak Memiliki SKT		
1	Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum	- Perkumpulan - Yayasan	66 15	-	-	66 15	Badan Hukum Kemenkum HAM
2	Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum	- Perkumpulan - Yayasan	-	49 -	-	49 -	SKT Ditjen Polpum Kemendagri
<b>Jumlah</b>			<b>81</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	

Berdasarkan data diatas jumlah Ormas yang terdaftar 130 sedangkan yang memiliki SKT aktif 49 dan memiliki Badan Hukum Aktif 81. Untuk yang diberi penguatan hanya



ormas yang aktif sesuai dalam target 20 Ormas dan realisasi 30 Ormas diberi penguatan.

Selain itu terdapat penyaluran dana hibah kepada organisasi massa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2022 sesuai :

- Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 151/31IV/2022 tentang penerima hibah dalam bentuk uang kepada Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022.
- Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 352/31XII/2022 tentang penerima hibah dalam bentuk uang kepada Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022.

#### 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Outcome dari program adalah Persentase Capaian Penguatan Ketahanan Ekonomi. Berdasar hasil pemetaan pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

##### a. Pelaksanaan Program

#### 4) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah dokumen laporan yakni 12 dokumen laporan perkembangan stabilitas dan ketersediaan sembako setiap bulan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Output Sub Kegiatan : peserta kegiatan dalam rangka membahas pencegahan penyakit masyarakat tentang peredaran miras di Provinsi Gorontalo. Sebagaimana tertuang dalam



perjanjian kinerja yakni 20 Peserta kegiatan dan terealisasi 50 peserta.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Output Sub Kegiatan : jumlah peserta sosialisai yakni 40 orang dalam rangka dialog dan evaluasi rencana aksi Nasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dengan Pemateri dari Badan Narkotika Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Daerah Gorontalo melalui media lainnya, terealisasi 70 orang yang diberikan penguatan ini.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan :**

- Terdapat keinginan masyarakat untuk bertatap muka dengan Penjabat Gubernur Gorontalo dalam rangka membahas Pembangunan Gorontalo.
- Dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

#### **Solusi :**

- Setiap perangkat daerah dapat mengagendakan kegiatan tatap muka Penjabat Gubernur Gorontalo dengan masyarakat terkait pelaksanaan program pemerintah.
- Pemerintah wajib menyediakan dukungan anggaran dalam rangka pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.



**4) Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2022**

**Tabel 3.195**

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2022  
Sesuai Renstra dan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan pemahaman wasbang, ideologi dan pembauran kebangsaan	95%	95%	95%	96.66%
2	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilukada	83%	86.48%	83%	86.48%
3	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
4	Skor rencana aksi penanganan konflik sosial	90	-	90	48
5	Meningkatnya peran LSM dan Ormas	60	61	60%	82%

**5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Data indeks demokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 77,01 persen.

**Tabel 3.196**

Nilai Indeks Demokrasi Indonesia

No	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Capaian IDI Gorontalo tahun 2021 (77,01) dengan kategori Sedang. Adapun 3 aspek penilaian indikator demokrasi. 1. Aspek kebebasan 81,57 2. Aspek kesetaraan 81,46 3. Aspek kapasitas lembaga demokrasi 67,18	Belum dirilis oleh BPS

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai indeks demokrasi adalah memberikan penguatan dan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih pemula serta peran perempuan dalam politik.



**C TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN SEBELUMNYA**

Sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4/DPRD/IV/2022 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2021, terdapat beberapa catatan Rekomendasi yang perlu menjadi input yang strategis dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 3.197**

Rekomendasi dan Tindak lanjut DPRD terhadap LKPJ Tahun sebelumnya

NO	URAIAN REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Sektor Pendidikan	
	Perlunya akses yang lebih merata pada Pendidikan yang berkualitas untuk semua dan komitmen dalam mendorong Pendidikan inklusif.	Telah dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana ke Satuan Pendidikan SMA dan SMK serta SLB baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD maupun APBD-P.
	Perlunya teknologi digital untuk pendidikan dan peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mengatasi model belajar during yang bagi sebagian masyarakat cukup memberatkan.	Telah dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) diantaranya pengadaan komputer di SMAN 3 Wonosari Kabupaten Boalemo.
	Perlunya gotong royong lintas sektor untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan dengan melibatkan peran orang tua dan swasta.	Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sehingga siswa atau peserta didik dapat menggunakan alat fasilitas teknologi yang baik sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta melaksanakan rapat rutin antara pihak sekolah dan orang tua serta melibatkan lintas sektor dengan



		mengedepankan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
	Menciptakan kompetensi Pendidikan yang berkualitas dan relevan untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing yang siap menghadapi tantangan dimasa depan sehingga pansus mendorong pengadaan dan pemetaan guru terutama guru produktif di sekolah kejuruan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap mengakomodir kegiatan penyediaan guru dan tenaga kependidikan dalam hal ini tenaga penunjang kegiatan berkualifikasi S1 kejuruan untuk memenuhi kebutuhan guru produktif pada RKA tahun 2022.</li> <li>- Membangun aplikasi elektronik guru dan tenag kependidikan yang dintaranya memuat data analisis kebutuhan guru produktif di SMK se provinsi Gorontalo pada tahun 2022.</li> <li>- Penyediaan guru tamu untuk melatih para guru produktif, Teknik permesinan pada tahun 2022.</li> </ul>
2.	Pansus merekomendasikan kepada OPD terkait untuk melakukan evaluasi model dan persyaratan penerima beasiswa pendidikan yang saat ini dinilai publik cenderung eksklusif pada 3 (tiga) jurusan ( Kedokteran, Teknik dan Ekonomi).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa petunjuk teknis tentang beasiswa telah di atur dalam SK Gubernur yang dalam juknis tersebut tetap ada cantolan untuk mengakomodir penerima beasiswa umum (semua jurusan) jika anggaran mencukupi.</li> <li>- Di tahun anggaran 2022 penerima beasiswa khusus (tiga jurusan) dan beasiswa umum (semua jurusan) telah diakomodir oleh Biro Pemerintahan dan Kesra sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SK juknis Beasiswa tersebut.</li> <li>- Sebagai tindak lanjut, bulan Desember 2022 Biro Pemkesra telah melakukan perubahan juknis Beasiswa sehingga tidak ada lagi anggapan publik terhadap diskriminasi program studi atau fakultas tertentu.</li> </ul>



<p>3.</p>	<p>Secara objektif terlihat ada beberapa indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan angka pencapaian positif, namun Pansus mencermati masih perlunya upaya perbaikan substansi dan kualitas sehingga peningkatan capaian makro ekonomi juga relevan dan paralel dengan mikro masyarakat.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Gorontalo fokus pada upaya pemulihan ekonomi dengan mendorong peningkatan produktifitas pertanian seperti bantuan bibit, benih, penyaluran pupuk, perbaikan irigasi. Disektor perikanan melalui pemberian bantuan motor coolbox, kapal 3 GT dan lain-lain. Peningkatan kapasitas dan kualitas produk UMKM melalui bantuan UEP dan lainnya yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi mikro masyarakat.</p>
<p>4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pansus juga mendorong perbaikan mekanisme rujukan BPJS yang masih kurang maksimal dalam pelayanannya dan masih kompleks.</li> <li>- Pansus mencermati anggaran dinas kesehatan yang tidak terealisasi, khususnya pada penanganan keluhan JKN (jaminan kesehatan nasional) yang realisasinya belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi masukan dan perhatian melalui koordinasi antara pihak BPJS dan Rumah Sakit dalam peningkatan layanan rujukan BPJS.</li> <li>- Pembayaran Premi utk Iuran, Bantuan Iuran Peserta PBPUPemda Prov ( Jamkesta) dan kontribusi iuran Peserta PBI APBN mengacu pada data rekonsiliasi yg di lakukan setiap bulannya dan dinamis yang mana terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang. Mutasi kurang di sebabkan oleh perpindahan peserta yg tadinya di biyai oleh APBD beralih ke APBN berdasarkan DTKS, ada juga yg hasil perbaikan (verivali)data, sehingga bantuan iuran yang dibayarkan berkurang, demikian pula halnya dengan dana perawatan Rumah sakit / dana talangan yg di bayarkan real berdasarkan klaim dari Rumah sakit milik pemda.</li> <li>- Tahun 2022 Realisasi Kegiatan Jaminan Kesehatan terrealisasi 97,46 persen,</li> </ul>





		dengan jumlah layanan sebanyak 89.200 orang.
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk RS. Ainun Habibie pansus mencermati dengan meningkatnya ocupasi BOR (Bed Occupation Rate) di RS. Ainun Habibie menjadi acuan.</li> <li>- Pansus juga merekomendasikan agar pengembangan dan Peningkatan layanan RS Ainun Habibie terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memberikan akses layanan kesehatan yang unggul dan terdepan bagi warga gorontalo. Oleh karena itu RS Ainun harus membangun branding sebagai Rumah Sakit yang memiliki konsentrasi layanan khusus seperti mata, jantung, ginjal, cancer atau lainnya. Sehingga konsep pengembangan gedung, penyiapan alkes dan tenaga kesehatan menjadi sesuai dan searah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pelayanan adalah dengan menggunakan sebagian ruangan yang menjadi bagian dari master plan yang eksisting saat ini difungsikan sebagai Gedung Rawat INAP.</li> <li>- RSUD dr. Hasri Ainun Habibie saat ini berupaya mengembangkan layanan kesehatan khususnya untuk Layanan Mata, Layanan Hemodialisa dan Layanan Kemoterapi. Selain sebagai rumah sakit pusat rujukan provinsi, RSUD dr Hasri Ainun Habibie telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Bidang Kedokteran dan menjadikan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sebagai Rumah Sakit Satellite Pendidikan.</li> </ul>
6.	Pansus merekomendasikan kepada pemerintah provinsi Gorontalo agar pembangunan GORR dapat di dorong melalui APBN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal pembangunan GORR segmen 3 Telah dibahas dan Usulkan dalam beberapa Forum Perencanaan Pusat dan daerah, untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan GORR Segment Senilai Rp. 398,1 Milyar serta telah ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Gorontalo Ke Menteri PUPR dengan Nomor 900/PUPR-SEK/3471/VI/2022, Pada tanggal 29 Juni 2022 terkait permohonan Anggaran.</li> </ul>



		- Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini sedang mencari alternatif terkait pemenuhan Anggaran
9.	<p>Terkait dengan prioritas pembangunan di bidang keagamaan khususnya Islamic Center sebagai Icon Gorontalo yakni Serambi Madinah yang belum terpenuhi realisasi pembebasan lahan yang telah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sebesar Rp. 15.000.000.000., (15 Milyar) karena tidak mencukupi, Pansus mendorong pembangunannya yang berpusat di Kota Gorontalo, melalui dinas terkait untuk dapat mengalokasikan kembali pembayaran pembebasan lahan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan. Pansus juga mendorong alternatif perlunya kerjasama dengan Kabupaten Gorontalo atau Kota Gorontalo yang akan menyiapkan lahan, Pemerintah Provinsi adalah pembangunan fisiknya dengan Catatan Tanah menjadi Hibah untuk kejelasan Aset</p>	<p>Mengidentifikasi/memastikan bahwa lokasi rencana pembangunan Islamic center tidak bermasalah dari segi administrasi (Alas Hak), selain itu proses pembebasan lahan akan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah dilaksanakan juga Lokakarya terkait Pembangunan Islamic Center Provinsi Gorontalo.</p>
10.	<p>Perlu dievaluasi dalam mekanisme penentuan target penerima bantuan sosial serta perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima manfaat</p>	<p>Untuk pelaksanaan Bansos BLP3G Tahun 2022 telah dilakukan monev pada penerima manfaat, sehingga pada pelaksanaannya dalam menentukan target penerima dikhususkan bagi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Tahun 2021 tidak diterimakan lagi, dengan ini maka output dan outcome dari pemerintah dirasakan oleh KPM penerima bantuan.</p> <p>Dalam pelaksanaan program bantuan sosial UEP telah dilaksanakan mekanisme penentuan KPM berdasarkan persyaratan dan kriteria yang sudah ditetapkan dan telah</p>



		<p>dilakukan monev terhadap keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga dapat dilihat pemanfaatan dan perkembangan usaha.</p>
<p>11.</p>	<p>Pansus menyadari bahwa dampak Pandemi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan tetapi juga ekonomi dan social, oleh karena itu ada hal-hal yang perlu di perhatikan dan di evaluasi seperti model bantuannya yang hanya fokus dalam bentuk sembako, disini lain peran pilar sosial yang harusnya berperan dalam perumusan, penanganan dan pendistribusian menjadi hilang karena hanya dilakukan parsial tanpa melibatkan para pilar sosial, antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Karang Taruna (KT), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Gorontalo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model bantuan sembako memang menjadi fokus Pemprov dimasa Pandemi antara tahun 2020 s/d 2023, perbaikan kedepan akan dirumuskan beserta pilar sosial model bantuan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat lainnya</li> <li>- Pilar-Pilar Sosial yang terkesan tidak dilibatkan pada masa pandemi dan penyaluran bantuan karena kebijakan Kementerian Sosial yang mencabut atau meniadakan anggaran dekonsentrasi untuk pembinaan dan pengembangan pilar-pilar sosial antara lain : Temu Koordinasi TKSK, Pembinaan PSM, Pembinaan TAGANA, dan lain-lain yang dicabut alokasinya pada tahun 2020.</li> <li>- Sementara alokasi APBD sangat terbatas dalam hal penganggaran untuk pilar-pilar sosial, meskipun demikian TKSK, PSM, TAGANA dan lain-lain tetap melaksanakan tugas ditingkat desa/kelurahan, kecamatan, kab/kota dan wilayah bencana</li> <li>- Untuk mengoptimalkan peran TKSK, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi melalui kegiatan Tali Asih dan kegiatan Rapat Koordinasi tahun 2022</li> </ul>



		yang diharapkan dapat menunjang peran TKSK di Provinsi Gorontalo.
12.	Data penerima bantuan agar transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas terkait	<p>Untuk Pelaksanaan program/kegiatan mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan petunjuk teknis bahwa pemberian bantuan terhadap KUKM melalui proses identifikasi dan verifikasi terhadap KUKM calon penerima.</li> <li>b. KUKM calon penerima sebelum diverifikasi dan divalidasi harus diusulkan oleh tim identifikasi verifikator kab/kota (Dinas Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memvalidasi data usulan yang telah diidentifikasi dan verifikasi oleh tim Kabupaten/Kota.</li> <li>c. Calon penerima dapat ditetapkan setahun sebelum penyaluran bantuan</li> </ol> <p>Pada mekanisme diatas terlihat adanya koordinasi dan pemilahan tugas antara lain untuk Identifikasi verifikasi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan validasi data dilakukan oleh Pemerintah Provinsi</p>
13.	Pemerintah Provinsi Gorontalo harus segera membangun sarana prasarana Panti Jompo yang baru karena gedung sebelumnya akan digunakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.	Pengadaan lahan untuk pembangunan panti jompo telah dilaksanakan pada tahun 2022.
14.	Memperbaiki mekanisme pengadaan tanah pemerintah, agar kejadian-kejadian lepasnya tanah yg telah dibayar tidak terulang lagi.	Untuk Pengadaan tanah telah menggunakan mekanisme Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 berdasarkan tahapan Pengadaan tanah dan Pelaksanaan



		Pembayaran tanah mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
15.	Pansus mencermati tahun 2021 terjadi peningkatan status Desa di provinsi Gorontalo, Kondisi ini tidak berbanding lurus dengan intervensi APBD Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan dan dukungan anggaran pemerintahan di tingkat desa.	Menjadi perhatian bersama dalam prioritas penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan.
16.	Pemerintah Provinsi Gorontalo harus berkoodinasi lagi dengan dinas perhubungan untuk pemberantasan parkir liar yang menyebabkan kemacetan.	Sesuai Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Masalah parkir liar merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten/Kota, namun untuk jalan yang berstatus jalan Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun jalan Nasional tidak bisa dijadikan lahan parkir. Untuk mencegah terjadinya parkir liar yang menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas yang berada di jalan Provinsi maka Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar bersama sama menindak lanjuti masalah parkir liar yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas
17	Meningkatkan konsumsi masyarakat dalam hal ini sangat terkait dengan daya beli masyarakat secara permanen. Maka dari itu pemerintah provinsi harus cepat menyelesaikan proyek yang padat karya agar berdampak pada pendapatan dan daya beli masyarakat.	Menjadi perhatian pada pelaksanaan pembangunan tahun 2023, selain itu untuk menjaga daya beli masyarakat telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga agar inflasi tetap terkendali.



<p>18</p>	<p>Peningkatan aktivitas dunia usaha, dengan mendorong kemudahan angsuran pinjaman pada kelompok koperasi dan UMKM, yang selama ini memiliki ketahanan ekonomi saat krisis ekonomi terjadi bahkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga memberikan kontribusi pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Keuangan melalui perbankan telah memberikan kemudahan kepada nasabah maupun KUKM yang memperoleh fasilitas kredit agar dapat dilakukan restrukturisasi usaha</li> <li>b. Pemberian kemudahan bagi KUKM yang mengalami dampak covid atas kegiatan usahanya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan investasi di daerah sehingga KUKM dapat dibantu akses permodalannya melalui bantuan hibah maupun kemudahan restrukturisasi pinjaman tersebut.</li> <li>c. Untuk mendorong kemudahan angsuran pinjaman pada koperasi dan UMKM (KUKM) ini, telah tersedia skim kredit yang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada KUKM sebagai upaya dukungan dan peran pemerintah dalam menyalurkan kredit kepada KUKM. Skim Kredit yang diberikan dengan bunga sangat ringan bagi UMKM antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Ultra Mikro (UMi) dengan bank pelaksana seperti Bank SULUT, BRI, BNI. SKIM kredit yang sangat familiar dimasyarakat adalah Kredit Usaha rakyat yang diberikan khusus bagi UMKM dengan kategori usaha yang layak namun tidak mempunyai agunan</li> </ul>
-----------	--	---



		yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. Begitupun dengan UMi diberikan kepada pelaku usaha ultra mikro.
19.	Pansus mencermati upaya pemerintah dalam penanganan dampak covid-19 baik dari aspek pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, melalui kebijakan pemberdayaan UMKM dan bantuan Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah kepada 2270 UMKM terdampak pandemi dan Pansus memberikan catatan dan rekomendasi untuk pemerintah memberikan alokasi anggaran lebih besar pada program dan kegiatan ini karena indikator capaiannya memiliki daya ungkit untuk menurunkan prosentase angka kemiskinan.	Dinas telah melakukan upaya dalam bentuk pemberian stimulan bantuan kepada KUKM untuk memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan investasi di daerah bagi KUKM. Oleh sebab itu pemberian anggaran tambahan bagi stimulan KUKM di Gorontalo sangat diharapkan dan sangat dibutuhkan oleh KUKM yang belum terintervensi oleh program tersebut
20.	Pansus juga mendorong upaya lainnya melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM berbasis Digital lewat aplikasi bela pengadaan serta mendorong pemulihan ekonomi daerah.	Beberapa upaya Dinas Kumperindag untuk mendorong UMKM agar bisa masuk platform digital antara lain mendorong sertifikasi UMKM agar bisa masuk E-Katalog LKPP, kemudian mendorong untuk UMKM melengkapi sertifikasinya agar bisa menjadi penyedia di instansi-instansi Pemerintah melalui M-Biz, Grabfood dan bisa masuk pada marketplace nasional sehingga produknya bisa dikenal di nasional.  Berdasarkan data dari ULP untuk progres UMKM yang telah memanfaatkan aplikasi Bela pengadaan hingga Bulan Desember 2022 sebanyak 158 UKM, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 13.101.996.648 dan jumlah transaksi UMK sebanyak 7.724 transaksi.



21	Pansus meminta Pemerintah Provinsi melalui Dinas perdagangan sesuai dengan kewenangan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat mengatasi apa yang terjadi di lapangan terkait pasar dadakan.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana untuk pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan yaitu penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota begitupun untuk izin lokasi pemanfaatan lahan, izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan dari Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi tidak bisa mengintervensi atau melampaui kewenangan tersebut. Adapun untuk pembinaannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap masyarakat KUKM secara umum dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama dengan Kabupaten/Kota.
22.	Pansus mencatat dan merekomendasikan agar perencanaan dan penganggaran pada sektor Infrastruktur agar tidak menyebabkan kawasan rawan bencana menjadi terbiar dan tidak prioritas	Menjadi perhatian dalam peningkatan pengendalian pengawasan pembangunan agar sesuai dengan pemanfaatan dan penataan ruang sesuai dengan RTRW.





## **BAB IV**

### **CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

#### **4.1 Dasar Hukum**

Tahun 2022, Pemerintah Provinsi mendapatkan tugas PembantuAN dari Pemerintah Pusat, yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2022 di Provinsi Gorontalo didasarkan pada beberapa peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



## 4.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Sebagaimana DIPA tahun anggaran 2021, terdapat 4 (empat) Kementerian/Lembaga pemberi tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dan dilaksanakan oleh instansi daerah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

Tugas Pembantuan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Kementerian/Lembaga	Instansi Daerah / Pelaksana	Anggaran	Realisasi	%
1.	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	41.544.428.000	39.839.761.171	95,897
2	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI	Dinas Penanaman Modal ESDM Tranmigrasi	1.891.536.000	1.891.007.499	99,97
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.017.000.000	3.017.517.020	99,99
4.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.551.710.000	12.550.521.228	99,99
<b>Total</b>			<b>59.004.674.000</b>	<b>56.309.306.347</b>	<b>95,43</b>

### 1. Urusan Pertanian (Dinas Pertanian)

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Tahun 2022, yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Ditjen Tanaman Pangan (TP-03), Ditjen Hortikultura (TP-04), Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (TP-08), Ditjen Perkebunan (TP 05) dan Ditjen Peternakan (TP-06) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.544.428.000,00, sesuai SP DIPA sebagai berikut :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA -018.03.4.319088/2022
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA -018.04.4.319089/2022
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA -018.08.4.319094/2022
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA -018.05.4.319090/2022
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA -018.06.4.319091/2022



- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA -018.06.4.319095/2022

**A. Program Kegiatan dan Pelaksanaan**

**Tabel 4.2**  
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantu  
Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo  
Tahun 2022

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Realisasi Tahun 2022	
			Keuangan	%
<b>1</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP-319088)</b>	<b>6,602,420,000</b>	<b>6,582,227,688</b>	<b>99.69</b>
	Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	6,602,420,000	6,582,227,688	99.69
<b>2</b>	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP-319088)</b>	<b>3,179,310,000</b>	<b>3,170,510,950</b>	<b>99.72</b>
	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/ia Tanaman Pangan	823,310,000	817,705,700	99.32
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	2,356,000,000	2,352,805,250	99.86
<b>3</b>	<b>Program Dukungan Manajemen (TP-319088)</b>	<b>575,517,000</b>	<b>573,116,200</b>	<b>99.58</b>
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	575,517,000	573,116,200	99.58
<b>4</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP 319089)</b>	<b>1,201,312,000</b>	<b>1,200,082,000</b>	<b>99.90</b>
	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1,201,312,000	1,200,082,000	99.90
<b>5</b>	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (319089)</b>	<b>2,940,000,000</b>	<b>2,931,630,000</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	2,700,000,000	2,692,830,000	99.73
	Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	240,000,000	238,800,000	99.50
<b>6</b>	<b>Program Dukungan Manajemen (319089)</b>	<b>51,700,000</b>	<b>51,600,000</b>	<b>99.81</b>
	Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manaj dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	51,700,000	51,600,000	99.81
<b>6</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri ( 319091)</b>	<b>355,000,000</b>	<b>329,876,000</b>	<b>92.92</b>
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	355,000,000	329,876,000	92.92



No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Realisasi Tahun 2022	
			Keuangan	%
<b>7</b>	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP-319091)</b>	<b>10,582,388,000</b>	<b>9,218,727,123</b>	<b>87.11</b>
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	7,933,336,000	6,577,697,423	82.91
	Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Pebibkkatan Produksi Ternak	2,448,752,000	2,447,762,500	99.96
	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	140,300,000	133,267,200	94.99
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	60,000,000	60,000,000	100
<b>8</b>	<b>Program Dukungan Manajemen (TP-319091)</b>	<b>417,860,000</b>	<b>411,360,000</b>	<b>98.44</b>
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	417,860,000	411,360,000	98.44
<b>9</b>	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP-319094)</b>	<b>9,756,618,000</b>	<b>9,498,950,010</b>	<b>97.36</b>
	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	7,876,110,000	7,630,100,700	96.88
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	195,000,000	194,650,000	99.82
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	1,629,440,000	1,618,131,310	99.31
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	56,068,000	56,068,000	100
<b>10</b>	<b>Program Dukungan Manajemen (TP - 319094)</b>	<b>1,108,100,000</b>	<b>1,098,974,000</b>	<b>99.18</b>
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1,108,100,000	1,098,974,000	99.18
<b>11</b>	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP-319095)</b>	<b>285,000,000</b>	<b>284,850,000</b>	<b>99.95</b>
	pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	240,000,000	240,000,000	100
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	45,000,000	44,850,000	99.67



No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	Realisasi Tahun 2022	
			Keuangan	%
<b>12</b>	<b>Program Dukungan Manajemen (TP-319095)</b>	<b>284,000,000</b>	<b>284,000,000</b>	<b>100</b>
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	284,000,000	284,000,000	100
<b>13</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industr (TP-319090)</b>	<b>3,926,803,000</b>	<b>3,925,457,200</b>	<b>99.97</b>
	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	888,010,000	887,960,000	99.99
	Penguatan Perlindungan Perkebunan	103,450,000	103,450,000	100
	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	541,000,000	541,000,000	100
	Pasca Panen, Pengolahan(Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1,684,420,000	1,684,217,000	99.99
	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	709,923,000	708,830,200	99.85
<b>14</b>	<b>Program Dukungan Manajemen (TP- 319090)</b>	<b>278,400,000</b>	<b>278,400,000</b>	<b>100</b>
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	278,400,000	278,400,000	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>41,544,428,000</b>	<b>39,839,761,171</b>	<b>95.90</b>

### 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP-319088)

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP-03) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.602.420.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.582.227.688 atau 99.69 %.

**Outcome** dari program ini adalah Ketersediaan produk tanaman pangan yang memiliki daya saing baik dipasar domestic maupun pasar ekspor

#### a. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.602.420.000,- terealisasi Rp. 6.582.227.688,- atau 99.69 %.

Output kegiatan ini adalah pengadaan alat pasca panen sebanyak 159 Unit.



## **2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP-319088)**

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,179,310,000,- telah terealisasi sebesar Rp., 3,170,510,950 atau 99.72 %. Outcome program ini adalah –

### **a. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan**

Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.356.000.000 terealisasi Rp. 2,675,612,400 atau 93.81 %

Output kegiatan ini adalah Sarana pengembangan kawasan area penyaluran benih padi melalui PEN 5.100 ha dan penyaluran benih jagung 1.000 Ha

### **a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan**

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,115,460,000,- terealisasi sebesar Rp. 2.352.805.250,- atau 99.86%.

Output dari kegiatan ini adalah pengembangan Kawasan padi kaya gizi 548 Ha

## **3) Program Dukungan Manajemen (TP-319088)**

Program Dukungan Manajemen mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 575.517.000,- terealisasi sebesar Rp. 573.116.200 atau 99.58 %.

**Outcome** program ini adalah -

### **a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan**

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 575.517.000 Terealisasi Rp. 573.116.200,- atau 99.58 %.

Output dari kegiatan ini adalah Layanan Manajemen Kinerja Internal 3 layanan.

## **4) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP 319089)**

Program nilai tambah dan daya saing industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.201.312.000,- terealisasi Rp. 1.200.082.000 atau 99.90%

**Outcome** program ini adalah –



**a. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura**

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.201.312.000,- Terealisasi Rp. 1.200.082.000,- atau 99.90%

Output dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan Pembelian produk hortikultura 2 unit, rehab pasar tani 1unit, fasilitasi sarana pasca panen 2 unit,fasilitasi sarana pengolahan 2unit, fasilitasi bangsal pasca panen 2 unit, alat pengering tenaga surya 1 unit

**5) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (319089)**

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,940,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 2,931,630,000 atau 99.72 %.

**Outcome** program ini adalah -

**a. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,700,000,000,- Terealisasi Rp 2,692,830,000,- atau 99.73 %

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengembangan Kawasan Bawang Merah melalui PEN 60 ha dan pengembangan kawasan aneka cabai 190 Ha

**b. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 240,000,000,- Terealisasi Rp. 238,800,000,- atau 99.50 %  
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan Kawasan durian 40 Ha

**c. Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura**

Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 150,000,000,- Terealisasi Rp. 149,900,000,- atau 99.93 %

Output dari kegiatan ini adalah Layanan Perencanaan dan Layanan Perbendaharaan 1 (Layanan)



## **6) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri ( 319091)**

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 355,000,000,- terealisasi Rp. 329,876,000 atau 92.92%

**Outcome** program ini adalah -

### **a. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 355,000,000,- Terealisasi Rp. 329,876,000,- atau 92.92%

Output dari kegiatan ini adalah Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor 1 Lembaga, dan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 1 unit

## **7) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP-319091)**

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10,582,388,000,- terealisasi Rp. 9,218,727,123 atau 87.11%.

**Outcome** program ini adalah –

### **a. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak**

Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,000,000 Terealisasi Rp. 60,000,000 atau 100%

Output dari kegiatan ini adalah Mutu dan Kemandirian Pangan 30 Sampel

### **b. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan**

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,933,336,000,- Terealisasi Rp. 6,577,697,423,- atau 82,91%

Output Pelayanan Kesehatan Hewan (PEN) 7644 layanan

### **c. Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak**

Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,448,752,000,- Terealisasi Rp. 2,447,762,500,- atau 99.96 %

Output dari kegiatan ini adalah Ternak yang di data dan ditandai 19.500 Unit dan Optimalisasi Reproduksi (PEN) 18.000 Ekor





**d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 140,300,000,- Terealisasi Rp. 133,267,200,- atau 94.99 %  
Output dari kegiatan ini adalah Keamanan dan Mutu Produk Hewan 25 Produk

**8) Program Dukungan Manajemen (TP-319091)**

Program Dukungan Manajemen mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 417,860,000,- terealisasi Rp. 411,360,000 atau 98.44 %

**Outcome** program ini adalah -

**a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan**

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 417,860,000,- Terealisasi Rp. Rp. 411,360,000 atau 98.44 %

Output dari kegiatan ini adalah Layanan BMN 4 layanan, Layanan Hubungan Masyarakat 1 Layanan, Layanan Data dan Informasi 1 Dokumen, Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 Dokumen, Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen, Layanan Manajemen Keuangan 4 dokumen

**9) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP-319094)**

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,756,618,000,- terealisasi Rp. 9,756,618,000 atau 97.36%

**Outcome** program ini adalah -

**a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian**

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,876,110,000,- Terealisasi Rp. 7,630,100,700,- atau 96.88%

Output dari kegiatan ini adalah Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi 1 Kelompok Masyarakat

**b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian**

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 195,000,000,- Terealisasi Rp. 194,650,000,- atau 99.82 %



Output dari kegiatan ini adalah Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1 Kegiatan

**c. Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida**

Kegiatan Fasilitas Pupuk dan pestisida mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,629,440,000,- Terealisasi Rp. 1,618,131,310,- atau 99.31%.

Output dari kegiatan ini e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi 80.138 Orang dan Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi 1 layanan

**d. Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian**

Kegiatan Fasilitas Pembiayaan pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 56,068,000,- Terealisasi Rp. 56,068,000,- atau 100%

Output dari kegiatan ini adalah Asuransi Pertanian 1 unit

**10) Program Dukungan Manajemen (TP - 319094)**

Program Dukungan Manajemen Mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,108,100,000,- terealisasi Rp. 1,098,974,000 atau 99.18 %.

**Outcome** program ini adalah -

**a. Kegiatan** dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,108,100,000,- Terealisasi Rp. 1,098,974,000,- atau 99.18 %

Output dari kegiatan ini adalah Layanan dukungan manajemen Internal 1 layanan

**11) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP-319095)**

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 285,000,000,- terealisasi Rp. 284,850,000 atau 99.95%.

**Outcome** program ini adalah -

**a. Kegiatan pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian**

Kegiatan pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. . 240,000,000,- Terealisasi Rp 240,000,000,- atau 100%

Output dari kegiatan ini adalah Embung Pertanian (PEN) 2 unit

**b. Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian**

Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. . 45,000,000,- Terealisasi Rp 44,850,000,- atau 99.67%

Output dari kegiatan ini adalah Asuransi Usaha Ternak 1 Unit



## **12) Program Dukungan Manajemen (TP-319095)**

Program Dukungan Manajemen mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 284,000,000,- terealisasi Rp. . 284,000,000 atau 100%

**Outcome** program ini adalah -

### **a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian**

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. . 284,000,000,- Terealisasi Rp. 283,846,700,- atau 99.95%

**Output** dari kegiatan ini adalah layanan perencanaan penganggaran internal 1 layanan

## **13) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP- 319090)**

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,926,803,000,- terealisasi Rp. 3,925,457,200 atau 99.97 %

**Outcome** program ini adalah -

### **a. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar**

Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. . 888,010,000,- Terealisasi Rp. 887,960,000,- atau 99.99 %

Output dari kegiatan ini adalah Perluasan tanaman kelapa 200Ha

### **b. Penguatan Perlindungan Perkebunan**

Penguatan Perlindungan Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. . 103,450,000,- Terealisasi Rp. 103,450,000,- atau 100.00%

Output dari kegiatan ini adalah Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 50 Ha

### **c. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah**

Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. . 541,000,000,- Terealisasi Rp. 541,000,000,- atau 100.00 %

Output dari kegiatan ini adalah Perluasan Tanaman Pala 200Ha



**d. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Pasca Panen, Pengolahan(Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,684,420,000,- Terealisasi Rp. 1,684,217,000,- atau 99.99 %

Output dari kegiatan ini adalah Pengembangan pelayanan informasi pasar komoditas tanaman perkebunan 1 kegiatan

**e. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan**

Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 709,923,000,- Terealisasi Rp. 708,830,200,- atau 99.85 %

Output dari kegiatan ini adalah Rekomendasi benih tanaman perkebunan 3 rekomendasi

**14) Program Dukungan Manajemen (TP- 319090)**

Program Dukungan Manajemen mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 278,400,000,- terealisasi Rp. 278,400,000 atau 100.00%

Outcome program ini adalah -

**a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan**

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 278,400,000,- Terealisasi Rp. 278,400,000,- atau 100.00 %

Output dari kegiatan ini adalah Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 (layanan).

**B. Permasalahan dan Solusi (Diuraikan)**

**Permasalahan**

1. Petani yang sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah.
2. Pedum dan Juknis terlambat yang sering berubah-ubah sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Beralihnya fungsi lahan pertanian produkti
4. Sebagian besar petani Belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan
5. Ketersediaan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya optimal
6. Kurangnya Penguatan kelembagaan petani/peternak



7. Kurangnya Penguatan pembibitan sapi

**Solusi**

1. Memberikan pemuatan dan pemahaman dengan langkah-langkah yang strategis kepada petani untuk menjadi petani mandiri .
2. Melaksanakan pendampingan, pengawalan serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan dilapangan
3. Melakukan peningkatan kapasitas petugas pertanian melalui pelatihan teknis dan fungsional
4. Terus mengedukasi petani dalam hal pemanfaatan teknologi budidaya pertanian yang maju dan efisien
5. Terus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian dalam peningkatan produksi dan produktivitas
6. Penguatan dan Pengembangan kelembagaan petani/peternak
7. Meningkatkan kapasitas petani /peternak melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan.

**2. Urusan Ketransmigrasian (Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi)**

Alokasi Tugas Pembantuan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI dalam pelaksanaan urusan Transmigrasi di Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 1.891.536.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.891.007.499,00 atau terrealisasi sebesar 99,97 %.

**A. Program Kegiatan dan Pelaksanaan**

**Tabel 4.3**

Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	(%)
<b>1.</b>	<b>Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>1.891.536.000</b>	<b>1.891.007.499</b>	<b>99,97</b>
	- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.756.708.000	1.756.179.899	99.97
	- Kegiatan Dukungan Manajemen Ess I Dirjen PPKTrans	134.828.000	134.827.600	99.99



Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.891.536.000, telah terealisasi sebesar Rp. 1.891.007.499 atau 99,97%, dengan outcome program adalah Terselenggaranya Program Penempatan Transmigrasi sebanyak 11 (Sebelas) KK di 1 lokasi permukiman Kimtrans Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.

a) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.756.708.000, telah terealisasi sebesar Rp. 1.756.179.899 atau 99.97%

output kegiatan meliputi :

1. Terbentuknya Kelompok Tani di Kimtrans Motihelumo
2. Bantuan Bibit Durian di Kimtrans Motihelumo
3. Bantuan hewan ternak untuk Kelompok Ternak di Lokasi Kimtrans Motihelumo berupa :
  - Sapi
  - Kambing
  - Ayam
  - Ikan Nila
4. Bantuan Penunjang Pegelola Pertanian berupa Mesin Pemipil Jagung
5. Bantuan Penunjang Wirausaha berupa sarana dan prasarana pembuatan dan pengolahan keripik.
6. Terpenuhinya insentif para pengelola pemukiman di 6 (enam) lokasi binaan transmigrasi dengan rincian lokasi sebagai berikut :
  - a. Kimtrans Sandalan Kec. Taluditi Kab. Pohuwato
  - b. Kimtrans Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara

dengan uraian tugas :

  - Pengelola UPT dan Pembantu Pengelola : 2 orang (Rp. 700.000/orang/bulan)
  - Guru SD : 3 orang (Rp. 500.000/orang/bulan)
  - Dokter : 1 orang (Rp. 400.000/orang/bulan)
  - Perawat : 2 orang (Rp. 300.000/orang/bulan)
  - Rohaniawan : 2 orang (Rp. 300.000/orang/bulan)
  - Penjaga Sekolah : 1 orang (Rp. 250.000/orang/bulan)
  - Keamanan UPT : 1 orang (Rp. 250.000/orang/bulan)



7. Terpenuhinya kebutuhan dalam bidang kesehatan dalam bentuk bantuan obat-obatan dan vitamin serta kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu.
8. Terpenuhinya kebutuhan sandang, papan serta penerangan bagi warga transmigrasi baru tahun 2022 di Lokasi Kimtrans Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara sebanyak 11 KK.
9. Terpenuhinya Lahan Usaha II (LU II) untuk warga transmigrasi baru tahun 2022 di Lokasi Kimtrans Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara sebanyak 9 KK dengan rincian : Lahan Usaha II sebanyak 11 Bidang Luasan 0,9 Ha

b) Kegiatan Dukungan Manajemen Ess I Dirjen PPKTrans

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 134.828.000, telah terealisasi sebesar Rp. 134.827.600 atau 99,99%.

Output kegiatan ini adalah :

- Kebutuhan operasional untuk penunjang kegiatan PPKTrans dapat terpenuhi semua.
- Terlaksananya kegiatan monitoring, pengendalian dan pelaporan kegiatan pendistribusian terhadap pengadaan barang dan jasa untuk warga transmigrasi baik binaan maupun warga transmigrasi yang baru ditempatkan.

### **B. Permasalahan dan Solusi**

Secara Teknis Pelaksanaan tidak mendapati permasalahan

### **3. Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan)**

Tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan adalah penugasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang kelautan dan perikanan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dana tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan adalah dana yang berasal dari anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Adapun dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022 adalah:



- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor B.24324/DJPT/KU.110.S2/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan.
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (03) TA. 2022 Nomor SP DIPA- 032.03.4.319098/2022 tanggal tanggal 21 Desember 2021;

#### **A. Program Kegiatan dan Pelaksanaan**

Pada Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar **Rp. 3.017.700.000,-** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar 99,99%. Alokasi ini yang diperuntukan untuk pelaksanaan 2 program dan kegiatan yaitu 1) Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dengan indikator kinerja berupa bantuan peralatan sarana Kapal Perikanan berukuran 5 GT sebanyak 6 unit dan 2) Program Dukungan Layanan Manajemen dengan kegiatan layanan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan tangkap dengan indikator kinerja 1 layanan perkantoran selama 6 bulan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.4**

Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan  
Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	(%)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.000.000.000	2.999.817.020	<b>99,99</b>
	- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	3.000.000.000	2.999.817.020	<b>99,99</b>
2	Program Dukungan Layanan	17.700.000	17.700.000	100





No	Program/Kegiatan	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	(%)
	Manajemen			
	- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.700.000	17.700.000	100
	<b>Total</b>	<b>3.017.700.000</b>	<b>3.017.517.020</b>	<b>99,99</b>

Output program dan kegiatan dari pelaksanaan tugas pembantuan Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**1. Program pengelolaan perikanan dan kelautan**

**a. Kegiatan :** Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan

Output kegiatan ini adalah Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berupa Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan, mesin penggerak utama, sertifikasi BKI, pengurusan dokman dan sea trial berukuran 5 GT sebanyak 6 unit. Semua kapal perikanan ini sudah diserahkan kepada koperasi perikanan yang ada di Kabupaten/Kota, dengan rincian alokasi penerima sebagai berikut: 1) Kota Gorontalo sebanyak 3 Unit dengan koperasi penerima yaitu Koperasi Fitra Jaya Bahari Kelurahan Tenda, Koperasi Sukur Lestari Sejahtera Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi dan Koperasi Karya Putra Gorontalo Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi, 2) Kabupaten Gorontalo sebanyak 1 Unit dengan Koperasi penerima yaitu koperasi Bersama Satu Hati Desa Olimoo'o Kecamatan Batuadaa Pantai, 3) Kabupaten Boalemo sebanyak 1 Unit dengan penerima Koperasi Mina Mandiri Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta, dan 4) Kabupaten Bone Bolango sebanyak 1 unit dengan penerima Koperasi Manggung Jaya Gemilang Desa Biluango Kecamatan Kabila Bone. Total pagu anggaran pada Program ini sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)

**2. Program dukungan layanan manajemen**

**a. Kegiatan :** Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap  
Output kegiatan ini berupa Belanja Honor Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran Satker dan Staf Pengelola Satker Selama 6 Bulan sebesar **Rp. 17.700.000,-** (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).



**B. Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber pada Dana APBN Dekonsentrasi TA. 2022 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tidak mengalami permasalahan dan kendala, semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan rata-rata persentase pencapaian fisik kegiatan sebesar 100 % dan rata-rata persentase pencapaian keuangan sebesar 99,99 %.

**4. Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)**

Penugasan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 melalui Tugas Pembantuan sesuai DIPA Nomor 033.04.1.319150/2022 tahun anggaran 2022 dengan alokasi sebesar Rp. 12.551.710.000,00.

**A. Program Kegiatan dan Pelaksanaan**

Sasaran Program kegiatan yang diharapkan dari pelaksanaan Tugas Pembantuan yaitu terselenggaranya konektivitas infrastruktur Jalan Nasional melalui Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan rincian kegiatan dan output kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
Program Kegiatan SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

Program	Program Peyelenggaraan Jalan	
Sasaran Program	1. 2.	Program Infrastruktur Konektivitas Program Dukungan Manajemen
Kegiatan	1. 2.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Sasaran Kegiatan	1. 2. 3. 4.	Dukungan Teknis Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jalan) Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jembatan) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Output Kegiatan	1. 2. 3. 4.	Dukungan Teknis 1 Dokumen Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jalan) 826.999 KM Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jembatan) 550 M Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga 1 Layanan



Rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP)  
Di SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</b>	<b>12.135.202.000</b>	<b>12.134.138.180</b>	<b>99,99</b>
	➢ Dukungan Teknis	20.000.000	19.990.000	99,95
	➢ Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jalan)	9.765.593.000	9.765.244.084	100
	➢ Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jembatan)	1.933.101.000	1.932.521.048	99,97
<b>2.</b>	<b>Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga</b>	<b>416.508.000</b>	<b>416.383.048</b>	<b>99,97</b>
	➢ Layanan Umum	416.508.000	416.383.048	99,97
	<b>Total</b>	<b>12.551.710.000</b>	<b>12.550.521.228</b>	<b>99,99</b>

**B. Permasalahan dan Solusi**

Adapun permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan tugas pembantuan, antara lain :

1. Rata-rata hampir semua Output Lingkup Pekerjaan mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh di Tahun 2022 ini pihak kontraktor menangani lebih dari satu paket pekerjaan sehingga berdampak pada Fungsi Manajerial dan Peralatan yg tidak memadai
2. Kondisi cuaca tidak menentu cenderung hujan deras hal ini mengakibatkan perubahan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan.
3. Adanya penyesuaian volume pekerjaan terhadap kondisi di lapangan.
4. Adanya kecenderungan dari pihak kontraktor lebih memprioritaskan pekerjaan efektif dibandingkan dengan pekerjaan pemeliharaan rutin mengingat efek menambah nilai cash flow lebih besar bila dikerjakan diawal kontrak
5. Kurang adanya kesadaran dari penyedia jasa dalam menjaga produktifitas alat, Apabila ada alat yang mengalami kerusakan, tidak ada alat cadangan untuk meng-back-up alat yang rusak tersebut

Adapun Solusi yang dilakukan oleh SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo dalam upaya menangani masalah yang timbul selama



pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memacu, mengawal, dan monitoring pengendalian setiap proses tahapan - tahapan pelaksanaan kegiatan antara lain dengan membuat rencana jadwal percepatan
2. Mendorong Penyedia jasa untuk meningkatkan stock persediaan sesuai dengan kebutuhan proyek.
3. Menambah Jumlah Peralatan dan Tenaga Kerja (pemberlakuan 2 shif waktu kerja)
4. Mempertimbangkan kondisi cuaca terhadap trend musim yang sering terjadi dan memaksimalkan Pekerjaan disaat cuaca sedang dalam kondisi baik.
5. Mengusulkan penambahan unit pemeliharaan rutin
6. Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah desa setempat untuk pelaksanaan pekerjaan malam mengingat arus lalu lintas di lokasi ini cukup padat



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Keterangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang disusun guna memberikan gambaran atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022.

LKPJ Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2022 memuat capaian kinerja pembangunan tahunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022, dengan tema dan arah pembangunan dalam “Meneguhkan Pencapaian Masyarakat yang Maju, Unggul dan Sejahtera”, dengan unsur-unsur tema yaitu Pengembangan Infrastruktur yang adaptif terhadap Bencana, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pertanian dan Perikanan Kelautan, Penguatan UMKM dan Pariwisata, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan, dan Mendorong Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Hasil capaian kinerja pembangunan tahun 2022 yang dilihat dari pencapaian indikator kinerja makro mencapai 94,39 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Capaian kinerja yang sesuai dan melampaui target diantaranya Pertumbuhan Ekonomi tumbuh 4,04 % atau tercapai 100,27% dari target 4,01-5,92%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 69,81% melampaui target sebesar 69,62%, PDRB Perkapita sebesar 39,89 juta Rupiah atau tercapai 100%. Sementara kinerja yang belum tercapai yaitu Persentase Kemiskinan yang mengalami kenaikan 0,1% dibanding tahun sebelumnya menjadi 15,51% tahun 2022 atau hanya tercapai 96,13% dari target kemiskinan sebesar 14,91-14,33%, dan juga ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur berdasarkan indeks gini sebesar 0,423% atau masih jauh dari target sebesar 0,412-0,391.



Beberapa capaian indikator lainnya yaitu Rata-rata lama sekolah 8,02%, Prevalensi stunting 23,8 %, Pengelolaan Keuangan Daerah tercatat mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 kali, Indeks Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja memperoleh predikat B, Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar 82,51%.

Tahun 2022 realisasi Pendapatan Daerah mencapai 1,84 Trilyun Rupiah, turun -6,32 persen dibanding tahun 2021 sebesar 1,98 Trilyun Rupiah, namun tercapai target 103,59 % dari target pendapatan sebesar. Realisasi belanja OPD tahun 2022 mencapai Rp. 1,93 Trilyun, atau 91,08 persen dari Pagu sebesar 2,12 Trilyun, dengan realisasi kinerja mencapai 98,07% atau dengan Kategori Sangat Tinggi.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 merupakan pencapaian yang diraih atas sinergi kolaborasi dan harmonisasi yang terjalin antar seluruh komponen Pemerintahan Daerah baik jajaran eksekutif dan legislatif serta masyarakat pada umumnya. Pemerintah Provinsi juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat sehingga tetap kondusif sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan. Oleh karenanya melalui mekanisme penyampaian LPKJ ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengharapkan masukan, saran dan kritiknya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2022, diiringi harapan semoga ditahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan pembangunan Provinsi Gorontalo kedepan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala doa, usaha dan langkah kita dalam mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.